

RKPD
2025

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) Tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2025.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi Daerah;
   c. rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
   d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2025;
   e. arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
   f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;

g. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
h. penutup.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksanaan program pembangunan dari RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 juni 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ANDI DARMAWAN BINTANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 17

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan ..... I – 1
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I – 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I – 8
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I – 10
1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD ..... I – 11

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II – 1
2.1. Kondisi Gambaran Umum ..... II – 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II – 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan ..... II – 1
2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana ..... II – 6
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II – 11
2.1.1.4. Kondisi Demografi ..... II – 17
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 19
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II – 19
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi ..... II – 19
2.2.1.2. Laju Infalsi ..... II – 23
2.2.1.3. PDRB Perkapita ..... II – 24
2.2.1.4. Gini Ratio ..... II – 25
2.2.1.5. Indeks Wiliamson ..... II – 26
2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan ..... II – 27
2.2.1.7. Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB ..... II – 32
2.2.1.8. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB ..... II – 32
2.2.1.9. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB ..... II – 33
2.2.1.10. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB ..... II – 33
2.2.1.11. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ..... II – 34
2.2.1.12. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ..... II – 34
2.2.1.13. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap Terhadap PDRB Sektor Industri ..... II – 34
2.2.1.14. Pertumbuhan PDRB Industri ..... II – 35
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial ..... II – 35
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia ..... II – 35
2.2.2.2. Indeks Pendidikan ..... II – 42
2.2.2.3. Angka Melek Huruf ..... II – 43
2.2.2.4. Indeks Kesehatan ..... II – 45
2.2.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..... II – 46
2.2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..... II – 47
2.2.2.7. Rasio Penduduk Yang Bekerja ..... II – 49

2.2.2.8. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja ..... II – 51
2.2.2.9. Indeks Pelayanan Publik ..... II – 51
2.2.2.10. Indeks Kepuasan Masyarakat ..... II – 52
2.2.2.11. Indeks pembangunan Gender (IPG) ..... II – 52
2.2.2.12. Indeks Reformasi Birokrasi ..... II – 56
2.2.2.13. Nilai SAKIP Provinsi ..... II – 56
2.2.2.14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ..... II – 57
2.2.2.15. Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq) ..... II – 57
2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga ..... II – 58
2.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II – 59
2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Dasar ..... II – 59
2.3.1.1. Pendidikan ..... II – 59
2.3.1.2. Kesehatan ..... II – 71
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II – 75
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II – 77
2.3.1.5. Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II – 79
2.3.1.6. Sosial ..... II – 88
2.3.2. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar ..... II – 90
2.3.2.1. Ketenagakerjaan ..... II – 90
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II – 92
2.3.2.3. Pangan ..... II – 96
2.3.2.4. Pertanahan ..... II – 99
2.3.2.5. Lingkungan Hidup ..... II – 100
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II – 103
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... II – 114
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II – 118
2.3.2.9. Perhubungan ..... II – 119
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika ..... II – 121
2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... II – 122
2.3.2.12. Penanaman Modal dan Investasi ..... II – 125
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga ..... II – 128
2.3.2.14. Statistik ..... II – 129
2.3.2.15. Persandian ..... II – 130
2.3.2.16. Kebudayaan ..... II – 130
2.3.2.17. Perpustakaan ..... II – 132
2.3.2.18. Kearsipan ..... II – 133
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan ..... II – 134
2.3.3.1. Pariwisata ..... II – 134
2.3.3.2. Pertanian ..... II – 136
2.3.3.3. Peternakan ..... II – 139

2.3.3.4. Kehutanan ..... II – 147
2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II – 149
2.3.3.6. Perdagangan ..... II – 151
2.3.3.7. Perindustrian ..... II – 153
2.3.3.8. Transmigrasi ..... II – 153
2.3.3.9. Kelautan dan Perikanan ..... II – 155
2.3.4. Penunjang Urusan ..... II – 161
2.3.4.1. Sekretariat Daerah ..... II – 161
2.3.4.2. Sekretariat Dewan ..... II – 166
2.3.4.3. Perencanaan Pembangunan ..... II – 168
2.3.4.4. Keuangan ..... II – 168
2.3.4.5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ..... II – 174
2.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan ..... II – 175
2.3.4.7. Pengawasan ..... II – 176
2.3.4.8. Pengelolaan Penghubung ..... II – 177
2.3.4.9. Pemerintahan Umum ..... II – 178
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II – 179
2.4.1. Indeks Layanan Infrastruktur ..... II – 179
2.4.2. Produktivitas Total Daerah ..... II – 180
2.4.3. Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Perkapita ..... II – 181
2.4.4. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita ..... II – 181
2.4.5. Nilai Tukar Petani ..... II – 181
2.4.6. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa ..... II – 183
2.4.7. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) ..... II – 183
2.4.8. Rasio Ketergantungan ..... II – 184
2.4.9. Angka Kriminalitas ..... II – 185
2.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah ..... II – 186
2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 186
2.5.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 190
2.5.3. Capaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II – 212
2.5.4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK) .. II – 215
2.5.5. Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Suistanable Development Goals (SDGs) ..... II – 333
2.6. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2023 ..... II – 345
2.6.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2023 ..... II – 345
2.7. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Berdasarkan Urusan Tahun Berjalan ..... II – 399

2.8. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II – 405
2.8.1. Permasalahan Terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II – 405
2.8.1.1. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Belum Optimal ..... II – 405
2.8.1.2. Pembangunan Infrastruktur yang belum merata..... II – 405
2.8.1.3. Meningkatnya Ketimpangan Pengeluaran Masyarakat..... II – 406
2.8.1.4. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran.... II – 406
2.8.1.5. Meningkatnya Angka Kemiskinan ..... II – 406
2.8.1.6. Masih Kurang Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif dan Inklusif ..... II – 407
2.8.1.7. Belum Optimalnya Kemampuan Daerah Dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim..... II – 407
2.8.2. Permasalahan terkait Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah..... II – 407
2.8.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ..... II – 407
2.8.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan dasar..... II – 410
2.8.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan..... II – 413
2.8.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan ..... II – 415
2.9. Isu Strategis..... II – 416
2.9.1. Isu Strategis Global..... II – 416
2.9.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDG's) . II – 416
2.9.1.2. Ketegangan Geopolitik Global ..... II – 416
2.9.1.3. Krisis Pangan Global ..... II – 417
2.9.1.4. Perlambatan Ekonomi Global..... II – 417
2.9.2. Isu Strategis Nasional ..... II – 418
2.9.2.1. Inflasi ..... II – 418
2.9.2.2. Kemiskinan Ekstrem..... II – 419
2.9.2.3. Standar Pelayanan Minimal ..... II – 420
2.9.2.4. Bonus Demografi..... II – 421
2.9.3. Isu Strategis Daerah..... II – 422
2.9.3.1. Optimalisasi Peran Sulawesi Selatan Sebagai Gerbang Indonesia Timur ..... II – 422
2.9.3.2. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.... II – 423
2.9.3.3. Ketahanan Pangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani. ..... II – 424
2.9.3.4. Transformasi Digital ..... II – 425
2.9.3.5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif ..... II – 425
2.10. Inovasi Daerah ..... II – 426

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah ..... III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III – 1
3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah ..... III – 2
3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah ..... III – 2
3.1.1.2. Tantangan Perekomian Global ..... III – 3
3.1.1.3. Tantangan Perekomian Nasional ..... III – 4
3.1.1.4. Tantangan Perekomian Daerah ..... III – 5
3.1.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... III – 6
3.1.1.4.2. PDRB Perkapita ..... III – 7
3.1.1.4.3. Inflasi ..... III – 8
3.1.1.4.4. Tingkat Pengangguran Terbuka III – 9
3.1.1.4.5. Kemiskinan ..... III – 10
3.1.1.4.6. Gini Rasio ..... III – 10
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025 ..... III – 11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III – 13
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III – 14
3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2022-2026 ..... III – 17
3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah ..... III – 17
3.2.2.1.1. Pajak Daerah ..... III – 17
3.2.2.1.2. Retribusi Daerah ..... III – 18
3.2.2.1.3. Hasil Pengelohan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ..... III – 18
3.2.2.1.4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan ..... III – 18
3.2.2.2. Pendapatan Transfer ..... III – 18
3.2.2.3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah ... III – 18
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III – 22
3.2.3.1. Belanja Operasi ..... III – 23
3.2.3.2. Belanja Modal ..... III – 24
3.2.3.3. Belanja Tidak Terduga ..... III – 25
3.2.3.4. Belanja Trasfer ..... III – 25
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III – 28
3.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya ..... III – 31
3.2.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ..... III – 31
3.2.5.2. Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)) ..... III – 31
3.2.5.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ..... III – 38
3.2.5.4. Pembiayaan Utang Daerah ..... III – 39

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025. IV – 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV – 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV – 5
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV – 5
4.2.1.1. Tema Pembangunan Nasional pad RKP Tahun 2025 ..... IV – 5
4.2.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025.... IV – 6
4.2.1.3. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 ..... IV – 7
4.2.1.4. Agenda Pembangunan pada RKP Tahun 2025.... IV – 7
4.2.1.5. Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Wilayah pada RKP Tahun 2025 ..... IV – 8
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... IV – 11
4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025..... IV – 17
4.2.3.1. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025..... IV – 17
4.2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... IV – 19
4.3. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2025..... IV – 25
4.3.1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPD..... IV – 25
4.3.2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025..... IV – 37
4.4. Pokok – pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan..... IV – 68

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota ..... V – 1
5.1. Arahan Nasional Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan..... V – 1
5.2. Evaluasi Pencapaian Pembangunan Pada Kawasan Pembangunan ..... V – 12
5.2.1. Pembangunan Kawasan Makassar..... V – 12
5.2.2. Pembangunan Kawasan Bulukumba ..... V – 14
5.2.3. Pembangunan Kawasan Watampone..... V – 15
5.2.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya ..... V – 16
5.2.5. Pembangunan Kawasan Palopo..... V – 17
5.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawese Selatan..... V – 19
5.3.1. Kawasan Makassar ..... V – 23
5.3.2. Kawasan Bulukumba..... V – 32
5.3.3. Kawasan Watampone ..... V – 39
5.3.4. Kawasan Parepare..... V – 45
5.3.5. Kawasan Palopo..... V – 53

BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah..... VI – 1
6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2025 ..... VI – 1
6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025..... VI – 2

6.3. Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... VI – 21

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... VI – 1
7.1. Indikator Makro Pembangunan ..... VI – 1
7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VI – 5
7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... VI – 6
7.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... VI – 52
7.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ..... VI – 55

BAB VIII Penutup ..... VIII – 1
8.1. Kaidah Pelaksanaan ..... VIII – 1
8.2. Kesimpulan ..... VIII – 3

Daftar Tabel

Tabel II.1.	Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	II – 2
Tabel II.2.	Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 3
Tabel II.3.	Kondisi Topografi Provinsi Sulawesi Selatan	II – 4
Tabel II.4.	Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 7
Tabel II.5.	Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	II – 8
Tabel II.6.	Dampak Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 9
Tabel II.7.	Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-202	II – 10
Tabel II.8.	Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 16
Tabel II.9.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.....	II – 17
Tabel II.10.	Rasio Jenis Klamin Menurut Kabupaten /Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	II – 18
Tabel II.11.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023.....	II – 20
Tabel II.12.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selata, Tahun 2019 – 2023.....	II – 21
Tabel II.13.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023.....	II – 22
Tabel II.14.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023.....	II – 23
Tabel II.15.	Perbandingan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	II – 24
Tabel II.16.	Perekmbangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023	II – 25
Tabel II.17.	Indeks Wiliamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023	II – 27
Tabel II.18.	Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023	II – 27
Tabel II.19.	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2023 Wilayah Regional Sulawesi.....	II – 28
Tabel II.20.	Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2019 – 2023.....	II – 30
Tabel II.21.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023.....	II – 30
Tabel II.22.	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2019 – 2023.....	II – 31

Tabel II.23. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2019 – 2023 ..... II – 31
Tabel II.24. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2019 – 2023 ..... II – 32
Tabel II.25. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 33
Tabel II.26. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023..... II – 33
Tabel II.27. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 33
Tabel II.28. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 34
Tabel II.29. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 34
Tabel II.30. Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 35
Tabel II.31. Pertumbuhan PDRB Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 35
Tabel II.32. Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan dengan Nasional 2019-2023 ..... II – 36
Tabel II.33. IPM Sulawesi Selatan Menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2019 – 2023 ..... II – 37
Tabel II.34. IPM dan Komponen Pembentuk Provinsi Regional Sulawesi Tahun 2023..... II – 42
Tabel II.35. Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 43
Tabel II.36. Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun keatas Sulawesi Selatan dan Nasional, 2019 – 2023 ..... II – 44
Tabel II.37. Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 45
Tabel II.38. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019 – 2023..... II – 46
Tabel II.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 48
Tabel II.40. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023..... II – 51
Tabel II.41. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 52
Tabel II.42. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 52
Tabel II.43. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2019 – 2023..... II – 53
Tabel II.44. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2019 – 2023 ..... II – 56
Tabel II.45. Nilai SAKIP Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2019 – 2023 ..... II – 56

Tabel II.46. Hasil Evaluasi Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2019 – 2023 ..... II – 56
Tabel II.47. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2019 – 2023 ..... II – 57
Tabel II.48. Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq) Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2022 ..... II – 58
Tabel II.49. Perkembangan Seni Budaya dan Olah raga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021 ..... II – 58
Tabel II.50. Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II – 60
Tabel II.51. Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II – 60
Tabel II.52. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ... II – 61
Tabel II.53. Angka Anak Tidak Sekolah dan Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 63
Tabel II.54. Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II – 64
Tabel II.55. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ... II – 64
Tabel II.56. Angka Anak Tidak Sekolah dan Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 65
Tabel II.57. Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA dan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 67
Tabel II.58. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-64 Tahun Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022 ..... II – 67
Tabel II.59. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-64 Tahun Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022 ..... II – 68
Tabel II.60. Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 68
Tabel II.61. Jumlah Siswa Penyadang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 ..... II – 69
Tabel II.62. Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ... II – 69
Tabel II.63. Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 70
Tabel II.64. Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 76
Tabel II.65. Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 78

Tabel II.66. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 ..... II – 80
Tabel II.67. Data Terdampak Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..... II – 81
Tabel II.68. Capaian Kinerja Program Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 88
Tabel II.69. Capaian Kinerja Program Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 89
Tabel II.70. Capaian Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 92
Tabel II.71. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2019-2023 ..... II – 93
Tabel II.72. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 93
Tabel II.73. Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 95
Tabel II.74. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 99
Tabel II.75. Capaian Kinerja Program Urusan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 100
Tabel II.76. Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 101
Tabel II.77. Kapasitas dan Pengoperasian TPA Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ... II – 101
Tabel II.78. Kapasitas dan Pengoperasian TPA Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ... II – 103
Tabel II.79. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 112
Tabel II.80. Capaian Kineja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 113
Tabel II.81. Status Desa di Tahun 2023 ..... II – 115
Tabel II.82. Data Kegaitan Umum PKK Provinsi Sulawesi Selatan..... II – 116
Tabel II.83. Persentase Posyandu Aktif..... II – 116
Tabel II.84. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 117
Tabel II.85. Capaian Cakupan Pembinaan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan di Kampung KB, M-CPR, dan iBangga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 119
Tabel II.86. Capaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 121
Tabel II.87. Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 . II – 122
Tabel II.88. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 124

Tabel II.89. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2019–2023 ..... II – 128
Tabel II.90. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 129
Tabel II.91. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 130
Tabel II.92. Capaian Kinerja Program Urusan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 130
Tabel II.93. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 131
Tabel II.94. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 133
Tabel II.95. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 134
Tabel II.96. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 135
Tabel II.97. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 136
Tabel II.98. Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 137
Tabel II.99. Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 138
Tabel II.100. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023 ..... II – 139
Tabel II.101. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 146
Tabel II.102. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 149
Tabel II.103. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 151
Tabel II.104. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023 ..... II – 152
Tabel II.105. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustriann Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 153
Tabel II.106. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 154
Tabel II.107. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Produksi Perikanan..... II – 155
Tabel II.108. Realisasi produksi perikanan tangkap, produksi budidaya dan produksi garam tahun 2018 – 2023..... II – 156
Tabel II.109. Realisasi Perkembangan komoditi unggulan budidaya Tahun 2018 -2023..... II – 156

Tabel II.110. Daftar Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional Tahun 2023 ..... II – 159
Tabel II.111. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 .... II – 160
Tabel II.112. Segmen Batas yang Terselesaikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 161
Tabel II.113. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 166
Tabel II.114. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 167
Tabel II.115. Capaian Kinerja Program Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 168
Tabel II.116. Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 .. II – 171
Tabel II.117. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 172
Tabel II.118. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 173
Tabel II.119. IKM Pelayanan Pajak Kendaraan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 173
Tabel II.120. Persentase ASN yang menduduki jabatan Strukutural dan Fungsional..... II – 175
Tabel II.121. Capaian Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 175
Tabel II.122. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengawasan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022 ..... II – 177
Tabel II.123. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengelolaan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 II – 178
Tabel II.124. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 179
Tabel II.125. Produktifitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 180
Tabel II.126. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 181
Tabel II.127. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 181
Tabel II.128. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 182
Tabel II.129. Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 182
Tabel II.130. Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 183
Tabel II.131. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 184
Tabel II.132. Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 184
Tabel II.133. Angka Kriminalitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 185

Tabel II.134. Capaian IKU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 187
Tabel II.135. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 191
Tabel II.136. Target dan Capaian Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan (Permendagri No 59 Tahun 2021) ..... II – 212
Tabel II.137. Outcome dan Output Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 ..... II – 216
Tabel II.138. Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 318
Tabel II.139. Capaian Pembangunan Berlanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 334
Tabel II.140. Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD II – 346
Tabel II.141. Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD ..... II – 350
Tabel II.142. Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD..... II – 352
Tabel II.143. Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 356
Tabel II.144. Capaian Sub Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 361
Tabel II.145. Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... II – 363
Tabel II.146. Review Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 367
Tabel II.147. Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan PemerintahanProvinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2024 ..... II – 400
Tabel II.148. Inovasi Daerah ..... II – 426
Tabel II.149. Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2021 pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 428
Tabel II.150. Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2022 pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 430
Tabel II.151. Jumlah Inovasi Tiap OPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan tidak termasuk dalam OPD Lingkup Pemprov Sulsel, namun melaporkan inovasinya melalui admin Pemprov Sulawesi Selatan..... II – 432

Tabel III.1. Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2023 (persen)..... III – 7
Tabel III.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019..... III – 20
Tabel III.3. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022-2026 ..... III – 22
Tabel III.4. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022- 2026 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019..... III – 27

Tabel III.5. Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2026 ..... III – 30
Tabel III.6. Mitra Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Mendukung Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan ..... III – 31

Tabel IV.1. Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... IV – 3
Tabel IV.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025..... IV – 8
Tabel IV.3. Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan berdasarkan Prioritas Nasional..... IV – 8
Tabel IV.4. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 ..... IV – 12
Tabel IV.5. Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV – 13
Tabel IV.6. Keterkaitan RPD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025..... IV – 15
Tabel IV.7. Tujuan Sasaran dan Strategi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... IV – 18
Tabel IV.8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025..... IV – 20
Tabel IV.9. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPD untuk Tahun 2025 ..... IV – 26
Tabel IV.10. Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025..... IV – 28
Tabel IV.11. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025..... IV – 37
Tabel IV.12. Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025..... IV – 39
Tabel IV.13. Keselarasan Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025 ..... IV – 43
Tabel IV.14. Hasil Pembahasan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan..... IV – 68

Tabel V.1. Sasaran Pembangunan Daerah Pulau Sulawesi Tahun 2025..... V – 5
Tabel V.2. Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dengan Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025..... V – 7
Tabel V.3. Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Makassar dan sekitarnya Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 ..... V – 13
Tabel V.4. Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten pada Kawasan Bulukumba dan sekitarnya Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 ..... V – 14
Tabel V.5. Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten pada Kawasan Watampone Tahun 2023 dan Target Tahun 2024..... V – 16

Tabel V.6. Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Parepare dan sekitarnya Tahun 2023 dan Target Tahun 2024..... V – 17
Tabel V.7. Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo dan sekitarnya Tahun 2023 dan Target Tahun 2024..... V – 18
Tabel V.8. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... V – 22
Tabel V.9. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... V – 26
Tabel V.10. Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Pembangunan Makassar Tahun 2025..... V – 27
Tabel V.11. Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten/Kota pada Kawasan Makassar Tahun 2025..... V – 31
Tabel V.12. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kawasan Pembangunan Bulukumba Tahun 2025 ..... V – 35
Tabel V.13. Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Pembangunan Bulukumba Tahun 2025 ..... V – 35
Tabel V.14. Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten pada Kawasan BulukumbaTahun 2025..... V – 38
Tabel V.15. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2025..... V – 41
Tabel V.16. Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2025..... V – 42
Tabel V.17. Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten pada Kawasan WatamponeTahun 202 ..... V – 44
Tabel V.18. Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Kota Kawasan Parepare Tahun 2025..... V – 47
Tabel V.19. Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Parepare Tahun 2025..... V – 48
Tabel V.20. Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten/Kota pada Kawasan Parepare Tahun 2025..... V – 51
Tabel V.21. Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Kota Kawasan Pembangunan Palopo Tahun 2025..... V – 55
Tabel V.22. Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Palopo Tahun 2025..... V – 56
Tabel V.23. Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo Tahun 2025..... V – 59

Tabel VI.1. Rincian Kerangka Pendanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025..... VI – 1
Tabel VI.2. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 . VI – 4
Tabel VI.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sulawesi Selatan..... VI – 19

Tabel VII.1. Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan RPD 2024 – 2025 dan Berdasarkan Kesepakatan Rakortek Tahun 2023 - 2025 ..... VII – 2

Tabel VII.2. Indikator Makro Berdasarkan Hasil kesepakatan Rakortek Tahun 2025 ..... VII – 4
Tabel VII.3. Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Perkiraan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Target Kinerja di Akhir RPD 2026..... VII – 5
Tabel VII.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023..... VII – 7
Tabel VII.5. Perkiraan Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2025..... VII – 28
Tabel VII.6. Penetapan Target Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Permendagri No 59 Tahun 2021) ..... VII – 58
Tabel VII.7. Capaian Pembangunan Berlanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Selatan 2023 dan Sasaran Nasional Tahun 2024 ..... VII – 62

Daftar Grafik

Grafik II.1.	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023	II – 20
Grafik II.2.	Pertumbuhan Ekonomi (y on y) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2	II – 21
Grafik II.3.	Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Perkapita Nasional Tahun 2019-2023	II – 24
Grafik II.4.	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2023	II – 25
Grafik II.5.	Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Maret 2023	II – 26
Grafik II.6.	Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023	II – 28
Grafik II.7.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Maret 2023	II – 29
Grafik II.8.	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode Maret 2023	II – 29
Grafik II.9.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2019-2023	II – 36
Grafik II.10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 37
Grafik II.11.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 38
Grafik II.12.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan RLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 39
Grafik II.13.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan RLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 40
Grafik II.14.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 41
Grafik II.15.	Perbandingan IPM Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2023	II – 42
Grafik II.16.	Perkembangan Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023	II – 43
Grafik II.17.	Perkembangan Angka Melek Huruf Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 44
Grafik II.18.	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 45
Grafik II.19.	Perkembangan Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 45
Grafik II.20.	Dimensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 47
Grafik II.21.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II – 47
Grafik II.22.	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020-2023	II – 48

Grafik II.23. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ... II – 49
Grafik II.24. Rasio Penduduk yang Bekerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 50
Grafik II.25. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023 ..... II – 50
Grafik II.26. IKM Berdasarkan Dimensi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 52
Grafik II.27. Perbandingan IPM Laki-laki dan IPM Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 54
Grafik II.28. Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 55
Grafik II.29. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 62
Grafik II.30. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 63
Grafik II.31. Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 64
Grafik II.32. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 65
Grafik II.33. Perkembangan Angka Anak Tidak Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 66
Grafik II.34. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ..... II – 72
Grafik II.35. Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 73
Grafik II.36. Prevalensi Balita Stunting, Wasting dan Underweight Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 74
Grafik II.37. Perbandingan Angka Stunting Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain Di Indonesia Tahun 2023 ..... II – 74
Grafik II.38. Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023 ..... II – 74
Grafik II.39. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 79
Grafik II.40. Sebaran Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 98
Grafik II.41. Penduduk Ber-KTP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 105
Grafik II.42. Penerbitan KTP-el Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 106
Grafik II.43. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ... II – 107
Grafik II.44. Bayi Berakta Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 107
Grafik II.45. Bayi Ber Akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 108
Grafik II.46. Pasangan Ber Akte Nikah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 109

Grafik II.47. Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 110
Grafik II.48. Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 111
Grafik II.49. Akta Kematian yang Diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 111
Grafik II.50. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 113
Grafik II.51. Jumlah Desa Status "Desa Mandiri" Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ... II – 115
Grafik II.52. Jumlah Desa Status "Desa Tertinggal" Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ... II – 123
Grafik II.53. Jumlah PKK dan Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ... II – 123
Grafik II.54. Jumlah UMKM yang Difasilitasi Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 124
Grafik II.55. Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... II – 126
Grafik II.56. Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 126
Grafik II.57. Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 127
Grafik II.58. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 132
Grafik II.59. Jumlah Perpustakaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 133
Grafik II.60. Peningkatan SDM Pengelola Arsip Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 134
Grafik II.61. Jumlah Destinasi Wisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023..... II – 135
Grafik II.62. Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 140
Grafik II.63. Produksi Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 141
Grafik II.64. Populasi Ternak Besar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 142
Grafik II.65. Populasi Ternak Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 143
Grafik II.66. Populasi Ternak Unggas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022..... II – 144
Grafik II.67. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 148
Grafik II.68. Produksi Perikanan ..... II – 155
Grafik II.69. Produksi dan Nilai Produksi Rumput Laut ..... II – 158
Grafik II.70. Produksi Udang 2019-2023 ..... II – 158
Grafik II.71. Produksi Garam ..... II – 159

Grafik II.72. Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Mempunyai Kemampuan Membaca Dan Menulis Huruf Arab ..... II – 163
Grafik II.73. Realisasi Pendapatan pada UPT Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 172
Grafik II.74. Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 180
Grafik II.75. Perbandingan NTP Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II – 182
Grafik II.76. Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... II – 185
Grafik II.77. Tingkat Kesesuaian Program RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 350
Grafik II.78. Tren Perkembangan Inovasi Daerah di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 ..... II – 432

Grafik III.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2023, Perkiraan Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 ..... III – 6
Grafik III.2. PDRB Perkapita Sulawesi Selatan, Capaian 2022, Perkiraan 2023, Target 2024 dan 2025 ..... III – 8
Grafik III.3. Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025 ..... III – 9
Grafik III.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025 ..... III – 9
Grafik III.5. Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025..... III – 10
Grafik III.6. Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025 ..... III – 11

Daftar Gambar

Gambar I.1	Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan TAhun 2025	I – 9
Gambar I.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	I – 10
Gambar II.1.	Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan....	II – 1
Gambar II.2.	Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 3
Gambar II.3.	Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan	II – 4
Gambar II.4.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan.....	II – 5
Gambar II.5.	Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	II – 12
Gambar III.1.	Tema RKP Tahun 2025	III – 12
Gambar III.2.	Arah Kebijakan RKP Tahun 2025	III – 12
Gambar III.3.	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..	III – 13
Gambar IV.1.	Penekanan Tema RKP Tahun 2025	IV – 5
Gambar IV.2.	Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV – 6
Gambar IV.3.	Prioritas Nasional Tahun 2025	IV – 7
Gambar IV.4.	Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025	IV – 7
Gambar V. 1.	Arahan Pengembangan Kawasan Perkotaan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.....	V – 2
Gambar V. 2.	Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi	V – 3
Gambar V. 3.	Kawasan Pusat Pertumbuhan, Perdesaan dan Daerah Afirmasi Wilayah Pulau Sulawesi	V – 5
Gambar V. 4.	Kawasan Pembangunan Sulawesi Selatan.....	V – 20
Gambar V. 5.	Arah Pengembangan Kawasan Makassar Tahun 2025....	V – 25
Gambar V. 6.	Arah Pengembangan Kawasan Bulukumba Tahun 2025	V – 34
Gambar V. 7.	Arah Pengembangan Kawasan Watampone Tahun 2025	V – 40
Gambar V. 8.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kawasan Parepare Tahun 2025	V – 46
Gambar V. 9.	Arah Pengembangan Kawasan Palopo Tahun 2025.....	V – 54

Daftar Diagram

Diagram II.1.	Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023	II – 11
Diagram II.2.	Perbandingan Indeks Gini Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2023.....	II – 26
Diagram II.3.	Dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 54
Diagram II.4.	Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 104
Diagram II.5.	Penerbitan KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 105
Diagram II.6.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 106
Diagram II.7.	Pasangan Ber Akte Nikah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 109
Diagram II.8.	Jumlah Desa Berdasarkan Status Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 114
Diagram II.9.	Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan (m3) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 147

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Nomor Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di RPJMD Tahun 2019 -2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Oleh karena itu RKPD 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024 – 2026.

Dokumen RKPD 2025 disusun sebagaimana mandat undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan pedoman dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Salah satu tujuan SPPN adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah maupun antara pusat dan daerah.

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam. sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Menunjuk amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tingkat keberhasilan perencaaan pembangunan di Indonesia, tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencananan kebijakan di setiap periodenya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan, sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional .

RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023, isu - isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan di namika agenda pembangunan nasional lainnya, serta penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara tematik, holistic integrative dan spasial (THIS). Disamping itu penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan secara transparan, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (risk bassed planning), serta berprinsip pada pembangunan yang berkelnjutan. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,51 Persen, Tingkat Kemiskinan 8,70 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,33 Persen, Gini Rasio 0,377, Indeks Pembangunan Manusia 74,60 dan PDRB Perkapita (ADHB) 69,70 Juta/Rp. Selain memperhatikan capaian indikator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2025 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Ranwal RPJMN 2025-2029 serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh

kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen RKPD 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke II (ke-dua) RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang dalam pelaksanaannya, telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dokumen RKPD tahun 2025 mempunyai nilai penting, antara lain ; merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026; Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Nageri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302); dan
48. Peraturan Gubernur Sulawesi selatan No.13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024 – 2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

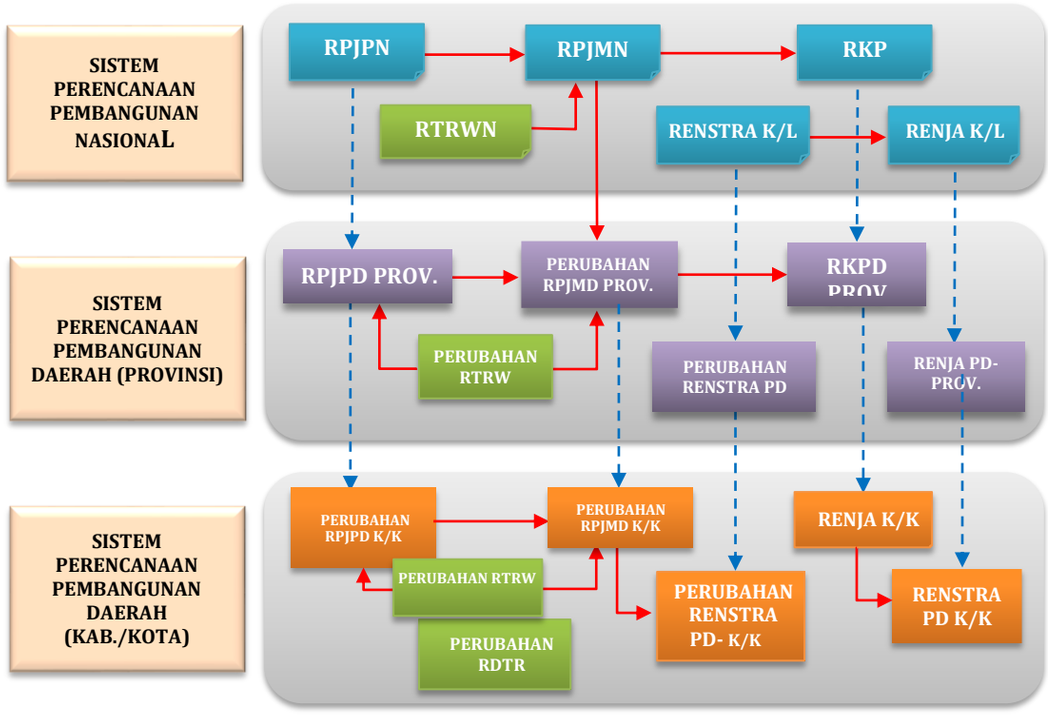
Dokumen RKPD tahun 2025 di susun dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka

menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Untuk RKPD tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.13 tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2025, dan ranwal RPJMN Tahun 2025-2029.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



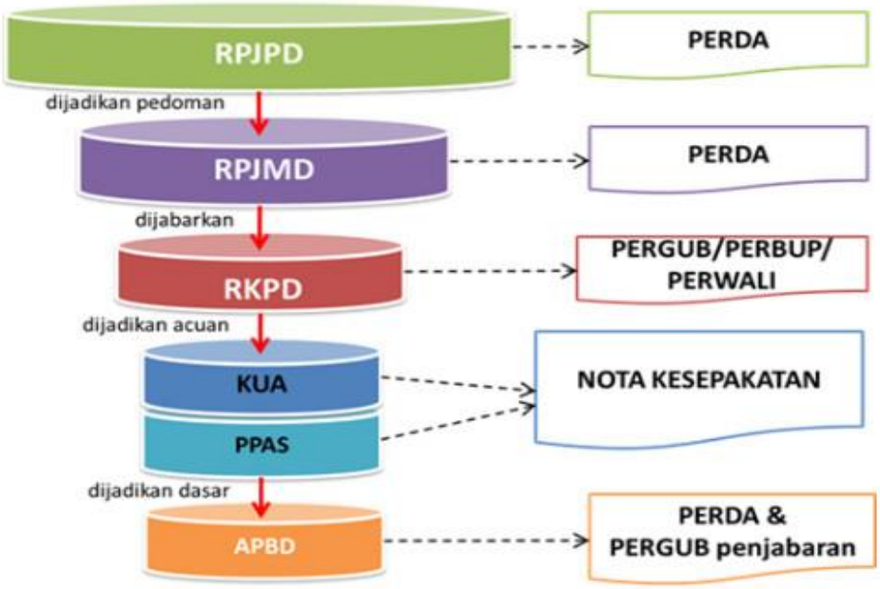
Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Melalui bahasan diatas, terlihat bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2025 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi, Dokumen RKPD sebagaimana telah di sebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Perangkat Daerah, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Gubenur dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; dan
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tujuan dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegitan Tahun 2025;

3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasa;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; Bab ini memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan, arah pengembangan wilayah Provinsi Suawesi Selatan dan sasaran pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP; Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

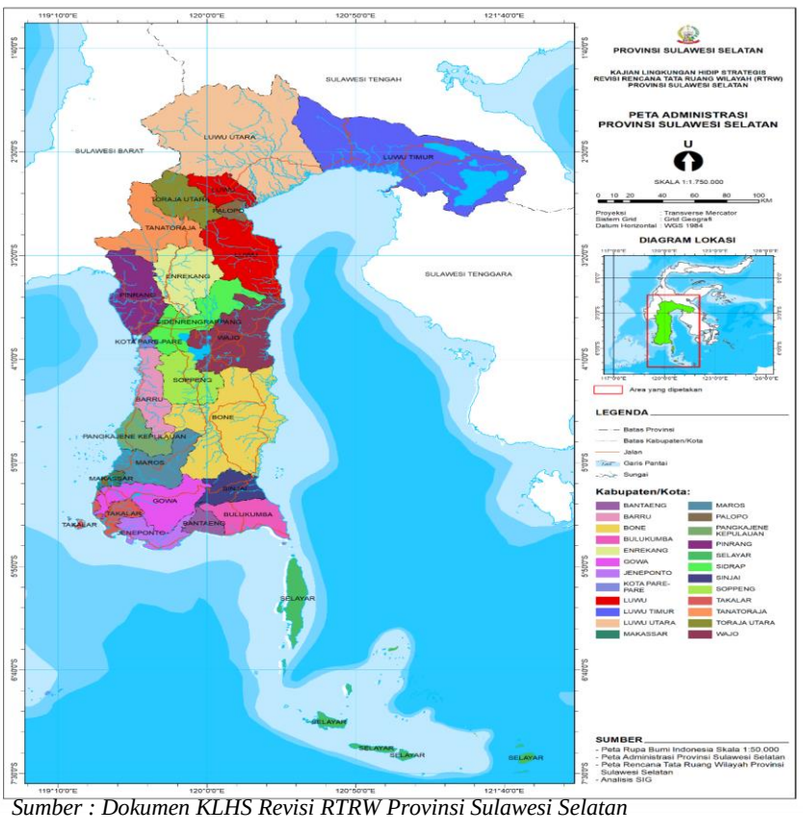
2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI WILAYAH SULAWESI SELATAN

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah sekitar 45.330,55 Km^2. Secara administratif terbagi menjadi 21 wilayah kabupaten dan 3 wilayah kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan wilayah terluas dengan luasan sebesar 7.422,42 Km^2 atau 16,37 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan Kota Parepare merupakan daerah dengan wilayah terkecil dengan luasan sebesar 89,67 Km^2 atau 0,2 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 1°52'52,14" hingga 7°45'32,19"S Lintang Selatan dan 117° 2'17,85" hingga 122°13'21,19" Bujur Timur. Daratan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasan 4.569.143,94 Km^2 memiliki daratan yang dikelilingi oleh laut yang cukup luas dengan kondisi geografis di sebelah selatan terdapat Laut Flores, di sebelah barat terdapat Selat Makassar dan di sebelah Timur terdapat Teluk Bone.

Gambar II.1.
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Secara Administrasi, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota, yang terdiri dari 313 kecamatan, 793 kelurahan, dan 2.266

desa. Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yang menetapkan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45.331 Km^2 atau seluas 4.533.100 Hektar.

Tabel II.1.
Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
		Km^2	%			
1	Kepulauan Selayar	1.160	2,56	11	7	81
2	Bulukumba	1.176	2,59	10	27	109
3	Bantaeng	391	0,86	8	21	46
4	Jeneponto	796	1,76	11	31	82
5	Takalar	555	1,22	12	24	86
6	Gowa	1.813	4	18	46	121
7	Sinjai	865	1,91	9	13	67
8	Maros	1.443	3,18	14	23	80
9	Pangkajene Kepulauan	889	1,96	13	38	65
10	Barru	1.202	2,65	7	15	40
11	Bone	4.567	10,07	27	44	328
12	Soppeng	1.386	3,06	8	21	49
13	Wajo	2.609	5,76	14	48	142
14	Sidenreng Rappang	1.832	4,04	11	38	68
15	Pinrang	1.897	4,18	12	40	69
16	Enrekang	1.807	3,99	12	17	112
17	Luwu	2.902	6,4	22	20	207
18	Tana Toraja	2.044	4,51	19	47	112
19	Luwu Utara	7.422	16,37	15	7	166
20	Luwu Timur	6.746	14,88	11	3	125
21	Toraja Utara	1.289	2,84	21	40	111
22	Makassar	177	0,39	15	153	0
23	Pare Pare	90	0,2	4	22	0
24	Palopo	273	0,6	9	48	0
Sulawesi Selatan		**45.331**	**100**	**313**	**793**	**2.266**

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022

Kondisi topografi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki permukaan yang bervariasi. Provinsi Sulawesi Selatan membentang dari ketinggian antara 0-500 mdpl berupa dataran rendah, 500-1000 mdpl merupakan dataran tinggi dan ketinggian diatas 1000 mdpl merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan. Bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu-satunya daerah paling bergunung yang membentang ke arah barat daya kemudian ke arah Tenggara Sulawesi.

Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemiringan 0-2 persen menempati luasan terbesar, dimana Kabupaten Wajo mendominasi dalam tingkat kemiringan ini sebesar 203.225 Ha atau sekitar 15,27 persen dari total luasan dalam tingkat kemiringan 0-2 persen ini. Kemudian disusul tingkat kemiringan 15-30 persen dengan dominasi luasan berada di Kabupaten Luwu Utara sebesar 280.873 Ha atau sekitar 22,84 persen dari total luasan dalam tingkat kemiringan 15-30 persen. Selanjutnya tingkat kemiringan 5-15 persen didominasi oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 171.832 Ha atau 16,84 persen. Sementara tingkat kemiringan 30-40 persen menempati luasan terkecil.

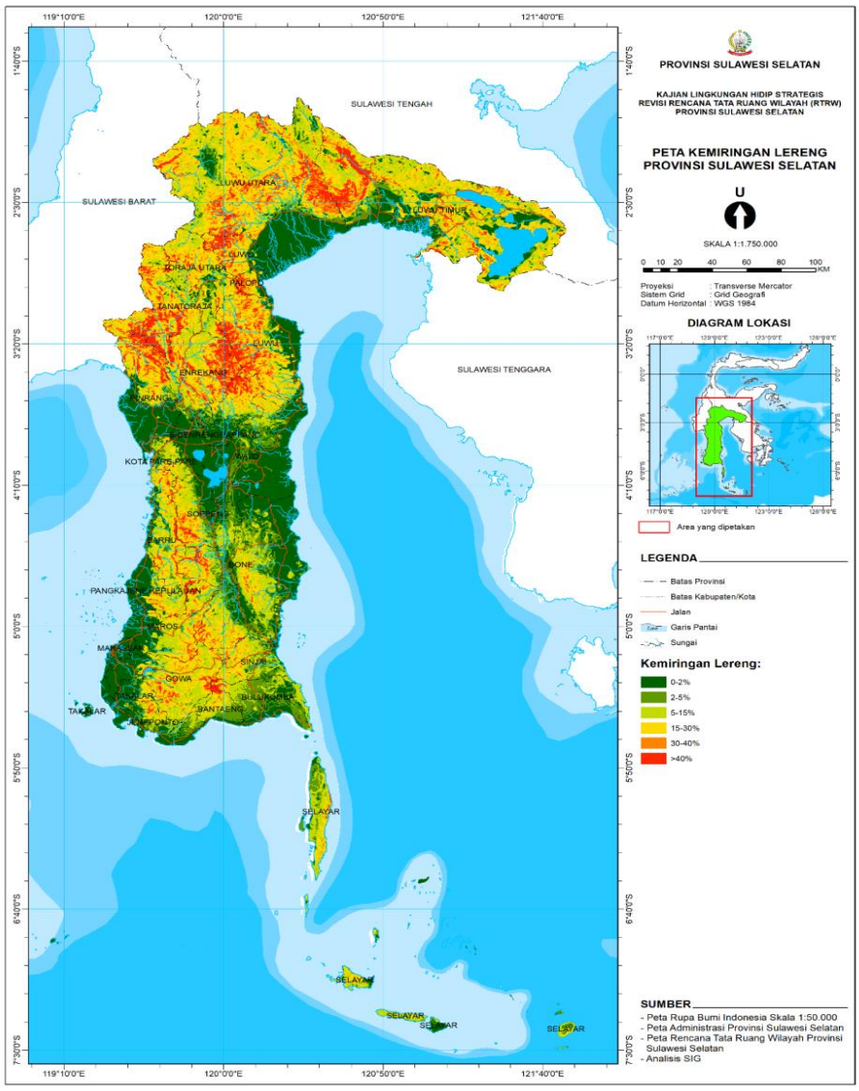
Secara rinci luasan berdasarkan klasifikasi tingkat kemiringan di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel II.2.
Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kemiringan Lereng (%)	Luasan	
		Ha	%
1	0 – 2%	1.331.582,91	29,27
2	2 – 5%	406.554,85	8,94
3	5 – 15%	1.021.023,21	22,44
4	15 – 30%	1.230.361,88	27,05
5	30 -40%	264.300,48	5,81
6	> 40%	295.082,58	6,49
Sulawesi Selatan		**4.554.366,68**	**100**

Sumber : Dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2051

Gambar II.2.
Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl seluas 2.176.516,80 Ha atau sebesar 47,89 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan ketinggian lahan yang paling kecil luasan

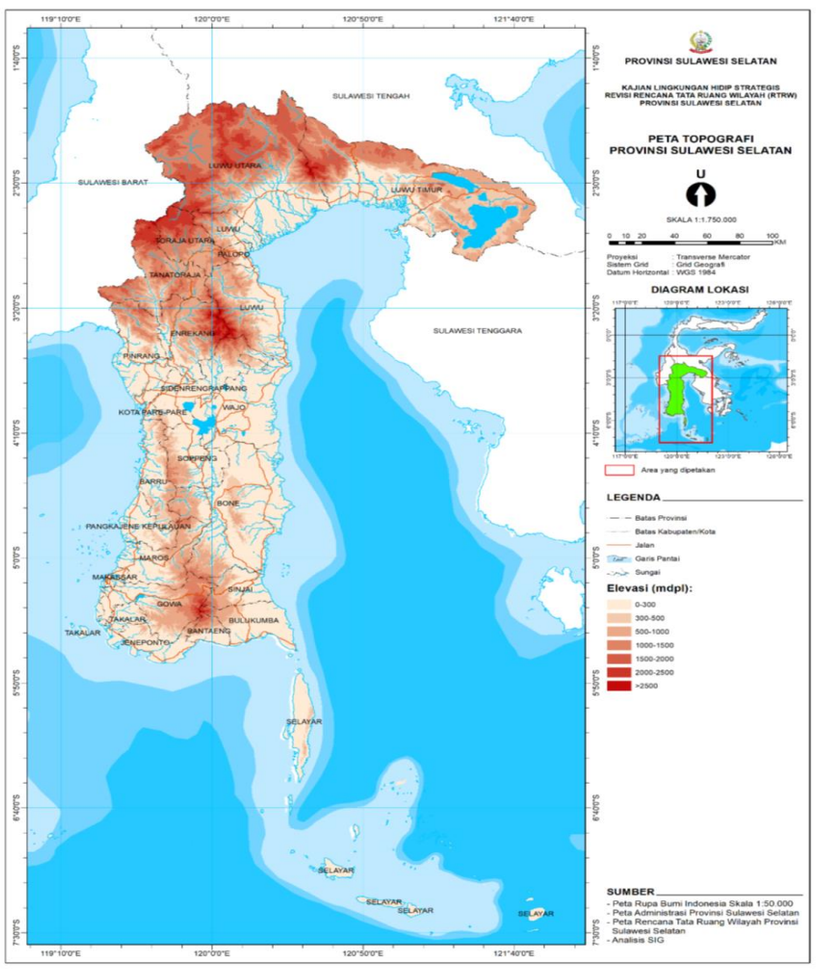
wilayahnya adalah wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl seluas 20.600,07 Ha atau sebesar 0,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel II.3.
Kondisi Topografi di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Elevasi (mdpl)	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	-300	2.176.516,80	47,89
2	300 – 500	521.673,90	11,48
3	500 – 1000	759.588,35	16,71
4	1000 -1500	574.747,71	12,65
5	1500 – 2000	355.551,01	7,82
6	2000 – 2500	135.688,83	2,99
7	> 2500	20.600,07	0,45
Sulawesi Selatan		**4.554.366,68**	**100**

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar II.3.
Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan

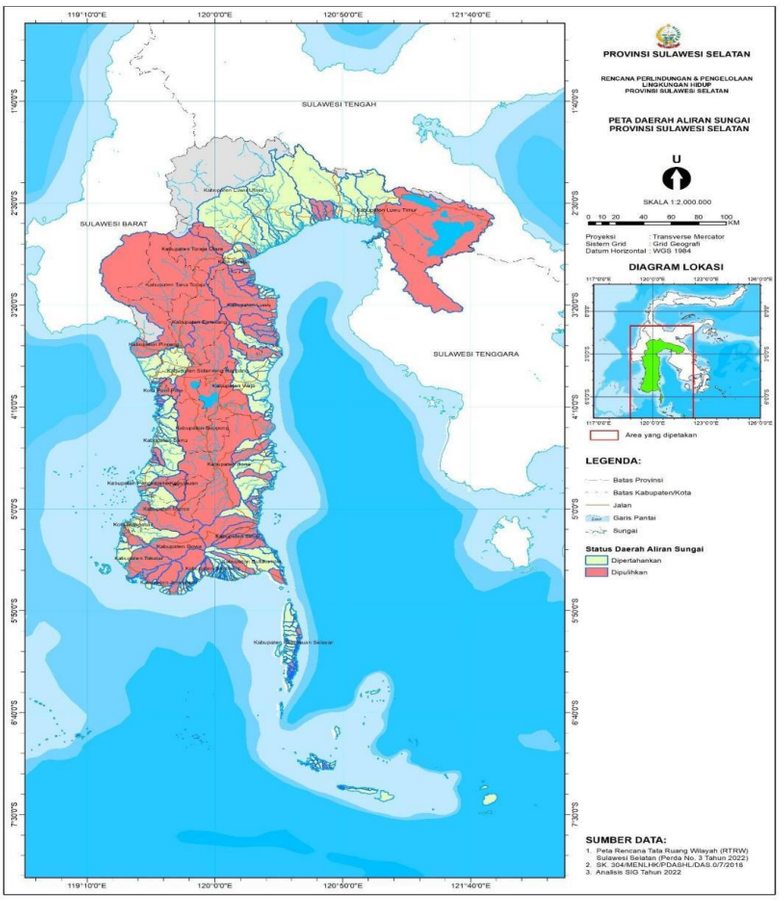


Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Curah hujan di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya cukup untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti untuk irigasi, industri, air minum, dan untuk keperluan domestik lainnya. Sebagai langkah untuk menanggulangi dampak negatif yang timbul maupun meminimalisasi dampak maka diperlukan upaya konservasi air tanah yang bertumpu pada aspek teknis dengan melakukan pengaturan dan pembatasan daerah pengambilan air tanah pada zona-zona konservasi air tanah

dan kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan tata air perlu untuk segera direhabilitasi dan diamankan. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi habis ke dalam daerah aliran sungai (DAS), terdapat beberapa sungai yang melintas antar kabupaten/kota dan ada juga yang melintas antar Provinsi. Kurang lebih terdapat 148 DAS di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikelola oleh BPDAS Jeneberang-Saddang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akan tetapi, 108 dari DAS tersebut tergolong DAS kritis yang perlu dipulihkan kondisinya. Setiap DAS, memiliki potensi air yang dihasilkan melalui proses hidrologi. Berdasarkan data dari Balai Wilayah Sungai yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa potensi air permukaan dari DAS-DAS yang ada sekitar 63.548.796.610,20 m3 yang berasal dari DAS di wilayah sungai Jeneberang, Pompengan Larona, Saddang, dan Walanae-Cenranae.

Gambar II.4.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan



Sumber : Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045

Berdasarkan aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu:

a. Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.

b. Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 - 3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng.
c. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 - 3000 mm/Tahun. Tipe iklim C terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros, Jeneponto, Makassar, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar.
d. Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm/Tahun. Tipe iklim ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Sinjai, Maros, Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Makassar.
e. Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 - 2000 mm/Tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Yang terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Bantaeng, dan Selayar.

2.1.1.2 WILAYAH RAWAN BENCANA

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh gempa. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang melewatinya dan berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Kota Makassar menyebabkan daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Kondisi topografi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 400 hingga 1000 meter dpl. Memiliki tujuh gunung dimana Gunung Rantemario dengan ketinggian 3.470 m di atas permukaan laut merupakan yang tertinggi di wilayah ini. Provinsi Sulawesi Selatan beriklim tropis dengan adanya musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan Data Data Geoportal Data Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 tercatat 267 kejadian bencana yang pernah terjadi. Jenis Bencana yang paling banyak terjadi di dominasi oleh bencana cuaca ekstrim, banjir, dan tanah longsor. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2023 Pemerintah Sulawesi Selatan memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 144.47 (tinggi).

Data BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023, Jumlah total bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 adalah 791 kejadian dengan jenis bencana Banjir 73 kejadian, Tanah Longsor 96 kejadian, Puting Beliung 39 kejadian, Gempa 5 kejadian, Gelombang Pasang 1 kejadian, Kekeringan 37 kejadian, Angin Kencang 197 kejadian, Kebakaran 371 kejadian, Longsor 96 kejadian, Banjir Bandang 2 kejadian, Gempa Bumi 5 Kejadian dan Abrasi 7 kejadian. Tingkat kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.4.
Kejadian Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian									
		Banjir	Gelombang Pasang	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Gempa Bumi	Kebakaran	Angin Kencang	Putting Beliung	Abrasi
1	Kepulauan Selayar	2	-	1	-	-	2	12	22	1	1
2	Bulukumba	3	-	3	-	-	-	1	4	1	-
3	Bantaeng	-	-	1	-	-	-	17	3	-	-
4	Jeneponto	-	-	-	-	-	-	31	4	4	-
5	Takalar	-	-	-	-	-	-	13	17	10	3
6	Gowa	1	-	3	-	-	-	4	-	3	-
7	Sinjai	14	-	9	-	-	-		4	-	-
8	Maros	4	-	-	-	-	-	10	14	1	-
9	Pangkajene dan Kepulauan	-	-	1	-	-	-	19	26	8	-
10	Barru	2	-	2	-	-	-	13	14	-	-
11	Bone	2	-	11	-	-	-	83	25	2	1
12	Soppeng	3	-	3	-	-	-	8	4	-	-
13	Wajo	3	-	1	-	-	-	28	15	-	-
14	Sidenreng Rappang	3	1	3	-	-	-	16	11	-	-
15	Pinrang	5	-	6	-	-	-	10	15	-	2
16	Enrekang	3	-	8	2	-	-	12	3	-	-
17	Luwu	5	-	3	-	-	-	7	2	-	-
18	Tana Toraja	-	-	7	-	-	-	6	1	7	-
19	Luwu Utara	12	-	2	-	-	-	12	3	2	-
20	Luwu Timur	2	-	2	-	-	3	10	2	-	-
21	Toraja Utara	-	-	13	-	-	-	8	3	1	-
22	Makassar	2	-	-	-	-	-	25	-	-	-
23	Parepare	4	-	8	-	-	-	12	47	-	-
24	Palopo	3	-	4	-	-	-	14	-	-	-
JUMLAH		**73**	**1**	**96**	**2**	**-**	**5**	**371**	**197**	**39**	**7**

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yakni angin kencang, kebakaran, tanah longsor, dan banjir. Jika diamati pada distribusi peta rawan banjir dan longsor, dapat dilihat gambaran bahwa distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi pada daerah-daerah yang relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Tabel II.5.
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1	Kota Makassar	Banjir Cuaca Ekstrim Tsunami	Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo
2	Kota Parepare	Cuaca Ekstrim Longsor Kebakaran	Kel. Kampung Pisang, Kel. Ujung Lare, Kel. Lakessi, Kel. Kampung Baru, Kel. Watang Soreang, Kel. Ujung Bulu, Kel. Tiro Sompe, Kel. Mallusetasi, Kel. Cappa Galung, dan Kel. Ujung Sabbang.
3	Kota Palopo	Banjir Longsor Kebakaran Kekeringan Cuaca Ekstrim	Kec. Telluwanua; Kec. Wara, Kec. Wara Selatan, Kec. Wara Barat, Kec. Wara Utara, Kec. Mungkajang, Kec. Sendana
4	Barru	Longsor Banjir Cuaca Ekstrim Kebakaran	Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Nepo
5	Soppeng	Cuaca Ekstrim Gempa Banjir Longsor	Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di Kecamatan Marioriawa;
6	Wajo	Banjir Cuaca Ekstrim Gempa	Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec. Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla
7	Sidenreng Rappang	Banjir Cuaca Ekstrim Gempa	Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang
8	Enrekang	Longsor Cuaca Ekstrim Banjir Kebakaran	Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja
9	Pinrang	Longsor Cuaca Ekstrim Banjir Gempa	Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang
10	Toraja Utara	Longsor Cuaca Ekstrim Kebakaran	Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
11	Tana Toraja	Longsor Cuaca Ekstrim Kebakaran	Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo
12	Luwu	Longsor Banjir Cuaca Ekstrim Abrasi	Kec. Latimojong, Kec. Larompong, Kec. Larompong Selatan, Kec. Bajo, Kec. Bajo Barat, Kec. Suli, Kec. Suli Barat, Kec. Bastem, Kec. Bupon, Kec. Bua, Kec. Walenrang Utata, Kec. Walenrang Barat, Kec. Belopa, Kec. Belopa Utara, Kec. Kamanre, Kec. Ponrang, Kec. Ponrang Selatan, Kec. Walenrang Timur, Kec. Lamasi Timur, Kec. Bassesangtempe, Kec. Bassesangtempe Utara
13	Luwu Utara	Banjir Cuaca Ekstrim	Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta;
14	Luwu Timur	Kekeringan Banjir Longsor Gempa Bumi	Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula
15	Gowa	Longsor Banjir Cuaca Ekstrim Kekeringan	Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao
16	Takalar	Tsunami Banjir	Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec.

No.	Kabupaten/ Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
		Cuaca Ekstrim	Mangarabombang
17	Bantaeng	Longsor	Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
18	Bulukumba	Banjir	Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
19	Sinjai	Longsor	Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
20	Bone	Banjir	Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
21	Maros	Longsor	Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
22	Pangkajene dan Kepulauan	Banjir	Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
23	Jeneponto	Banjir	Kec. Bangkala, Kec. Bangkala Barat, Kec. Binamu, Kec. Arungkeke, Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kec. Kelara, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba
		Cuaca Ekstrim	
		Angin Putting Beliung	
		Kekeringan	
24	Kepulauan Selayar	Longsor	Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki
		Banjir	
		Tsunami	
		Kebakaran	

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan

Dari segi dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana, baik jumlah korban hilang/Mati, Luka/Sakit/, dan mengungsi serta sarana yang terdampak akibat terjadinya bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.6.
Dampak Kejadian Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Terdampak			Sarana Terdampak				
		Hilang/ Mati	Luka/ Sakit	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Ibadah	Kesehatan	Perkantoran
Banjir	73	3	-	721	12.198	59	47	20	11
Tanah Longsor	90	-	4	118	126	3	1	-	1
Banjir Bandang	2	-	-	-	15	-	-	-	-
Gempa Bumi	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran	350	13	25	84	670	3	1	-	-
Angin Kencang	235	-	2	57	1.424	19	10	2	1
Angin Puting Beliung	41	-	-	10	351	-	1	-	-
Abrasi	7	-	-	-	3	-	-	-	-
Kebakaran Hutan dan Lahan	88	3	-	-	-	-	-	-	-
Kekeringan	89	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**980**	**19**	**31**	**990**	**14.778**	**84**	**60**	**22**	**13**

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yakni bencana kebakaran, angin kencang, dan tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan El Nino. Jika diamati pada distribusi peta rawan banjir dan longsor, distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi pada daerah-daerah yang relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRBI. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar 0,42 dimana hanya sejumlah 15 kabupaten/kota yang melakukan penilaian IKD.

Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di suatu daerah atau kawasan. Metode yang digunakan dengan menggabungkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Tahun 2023 Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan nilai IRB dan kelas risiko bencana dari tahun 2022. Wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi di Sulawesi Selatan sejumlah 14 kabupaten/kota, serta 10 kabupaten/kota dengan nilai indeks risiko bencana sedang. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.7.
Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023

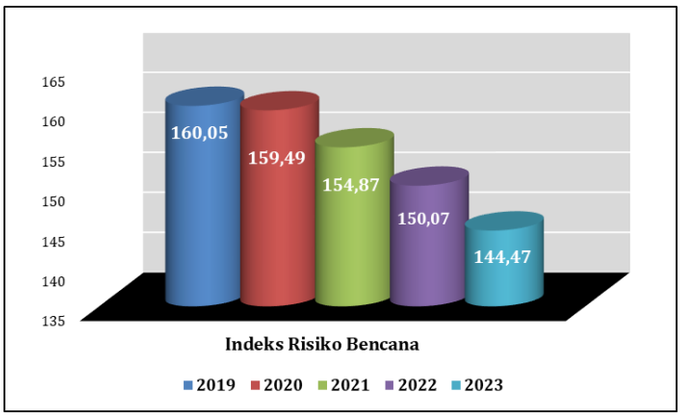
No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
1	Kepulauan Selayar	155,20	Tinggi	155,20	Tinggi	151,12	Tinggi	142,83	Sedang
2	Bulukumba	163,20	Tinggi	163,20	Tinggi	163,20	Tinggi	156,54	Tinggi
3	Bantaeng	107,73	Sedang	102,20	Sedang	105,96	Sedang	105,96	Sedang
4	Jeneponto	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi
5	Takalar	135,04	Sedang	131,33	Sedang	128,38	Sedang	128,38	Sedang
6	Gowa	114,42	Sedang	106,27	Sedang	106,98	Sedang	106,98	Sedang
7	Sinjai	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi
8	Maros	157,93	Tinggi	157,93	Tinggi	148,96	Tinggi	148,96	Tinggi
9	Pangkajene Kepulauan	168,40	Tinggi	168,40	Tinggi	168,40	Tinggi	165,66	Tinggi
10	Barru	180,40	Tinggi	162,65	Tinggi	149,41	Tinggi	137,16	Sedang
11	Bone	191,20	Tinggi	183,85	Tinggi	173,75	Tinggi	164,46	Tinggi
12	Soppeng	131,20	Sedang	131,20	Sedang	131,20	Sedang	131,20	Sedang
13	Wajo	179,20	Tinggi	179,20	Tinggi	179,20	Tinggi	156,96	Tinggi
14	Sidenreng Rappang	119,20	Sedang	119,20	Sedang	119,20	Sedang	119,20	Sedang
15	Pinrang	179,20	Tinggi	161,57	Tinggi	148,84	Tinggi	148,84	Tinggi
16	Enrekang	150,00	Tinggi	144,23	Tinggi	136,13	Sedang	187,91	Tinggi
17	Luwu	192,23	Tinggi	187,71	Tinggi	187,91	Tinggi	187,91	Tinggi
18	Tana Toraja	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi
19	Luwu Utara	185,25	Tinggi	169,57	Tinggi	155,01	Tinggi	141,64	Sedang
20	Luwu Timur	202,00	Tinggi	195,10	Tinggi	176,14	Tinggi	152,28	Tinggi
21	Toraja Utara	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi
22	Makassar	131,78	Sedang	127,18	Sedang	119,49	Sedang	119,49	Sedang

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
23	Pare-Pare	155,20	Tinggi	155,20	Tinggi	148,84	Tinggi	141,26	Sedang
24	Palopo	211,20	Tinggi	198,94	Tinggi	186,68	Tinggi	167,40	Tinggi

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Sulawesi Selatan (IRB) tahun 2019 hingga 2023 mengalami tren penurunan nilai indeks, namun IRB Sulawesi Selatan termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas. Hingga tahun 2023 nilai Indeks Risiko Bencana Sulawesi Selatan sebesar 144,47 mengalami penurunan penurunan sebesar 5,6 poin dari tahun 2022 namun masih dalam kategori indeks risiko tinggi.

Diagram II. 1.
Indeks Risiko Bencana (IRB)
Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023

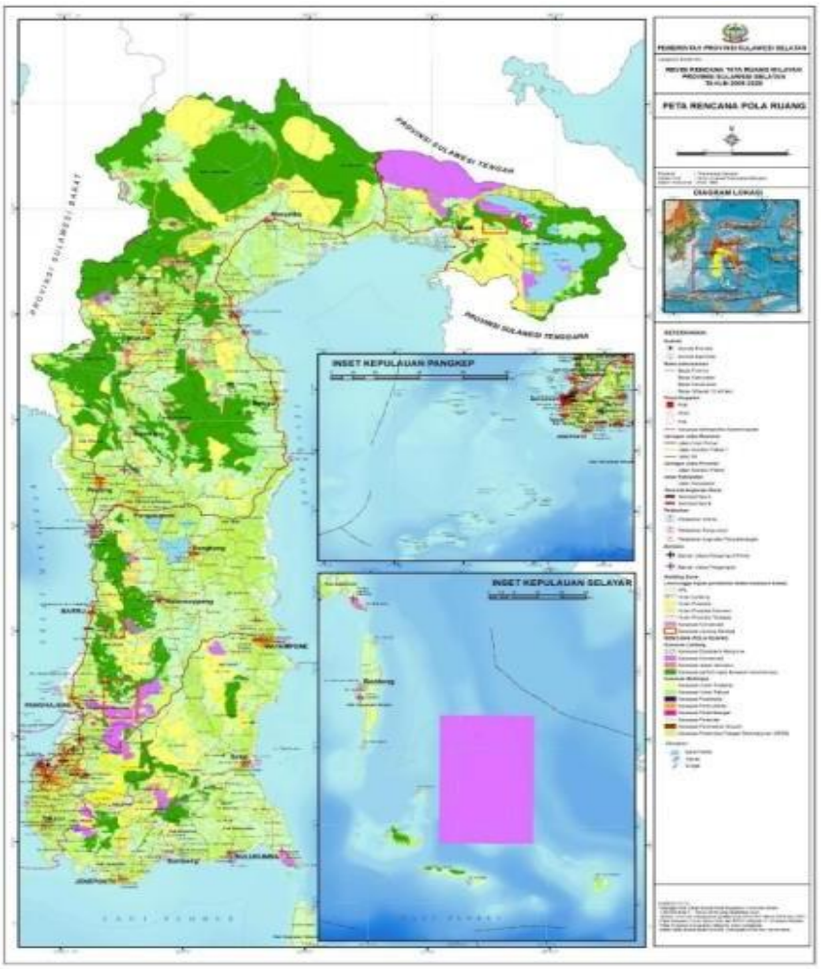


Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.1.1.3 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

Gambar II.5.
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. Pembagian pemanfaatan ruang dalam beberapa kawasan sebagaimana terbuat dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan

komoditas kedelai yaitu di Kabupaten Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Bone, Soppeng, dan Wajo; dan lokasi pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan Kabupaten Maros.

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura di arahkan, sebagai berikut:

- Bawang Merah pada Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, dan Takalar;
- Tanaman Cabai pada Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan Takalar;
- Tanaman Jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan;
- Perkebunan Tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;
- Perkebunan Kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;
- Perkebunan Kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu Utara, Luwu, dan Bulukumba;
- Komoditas Perkebunan Lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu Timur;
- Komoditas Perkebunan Cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone dan Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba, Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan komoditas peternakan sapi perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng. Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai kontibutor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Untuk itu dalam RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan 594.367 Hektar yang tersebar seluruh wilayah kabupaten/kota, kecuali Kota Makassar yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan.

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa dan Teluk Bone. Sedangkan perikanan budidaya berupa budidaya laut dan budidaya payau tersebar di wilayah perairan kabupaten/kota yaitu Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Pangkep, Barru, Palopo, Luwu, Sinjai, Luwu Timur, Makassar, Luwu Utara, Pinrang, Selayar, Takalar, Wajo, Bone, dan Maros.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang. Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri yang meliputi Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusf dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan.

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan kawasan wisata di laut. Arahan pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang berada dalam kawasan strategis provinsi (KSP) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi a). Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros; b). Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; c). Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru; d). Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang; e). Kawasan agrowisata Bone-Wajo ; f). Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan selayar; dan g) Kawasan Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya. Sedangkan KSP untuk kepentingan sosial budaya khususnya kawasan wisata budaya dan agrowisata berada pada Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dan taman miniatur Sulawesi Selatan dan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 64). Pengembangan wisata laut di Provinsi Sulawesi Selatan tersebar pada kabupaten dan kota yang berada pada wilayah Perairan Selat Makassar, Teluk Pare-Pare,

Laut Flores dan Teluk Bone dengan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk usaha wisata edukasi, usaha wisata dayung, usaha wisata selam, usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha wisata snorkeling, usaha wisata tontonan, usaha wisata berenang, dan usaha wisata alam perairan.

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan Kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terdiri atas: a. seluruh Wilayah Kota Makassar; b. seluruh Wilayah Kabupaten Takalar; c. sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) Wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan d. sebagian Wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : a) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan; b) Kawasan Perkotaan Jeneponto Kabupaten Jeneponto; c) Kota Palopo; d) Kawasan Perkotaan Watampone Kabupaten Bone; e) Kawasan Perkotaan Bulukumba Kabupaten Bulukumba; f) Kawasan Perkotaan Barru Kabupaten Barru; dan g) Kota Pare Pare.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bantaeng sebagai ibu kota Kabupaten Bantaeng; b. Kawasan Perkotaan Enrekang sebagai ibu kota Kabupaten Enrekang; c. Kawasan Perkotaan Masamba sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Utara; d. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu; e. Kawasan Perkotaan Malili sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Timur; f. Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai ibu kota Kabupaten Pinrang; g. Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang; h. Kawasan Perkotaan Benteng sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar; i. Kawasan Perkotaan Sinjai sebagai ibu kota Kabupaten Sinjai; j. Kawasan Perkotaan Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten Soppeng; k. Kawasan Perkotaan Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tana Toraja; l. Kawasan Perkotaan Rantepao sebagai ibu kota Kabupaten Toraja Utara; m. Kawasan Perkotaan Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo; n. Kawasan Perkotaan Siwa Kabupaten Wajo; o. Kawasan Perkotaan Batusitanduk Kabupaten Luwu; dan p. Kawasan Perkotaan Palattae Kabupaten Bone.

Tabel II.8.
Arahan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Perkotaan Benteng. Sektor unggulan agrion dustri dan perikanan
2	Bulukumba		Kawasan Perkotaan Bulukumba. Sektor unggulan Agroindustri, Pertanian, Pariwisata dan Perikanan	
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
4	Jeneponto		Kawasan Perkotaan Jeneponto. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
7	Sinjai			Kawasan Sinjai. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
9	Pangkep		Kawasan Perkotaan Pangkejene. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pariwisata	
10	Barru		Kawasan Perkotaan Barru. Sektor unggulan Agroindustri, perikanan, pertanian dan perkebunan	
11	Bone		Kawasan Perkotaan Watampone. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pertanian	
12	Soppeng			Kawasan Perkotaan Watansoppeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
13	Wajo			Kawasan Perkotaan Sengkang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Siwa Sektor Unggulan
14	Sidrap			Kawasan Perkotaan Pangkajene. Sektor unggulan perdagangan dan jasa

No.	Kabupaten/ Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
15	Pinrang			Kawasan Perkotaan Pinrang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
16	Enrekang			Kawasan Perkotaan Enrekang. Sektor unggulan pertanian dan perdagangan dan jasa
17	Luwu			Kawasan Perkotaan Batusitanduk. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Belopa Sektor Unggulan
18	Tana Toraja			Kawasan Perkotaan Makale. Sektor unggulan perdagangan dan jasa dan pariwisata
19	Luwu Utara			Kawasan Perkotaan Masamba. Sektor unggulan Agropolitan dan Agroindustri
20	Luwu Timur			Kawasan Perkotaan Malili. Sektor unggulan agroindustri
21	Toraja Utara			Kawasan Perkotaan Rantepao Sektor Unggulan Perdagangan dan Jasa
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
23	Pare Pare		Parepare. Sektor unggulan Agroindustri, Perdagangan dan Jasa	
24	Palopo		Palopo. Sektor unggulan Agroindustri, Perkebunan, Pertanian	

Sumber : RTRWN dan Revisi RTRWP Sulawesi Selatan

2.1.1.4 KONDISI DEMOGRAFI

Peningkatan jumlah penduduk hampir terjadi pada tiap-tiap wilayah di Sulawsi Selatan. Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2023 ada 13 kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk di atas laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 3 kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode tersebut yang dicapai oleh Toraja Utara sebesar 1,68 persen, Gowa dan Parepare sebesar 1,65 persen. Sedangkan 3 kabupaten yang mengalami laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Soppeng sebesar 0,47 persen, Barru sebesar 0,69 persen, dan Wajo sebesar 0,71 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.9.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kepulauan Selayar	134.286	137.071	137.974	139.145	140.312	1,08

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
2	Bulukumba	418.627	437.607	440.090	443.292	446.468	1,05
3	Bantaeng	187.472	196.716	197.886	199.399	200.900	1,18
4	Jeneponto	363.755	401.610	405.508	410.639	415.792	1,15
5	Takalar	295.078	300.853	302.695	305.077	307.445	1,43
6	Gowa	761.491	765.836	773.315	783.167	793.061	1,65
7	Sinjai	243.323	259.478	261.366	263.827	266.282	1,12
8	Maros	351.649	391.774	396.924	403.774	410.699	1,48
9	Pangkajene dan Kepulauan	334.597	345.775	348.230	351.426	354.614	1,03
10	Barru	173.965	184.452	185.525	186.910	188.285	0,69
11	Bone	753.694	801.775	806.750	813.188	819.590	0,96
12	Soppeng	228.686	235.167	235.574	236.049	236.498	0,47
13	Wajo	402.323	379.079	379.396	379.706	379.975	0,71
14	Sidenreng Rappang	298.842	319.990	323.194	327.416	331.660	0,89
15	Pinrang	376.784	403.994	407.371	411.795	416.223	1,36
16	Enrekang	206.881	225.172	227.520	230.622	233.739	1,50
17	Luwu	363.754	365.608	367.454	369.820	372.161	1,35
18	Tana Toraja	236.255	280.794	285.179	291.046	297.002	1,11
19	Luwu Utara	313.264	322.919	325.052	327.820	330.576	1,21
20	Luwu Timur	294.288	296.741	300.511	305.521	310.582	1,43
21	Toraja Utara	233.603	261.086	264.145	268.198	272.286	1,68
22	Makassar	1.521.091	1.423.877	1.427.619	1.432.189	1.436.626	0,79
23	Pare Pare	144.446	151.454	152.922	154.854	156.795	1,65
24	Palopo	181.395	184.681	187.331	190.867	194.448	1,57
Sulawesi Selatan		**8.819.549**	**9.073.509**	**9.139.531**	**9.225.747**	**9.312.019**	**1,15**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 98,37. Angka ini mengandung arti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sekitar 98 hingga 99 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk laki-laki yang berdomisili di Sulawesi Selatan lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Untuk rasio jenis kelamin berdasarkan kabupaten/kota, terdapat 6 kabupaten yang memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100 yang berarti di wilayah tersebut penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuannya yaitu di kabupaten Luwu Timur (106,37), Tana Toraja (105,31), dan Toraja Utara (104,22), Enrekang (103,28), Luwu Utara (101,9), dan Luwu (101,25). Sementara itu, tiga kabupaten dengan rasio jenis kelamin paling kecil adalah Soppeng (93,60), Wajo (94,70), dan Bulukumba (95,45). Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.10.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2023			
		Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Kepulauan Selayar	69.907	72.193	142.100	96,83

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2023			
		Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
2	Bulukumba	230.557	241.131	471.688	95,61
3	Bantaeng	104.602	107.021	211.623	97,74
4	Jeneponto	207.496	212.627	420.123	97,59
5	Takalar	159.339	166.705	326.044	95,58
6	Gowa	396.130	403.869	799.999	98,08
7	Sinjai	135.661	137.898	273.559	98,38
8	Maros	198.708	200.158	398.866	99,28
9	Pangkajene dan Kepulauan	175.700	182.146	357.846	96,46
10	Barru	95.571	98.972	194.543	96,56
11	Bone	400.508	420.002	820.510	95,36
12	Soppeng	116.455	124.500	240.955	93,54
13	Wajo	198.382	209.491	407.873	94,7
14	Sidenreng Rappang	160.986	165.344	326.330	97,36
15	Pinrang	206.252	211.680	417.932	97,44
16	Enrekang	117.519	113.782	231.301	103,28
17	Luwu	191.523	189.156	380.679	101,25
18	Tana Toraja	132.284	125.617	257.901	105,31
19	Luwu Utara	168.133	164.994	333.127	101,9
20	Luwu Timur	161.542	151.862	313.404	106,37
21	Toraja Utara	133.529	128.123	261.652	104,22
22	Makassar	732.391	742.002	1.474.393	98,7
23	Pare Pare	79.753	80.556	160.309	99
24	Palopo	88.693	88.833	177.526	99,84
Sulawesi Selatan		**4.661.621**	**4.738.662**	**9.400.283**	**98,37**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

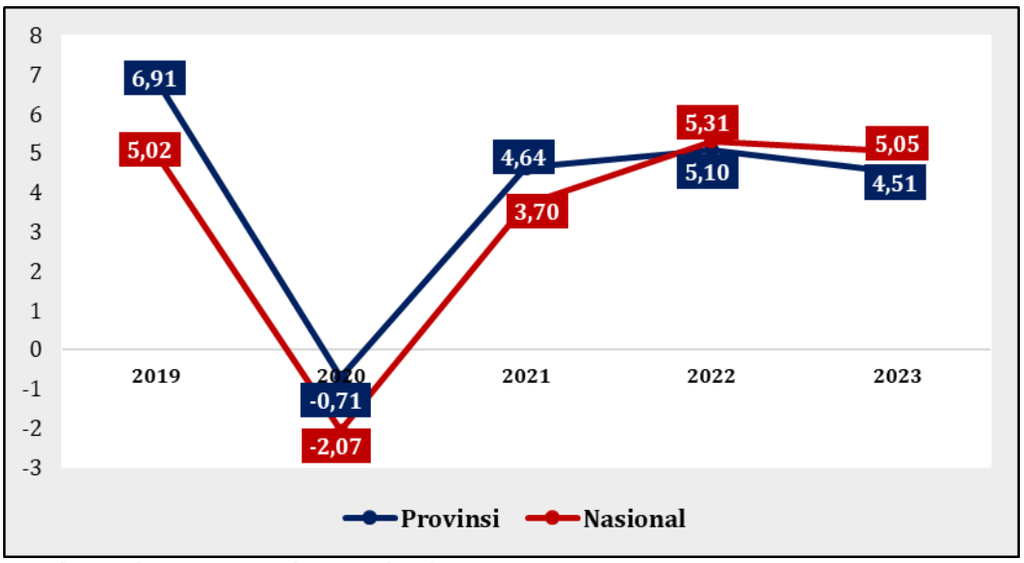
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 13,63 persen; disusul Jasa Lainnya sebesar 11,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,28 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,63 persen.

Grafik II.1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

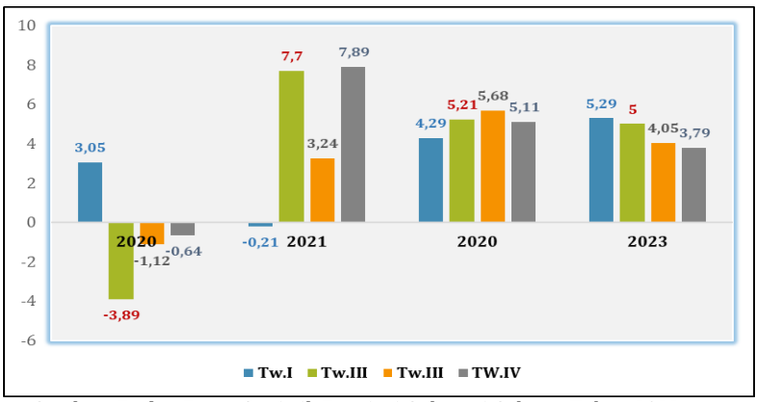
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan selama dua tahun terakhir berada dibawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup berat karena faktor cuaca yang ekstrem sangat mempengaruhi Pertanian Sulawesi Selatan. Hantaman banjir di awal tahun dan Elnino yang berkepanjangan membuat sejumlah produksi pertanian mengalami penurunan produksi, seperti komoditi tanaman pangan hingga harga perikanan yang anjlok akibat faktor cuaca tersebut.

Tabel II.11.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Sektor Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,78	-0,71	6,38	2,57	0,09
b	Pertambangan dan Penggalian	2,68	0,54	-0,59	0,32	13,63
c	Industri Pengolahan	9,92	-4,57	3,02	9,73	4,26
d	Pengadaan Listrik dan Gas	6,21	2,59	10,87	14,69	8,63
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	6,61	4,07	6,48	2,94
f	Konstruksi	8,92	1,56	4,14	1,59	5,20
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	9,04	-3,07	6,5	6,55	4,75
h	Transportasi dan Pergudangan	1,74	-21,46	5,17	21,20	8,54
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,42	-13,68	2,96	17,74	6,61
j	Informasi dan Komunikasi	10,99	10,84	6,39	5,25	6,86
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	4	2,43	1,14	1,15	2,91
l	Real Estat	5,42	3,79	2,58	3,86	5,02
m,n	Jasa Perusahaan	10,53	-10,05	6,23	14,16	9,28
o	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	9,98	-0,04	2,92	1,99	3,36
P	Jasa Pendidikan	6,93	5,73	3,67	2,83	2,79
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	10,06	7,77	8,64	7,33
r,s,t,u	Jasa Lainnya	9,73	-12,02	7,56	9,56	11,22
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**6,91**	**-0,71**	**4,64**	**5,10**	**4,51**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Grafik II.2.
Pertumbuhan Ekonomi (y on y)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y on y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen. Sebanyak 14 Kategori Lapangan Usaha tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha kategori Jasa Lainnya sebesar 12,56 persen. Selanjutnya kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,26 persen. Posisi ketiga dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,56 persen; posisi ke empat Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,58 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di posisi ke lima tumbuh sebesar 7,14 persen. Sementara itu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi tertinggi sebesar -5,91 persen dimana kemarau yang melanda Sulawesi Selatan menyebabkan beberapa wilayah mengalami krisis air.

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2023 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp.377,16 Triliun tumbuh sebesar Rp.16,26 Triliun. Nilai tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.72,23 Triliun, mengalami peningkatan dari tahun 2922 sebesar 0,07 poin. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.12.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHK (Triliun Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	66,62	66,14	70,37	72,16	72,23
Pertambangan dan Penggalian	17,24	17,33	17,23	17,28	19,64
Industri Pengolahan	44,83	42,78	44,07	48,36	50,43
Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,32	0,35	0,41	0,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	0,39	0,41	0,44	0,45
Konstruksi	41,23	41,88	43,61	44,30	46,61
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	51,38	49,8	53,04	56,5	59,19
Transportasi dan Pergudangan	11,98	9,41	9,9	12,00	13,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,91	4,24	4,36	5,14	5,47
Informasi dan Komunikasi	23,34	25,87	27,52	28,97	30,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,19	11,46	11,59	11,72	12,06
Real Estate	11,28	11,7	12,01	12,47	13,09

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHK (Triliun Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Perusahaan	1,51	1,36	1,44	1,64	1,80
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	14,42	14,42	14,84	15,13	15,64
Jasa Pendidikan	18,41	19,47	20,18	20,75	21,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,71	7,38	7,96	8,64	9,28
Jasa Lainnya	4,79	4,22	4,53	4,97	5,52
Total PDRB (ADHK)	**330,51**	**328,15**	**343,40**	**360,90**	**377,16**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2023 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mampu memberikan nilai tambah sebesar Rp. 652,57 Triliun dibandingkan dengan tahun 2022 tumbuh sebesar sebesar Rp.47,42 Triliun. Sejalan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan, kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.13.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107,66	109,46	122,97	133,92	141,55
Pertambangan dan Galian	23,3	23,54	25,9	30,88	33,49
Industri Pengolahan	66,43	64,32	68,14	78,00	83,83
Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,32	0,37	0,43	0,48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,48	0,51	0,54	0,59	0,62
Konstruksi	71,16	72,42	78,56	85,23	92,44
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	74,62	72,98	79,49	88,60	95,89
Transportasi dan Pergudangan	21,21	15,48	16,74	23,91	29,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	6,30	6,56	7,99	8,72
Informasi dan Komunikasi	25,49	28,31	30,3	32,35	34,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	18,43	18,91	19,79	21,67	23,01
Real Estate	18,41	19,21	19,75	21,12	22,52
Jasa Perusahaan	2,37	2,18	2,35	2,81	3,19
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	23,33	23,75	24,67	24,94	26,17
Jasa Pendidikan	26,54	28,24	29,21	30,61	32,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,16	11,64	12,8	14,05	15,35
Jasa Lainnya	7,29	6,48	7,07	8,05	9,21
Total Nilai PDRB	**504,32**	**504,06**	**545,17**	**605,14**	**652,57**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,69 persen) menurun dari tahun 2022 sebesar -0,44 poin persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,69 persen) meningkat

0,05 poin persen dari tahun 2022; Konstruksi (14,17 persen) meningkat 0,09 poin persen dari tahun 2022; serta Industri Pengolahan (12,85 persen) menurun -0,04 poin persen dari tahun 2022. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,33 persen.

Tabel II.14.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,35	21,72	22,55	22,13	21,69
Pertambangan dan Galian	4,62	4,67	4,75	5,10	5,13
Industri Pengolahan	13,17	12,76	12,5	12,89	12,85
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09
Konstruksi	14,11	14,37	14,41	14,08	14,17
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,8	14,48	14,58	14,64	14,69
Transportasi dan Pergudangan	4,21	3,07	3,07	3,95	4,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,25	1,2	1,32	1,34
Informasi dan Komunikasi	5,05	5,62	5,56	5,35	5,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,75	3,63	3,58	3,53
Real Estate	3,65	3,81	3,62	3,49	3,45
Jasa Perusahaan	0,47	0,43	0,43	0,46	0,49
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	4,63	4,71	4,53	4,12	4,01
Jasa Pendidikan	5,26	5,6	5,36	5,06	4,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,02	2,31	2,35	2,32	2,35
Jasa Lainnya	1,45	1,29	1,3	1,33	1,41
Total Kontribusi PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.1.2. LAJU INFLASI

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, nainya harga barang dan jas tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi nasional sejak tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan, namun laju inflasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022. Pada Desember 2023, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasi year on year sebesar 2,81 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) sebesar 117,49 dari 5 kota IHK tercatat seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) mengalami inflasi year on year. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Makassar sebesar 2,89 persen sedangkan inflasi year on year terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 2,21 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami kenaikan indeks harga yaitu sebesar 1,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga

sebesar 0,12 persen; kelompok transportasi sebesar 1,19 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi (y-on-y) pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan kacang panjang. Gambaran perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.15.
Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019-2023

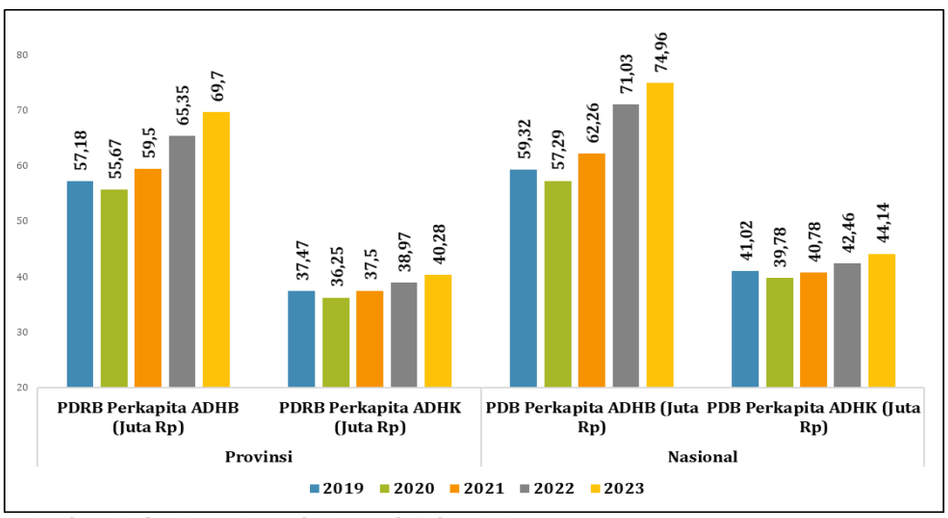
Laju Inflasi	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	%	2,35	2,04	2,40	5,77	2,81
Nasional	%	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

2.2.1.3. PDRB Perkapita

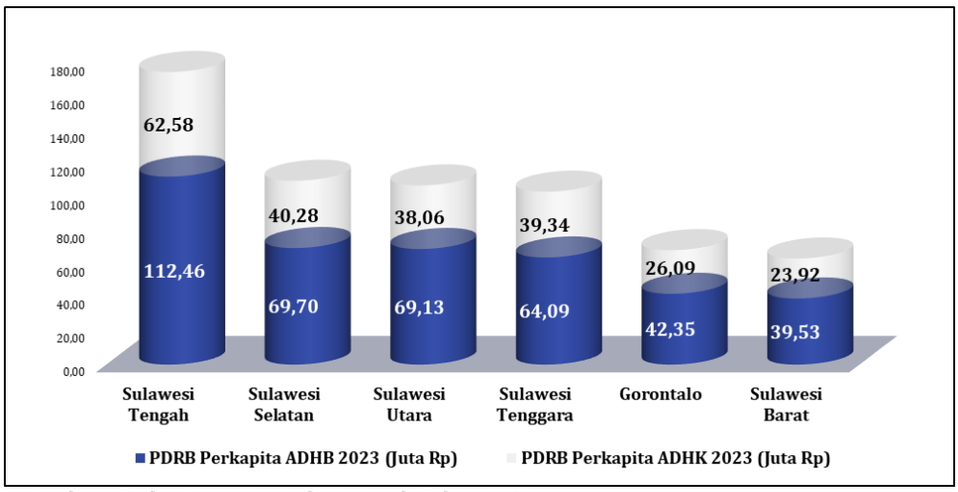
Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 652,57 Triliun Rupiah dan PDRB Perkapita mencapai 69,70 Juta Rupiah. Perbandingan PDRB Perkapita dan PDB Nasional tahun 2019 hingga 2023 selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.3.
Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan
PDB Perkapita Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Grafik II.4.
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK
Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

PDRB Perkapita (ADHK) Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi pada tahun 2023 menduduki peringkat kedua setelah Sulawesi Tengah.

2.2.1.4. GINI RATIO

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,377. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 akan tetapi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,377. Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,386, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,378 tetapi turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,324 dan juga naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,336. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.16.
Perkembangan Indeks Gini
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

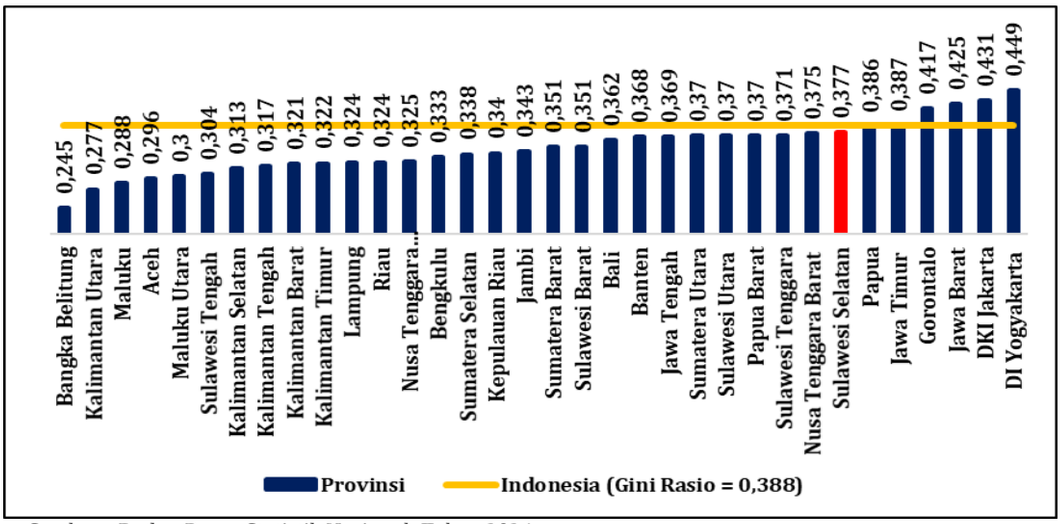
Indeks Gini	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	Maret 2023
Perkotaan	Indeks	0,393	0,384	0,387	0,378	0,386
Perdesaan	Indeks	0,354	0,352	0,334	0,324	0,339
Perkotaan + Perdesaan	Indeks	0,391	0,382	0,377	0,365	0,377

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,449. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,245. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,388, Gini Ratio Sulawesi Selatan masih berada dibawah Nasional (0,388). Terdapat enam provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi daripada Gini Ratio Sulawesi Selatan yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425),

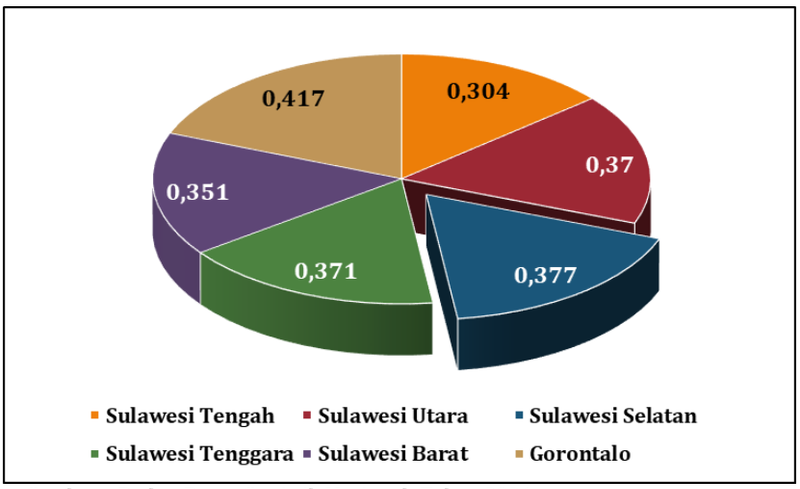
Gorontalo (0,417), Jawa Timur (0,387), dan Papua (0,386). Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.5.
Perbandingan Indeks Gini
Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Maret 2023



Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2024

Diagram II. 2.
Perbandingan Indeks Gini Wilayah Regional Sulawesi
Maret 2023



Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2024

Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi, capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan masih lebih baik daripada Sulawesi Tenggara (0,371), Sulawesi Barat (0,351), dan Gorontalo (0,417).

2.2.1.5. INDEKS WILLIAMSON

Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pendekatan yang digunakan mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nilai Indeks Williamson tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren penurunan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 0,567 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,01 poin. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan membuka akses wilayah terisolir di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu sektor pendorong yang dapat menurunkan Indeks Williamson, data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.17.
Indeks Williamson
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Williamson	Nilai	0,639	0,620	0,568	0,567	0,570

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.6.TINGKAT KEMISKINAN

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, meningkat 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat 0,07 persen poin terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 4,98 persen, naik menjadi 5,01 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 11,81 persen, naik menjadi 11,91 persen pada Maret 2023. Dibandingkan dengan Nasional selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren menurun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan masih lebih rendah meskipun mengalami tren meningkat.

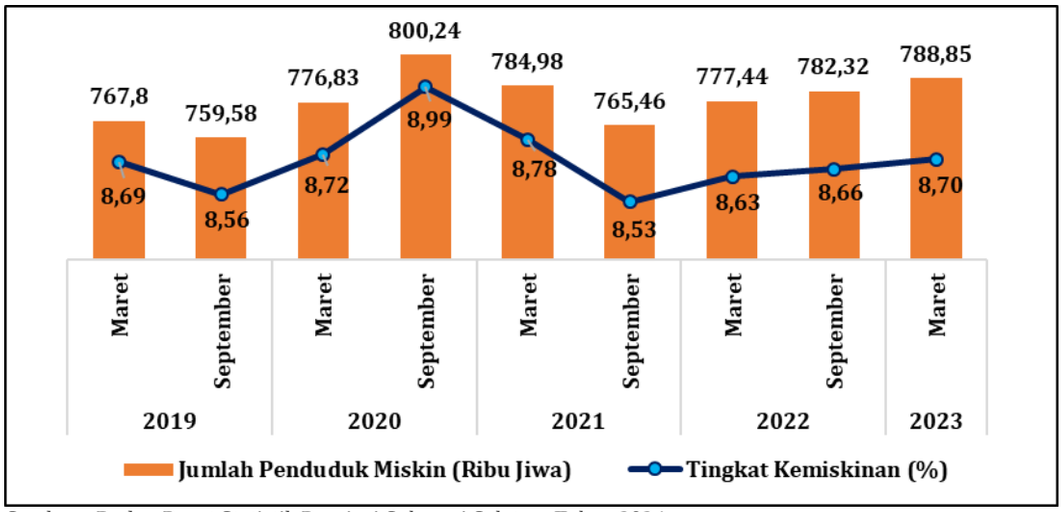
Tabel II.18.
Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2019	2020	2021	2022	Maret 2023
Sulawesi Selatan	8,56	8,99	8,53	8,66	8,70
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami tren meningkat dimana jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 788,85 ribu orang, meningkat 6,5 ribu orang terhadap September 2022 dan meningkat 11,41 ribu orang terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2023 mencapai 788,85 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 6,5 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 11,41 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 8,70 persen, naik 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan terhadap Maret 2022 juga mengalami kenaikan 0,06 persen poin. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.6.
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Di tingkat regional Sulawesi persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Gorontalo, yaitu sebesar 15,15 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 7,38 persen. Dari sisi jumlah, penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Sulawesi Selatan (788,85 ribu orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat (164,14 ribu orang). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

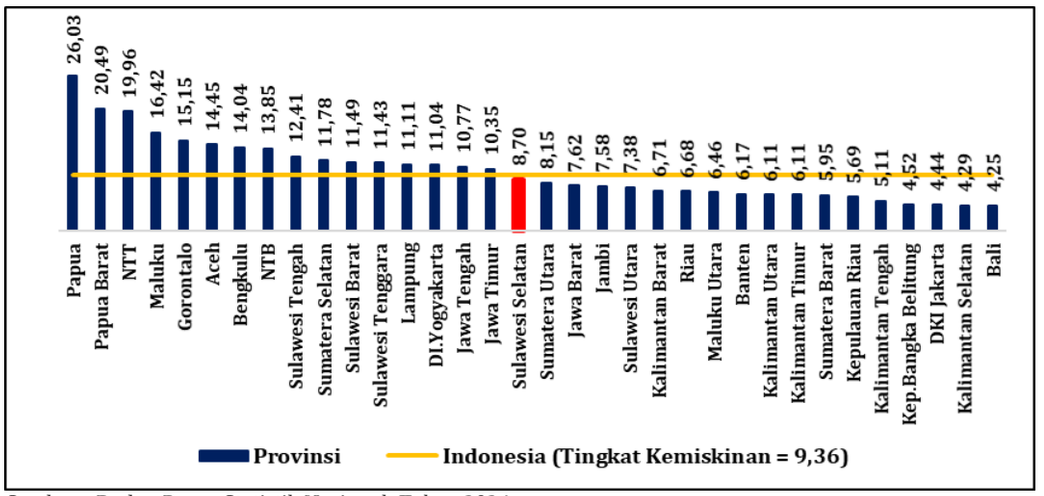
Tabel II.19.
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2023
Wilayah Regional Sulawesi

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Gorontalo	4,47	23,73	15,15	24,12	159,60	183,71
Sulawesi Tengah	8,90	14,09	12,41	92,11	303,55	395,66
Sulawesi Barat	9,08	12,10	11,49	26,33	137,81	164,14
Sulawesi Tenggara	7,40	13,94	11,43	79,89	241,64	321,53
Sulawesi Selatan	5,01	11,91	8,70	211,48	577,37	788,85
Sulawesi Utara	4,91	10,38	7,38	69,03	119,97	189,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain di Indonesia pada periode Maret 2023 jika dibandingkan dengan wilayah setaranya pada level menengah menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibanding 5 provinsi lainnya, namun masih lebih baik dibanding Provinsi Sulawesi Tenggara, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI.Yogyakarta. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

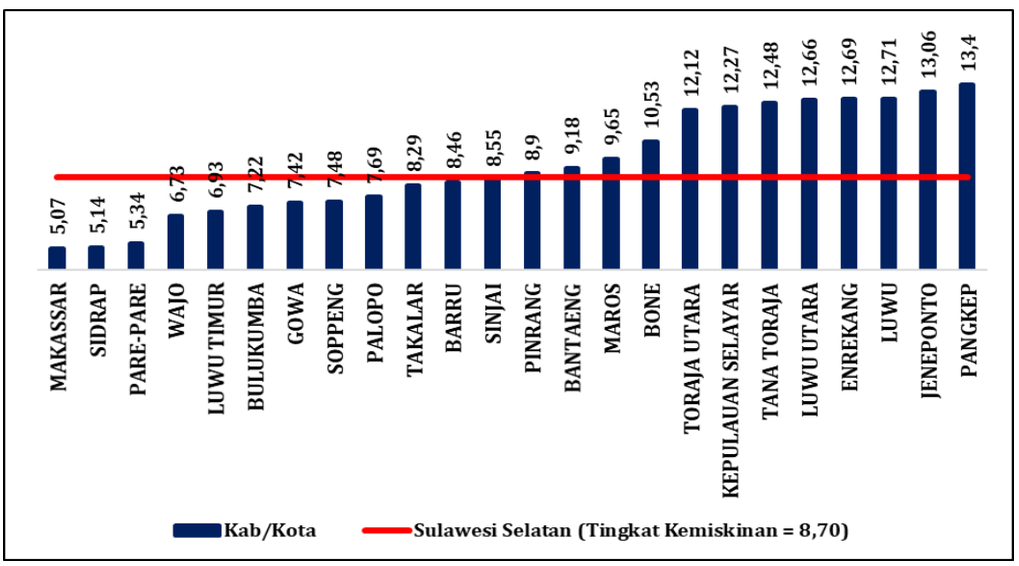
Grafik II.7.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Maret 2023



Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2024

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tertinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 13,4 persen dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 46,06 jiwa mengalami penurunan dari tahun 2022. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah di Kota Makassar dengan jumlah penduduk miskin 80,32 ribu jiwa mengalami peningkatan dari tahun 2022. Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.8.
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Periode Maret 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 436.025,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,09 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 9,07 persen. Perkembangan garis kemiskinan tahun 2018 hingga Maret 2023 yang merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan menunjukkan tren peningkatan. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.20.
Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2023

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	Maret 2023
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	354.770	375.463	403.751	443.717	458.859
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	331.063	350.791	368.465	405.213	416.532
Total	Rupiah/ Kapita/Bulan	341.555	362.031	384.455	422.952	436.025

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 20,21 persen di perkotaan dan 24,93 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan yaitu 12,30 persen di perkotaan dan 12,78 persen di perdesaan. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras sebesar 3,28 persen di perkotaan dan 3,30 persen di perdesaan, bandeng sebesar 3,22 persen di perkotaan dan 3,00 persen di perdesaan, tongkol/tuna/cakalang sebesar 2,41 persen di perkotaan dan 2,37 di perdesaan, mie instan sebesar 2,32 persen di perkotaan dan 2,24 persen di perdesaan. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Tabel II.21.
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	Maret 2023
Sulawesi Selatan	%	91,44	91,01	91,47	91,34	91,30
Nasional	%	90,78	89,81	90,29	90,43	90,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,57 naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,50. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,71, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,31. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.22.
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2019	2020	2021	2022	Maret 2023
Perkotaan	0,81	0,81	0,63	0,76	0,71
Perdesaan	2,26	2,32	2,04	2,13	2,31
Total	1,63	1,65	1,40	1,50	1,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,35 menjadi 0,41. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,16, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,62. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23.
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2019	2020	2021	2022	Maret 2023
Perkotaan	0,2	0,18	0,14	0,16	0,16
Perdesaan	0,62	0,68	0,5	0,52	0,62
Total	0,43	0,46	0,34	0,35	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatanl, Tahun 2024

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022 higga Maret 2023 antara lain:

1. Pada periode Maret 2023 terhadap September 2022 terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen secara umum sebesar 1,95 persen. Sementara kenaikan harga komoditi makanan sebesar 5,15 persen di periode yang sama (September 2022-Maret 2023). Tingkat inflasi Maret secara y-o-y (Maret 2023 terhadap Maret 2022) sebesar 5,86 persen.
2. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen (y-on-y). Namun pada sektor padat karya seperti Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan, Jasa Pendidikan, Transportasi, dan lainnya tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya.
3. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -5,57 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar -19,49 persen.
4. Perkembangan indikator makro selama Bulan Maret 2023 dibandingkan dengan Bulan September 2022 menunjukkan penurunan dengan mengikuti pola musiman yang biasanya berjalan. Indikator makro mengarah pada penurunan luas panen sebesar sekitar 13 ribu hektar diikuti dengan produksi padi yang menurun sebesar 108,1 ribu ton GKG.

5. Persentase setengah pengangguran naik 0,29 persen poin (6,84 persen menjadi 7,13 persen), sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 2,49 persen poin (30,49 persen menjadi 32,98 persen) pada Februari 2023 jika dibandingkan Februari 2022.

2.2.1.7. KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana pada tahun 2022 sebesar 22,1 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -1,99 persen. Capaian kontribusi sektor pertanian khususnya pada komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2022 kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB sebesar 5,91 mengalami penurunan sebesar -7,44 persen dari tahun 2021 kondisi ini dipengaruhi oleh gagal panen dibeberapa lokasi di Provinsi Sulawesi selatan akibat bencana banjir pada sentra-sentra produksi pangan seperti Kabupaten Soppeng, Wajo dan Sidrap. Capaian kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,49 persen. Kontribusi jenis komoditas yang mengalami peningkatan yaitu komoditas kelapa sawit (96.747 ton), kelapa (73.985 ton), karet (3.829 ton), dan pala (607 ton). Sedangkan komoditas kopi (30.007 ton), kakao (89.242 ton), dan tebu (5.042 ton), jambu mete (9.508 ton), lada (5.236 ton), dan tembakau (1.118 ton) mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.24.
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	21,35	21,72	22,54	22,13	21,69
Kontribusi Sektor Pertanian (Tamanan Pangan) Terhadap PDRB	%	6,34	6,50	6,45	6,00	6,12
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	3,88	3,94	4,07	4,05	4,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.1.8. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB

Pencapaian tertinggi kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB periode tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,07 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dengan capaian 0,05 persen pada tahun 2022. Pada sektor kehutanan upaya yang ditempuh dengan mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan (ekowisata).

Tabel II.25.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.1.9. KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,39 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB dari sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 19,35 persen dari tahun 2020 hingga 2022. Selain itu peningkatan kontribusi PDRB sub sektor pertambangan bijih logam tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 24,59 persen.

Tabel II.26.
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4,62	4,67	4,75	5,10	5,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.1.10. KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Terkait dengan perikanan semakin banyak jumlah usaha perikanan dan nilai investasinya akan memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Selatan. Kedua faktor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan. Berikut ini dapat dilihat perkembangan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 tahun terakhir.

Tabel II.27.
Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,44	8,53	9,41	9,43	8,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi selatan terus mengalami peningkatan sejak 2019. Realisasi kontribusi PDRB sub

sektor perikanan pada tahun 2023 mencapai target sebesar 153,75 % dan turun 8,79% dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018- 2023 kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan naik dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,88 %.

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebesar 7,85 % tidak seiring dengan nilai PDRB perikanan yang turun sebesar 1,58 % dibandingkan tahun 2022. Perlambatan pertumbuhan PDRB perikanan dipengaruhi penurunan nilai produksi perikanan sebesar 6,21 % yaitu nilai produksi budidaya sebesar 16,37 %. Penyebab turunnya nilai produksi budidaya adalah turunnya nilai produksi rumput laut sebesar 29,35 %. Hal ini disebabkan karena harga rumput laut dipengaruhi oleh harga pasar dan permintaan negara tujuan ekspor.

2.2.1.11. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 persen dengan capaian 14,64 persen pada tahun 2022. Peningkatan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan sebesar 0,51 persen pada tahun 2022 mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Tabel II.28.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	14,80	14,48	14,58	14,64	14.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.1.12. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai 12,9 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sektor industri sendiri terdiri dari 16 jenis industri yang memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap capaian PDRB tahun 2022 dengan capaian tertinggi pada sub sektor industri makanan dan minuman dengan capaian 7,68 persen mengalami pertumbuhan sebesar 4,06 persen dari tahun 2021.

Tabel II.29.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13,17	12,76	12,49	12,9	12.85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.1.13. KONTRIBUSI INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP PDRB SEKTOR INDUSTRI

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri di Sulawesi Selatan di Tahun 2021 mencapai 8,91 persen nilai tersebut belum

mencapai target yang ditetapkan sebesar 9,3 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga berdampak terhadap keterbatasan dan tingginya harga bahan baku, pengurangan tenaga kerja dan pemasaran produk. Tahun 2022 kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 4,5 persen dari tahun 2021 dengan capaian 9,31 persen.

Tabel II.30.
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	%	7,35	7,35	8,91	9,31	7,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.1.14. PERTUMBUHAN PDRB INDUSTRI

Pertumbuhan PDRB sektor industri di Sulawesi Selatan kembali mengalami perbaikan pada tahun 2021, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 4,57 persen pada tahun 2020. Capaian pertumbuhan PDRB sektor industri tahun 2022 mencapai 9,86 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Perbaikan pertumbuhan PDRB sektor industri didorong oleh tiga sub sektor dengan tingkat pertumbuhan positif dan terbesar yang terdiri dari sub sektor industri logam dasar sebesar 136,32 persen sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki sebesar 32,41 persen.

Tabel II.31.
Pertumbuhan PDRB Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan PDRB Industri	%	9,92	-4,57	3,02	9,86	4.26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan dimana sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Sulawesi Selatan sudah berada di level “tinggi”. Selama periode 2020 hingga 2023, IPM Sulawesi Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun, dari 73,08 pada tahun 2020 menjadi 74,60 pada 2023. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir hasil long form Sensus Penduduk 2020. Peningkatan IPM Sulawesi Selatan 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,60 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,20 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,40 persen menjadi 0,31 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 2,01 persen

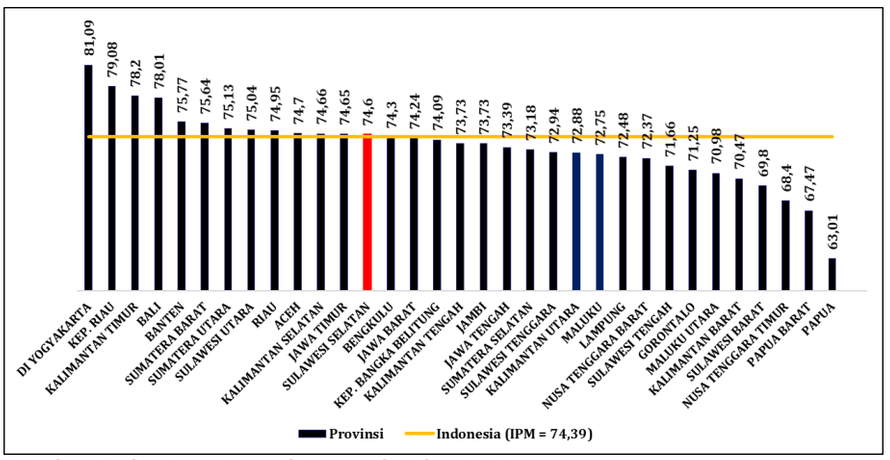
menjadi menjadi 1,51 persen. Adapun Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sama seperti tahun lalu sebesar 0,07 persen.

Tabel II.32.
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sulawesi Selatan dengan Nasional 2019-2023

Wilayah	Capaian				
	Perhitungan Metode Lama	Perhitungan Metode Baru			
	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	71,66	73,08	73,38	73,96	74,60
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Grafik II.9.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2019-2023

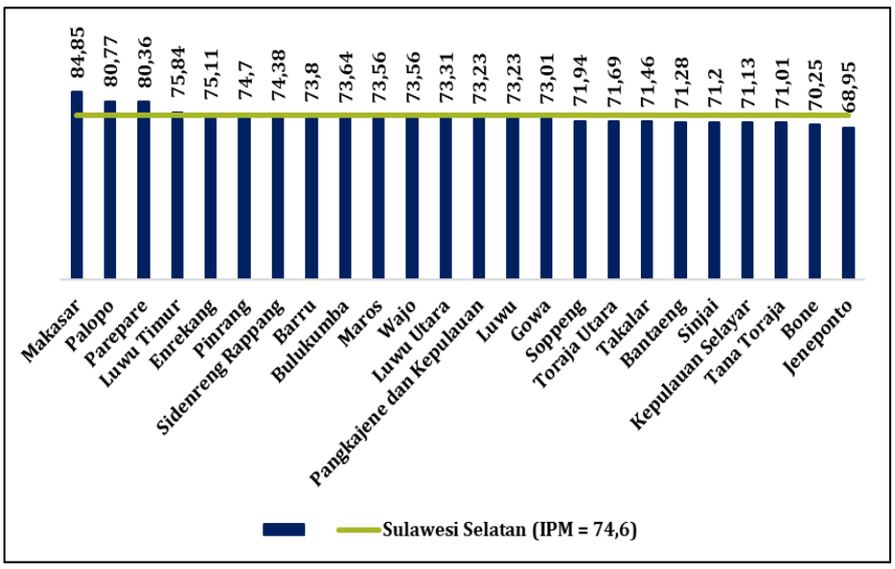


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2023 berada di urutan ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan capaian wilayah setaranya pada level "menengah", capaian IPM Sulawesi Selatan masih lebih baik dari Bengkulu, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Seiring dengan meningkatknya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Pada 2023, status pembangunan manusia "sangat tinggi" dicapai Kota Makassar, Palopo, dan Parepare. Status pembangunan manusia di Kota Pare-pare meningkat dari "tinggi" menjadi "sangat tinggi" dengan capaian IPM 80,36. Selain di Kota pare-pare, selama kurun waktu 2020-2023 peningkatan status dari "tinggi" ke "sangat tinggi" juga dialami Kota Palopo sejak tahun 2022. Dengan peningkatan status pembangunan tersebut, sejumlah 3 kota dengan status pembangunan manusia "sangat tinggi" (IPM≥80).

Grafik II.10.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Pertumbuhan IPM menggambarkan kecepatan pembangunan manusia pada suatu wilayah. Selama periode 2022- 2023, Kabupaten Soppeng memiliki pertumbuhan IPM paling cepat sebesar 1,25 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bantaeng sebesar 1,24 persen, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukumba masing-masing sebesar 1,22 persen. Secara keseluruhan ada 15 kabupaten yang pertumbuhan IPM-nya lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah dengan pertumbuhan IPM terendah terdapat di Kota Makassar, Kab. Luwu Timur dan Kota Parepare dengan pertumbuhan pada kisaran 0,47 hingga 0,61 persen.

Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.33.
IPM Sulawesi Selatan Menurut Dimensi Penyusunnya
Tahun 2019-2023

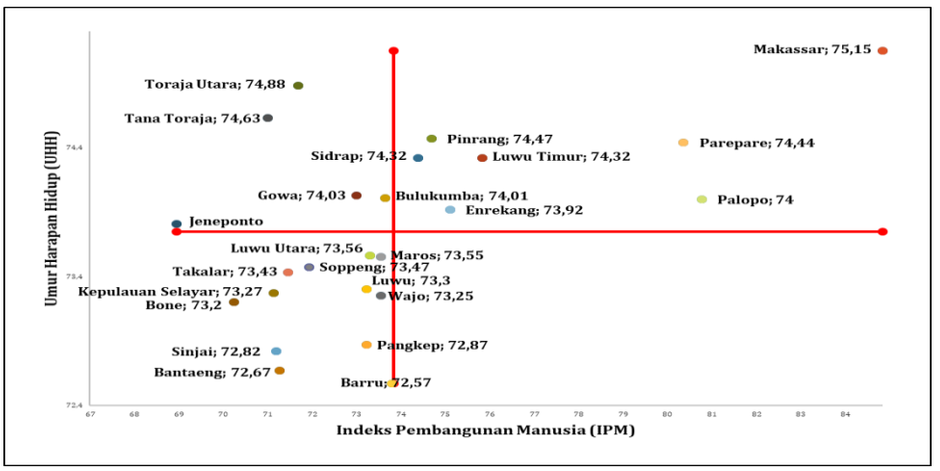
Komponen	Satuan	Capaian				
		Perhitungan Metode Lama	Perhitungan Metode Baru			
		2019	2020	2021	2022	2023
Umur Panjang dan Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,43	73,02	73,11	73,40	73,63
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,36	13,45	13,52	13,53	13,54
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,26	8,38	8,46	8,63	8,76
Pengeluaran Perkapita (ADHK)	Ribu Rupiah	11.118	11.079	11.184	11.430	11.841
IPM	**Nilai**	**71.66**	**73,08**	**73,38**	**73,96**	**74,60**

Sumber :Badan Pusat Statitik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana

tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau Life Expectancy didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2020–2023 cenderung stabil pada kisaran 73 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,61 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sulawesi Selatan adalah 73,02 tahun, dan pada tahun 2023 mencapai 73,63 tahun. UHH 2023 meningkat 0,23 tahun atau 0,31 persen dibanding tahun sebelumnya, mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan di tahun 2022 yang meningkat 0,40 persen atau 0,29 tahun.

Grafik II.11.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan UHH
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



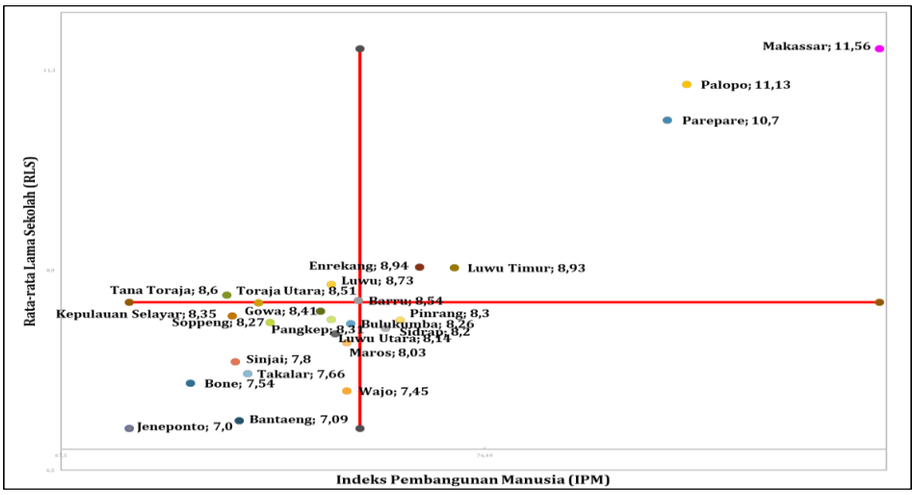
Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Dalam konteks kewilayahan, ada 12 kabupaten/kota yang memiliki UHH lebih tinggi dari UHH Sulawesi Selatan dengan Umur Harapan Hidup tertinggi pada tahun 2023 adalah Makassar (75,15 tahun) dan Toraja Utara (74,88 tahun). Selanjutnya Kabupaten Barru dan Bantaeng mencatatkan UHH terendah bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu dengan pencapaian UHH masing-masing sebesar 72,57 tahun dan 72,67 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi/lama jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Selama periode tahun 2020 hingga 2023 RLS Sulawesi Selatan meningkat 1,49 persen per tahun serta mencapai 8,76 tahun pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,13 tahun atau 1,51 persen mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan adalah selama 8,76 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 3. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 11,56 tahun. Penduduk Makassar rata-rata dapat menempuh pendidikan hingga jenjang SMA kelas 2. Hal ini didukung oleh keberadaan Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan

dan kota terbesar penduduknya di Indonesia bagian tengah dan timur sehingga fasilitas pendidikan dapat dikatakan sudah lebih maju. Kemudian diikuti oleh Kota Palopo (11,13 tahun) dan Kota Parepare (10,7 tahun). Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di ketiga kota ini rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA kelas 2. Sedangkan Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten dengan RLS terendah tahun 2023 di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 7 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 1.

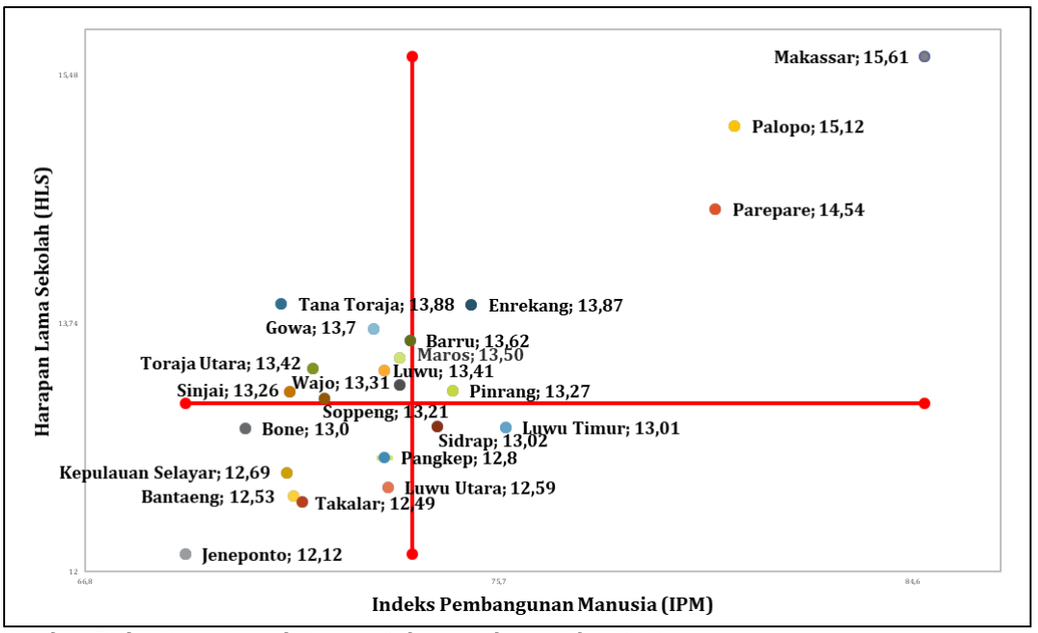
Grafik II.12.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan RLS
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Pada periode tahun 2020-2023, tren Harapan Lama Sekolah mengalami pertumbuhan positif namun dengan tren perlambatan pertumbuhan pada 3 tahun terakhir ini. HLS tumbuh sebesar 0,07 persen atau mengalami pertumbuhan paling rendah sejak tahun 2020. Selama periode tahun 2020 hingga 2023, HLS Sulawesi Selatan rata-rata meningkat 0,22 persen per tahun. HLS Sulawesi Selatan tahun 2023 mencapai 13,54 tahun mengalami peningkatan 0,01 tahun dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan hingga selama 13,54 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II.

Grafik II.13.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan HLS
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

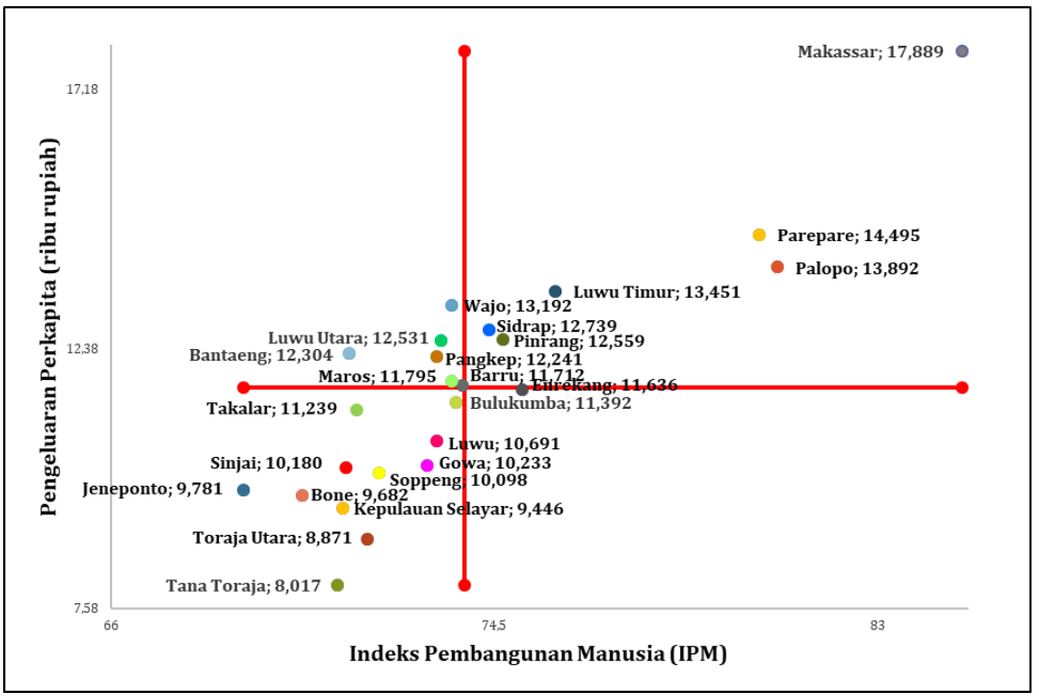


Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jeneponto dan Takalar merupakan dua kabupaten dengan HLS terendah, masing-masing 12,12 tahun dan 12,49 tahun. Angka ini menunjukkan harapan bahwa penduduk umur 7 tahun ke atas akan dapat bersekolah hingga kelas 3 SMA. Sementara itu Kota Makassar, Palopo, dan Parepare memiliki angka HLS tertinggi di Sulawesi Selatan. Kota Makassar dengan HLS 15,61 tahun menggambarkan harapan penduduk berumur 7 tahun ke atas akan dapat menikmati pendidikan rata-rata hingga lulus Diploma III.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2020-2023 mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,35 persen. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan mencapai Rp 11,84 juta per tahun. Capaian ini meningkat 411 ribu rupiah (3,60 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,57 persen per tahun. Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk telah meningkat sebesar Rp 762.000 dari yang sebelumnya Rp 11,08 Juta (2020) menjadi Rp 11,84 juta perkapita per tahun di tahun 2023.

Grafik II.14.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023

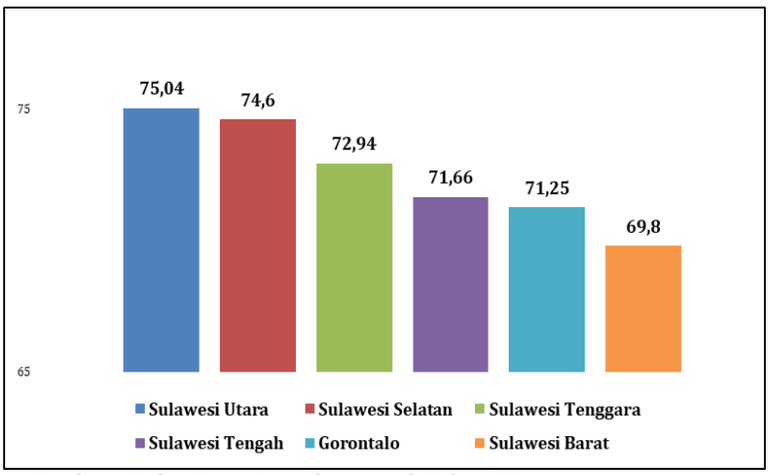


Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Secara umum pengeluaran perkapita disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tren meningkat. Terdapat kesenjangan pengeluaran perkapita disesuaikan antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Daerah dengan pengeluaran perkapita disesuaikan terendah adalah Tana Toraja yaitu sebesar 8,017 juta/kapita/tahun. Sementara itu Makassar memiliki pengeluaran perkapita disesuaikan terbesar yaitu mencapai Rp 17,889 juta/kapita/tahun. Pada tahun 2022, terdapat 10 kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran perkapita disesuaikan lebih tinggi dari nilai provinsi yaitu Kota Makassar, Parepare, Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Wajo, Sidrap, Bantaeng, Pinrang, Luwu Utara, dan Pangkep.

Pulau Sulawesi secara administratif terbagi menjadi 6 Provinsi dengan Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian angka IPM paling tinggi dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya. Adapun Sulawesi Selatan berada di urutan ke 2 dan diurutan selanjutnya adalah provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Masih terdapat ketimpangan pembangunan manusia di Pulau Sulawesi, terdapat 1 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “sedang” yaitu Sulawesi Barat dengan nilai IPM 69,8 (60≤IPM<70) sementara 5 provinsi lainnya sudah berstatus “tinggi” (70≤IPM<80).

Grafik II.15.
Perbandingan IPM Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Perbedaan capaian IPM di pulau Sulawesi disebabkan oleh perbedaan capaian masing-masing komponen pembentuknya. Meski capaian IPM Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, terdapat beberapa komponen seperti Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan yang lebih rendah dibandingkan provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Tabel II.34.
IPM dan Komponen Pembentuk Provinsi Regional Sulawesi
Tahun 2023

Provinsi	UHH LF SP2020 (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	IPM
Sulawesi Utara	73,85	12,96	9,77	11.497	75,04
Sulawesi Tengah	70,66	13,13	8,96	10.149	71,66
Sulawesi Selatan	73,63	13,54	8,76	11.841	74,60
Sulawesi Tenggara	71,79	13,70	9,31	10.117	72,94
Gorontalo	70,50	13,16	8,10	11.069	71,25
Sulawesi Barat	70,76	12,88	8,13	9.718	69,80
Indonesia	**73,93**	**13,15**	**8,77**	**11.899**	**74,90**

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.2.2. INDEKS PENDIDIKAN

Indeks pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS), merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan ratarata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas sudah menempuh masa sekolah selama 8,76 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 2 hingga kelas 3 SMP. Selain itu indikator lainnya dalam dimensi pengetahuan adalah harapan

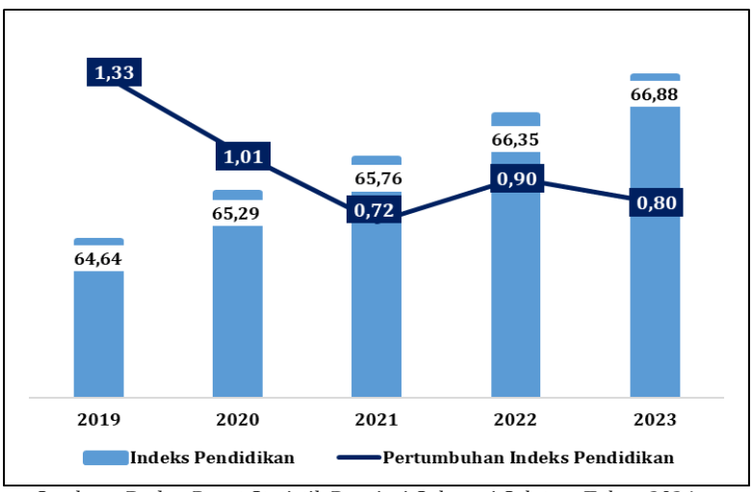
lama sekolah. Rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 13,54 tahun kedepan atau setara dengan menyelesaikan pendidikan tinggi hingga diploma I.

Tabel II.35.
Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
I_{RLS}	Nilai	55,07	55,87	56,40	57,53	58,53
I_{HLS}	Nilai	74,22	74,72	75,11	75,17	75,22
Indeks Pendidikan	Nilai	64,64	65,29	65,76	66,35	66,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Grafik II.16.
Perkembangan Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



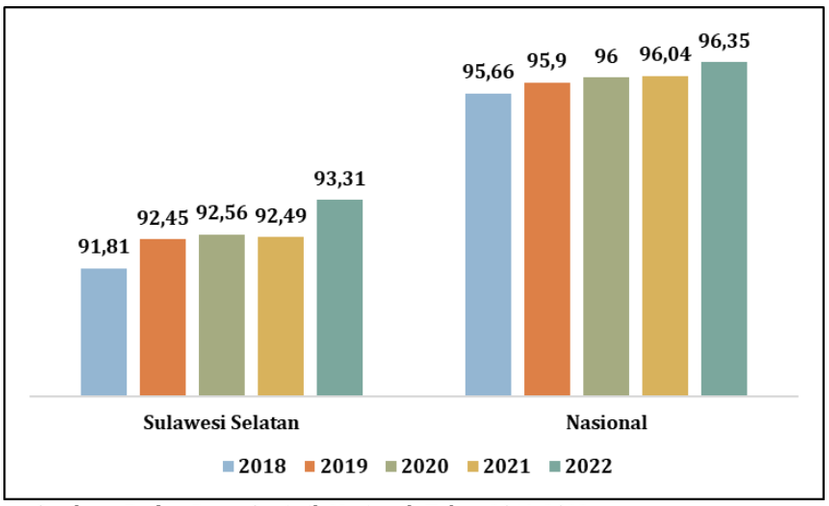
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Indeks pendidikan Provinsi Sulawesi selatan tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan. Namun tahun 2023 pertumbuhan Indeks Pendidikan mengalami perlambatan atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,10 poin.

2.2.2.3. ANGKA MELEK HURUF

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan trend peningkatan namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,16 persen dengan nilai capaian sebesar 92,49 persen. Angka Melek Huruf di Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,89 poin dengan capaian sebesar 93,31 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 6,69 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak dapat membaca dan menulis. Meskipun demikian tahun 2022 merupakan pertumbuhan angka melek huruf tertinggi pada periode tahun 2018 hingga 2022. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.17.
Perkembangan Angka Melek Huruf
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka melek huruf Sulawesi Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Sehingga peningkatan kemampuan baca tulis bagi masyarakat khsususnya yang berusia 15 tahun keatas perlu mendapat perhatian mengingat penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

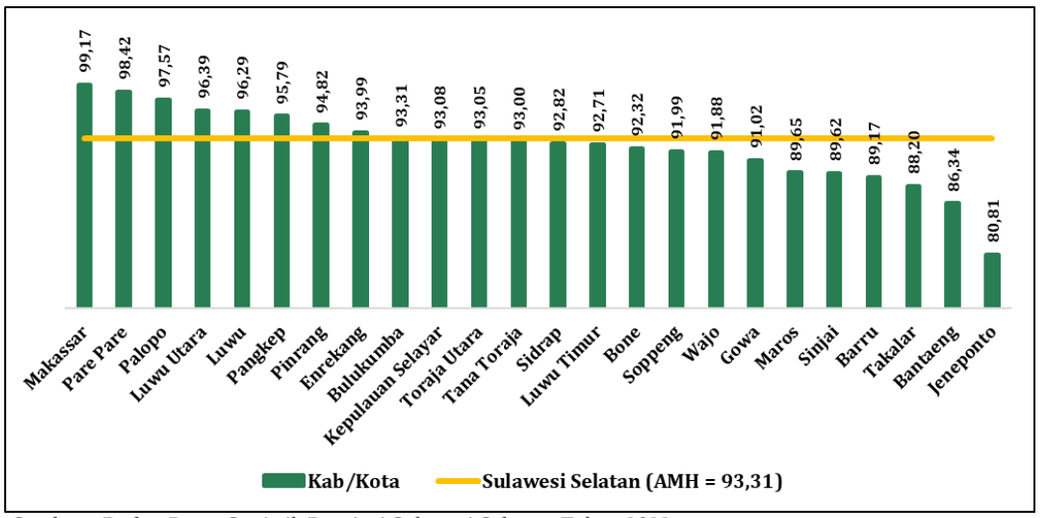
Tabel II.36.
Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Sulawesi Selatan dan Nasional, 2019-2023

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	%	92,45	92,56	92,49	93,31	93.83
Nasional	%	95,9	96	96,04	96,35	96.53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Capaian terendah angka melek huruf pada tahun 2022 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 80,81 persen yang hanya mengalami peningkatan 0,25 poin dari tahun sebelumnya sedangkan capaian tertinggi di Kota Makassar sebesar 99,17 persen dengan peningkatan 0,94 poin dari tahun sebelumnya.

Grafik II.18.
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.4. INDEKS KESEHATAN

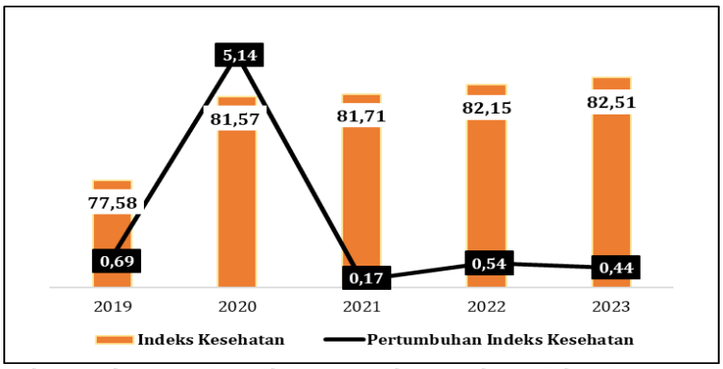
Indeks Kesehatan diukur menggunakan capaian umur harapan hidup dimana dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Indeks Kesehatan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren meningkat seiring dengan peningkatan Umur Harapan Hidup. Saat ini, umur harapan hidup saat lahir di Sulawesi Selatan mencapai 73,63 tahun dengan kata lain bayi yang baru lahir di tahun 2023 diharapkan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 73,63 tahun.

Tabel II.37.
Indeks Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kesehatan	Nilai	77,58	81,57	81,71	82,15	82,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik II.19.
Perkembangan Indeks Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Indeks Kesehatan tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2023 mencapai 82,51 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang diinterpretasikan bahwa anak lahir hidup di Sulawesi Selatan memiliki peluang hidup lebih lama. Peningkatan Indeks Kesehatan menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

2.2.2.5. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Selatan. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 7,15 juta orang, naik sebanyak 259,8 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 4,69 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2,45 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 4,49 juta orang penduduk yang bekerja dan 203,5 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 135,1 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 137,3 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 2,22 ribu orang.

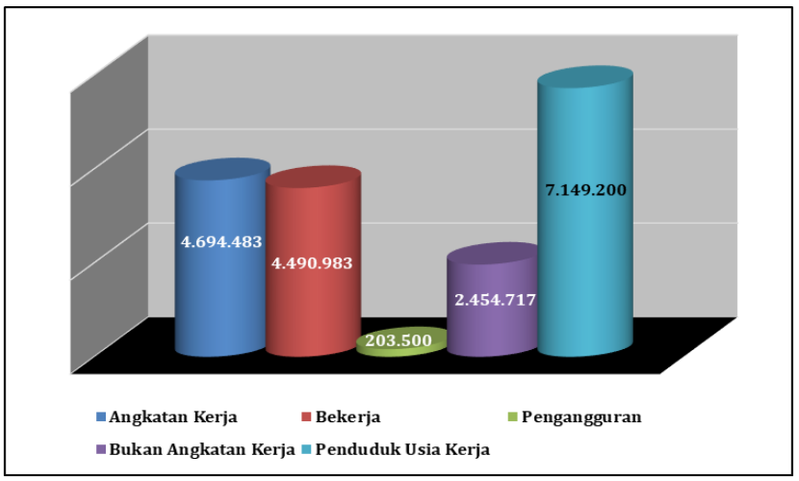
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 63,60 persen, turun 2,58 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 82,22 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 49,62 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,69 persen poin dan 0,85 persen poin.

Tabel II.38.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Periode Agustus)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	Orang	4.030.400	4.280.000	4.412.782	4.559.375	4.694.483
Bekerja	Orang	3.830.096	4.010.000	4.160.433	4.353.650	4.490.983
Pengangguran	Orang	200.304	269.817	252.349	205.725	203.500
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.376.885	2.468.484	2.404.818	2.330.024	2.330.024
Penduduk Usia Kerja	Orang	6.407.285	6.744.921	6.817.600	6.889.399	7.149.200
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,90	63,40	64,73	66,18	63,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

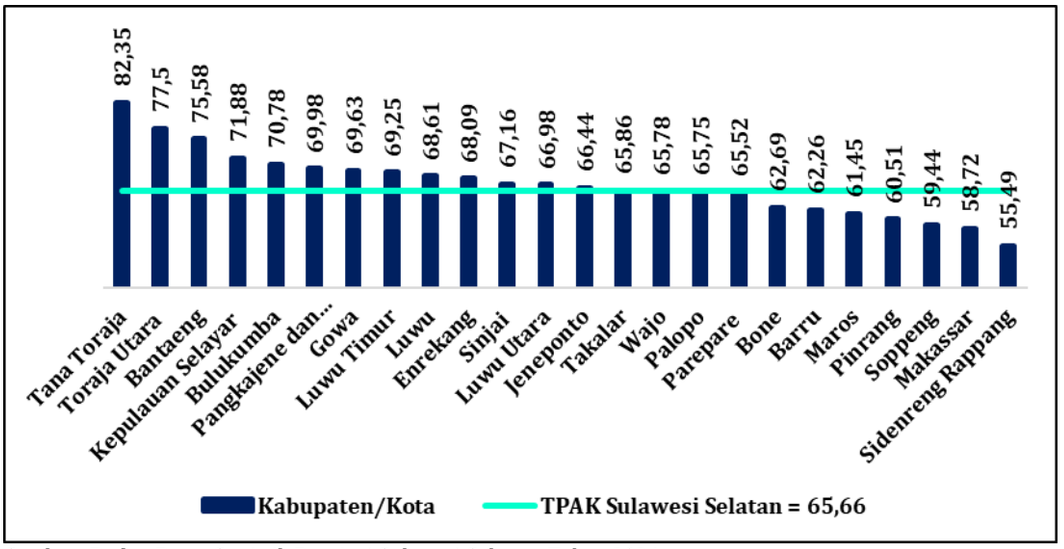
Grafik II.20.
Dimensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada tahun 2023 di Kabupaten Tana Toraja sebesar 82,35 persen mengalami penurunan -2,75 persen persen poin dari tahun 2022. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 55,49 persen poin mengalami penurunan sebesar -2,14 persen poin dari tahun 2022.

Grafik II.21.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.2.6. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,33 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 4,39 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,25 persen. TPT laki-laki turun sebesar 0,52 persen poin dibandingkan Agustus 2022, sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,35 persen poin dibandingkan

Agustus 2022. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,24 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,80 persen). Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,60 persen poin. Sementara itu, TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,89 persen poin.

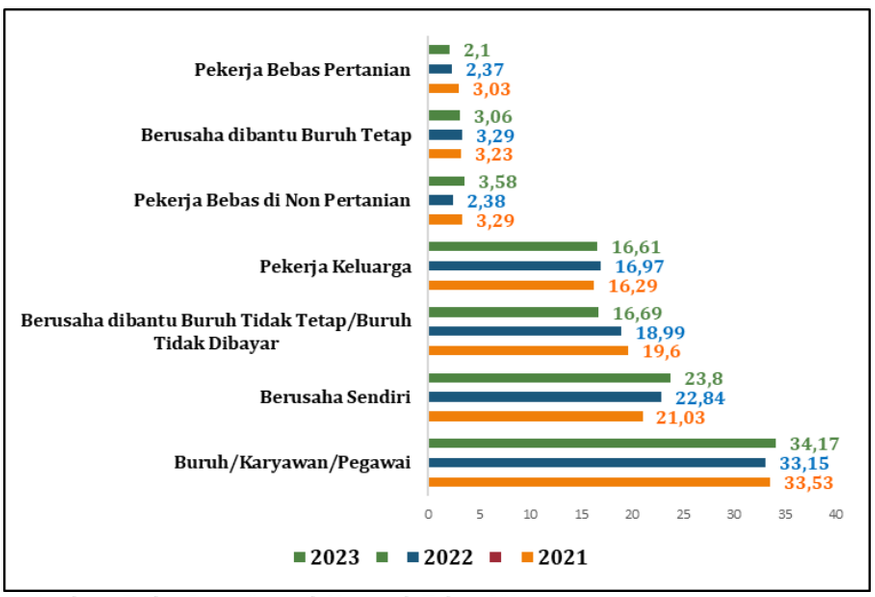
Tabel II.39.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	%	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
Nasional	%	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 4,39 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,25 persen. TPT laki-laki turun sebesar 0,52 persen poin dibandingkan Agustus 2022, sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,24 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,80 persen). Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,60 persen poin. Sementara itu, TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,89 persen poin.

Grafik II.22.
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 2020-2023

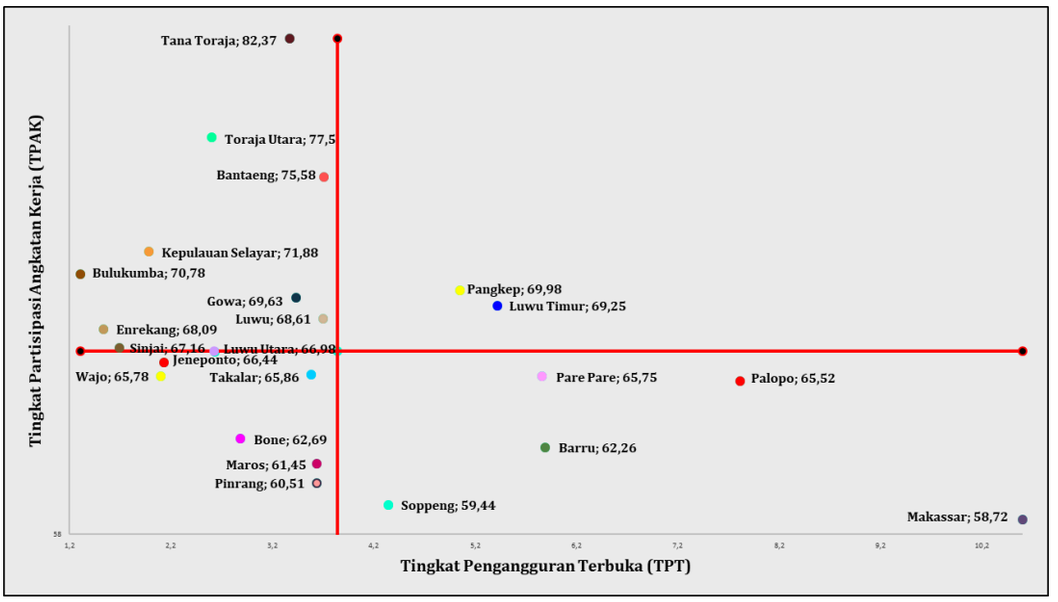


Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,82 juta orang (62,77 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,67

juta orang (37,23 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,78 persen poin.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -0,18 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 tertinggi di Kota Makassar sebesar 10,6 persen namun mengalami penurunan sebesar -1,22 persen poin serta berhasil mencatat TPT dengan tren menurun selama 3 tahun terakhir. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Bulukumba sebesar 1,31 persen mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen poin dari tahun 2022. Peningkatan TPT terbesar tahun 2023 sebesar 0,99 persen poin di Kabupaten Bantaeng dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -1,35 persen poin dari tahun 2021.

Grafik II.23.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

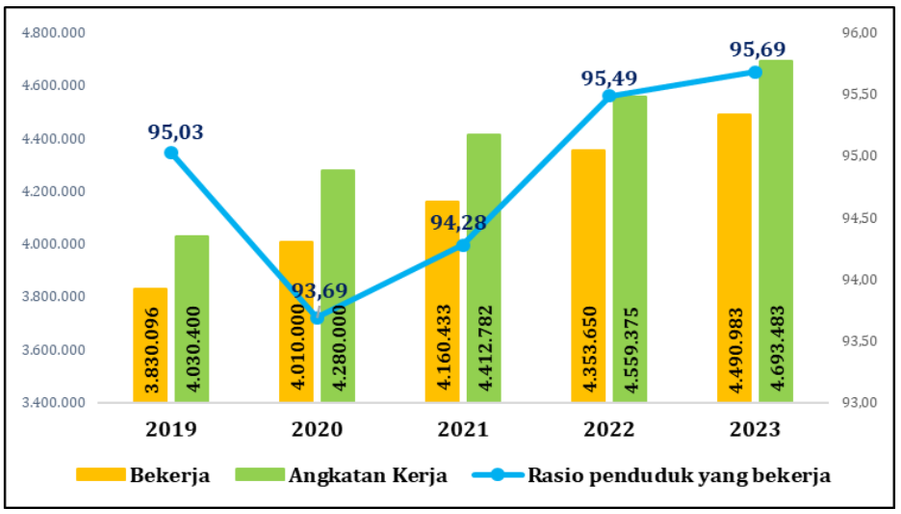


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.2.7. RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2023 sebagai bentuk usaha pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid 19, kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan utama tertentu dari tahun 2020 ke tahun 2021. Terdapat enam lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (67,62 ribu orang); Jasa Lainnya (5,97 ribu orang); serta Informasi dan Komunikasi (5,22 ribu orang).

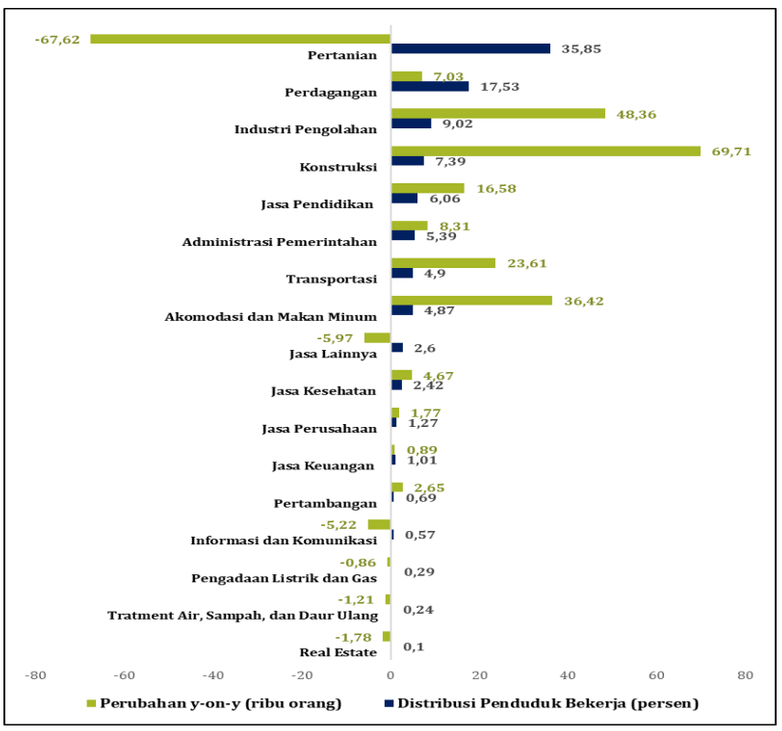
Grafik II.24.
Rasio Penduduk yang Bekerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Dibandingkan Agustus 2021 Rasio Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tiga lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,01 persen poin); Pengangkutan dan Pergudangan (0,63 persen poin); dan Jasa Lainnya (0,44 persen poin).

Grafik II.25.
Distribusi Penduduk Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas

Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 35,84 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,53 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,02 persen. Dibandingkan Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Konstruksi (69,71 ribu orang); Industri Pengolahan (48,36 ribu orang); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (36,42 ribu orang). Terdapat enam lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (67,62 ribu orang); Jasa Lainnya (5,97 ribu orang); serta Informasi dan Komunikasi (5,22 ribu orang).

2.2.2.8. PROPORSI TENAGA KERJA YANG BERUSAHA SENDIRI DAN PEKERJA BEBAS KELUARGA TERHADAP TOTAL KESEMPATAN KERJA

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan bekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah merupakan jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri ditambah dengan jumlah pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja). Dalam lima tahun terakhir terlihat kontribusi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga mengalami peningkatan dari angka 36,9 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 40,41 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja rentan atau pekerja rentan dalam ketenagakerjaan mengalami semakin banyak dan cenderung naik setiap tahunnya. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

Tabel II.40.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	36,90	36,90	37,32	39,81	40,41

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.2.9. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Keputusan Menterk PANRB Nomor 795 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Dan Bumn Tahun 2023, nilai rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,34 kategori A-. Nilai IPP tersebut diperoleh melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada 3 Unit Pelayanan Publik (UPP), yaitu Bapenda/Samsat (4,43), Dinas Sosial (4,13), dan RSUD (4,47).

Tabel II.41.
Indeks Pelayanan Publik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	%	B (4)	B (4,02)	A- (4,10)	A- (4,28)	A- (4,34)

Sumber: Kemenpan RB, Tahun 2024

2.2.2.10. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerimaan pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Berdasarkan nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada 14 OPD/Unit Pelayanan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,58 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022.

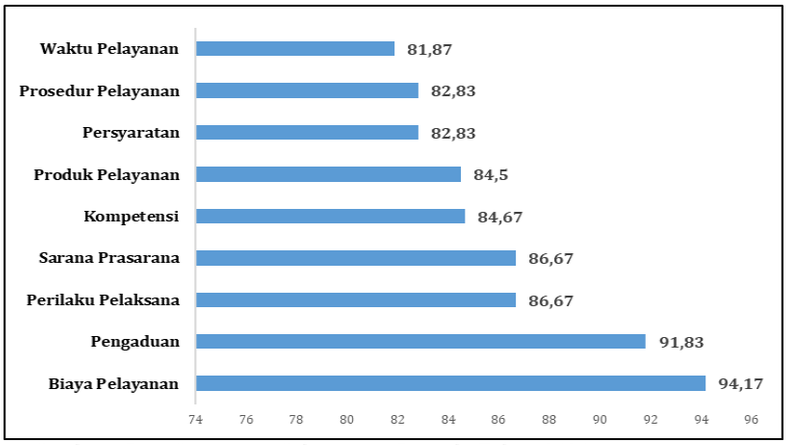
Tabel II.42.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,92	77,32	78,31 (B)	84,35 (B)	85,93 (B)

Sumber : Biro Organisasi Sektretariat Daerah, Tahun 2024

Perkembangan nilai IKM terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Sulsel mengindikasikan adanya perbaikan dan inovasi yang terus dilakukan oleh pemerintah guna peningkatan kualitas pelayanan. Berdasarkan dimensinya, indikasi kepuasan masyarakat yang tinggi pada dimensi Biaya Pelayanan dan Pengaduan. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

Grafik II.26.
IKM Berdasarkan Dimensi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Biro Organisasi Sektretariat Daerah, Tahun 2024

2.2.2.11. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan

ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Metodologi perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan UNDP yang mencakup dimensi antara lain: a) Dimesi Umur Panjang dan Sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup pada saat lahir laki-laki dan perempuan; b) Dimensi Pengetahuan dengan indiktor Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki dan perempuan; c) Dimensi Kehidupan yang Layak dengan indikator Perkiraan Pendapatan laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren penurunan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki semakin tinggi. Namun pada tahun 2022 capaian Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 93,14 persen serta masih berada diatas capaian nasional. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

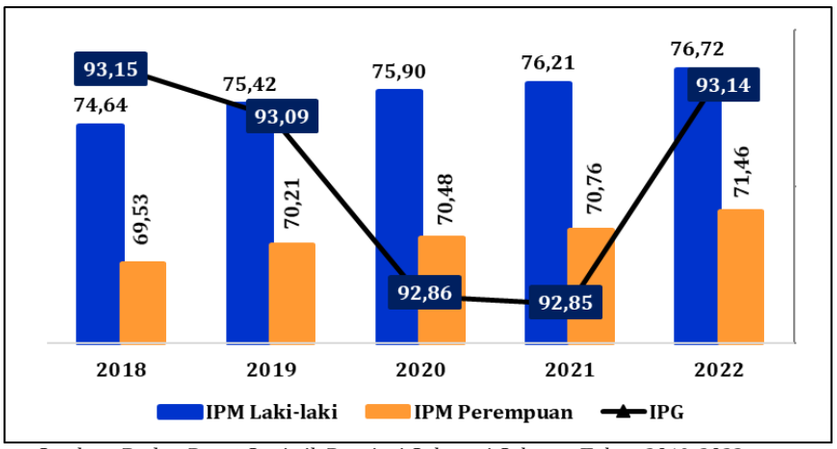
Tabel II.43.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2019-2023

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	%	93,09	92,86	92,85	93,14	93.19
Nasional	%	91,07	91,07	91,27	91,63	91.85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Masih terdapatnya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Sulawesi Selatan masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Fenomena penurunan IPG terjadi pada tahun 2019 hingga 2021 dimana dimana IPG Sulawesi Selatan turun sekitar 0,06 persen di tahun 2019, kemudian turun -0,25 persen di tahun 2020, dan -0,01 persen di tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,31 persen. Tahun 2022 capaian IPG tertinggi di Kabupaten Sinjai dengan capaian 98,13 persen dimana perbandingan IPM Laki-Laki dan Perempuan paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya dengan rasio IPM sebesar 0,98. Sedangkan capaian IPG terendah di Kabupaten Takalar sebesar 87,66 persen dengan rasio IPM Laki-Laki dan Perempuan sebesar 0,88. Nilai indeks jika semakin mendekati angka 1, maka kesenjangan pembangunan manusia antara Laki-Laki dan Perempuan semakin kecil. Gambaran perbandingan IPM Laki-Laki dan Perempuan serta capaian IPG di Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.27.
Perbandingan IPM Laki-laki dan IPM Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Sejak tahun 2019 hingga 2021, pertumbuhan IPM laki-laki lebih cepat dibanding perempuan. Perkembangan dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut.

Diagram II. 3.
Dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

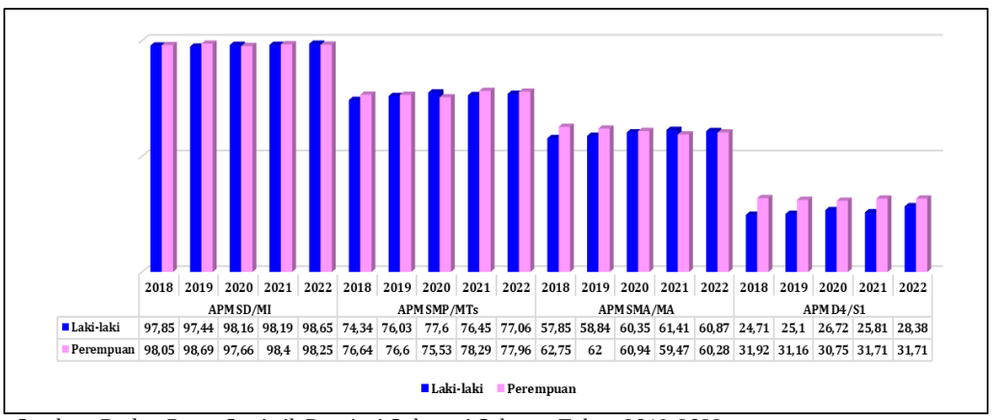
Realita ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah tercatat dalam angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Secara rata-rata tahun 2022 laki-laki di Sulawesi Selatan sudah mampu mengenyam pendidikan hingga 8,77 tahun atau sekitar kelas 2-3 SMP, sementara perempuan masih sekitar 8,48 tahun. Meski demikian, secara rata-rata, dalam kurun 2018 hingga 2022 trend pertumbuhan RLS perempuan ternyata lebih cepat dibanding laki-laki. Peluang bersekolah anak perempuan sedikit lebih baik dibanding laki-laki. Pada tahun 2022, HLS perempuan tercatat 13,82 tahun, sementara laki-laki 13,4 tahun. Rendahnya peluang bersekolah laki-laki dibanding perempuan terkait fenomena diantaranya jumlah tenaga kerja anak laki-laki yang lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ekonomi memaksa pekerja anak untuk bekerja, yang berimbas pada anak putus sekolah.

Dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Beberapa studi ilmiah telah membuktikannya, mulai dari segi kromosom, hormonal hingga gaya hidup, perempuan cenderung lebih unggul. Hal

inilah yang menyebabkan secara umum umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Pada tahun 2022 UHH perempuan di Sulawesi Selatan telah mencapai 72,96 tahun, sementara laki-laki mencapai 69,03 tahun yang menggambarkan bahwa perempuan hidup lebih lama dibanding laki-laki. Secara akumulasi UHH di Sulawesi Selatan tahun 2022 telah mencapai usia 70,97 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,44 persen. Peningkatan UHH yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan yang cenderung terus meningkat.

Ditinjau secara terpilah menurut gender dari tahun 2018 hingga 2022, pengeluaran perkapita yang disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Meski secara rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, namun kesenjangan PPP laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan masih cukup lebar. Tercatat di tahun 2022 pengeluaran perkapita disesuaikan laki-laki telah mencapai 16,645 juta rupiah, sementara perempuan sebesar 10,131 juta rupiah. Kondisi ini terkait fakta bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang memang lebih sedikit di banding laki-laki. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja. Dengan melihat kondisi ketenagakerjaan laki-laki dan perempuan, wajar apabila pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki.

Grafik II.28.
Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



	APM SD/MI					APM SMP/MTs					APM SMA/MA					APM D4/S1				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	97,85	97,44	98,16	98,19	98,65	74,34	76,03	77,6	76,45	77,06	57,85	58,84	60,35	61,41	60,87	24,71	25,1	26,72	25,81	28,38
Perempuan	98,05	98,69	97,66	98,4	98,25	76,64	76,6	75,53	78,29	77,96	62,75	62	60,94	59,47	60,28	31,92	31,16	30,75	31,71	31,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Secara terpilah, APM perempuan untuk jenjang SD dan SMP tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Sedangkan pada jenjang SMA APM perempuan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 serta lebih rendah daripada APM laki-laki. Perlu perhatian pada APM perempuan jenjang SMA yang telah mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2022. Jika dibandingkan dengan laki-laki, maka APM perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pada jenjang SD dan SMP, sementara untuk jenjang SMA masih di bawah APM laki-laki. Melihat komposisi APM perempuan dan laki-laki tahun 2022, terjadi sedikit pergeseran APM secara gender. Meski demikian, secara umum perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang untuk melaksanakan

pendidikan. Kesempatan sekolah sudah merata bagi siapapun di wilayah Sulawesi Selatan.

2.2.2.12. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2023, bahwa hasil evaluasi KemenPANRB untuk tahun 2022, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik, melalui perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi secara signifikan pada tahun 2022 sebear 4,98 poin dibandingkan tahun 2021 atau merupakan capaian tertinggi Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2018 hingga 2022. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 66,16 (B) belum mencapai target sebesar 78,00 (BB).

Tabel II.44.
Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	%	B	B (60,07)	B (61,18)	66,16 (B)	74,21 (BB)

Sumber : KemenPANRB, Tahun 2024

2.2.2.13. NILAI SAKIP PROVINSI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,70 poin dari tahun sebelumnya mencapai 68,78 dengan predikat “B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel II.45.
Nilai SAKIP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (65,06)	B (63,02)	B (65,01)	B (68,08)	B (68,78)

Sumber: KemenPANRB, Tahun 2024

Rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

Tabel II.46.
Hasil Evaluasi Kinerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
Perencanaan Kinerja	30	23,70	23,99
Pengukuran Kinerja	30	17,85	18,02
Pelaporan Kinerja	15	10,73	10,89
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,80	15,88

Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**68,08**	**68,78**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber: KemenPANRB, Tahun 2024

2.2.2.14. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif, namun jika dikaji lebih lanjut fluktuasi nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan indikator yang pada tahun 2020 yaitu indikator indeks kualitas air laut (IKAL). Sehingga nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan dengan indikator pembangun Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan nilai, kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan nilai indeks kualitas air dan adanya penambahan 1 jenis indikator yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh peningkatan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas air laut.

Tabel II.47.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air	%	81,47	54,00	56,82	57,79	57,95
Indeks Kualitas Udara	%	88,69	88,73	89,13	90,35	90,58
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	61,14	63,56	55,40	55,46	56,22
Indeks Kualitas Air Laut	%	-	70,22	84,82	85,59	84,30
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	75,12	71,74	73,23	74,17	74,30

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

2.2.2.15. POTENSI PENURUNAN EMISI GRK (JUTA TON CO2EQ)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Dukungan tersebut diwujudkan dengan penetapan PERGUB Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Gubernur ini antara lain mengatur pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK dan menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 2030.

Berdasarkan hasil kaji ulang Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD- GRK), target penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 3,5 juta ton CO^2 eq atau sebesar 5,6 persen terhadap nilai *Business as usual* (BAU). Berdasarkan data capaian indikator kinerja, potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat tercapai. Target penurunan

emisi tahun 2022 adalah sebesar 1,198 juta ton CO2 eq dengan realisasi penurunan emisi GRK sebesar 1,36 juta ton CO2 eq. Tingkat capaian penurunan emisi gas rumak kaca (GRK) pada tahun 2022 adalah 113,52 persen dengan jumlah kegiatan/aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan sebanyak 704 kegiatan.

Target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat tercapai setiap tahunnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten/kota. Sejak tahun 2020 kabupaten/kota secara aktif melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK yang yang dianggarkan melalui APBD masing-masing. Kegiatan yang telah dilaporkan melalui aplikasi AKSARA adalah yang dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya untuk semua sektor, yaitu; sektor hutan dan lahan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi, sektor energi dan sektor blue carbon. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang aktif dan tepat waktu melaporkan aksi mitigasi ke aplikasi AKSARA, sehingga pada tahun 2021 berhasil menjadi salah satu provinsi terbaik pelaporan AKSARA selama 1 dekade (2010-2020).

Perkembangan kondisi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.48.
Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Potensi Penurunan emisi GRK	(Juta Ton CO2Eq)	0,89	0,96	1,13	1,36	1.66

Sumber: Pokja Pembangunan Rendah Karbon Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.3. SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

Ketersediaan gedung lembaga sanggar kesenian diprovinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Data menunjukkan setiap 100.000 penduduk terdapat 5 lembaga sanggar seni di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula halnya dengan jumlah gedung kesenian yang tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, kondisi ini disebabkan oleh titik berat pembangunan masih difokuskan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan dan perbaikan daya beli masyarakat. Data selengkapnya terkait dengan perkembangan seni budaya dan olah raga di Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.49.
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga Sanggar Kesenian	Lembaga/10.000 penduduk	0,0471	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468
Jumlah gedung	Unit/10.000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
kesenian	penduduk					
Jumlah Gedung Olah Raga	Unit/10.000 penduduk	0,0026	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaaan dan Olahraga, Tahun 2024

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

2.3.1.1 PENDIDIKAN

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,52 persen capaian persentase jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2023 belum mencapai target nasional terkait pencapaian SPM Pendidikan sebesar 100 persen dengan capaian 86,20 persen atau sejumlah 405.137 penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dari total 470.019 penduduk usia 16-18 tahun.

Pemenuhan standar layanan minimal urusan pendidikan yaitu persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2018 hingga 2023 mengalami tren peningkatan dimana persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tertinggi di Kabupaten Bantaeng sebesar 98,89 persen dari sejumlah 6.831 warga negara usia 16-18 tahun dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah sebesar 6.755 orang . Sedangkan persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah terendah di Kabupaten Wajo sebesar 73,50 persen dari sejumlah 18.572 warga negara usia 16-18 tahun dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah sebesar 13.650 orang.

Indikator kinerja pemenuhan standar layanan minimal urusan pendidikan terkait pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2018 hingga 2023 mengalami tren fluktuasi dimana capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 2,21 persen dengan capaian 84,94 persen namun belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2023 sebesar 3.829 orang dari total 4.508 jumlah penduduk disabilitas usia 4-18 tahun. Persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus tertinggi di Kabupaten Maros dan Barru sebesar 100 persen dari masing-masing 165 dan 50 warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas. Sedangkan persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus yang terendah di Kota Enrekang sebesar 52,11 persen dari sejumlah 71 warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas.

Kinerja pembangunan pendidikan Sulawesi Selatan dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan antara lain angka partisipasi sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi sekolah diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni

(APM) pada setiap jenjang pendidikan. Tahun 2018 hingga 2023 Angka Partisipasi Kasar tertinggi dicapai pada jenjang pendidikan SD/MI. Adapun jenjang dengan APK terendah adalah PAUD baik di Sulawesi Selatan maupun nasional.

Tabel II.50.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan						
PAUD	%	29,74	31,79	29,41	30,56	31,58
SD/MI	%	108,46	106,99	106,85	106,71	106,65
SMP/MTs	%	84,22	86,97	86,82	86,19	87,15
SMA/SMK/MA	%	86,09	86,44	87,07	86,49	88,04
Nasional						
PAUD	%	36,93	37,52	35,59	35,28	36,36
SD/MI	%	107,46	106,32	106,2	106,27	105,62
SMP/MTs	%	90,57	92,06	92,8	92,11	92,51
SMA/SMK/MA	%	83,98	84,53	85,23	85,49	86,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Secara kewenangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,55 persen dari tahun 2022. Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2023 masih diatas capaian nasional.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM pada tiap jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan APM Nasional masih dibawah capaian nasional.

Tabel II.51.
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
SD Sederajat	%	98,06	97,98	98,26	98,41	98,41
SMP Sederajat	%	75,82	76,17	77,2	77,42	77,98
SM Sederajat	%	60,14	60,32	60,35	60,44	60,57

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
SD Sederajat	%	97,64	97,69	97,8	97,88	97,89
SMP Sederajat	%	79,4	80,12	80,59	80,89	81,35
SM Sederajat	%	60,84	61,25	61,65	61,97	62,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian APM pada jenjang pendidikan SD sederajat tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan serta berada diatas capaian nasional. Sedangkan capaian APM SMP dan SM sederajat pada tahun 2019 hingga 2023 meskipun mengalami peningkatan namun berada dibawah capaian nasional. Secara kewenangan capaian APM SM sederajat tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen yaitu 60,44 persen pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 60,57 persen pada tahun 2023, namun masih berada dibawah capaian nasional.

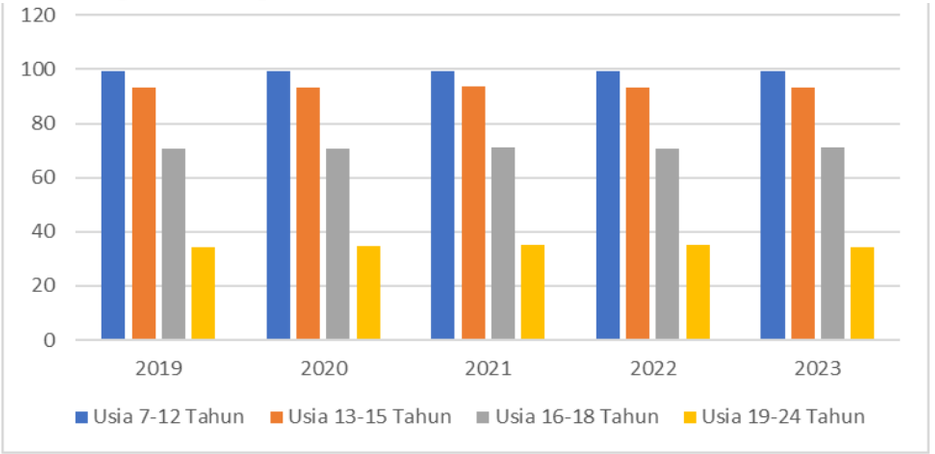
Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan pada setiap kelompok umur menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Sedangkan Angka partisipasi usia 19-24 tahun mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir.

Tabel II.52.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Jenjang Usia	Satuan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,23	99,25	99,29	99,43	99,49
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	93,22	93,34	93,55	93,2	93,22
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	70,85	70,89	71,21	70,81	71,00
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	34,44	34,51	35,08	35,07	34,47
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,24	99,26	99,19	99,1	99,16
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	95,51	95,74	95,99	95,92	96,10
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	72,36	72,72	73,09	73,51	73,42
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	25,21	25,56	26,01	25,99	26,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II.29.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,89 persen capaian persentase jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2022 belum mencapai target nasional terkait pencapaian SPM Pendidikan sebesar 100 persen dengan capaian 83,68 persen atau sejumlah 478.899 penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dari total 478.899 penduduk usia 16-18 tahun.

Pemenuhan standar layanan minimal urusan pendidikan yaitu persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tertinggi di Kota Makassar sebesar 97,33 persen dari sejumlah 80.989 warga negara usia 16-18 tahun. Sedangkan persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar 71,45 persen dari sejumlah 8.375 warga negara usia 16-18 tahun.
Indikator kinerja pemenuhan standar layanan minimal urusan pendidikan terkait pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,34 persen dengan capaian 82,73 persen namun belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2022 sebesar 3.712 orang dari total 4.487 jumlah penduduk disabilitas usia 4-18 tahun. Persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus tertinggi di Kota Makassar sebesar 89,98 persen dari 1.347 warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas. Sedangkan persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus yang terendah di Kota Pare-Pare sebesar 77,78 persen dari sejumlah 117 warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas.

Kinerja pembangunan pendidikan Sulawesi Selatan dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan antara lain angka partisipasi sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi sekolah diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Tahun 2018 hingga 2022 Angka

Partisipasi Kasar tertinggi dicapai pada jenjang pendidikan SD/MI. Adapun jenjang dengan APK terendah adalah PAUD baik di Sulawesi Selatan maupun nasional.

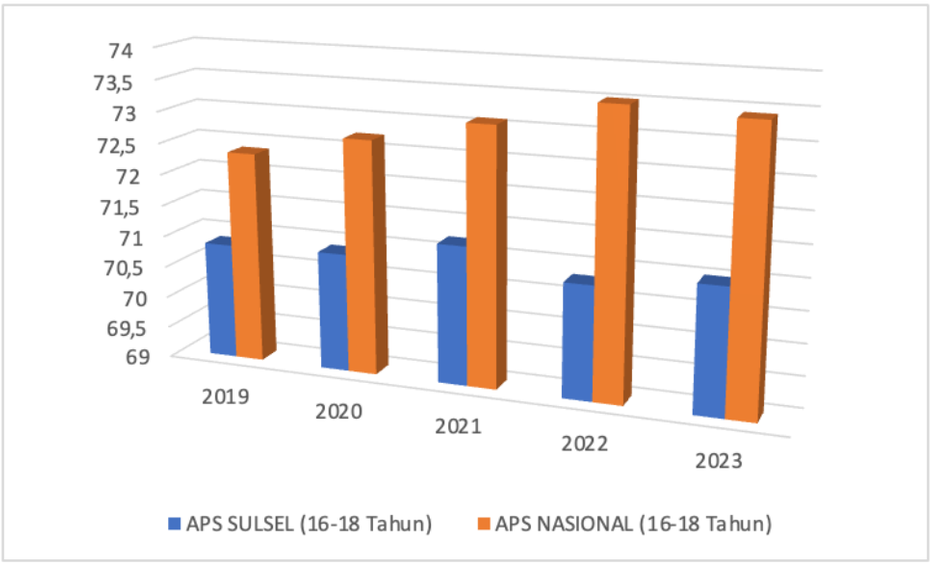
Tabel II.53.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan						
PAUD	%	29,74	31,79	29,41	30,56	
SD/MI	%	108,46	106,99	106,85	106,71	106,65
SMP/MTs	%	84,22	86,97	86,82	86,19	87,15
SMA/SMK/MA	%	86,09	86,44	87,07	86,49	88,04
Nasional						
PAUD	%	36,93	37,52	35,59	35,28	
SD/MI	%	107,46	106,32	106,2	106,27	105,62
SMP/MTs	%	90,57	92,06	92,8	92,11	92,51
SMA/SMK/MA	%	83,98	84,53	85,23	85,49	86,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Secara kewenangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,58 poin atau -0,66 persen dari tahun 2021. Namun demikian Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2023 masih diatas capaian nasional. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.30.
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM pada tiap jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan APM Nasional.

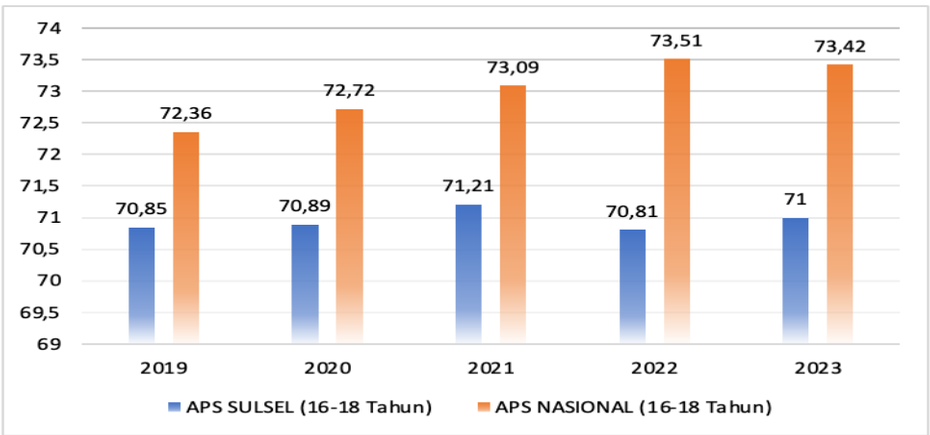
Tabel II.54.
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
SD Sederajat	%	98,06	97,98	98,26	98,41	98,41
SMP Sederajat	%	75,82	76,17	77,2	77,42	77,98
SM Sederajat	%	60,14	60,32	60,35	60,44	60,57
SD Sederajat	%	97,64	97,69	97,8	97,88	97,89
SMP Sederajat	%	79,4	80,12	80,59	80,89	81,35
SM Sederajat	%	60,84	61,25	61,65	61,97	62,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian APM pada jenjang pendidikan SD sederajat tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan serta berada diatas capaian nasional. Sedangkan capaian APM SMP dan SM sederajat pada tahun 2019 hingga 2023 meskipun mengalami peningkatan namun berada dibawah capaian nasional. Secara kewenangan capaian APM SM sederajat tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,22 poin atau 0,36 persen dari tahun 2021, namun masih berada dibawah capaian nasional.

Grafik II.31.
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan pada setiap kelompok umur menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023.

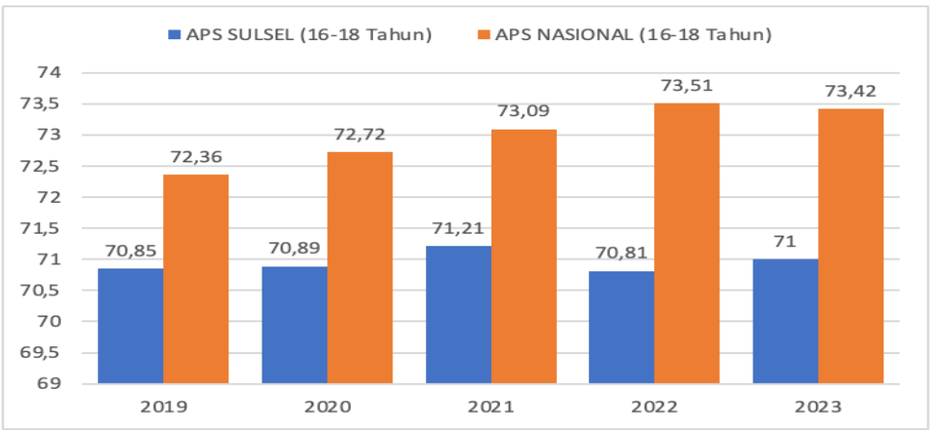
Tabel II.55.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Jenjang Usia	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,23	99,25	99,29	99,43	99,49
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	93,22	93,34	93,55	93,2	93,22
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	70,85	70,89	71,21	70,81	71,00

Jenjang Usia	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	34,44	34,51	35,08	35,07	34,47
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,24	99,26	99,19	99,1	99,16
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	95,51	95,74	95,99	95,92	96,10
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	72,36	72,72	73,09	73,51	73,42
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	25,21	25,56	26,01	25,99	26,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II.32.
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tahun 2019 hingga 2023 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan masih lebih rendah dari capaian Nasional. Pada tahun 2023 Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia sekolah 16-18 tahun mengalami peningkatan sebesar -0,19 poin atau -0,27 persen dari capaian tahun 2022.

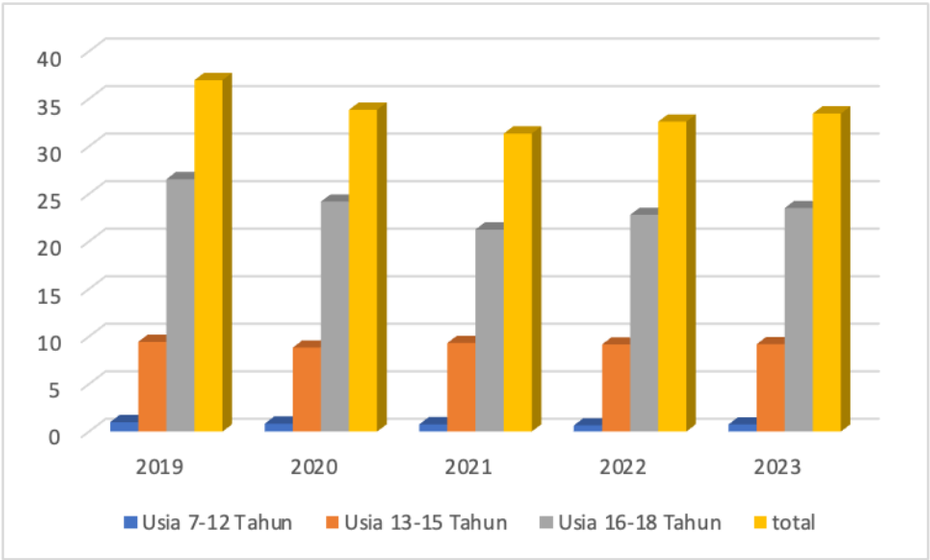
Dimensi angka partisipasi sekolah yaitu terdiri dari anak usia 7-18 tahun yang masih sekolah, tidak/belum pernah sekolah, dan tidak bersekolah lagi. Berdasarkan data Susenas tahun 2018 hingga 2022, persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah dan anak laki-laki usia 7-18 tahun lebih besar daripada anak perempuan usia 7-18 tahun. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.56.
Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Usia
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Jenjang Usia	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Usia 7-12 Tahun	**%**	0,99	0,83	0,76	0,65	0,75
Usia 13-15 Tahun	%	9,44	8,83	9,32	9,16	9,19
Usia 16-18 Tahun	%	26,54	24,19	21,26	22,79	23,51
Total	%	36,97	33,85	31,34	32,60	33,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik II.33.
Perkembangan Angka Anak Tidak Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik diatas menggambarkan bahwa capaian angka anak tidak sekolah menunjukkan fluktuasi, dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 angka anak tidak sekolah sebesar 36,97 persen, mengalami penurunan di tahun 2020 hingga 2021 sebesar 5,63 persen dengan capaian 31,34 persen. Di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen dengan capaian 32,60 persen dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 0,85 persen dengan capaian 33,45 persen. Hal tersebut disebabkan karena tidak mau bersekolah; bekerja dan mendapatkan upah; bekerja tidak mendapatkan upah; jarak sekolah jauh; tidak ada biaya; disabilitas; perundungan (bullying); menikah/mengurus rumah tangga; merasa pendidikan sudah cukup; pengaruh lingkungan; pengaruh teman; menganggap sekolah tidak penting; tidak pernah terlayani paud dan tidak punya akte kelahiran (dokumen kependudukan).

Capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren peningkatan yang mencapai 147.663 jumlah siswa baru SMA/SMK/MA dari 148.306 jumlah siswa SMP/MTs kelas III yang menyelesaikan pendidikan pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga tahun 2020 dimana salah satu penyebabnya adalah kondisi pandemic covid-19. Kondisi ini menunjukkan, menurunnya kemampuan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/MA/SMK. Pada tahun 2023 angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tertinggi di Kota Pare-Pare sebesar 130,74 persen atau sejumlah 3.258 siswa baru dari 2.492 yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTs . Sedangkan angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terendah di Kabupaten Wajo sebesar 80,24 persen atau sejumlah 4.633 siswa baru dari 5.774 siswa yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTs.

Tabel II.57.
Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA dan
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Putus Sekolah	%	0,71	1,35	1,02	3,62	0,41
Angka Melanjutkan	%	97,20	92,07	93,82	95,34	99,57

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah. Angka melek huruf Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 hingga 2023 mengalami tren peningkatan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 94,91 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen dari tahun 2022.

Tabel II.58.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-64 Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Indikator	**Satuan**	**Capaian**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Banyaknya Penduduk Usia 15-64 Tahun yang Melek Huruf	Orang	5.404.659	5.523.289	5.598.898	5.675.232	5.751.566
Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	Orang	5.840.507	5.901.873	5.945.547	6.002.624	6.059.701
Angka Melek Huruf	%	92,54	93,58	94,16	94,55	94,91

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Hingga tahun 2023 jumlah bangunan gedung sekolah SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.053 unit dengan persentase bangunan dengan kondisi baik sejumlah 60,58 persen untuk gedung SMA dari total 621 unit dan 61,56 persen untuk gedung SMK dari 432 unit, mengalami peningkatan dari tahun 2022 untuk bangunan dalam kondisi baik pada SMK dan mengalami penurunan 0,05 persen pada bangunan SMA. Sedangkan persentase bangunan yang rusak ringan/sedang untuk gedung SMA sebesar 35,37 persen dan gedung SMK sebesar

35,66 persen mengalami peningkatan dari tahun 2022. Namun kondisi bangunan yang rusak berat pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan capaian 4,05 persen untuk gedung SMA dan 2,78 persen untuk gedung SMK. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rehabilitasi gedung sekolah yang meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang laboratorium biologi, ruang parktik, ruang perpustakaan, dan ruang serbaguna.

Jumlah sekolah khusus bagi penyandang Disabilitas sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, Pada tahun 2023 proporsi pada semua jenjang telah terpenuhi dibandingkan dengan tahun 2022. Hingga tahun 2022 jumlah total SLB berjumlah 282 unit. Data jumlah sekolah khusus bagi penyandang disabilitas selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.59.
Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No.	Jenis Sekolah	Satuan	Jumlah SLB				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SDLB	Unit	1	84	87	93	94
2	SMPLB	Unit	0	84	85	86	94
3	SMLB	Unit	82	84	73	70	94
Total SLB		Unit	83	252	245	249	282

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Siswa penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan SDLB merupakan jumlah siswa terbanyak sepanjang tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2023 jumlah siswa penyandang disabilitas yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan SDLB hingga SMLB sama dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mendorong motivasi bersekolah bagi penyandang disabilitas dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan memadai. Data siswa penyandang disabilitas berdasarkan jenjang pendidikannya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.60.
Jumlah Siswa Penyadang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023

No.	Jenis Sekolah	Satuan	Jumlah Siswa				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SDLB	Orang	2.970	2.821	2.501	2.555	2.555
2	SMPLB	Orang	1.014	1.023	1.033	1.253	1.253
3	SMLB	Orang	684	652	630	786	786
Total Siswa		Orang	4.668	6.141	4.164	4.594	4.594

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah siswa penyandang disabilitas berdasarkan kelompok umur di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2023 didominasi oleh siswa dengan usia 7–12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah untuk usia tersebut masih sangat dibutuhkan, mengingat bahwa data menunjukkan jumlah sekolah SDLB hanya sebanyak 94 unit pada tahun 2023. Untuk siswa penyandang disabilitas usia 16-18 tahun pada tahun 2023 sejumlah 514 orang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Data disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.61.
Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No.	Kelompok Umur	Satuan	Jumlah Siswa				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	< 7 Tahun	Orang	102	118	135	148	141
2	7 - 12 Tahun	Orang	1.816	1.796	1.801	2.407	2.409
3	13 - 15 Tahun	Orang	954	987	1.033	1.253	1.255
4	16 - 18 Tahun	Orang	913	876	630	512	514
5	> 18 Tahun	Orang	883	719	565	274	275
Total		Orang	4.668	4.496	4.164	4.594	4.594

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan jenis ketunaan, jumlah siswa terbanyak berdasarkan data tahun 2018-2023 adalah siswa tuna grahita dan tuna rungu. Khusus siswa tuna grahita pada tahun 2023 berjumlah 2.380 sama dengan tahun sebelumnya. Olehnya itu sarana prasarana khusus bagi penyandang tuna grahita dan tuna rungu dalam pelaksanaan pendidikan siswa disabilitas perlu menjadi perhatian.

Tabel II.62.
Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No.	Jenis Ketunaan	Satuan	Jumlah Siswa				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tuna Netra	Orang	213	221	101	205	205
2	Tuna Rungu	Orang	1.038	1.083	1.183	1.047	1.047
3	Tuna Grahita	Orang	2.099	2.525	2.279	2.380	2.380
4	Tuna Daksa	Orang	289	282	483	311	311
5	Autisme	Orang	28	379	114	651	651
6	Tuna Ganda	Orang	1.001	1.113	4	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2023 jumlah siswa yang bebas buta aksara Al-Qur'an yaitu 244.777 orang dari jumlah total siswa 263.337 orang atau sebesar 92,95 persen mengalami peningkatan dibanding dari tahun sebelumnya sebesar 0,30 persen. Capaian persentase siswa SMA/SMK yang bebas narkoba pada tahun 2023 sebesar 99,95 persen atau sejumlah 294.978 siswa SMA/SMK yang bebas narkoba dari total 295.132 siswa, mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,02 persen. Sedangkan jumlah SMA/SMK yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama yaitu 429 unit atau 60,00 persen pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian 73,46 persen.

Dari total 1.053 unit sekolah tingkat pendidikan menengah terdapat sejumlah 42 sekolah yang masuk kategori wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang tidak menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK karena keterbatasan dan jangkauan terhadap teknologi informasi yang tidak memadai. Salah satu contoh penerapan penyelenggaraan dan pelayanan Pendidikan berbasis TIK bagi sekolah yang masuk kategori 3T adalah tidak melaksanakan ujian nasional berbasis teknologi informasi. Capaian persentase pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan

pendidikan berbasis TIK pada tahun 2023 sebesar 615 unit atau 86,86 persen mengalami peningkatan sebesar 0,60 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra pada tahun 2023 sebesar 50,57 persen atau dengan sejumlah 357 satuan pendidikan (SMA/SMK).

Rasio guru terhadap Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Tahun 2023 yaitu 1 : 12 yang menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 12 murid. Jumlah murid SMA/SMK/MA pada tahun 2023 sebesar 413.805 orang, sedangkan jumlah guru jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 33.675 orang. Jumlah satuan pendidikan (SMA/SMK) yang telah memeperoleh izin penyelenggaraan pendidikan yaitu 645 dari 708 satuan pendidikan atau dengan capaian 91,10 persen. Pada tahun 2023 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV sebesar 25.841 guru dari total 26.195 guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA atau dengan capaian 98,65 persen. Jumlah guru SMA yang bersertifikat pada tahun 2023 sebesar 8.333 pendidik baik negeri atau swasta yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) serta Sertifikat Pendidik dari total 15.814 guru SMA atau dengan capaian 52,69 persen sama dengan tahun 2022. Sedangkan jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang bersertifikat baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) serta Sertifikat Pendidik pada tahun 2022 sebesar 4.864 dari total 10.381 pendidik atau dengan capaian 46,85 persen sama dengan tahun 2022 dengan capaian 52,24 persen.

Tabel II.63.
Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Qur'an	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	75	92,65	92,95
Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba	%	90	91	91,5	99,97	99,95
Persentase warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	75,25	76,62	80,55	83,68	86,20
Persentase warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	80	81	80,84	82,73	84,94
Persentase Sekolah yang menerapkan	%	Belum dilakuk	50,05	80	73,46	75,76

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama		an pengukuran				
Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	63	75	81	86,26	86,86
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Guru/ Murid	1:14	1:13	1:13	1:13	1 : 12
Jumlah Murid SMA/MA/SMK	Orang	295.634	415.158	422.588	422.190	413.805
Jumlah Guru SMA/MA/SMK	Orang	20.469	31.216	33.191	32.763	33.675
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D-IV	%	98,69	98,84	94,83	99,16	98,65
Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	53,78	51,02	56,07	52,69	52,69
Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	45,6	44,25	52,24	46,85	46,85
Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	94,13	91,1
Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	48,25	45,3	50,57

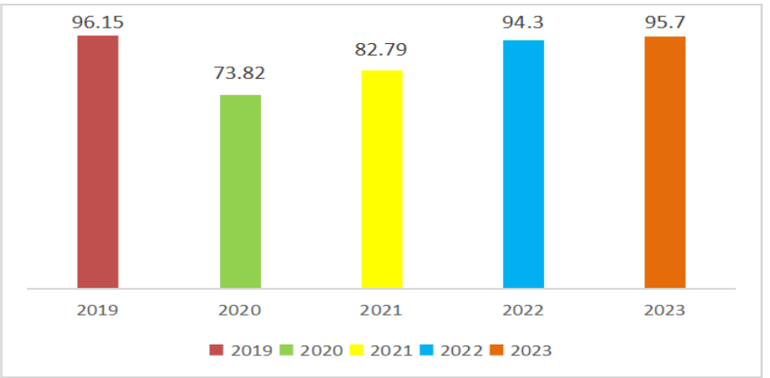
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.1.2 KESEHATAN

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Imunisasi dasar pada bayi dilakukan pada saat bayi masih berusia kurang dari 12 bulan, dengan pemberian imunisasi meliputi BCG, DPT, Polio, Hepatitis, dan Campak. Bayi dikatakan mendapatkan imunisasi dasar lengkap terdiri dari BCG satu kali, DPT tiga kali, polio empat kali, hepatitis tiga kali dan campak satu kali. Untuk menilai status kelengkapan imunisasi dasar pada bayi dapat ditinjau dari cakupan imunisasi campak karena pemberian imunisasi campak merupakan imunisasi yang paling akhir diberikan setelah keempat imunisasi dasar pada bayi yang lain telah diberikan.

Tahun 2020 hingga 2023 cakupan desa/kelurahan UCI mengalami tren peningkatan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 95,7% persen dimana sejumlah 9 kabupaten/kota dengan capaian 100 persen desa/kelurahan UCI yaitu Kabupaten Bulukumba (136 desa/kelurahan), Takalar (101 desa/kelurahan), Sinjai (80 desa/kelurahan), Maros (103 desa/kelurahan), Sidrap (106 desa/kelurahan), Pinrang (109 desa/kelurahan), Luwu Utara (173 desa/kelurahan), Kota Makassar (153 kelurahan), dan Pare-Pare (22 kelurahan). Sedangkan capaian terendah jumlah desa/kelurahan UCI adalah Kabupaten Tana Toraja dengan cakupan 74, 2% (118 desa/kelurahan) dan Toraja Utara dengan cakupan 82,1% (124 desa/kelurahan) .

Grafik II.34.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

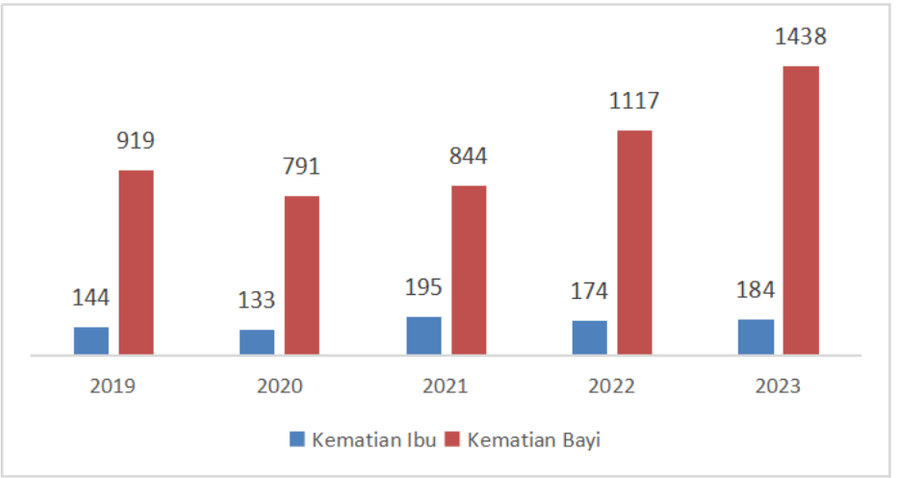


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2024

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama angka kematian ibu. Pada tahun 2023 jumlah kematian ibu sebesar 184 jiwa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah kematian ibu tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 di Kabupaten Gowa sebanyak 20 kasus kematian ibu. Sedangkan Jumlah kasus kematian ibu terendah ada di Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 2 kasus kematian ibu.

Kematian bayi adalah kematian anak kurang dari satu tahun. Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Jumlah kematian bayi tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan dimana tahun 2023 mencapai 1.438 jiwa. Jumlah kematian bayi tertinggi di Kota Makassar sebanyak 220 kasus dan terendah di Kabupaten Toraja Utara sebesar 15 kasus kematian.

Grafik II.35.
Jumlah Kematian Ibu dan Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



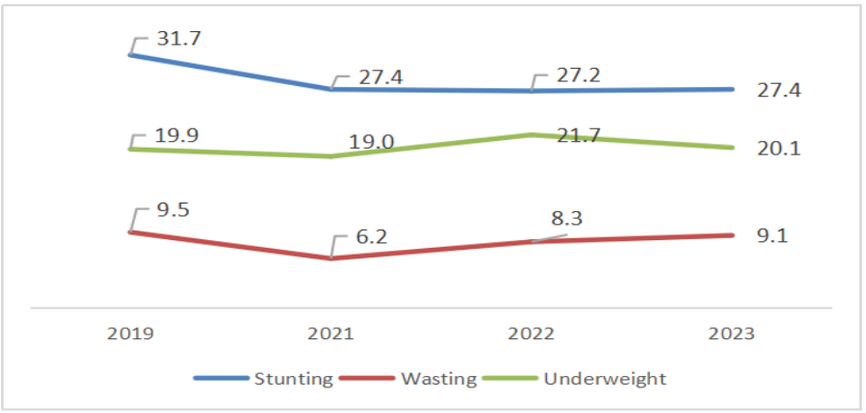
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2024

Meningkatnya jumlah kasus kematian Ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan dirasakan sebagai suatu tantangan permasalahan yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan program pembangunaan kesehatan. Informasi mengenai tingginya kasus kematian ibu dan bayi di suatu wilayah akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan yang aman bebas risiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi serta meningkatkan derajat kesehatan reproduksi perempuan.

Peningkatan jumlah kasus kematian ibu ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan antenatal (masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan, serta faktor sosial budaya. Terbatasnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, terutama bagi ibu hamil di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) juga turut mempengaruhi peningkatan kasus kematian ibu.

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan tahun 2021 hingga 2022 mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 27,4% Wasting dan underweight merupakan kondisi status gizi yang apabila tidak segera ditangani maka akan menyebabkan terjadinya stunting.

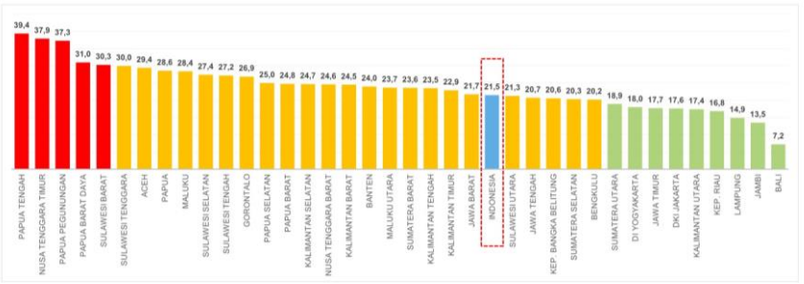
Grafik II.36.
Prevalensi Balita Stunting, Wasting dan Underweight
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Status gizi tingkat provinsi tahun 2023 menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan berada di peringkat 10 dengan angka stunting tertinggi diantara 34 provinsi. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

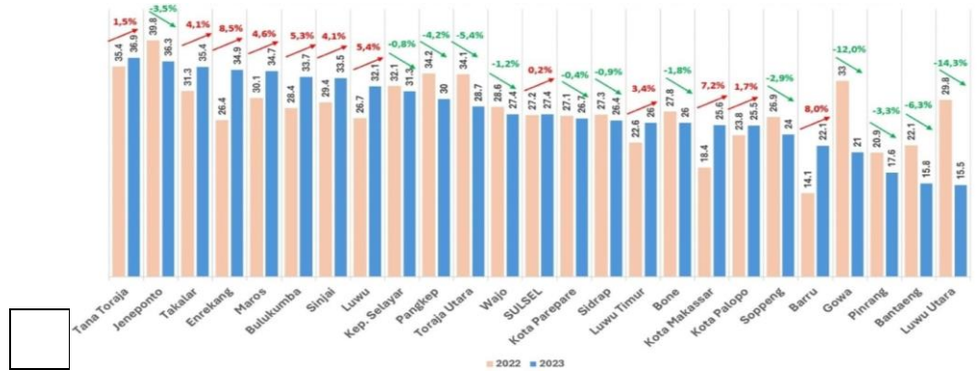
Grafik II.37.
Perbandingan Angka Stunting Sulawesi Selatan dengan
Provinsi Lain Di Indonesia Tahun 2023



Sumber: Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2024

Berdasarkan data SKI tahun 2023, sebaran prevalensi stunting di Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa 11 kabupaten/kota mengalami kenaikan prevalensi stunting dan 13 kabupaten/kota mengalami penurunan prevalensi stunting, Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Enrekang (8,5%), Barru (8,0%), dan Makassar (7,2%), sedangkan penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Luwu Utara (14,5%), Gowa (12%) dan Bantaeng (6,3%).

Grafik II.38.
Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2022 dan 2023

Faktor utama yang menjadi penyebab stunting adalah buruknya asupan gizi dan rendahnya status kesehatan. Pemicu dari kedua faktor penyebab stunting ini adalah: praktek pengasuhan anak yang kurang baik; tidak tersedianya makanan bergizi bagi rumah tangga, Belum optimalnya layanan kesehatan untuk ibu terutama selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk balita serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

2.3.1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jaringan irigasi kewenangan provinsi dengan kondisi baik mengalami tren peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 72,86 persen pada tahun 2023 yang didukung melalui Peningkatan DI. Kuri-Kuri Kasambi Kabupaten Luwu Utara, Rehabilitasi DI. Unyi Kabupaten Bone, Rehabilitasi DI. Angkona Kabupaten Luwu Timur, Rehabilitasi DI. Aparang 1 Kabupaten Sinjai, Rehabilitasi DI. Aparang Hulu Kabupaten Sinjai, Rehabilitasi DI. Bili-Bili Kabupaten Gowa, Rehabilitasi DI. Bontonyeleng Kabupaten Bulukumba, Rehabilitasi DI Jaling Kabupaten Bone, Rehabilitasi DI. Lengkong Pini Kabupaten Luwu, Rehabilitasi DI. Makawa Kabupaten Luwu, Rehabilitasi DI. Padaelo Kabupaten Pangkep, Rehabilitasi DI. Tallu Ura Kabupaten Enrekang, dan Rehabilitasi Bendung DI. Waru-Waru Kabupaten Bone.

Pada tahun 2023 kondisi Kemantapan Jalan (Kondisi Baik dan Sedang) kewenangan provinsi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai 75,37 persen dengan komposisi Ppnjang jalan kondisi Baik 948,74 Km dan panjang jalan kondisi Sedang 569,51 Km. Sedangkan panjang jalan kondisi Rusak Ringan 176,65 Km dan panjang jalan Rusak Berat 319,33 Km. Tahun 2023 panjang jalan wilayah terisolir yang terbangun juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai 21,04 Km.

Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan layanan SPALD. Dalam upaya pelayanan sanitasi Aman Setempat di Provinsi Sulawesi Selatan telah terbangun IPLT sebanyak 16 unit yang tersebar di kabupaten/kota. Daerah yang telah memiliki IPLT sejumlah 16 kabupaten/kota dengan kapasitas terbangun 218 m^3/hari. Jumlah IPLT yang berfungsi sejumlah 11 unit dan 4 unit tidak/belum berfungsi. Sedangkan 8 kabupaten belum memiliki IPLT yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Gowa dan Bone sehingga untuk meningkatkan kinerja layanan penyedotan lumpur tinja melalui kerjasama dengan kabupaten/kota terdekat yang memiliki IPLT. Namun demikian hampir semua kabupaten/kota memiliki IPAL komunal dengan jumlah yang terbatas dan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pencapaian target akses sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan IPLT Regional perlu dilakukan apabila daerah tidak memiliki kemampuan untuk membangun IPLT sendiri dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan posisi lokasi geografis kabupaten/kota yang saling berdekatan yang sama-sama belum memiliki IPLT. Dalam upaya meningkatkan layanan sanitasi aman terpusat di Provinsi Sulawesi Selatan telah dibangun 1 unit IPALDT (sewerage system) skala kota di Kota Makassar dengan kapasitas layanan 14.000 sambungan rumah.

Rumah tangga dengan akses Air Minum melalui Jaringan Perpipaan di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 25,64 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta lebih tinggi dari capaian Nasional. Layanan PDAM yang belum mencakup seluruh wilayah permukiman serta kinerja layanan BUMD

Air Minum (PDAM) menjadi faktor yang menyebabkan akses air minum rumah tangga melalui jaringan perpipaan PDAM masih sangat rendah. Pembangunan SPAM Regional merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan lintas kabupaten/kota. Berdasarkan data Susenas tahun 2018 hingga 2023 akses rumah tangga terhadap air minum layak di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan mencapai 92,12 persen pada tahun 2023. Berdasarkan sumbernya air minum layak rumah tangga terbesar diperoleh dari air isi ulang sebesar 36,39 persen dan sumur bor/pompa sebesar 18,75 persen. Hal ini menggambarkan pemenuhan akses air minum layak rumah tangga masih bertumpu pada akses non perpipaan yang salah satunya disebabkan oleh karakteritik wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri dari wilayah pesisir dan kepulauan.

Tabel II.64.
Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	%	70	72,7	76	76,13	72,86
Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	%	100	100	100	100	100
Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota)	%	100	100	100	100	100
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan Drainase Kab/Kota	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	16	16
Persentase Bangunan Pamerintah yang di Fasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	75,04	85	100	100
Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	7	13	9	4	4
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	61,52	65,9	70,01	71,95	75,37

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat	%	20,48	42,72	74,53	76,03	27,21
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Rasio	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	19,95	12,12	12,12
Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	Rasio	0,7	0,75	0,8	0,86	0,86

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

2.3.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi tahun 2023 0 persen karena tidak ada program pemerintah provinsi yang mengakibatkan relokasi. Tahun 2023 telah tertangani sebanyak 17 unit rumah korban bencana yang diantaranya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sejumlah 11 unit di Kecamatan Baebunta Selatan Desa Beringin Jaya dan Desa Sumpiria Kabupaten Luwu Utara, serta Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana sejumlah 6 unit di Desa Tarowang dan Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kelurahan Barranglompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar sejumlah 13 unit. Sementara untuk mendukung penyediaan PSU pada kawasan kumuh telah terbangun jalan lingkungan dengan panjang 407,2 meter yang berlokasi di Kelurahan Barranglompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros, dan Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Capaian kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi dari tahun 2020 hingga 2023 sebesar 319,72 Ha atau 27,01 persen dari total luas kawasan kumuh sebesar 1.183,79 Ha yang tersebar di 20 kabupaten/kota, 52 kecamatan, 91 kelurahan, 97 kawasan melalui pendanaan APBD Provinsi, Program KOTAKU Kemen PUPR, dan CSR.

Tahun 2023 pembangunan PSU permukiman di Sulawesi Selatan pada 26 Kawasan antara lain Pembangunan Teknologi Air Siap Minum (ARSINUM) dengan kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan layanan 625 rumah tangga pada 11 kawasan yang tersebar di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar sejumlah 4 kawasan, Kabupaten Sinjai sejumlah 1 Kawasan, Kabupaten Bulukumba sejumlah 1 Kawasan, Kabupaten Bantaeng sejumlah 1 Kawasan, Kabupaten Maros sejumlah 1 Kawasan, Kabupaten Pangkep sejumlah 2 Kawasan, Kabupaten Pinrang sejumlah 1 Kawasan. Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 174,16 meter pada 1 kawasan yang berlokasi di Kota Makassar. Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 174,16 meter pada 1 Kawasan yang berlokasi di Kota Makassar untuk menunjang fungsi permukiman khususnya untuk menampung limpasan air hujan agar tidak terjadi genangan serta air limbah domestik grey water. Selain pembangunan Drainase

Lingkungan untuk menunjang fungsi permukiman, juga dilaksanakan pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 2.210,72 meter pada 14 Kawasan yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota, diantaranya Kota Makassar sebanyak 9 Kawasan, Kota Pare-Pare 1 Kawasan, dan Kabupaten Bone 4 Kawasan.

Proses Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya: a) Koordinasi bersama REI dan APERSI untuk proses sertifikasi pengembang tahun 2023; b) Rapat koordinasi bersama Tim SRP2 untuk penerbitan sertifikat pengembang tahun 2023; c) Sosialisasi dengan opd kab/kota mengenai kegiatan sertifikasi pengembang; d) Penerbitan sertifikat pengembang perumahan tahun 2023. Hingga Tahun 2023 jumlah pengembang yang tersertifikasi sebanyak 35 Pengembang atau mencapai 100 persen.

Tabel II.65.
Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi (SPM)	%	100	100	100	30	0
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	52,7	6,67	18,03	25,39	27,01
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	100	100	100	100	100
Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	89,77	93,79	93,98	97,36	97,37
Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	17,1	17,1	195,9	100	100
Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	7,15	57,14	100

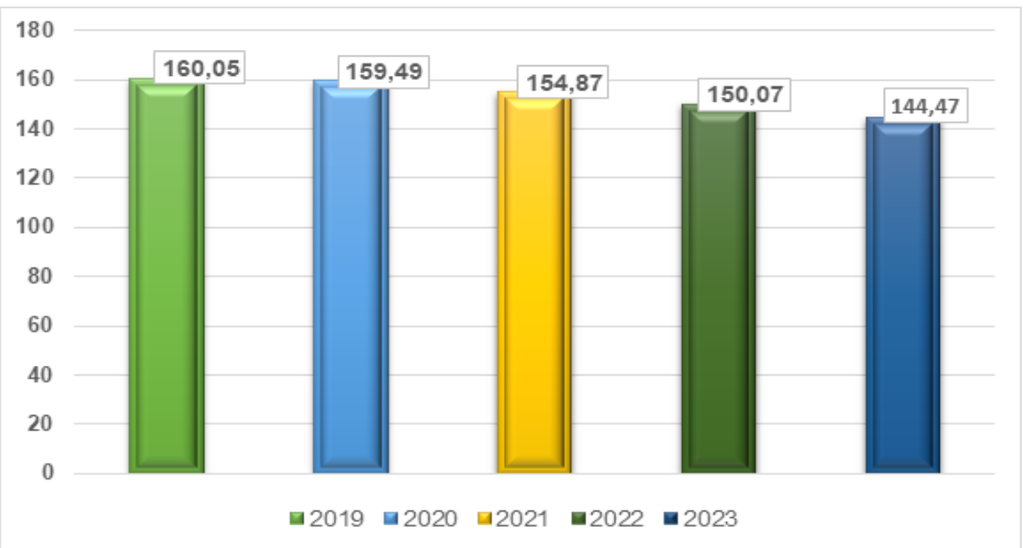
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.3.1.5 KENTENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dengan menetapkan target dan indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi. Pada tahun 2022 jumlah kasus penegakan perda pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 59 kasus yang terdiri dari Non Yustisi sebanyak 19 kasus dan Yustisi 40 kasus dari total 8 perda/perkada yang ditegakkan. Dalam pelaksanaan tersebut telah disediakan anggaran untuk memberikan layanan kepada warga negara akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. Namun dalam pelaksaaan kegiatan penegakan perda/perkada tidak pernah ada warga yang terkena dampak dari kegiatan tersebut dikarenakan pelaksanaan selalu berdasar SOP dan secara Humanis. Jumlah pengamanan dan penertiban yang terlaksana sejumlah 206 kegiatan yang terdiri dari pengamanan aset provinsi sejumlah 7 aset, pengamanan unjuk rasa 35 kasus, pengamanan objek vital sejumlah 9 objek, patroli rutin dan wilayah sejumlah 75 kasus, dan pelaksanaan deteksi dini sejumlah 80 kasus.

Program Penanggulangan Bencana didukung oleh penyusunan kajian risiko bencana provinsi, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana. Dengan luas wilayah Sulawesi Selatan sebesar 45.704,16 km^2 jumlah pos pelayanan bencana kebakaran yang harus tersedia sebanyak 265 pos, dimana pada tahun 2023 telah tersedia sebanyak 100 pos pelayanan di kabupaten/kota. Sedangkan untuk evakuasi korban kebakaran dihitung dari waktu tanggap (Respon Time Rate) yaitu waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi tidak lebih 15 menit sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat. Pada tahun 2023 sejumlah 670 kejadian kebakaran terjadi dan yang tertangani sesuai kategori waktu tanggap sejumlah 635 kasus.

Grafik II.39.
Indeks Risiko Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2019-2023

Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang bergunung-gunung dengan sarana prasarana jalan yang kurang baik. Secara umum faktor geologi dan kegempaan, wilayah Sulsel dilalui oleh Sesar Walanae melintang dari barat laut menuju tenggara. Ancaman bencana di Sulawesi Selatan antara lain: Gempa, Banjir, Tsunami, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Gelombang Pasang, Cuaca Ekstrim dan Abrasi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2018 hingga 2023 mengalami tren penurunan nilai indeks dengan rata-rata penurunan sebesar 3,13 poin, namun IRB Sulawesi Selatan termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas. Capaian tahun 2023 nilai indeks risiko bencana Sulawesi Selatan sebesar **144.47** mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 5.6 poin namun masih dalam kategori indeks risiko tinggi.

Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di suatu daerah atau kawasan. Metode yang digunakan dengan menggabungkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Tahun 2023 IRB Kabupaten/Kota mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana sejumlah 13 kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi di Sulawesi Selatan serta 11 kabupaten/ kota dengan indeks risiko bencana sedang. penurunan indeks risiko bencana terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 7.29 poin, Kabupaten Barru sebesar 12.25 poin, dan Luwu Utara sebesar 13.37 poin. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.66.
Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021		2022		2023	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
1	Luwu	187,71	Tinggi	187,91	Tinggi	187,81	Tinggi
2	Palopo	198,94	Tinggi	186,68	Tinggi	167.40	Tinggi
3	Wajo	179,20	Tinggi	179,20	Tinggi	156.96	Tinggi
4	Luwu Timur	195,10	Tinggi	176,14	Tinggi	152.28	Tinggi
5	Bone	183,85	Tinggi	173,75	Tinggi	164046	Tinggi
6	Pangkajene Kepulauan	168,40	Tinggi	168,40	Tinggi	165.68	Tinggi
7	Sinjai	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi	165.60	Tinggi
8	Bulukumba	163,20	Tinggi	163,20	Tinggi	156.54	Tinggi
9	Luwu Utara	169,57	Tinggi	155,01	Tinggi	141.64	Sedang
10	Jeneponto	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi	151.20	Tinggi
11	Kepulauan Selayar	155,20	Tinggi	151,12	Tinggi	142.83	Sedang
12	Tana Toraja	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150.00	Tinggi
13	Toraja Utara	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150.00	Tinggi
14	Barru	162,65	Tinggi	149,41	Tinggi	137.16	Sedang
15	Maros	157,93	Tinggi	148,96	Tinggi	148.56	Tinggi
16	Pinrang	161,57	Tinggi	148,84	Tinggi	148.84	Tinggi
17	Pare-Pare	155,20	Tinggi	148,84	Tinggi	141.26	Tinggi
18	Enrekang	144,23	Tinggi	136,13	Sedang	127.25	Sedang
19	Soppeng	131,20	Sedang	131,20	Sedang	131.20	Sedang
20	Takalar	131,33	Sedang	128,38	Sedang	128.38	Sedang
21	Kota Makassar	127,18	Sedang	119,49	Sedang	119.49	Sedang

No	Kabupaten/Kota	2021		2022		2023	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
22	Sidenreng Rappang	119,20	Sedang	119,20	Sedang	119.20	Sedang
23	Gowa	106,27	Sedang	106,98	Sedang	106.98	Sedang
24	Bantaeng	102,20	Sedang	105,96	Sedang	105.96	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021-2023

Pada Tahun 2023 dilaksanakan peningkatan kapasitas aparat sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana, yang mana kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan, sosialisasi dan edukasi bencana di wilayah rawan bencana yaitu di Kabupaten Gowa dan Kota Pare-pare, serta pelaksanaan kegiatan workshop pengkajian dan perhitungan kerugian pasca bencana. Selain itu juga sebagai bentuk respon cepat dalam melakukan evakuasi tanggap darurat, dilaksanakan operasi darurat di wilayah yang tertimpa bencana yang mencakup 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani merupakan indikator kinerja pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan pada sub kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana dan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dijabarkan sebagai berikut:

a. Jumlah total bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 adalah 791 kejadian dengan jenis bencana Banjir 73 kejadian, Tanah Longsor 96 kejadian, Puting Beliung 39 kejadian, Gempa 5 kejadian, Gelombang Pasang 1 kejadian, Kekeringan 37 kejadian, Angin Kencang 197 kejadian, Kebakaran 371 kejadian, Longsor 96 kejadian, Banjir Bandang 2 kejadian, Gempa Bumi 5 Kejadian dan Abrasi 7 kejadian yang tersebar pada 24 kabupaten/kota disikapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelayanan respon cepat dan bantuan logistik pada 24 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 3000 paket, yang terdiri dari Logistik Pangan sebanyak 1000 paket, Perlengkapan Keluarga sebanyak 1000 paket dan Shelter Kit sebanyak 1000 paket.
b. Jenis sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia sejumlah 6 jenis, antara lain: mobil tangki air, mobil single cabin, perahu polythylene besar, perahu polythylene kecil, perlengkapan Tim Reaksi Cepat dan pelampung.
c. Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten/Kota sebanyak 100 orang yang melibatkan aparatur BPBD dan OPD terkait dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Pada tahun 2023.

Tabel II.67.
Data Terdampak Bencana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Kab / Kota	Jenis Bencana	Jml Kejadian	Jml Korban	Jml Sarana
			(Total)	(Total)	(Total)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Selayar	Banjir	2	0	0
		Gelombang Pasang	0	0	0

No	Kab / Kota	Jenis Bencana	Jml Kejadian	Jml Korban	Jml Sarana
			(Total)	(Total)	(Total)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Tanah Longsor	1	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	2	0	0
		Kebakaran	12	15	9
		Angin Kencang	22	14	38
		Angin Puting Beliung	1	0	2
		Abrasi	1	0	0
		Karhutla	10	0	0
		Kekeringan	0	0	0
2	Bulukumba	Banjir	3	31	202
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	3	58	3
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	1	0	1
		Angin Kencang	4	2	4
		Angin Puting Beliung	1	0	4
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	2	0	0
		Kekeringan	28	9268	0
3	Bantaeng	Banjir	0	0	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	1	0	2
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	17	3	25
		Angin Kencang	3	0	34
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	10	0	0
		Kekeringan	0	0	0
4	Jeneponto	Banjir	0	0	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	0	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	31	45	74
		Angin Kencang	4	3	5
		Angin Puting Beliung	4	11	8
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	1	0	0
		Kekeringan	7	1400	0

No	Kab / Kota	Jenis Bencana	Jml Kejadian	Jml Korban	Jml Sarana
			(Total)	(Total)	(Total)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	Takalar	Banjir	0	0	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	0	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	13	3	13
		Angin Kencang	17	9	67
		Angin Puting Beliung	10	16	88
		Abrasi	3	0	3
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	34	200	0
6	Gowa	Banjir	1	0	1
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	3	63	1
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	4	36	9
		Angin Kencang	0	0	0
		Angin Puting Beliung	3	0	145
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	2	0	0
		Kekeringan	0	0	0
7	Sinjai	Banjir	14	2418	674
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	9	4	6
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	0	0	0
		Angin Kencang	4	78	5
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	12	0	0
		Kekeringan	1	52898	0
8	Maros	Banjir	4	8	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	0	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	10	6	22
		Angin Kencang	14	4	20
		Angin Puting Beliung	1	0	4
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0

No	Kab / Kota	Jenis Bencana	Jml Kejadian	Jml Korban	Jml Sarana
			(Total)	(Total)	(Total)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Kekeringan	3	58396	0
9	Pangkep	Banjir	0	0	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	1	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	19	7	24
		Angin Kencang	26	77	119
		Angin Puting Beliung	8	1	77
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	0	0	0
10	Barru	Banjir	2	3373	275
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	2	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	13	63	23
		Angin Kencang	14	520	257
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	2	0	0
		Kekeringan	2	0	0
11	Bone	Banjir	2	0	8
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	11	0	1
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	63	47	96
		Angin Kencang	25	12	100
		Angin Puting Beliung	2	1	7
		Abrasi	1	0	0
		Karhutla	25	2	0
		Kekeringan	0	0	0
12	Soppeng	Banjir	3	11,163	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	3	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	8	4	27
		Angin Kencang	4	0	33
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0

No	Kab / Kota	Jenis Bencana	Jml Kejadian	Jml Korban	Jml Sarana
			(Total)	(Total)	(Total)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	0	0	0
13	Wajo	Banjir	3	23111	6473
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	1	0	2
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	28	11	73
		Angin Kencang	15	274	11
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	3	1	0
		Kekeringan	1	10417	0
14	Sidrap	Banjir	3	94	303
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	2	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	16	53	27
		Angin Kencang	11	23	244
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	4	0	0
15	Pinrang	Banjir	5	500	400
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	6	1	5
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	15	3	16
		Angin Kencang	10	82	205
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	2	0	0
		Karhutla	3	0	0
		Kekeringan	0	0	0
16	Enrekang	Banjir	3	198	57
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	8	9	3
		Banjir Bandang	2	96	15
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	12	71	17
		Angin Kencang	3	20	5
		Angin Puting Beliung	0	0	0

No	Kab / Kota	Jenis Bencana	Jml Kejadian	Jml Korban	Jml Sarana
			(Total)	(Total)	(Total)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	14	0	0
		Kekeringan	4	0	0
17	Luwu	Banjir	5	1	2414
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	3	6	22
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	7	24	9
		Angin Kencang	2	0	5
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	0	0	0
18	Tana Toraja	Banjir	0	0	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	7	2	6
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	6	0	6
		Angin Kencang	1	0	0
		Angin Puting Beliung	7	1	13
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	3	0	0
		Kekeringan	1	0	0
19	Luwu Utara	Banjir	12	2427	502
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	2	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	12	46	13
		Angin Kencang	3	384	70
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	0	0	0
20	Toraja Utara	Banjir	0	0	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	13	0	8
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	8	0	9
		Angin Kencang	3	0	3

No	Kab / Kota	Jenis Bencana	Jml Kejadian	Jml Korban	Jml Sarana
			(Total)	(Total)	(Total)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Angin Puting Beliung	1	0	5
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	0	0	0
21	Luwu Timur	Banjir	2	0	16
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	2	10	2
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	3	0	0
		Kebakaran	10	41	15
		Angin Kencang	2	25	9
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	0	0	0
22	Pare-Pare	Banjir	4	797	1004
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	8	144	70
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	12	25	11
		Angin Kencang	47	16	75
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	0	0	0
23	Palopo	Banjir	3	1	6
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	4	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	14	1	9
		Angin Kencang	0	0	0
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	5	0	0
		Kekeringan	0	0	0
24	Makassar	Banjir	2	2102	0
		Gelombang Pasang	0	0	0
		Tanah Longsor	0	0	0
		Banjir Bandang	0	0	0
		Cuaca Ekstrim	0	0	0
		Gempa Bumi	0	0	0
		Kebakaran	25	687	156

No	Kab / Kota	Jenis Bencana	Jml Kejadian	Jml Korban	Jml Sarana
			(Total)	(Total)	(Total)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Angin Kencang	1	350	183
		Angin Puting Beliung	0	0	0
		Abrasi	0	0	0
		Karhutla	0	0	0
		Kekeringan	5	618653	0
Jumlah			**988**	**789814,163**	**15013**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Data capaian kinerja program pembangunan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.68.
Capaian Kinerja Program Urusan Kententraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	%	89	100	100	100	
Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100
Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	37	80	80
Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100	100	100	100
Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100	100	100	100
Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.1.6 SOSIAL

Standar Pelayanan Minimal urusan sosial mengamanatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis. Pada tahun 2023 populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sebanyak 415.310 orang dan populasi yang terdaftar dalam program keluarga harapan, program bantuan bersyarat untuk pengentasan kemiskinan yang bersumber dari kemensos sebesar 323.599 Orang. Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan

melampaui target dengan capaian 1077 orang yang terdiri dari Pendamping PKH sebanyak 121 Orang dan Taruna Siaga Bencana sebanyak 956 Orang. Jumlah Pemulangan orang terlantar sebanyak 259 orang dipulangkan ke daerah asal. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di UPT Dinas Sosial sebanyak 215 orang. Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi di dalam panti Mappaksunggu Pare-Pare yaitu sebanyak 60 orang dan terealisasi sesuai target yang ditentukan. Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi dalam panti Mattirodeceng yaitu sebanyak 50 orang. Jumlah populasi PPKS sebanyak 415.310 orang dan yang mendapatkan bantuan jaminan social (PKH) sebanyak 323.599 orang. Jumlah orang tua tunggal yang mengajukan proses pengangkatan anak WNI yaitu sebanyak 33 orang.

Pada tahun 2023 jumlah korban bencana yang terdampak sebanyak 74.159 orang dan semua korban terdampak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2023. Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten dengan jumlah korban bencana tertinggi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana provinsi sebesar 13.941 jiwa kemudian Kabupaten Pinrang sejumlah 1.270 jiwa, Kota Palopo sejumlah 254 jiwa, dan Kabupaten Wajo sejumlah 29.815 jiwa. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2 TMP/MPN dan terealisasi sesuai target yang ditetapkanData capaian kinerja program pembangunan urusan sosial tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.69.
Capaian Kinerja Program Urusan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	%	100	100	100	100	100
Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	%	60,97	38,91	65	100	100
Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	55,66	58	100
Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti (SPM)	%	20,83	35,12	100	100	100
Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM)	%	30,09	3,88	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti (SPM)	%	11,35	100	100	100	100
Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	%	5,52	100	100	100	100
Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	50,4	75,45	88,04	3,6	86,45
Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	%	100	96,96	100	100	100
Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100	15,63	100	100	100
Persentase TMP yang dikelola	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.2 PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR

2.3.2.1 KETENAGAKERJAAN

Capaian persentase kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja makro sebesar 75 persen dimana sejumlah 18 kabupaten/kota yang masih aktif dan 5 kabupaten/kota yang telah habis masa berlakunya dan 1 Kabupaten tidak menyusun karena tidak tersedia anggaran. Dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan semua menyusun perencanaan tenaga kerja makro. Capaian perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro sebesar 12 persen dimana dari 25 perusahaan terdapat 3 perusahaan yang telah menyusun perencanaan tenaga kerja mikro. Capaian persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan sebesar 83,33 persen dimana jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 60 orang dan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 50 orang.

Jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga pada tahun 2023 mengalami peningkatan 1,24 persen poin dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1.068.775 orang. Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri pada tahun 2023 adalah sebesar 100 persen dari target 100 persen. Dari total 80 orang peserta pelatihan yang berbasis

kewirausahaan yang telah mandiri sebanyak 80 orang, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh UPT BPK.

Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami peningkatan dari tahun 2020. Berdasarkan hasil monitoring di 24 kabupaten/kota jumlah pencari kerja sebanyak 311.117 orang dan yang ditempatkan sebanyak 17.424 orang yang terdiri dari AKAL (Antar Kerja Antar Luar) sebanyak 4.990 orang, AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) sebanyak 246 orang, Disabilitas sebanyak 19 orang dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebanyak 177 orang.

Tahun 2023 persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan capaian 80,81 persen. Dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 41.114 orang dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 33.216 orang yang terdiri dari AKAD/AKL sebanyak 26.306 orang, Disabilitas sebanyak 52 orang dan PMI sebanyak 5.292 orang. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 tertinggi di Kota Makassar sejumlah 9.484 orang, sedangkan yang terendah di Kabupaten Enrekang sejumlah 1 orang.

Persentase daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Persentase daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 sebesar 63,19 persen dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 6.889.399 orang dan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 4.889.399 orang mengalami peningkatan sebesar 2,61 persen dari tahun 2021. Daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 tertinggi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone. Sedangkan daya serap tenaga kerja terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, dan Kota Palopo.

Untuk persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023 adalah sebesar 67,42% persen melampaui 7,42 persen dari target 60 persen. Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama sebesar 23,60 persen yang diukur dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 339 kasus dan jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 80 kasus dan sisanya adalah anjuran. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 63,38 persen, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 27.157 perusahaan serta jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 40.283 perusahaan.

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek merupakan rasio antara jumlah pekerja/buruh yang mengikuti jamsostek dibagi dengan total jumlah pekerja. Tahun 2023 persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi Program Jamsostek adalah sebesar 47,48 persen. Jumlah pekerja yang telah mengikuti Program Jamsostek sebesar 1.307.018 orang yang terdiri dari PU : 844.393 orang, , BPU: 259.684 orang dan Jakon : 202.941 orang. Capaian persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan sebesar 84,29 dari target 84, berarti ada kenaikan 0,29 persen. Jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 40.283 perusahaan dan jumlah perusahaan yang telah diperiksa sebanyak 33.954perusahaan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.70.
Capaian Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	95,83	95,83	91,67	66,7	75
Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	10	12	12
Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	73	83,33	82
Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	81,25	100	100
Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	4,36	3,29	5,60	9,49	9,69
Persentase daya serap tenaga kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	20,27	61,58	63,19	62,82
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	63,38	67,42
Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	63,55	77,99	47,12	49,43	47,48
Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	62,59	87,16
Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100	84,29

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Salah satu indikator makro dalam melihat keberhasilan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan adalah melihat peran aktif perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, yang tercermin melalui nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Selatan selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dikatakan cukup berfluktuasi. Pada tahun 2021 nilai IDG turun ke angka 74,76 dan kembali meningkat ke angka 76,37 pada tahun 2022 namun kembali turun ke angka 75,24

pada tahun 2023 dan berada di bawah rata-rata nasional.disebabkan faktor komposit IDG yang belum sepenuhnya tercapai maksimal.

Tabel II.71.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2019-2023

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	%	76,01	76,32	74,76	76,37	75,24
Nasional	%	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Tiga indikator komposit IDG menunjukkan bahwa capaian Perempuan pada ketiga indikator yaitu Indikator keterlibatan Perempuan di Parlemen selama tiga tahun mengalami fluktuasi naik turun yaitu 25,88 persen di tahun 2021 naik 27,06 di tahun 2022 dan kembali turun 25,88 persen di Tahun 2023 hal ini dipicu oleh ada pergantian Parlemen perempuan antar waktu dibeberapa Kabuaten/ Kota digantikan parlemen laki-laki yaitu di Kabupaten Luwu. Dilihat dari indikator proporsi Perempuan sebagai tenaga professional selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 55,10 di tahun 2021 dan turun di 52,99 tetapi ditahun 2023 mengalami peningkatan di angka 55,03. Komponen terakhir yang sangat berpengaruh pada indeks pemberdayaan Perempuan yaitu Sumbangan Pendapatan Perempuan yang mengalami penurunan meskipun yang tidak terlalu signifikan yaitu 32,51 di tahun 2021 dan turun 0,08 point di tahun 2022 yaitu 32,43 dan turun lagi 0,02 poin di tahun 2023 yaitu 32,41 persen. Berdasarkan kondisi diatas indikator yang paling menentukan turunnya IDG 0,13 poin di tahun 2023 adalah indikator sumbangan pendapatan Perempuan yang relative cenderung menurun selama tiga tahun terakhir, faktor yang mempengaruhi diantaranya masih kurangnya peranan Perempuan sebagai pencari nafkah (Perempuan bekerja). Hal ini diperkuat dengan budaya patriarkhi yang masih sangat kental di Sulawesi Selatan sehingga keterbatasan Perempuan dalam mengakses pekerjaan yang layak atau sektor formal sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sumbangan pendapatan Perempuan di Sulawesi Selatan adalah dengan melakukan sinergi dengan Lembaga pemerhati Perempuan dan anak melalui Forum PUSPA, Meningkatkan Kewirausahaan Perempuan di beberapa Kabupaten/ Kota dan Melakukan Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 terendah di Kabupaten Luwu Utara dengan nilai 47,63, sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Gowa dengan nilai 79,70. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.72.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Selayar	68,03	70,06	68,07	68,71	70,29
Bulukumba	69,89	68,22	67,10	70,32	69,74

Kabupaten/Kota	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bantaeng	80,27	80,26	81,20	80,21	79,28
Jeneponto	68,04	68,24	68,68	68,94	70,73
Takalar	70,66	68,78	70,67	73,39	74,45
Gowa	78,31	77,97	79,71	78,35	79,70
Sinjai	72,48	73,46	73,59	73,78	71,09
Maros	69,93	72,43	72,38	71,63	71,85
Pangkep	57,03	59,44	59,94	64,12	66,38
Barru	63,41	63,96	63,98	65,24	64,91
Bone	58,55	56,86	57,55	59,09	58,61
Soppeng	71,45	71,15	70,54	71,07	74,60
Wajo	55,09	56,24	56,30	55,83	57,90
Sidenreng Rappang	56,80	56,86	56,39	56,71	60,37
Pinrang	67,92	68,11	68,43	65,12	68,92
Enrekang	58,28	60,32	56,51	62,98	64,68
Luwu	55,89	57,15	57,29	58,03	55,34
Tana Toraja	69,32	68,50	68,77	70,68	70,29
Luwu Utara	38,92	38,11	41,11	43,96	47,63
Luwu Timur	50,76	50,76	54,09	55,4	53,38
Toraja Utara	62,58	60,98	62,75	64,21	62,23
Kota Makassar	78,32	77,61	76,59	78,15	78,13
Kota Pare-Pare	73,86	74,06	70,86	71,21	71,85
Kota Palopo	77,53	77,47	73,10	79,1	78,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2020-2024

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dalam mendukung dan mewujudkan kesetaraan gender, melalui penerapan pelaksanaan 7 prasyarat awal PUG (Pengarusutaman Gender) di Provinsi maupun kabupaten/kota. Bentuk keberhasilan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sulawesi Selatan adalah perolehan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) pada kategori Nindya di Tahun 2023. Jika dilihat dari keberhasilan Pemerintah Provinsi dalam mendorong pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten/ Kota dilihat dari persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG dalam Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sudah 61 persen. Adapun kegiatan yang mendukung kesetaraan gender di tahun 2023 difokuskan pada dilakukan pendampingan/*mentoring* pengarusutaman gender secara langsung di 24 kab/kota serta memaksimalkan kelembagaan PUG di Tingkat Provinsi melalui Penyusunan Rancangan RAD PUG, penguatan focal point PUG melalui pelatihan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender), Penguatan kelembagaan data Gender dan Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya, urusan perlindungan perempuan dan anak di tahun 2023 masih terus fokus terhadap upaya penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya melalui penyediaan lembaga layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi. Hingga tahun 2023, sebesar 75 persen atau sebanyak 18 kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membentuk Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai wadah dalam mendukung penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.73.
Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	%	58,33	75	83,33	71	61
Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	%	0	54	58	25	30
Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	0	54	58	87,5	60
Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	%	58,33	58,33	66,7	62,5	75
Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak yang terupdate	%	0	0	82,5	85	89
Persentase kabupaten/Kota Layak Anak	%			62,5	87,5	91,6
Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	0	54	58	58,3	60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dalduk dan KB, 2020-2024

Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan Perempuan dan anak yg terstandarisasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan disahkannya Undang-undang 12 tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana UPT PPA diberi mandat dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Tahun 2023 tercatat 14 UPTD PPA yang telah terbentuk dari 24 kabupaten kota. Diantaranya, Luwu Utara, Bone, Wajo, Enrekang, Maros, Makassar, Luwu Timur, Sinjai, Takalar, Soppeng, Bulukumba, Barru, dan Gowa. Tersisa 10 kabupaten kota yang belum terbentuk. Hingga saat ini, layanan perlindungan terus bergerak dan menuju pembentukan UPT PPA di daerah masing-masing. Upaya-upaya standarisasi terus dilaksanakan setiap tahunnya dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM demi peningkatan standar layanan perlindungan perempuan dan anak.

Presentase Kabupaten Kota Layak Anak meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 sebanyak 21 kabupaten kota yang telah memperoleh predikat KLA, tersisa 3 kabupaten kota yang belum memperoleh KLA yaitu Tana Toraja, Toraja Utara dan Wajo. Hal ini dikarenakan kabupaten kota yang tidak mengisi, dan komitmen daerah yang masih kurang dalam mendorong pemenuhan 24 indikator KLA. Tahun 2023, sebanyak 22 kabupaten kota telah memperoleh predikat KLA tersisa Luwu dan Jeneponto. Kabupaten Luwu pada tahun 2022 telah mendapat peringkat KLA dengan kategori pratama, namun mengalami penurunan di tahun 2023 dengan tidak mendapatkan peringkat, begitupun dengan Kabupaten Jeneponto. Pemenuhan indikator KLA ini, memang dibutuhkan keterlibatan lintas sektor. Kabupaten kota yang tidak memperoleh predikat KLA umumnya keterlibatan lintas sektor dalam pemenuhan 24 indikator KLA nya masih kurang. Beberapa dokumen indikator tidak dapat dipenuhi. Dan kepala perangkat daerah /

pejabat yang berganti juga menjadi salah satu faktor sulitnya memperoleh predikat KLA.

Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi. Layanan pembelajaran keluarga yang dimaksud adalah terbentuknya PUSPAGA di kabupaten kota sampai di tingkat desa. PUSPAGA adalah layanan Pembelajaran Keluarga yang berbasis Kesetaraan Gender dan Hak Anak, serta menjadi program pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang umumnya terjadi di lingkugnan keluarga. Puspaga mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui program sosialisasi dan advokasi kepada Masyarakat untuk lebih memal=hami peran dan fungsi keluarga. tahun 2019 dan 2020 stagnan di angka 58,33%. Meningkat menjadi 66,7% di tahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi 62,5 % di tahun 2022. Faktor pendorong terjadinya peningkatan penyediaan layanan pembelajaran keluarga, karena pemerintah provinsi terus melakukan advokasi dan mendorong terbentuknya PUSPAGA di kabupaten kota, setiap tahunnya komitmen dari perangkat daerah mengalami peningkatan.

2.3.2.3 PANGAN

Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun didukung oleh anggaran DAK Fisik Pertanian pemerintah pusat untuk kabupaten/kota (anggaran langsung ke kelompok tani) berupa pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat pada kelompok tani yang memenuhi syarat. Pada tahun 2021 dilaksanakan pembangunan lumbung pangan masyarakat sejumlah 25 lumbung sedangkan pada tahun 2022 jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun mengalami peningkatan dengan jumlah 58 lumbung.

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan mempunyai cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 140 ton yang dititip di Badan Urusan Logistik (Bulog). Ketersediaan beras di provinsi Sulawesi Selatan mampu memenuhi kebutuhan penduduk sehingga masuk dalam kategori aman. Faktor pendukung capaian ketersediaan pangan utama adalah bergantung pada produksi padi dan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Ketersediaan beras pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Untuk komoditi jagung mengalami surplus. Begitu pula dengan ketersediaan jagung mencapai 202,72 persen melampaui target sebesar 58,2 persen atau 248,32 persen. Berbeda dengan ketersediaan kedelai mengalami defisit yakni situasi dimana tingkat ketersediaan pangan kedelai lebih kecil dari total kebutuhan. Capaian ketersediaan kedelai tahun 2023 sebesar 0,28 persen tidak mencapai target sebesar 27,55 persen. Faktor penghambat pencapaian target disebabkan karena Sulawesi Selatan bukan merupakan daerah sentra produksi kedelai. Selain itu walaupun areal luas tanam diperluas akan tetapi banyak pertanaman puso akibat banjir. Sebab lain akibat rendahnya produksi kedelai menyebabkan harga kedelai naik, dalam prespektif ketahanan pangan terkendala dalam akses ketersediaan dan akses distribusi. Tahun 2023 jumlah ketersediaan pangan tidak mencapai target yang dipengaruhi oleh jumlah produksi pertanian dan jumlah penduduk yang menurun, namun meskipun demikian jumlah ketersediaan pangan Sulawesi Selatan melebihi jumlah kebutuhan konsumsi. Berdasarkan neraca pangan tahun 2022, necara beras sebanyak 759.916 ton, neraca jagung sebanyak 662.137 ton dan jumlah produksi kedelai sebanyak 4.006 ton (untuk pangan kedelai tidak dilakukan perhitungan neraca karena tidak masuk kategori pangan pokok strategis).

Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein melebihi angka kecukupan gizi (AKG)

berdasarkan standar nasional sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kapita/hari bila dikonsumsi. Tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkanyaitu 2.150 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi bersumber dari beras dan jagung pada tahun 2022 mencapai 3.593 kkal/kapita/hari mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,07 persen. Tingkat ketersediaan protein pada tahun 2022 sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan yaitu 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein bersumber dari telur, susu, daging sapi, daging ayam dan ikan dengan capaian 171,65 gram/kapita/hari pada tahun 2022 mengalami penurunan -15,44 persen dari tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan oleh Tim FSVA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2023, diketahui bahwa jumlah sebaran Kecamatan yang dianalisis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan/pemekaran Kecamatan dari 307 di tahun 2020 menjadi 310 Kecamatan di tahun 2021 (penambahan 3 Kecamatan), dan pada tahun 2022 ini kembali terjadi pemekaran menjadi 311 (penambahan 1 Kecamatan). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan (fluktuatif) status ketahanan dan kerentanan pangan di Sulawesi Selatan sejak tahun 2020-2023, dimana pada tahun 2020 sebanyak 22 (7,17%) Kecamatan naik menjadi 27 Kecamatan (8,71%) pada tahun 2021, di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 15 Kecamatan (4,82%) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya 5 Kecamatan (1,61%) yang terindikasi rawan pangan.

Perwujudan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan masih dihadapkan pada beberapa kendala terutama yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Beberapa kendala dalam perwujudan ketahanan pangan berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) antara lain: masih terdapat beberapa daerah yang memiliki keterbatasan pada aspek ketersediaan pangan, kemiskinan yang tinggi, pangsa pengeluaran yang tinggi, akses listrik dan air bersih yang rendah, tingkat pendidikan perempuan yang rendah, dan balita stunting yang tinggi serta angka harapan hidup yang rendah. Disamping itu, hasil analisis FSVA juga menunjukkan bahwa terdapat daerah yang sebelumnya masuk dalam status tahan pangan menjadi turun statusnya menjadi rawan pangan.

Berdasarkan hasil analisis FSVA tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) sekaligus mempertahankan wilayah yang statusnya sudah tahan pangan agar tetap tahan pangan (prioritas 4 dan 5). Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan mengoptimalkan dan memberdayakan keluarga petani untuk meningkatkan ketersediaan pangan, perbaikan gizi sekaligus peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks global, hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan SDG-1 yaitu pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2 yaitu mengakhiri kelaparan melalui ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan sistem pertanian berkelanjutan serta tercapainya individu dan masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mempercepat pengentasan daerah rentan rawan pangan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan intervensi Penanganan Kerawanan Pangan yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (PK) yang merupakan kegiatan belanja diserahkan kemasyarakat sebagai trigger, dengan harapan dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang dan akan peningkatan status daerah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) menjadi tahan pangan dan daerah yang sudah

tahan pangan pangan tidak menurun statusnya menjadi rentan rawan pangan (prioritas 4-5) serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pendapatan petani.

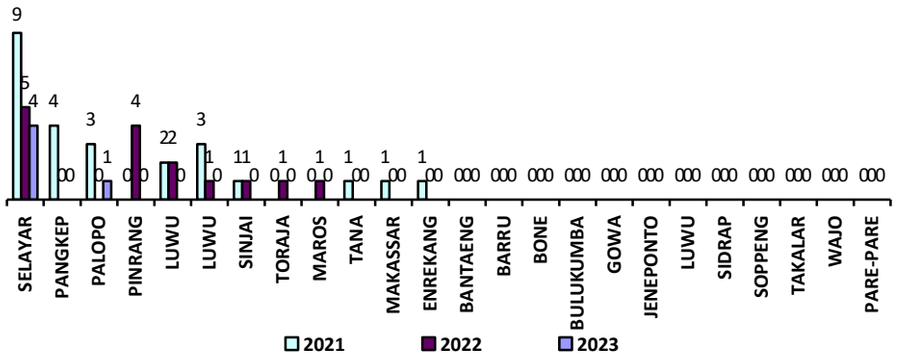
Sementara itu dari segi kualitas yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan harapan (PPH). Berdasarkan data dapat diketahui bahwa dalam rentang tahun 2020-2023 skor PPH berkisar antara 80,1-85,3 yang berarti bahwa skor PPH masih belum mencukupi skor ideal 100. Namun demikian, trend data menunjukkan kecenderungan peningkatan poin dari tahun ke tahun. Skor PPH dikategorikan sangat rendah (< 55), rendah (55-70), cukup (71-84), dan tinggi (>85). Skor PPH Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023 berada di angka 85,3 sehingga termasuk kategori tinggi, yang menandakan bahwa keragaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi. Belum tercapainya skor 100 disebabkan karena terdapat beberapa kelompok pangan yang konsumsinya masih sangat rendah jika dibandingkan dengan konsumsi idealnya, yaitu umbi-umbian, konsumsinya 30 gr/kap/hr dari konsumsi ideal 108 gr/kap/hr, kacang kacangan, konsumsinya 15,5 gr/kap/hr dari konsumsi ideal 38 gr/kap/hr, buah/biji berminyak, konsumsinya 2,8 gr/kap/hr dari konsumsi ideal 11 gr/kap/hr. Disisi lain, terdapat kelompok pangan yang konsumsinya sudah berlebih, yaitu Pagi-padian, konsumsinya 345,9 gr/kap/hr dari konsumsi ideal 296 gr/kap/hr, Minyak dan lemak, konsumsinya 23,2 gr/kap/hr dari konsumsi ideal 22 gr/kap/hr.

Hal ini menandakan bahwa konsumsi masyarakat terhadap kedua kelompok pangan tersebut sudah sangat tinggi. Dari data terlihat Peningkatan konsumsi pada kedua kelompok pangan tersebut sudah tidak akan meningkatkan skor PPH karena telah mencapai skor maksimal terutama pada kelompok pangan padi-padian yang secara konsisten menyumbakan skor 25 pada rentang tahun 2020-2023. Ini berarti bahwa perlu dilakukan upaya untuk menurunkan konsumsi padi-padian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Situasi daerah rentan rawan pangan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun tahun 2023 mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Daerah Prioritas 1-3 (agak rawan pangan) menurun dari 15 kecamatan menjadi 5 kecamatan yaitu di Kota Palopo 1 kecamatan dan di Kabupaten Kepulauan Selayar 4 kecamatan. Adapun wilayah Kecamatan masuk kategori prioritas 3 (agak rentan pangan) pada tahun 2023 yaitu Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomatene, Buki (Kab.Selayar) dan Telluwanua (Kota Palopo).

Karakteristik kecamatan rentan rawan pangan disebabkan antara lain tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih (Kota Palopo) dan kendala distribusi pangan (Kabupaten Kepulauan Selayar). Adapun seberan kerawanan pangan Kabupaten/Kota dalam 3 tahun yaitu Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik II.40.
Sebaran Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan Kesehatan manusia. Dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kima dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dilengkapi dengan peraturan perundang-unfangan dibidang mutu keamanan pangan. Dukungan Stakeholder terkait dalam hal ini kelompok Wanita Tani, Balai POM dan Pelaku Usaha merespon baik kegiatan pengambilan dan pengujian sampel. Pada tahun 2022 dari 30 sampel yang diuji semuanya lolos uji pestisida dan formalin. Telah diterbitkan 1 Sertifikat Prima 3 dan 47 Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.74.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	%	15,19	14,98	14,58	29,15	60 (target)
Ketersediaan Beras	%	363,76	332,21	363,8	367,91	334,94
Ketersediaan Jagung	%	47,88	53,27	61,83	55,04	202,72
Ketersediaan Kedelai	%	24,96	13,66	13,62	18,23	0,28
Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/ kapita/ hari	3.879	3.168	3.484,4	3.593	4.616
Ketersediaan Protein Perkapita	gr/ kapita/ hari	139,92	86,16	94,78	171,65	158,19
Jumlah Daerah Rawan Pangan	%	16	22	27	15	5
Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	16,29	7,49	25,64	74,07	26,66
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100
Skor Pola Pangan Harapan	%	83,4	80,4	80,1	83,1	85,3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.2.4 PERTANAHAN

Pada Tahun 2023 Jumlah perencanaan pengadaan tanah yang difasilitasi adalah sebanyak 3 (tiga) perencanaan, yaitu : a) Pengadaan tanah pembangunan Bendungan Jenelata Kabupaten Gowa seluas ± 1.590,67 Ha; b) Pengadaan tanah pembangunan Bandara Wisata Kabupaten Bulukumba seluas ± 79,93 Ha; c) Pengadaan tanah Pembangunan Overpass Tonasa 2 Kabupaten Pangkep dan Jalan Ongkoe Kab. Maros, Jalur Kereta Api Makassar-Parepare seluas ± 5,28 Ha. SK penetapan lokasi yang diterbitkan sebanyak 1 (Satu) SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yakni Pengadaan tanah pembangunan bendungan jenelata kab.

Gowa. Adapun Pengadaan tanah pembangunan Bandara Wisata kab. Bulukumba belum dilakukan penetapan lokasi karena dilakukan perbaikan FS (Feasibility Study), sedangkan Pembangunan Overpass Tonasa 2 Kab. Pangkep dan Jalan Ongkoe Kab. Maros, Jalur Kereta Api Makassar-Parepare, masih dalam penyempurnaan dokumen terkait luasan tanah yang akan dibebaskan.

Kegiatan Penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota serta kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi yang dilakukan pada Tahun 2023 antara lain : a) Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kab. Bantaeng; b) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data lahan kewenangan pemprov yang berada di Kabupaten Gowa; c) Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Lahan Milik Pemprov yang berada di di Kab. Kepulauan Selayar; d) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data lahan kewenangan pemprov yang berada di Kabupaten Bulukumba; e) Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi data lahan milik Pemprov yang berada di Kabupaten Maros. Sedangkan jumlah aduan sengketa tanah pada tahun 2023 sejumlah 14 sengketa dan seluruhnya telah difasilitasi.

Tabel II.75.
Capaian Kinerja Program Urusan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	140	83,3	100	100	100
Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	83,33	100	100	100
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.3.2.5 LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen RPPLH memuat tentang latar belakang, kondisi wilayah dan lingkungan hidup, permasalahan dan isi pokok lingkungan hidup, serta arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan untuk 30 tahun mendatang. Pada tahun 2018 DPLH Prov.Sulsel telah menyusun dokumen RPPLH Sulawesi Selatan untuk 2017-2047, sehingga target tersedianya dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai pada tahun 2017. Skenario RPPLH Prov.Sulsel adalah untuk Periode I (tahun 2017-2026), Periode II (tahun 2027-2036), dan Periode III (tahun 2037-2047). Dengan adanya tahapan verifikasi dokumen RPPLH maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan penyusunan peraturan daerah tentang RPPLH. Tahun 2022 direncanakan untuk menyusun naskah akademik Ranperda RPPLH, di tahun 2023 penyelesaian penyusunan RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Peraturan Daerah. Tahapan pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2022 sebesar 60 persen dimana pada tahapan ini dilakukan pra verifikasi di KLHK terhadap Draft Dokumen RPPLH yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Surat Edaran MenLHK No. 5 Tahun 2016.

Berdasarkan pembagian urusan Pokja Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merupakan koordinator inventarisasi aksi mitigasi khusus sektor limbah. Beberapa kegiatan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah yang dilakukan inventarisasi antara lain TPS 3R, TPST, Bank Sampah, Pengomposan serta didukung dengan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2023 sebesar 7,85 persen yang diperoleh dari sejumlah kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK yaitu kegiatan TPS3R sebesar 135,87 Ton CO2 Eq, TPST sebesar 3.027,52 Ton CO2 Eq, Rumah Kompos sebesar 566,77 Ton CO2 Eq, Bank sampah sebesar 159,07 Ton CO2 Eq, ProKlim sebesar 7.836,79 Ton CO2 Eq serta sektor informal (pengepul) sebesar 1.370,21 Ton CO2 Eq. Total jumlah penurunan Emisi GRK pada tahun 2023 sebesar 13.096,23 Ton CO2 Eq.

Tabel II.76.
Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No	Kegiatan	Jumlah Penurunan Emisi (Ton CO_2 Eq)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	TPS3R	325,07	3,77	53,38	667,88	135,87
2	TPST	2,85	1,78	765,8	5.271,15	3.055,52
3	Rumah Kompos	0,133	0,778	309,67	1.120,37	566,77
4	Bank Sampah	0,342	1.328,67	200,28	486,47	159,07
5	ProKlim	0	0	3.895,29	251,77	7.836,79
6	Aplikasi Aksara	163,92	778,29	1.911	0	0
7	Sektor Informal (Pengepul)				6.329,08	1.370,21
Total		**7.135,42**	**14.126,72**			**13.096,23**

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian persentase tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi) pada tahun 2022 sebesar 92,85 persen atau sebanyak 320 jenis tanaman koleksi yang berada di kebun Raya Pucak dari target 350 jenis hingga tahun 2023.

Target sampah perkotaan yang tertangani sebesar 73 persen sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 55,48 persen yang berasal dari jumlah sampah yang ditangani sebesar 765.570 ton/tahun dibagi dengan timbulan sampah sebesar 1.380.553,36 ton. Kapasitas infrastruktur layanan persampahan serta sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah di kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.77.
Kapasitas dan Pengoperasian TPA Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas (Ton/Hari)	Sistem Pengoperasian
1	Kepulauan Selayar	10	Controll Landfill (Over)
2	Bulukumba	30	Sanitary Landfill (Over)
3	Bantaeng	21	Sanitary Landfill
4	Jeneponto	27	Controll Landfill
5	Takalar	9	Sanitary Landfill
6	Gowa	238	Open Dumping

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas (Ton/Hari)	Sistem Pengoperasian
7	Sinjai	19	Controll Landfill (Over)
8	Maros	49	Controll Landfill
9	Pangkajene dan Kepulauan	30	Controll Landfill
10	Barru	10	Controll Landfill (Over)
11	Bone	57	Controll Landfill (Over)
12	Soppeng	25	Controll Landfill (Over)
13	Wajo	59	Sanitary Landfill
14	Sidenreng Rappang	57	Sanitary Landfill (Over)
15	Pinrang	36	Sanitary Landfill
16	Enrekang	45	Controll Landfill
17	Luwu	51	Controll Landfill
18	Tana Toraja	16	Open Dumping
19	Luwu Utara	14	Controll Landfill (Over)
20	Luwu Timur	9	Controll Landfill
21	Toraja Utara	11	Controll Landfill
22	Makassar	603	Controll Landfill
23	Parepare	57	Controll Landfill (Over)
24	Palopo	72	Controll Landfill

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Target cakupan limbah yang dikelola pada tahun 2022 sebesar 4.000.000 ton. Adapun limbah yang dihasilkan sebesar 5.002.706,88 ton (termasuk FABA dan Slug nikel) sedangkan belum dikelola lanjut atau bersisa sebesar 68.075,35 ton. Target ketaatan pemrakarsa usaha terhadap izin lingkungan dan Izin PPLH tahun 2023 sebanyak 26 persen dimana jumlah pemrakarsa yang taat sebanyak 16 usaha dan target pengawasan usaha sebanyak 65 usaha, sedangkan realisasi pemrakarsa usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH sebanyak 21 usaha dan pengawasan usaha/kegiatan dan 71 usaha/kegiatan yang diawasi terdiri dari 65 pengawasan langsung dan 6 pengawasn tidak langsung.

Realisasi persentase pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH sebanyak 65,27 persen pada tahun 2023 yang terdiri dari 53 MHA yang dibina sedangkan total MHA yang dibina sampai dengan tahun 2023 sebanyak 72 MHA dan realisasi sebanyak 53 MHA yang dibina. Target Cakupan lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH sebanyak 154 instansi lembaga dan organisasi, yang dilakukan penyuluhan sebanyak 134 instansi lembaga dan organisasi pada tahun 2022. Target cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan pada tahun 2022 sebanyak 30 rekomendasi dan penanganan pengaduan yang tertangani pada tahun 2022 sebanyak 30 rekomendasi. Pada tahun 2022 jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan sebesar 111 pengharagaan dari pelaksanaan kegiatan adiwiyata, kalpataru, adipura, proklim dan proper.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.78.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	20	60	50
Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	%	Belum dilakukan pengukuran	3,4	3,88	7,85	0,37
Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	85,71	92,85	40
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	73,33	72,83	82,32	54,48	74 (target)
Cakupan limbah yang dikelola	%	57	69	16,79	98,64	98 (target)
Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	40	60	20	29,6	26 (target)
Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	13,8	27,7	29,16	73,61	65,27
Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	0	0	64,29	87	45,45
Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang diberikan	Penghargaan	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	111	14
Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

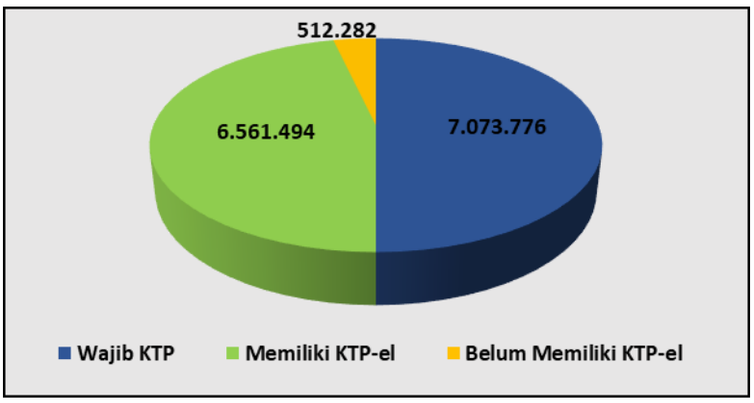
Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas resmi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagai bukti diri bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah senantiasa memberi dukungan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el serta mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih

(DKB) Semester II Tahun 2023 Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 7.073.776 jiwa dari total 9.400.283 jiwa penduduk. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 6.561.494 jiwa atau sebesar 97,26 persen. Sementara jumlah penduduk wajib KTP di Sulawesi Selatan yang belum memiliki KTP-el sejumlah 185.108 jiwa. Pencapaian ini didukung melalui sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait kepemilikan KTP-el yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

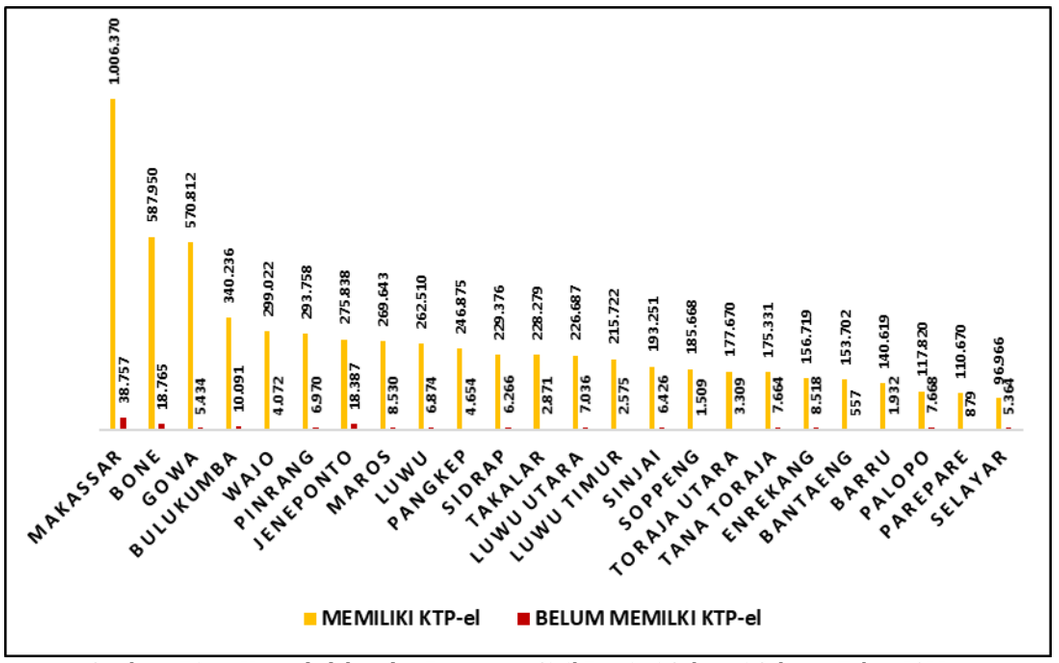
Diagram II.7.
Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

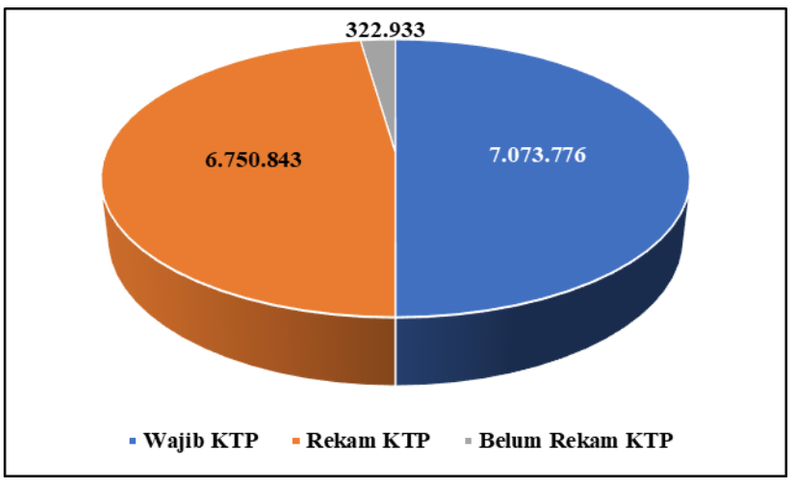
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan Identitas Wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagaimana telah dijelaskan pada Nomor 1 (satu) diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai Instansi yang menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan di daerah wajib memberikan pelayanan tersebut. Capaian tertinggi penduduk yang memiliki KTP-el di Kota Makassar dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 1.006.370 jiwa, sedangkan yang belum memiliki KTP-el sebesar 38.757 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 96.966 jiwa sedangkan yang belum memiliki KTP-el sebesar 5.364 jiwa. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.41.
Penduduk Ber-KTP Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Diagram II.8
Penerbitan KTP-el
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

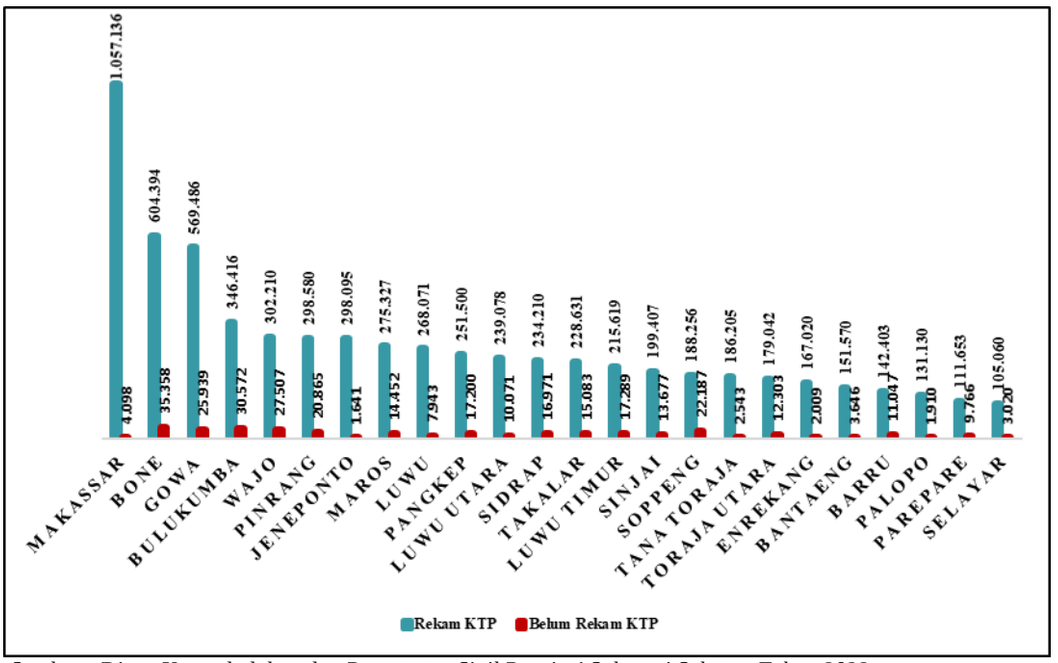


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Perekaman KTP-el merupakan kegiatan perekaman Sidik Jari, Scan Retina Mata, Tanda Tangan serta Data Pribadi yang dilakukan oleh Penduduk Wajib KTP-el ataupun belum menjadi wajib KTP-el. Perekaman ini dimaksudkan untuk mencegah KTP-el ganda atau KTP-el yang dipalsukan sehingga menciptakan keakuratan data yang yang nantinya akan mendukung program pembangunan pemerintah. Data Demographic yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar dalam menetapkan hasil Perekaman KTP-el setiap bulannya. Jumlah Penduduk Wajib Rekam KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 7.073.776 jiwa yang ditargetkan dari total jumlah penduduk 9.362.290 jiwa dan yang telah telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 6.750.843 atau 95,43 persen.

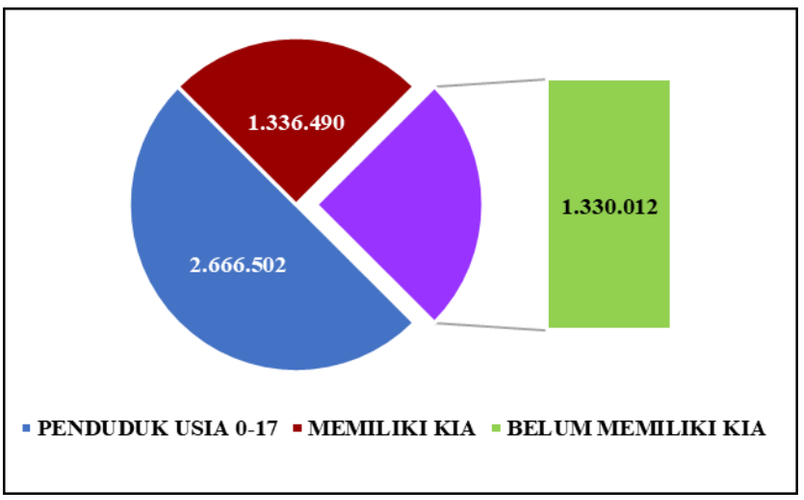
Capaian tertinggi penduduk yang melakukan rekam KTP-el di Kota Makassar dengan jumlah penduduk yang telah melakukan rekam KTP-el sejumlah 1.061.234 jiwa, sedangkan yang belum melakukan rekam KTP-el sebesar 4.098 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk yang telah melakukan rekam KTP-el sejumlah 105.060 jiwa sedangkan yang belum melakukan rekam KTP-el sebesar 3.020 jiwa.

Grafik II.42.
Penerbitan KTP-el Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Diagram II.9.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



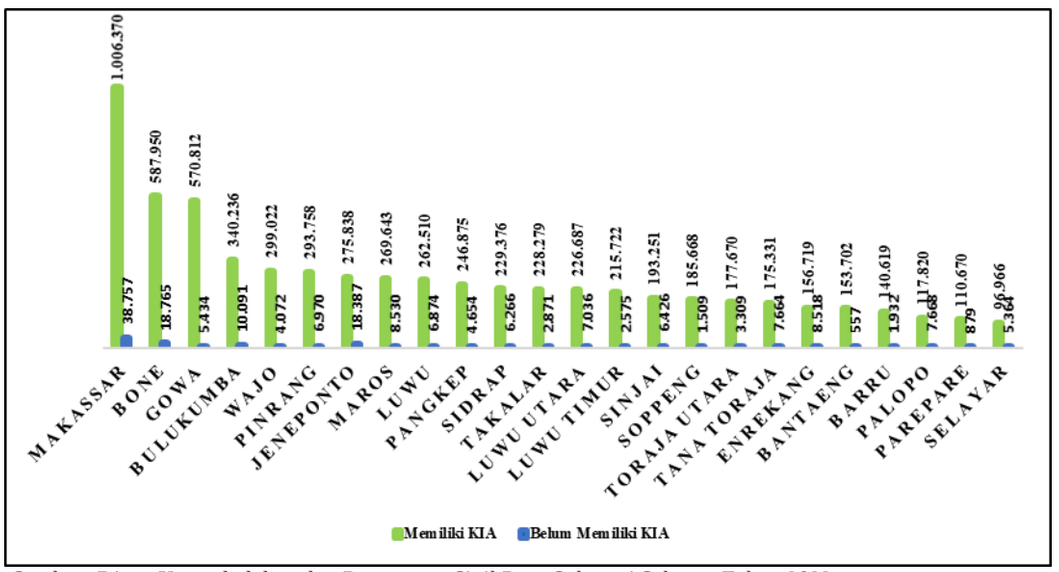
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan Kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk anak berusia kurang dari 17 Tahun dan atau belum menikah. Pada dasarnya fungsi KIA ini sama dengan KTP-el dan KIA terbagi 2 (dua) yaitu KIA untuk anak 0-5 tahun dan KIA untuk anak 5-17 Tahun kurang 1 hari, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu

Identitas Anak. Berdasarkan Permendagri tersebut kegunaan dari KIA antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pendataan warga negara sebagai perlindungan dan pelayanan publik dan sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khusunya terhadap anak-anak. Pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebanyak 1.336.490 jiwa telah memiliki KIA dari 2.666.502 jiwa penduduk usia 0-17 Tahun dengan persentase kepemilikan KIA sebesar 50,12 persen mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 54,29 persen.

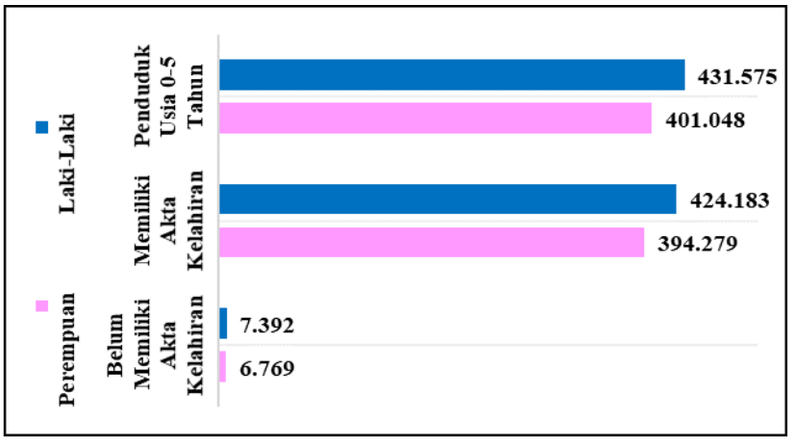
Capaian kepemilikan kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2023 tertinggi di Kota Pare-pare sebesar 91,79 persen dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA sejumlah 44.664 jiwa dan yang belum memiliki KIA sejumlah 3.994 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Kepulauan Takalar sebesar 27,07 persen dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA sejumlah 26.076 jiwa dan yang belum memiliki KIA sejumlah 70.241 jiwa.

Grafik II.43.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

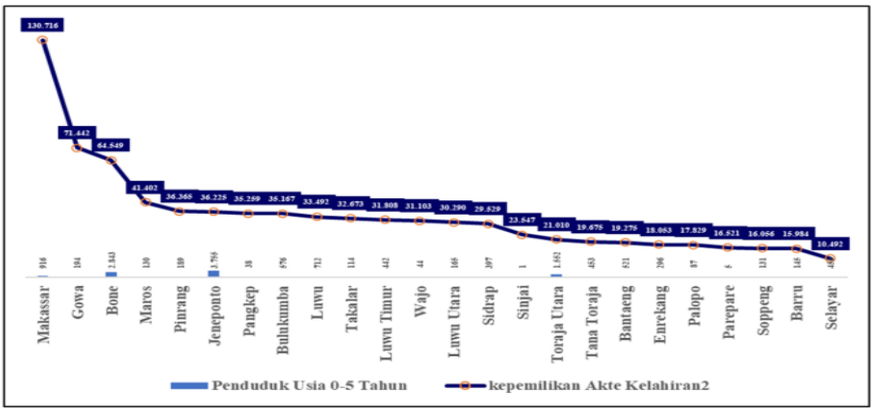
Grafik II.44.
Bayi Berakta Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir.

Grafik II.45.
Bayi Ber Akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



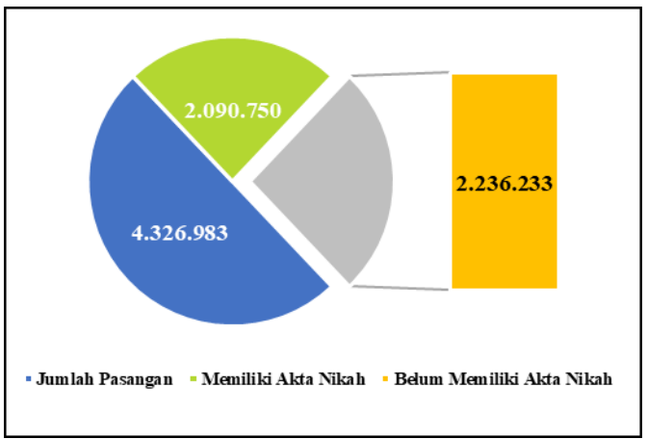
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Bayi berakte kelahiran adalah penduduk yang berusia 0-5 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2023 jumlah bayi (penduduk 0-5 Tahun) di Sulawesi Selatan berjumlah 832.623 jiwa dan yang telah memiliki akte kelahiran sejumlah 818.462 jiwa atau 98,30 persen sehingga bayi yang belum memiliki akta kelahiran sejumlah 14.161 jiwa. Capaian tertinggi kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-5 tahun di Kabupaten Sinjai sebesar 100 persen. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Jeneponto sebesar 90,61 persen dengan jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran sejumlah 36.225 jiwa dari total 39.980 jiwa penduduk usia 0-5 tahun. Sehingga masih terdapat 3.755 jiwa penduduk usia 0-5 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte

perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK). Pada tahun 2023 ini jumlah penduduk atau pasangan telah menikah sebanyak 4.326.983 jiwa dan memiliki Akte perkawinan sebanyak 2.090.750 jiwa sedangkan pasangan nikah yang beragama diluar agama Islam yang memiliki buku nikah dan atau nikah siri sebanyak 2.236.233 jiwa dengan persentase sebesar 48,32 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

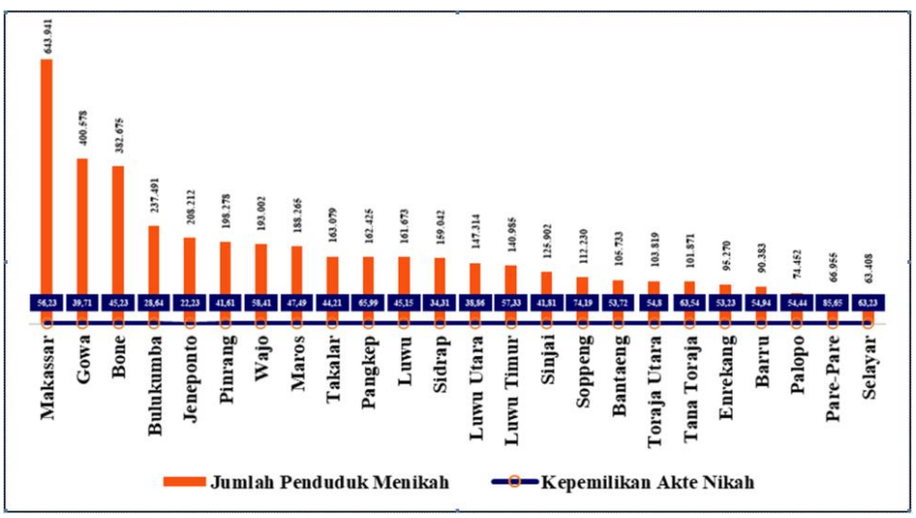
Diagram II.10.
Pasangan Ber Akte Nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian tertinggi pasangan yang memiliki akta nikah di Kota Pare-Pare sebesar 85,65 persen dengan jumlah 57.347 jiwa dari total 66.955 jiwa yang telah menikah. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Jeneponto sebesar 22,23 persen dengan jumlah 46.283 jiwa dari total 208.212 jiwa yang telah menikah. Sehingga masih terdapat 161.929 jiwa yang belum memiliki akta nikah di Kabupaten Jeneponto. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

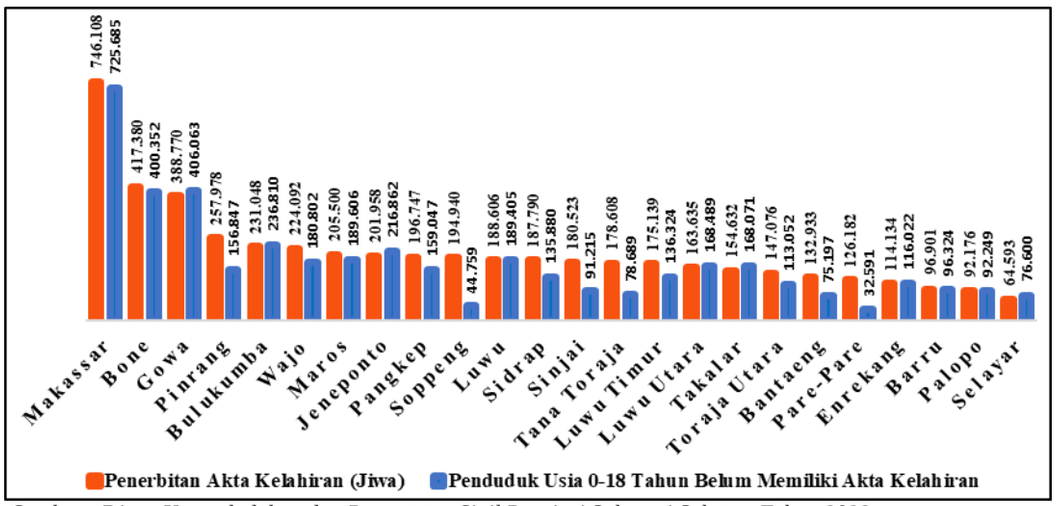
Grafik II.46.
Pasangan Ber Akte Nikah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan penerbitan akta kelahiran ini merupakan seluruh penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran. Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untuk menentukan persentase penerbitan akta kelahiran. Capaian persentase penerbitan akta kelahiran tahun 2023 sebesar 97,62 persen.

Grafik II.47.
Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

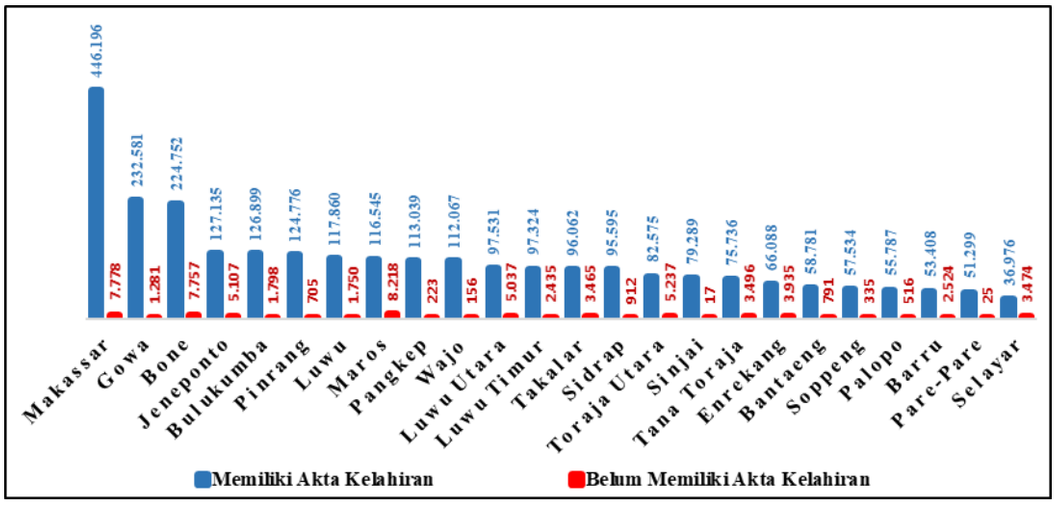


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan DKB Semester II tahun 2023 cakupan akta kelahiran untuk semua umur di Sulawesi Selatan berjumlah 9.354.390 jiwa dan yang memiliki akta kelahiran berjumlah 5.067.449 jiwa. Capaian tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan capaian 81,33 persen atau sejumlah 194.940 jiwa dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 44.759 jiwa. Sedangkan Capaian terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 45,75 persen atau sejumlah 64.593 jiwa dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 76.600 jiwa.

Berdasarkan DKB Semester II tahun 2023 jumlah penduduk yang berusia 0-17 Tahun di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 2.812.807 jiwa dan yang telah memiliki akte kelahiran mencapai 2.745.835 jiwa. Capaian tertinggi penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Sinjai dengan capaian 99,98 persen atau sejumlah 79.289 jiwa yang memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 17 jiwa. Sedangkan capaian terendah penduduk usia 0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran sejumlah 36.976 jiwa dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 3.474 jiwa. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

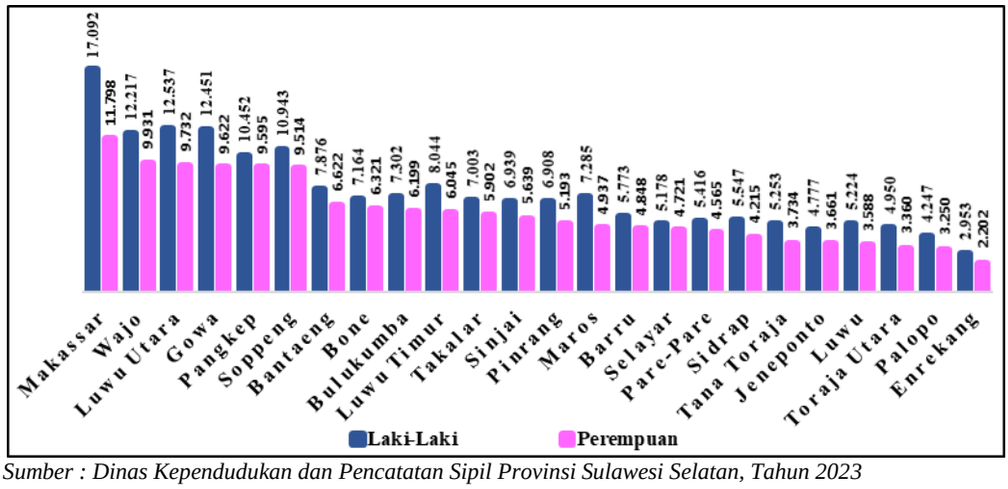
Grafik II.48.
Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Akta Kematian merupakan Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan atas meninggalnya seseorang. Akta kematian memberikan memberikan manfaat bagi Ahli Waris diantaranya Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi, Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak, Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya dan persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan, Pensiun. Masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menganggap tidak pentingnya akta kematian sehingga untuk perhitungan persentase akta kematian ini yaitu jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang melaporkan kematian keluarganya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dikalikan 100 persen.

Grafik II.49.
Akta Kematian yang Diterbitkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan laporan keluarga penduduk yang meninggal ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2023 jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan sejumlah 328.725 dokumen dengan rincian jumlah laki-laki sebesar 183.531 dokumen dan jumlah perempuan sebesar 145.194 dokumen dengan jumlah akta kematian yang diterbitkan tertinggi di Kota Makassar sebesar 28.890 dokumen dan yang terendah di Kabupaten Enrekang sejumlah 5.155 dokumen.

Pemanfaatan data kependudukan adalah pemanfaatan data dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui system informasi administrasi kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh menteri dalam negeri. Dalam impelementasi pemberian hak akses, menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan akses kedalam basis data melalui Data Warehouse (DWH) yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan melalui jaringan komuniksi data. Dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan telah diatur terkait tatacara dan kewenangan pemberian hak akses data kependudukan yang mana kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas atau Lembaga Pengguna skala provinsi atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pusat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan.

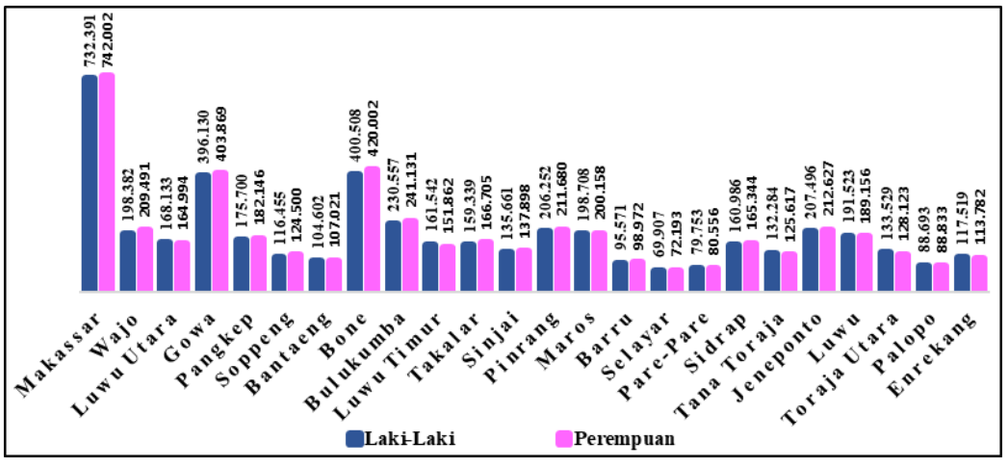
Tabel II.79.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bantaeng	201.115	201.688	201.960	206.194	211.623
2	Barru	182.373	187.392	189.877	191.895	194.543
3	Bone	809.441	812.719	813.211	814.106	820.510
4	Bulukumba	439.292	441.010	448.218	463.981	471.688
5	Enrekang	226.776	227.825	228.087	228.716	231.301
6	Gowa	759.872	763.387	768.868	787.917	799.999
7	Jeneponto	413.769	415.174	415.462	416.514	420.123
8	Kepulauan Selayar	139.470	140.077	140.322	140.881	142.100
9	Luwu	370.675	372.609	372.876	375.481	380.679
10	Luwu Timur	300.374	302.039	304.938	308.530	313.404
11	Luwu Utara	327.994	329.590	329.934	330.734	333.127
12	Maros	386.408	388.330	388.738	391.489	398.866
13	Pangkajene Kepulauan	350.208	351.877	352.229	353.098	357.846
14	Pinrang	405.671	407.236	408.109	411.392	417.932
15	Sidenreng Rappang	319.285	320.537	320.761	321.615	326.330
16	Sinjai	261.220	263.141	266.479	269.314	273.559
17	Soppeng	237.115	239.391	237.875	240.249	240.955
18	Takalar	293.732	301.765	311.949	319.716	326.04
19	Tana Toraja	287.245	288.202	270.597	263.914	257.901
20	Toraja Utara	247.157	252.200	255.140	257.539	261.652
21	Wajo	374.888	378.024	392.437	402.066	407.873
22	Makassar	1.480.480	1.487.256	1.463.089	1.464.401	1,474.393
23	Palopo	181.949	182.827	183.056	183.561	177.526
24	Pare-Pare	148.634	151.763	154.524	157.442	160.309
Sulawesi Selatan		**9.145.143**	**9.206.059**	**9.218.736**	**9.300.745**	**9.400.283**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan pada tahun 2021 dengan jumlah 527 responden diperoleh nilai IKM sebesar 81,29 mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan kategori BAIK.

Grafik II.50.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Profil Kependudukan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No.65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, merupakan suatu upaya pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil dari pengelolaan informasi administrasi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Kependudukan diterbitkan berdasarkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah ditunggalkan dan dibersihkan oleh kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui penyajian profil kependudukan pemerintah berharap informasi terkait data kependudukan dapat diakses dan digunakan oleh semua pihak khususnya untuk mendukung perencanaan dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik di provinsi Sulawesi Selatan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.80.
Capaian Kineja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	94	94	96,43	99,42	97,26
Persentase penerbitan KTP	%	94	94	96,43	99,42	97,26

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	97,90	99,80	102,18	102,78	104,78
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Belum dilakukan pengukuran	16,47	40,14	54,29	50,12
Persentase Bayi ber akte kelahiran	%	92	94	96,89	97,47	98,30
Persentase Pasangan ber akte nikah	%	29	32	39,52	39,86	48,32
Persentase penerbitan akta kelahiran	%	43	46	49,52	104,39	97,62
Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	84,51	89,27	93,99	96,51	97,62
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	43,35	46,54	49,52	51,02	54,18
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100	100	100	100
Persentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

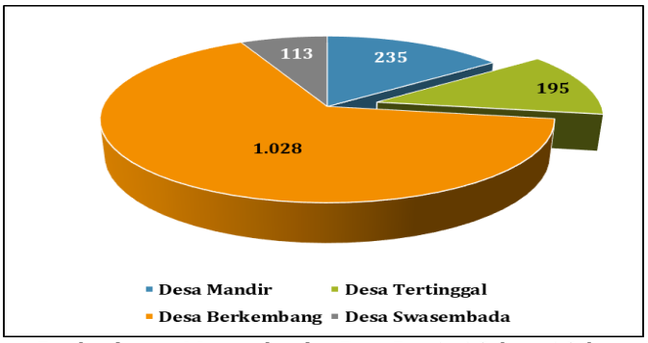
Capaian persentase cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2023 sebesar 99,42 persen atau 2242 desa dari 2.255 jumlah total desa. Faktor pendorong pencapaian target karena adanya dukungan dan sinergitas pemerintah baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten.

Ketersediaan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja aparat desa dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2023 dilaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

Capaian Program Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Indikator Capaian Program Persentase Desa yang menjalin kerjasama sebesar 5,1 Persen.

Capaian Persentase peningkatan status desa mandiri tahun 2023 sebesar 20,88% atau sebanyak 471 Desa mengalami peningkatan sebanyak 236 Desa pada tahun sebelumnya yang hanya 235 Desa.

Diagram II.11.
Jumlah Desa Berdasarkan Status Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



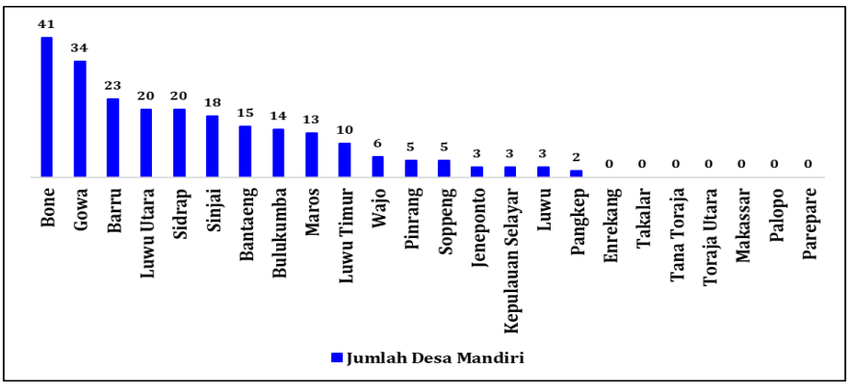
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Tabel II.81.
Status desa di tahun 2023

STATUS DESA	2022	2023
MANDIRI	235	471
MAJU	786	873
BERKEMBANG	1028	757
TERTINGGAL	195	162
SANGAT TERTINGGAL	11	3
TOTAL	**2255**	**2266**

IDM merupakan sistem yang mengkategorisasikan desa dengan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.
Jumlah desa disulawesi selatan bertambah 10 desa (2023) dari 2.255 desa (2022) menjadi 2.266 desa. Penambahan desa baru dengan pemekaran desa dikabupaten Takalar sebanyak 10 desa.
Penurunan Desa sangat tertinggal 11 desa (2022) yaitu kabupaten pinrang, toraja dan toraja utara. telah tertangani 10 desa melalui bantuan keuangan daerah. Sisa 1 desa sangat tertinggal dikabupaten tanah toraja dan takalar 2 desa.
status desa Mandiri mengalami kenaikan dari 235 (tahun 2022) desa menjadi 471 desa dengan harapan desa dapat yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah membaik.

Grafik II.51.
Jumlah Desa Status "Desa Mandiri" Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian target persentase pengentasan desa tertinggal pada tahun 2023 melampaui target dengan capaian 11 desa sangat tertinggal sementara jumlah desa tertinggal pada tahun 2023 sejumlah 162 desa.
Kegiatan umum PKK di desa Sejumlah 3.344 PKK merupakan PKK aktif hingga tahun 2023 serta jumlah posyandu aktif sebesar 10.007 dari total 10.310 unit posyandu atau dengan capaian 97,06 persen. Keaktifan posyandu didukung dengan alokasi pendanaan dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Tabel II.82.
Data Kegaitan Umum
PKK Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH TP.PKK			JUMLAH KELOMPOK				JUMLAH		JUMLAH IDT		JUMLAH KADER PKK						JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT				KET
		KEC	DESA	KEL	DSN/ LING	PKK RW	PKK RT	DASA WISMA	KRT	KK	L	P	ANGGOTA TP. PKK		UMUM		KHUSUS		HONORER		BANTUAN		
													L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	BANTAENG	8	-	-	-	769	1.397	884	49.384	61.730	100.844	102.085	2	2.302	3	1.459	56	2.239	2	3	-	-	
2	BULUKUMBA	8	109	27	490	664	994	2.369	108.997	131.092	213.218	229.848	30	3.629	86	3.047	30	4.193	2.103	3.397	7	11	
3	BARRU	7	43	19	175	40	471	2.521	30.979	56.679	88.815	88.670	65	2.743	43	1.341	62	597	31	121	1	74	
4	BONE	29	328	43	2.865	2.813	6.123	8.971	169.847	211.765	355.959	338.104	849	85.174	843	40.604	2.215	16.540	8	28	36	180	
5	ENREKANG	12	113	16	485	194	151	2.497	44.446	54.303	103.501	102.393	35	262	186	168	13	3.052	-	3	-	14	
6	GOWA	18	123	46	674	1.656	3.483	4.998	169.539	197.143	327.695	337.203	48	6.108	117	10.174	258	8.564	8	22	2	6	
7	JENEPONTO	11	82	31	743	221	559	6.427	88.114	108.693	180.313	191.447	865	3.717	397	5.418	219	4.331	31	69	7	28	
8	LUWU	22	207	20	959	-	-	5.779	100.892	107.286	185.609	186.351	27	6.989	185	29.088	69	8.681	4	31	-	-	
9	LUWU UTARA	15	177	-	687	-	-	2.098	104.929	104.929	167.477	161.128		4.861	-	-	-	505	-	-	-	-	
10	LUWU TIMUR	11	125	3	-	-	-	2.686	66.665	87.166	152.886	148.655	10	5.079	10	5.079	1	1.840	42	4	-	2	
11	MAKASSAR	15	-	153	-	997	4.911	12.065	248.359	344.343	602.918	626.324	19	5.384	-	16.421	69	11.027	2	11	-	-	
12	MAROS	14	78	27	380	229	1.349	4.275	91.122	106.781	177.590	182.377	9	4.333	48	7.866	2	6.807	-	-	13	14	
13	PALOPO	8	-	48	-	235	683	1.132	40.095	44.175	105.317	107.235	-	2.195	-	8.517	-	11.193	-	59	-	114	
14	PARE - PARE	4	-	22	-	177	341	444	31.460	43.439	64.856	68.448	49	959	51	1.347	5	519	4	33	1	10	
15	PANGKEP	13	93	44	209	363	762	1.651	103.409	110.305	190.980	193.292	1.271	3.283	681	5.966	151	2.750	19	171	55	117	
16	PINRANG	12	281	-	-	452	772	3.881	89.897	117.953	184.238	196.071	7	3.763	147	10.156	10	10.214	-	1	18	98	
17	SELAYAR	11	81	1	399	403	938	1864	33955	43433	63360	64714	43	4695	20	9664	21	4085	-	-	3	11	
18	SINJAI	10	67	13	353	1.761	1.847	3.236	47.906	64.204	112.562	115.617	44	4.792	98	4.590	82	1.844	21	159	1	10	
19	SIDRAP	11	65	38	348	348	1.041	3.568	61.678	71.861	132.204	129.760	94	5.884	122	5.365	63	849	39	39	26	89	
20	SOPPENG	8	43	21	174	488	1.027	1.963	48.318	75.981	105.641	113.611	11	3.628	30	5.432	-	759	1	21	1	31	
21	TANA TORAJA	19	114	47	1.552	449	2.543	6.920	55.068	63.848	105.625	105.273	2.268	6.734	119	2.425	50	1.654	19	52	1	31	
22	TORAJA UTARA	21	112	43	549	285	549	2.549	53.841	99.862	128.639	126.517	574	3.017	533	2.388	450	748	66	2	-	17	
23	TAKALAR	10	71	22	486	266	691	3.557	29.481	86.893	141.095	148.370	5	6.796	45	3.714	120	2.092	5	54	-	21	
24	WAJO	14	143	50	459	624	1.377	3.149	79.497	111.731	187.121	203.559	83	6.663	347	6.157	395	2.823	60	228	74	1.300	

Tabel II.83.
Persentase Posyandu Aktif

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Valid	Jumlah Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif
1	Bantaeng	263	263	100,00
2	Barru	272	272	100,00
3	Bone	1006	993	98,71
4	Bulukumba	575	539	93,74
5	Enrekang	315	313	99,37
6	Gowa	823	513	62,37
7	Jeneponto	573	494	86,21
8	Kepulauan Selayar	307	294	95,77
9	Luwu	432	411	95,14
10	Luwu Timur	282	282	100,00
11	Luwu Utara	380	334	87,89
12	Maros	422	422	100,00
13	Pangkajene Kepulauan	391	388	99,23
14	Pinrang	382	380	99,48
15	Sidenreng Rappang	315	313	99,37
16	Sinjai	369	369	100,00
17	Soppeng	332	332	100,00

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Valid	Jumlah Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif
18	Takalar	491	475	96,74
19	Tana Toraja	350	350	100,00
20	Toraja Utara	302	299	99,01
21	Wajo	464	461	99,35
22	Makassar	1029	950	92,32
23	Palopo	154	145	94,16
24	Pare-Pare	130	130	100,00

Posyandu sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang diintroduser oleh pemerintah ke pedesaan memiliki paket pelayanan minimal yang terdiri dari 5 program utama, yaitu: pelayanan keluarga berencanan (KB) , kesehatan , ibu hamil, dan anak, imunisasi dan perbaikan gizi dan lainnya.

Data posyandu kabupaten kota di tahun 2023 terbagi pada posyandu valid (103599) dan posyandu aktif 9.752 dimana persentase kabupaten kota posyandu yang aktif mencapai tertinggi pada masing masing kabupaten bantaeng, barru, maros , luwu timur, pare- pare, sinjai dan kabupaten soppeng mencapai 100 % .

PKK aktif tertinggi (399) adalah kabupaten Barru dan terendah adalah kota pare -pare 26, sedangkan posyandu aktif adalah tertinggi di kabupaten barru (975) dan Kota Makasar (962) dan terendah adalah pada kota pare pare 118.

Untuk data capaian kinerja program pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.84.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	4,08	17,38	17,38	98,89	99,42	99,42
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	4,96	5,45	20,88
Persentase pengentasan desa tertinggal	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	11,88	48,75	7,18
Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	0,62	4,3	5,1
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu Aktif	%	99,89	99,89	99,89	97,06	97,06	99,98
Persentase BUM Desa yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	5,9	3,14	2
Persentase Desa yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	34,1	50,33	80,93
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	1,51	1,44	1,57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Indikator kinerja pengukuran Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi adlah Presentase PKK akti f mencapai 100 % disusul presentase desa difasilitasi 80 % dan terendah adalah pada kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya baru mencapi 1,57 % pada tahun 2023.

2.3.2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijabarkan dalam tiga besaran program yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Program pengendalian penduduk diarahkan pada pembangunan kependudukan yang ke depannya dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas Pembangunan kependudukan 5 pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Implementasi ini sulit diwujudkan mengingat capaian kabupaten/kota yang menyusun *Grand* Desain Pembangunan Kependudukan 5 Pilar masih belum mencapai 100%. Rekapitulasi data kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang telah menyusun GDPK 5 Pilar sampai dengan tahun 2023 baru tercatat 12 Kabupaten/Kota yaitu Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Bone, Pinrang, Luwu Utara, Makassar, Palopo, Parepare, Pangkep, Luwu Timur, dan Jeneponto. Sedangkan GDPK 3 Pilar sampai tahun 2023 sebanyak 3 kab/kota (Maros, Wajo, Sidrap). Di sisi lain GDPK 2 Pilar terdiri dari Soppeng, Enrekang, dan Toraja Utara serta GDPK 1 pilar (Selayar, Takalar, Sinjai, Barru, Luwu dan Tana Toraja).

Program Pembinaan Keluarga Berencana diarahkan pada capaian persentase PUS peserta KB aktif. Dilihat dari cakupan kepesertaan KB di Sulawesi Selatan masih memerlukan upaya keras demi mewujukan masyarakat yang Sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari kondisi persentase pemakaian kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, angka prevalensi kontrasepsi modern (m-CPR) sebesar 66,34 persen meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat kendala karena masih cukup tingginya persentase PUS yang putus pakai kontrasepsi berdasarkan hasil Pemutakhiran PK-23 yaitu sebesar 20,4% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 21,5%. Selain itu masih kurangnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dari pengelola program KB di tingkat desa/kelurahan. Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang KB MKJP sehingga masih ada Masyarakat yang menggunakan KB Non MKJP.

Berikutnya untuk program pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera diarahkan berfokus terhadap upaya kabupaten/kota dalam meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Hingga akhir tahun 2023, persentase kabupaten/kota yang meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga yaitu 100% atau dengan kata lain seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berjumlah 24 kab/kota mengalami kenaikan iBangganya. Hal ini membuat iBangga Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan yang semula 55,60 di tahun 2022 meningkat menjadi 61,31 di tahun 2023. Tribina mempunyai peranan penting dalam Pembangunan keluarga. Melalui tribina (Bina Keluarga

Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilab dan pengetahuan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja, dan menyiapkan masa lansia agar tetap memiliki produktifitas menuju lansia tangguh.

Tabel II.85.
Capaian Cakupan Pembinaan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan di Kampung KB, M-CPR, dan iBangga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	20,83	20,83	25
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern *(Modern Contraceptive Prevalency Rate- m-CPR)*	%	54,47	71,86	71,66	56,62	66,34
Persentase kab/kota yang meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	53,92	62,5	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk KB

2.3.2.9 PERHUBUNGAN

Tren pengguna transportasi mengalami peningkatan yang signifikan dengan diluncurkannya layanan transportasi perkotaan TEMAN BUS dengan skema pembelian layanan (buy the service) oleh Kementerian Perhubungan pada 4 koridor di wilayah Mamminasata sejak November 2021. Kebijakan yang awalnya digratiskan hingga berbayar berhasil meningkatkan jumlah penumpang perkotaan mencapai 72 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian 62,58 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan skema layanan transportrasi gratis menjadi berbayar yang diterapkan sejak November 2022 hingga saat ini sehingga mempengaruhi jumlah pengguna moda transportasi perkotaan.

Persentase layanan angkutan darat terus meningkat mencapai 97 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan terlayaninya 17 trayek AKDP yang menghubungkan wilayah di Sulawesi Selatan sehingga mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan darat semakin meningkat. Peningkatan infrastruktur transportasi melalui rehabilitasi terminal angkutan darat, perubahan demografis berupa pertambahan penduduk, dukungan pemerintah berupa kebijakan dan regulasi dan perkembangan teknologi.

Cakupan Prasarana LLAJ dalam kondisi baik mengalami tren penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : a) Kurangnya perawatan rutin pada prasarana LLAJ yang telah terpasang atau terbangun; b) Vandalisme atau perusakan prasarana yang ada; c) Keterbatasan APBD menyebabkan penundaan perawatan dan rehabilitasi prasarana LLAJ; d) Peningkatan beban lalu lintas; e) Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum bagi perusakan prasarana LLAJ yang merupakan fasilitas publik; f) Dampak lingkungan seperti banjir, tanah longsor, maupun kebijakan pelebaran jalan menyebabkan kerusakan pada prasarana keselamatan jalan seperti rambu, marka jalan, pagar pengaman, cermin tikungan; serta g) Kurangnya inovasi teknologi yang dapat memantau secara real time kondisi prasarana LLAJ di lapangan sehingga menyebabkan keterlambatan deteksi ataupendataan kerusakan prasarana LLAJ tersebut. Tahun 2023 pengadaan rambu sejumlah 238 unit pada jalan ruas Takalalla-Cabenge-Salonro Kabupaten Soppeng, jalan ruas Pinrang-Rappang Kabupaten Pinrang, jalan ruas Pekkae-BTS, Soppeng Kabupaten Barru, pengadaan rambu Bus Stop 15 unit wilayah MAMMINASATA pada jalan ruas Barombong-Galesong Utara-Galesong Selatan dan jalan ruas Hertasning Baru (Aroepala)-Tun Abdul Razak. Pengadaan Marka 493 m^2 pada jalan Kumala Kota Makassar.

Jumlah terminal Tipe B yang dikelola adalah terminal Tipe B yang telah memiliki Berita Acara Serah Terima dari Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sejumlah 4 terminal dikelola mengalami penurunan dari tahun 2022 sejumlah 7 terminal. Untuk mendukung fungsi terminal pada tahun 2023 pengadaan rambu sejumlah 5 unit pada Terminal Sasayya Kabupaten Bantaeng.

Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan mengalami peningkatan sejak 3 tahun terakhir dimana pada tahun 2023 mencapai 2.302.339 orang. Arus penumpang melalui pelabuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengaan peningkatan ekonomi di Sulawesi Selatan yang berpengaruh langsung pada peningkatan mobilitas dan aktivitas perdagangan. Hal ini bisa mengakibatkan peningkatan arus penumpang di pelabuhan karena adanya peningkatan permintaan untuk transportasi barang dan orang. Investasi dalam perluasan infrastruktur pelabuhan, seperti pembangunan dermaga baru atau peningkatan kapasitas terminal Soekarno-Hatta dapat meningkatkan kemampuan pelabuhan untuk menangani lebih banyak penumpang.

Jumlah pelabuhan strategis Provinsi adalah pelabuhan pengumpan regional yang sementara menunggu penyerahan P3D dari Kementerian Perhubungan yaitu Pelabuhan Bantaeng, Pelabuhan Awerange Barru, Pelabuhan Pattirobajo Bone, Pelabuhan Jeneponto, Pelabuhan Malili Luwu Timur, Pelabuhan Maccinibaji Pangkep, Pelabuhan Jampea Selayar,Pelabuhan Galesong Barru, Pelabuhan Siwa/Bangsalae, Pelabuhan Bira dan Pelabuhan Pattumbukang Selayar. Seluruh pelabuhan pengumpan regional dalam kondisi beroperasi dan sementara ini dikelola oleh UPP Kementerian Perhubungan, sambil menunggu penyerahan P3D selesai dan SDM serta kemampuan anggaran Provinsi sementara ini disiapkan untuk menerima serah terima pengelolaan pelabuhan tersebut. Tahun 2023 pengadaan rambu sejumlah 10 unit pada Pelabuhan Bira Kabupaten Bulukumba untuk menunjang fungsi pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional.

Tabel II.86.
Capaian Kinerja Program Urusan Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	10	11,5	41	72	62,58
Persentase Layanan Angkutan Darat	%	87	90	94	97	97
Jumlah penumpang melalui terminal Type B per tahun	Orang	829.122	580.872	499.277	500.981	2.082.126
Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	5,16	5,03	3,05	3,07	3
Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Ruas	15	15	45	12	20
Jumlah Terminal Bis terkelola (Terminal type B)	Terminal	4	5	7	7	4
Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Orang	1.686.838	658.933	1.355.919	1.418.985	2.302.399
Jumlah pelabuhan strategis provinsi (pelabuhan pengumpan regional dan penyeberangan)	Lokasi	11	11	11	11	11
Persentase pelabuhan yang beroperasi (pengumpan regional)	%	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan

2.3.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 sebesar 2,05 atau kategori Cukup. Nilai SPBE dengan target sebelumnya tidak terpenuhi disebabkan oleh: a) Bertambahnya indikator penilaian SPBE sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan RB No 59 Tahun 2020; b) Provinsi Sulsel masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE; c) Provinsi Sulsel masih belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE; d) Provinsi Sulsel masih belum memiliki tata kelola yang mengatur terkait pada pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra dan penggunaan system penghubung layanan dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan. Tahun 2022 capaian Indeks SPBE mencapai 2,35 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan nilai Indeks SPBE didukung melalui penyusunan kebijakan internal yang mengatur arsitektur SPBE serta perencanaan strategis yang mengatur SPBE. Tahun 2023 nilai Indeks SPBE mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta merupakan capaian tertinggi kurun waktu 5 tahun terakhir dengan capaian 3,09 predikat Baik. Hal ini didukung oleh keunggulan pada penerapan Aspek Kebijakan internal tata kelola SPBE, Perencanaan Strategis, Penyelenggara SPBE, Audit TIK, Layanan Publik Berbasis

Elektronik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Sejak tahun 2022 pemanfaatan Aplikasi Baruga dialihkan ke Aplikasi SP4N Lapor. Pada tahun 2023 jumlah aduan yang masuk pada aplikasi SP4N Lapor sebanyak 96 aduan dan telah selesai ditindaklanjuti, adapun hasil penilaian dari Kementrian PANRB terkait indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan mendapatkan nilai 2 (rentang penilaian 1-5) dikarenakan Dokumen Rencana Aksi masih dalam bentuk draft dan waktu tindak lanjut aduan masih tergolong lama.

Jumlah OPD yang melapor ke PPID sejumlah 52 OPD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 55 OPD. Namun tingkat pelaporan OPD ke PPID mengalami peningkatan 5 persen poin dari tahun sebelumnya dengan capaian 70 persen. Sedangkan jumlah sengketa informasi yang ditindaklanjuti sejumlah 42 kasus. Persentase layanan informasi publik pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai 100 persen dengan jumlah jenis layanan informasi publik sejumlah 7 jenis layanan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang terdiri dari Konten sejumlah 783, Berita (Media Cetak dan Online) sejumlah 16.910, dan Advetorial sejumlah 315.

Tabel II.87.
Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	60	70	80	90	100
Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	%	100	100	100	Sudah tidak diukur ditahun 2022, pemanfaatan Aplikasi Baruga dialihkan ke Aplikasi Lapor SP4N	Sudah tidak diukur ditahun 2022, pemanfaatan Aplikasi Baruga dialihkan ke Aplikasi Lapor SP4N
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	2,66	3,08	2,05	2,35	3,09

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

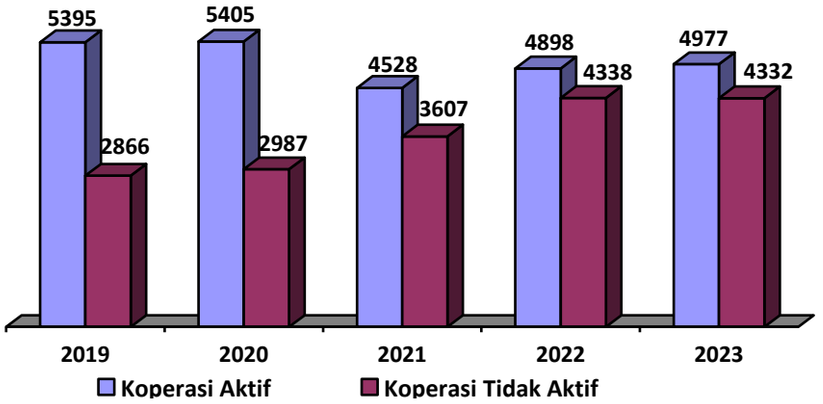
2.3.2.11 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Untuk melindungi masyarakat pelaku usaha pada akses permodalan salah satunya adalah mendorong dan memfasilitasi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi di Sulawesi Selatan untuk lebih akuntable dengan cara fasilitasi KSP/USP Koperasi tersebut dalam legalitas usaha simpan pinjam. Merupakan kewajiban seluruh KSP/USP Koperasi memiliki izin usaha simpan pinjam tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam di berikan kepada Koperasi yang bergerak pada sektor simpan pinjam, hingga tahun 2022 terdapat 12 persen Koperasi dan UKM yang memiliki izin usaha simpan pinjam.

Hingga tahun 2023 jumlah koperasi aktif sebesar 4.977 unit mengalami peningkatan dari tahun 2022. Sedangkan jumlah koperasi tidak aktif sebesar 4.332 unit juga mengalami penurunan dari tahun 2022. Sejumlah 20 persen koperasi

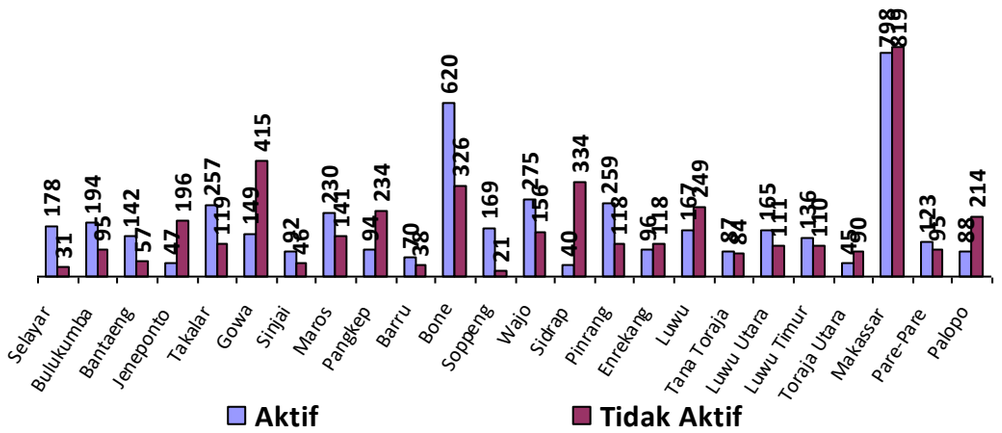
aktif primer provinsi diberikan infomasi/sosialisasi terkait peraturan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terupdate informasi dan peraturan yang berlaku saat ini. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.52.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

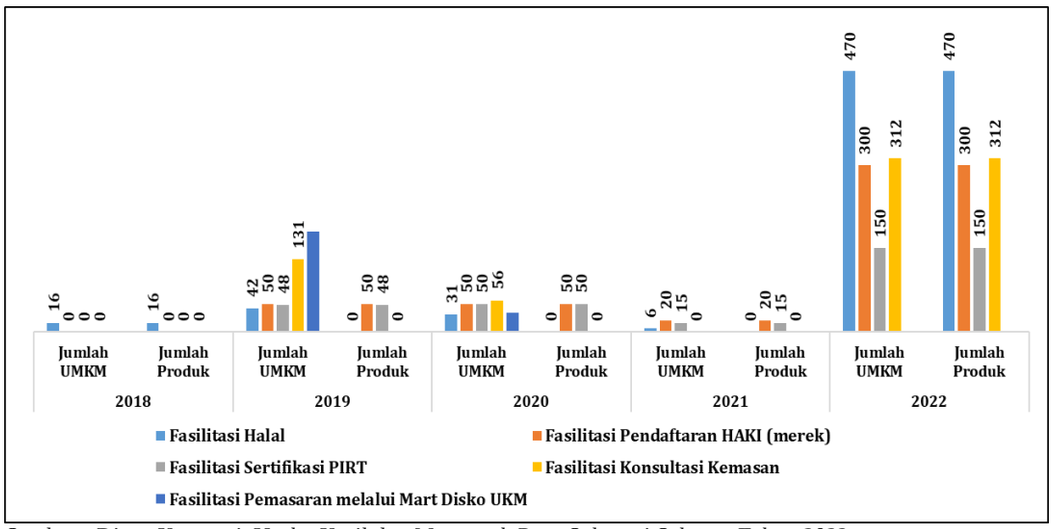
Grafik II.53.
Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Sertifikat penilaian kesehatan koperasi menjadi syarat wajib pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas dilakukan minimal setahun sekali. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi setiap tahunnya dilakukan bersamaan dengan pengawasan dan pemeriksaan koperasi namun penilaian kesehatan koperasi hanya dilakukan kepada koperasi yang teah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Tahun 2023 dilakukan penilaian pada koperasi/KSP dengan berkriteria sehat, dalam hal ini dilanjutkan dengan pemberian sertfikat koperasi berkriteria sehat dan cukup sehat hal ini juga merupakan catatan dari tingkat keaktifan pengurusan dan pembina dalam melakukan pemantauan pada kelembagaan koperasi dengan capaian persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT sebesar 25 persen atau sejumlah 244 unit KSP/USP Koperasi dengan kriteria sehat. Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan manajer koperasi, dan juga pada koperasi baru sehingga koperasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Grafik II.54.
Jumlah UMKM yang Difasilitasi Perizinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi pemberdayaan usaha, permodalan dan sertfikasi SKKNI diberikan sehingga dapat meningkatkan kompetensi koperasi dan pengurus Koperasi. Tahun 2022 sejumlah 105.072 usaha kecil yang diberikan pelatihan dan pendidikan hal ini sesuai dengan kewenangan para pelaku usaha kecil. Sejumlah 15.411 unit usaha yang diberikan pendampingan kelembagaan usaha, UKM terstadarisasi sertifikasi usaha, dan usaha yang bermitra diberikan pada koperasi dengan kriteria usaha kecil.

Cakupan promosi produk UMKM dalam dukungan pemasaran dan promosi untuk terlibat dapat pameran promosi produk UMKM unggulan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,5 persen pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Jumlah promosi produk UMKM sebesar 77.052 unit pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 38.570 unit.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.88.
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	9	10	39	12	20
Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	9	10	36	10	20
Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	20	20	30	20	25
Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan	%	20	20	20	20	25

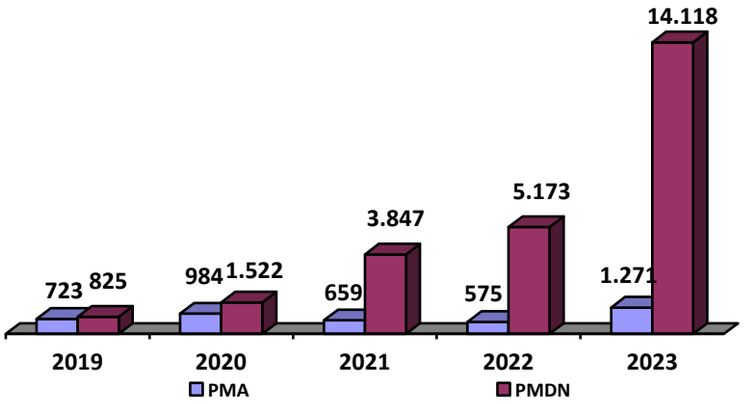
Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
perundang undangan						
Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	20	15	35	20	25
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	20	20	20	20	25
Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	7	7	31	20	20
Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	7	5	30	10	20
Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	2	4	15	10	20
Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha	%	7	5	30	11	20
Cakupan promosi produk UMKM	%	0,3	0,2	1,7	3	1,5

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.12 PENANAMAN MODAN DAN INVESTASI

Pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yakni pada tahun 2019 sebesar 40 persen, naik pada tahun berikutnya sebesar 60 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 75 persen, demikian halnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 85 persen, namun tidak mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu 85 persen. Rendahnya potensi investasi yang dimanfaatkan oleh calon investor pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena belum tersedianya data dan informasi yang memadai dan masih banyaknya data potensi daerah yang belum diperbaharui. Adapun kenaikan pemanfaatan potensi investasi pada tahun 2023 merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarluaskan potensi dan peluang investasi daerah serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha daerah untuk membangun kemitraan dengan investor besar.

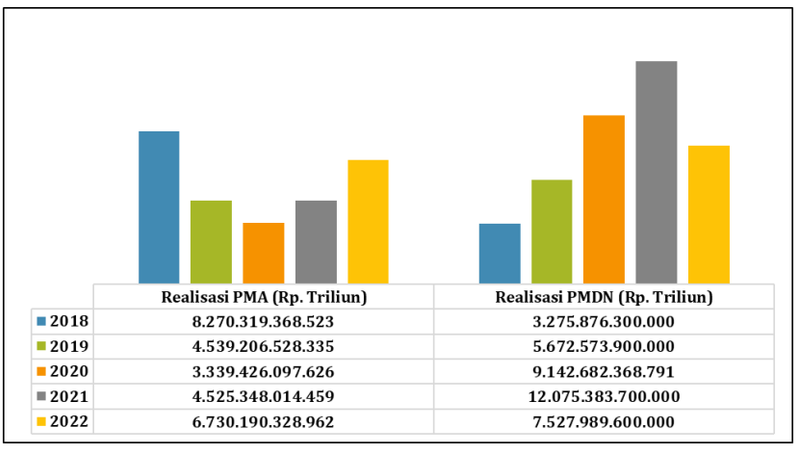
Grafik II.55.
Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024

Capaian realisasi investasi sektor PMA yang diraih pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami tren fluktuasi dimana tren peningkatan mulai tahun 2023 dengan capaian Rp. 4,98 triliun pada tahun 2023. Jumlah realisasi PMDN berdasarkan rilis dari Kementrian Investasi/BKPM tahun 2023 Capaian realisasi investasi sektor PMDN mengalami tren peningkatan mulai tahun 2019 hingga 2023.

Grafik II.56.
Realisasi PMA dan PMDN
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



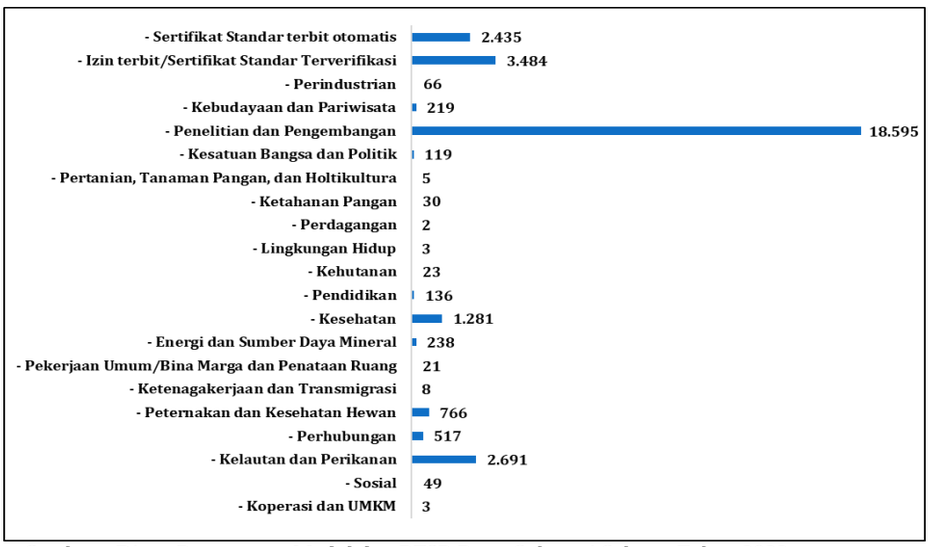
	Realisasi PMA (Rp. Triliun)	Realisasi PMDN (Rp. Triliun)
2018	8.270.319.368.523	3.275.876.300.000
2019	4.539.206.528.335	5.672.573.900.000
2020	3.339.426.097.626	9.142.682.368.791
2021	4.525.348.014.459	12.075.383.700.000
2022	6.730.190.328.962	7.527.989.600.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

Capaian ketepatan waktu penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2022 persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP belum mencapai target dengan capaian 80 persen. Beberapa dokumen yang penyelesaiannya belum tepat waktu diakibatkan oleh pertimbangan teknis yang kadang terlambat dikeluarkan oleh OPD teknis, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi waktu penyelesaian dokumen perizinan. Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 139.428 izin. Pada tahun 2022 jumlah izin yang diterbitkan sebesar 30.691 izin.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk institusi pelayanan perizinan tahun 2022 sebesar 82,81 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -0,94 persen.

Grafik II.57.
Jumlah Perizinan yang Diterbitkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah kurang lebih sebesar 15.700 perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan tersebut persentase ketaatan perusahaan PMA dan PMDN pada peraturan penanaman modal pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami tren peningkatan mencapai 67 persen atau 3.351perusahaan pada tahun 2023. Masih rendahnya ketaatan perusahaan dalam hal ini mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diakibatkan oleh pemberlakuan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana salah satunya adalah perubahan pada pelaporan sistem manual menjadi pelaporan online. Hal ini belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha.

Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan mencapai 85 persen pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan dengan kata lain angkanya sama dengan tahun 2022. Pencapaian ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data dan informasi pendukung penanaman modal serta meningkatnya koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten dan kota serta pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan penanaman modal dan investasi tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.89.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2019–2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	%	40	60	75	85	85
Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	4,54	3,39	4,52	6,73	4,98
Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	5,67	9,14	12,07	7,52	11,468
Persentase Ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	%	Belum dilakukan pengukuran	78	78	80	85
Persentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	%	Belum dilakukan pengukuran	45	50	55	59
Persentase Ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	Belum dilakukan pengukuran	70	80	85	85

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024

2.3.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat ditentukan pada pembinaan pemuda saat ini. Pembinaan pemuda dilakukan dengan melibatkan pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam pembangunan. Capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial didukung melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan mengalami penurunan dari tahun 2021 karena kurangnya kegiatan kepemudaan yang diinisiasi oleh organisasi pemuda secara mandiri. Tingkat partisipasi pemuda di Provinsi Sulawesi Selatan terutama dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial serta dalam kegiatan ekonomi mandiri dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Untuk tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial tahun 2019 sebesar 1,06 meningkat ditahun 2020 menjadi 1,09 selanjutnya dibtahun 2021 meningkat lagi menjadi 4,23 dan pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan (3,81) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yg cukup signifikan menjadi 0,05. Sementara itu untuk tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, dari tahun 2019 ke 2023 juga mengalami peningkatan dari 0,16 menjadi 3,0. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Pembinaan organisasi pramuka di Sulawesi Selatan dilakukan melalui program pengembangan kapsitas kepramukaan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Organisasi gerakan Pramuka telah terbentuk dan aktif mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Capaian indikator organisasi pramuka yang aktif sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100 persen. Jumlah organisasi pramuka aktif tahun 2023 sejumlah 25 organisasi.

Ketersediaan sarana prasarana olahraga sangat penting untuk menunjang peningkatan prestasi olahraga. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

olehraga yang represntative berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 85 % dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 25 % selanjtnya meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 95 %. Dan pada tahun 2023 menjadi 100 %.

Pembinaan cabang olah raga prestasi pada tahun 2019 hingga 2021 menjadi bagian dari binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sebelumnya dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Perolehan medali pada tahun 2019 sebanyak 81 medali, tahun 2019 memperoleh 317 medali, perolehan ini mengalami peningkatan yang signifikan karena kegiatan Pra PON menjadi bagian dari tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kualitas pelatih dan intensitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Namun persentase peningkatan prestasi olahraga mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan tidak adanya penyelenggaraan event olahraga, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan perolehan 100 medali dan Pada tahun 2022 peningkatan prestasi olahraga kembali mengalami peningkatan dengan capaian sejumlah 217 medali diperoleh pada tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi 300 medali. Sementara untuk jumlah atlet berprestasi juga mengalami fluktuasi, dari 246 orang pada tahun 2019, mangalami penurunan pada tahun 2020 karena tidak adanya even olahraga. Dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 84 orang. Dan tahun 2022 menjadi 119 orang. Dan pada tahun 2023 menjadi 141 orang.

Tabel II.90.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,16	0,21	0,21	0,24	3,0
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	1,09	2,33	4,23	3,81	0,05
Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	%	2,9	-1	-0,84	3,17	3,17
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	85	25	95	95	100
Persentase organisasi pramuka aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.14 STATISTIK

Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami tren peningkatan dengan capaian sebesar 90 persen pada tahun 2023 berdasarkan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dari total kebutuhan data. Masih ada sebagian OPD yang belum memahami cara menyusun data statistik sektoral sesuai prinsip SDI.

Tabel II.91.
Capaian Kinerja Program Urusan Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	35	40	50	80	90

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.3.2.15 PERSANDIAN

Saat ini pencapaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada level kematangan 3 dengan nilai 2,67. Dari penilaian tersebut nilai terendah pada pemenuhan tata kelola, manajemen resiko, proteksi kepada end user, alert system dan respon terhadap insiden siber. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya literasi terkait awereness keamanan siber, sistem monitoring keamanan jaringan dan aplikasi yang belum optimal sehingga menyebabkan tidak adanya alert system untuk mendeteksi secara dini anomali trafik yang bisa menjadi step awal masuknya serangan. Selain itu hal diatas terjadi diakibatkan tidak adanya Sistem keamanan jaringan dan aplikasi khusus sehingga jaringan dan aplikasi kita sangat rentan terhadap serangan. Selain itu kurangnya SDM yang berkompetensi terkait keamanan siber, penanggulangan insiden siber dan Security Operation Center serta analyst kerentanan keamanan siber.

Tabel II.92.
Capaian Kinerja Program Urusan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	%	30	35	50	69,57	60

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.3.2.16 KEBUDAYAAN

Pada tahun 2021 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari 12 Karya Budaya yang diusulkan sejumlah 11 Karya Budaya dari 6 Kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tahun 2022 jumlah karya budaya hanya terdapat 2 karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari 7 karya budaya yang ditargetkan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Sedangkan untuk Tahun 2023 sendiri, dari 10 karya budaya yang ditargetkan hanya dapat dicapai sebanya 3 karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Belum tercapainya target yang ditetapkan disebabkan oleh banyaknya usulan karya budaya oleh pemerintah kabupaten/kota yang dinilai belum memenuhi syarat dalam penetapan WBTB oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Capaian Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/ Pembinaan pada tahun 2022 sebesar 7,69% atau 103% dari yang ditargetkan atau dapat dicapai sebanyak 36 sanggar seni dari 35 sanggar seni yang ditargetkan, hal

ini berbeda dengan tahun 2023 dimana hanya dapat dicapai sebanyak 8,79% atau 95% dari yang ditargetkan atau dicapai 42 sanggar seni dari 44 sanggar seni yang ditargetkan. walaupun tidak mencapai target pada tahun 2023, namun tetap mengalami peningkatan mengalami capaian jumlah yang dicapai dari tahun sebelumnya (2022) melalui pelibatan sanggar seni pada beberapa kegiatan-kegiatan seni budaya sebagai bentuk pembinaan sanggar kesenian.

Capaian persentase lembaga sejarah yang difasilitasi pada tahun 2023 sebesar 3,89 persen atau sama dengan capaian pada tahun sebelumnya (2022), atau sebesar 70% dari yang ditargetkan, yaitu 10 lembaga Sejarah. Tidak tercapainya indicator tersebut dikarenakan beberapa lembaga di kabupaten/kota masih dalam tahapan penyusunan/penelahaan terkait dengan peraturan daerah tentang perlindungan sejarah/adat.

Tahun 2022 capaian indikator persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dari target 5 Cagar Budaya yang ditargetkan untuk dilestarikan hanya dapat dicapai sebanyak 3 Cagar budaya, yaitu (1) Makam Raja Bangkala di Kab. Jeneponto; (2) Makam Makole Baebunta; dan (3) Museum Karaeng Pattingalloang. Sedangkan pada Tahun 2023 hanya dapat dicapai 2 cagar budaya yang dilestarikan dari 10 cagar budaya yang ditargetkan untuk dilakukan pelestarian. Hal ini disebabkan masih banyaknya cagar budaya di kabupaten/kota yang belum ditetapkan atau menjadi cagar budaya skala/peringkat provinsi, walaupun telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Tahun 2022 capaian indikator persentase kunjungan ke museum mengalami peningkatan capaian target dari yang telah ditetapkan sebesar 615% atau 101.638 Kunjungan ke Museum dari target sebesar 16.500 Kunjungan ke Museum. Hal ini dikarenakan adanya pelonggaran penerbangan dalam negeri dan obyek-obyek wisata dibuka kembali serta pencabutan status PPKM, juga mempengaruhi jumlah kunjungan di museum provinsi. Berbeda dengan Tahun 2023 walaupun tidak mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, namun tetap melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 260% atau 54.625 Kunjungan ke Museum dari target sebesar 20.950 Kunjungan ke Museum. Banyaknya kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke sekolah-sekolah (SD dan SMP) melalui kegiatan Museum Masuk Sekolah/Belajar Bersama di Museum, selain itu beberapa kegiatan pameran yang menarik minat masyarakat berkunjung ke museum

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kebudayaan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.93.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	1,9	0,34	0,51
Persentase Sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	7,5	8,97
Persentase Lembaga sejarah yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	2,2	3,89	3,89

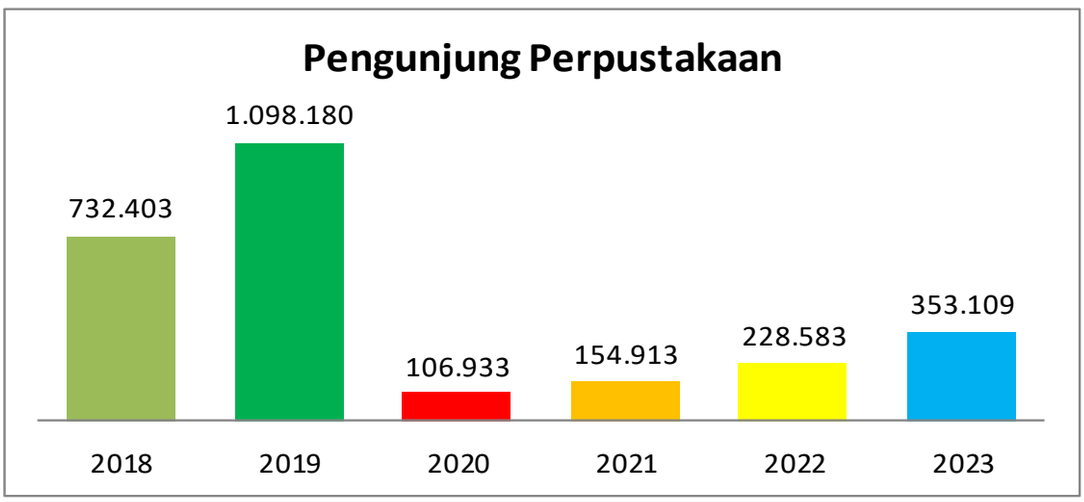
Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	0,57	0,29	0,19
Persentase Kunjungan ke musium	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	615,99	260,74

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.2.17 PERPUSTAKAAN

Capaian Jumlah pengunjung Perpustakaan baik elektronik dan konvensional pada tahun 2022 sejumlah 228.583 yang merupakan pengunjung dengan jenis kelamin Perempuan dan Laki-laki sesuai dengan Rekap data statsistik triwulan pada Unit Pelayanan terpadu Perpustakaan Umum di 4 Gedung layanan Perpustakaan yang ada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah ini merupakan perhitungan data dari layanan perpustakaan umum dan layanan perpustakaan elektronik yang menjadi solusi pemenuhan kebutuhan pemustaka. Capaian indikator program pembinaan perpustakaan yaitu jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan jumlah pengunjung Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 mencapai 353.109 orang. Dan Sejumlah 6.765.152 orang pemustaka yang pada layanan perpustakaan se Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik II.58.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

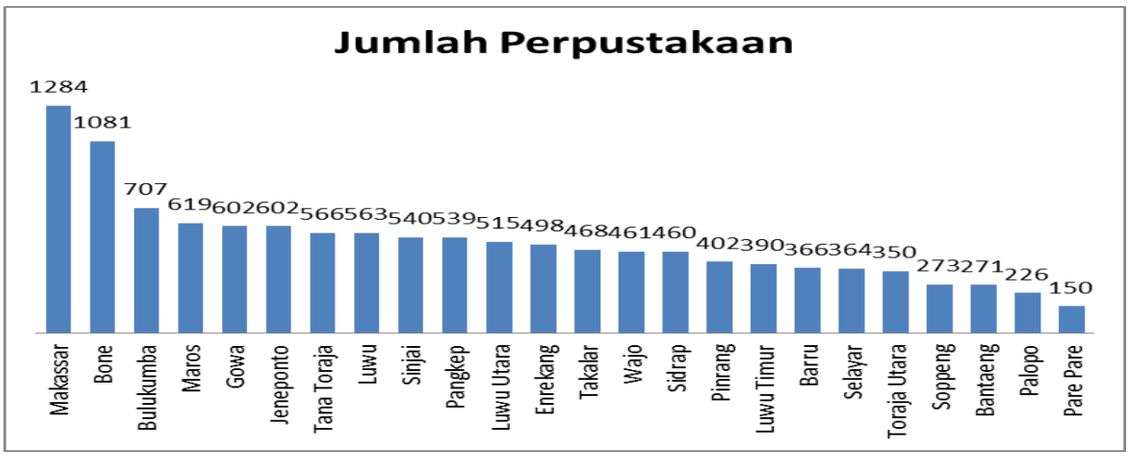


Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa jenis layanan perpustakaan, antara lain layanan perpustakaan umum, layanan perpustakaan Abdurrasyid Daeng Lurang, Layanan perpustakaan ibu dan anak, layanan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (PP-IPTEK) serta Layanan Deposit. Pemustaka yang datang berkunjung tidak hanya langsung ke perpustakaan tetapi dapat juga mengunjungi layanan Perpustakaan Digital Isulsel, website maupun Sosial media berupa Instagram, Tiktok dan Facebook. Rasio perpustakaan walaupun naik dibanding tahun lalu, akan tetapi belum rasional bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Diperlukan pengembangan perpustakaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Serta peningkatan jumlah

koleksi buku perpustakaan. Jumlah perpustakaan pada tahun 2023 yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 12.297 unit, mengalami peningkatan 51% dari tahun 2022 dengan jumlah perpustakaan sebanyak 6.029 unit. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.59.
Jumlah Perpustakaan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Capaian persentase Naskah Kuno yang dilestarikan tahun 2020 hingga 2023 yang dilestarikan hanya 1 jenis naskah yakni naskah Lontaraq dengan jumlah judul sebanyak 4.049 naskah.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perpustakaan tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.94.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	732.403	1.098.180	106.933	154.913	228.583	353.109
Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	54,33	42,33	30,1	80,86	100	100

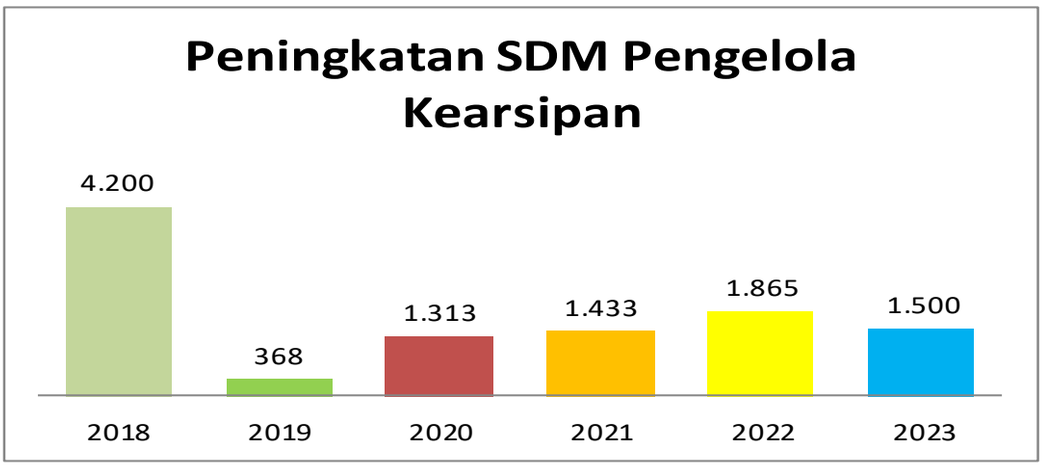
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.2.18 KEARSIPAN

Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2023 adalah 46 perangkat Daerah atau sebesar 90 persen, ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 10 Persen dengan jumlah pada tahun 2022 sebanyak 31 Perangkat Daerah atau 79,49 persen. Hal ini disebabkan oleh aktifnya dan respons positif dari Lembaga Kearsipan Daerah yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan arsip secara baku di masing-masing instansi pemerintah untuk kemudahan dalam menelusuri arsip sebagai alat bukti dalam administrasi pemerintah dan juga sebagai identitas bangsa. Keaktifan para arsiparis dalam melaksanakan pembinaan pada instansi pemerintah dan juga swasta dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis. Pembinaan ini dilakukan sebagai langkah tertib arsip pada instansi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang di tuangkan dalam Perka ANRi, dan juga merupakan indikator penilaian Reformasi Birokrasi bagi instansi pemerintah.

Instrumen yang dinilai dalam mengelola arsip secara baku cukup banyak, salah satu diantaranya yaitu pemusnahan arsip. Perangkat daerah yang telah melaksanakan pemusnahan arsip bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 46 Perangkat Daerah. Untuk nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B keatas pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diraih oleh 4 lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Kota Pare pare, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Enrekang. Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori Baik (80,23).

Grafik II.60.
Peningkatan SDM Pengelola Arsip
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Menurunnya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan dari 2022 ke 2023 dikarenakan pada Tahun 2023 adanya Refocusing anggaran sehingga berdampak berkurangnya kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kearsipan tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.95.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	65	56	29,54	64,1	79,49	90

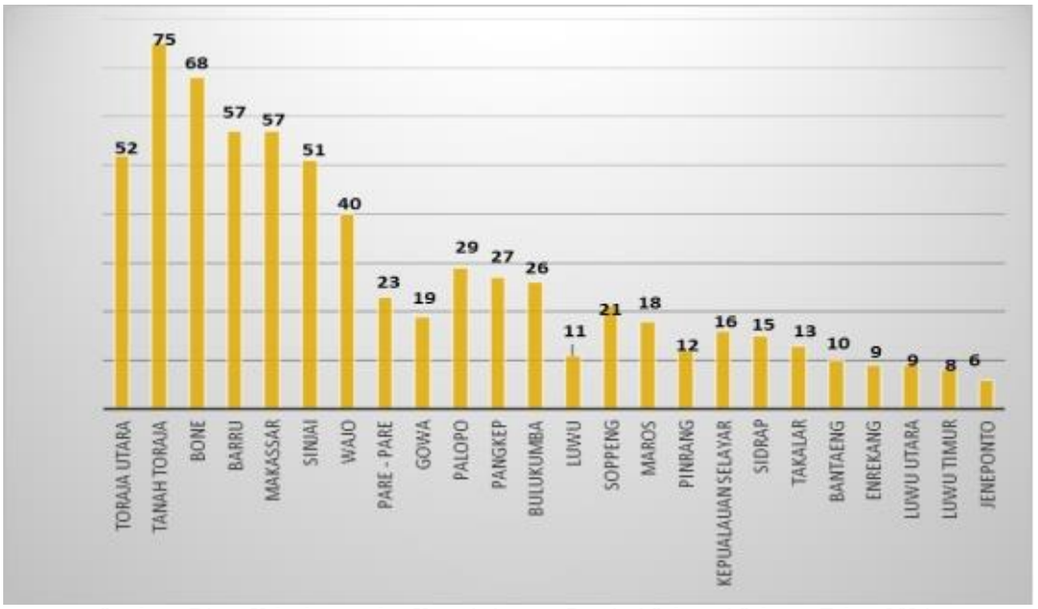
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.3 LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 PARIWISATA

Pada tahun 2023 capaian persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan capaian 0,62 persen. Masih terdapat beberapa destinasi pariwisata yang membutuhkan bantuan pengembangan namun belum memiliki dokumen perencanaan yang lengkap, seperti RIPPAR Kabupaten/Kota.

Grafik II.61.
Jumlah Destinasi Wisata Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Beberapa destinasi khususnya destinasi wisata alam masih belum jelas dasar kepemilikannya, mengingat pembagunan/pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten/Kota yang bukan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Hibah. Jumlah destinasi wisata pada tahun 2023 sejumlah 703 destinasi mengalami penurunan dari tahun 2022 sejumlah 980 destinasi.

Tabel II.96.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Wisman	173.524	34.118	6.055	85.871	116.326
Wisnus	8.691.733	2.905.294	4.764.290	8.720.474	10.249.494

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Tahun 2024

Kunjungan wisatawan nusantara atau wisatawan domestik di Sulawesi Selatan tahun 2021 mulai mengalami peningkatan seiring dengan usaha pemulihan ekonomi pada masa pandemic covid-19, kebijakan kelonggaran dalam pembatasan aktivitas mendorong masyarakat lokal untuk melakukan kunjungan pada obyek-obyek wisata lokal yang mulai dilakukan pembenahan kembali. Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Sulawesi Selatan mulai mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, kondisi ini tidak terlepas dari pandemic covid-19, yang memberlakukan kebijakan pembatasan dan larangan masuk ke Indonesia. Kondisi ini juga berdampak terhadap tidak tercapainya target yang ditetapkan yaitu jumlah kunjungan wisata sebanyak 87.500 kunjungan pada tahun 2021. Adanya pelonggaran penerbangan dalam negeri, sehingga membuka peluang untuk wisatawan domestik berkunjung ke destinasi-destinasi wisata, khususnya di Sulawesi Selatan. Tahun 2023 tercatat jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 10.249.494 kunjungan dari target sebanyak 2.125.000 kunjungan atau meningkat sebesar 482,33 persen. Dengan

dibukanya akses penerbangan dari luar negeri menjadi salah satu penyebab meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan, yang menjadikan target kunjungan wisatawan mancanegara mencapai target sebanyak 116.326 kunjungan atau 116,33 persen dari target 100.000 kunjungan. Tahun 2023 rata-rata lama kunjungan wisata sejumlah 2,5 hari mengalami peningkatan dari tahun 2022 sejumlah 1,5 hari. Selain itu peningkatan dari tahun sebelumnya juga terjadi pada peningkatan PAD pariwisata dimana pada tahun 2023 mencapai 372.805.000 rupiah, namun untuk kontribusi PDRB sektor Pariwisata tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu hanya 1,34 persen.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pariwisata tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.97.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0,2	0,4	0,2	0,62	0,62
Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	%	4,2	8,3	8,3	12,5	4,17
Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	%	114	4,21	77,16	367,1	109,79
Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara)	%	58,27	4,52	4,17	75,73	480,01
Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	19	13	17,64	18,75	25,00
Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	1,08	0	1,45	1,55	0,66
Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	15	11	12	14,92	21,54

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.3.2 PERTANIAN

Pengembangan tanaman Talas Satoimo dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena tanaman ini memiliki kandungan kolagen dan antioksidan tinggi dan merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan. Produksi talas satoimo tahun 2021 sejumlah 6.104 ton mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 7.214 ton disebabkan oleh perubahan iklim yang berakibat banjir pada beberapa wilayah yang menjadi lokasi penanaman komoditas ini seperti Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Bone dan Soppeng, sementara itu jenis komoditas ini tidak dapat terkena banjir selama musim tanam 5 bulan. Pada tahun 2022 pengembangan talas satoimo tidak di laksanakan karena tidak ada proposal/permintaan dari petani. Pengembangan Jeruk Keprok Selayar sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkantan luas areal penanaman. Pada tahun 2022 luas areal pengembangan jeruk kopyor sebesar 130,02 Ha mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan ini didukung oleh pengembangan kawasan dan pengembangan jeruk selayar berbasis pekarangan yang dilakukan melalui pengadaan dan perakitan bibit jeruk selayar.

Tabel II.98.
Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan Terhadap PDRB*	%	21,35	21,72	22,54	22,13	21,69
Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	6,34	6,50	6,45	6,00	6,12
Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,11	1,13	1,13	1,17	1,22
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	3,88	3,94	4,07	4,05	4,12
NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	%	100,54	100,66	94,17	91,34	95,96
NTP Sub Sektor Hortikultura	%	113,85	107,97	105,02	125,36	106,30
NTP Sub Sektor Perkebunan Rakyat	%	95,62	99,25	107,09	120,48	95,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Tahun 2023 produktivitas tanaman padi dan jagung mengalami penurunan dari tahun 2022 sedangkan produktivitas tanaman kopi dan kakao juga mengalami penurunan dari tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan luas lahan panen, selain itu dampak Krisis Iklim yang sulit diprediksi karena cuaca yang cepat berubah. Upaya yang dilakukan dengan adanya bantuan benih bersertifikat, pupuk yang tepat, peningkatan SDM petani dan penyuluh, penanganan serangan hama dan penyakit serta pola taman yang baik tetap dilakukan. Untuk komoditas jagung, capaian yang melampaui target dipengaruhi oleh penggunaan benih jagung yang bersertifikat, pemakaian pupuk yang tepat dan berimbang, menanganan serangan hama dan penyakit serta peningkatan SDM dan penyuluh pertanian.

Tahun 2023 produktivitas tanaman padi dan jagung mengalami penurunan dari tahun 2022 sedangkan produktivitas tanaman kopi dan kakao juga mengalami penurunan dari tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan luas lahan panen, selain itu dampak Krisis Iklim yang sulit diprediksi karena cuaca yang cepat berubah. Upaya yang dilakukan dengan adanya bantuan benih bersertifikat, pupuk yang tepat, peningkatan SDM petani dan penyuluh, penanganan serangan hama dan penyakit serta pola taman yang baik tetap dilakukan. Untuk komoditas jagung, capaian yang melampaui target dipengaruhi oleh penggunaan benih jagung yang bersertifikat, pemakaian pupuk yang tepat dan berimbang, menanganan serangan hama dan penyakit serta peningkatan SDM dan penyuluh pertanian.

Tabel II.99.
Produksi Tanaman Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Uaraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kopi (ribu Ton)	5,30	33,70	35,30	30,10	27,50
Kakao (ribu Ton)	113,40	103,50	107,10	86,90	82,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Produksi tanaman kopi tahun 2019 hingga 2020 mengalami tren penurunan, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami tren penurunan, sedangkan produksi tanaman kakao tahun 2019 hingga 2020 mengalami tren penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami tren penurunan. Produksi tanaman kopi terbesar di Kabupaten Enrekang dengan jumlah produksi sebesar 8.724 ton pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -2,99 persen dari tahun 2022, sedangkan produksi tanaman kakao terbesar di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah produksi sebesar 22.709 ton pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 22,31 persen.
Capaian peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian tahun 2020 cukup tinggi yaitu 10.401 unit mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 18.462 unit. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya bantuan alat-alat pertanian baik dari sumber pendanaan APBD maupun dari APBN. Namun demikian pada tahun 2022 meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 jumlah permintaan untuk pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian oleh kelompok tani berupa Hand Traktor, Combine Harvester, Cultivator, Handsprayer, Traktor Roda 4, Mesin Pompa Air 4 Inch dengan jumlah bantuan alsintan yang didistribusikan sebesar 14.111 unit, demikian halnya pada tahun 2023 ketersediaan alat dan mesin pertanian hanya mencapai 6.073 unit.

Peningkatan ketersediaan pupuk tahun 2019 hingga 2021 mengalami tren peningkatan, hal ini menjawab kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan petani dalam aktivitas pertaniannya, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan, kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 yang mencapai 850.440,90 ton, hal ini tidak terlepas dari program pemerintah yang fokus pada budidaya pisang khususnya pisang cavendish dan beberapa komoditi lainnya.

Nilai hilirisasi produk tanaman pangan pada tahun 2023 sebesar 11.331.727.857 rupiah, mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 92,31 persen dimana penurunan produksi dan nilai produk tanaman pangan dan hortilkultura berpengaruh terhadap penurunan nilai hilirisasi produk tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan nilai hilirisasi produk tanaman perkebunan pada tahun 2023 sebesar 10.172.090.000 rupiah mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 7.408.901.000 rupiah. Peningkatan produksi dan nilai produk tanaman perkebunan berpengaruh terhadap peningkatan nilai hilirisasi produk perkebunan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pertanian tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.100.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton)	Ton	0	7.214	6.104	0	0
Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	550,88	568,63	630,99	130,02	130
Produktifitas Padi	Kw/Ha	50,03	48,23	49,46	51,27	50,39
Produktifitas Jagung	Kw/Ha	56,49	54,04	55,31	56.83	57,54
Produtifitas Kopi	Kg/Ha	612	628	647	563,88	559
Produktifitas Kakao	Kg/Ha	792	776	814	725	707
Cakupan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	713	10.401	18.462	14.111	6.073
Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	256,34	381,30	775,23	22.658	850.440,90
Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp	0	0	392.483.722	147.321.223 .500	11.331.727. 857
Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp (000)	9.176.092	6.766.032.	6.144.952	7.408.901	10.172.09 0.000
Persentase Penurunan Serangan OPT (%)	%	1,11	1,79	2	2	2,4
Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	%	63	0	76,49	68	68
Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP	Rasio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

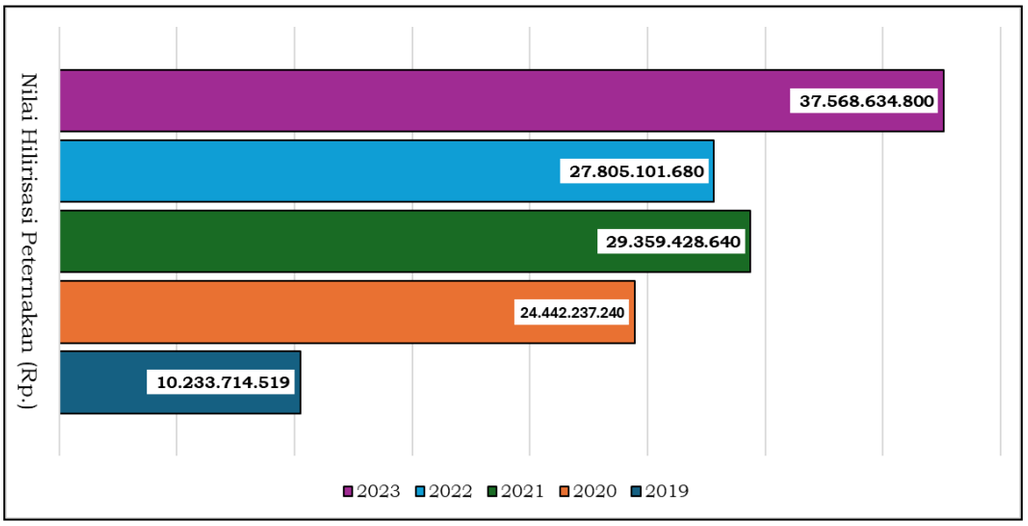
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2023

2.3.3.3 PETERNAKAN

Nilai hilirasi produksi peternakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, tahun 2019 – 2023 mengalami tren peningkatan yang sangat baik, namun pada tahun 2022 nilai hilirisasi produksi peternakan mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai hilirisasi produksi peternakan disebabkan karena adanya perlambatan perkembangan pertumbuhan ekonomi, adanya penurunan pendapatan masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap kemampuan daya beli masyarakat, rendahnya perkembangan usaha sektor perhotelan, restoran dan kantin yang memberikan tekanan terhadap penurunan nilai hilirisasi produksi peternakan.

Nilai hilirisasi produksi peternakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.62.
Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2024

Perkembangan pertumbuhan produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi. Tahun 2020 mengalami penurunan produksi hasil peternakan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dimana produksi daging mengalami penurunan sebesar 19,42% dan produksi telur mengalami penurunan sebesar 5,79%. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum maksimalnya operasional perhotelan, restoran dan kantin yang berdampak pada hambatan distribusi daging ke konsumen yang hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga.

Produksi daging terbesar berasal dari produksi daging ayam pedaging yang memberikan kontribusi sebesar 92.128 Ton atau 65 – 70% dan produksi daging sapi potong yang memberikan kontribusi sebesar 21.578 Ton atau 15 – 17% dari keseluruhan produksi daging yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sentra penghasil produksi daging ayam pedaging terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Maros dengan kontribusi sebesar 33.185 Ton atau 36% dan Kota Makassar dengan kontribusi sebesar 32.446 Ton atau 35% dari produksi daging ayam pedaging di Provinsi Sulawesi Selatan. Sentra penghasil produksi daging sapi potong terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bone dengan kontribusi sebesar 3.338 Ton atau 15%, Kabupaten Sinjai dengan kontibusi sebesar 3.141 Ton atau 14%, Kabupaten Wajo dengan kontribusi sebesar 2.208 Ton atau 10% dan Kota Makassar dengan kontibusi sebesar 2.189 Ton atau 10% dari produksi daging sapi di Provinsi Sulawesi Selatan.

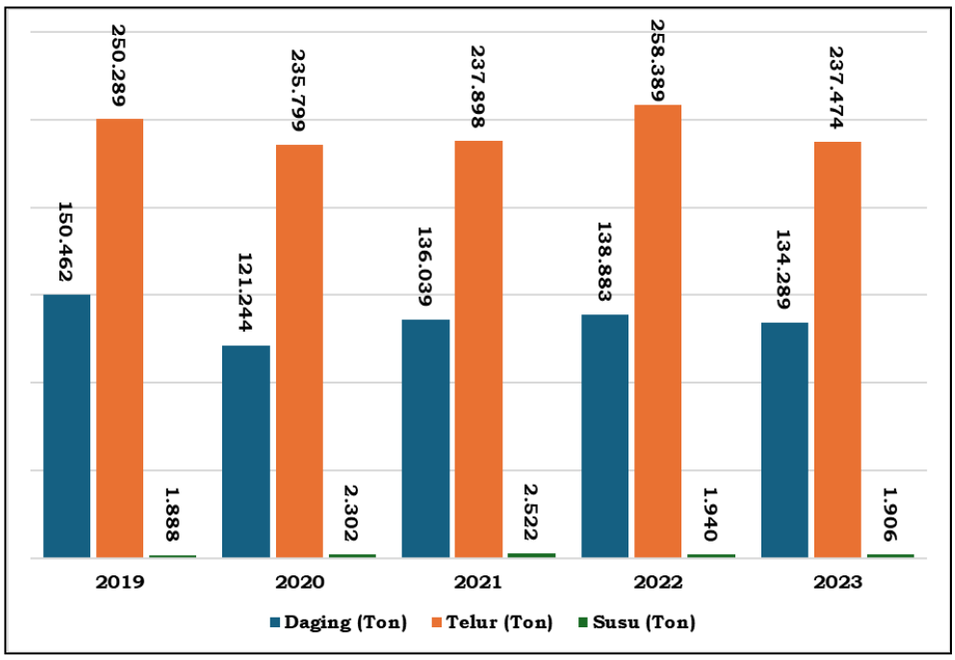
Produksi telur berasal dari produksi telur ayam ras petelur yang memberikan kontribusi sebesar 176.081 Ton atau 75% dan produksi telur itik yang memberikan kontribusi sebesar 35.194 Ton atau 15% dari keseluruhan produksi telur di Provinsi Sulawesi Selatan. Sentra penghasil telur ayam ras petelur adalah Kabupaten Sidrap dengan kontribusi sebesar 46.951 Ton atau 26%, Kabupaten Maros dengan kontribusi sebesar 30.090 Ton atau 17% dan Kabupaten Pinrang dengan kontribusi sebesar 24.951 Ton atau 14% dari produksi telur ayam ras petelur di Provinsi Sulawesi Selatan. Sentral penghasil telur itik adalah Kabupaten Pinrang dengan kontribusi sebesar 8.458 Ton atau 24%, Kabupaten Bone dengan kontribusi sebesar 4.636 Ton atau 13% dan Kabupaten Pangkep

dengan kontribusi sebesar 3.783 Ton atau 10% dari produksi telur itik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Produksi susu di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya berasal dari ternak sapi perah, dimana sentra produksi susu adalah Kabupaten Enrekang dengan kontribusi sebesar 1.789 Ton atau 96% dari produksi susu di Provinsi Sulawesi Selatan.

Produksi hasil peternakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.63.
Produksi Hasil Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Pada umumnya perkembangan populasi ternak besar mengalami tren pertumbuhan yang negatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Ternak Sapi Potong dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan pertumbuhan rata – rata sebesar 2,61% pertahun, Ternak Kuda mengalami penurunan pertumbuhan rata – rata sebesar 1,17% pertahun, Ternak Sapi Perah mengalami penurunan pertumbuhan rata – rata sebesar 7,30% pertahun, hanya Ternak Kerbau yang mengalami peningkatan pertumbuhan rata – rata sebesar 2,09% pertahun.

Sentra populasi Ternak Sapi Potong di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bone dengan kontribusi populasi sapi potong sebesar 401.631 ekor atau 35,90% dan Kabupaten Gowa dengan kontribusi populasi sapi potong sebesar 116.507 ekor atau 10,41%. Pertumbuhan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan rata – rata sebesar 0,89% pertahun sedangkan Kabupaten Gowa hanya mengalami pertumbuhan rata – rata sebesar 1,81% pertahun.

Sentra populasi Ternak Kerbau di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Tana Toraja dengan kontribusi populasi Ternak Kerbau sebesar 22.738 Ekor atau 25,45%, Kabupaten Luwu Utara dengan kontribusi populasi Ternak Kerbau Sebesar 14.124 Ekor atau 15,81% dan Kabupaten Toraja Utara dengan kontribusi Populasi Ternak Kerbau sebesar 13.395 Ekor atau 14,99%.

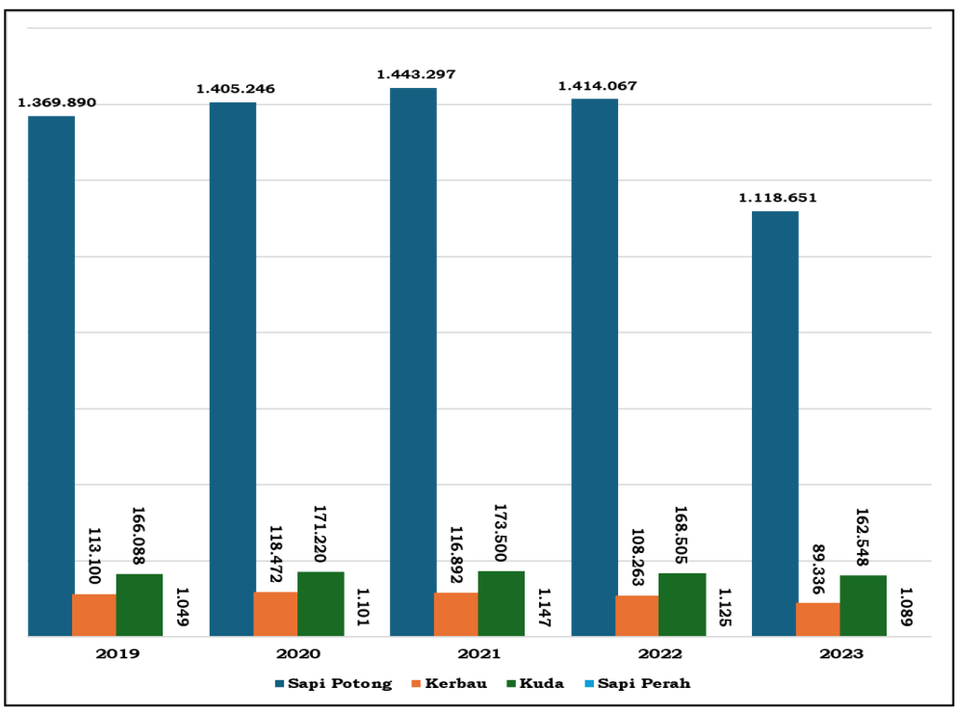
Pertumbuhan rata – rata Ternak Kerbau di Kabupaten Tana Toraja sebesar 3,83% pertahun, Kabupaten Luwu Utara sebesar 5,07% pertahun dan Kabupaten Toraja Utara hanya tumbuh 0,003% pertahun.

Sentra populasi Ternak Kuda di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Jeneponto dengan kontribusi populasi Ternak Kuda sebesar 78.636 Ekor atau 48,38%, Kabupaten Bone dengan kontribusi populasi Ternak Kuda sebesar 21.651 Ekor atau 13,32%, Kabupaten Bulukumba dengan kontribusi populasi Ternak Kuda sebesar 18.249 Ekor atau 11,23% dan Kabupaten Bantaeng dengan kontribusi populasi Kuda sebesar 16.415 Ekor atau 10,10%. Pertumbuhan rata – rata Ternak Kuda di Kabupaten Jeneponto sebesar 1,58% pertahun, Kabupaten Bone sebesar 12,30% pertahun, sedangkan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan sebesar 8,42% pertahun untuk Kab. Bulukumba dan sebesar 0,55% untuk Kabupaten Bantaeng.

Sentra populasi Ternak Sapi Perah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Enrekang dengan kontribusi populasi Ternak Sapi Perah sebesar 1.024 Ekor atau 94,03% dari jumlah populasi yang ada di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan rata – rata Ternak Sapi Perah di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan sebesar 6,66% pertahun.

Populasi Ternak Besar di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.64.
Populasi Ternak Besar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 -2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Pada umumnya perkembangan populasi ternak kecil mengalami tren pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Ternak Kambing dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan pertumbuhan rata – rata sebesar 1,26% pertahun, Ternak Babi mengalami peningkatan pertumbuhan rata – rata sebesar 0,50% pertahun, sedangkan Ternak Domba mengalami penurunan pertumbuhan minus sebesar 0,22% pertahun.

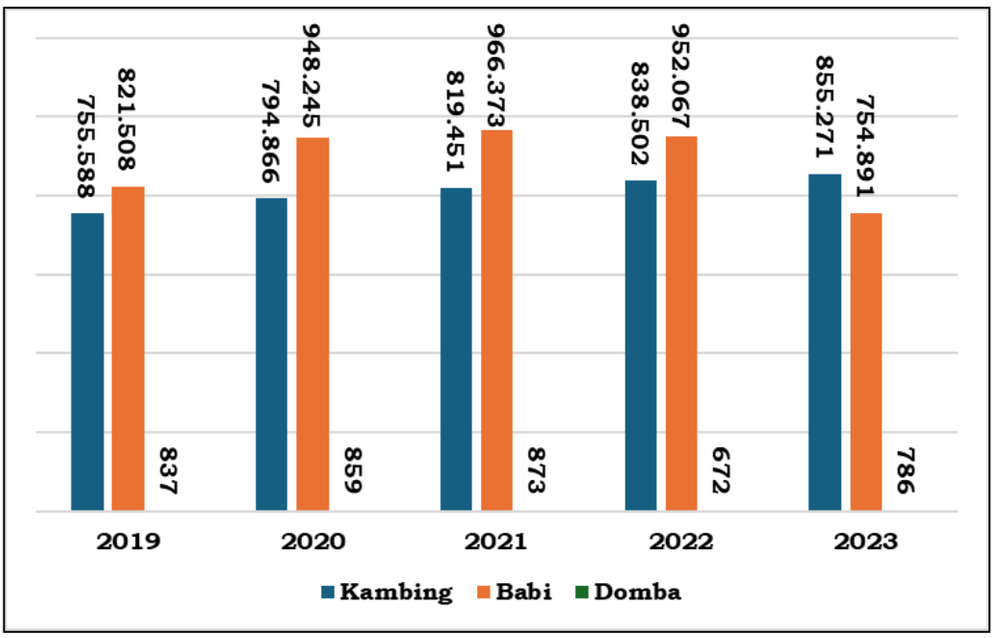
Sentra populasi Ternak Kambing di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Jeneponto dengan kontribusi populasi Ternak Kambing sebesar 254.286 Ekor atau 29,73% dan Kabupaten Selayar dengan kontribusi populasi Ternak Kambing sebesar 95.626 Ekor atau 11,18%. Pertumbuhan rata – rata Ternak Kambing di Kabupaten Jeneponto sebesar 1,73% pertahun sedangkan Kabupaten Selayar sebesar 3,81% pertahun.

Sentra populasi Ternak Babi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Toraja Utara dengan kontribusi populasi Ternak Babi sebesar 390.454 Ekor atau 51,72% dan Kabupaten Tana Toraja dengan kontribusi populasi Ternak Babi sebesar 339.849 Ekor atau 45,02%. Pertumbuhan rata – rata Ternak Babi di Kabupaten Toraja Utara sebesar 3,74% pertahun sedangkan Kabupaten Tana Toraja sebesar 2,15% pertahun.

Populasi Domba di Provinsi Sulawesi Selatan hanya ada di Kabupaten Jeneponto sebanyak 687 Ekor dan Kabupaten Selayar sebanyak 99 Ekor.

Populasi Ternak Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.65.
Populasi Ternak Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Pada umumnya perkembangan populasi ternak unggas mengalami tren pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Ternak Ayam Buras dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan pertumbuhan rata – rata sebesar 0,18% pertahun, Ternak Ayam Petelur mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 1,73% pertahun, Ternak Ayam Pedaging mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 3,50% pertahun sedangkan itik mengalami pertumbuhan minus sebesar 2,75% pertahun.

Sentra populasi Ternak Ayam Buras di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bone dengan kontribusi populasi Ternak Ayam Buras sebesar 5.005.178 Ekor atau 16,11%, Kabupaten Soppeng dengan kontribusi populasi Ternak Ayam Buras sebesar 4.074.069 Ekor atau 11,75% dan Kabupaten Jeneponto dengan kontribusi populasi Ternak Ayam Buras sebesar 3.438.487

Ekor atau 11,07%. Pertumbuhan rata – rata Ternak Ayam Buras di Kabupaten Bone sebesar 0,28% pertahun, Kabupaten Soppeng sebesar 8,24% pertahun sedangkan Kabupaten Jeneponto tumbuh minus sebesar 0,30% pertahun.

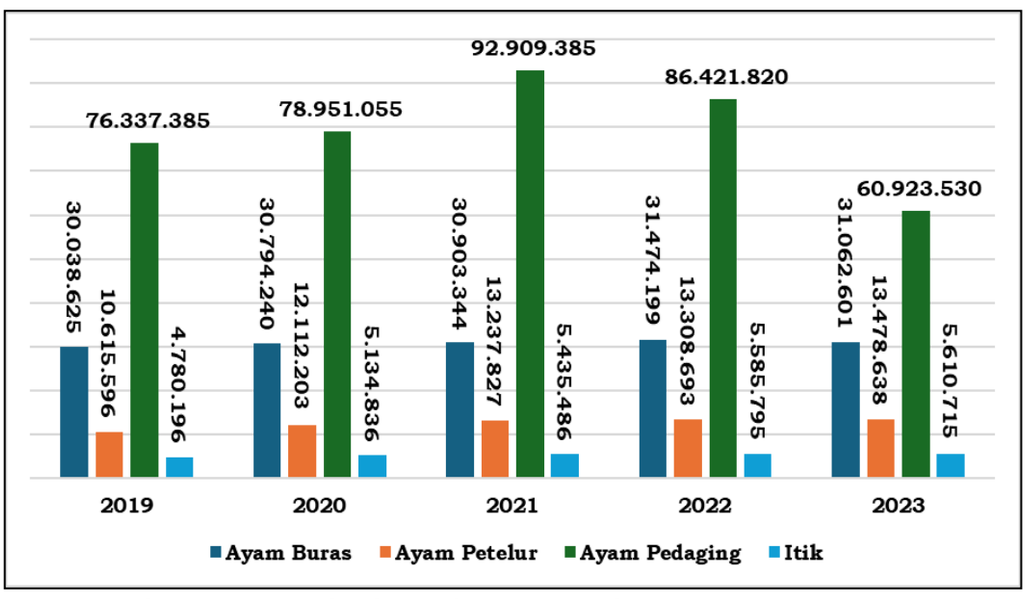
Sentra populasi Ternak Ayam Ras Petelur di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Sidrap dengan kontribusi populasi Ternak Ayam Ras Petelur sebesar 3.794.705 Ekor atau 28,15%, Kabupaten Maros dengan kontribusi populasi Ternak Ayam Ras Petelur sebesar 2.286.721 Ekor atau 16,97% dan Kabupaten Pinrang dengan kontribusi populasi Ternak Ayam Ras Petelur sebesar 1.732.964 Ekor atau 12,86%. Pertumbuhan rata – rata Ternak Ayam Ras Petelur di Kabupaten Sidrap mengalami pertumbuhan minus sebesar 7,91% pertahun, Kabupaten Maros meningkat sebesar sebesar 37,37% pertahun sedangkan Kabupaten Pinrang tumbuh minus sebesar 4,48% pertahun.

Sentra populasi Ternak Ayam Ras Pedaging di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Maros dengan kontribusi populasi Ternak Ayam Ras Pedaging sebesar 37.644.481 Ekor atau 61,79% dan Kabupaten Luwu Utara dengan kontribusi populasi Ternak Ayam Ras Pedaging sebesar 6.871.108 Ekor atau 11,28%. Pertumbuhan rata – rata Ternak Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Maros sebesar 9,80% pertahun dan Kabupaten Luwu Utara tumbuh sebesar 19,35% pertahun.

Sentra populasi Ternak Itik di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Pinrang dengan kontribusi populasi Ternak Itik sebesar 1.289.205 Ekor atau 22,98%, Kabupaten Bone dengan kontribusi populasi Ternak Itik sebesar 742.295 Ekor atau 13,23% dan Kabupaten Pangkep dengan kontribusi populasi Ternak Itik sebesar 589.994 Ekor atau 10,52%. Pertumbuhan rata – rata Ternak Itik di Kabupaten Pinrang sebesar 0,72% pertahun, Kabupaten Bone tumbuh sebesar 21,39% pertahun dan Kabupaten Pangkep tumbuh sebesar 2,47% pertahun.

Populasi Ternak Unggas di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.66.
Populasi Ternak Unggas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Indikator kinerja program urusan peternakan terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu Produksi daging, produksi telur, produksi susu, nilai hilirisasi produksi peternakan, jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS), persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan dan rasio ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani / ternak.

Pertumbuhan produksi daging dan produksi telur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan, produksi daging menurun sebesar 16.173 Ton atau 10,75%, produksi daging tahun 2019 sebesar 150.462 ton sedangkan produksi daging tahun 2023 hanya sebesar 134.289 Ton, produksi telur menurun sebesar 12.815 Ton atau 5,12%, produksi telur tahun 2029 sebesar 250.289 Ton sedangkan produksi telur tahun 2023 sebesar 237.474 Ton. Sedangkan produksi susu hanya meningkat sebesar 18 Ton atau 0,95%, dari produksi 1.888 Ton di tahun 2019 menjadi 1.906 Ton di Tahun 2023. Penurunan produksi daging, telur dan susu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disebabkan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan masyarakat yang berkontribusi terhadap kemampuan daya beli masyarakat dan rendahnya perkembangan usaha sektor perhotelan, restoran dan kantin yang memberikan pengaruh terhadap produksi hasil peternakan termasuk produksi daging. Selain itu, penurunan produksi daging disebabkan karena masih tingginya masih rendahnya tingkat kelahiran ternak, tingginya angka pemotongan betina produktif, adanya kasus penyakit ternak dan masih tingginya angka kematian pedet (anak sapi) yang disebabkan oleh kuantitas dan kualitas pakan yang rendah. Penurunan produksi susu lebih cenderung disebabkan karena sapi perah yang ada di Kabupaten Enrekang pada umumnya sudah tua dan membutuhkan peremajaan kembali dengan dukungan pemerintah.

Nilai hilirasi produksi peternakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, tahun 2019 – 2023 mengalami tren peningkatan yang sangat baik, walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang dapat disebabkan oleh adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada penurunan daya beli masyarakat dan pelambatan industri perhotelan, restoran dan kantin. Nilai hilirisasi produk peternakan dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat besar, nilai hilirisasi produk peternakan tahun 2019 sebesar Rp. 10.233.714.519,- meningkat sebesar Rp. 27.334.920.281,- di tahun 2023 menjadi Rp. 37.568.634.800,-. Peningkatan nilai hilirisasi produksi peternakan dapat disebabkan karena adanya perbaikan kualitas pengolahan dan mutu produk hasil peternakan, perbaikan dalam distribusi logistik yang lebih efisien dan adanya insentif untuk investasi oleh pemerintah dalam sektor peternakan.

Pelaporan Jumlah kasus penyakit hewan menular stategis (PHMS) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan sangat besar, Tahun 2019 jumlah pelaporan kasus penyakit sebanyak 11.071 Kasus kemudian meningkat di Tahun 2020 menjadi 36.689 Kasus dan kembali menurun sebanyak 570 kasus di tahun 2023. Penurunan kasus penyakit hewan menular stategis (PHMS) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak lepas kaitannya dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penanggulangan bencana khususnya kedaruratan penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Jembrana. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan membentuk posko crisis center pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penyakit Jembrana di setiap kabupaten / kota, pengawasan lalu lintas di pelabuhan pemasukan dan

pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan terkait penyakit PMK dan Penyakit Jembrana, pendistribusian sarana dan prasarana terkait penanganan penyakit PMKdan Penyakit Jembrana.

Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sudah lebih baik, walaupun belum mencapai target yang diharapkan. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya dukungan kebijakan daerah dan system pengawasan yang dapat mendorong pencapaian target terhadap usaha unit obat hewan yang beroperasi. Usaha distribusi atau layanan obat hewan tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan jumlah yang besar, sehingga diperlukan suatu sistem yang lebih mudah dalam pelaksanaannya. Sistem tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sistem perizinan lainnya.

Rasio ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani / ternak adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dalam suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah kelompok tani / ternak yang harus dilayani oleh penyuluh tersebut. Rasio ini dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi apakah terdapat cukup banyak penyuluh pertanian yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian di suatu daerah. dari perolehan data pada tahun 2023, dapat diinterpretasikan bahwa 1 penyuluh untuk 35 kelompok tani / ternak. Hal ini masih dianggap ideal mengingat kondisi wilayah bisa sangat bervariasi di setiap daerah. Semakin luas wilayah yang harus dilayani oleh penyuluh pertanian, maka semakin banyak pula jumlah penyuluh yang dibutuhkan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan peternakan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.101.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023

INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Daging	Ton	150.462	121.244	136.039	138.883	134.289
Produksi Telur	Ton	250.289	235.799	237.898	258.389	237.474
Produksi Susu	Ton	1.888	2.302	2.522	1.940	1.906
Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	Rp.	10.233.714.519	24.442.237.240	29.359.428.640	27.805.101.680	37.568.634.800
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Kasus	11.071	36.689	12.341	1.331	570
Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	0	0	21	21	50
Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap kelompok Tani / Ternak	Rasio	1 : 3	1 : 6	1 : 10	1 : 14	1 : 35

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

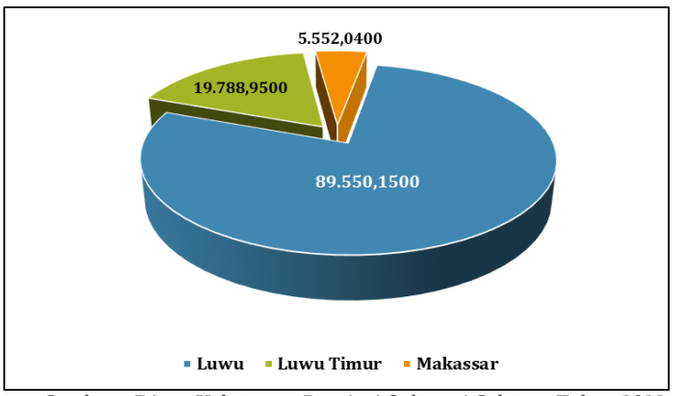
2.3.3.4 KEHUTANAN

Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan dengan capaian 71,14 persen luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022 baik yang ada di dalam dan diluar kawasan sejumlah 13.003,2 Ha sehingga luas lahan kritis yang direhabiltasi menjadi 277.042,97 Ha dari luas total lahan kritis sebesar 389.426,8 Ha.

Tahun 2018 hingga 2020 persentase luas kerusakan hutan mengalami tren menurun, meskipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan namun persentase kerusakan hutan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,03 persen. Hal ini didukung oleh upaya pengamanan dan perlindungan hutan berupa patroli dan penyuluhan berupa sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dimana kerusakan hutan yang terjadi pada tahun 2021 seluas 1.431,99 Ha menurun menjadi 580,79 Ha dari total 1.780.029 Ha luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya. Hal ini didorong oleh kegiatan rehabilitasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas penebangan liar yang sering terjadi pada kawasan hutan. Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara pada tahun 2022 sebesar 724 Ha melalui pembuatan dan pemeliharaan tanaman hutan rakyat dan pembuatan dan pemeliharaan tanaman mangrove.

Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan pada tahun 2022 sebesar 111.444,19 Ton mengalami penurunan produksi dari tahun 2021 yang disebabkan berkurangnya potensi bahan baku serta daya beli masyarakat yang semakin berkurang dimana sebagian masyarakat yang beralih ke penggunaan baja ringan. Produksi hasil hutan kayu olahan berasal dari kelompok komoditi kayu gergajian, kayu lapis dan veener, dengan nilai produksi tersebsar berasal dari kayu lapis.

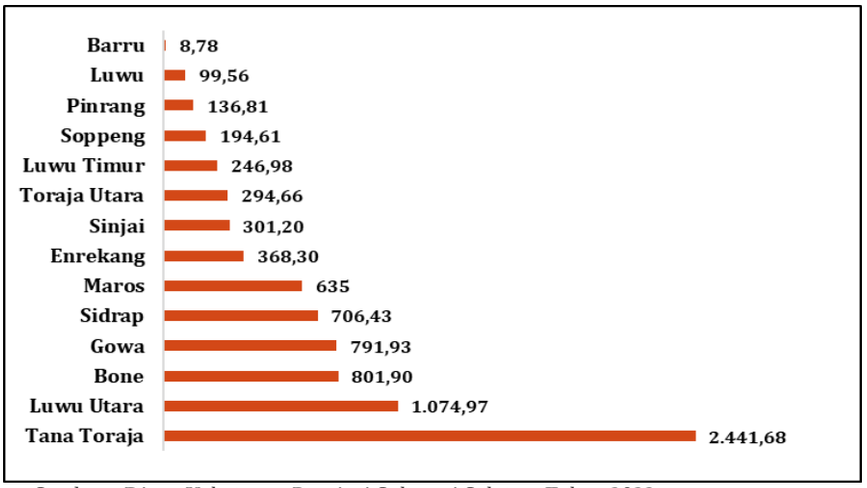
Diagram II.13.
Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan (m^3)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada tahun 2022 sebesar 8.102,81 Ton mengalami peningkatan produksi dari tahun 2021 yang didukung dengan adanya penambahan jumlah izin pemungutan HHBK yang berdampak langsung dengan jumlah produksi di industri-industri yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung jumlah penerimaan dari sektor kehutanan pada tahun 2022 mencapai Rp.91.654.000,-. Produksi hasil hutan bukan kayu diperoleh dari produksi kelompok rotan, kelompok getah dan kelompok resin. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.67.
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata tahun 2022 sejumlah 2 jenis dimana tidak adanya perubahan atau penambahan jenis yang diukur sesuai target indikator tahun ini yaitu satu jenis tumbuhan/Flora dan satu jenis hewan/Fauna.

Capaian persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 dengan capaian 26,8 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang diberikan akses legal meningkat dalam pengelolaan hutan pada tahun 2022. Jumlah pemegang izin perhutanan sosial pada tahun 2022 sebesar 505 kelompok sedangkan jumlah usulan pemegang izin perhutanan sosial sebesar 1.884. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: a) Adanya pembinaan yang dilaksanakan secara intensif terkait hak dan kewajiban pemegang persetujuan dari UPT KPH baik oleh pendamping KPS maupun penyuluh kehutanan pada areal pemegang persetujuan perhutanan sosial; b) Sosialisasi pengelolaan perhutanan sosial sesuai permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 kepada pemegang persetujuan baik yang dilaksanakan oleh BPSKL Sulawesi maupun Dinas Kehutanan melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial; c) Kemampuan pemegang izin dalam mengakses teknologi informasi yang makin berkembang terkait Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Pada tahun 2022 untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial dilaksanakan kegiatan pembangunan rumah pemeliharaan ulat sutera sejumlah 5 unit, pengadaan bibit aren, jahe, dan kopi serta penyediaan sarana dan prasarana alat ekonomi produktif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) disebutkan bahwa terdapat 7 DAS Lintas Provinsi. 27 DAS Lintas Kabupaten, dan 507 DAS Kabupaten. Jumlah DAS yang direhabilitasi dari tahun 2019 hingga 2022 tidak mengalami perubahan DAS yang direhabilitasi yang terletak di lokasi DAS yang telah ditentukan yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang sedangkan DAS lainnya tetap dipertahankan kondisinya.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kehutanan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.102.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	238.506,77	251.016,77	264.039,77	277.042,97	
Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	427.963	415.453	402.430	389.426,8	
Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	55,73	60,42	65,61	71,14	65,47 (target)
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	362.264,23	12.440	1.431,99	580,79	
Luas Kawasan Hutan	Ha	2.078.486	1.780.029	1.780.029	1.780.029	1.780.029,00 (target)
Persentase Kerusakan Hutan pertahun	%	17,43	0,7	0,08	0,03	14,82 (target)
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ton	632.869,29	3.920,13	2.688,57	6.664,87	3.112,83 (realisasi sampai tw2)
Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	m^3	215.731,05	20.801,62	137.931,37	111.982,00	5.325.195,00 (realisasi sampai tw2)
Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Jenis	2	2		2	2 (target)
Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	%	12,19	15,80	24,04	26,8	28,26 (realisasi sampai tw2)
Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan, dimana capaian tahun 2023 mencapai 99,99 persen.

Tahun 2023 jumlah rumah tangga yang telah menikmati layanan listrik sejumlah 2.650.354 KK atau persentase rumah tangga yang berlistrik telah mencapai 99,99 persen yang bersumber dari Listrik PLN dan Non PLN) sedangkan rumah tangga yang belum terlayani penerangan merupakan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang berada di kepulauan dan pegunungan serta rumah tangga yang tidak mampu selain wilayah 3T meskipun terdapat jaringan PLN.

Capaian persentase rumah tangga pengguna listrik PLN di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan untuk wilayah perdesaan sejak tahun 2019 hingga 2023. Sedangkan untuk wilayah perkotaan persentase rumah tangga pengguna listrik PLN tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan

masing-masing dengan capaian 99,94 persen dan 99,82 persen. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Persentaase desa berlistrik di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan selama kurun waktu 5 tahun meskipun belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terdapat desa yang berada di wilayah kepulauan dan desa terpencil yang belum terjangkau listrik sebesar 1,51 persen. Tahun 2023 persentase desa berlistrik mencapai 100 persen yang berarti bahwa sejumlah 2.255 desa di Sulawesi Selatan telah terakses listrik baik yang bersumber dari listrik PLN maupun Non PLN.

Dalam rangka konsevasi energi untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional dan bijaksana untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penggunaan energi secara efisien dan merata serta kelestarian sumber-sumber energi di Sulawesi Selatan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: a) Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga sejumlah 15 unit yang tersebar di Kabupaten Bone, Jeneponto dan Sidrap; b) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sejumlah 5 unit di Kabupaten Barru dan 13 unit di Kabupaten Pangkep; c) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya di Pulau Samalona Kota Makassar; d) Pembangunan PLTS Rooftop Offgrid 3 kWp di Kabupaten Bone; e) Pengadaan Genset di Kabupaten Pangkep; f) Pengadaan PLTS Hybrid sejumlah 2 unit di Kabupaten Jeneponto; dan g) Pengadaan Genset 300 kVA di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar.

Capaian Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) tahun 2023 menunjukkan nilai 150.265 Ha, capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebsar 100.000 Ha, kondisi ini disebabkan oleh kewenangan provinsi untuk sector minerba telah dialihkan ke pemerintah pusat sehingga dinas ESDM Provinsi hanya melakukan fungsi penyiapan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan layanan perizinan air tanah dengan metode pemberian rekomendasi teknis pengusahaan air tanah yang didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian teknis sebagai pertimbangan dalam proses penerbitan izin usaha pengusahaan air tanah. Semakin banyaknya pelaku usaha melakukan perizinan usaha air tanah sehingga konservasi air tanah demi lingkungan dapat tercapai. Disamping itu pendataan cakupan air tanah berwawasan konservasi sehingga cekungan air tanah menjadi acuan pembuatan tata ruang yang baik. Tahun 2022 luas wilayah izin usaha pertambangan (komoditas batuan, non logam, non logam jenis tertentu) sebesar 130.000 Ha. Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020 dengan adanya penambahan pelaku usaha pertambangan yang berizin sehingga bertambah luasan. Namun pada tahun 2021 hingga 2022 capaian 0 persen disebabkan karena kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat. Tahun 2019 hingga 2022 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 379.181.399.147 rupiah.

Capaian penggunaan gas rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan, kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat 10 persen masyarakat

pedesaan dan daerah terpencil masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah serta penyediaan gas elpiji 3 kg yang belum mencapai daerah terpencil. Pada tahun 2022 jumlah pengguna gas rumah tangga telah mencapai 93,4 persen baik gas elpiji maupun biogas. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan masyarakat telah beralih dari bahan bakar minyak tanah dan kayu bakar ke gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangga, ditunjang dengan makin meratanya jangkauan distribusi elpiji bersubsidi 3 kg hingga ke pelosok-pelosok desa.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.103.
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	97,8	97,53	98,2	99,89	99,99
Persentase Desa Berlistrik	(%)	98,51	98,64	98,49	100	100
Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi	(%)	98,18	235	100	100	80,04
Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	0	0	320	130.000	150.265
Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	3.979,06	5.535,08	0	0	146.276
Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	88,47	90	91,67	93,4	95

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.3.6 PERDAGANGAN

Capaian rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) tahun 2023 menunjukkan nilai 0 yang berarti bahwa tidak terdapat izin usaha perdagangan minuman keras yang dikeluarkan untuk diperdagangkan secara bebas. Tahun 2022 jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan sejumlah 1 rekomendasi (PT. Sulawesi Sumber Segar) dari 2 rekomendasi yang ditargetkan. Surat keterangan asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) merupakan sertifikat asal barang yang menyatakan asal dari barang yang diekspor. Tahun 2022 jumlah rekomendasi penerbitan SKA sebesar 5.013 dokumen dari target 4.800 dokumen. Capaian ini didukung oleh makin banyaknya pengusaha/eksportir yang memanfaatkan preferensi tarif yaitu fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional serta menigkatnya ekspor komoditi di Sulawesi Selatan.

Sarana distribusi perdagangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah tersedia di Sulawesi Selatan. Sarana perdagangan tersebut adalah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka

komoditas dan sarana lainnya seperti terminal. Olehnya itu capaian untuk persentase ketersediaan sarana distribusi perdagangan adalah 100 persen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dimana capaian tahun 2023 didukung oleh termanfaatkannya/tersewakan 3 sarana dan prasarana pusat distribusi regional oleh para pengusaha dan UKM yaitu pasar tradisional Jompi'e Pare-Pare, PDR Gudang Kima, dan Ballroom CCC yang mana ketiga sarana tersebut merupakan sumber PAD.

Tahun 2019 hingga 2023 capaian persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya mencapai 100 persen. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: a) Telah dilaksanakan pemantauan harga terhadap 22 komoditi/bahan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran; b) Telah dilaksanakan pasar murah menyambut hari besar keagamaan di 5 kabupaten yaitu Jeneponto, Bone, Palopo, dan Toraja, dan telah mendistribusikan 1300 paket di masing-masing kabupaten dengan harga per paket sebesar Rp. 50.000,-.

Capaian persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen mengalami tren peningkatan pada tahun 2020 hingga 2023 yang mencapai 100 persen pada tahun 2023. Jumlah barang beredar yang sesuai dengan ketentuan sebesar 26.400 unit dari yang di targetkan sebesar 30.000 unit. Capaian persentaase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar perdagangan retail pada tahun 2023 sebesar 100 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh karena produk UMKM yang memiliki standar untuk memasuki pasar retail hanya sejumlah 46 pelaku usaha.

Nilai Ekspor Perdagangan tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 2.358.937.318 US$, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 1.584.085.320 US$ yang dipengaruhi oleh meningkatnya nilai ekpor khususnya dari sektor tambang Nikel sebesar 1.625.353.632 US$ dengan volume 304.471,48 Ton yang diekspor ke negara China, India, Jepang, dan Korea, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 1.756.183.886 US$. Nilai ekspor sub sektor pertanian sejumlah 10 jenis dan sub sektor perikanan sejumlah 17 jenis sebesar 432.567.010,2 US$ dengan volume ekspor 161.072,09 Ton. Sedangkan nilai ekspor sektor industri sejumlah 39 jenis sebesar 300.915.510,89 US$ dengan volume ekspor 279.852.656,13 Ton.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perdagangan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.104.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	0	20	0	50	0
Persentase Penerbitan SKA	%	100	100	116,4	104,44	100
Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	100	100	100
Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
yang dapat dikendalikan harganya						
Nilai Ekspor Perdagangan	US $	1.463.153.049	1.384.609.057	1.677.394.840	2.358.937.318	1,756.183.886
Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	%	64,53	35,22	75	88	100
Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	%	75	87,5	100	50	100

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.3.7 PERINDUSTRIAN

Pada Tahun 2020 hingga 2023 persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2023 mencapai 3 persen. Hal ini disebabkan banyaknya para pelaku industri utamanya industri kecil yang berlomba-lomba untuk menstandarisasi produknya dengan tujuan untuk menambah peminat dan untuk mengakses pasar yang lebih luas.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Tahun 2019 hingga 2023 capaian persentase peningkatan pengelolaan SIINAS mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2023 mencapai 3 persen. Peningkatan ini didukung oleh mulai tumbuhnya kesadaran para pelaku industri memanfaatkan pendataan industri untuk membantu mereka untuk mendapatkan fasilitasi dari pihak manapun melalui pendataan SIINAS, namun masih diperlukan usaha-usaha pengelolaan terhadap sistem informasi tersebut agar dapat berfungsi lebih optimal.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perindustrian tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.105.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pertumbuhan jumlah industry	%	-6,92	-11,21	49,52	35,44	40,84
Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	6	1,4	1,78	2,1	3
Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	1	1,4	1,97	2,2	3

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2024

2.3.3.8 TRANSMIGRASI

Pada tahun 2023 penempatan transmigrasi sebesar 35 KK yang terdiri dari di dua kabupaten (Sidrap dan Luwu Timur). Untuk mendukung pelaksanaan penempatan transmigran dimaksud, telah diterbitkan dan diperbaharui draft naskah perjanjian kerja sama antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan beberapa Provinsi, yakni DKI. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Beberapa

kegiatan lain yang menunjang seperti Bimbingan teknis Ketransmigrasian, Penyuluhan Transmigrasi, dan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Transmigrasi, juga telah dilaksanakan secara optimal.

1. Untuk Lokasi Mahalona SKP.C SP.1 Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan penempatan transmigran pada 23 November 2023 sebanyak 15 KK yang terdiri dari :
   - Transmigran Penduduk Asal (TPA) sebanyak 7 terdiri dari :
     - Provinsi Jawa Tengah 3 KK;
     - Provinsi Lampung 4 KK;
   - Transmigran Penduduk Setempat (TPS) sebanyak 8 KK.
2. Untuk Lokasi UPT. Wala Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan penempatan transmigran pada 15 Desember 2023 sebanyak 20 KK yang terdiri dari :
   - Transmigran Penduduk Asal (TPA) sebanyak 8 KK terdiri dari :
     - Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 KK;
     - Provinsi Jawa Timur sebanyak 3 KK;
     - Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 KK;
   - Transmigran Penduduk Setempat (TPS) sebanyak 12 KK.

Capaian persentase Transmigran yang telah dilatih untuk dapat lebih mandiri yang diwujudkan dalam kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi lokasi transmigrasi telah terealisasi sebesar **100%** pada 4 Kabupaten yakni Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

Capaian persentase ketersediaan data sarana dan prasarana yang tersedia di Unit Permukiman Transmigrasi Binaan Provinsi Sulawesi Selatan telah terealisasi sebesar **100%**, selain itu pada tahun 2023 juga telah dilakukan kegiatan pengukuran terkait luas, kecukupan, dan batasan lahan transmigrasi pada kabupaten Sidrap dan Luwu Timur (terealisasi **100%**).

Data capaian kinerja program pembangunan urusan transmigrasi tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.106.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penempatan transmigrasi	%	100	100	0	100	100
Persentase Transmigrasi yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	%	100	100	100	100	Belum ada data
Persentase Ketersediaan data sarana dan prasarana transmigrasi	%	100	100	100	100	100
Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawei Selatan, tahun 2023

2.3.3.9 KELAUTAN DAN PERIKANAN

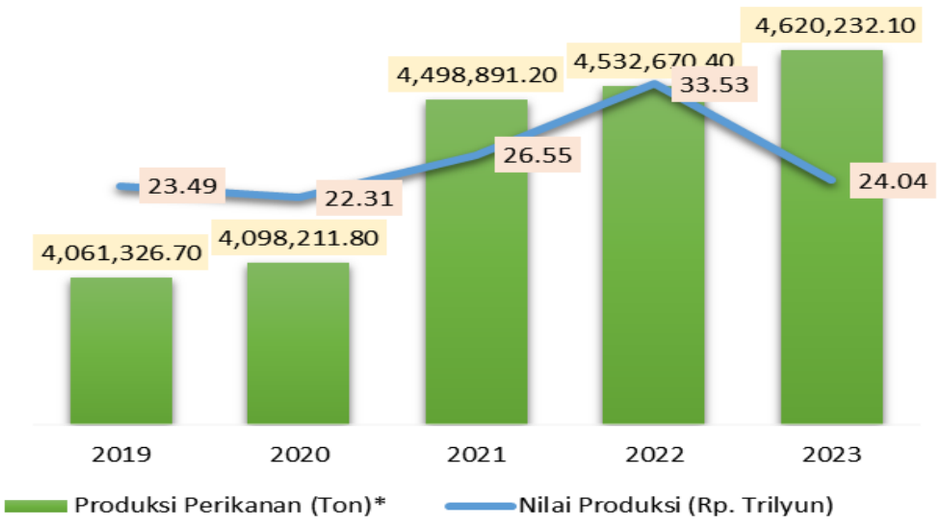
Pelaksanaan program/kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dimana terdapat beberapa indiktor Keberhasilan capaian sasaran strategis antara lain meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi yaitu produksi perikanan, dan kontribusi PDRB perikanan.

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan produksi garam. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut (termasuk rumput laut) dan produksi garam dari kabupaten/kota penghasil garam, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

Tabel II.107.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)		
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Target	Capaian
Produksi Perikanan (Ton)	4.022.206	4.201.665,51	4.147.630,5	4.500.393,56	4.536.058,18	4.620.232,10	4.759.871,9	97.06

Grafik II.68.
Produksi Perikanan



Produksi perikanan mencapai 99,48 % dari target namun naik 4,39 % dibandingkan tahun 2022. Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 produksi perikanan tumbuh positif dengan peningkatan rata-rata 4,22%. Tidak tercapainya target disebabkan perlambatan peningkatan produksi budidaya yaitu sebesar 0,78 % jauh dari proyeksi perencanaan yaitu tumbuh sebesar 5 %. Informasi diperoleh dari petugas statistik Kabupaten /Kota adalah akibat musim kemarau sehingga produksi budidaya air tawar tidak optimal akibat kurangnya pasokan air dan mempengaruhi kualitas air. Selain itu harga rumput laut yang turun mempengaruhi animo pembudidaya. Upaya yang telah dilakukan adalah penerapan teknologi budidaya yaitu teknologi bioflock. Perlunya penerapan beberapa teknologi yang adaptif, aplikatif, efektif, dan efisien karena kelebihan penerapan teknologi budidaya tersebut adalah

penggunaan pakan lebih efisien, produktifitas tinggi, hemat air dan ramah lingkungan.

Adapun untuk produksi perikanan tangkap mencapai 119,16 % dari target dan naik 12,69 % dibandingkan capaian tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata Produksi 7,74 % kurun waktu 2018-2023. perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan laut sebesar 448.272 ton dan perairan umum sebesar 43.887.5 ton. Komoditi unggulan perikanan tangkap yaitu Tuna Cakalang Tongkol naik 1,81 %, produksi gurita naik 209 %. Upaya yang dilakukan untuk mendorong produksi perikanan tangkap adalah bantuan kepada nelayan berupa alat tangkap, alat bantu tangkap, mesin, rumpon, dan kapal serta pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan sebagai sentra produksi perikanan.

Tabel II.108.
Realisasi produksi perikanan tangkap, produksi budidaya dan produksi garam tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2023	Capaian (%)	Naik/Turun tahun 2022-2023
Produksi perikanan budiaya (ton)	3.662.761.4	3.713.111,8	4.081.480,5	4.095.934,7	4.128.072,6	4.298.391,1	96,04	+ 0,78
produksi perikanan tangkap (ton)	398.565,2	389.208,2	417.410,7	436.735,7	492.159,5	413.030,8	119,16	+ 12,93
Produksi Garam (ton)	140.338,87	45.310,5	1.283,15	3.387,66	114.959,88	48.450	230,27	+ 3.293,34
Total Produksi	4.201.665,51	4.147.630,5	4.500.174,4	4.536.058,06	4.735.190,98	4.759.871,9	99,48	+ 4,22

Produksi perikanan budidaya mencapai target sebesar 96,04 % dan naik 0,78 % dibandingkan tahun 2022. Perkembangan produksi budidaya tahun 2018-2023 terus meningkat dengan rata-rata 3,77 %. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 4.243.467 ton telah mencapai 97,28 %. Produksi perikanan budidaya tersebut terdiri dari budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar.

Tabel II.109.
Realisasi Perkembangan komoditi unggulan budidaya
Tahun 2018 -2023

Komoditi	Tahun					% Peningkatan/ penurunan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Rumput laut	3,406,924.6	3,441.138,7	3.786,411.7	3.796.733,3	3.858.093,4	+ 1,62
Udang	44,520.5	50.876,1	54.974,6	61,446.2	66,723.1	+ 8,59
Udang Windu	10,370.2	10.595,4	11.457,5	10.662,4	8.859,0	- 16,9
Bandeng	184.186,2	193.589,2	211.225,4	206.091,4	173.040,8	-16.04

Perlambatan peningkatan produksi budidaya disebabkan perlambatan produksi rumput laut sebesar 1,62 % dan penurunan komoditi budidaya tambak yaitu udang windu turun 0,38 % dan bandeng turun 2,89 %. Jika dilihat dari realisasi produksi per kabupaten/kota sesuai tabel 16 yang mengalami penurunan adalah Kab. Selayar, Jeneponto, makassar, pangkep, Sidrap, enrekang, Soppeng dan Toraja Utara. Informasi diperoleh dari petugas statistik Kabupaten /Kota adalah akibat musim kemarau sehingga produksi budidaya air tawar tidak optimal akibat kurangnya pasokan air, mempengaruhi kualitas air sehingga menyebabkan pertumbuhan terhambat bahkan menyebabkan gagal panen, selain itu harga rumput laut yang turun mempengaruhi animo pembudidaya. Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya yaitu berkisar 93 %. Pencapaian volume produksi perikanan budidaya didukung kegiatan bantuan bibit, sarana prasarana budidaya, serta pembinaan dan pendampingan teknis secara rutin (Tenaga pendamping Budidaya) untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

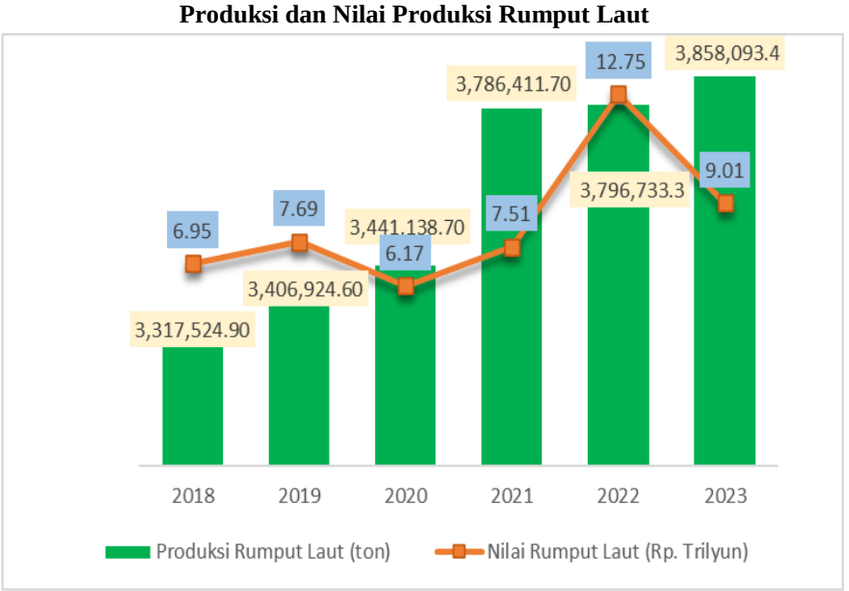
Adapun nilai produksi budidaya mencapai target 113,78 % namun turun sebesar 16,37 % dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018 - 2023 nilai produksi budidaya terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 9,14 %. Tahun 2020 mengalami penurunan akibat imbas pandemi Covid, kemudian di tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Jika dilihat dari nilai produksi komoditi budidaya yang mengalami penurunan adalah nilai produksi rumput laut turun sebesar 29,35 % dan nilai produksi bandeng sebesar 7,85 %. Nilai produksi bandeng turun seiring dengan penurunan volume produksi sedangkan nilai produksi rumput laut disebabkan penurunan harga yaitu tahun 2022 harga rata-rata rumput laut *E Cottonii* Basah sebesar Rp 4.992 dan kering Rp 29.953 sedangkan tahun 2023 harga rata-rata rumput laut *E Cottonii* Basah Rp.3.484 dan Kering Rp 20.900.

Nilai produksi rumput laut berkontribusi sekitar 50 % terhadap total nilai produksi budidaya sehingga mempengaruhi fluktuasi nilai produksi budidaya. Sebagai salah satu komoditi ekspor, harga rumput laut sangat dipengaruhi harga permintaan pasar negara tujuan ekspor. Perlu menjadi perhatian adalah memastikan kualitas rumput laut agar mampu bersaing dengan negara produsen rumput laut lainnya. Upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan kepada pembudidaya terkait perlunya memperhatikan kualitas rumput laut mulai dari proses *onfarm* yaitu menggunakan bibit berkualitas, penanganan pasca panen rumput laut (pengeringan sampai dengan pengemasan).

Nilai produksi perikanan tangkap mencapai target sebesar 144,24 % dan naik sebesar 12,46 % jika dibandingkan tahun 2022. Dalam kurun waktu 2018 - 2023 nilai produksi tangkap terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 13,68 %. Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap seiring dengan volume produksi yang terus meningkat. Tahun 2023 kontribusi peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dari komoditi unggulan perikanan tangkap yaitu Tuna Cakalang Tongkol yang nilai produksinya naik dengan peningkatan 2,90 % dan gurita naik 209 % dibandingkan tahun 2022.

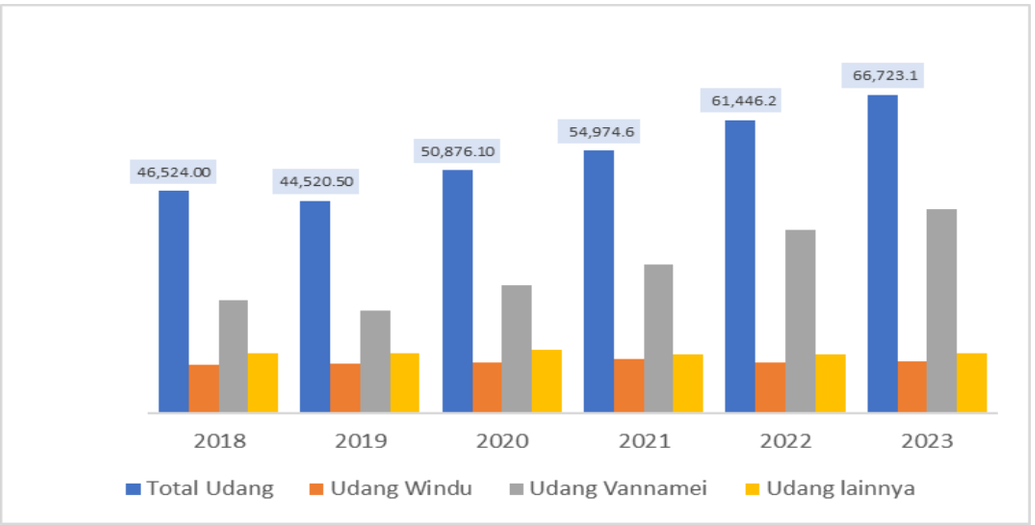
Tahun 2023 produksi rumput laut naik sebesar 1,62 % dibandingkan tahun 2022 dan mencapai 96,85 % dari target yang ditetapkan sebesar 3.983.548 ton basah. Selama kurun waktu 2018-2015 Produksi budidaya rumput laut terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 3,91 %. Berdasarkan tabel produksi rumput laut per kabupaten/kota tabel 18, kabupaten yang mengalami penurunan produksi yaitu Kabupaten selayar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep dan Kota Palopo. Informasi yang diperoleh produksi rumput laut kurang berkembang dan mati disebabkan salahsatunya kondisi perairan karena suhu permukaan laut yang tinggi akibat *el nino*.

Grafik II.69.
Produksi dan Nilai Produksi Rumput Laut



namun sebaliknya produksi udang windu turun 16,04 % di tahun 2022. Peningkatan udang vannamae disumbang oleh budidaya udang intensif dan animo masyarakat yang lebih memilih membudidayakan udang *vannamae* karena dikenal lebih tahan penyakit. Budidaya udang windu di dominasi budidaya tradisional atau tanpa perlakuan. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dilaksanakan Pengembangan udang windu melalui kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Udang Windu Berbasis Kawasan, tahun 2023 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena program tersebut akan di evaluasi.

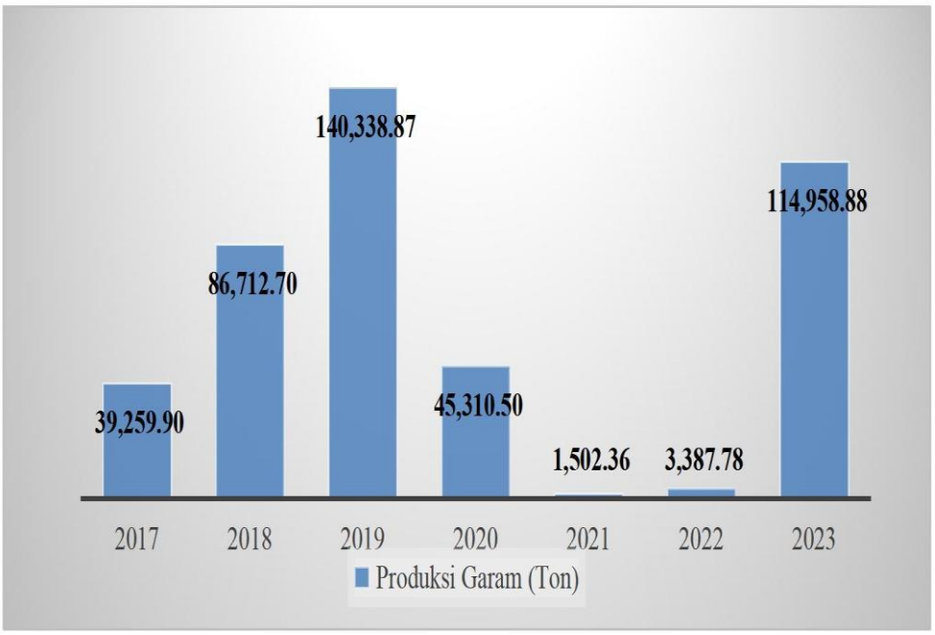
Grafik II.70.
Produksi Udang 2019-2023



Produksi garam mencapai target sebesar 230,39 % dan naik 3.194,86 % diandingkan tahun 2022 kurun waktu 2018-2023 produksi garam rakyat sangat fluktuatif dimana produksi tertinggi di tahun 2019 sebesar 140.338,87 ton dan terendah di tahun 2021 yaitu 1.502,36 ton. Hal ini disebabkan karena produksi garam rakyat sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Tahun 2023 peningkatan produksi garam didukung faktor cuaca yaitu musim kemarau yang cukup panjang di tahun 2023 dimulai bulan maret dan puncak produksi dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi produksi garam yaitu geomembran untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam Rapat koordinasi percepatan pengembangan garam bersama kemenomarves sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022

tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, pembinaan KUGAR terkait upaya peningkatan produksi garam di kabupaten dalam mendukung stok garam nasional . Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah Tahun 2020-2024 yang sedang tahap proses penetapan pergub sebagai tindak lanjut Perpres 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Melalui APBN dilaksanakan penyusunan DED SEGAR (Sentra Ekonomi Garam).

Grafik II.71.
Produksi Garam



Realisasi persentase pelabuhan perikanan memenuhi standar operasional sebesar 89,47 % meningkat dibandingkan tahun 2022 terealisasi 68,42 %. Persentase pelabuhan perikanan sesuai standar operasional jika memenuhi minimal 3 standar operasional yaitu telah operasional, penetapan kelas oleh kementerian, memiliki kelembagaan, memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran, menyusun wkopp dan menerapkan CPIB. Dari total 19 pebuhan perikanan, yang memenuhi standar opersional sebanyak 17 pelabuhan.

Tabel II.110.
Daftar Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional Tahun 2023

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	KABUPATEN/KOTA	PELABUHAN PERIKANAN MEMENUHI STANDAR OPERASIONAL *SESUAI IKK LPPD PERMENDAGRI 28 TAHUN 2020*					
			Telah operasional	Penetepan kelas oleh MKP	Memiliki Kelembagaan	Memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran	Menyusun WKOPP	Menerapkan CPIB
	PELABUHAN WILAYAH II							
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	√	√	√	√	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	√	X	√	X	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Benteng Somba Opu	Kab. Gowa	√	X	√	√	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	√	√	√	√	X	X
	PELABUHAN WILAYAH I							
1	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	X	X	√	X	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	√	X	√	√	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Pare-pare	√	X	√	√	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	√	X	√	√	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	√	X	√	√	X	X
10	Pelabuhan Perikanan Lero	Kab. Pinrang	√	X	√	√	X	X

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.111.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai produksi perikanan tangkap	Rp Trilyun	8,63	8,52	10,68	11,81	13,28
Produksi perikanan tangkap	Ton	398.565,30	389.100,00	417.410,70	436.735,70	492.159,50
Nilai Produksi perikanan budidaya	Rp Trilyun	14,86	13,79	15,88	21,70	18,16
Produksi perikanan budidaya	Ton	3.662.761,40	3.713.111,80	4.081.480,50	4.095.934,70	4.128.072,60
Produksi garam rakyat	Ton	140.338,87	45.310,5	5.842,35	6.507,17	114.959,90
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan	%	6,52	8,70	28,28	49,49	35.48
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan	Klp	55	21	60	86	72
Jumlah Kelompok nelayan	Klp	314	314	314	314	314
Cakupan Bina kelompok nelayan	%	17,52	6,69	18,47	27,39	22.93
Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	174.620	50.174,24	77.770,07	128.535,41	106,257.24
Jumlah Produksi ikan di daerah	Ton	436.551	389.208.20	429.431,20	436.749.6	492,159.50
Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	40	12,89	18,11	29,43	21.59
Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	%	67,28	67,29	67,29	100,19	68,11
Persentase Pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana sesuai standar operasional	%	15,79	47,37	63,16	68,42	89.47
Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	90	100,65	96,9	78,51	112.58
Persentase Kepatuhan pelaku usaha kp terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	50,13	63,07	69,18	95,15	56.35
Nilai Hilirisasi produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp Milyar	293,1	272,2	280,3	355,05	502,6
Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	5.332,1	5.235,6	5.497,4	5.911,6	7.235,83
Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	%	20,11	40	53,77	69,05	97.4

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2024

2.3.4 PENUNJANG URUSAN

2.3.4.1 SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi Sekretariat Daerah adalah: (1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; (2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; (4) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya..

Pada tahun 2023 kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari kinerja masing-masing Biro yang terjabarkan dalam data berikut:

Biro Organisasi telah memfasilitasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas fasilitasi tersebut, Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilihat melalui rata-rata hasil penilaian Inspektorat Daerah dan Kemenpan-RB tahun 2023 yang dilakukan oleh semua perangkat daerah provinsi sulawesi selatan yaitu 78,97 (BB).

Rata-rata indeks reformasi birokrasi perangkat daerah provinsi dari hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada pelaksanaan PMPRB secara self assessment oleh para Asesor dimasing-masing Perangkat Daerah mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Penilaian Reformasi Birokrasi terbagi menjadi dua fokus utama: Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) dan Reformasi Birokrasi General (RB General). Adapun Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 adalah 74,21 (BB), selain itu, Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 memperoleh Nilai A atau Predikat Sangat Tinggi dan capaiannya sebesar 100%

Adapun Segmen batas yang terselesaikan sejak tahun 2019 hingga 2023 yang menjadi urusan Biro Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel II.112.
Segmen Batas yang Terselesaikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No	Segmen	Pengesahan
1	Kab.Maros – Kota Makassar	Permendagri 40 Tahun 2019
2	Kota Makassar – Kab.Takalar	Permendagri 41 Tahun 2019
3	Kab.Gowa – Kab.Maros	Permendagri 42 Tahun 2019
4	Kab.Jeneponto – Kab.Takalar	Permendagri 77 Tahun 2019
5	Kota Pare-Pare – Kab.Sidrap	Permendagri 42 Tahun 2020
6	Kab.Pinrang – Kab. Sidrap	Permendagri 43 Tahun 2020
7	Kab.Enrekang – Kab. Sidrap	Permendagri 44 Tahun 2020
8	Kab.Wajo – Kab. Luwu	Permendagri 14 Tahun 2021
9	Kab.Bone – Kab. Sinjai	Permendagri 15 Tahun 2021

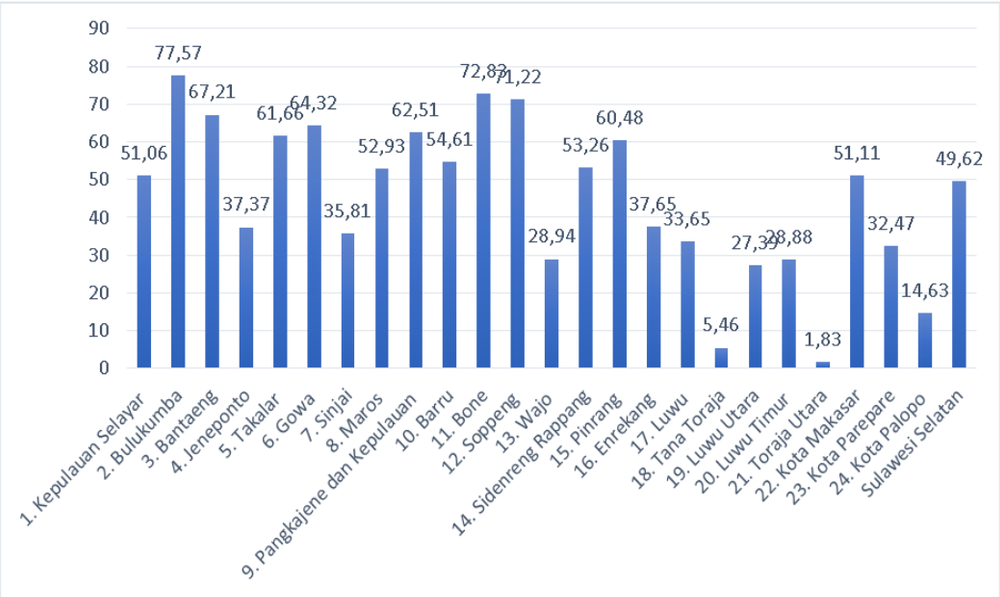
Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Prov.Sulsel, Tahun 2023

Untuk tahun 2023 tidak ada segmen batas yang terselesaikan tetapi telah dilakukan fasilitasi penyelesaian batas wilayah sebanyak 8 segmen yang dalam tahapan penyusunan Draft Permendagri, sehingga masih membutuhkan fasilitasi rapat pembahasan dengan tim PBD Pusat, PBD Provinsi, dan PBD Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan mencapai 100 persen, berupa pemberian subsidi transportasi dukungan pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan konektivitas transportasi udara di Wilayah Sulawesi Selatan, kebijakan Pemberian Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat (IPDN Kampus Gowa), Kebijakan Pemberian Hibah Uang Kepada Organisasi / Lembaga Pendidikan dan Lembaga Keagamaan, Kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Rumah Ibadah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kebijakan Fasilitasi Pelaksanaan Karantina Tahfids dengan 200 orang peserta. Tahun 2019 dan 2020 bantuan hibah yang diberikan hanya untuk sarana keagamaan, masing-masing sejumlah 130 bantuan hibah sarana keagamaan pada tahun 2019 dan sejumlah 24 bantuan hibah sarana keagamaan pada tahun 2020. Tahun 2021 bantuan hibah sebesar Rp. 8.545.000.000,- diberikan kepada sejumlah 32 lembaga keagamaan, Rp. 31.397.000.000,- diberikan kepada sejumlah 287 sarana keagamaan, serta Rp. 5.750.000.000,- diberikan kepada 12 lembaga pendidikan. Tahun 2022 dihasilkan 8 dokumen rumusan kebijakan dari 9 dokumen yang ditargetkan atau dengan capaian 88,89 persen. Sedangkan bantuan hibah sebesar Rp. 13.135.000.000,- diberikan kepada 34 lembaga keagamaan, Rp. 20.860.000.000,- diberikan kepada sejumlah 231 sarana keagamaan, serta Rp. 3.250.000.000,- diberikan kepada sejumlah 5 lembaga pendidikan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan hibah kepada sarana/lembaga keagamaan sebesar Rp.23.852.850.000 yang terdiri dari Bantuan Hibah Barang kepada IPDN Kampus Gowa senilai Rp.188.850.000,-, Bantuan Hibah Uang sebesar Rp.2.900.000.000 kepada 3 (tiga) lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, bantuan hibah uang sebesar Rp.12.964.000.000 kepada 90 sarana peribadatan, bantuan hibah uang sebesar Rp.4.000.000.000 kepada 8 lembaga keagamaan dan bantuan hibah uang sebesar Rp.3.800.000.000 kepada 4 lembaga pendidikan.

Tahun 2018 hingga 2023 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Qur’an mengalami tren peningkatan, hingga tahun 2023 persentase penduduk laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf arab mencapai 49,62%. Faktor Pendukung Peningkatan Persentase usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al Quran, antara lain: a) Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan calon siswa tingkat SMP untuk menyetorkan sertifikat mengaji; b) Peningkatan sarana prasarana rumah ibadah (masjid) melalui bantuan hibah.

Grafik II.72.
Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Mempunyai Kemampuan Membaca Dan Menulis Huruf Arab



Capaian persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara tahun 2023 mencapai 100 persen melalui pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Jumlah peserta gerakan bela negara sejumlah 500 orang.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2023 dengan capaian 101.67 persen. Sejumlah 150 orang mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tahun 2023 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan peningkatan capaian adalah karena masifnya pendidikan politik baik yang dilakukan oleh parpol dan lembaga-lembaga pemerintah.

Peran aktif dari tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB serta dukungan dari seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan mendorong pencapaian target kinerja hingga tahun 2023 mencapai 100 persen. Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaa narkoba di tingkat kabupaten/kota mendorong pencapaian target kinerja 100 persen penurunan penyalahgunaan narkoba. Dukungan terkait kebijakan penyalaghunaan narkoba melalui penetapan PERDA tentang Penyalahgunaan Narkotika diperlukan untuk mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja program.

Dukungan dari tokoh-tokoh agama khususnya yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah menjadi faktor pendorong capaian target kinerja persentase wilayah sulsel berpotensi konflik agama yang ditangani mencapai 150 persen hingga tahun 2023. Tahun 2022 capaian kinerja penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat melampaui target kinerja dengan jumlah kasus tahun 2021 sebesar 21 kasus menurun menjadi 17 kasus pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong diantaranya; a) Optimalisasi peran forum kewasapadaan dini daerah maupun forum kewaspadaan dini masyarakat dalam deteksi dini potensi konflik yang ada,

b) Meningkatnya sinergitas forum-forum yang ada di masyarakat seperti FOKDM, FKUB, FPK dan forum keagamaan lainnya, c) Meningkatnya sosialisasi konflik di masyarakat. Kinerja FKUB dan instansi terkait sangat baik dalam mengatasi perselisihan-perselisihan antara maupun intra umat beragama sehigga tidak membesar menjadi konflik.

Kinerja instansi terkait yang tergabung dalam FORKOPIMDA, FKDD dan Forum lainnya sangat baik dalam meredam permasalahan-permasalahan kecil sehingga tidak membesar menjadi konflik sehingga capaian penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat mengalami peningkatan dan mencapai 100 persen pada tahun 2022.

Capaian indikator persentase perkara hukum yang difasilitasi pada Tahun 2023 mencapai 100 persen melalui pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM. Jumlah Perkara yang ditangani Biro Hukum pada tahun 2023 sejumlah 32 perkara yang terdiri atas 4 perkara PTUN dan 28 Perkara Perdata. seluruh perkara telah ditangani oleh Biro Hukum diantaranya:

a. Perkara perdata yang sementara proses PK tergugat sejumlah 5 perkara;
b. Perkara Perdata Sementara proses Kasasi penggugat sejumlah 6 perkara;
c. Perkara Perdata sementara proses banding tergugat sejumlah 2 perkara; dan
d. Perkara perdata sementara proses Pengadilan Negeri Makassar sejumlah 6 perkara.
e. Sedangkan sejumlah 9 perkara perdata telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
f. perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama 1 Perkara
g. Perkara Tata Usaha Negara sejumlah 3 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) .

Mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,32 persen capaian indikator rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan dicapai melalui penguatan ketersediaan pasokan di kabupaten/kota dengan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan pangan strategisnya. Bupati/Walikota dan Anggota TPID senantiasa memantau harga pangan agar stabilitas pangan kabupaten/kota terkendali. Untuk menjaga stabilitas pangan strategis maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat melaksanakan operasi pasar dan pasar murah yang bekerjasama dengan Bulog, distributor dan agen dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada Hari Besar Keagamaan. Perlunya pengawasan dilaksanakan oleh TPID Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satgas Pangan, sehingga tidak terjadi penimbunan komoditas pangan yang dapat menyebabkan inflasi. Mendorong digitalisasi Sistem Informasi Harga Pangan yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Bersama dengan FORKOPIMDA melakukan pengawasan terhadap penyaluran, Ketersediaan, Stabilitas Harga dan Ketersediaan BBM dan gas Elpigi 3 kg baik di Sulawesi Selatan. Bupati/Walikota bekerjasama dengan ulama/pemuka agama agar masyarakat tidak melakukan konsumsi yang berlebihan selama Natal dan Tahun Baru. Bupati/Walikota melakukan MOU dengan Bulog terkait penjualan beras bagi ASN agar dapat mendorong penyerapan gabah di kabupaten/kota.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah yang menjadi tonggak capaian lima tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan target pembangunan. Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah sebesar 98 persen selama 3 tahun terakhir melalui pelaksanaan program Ranperda Perubahan Penyertaan Modal Pemda, Ranperda Perubahan Bentuk Perusda Agribisnis ke Perseroda, Ranperda Pendirian PI, Pergub tentang Optimalisasi Manajemen RS dengan sistem BLUD. Tersedianya dokumen pendukung kebijakan Bidang Perekonomian, dokumen pendukung kebijakan Bidang Pelayanan Dasar, dokumen pendukung kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar, meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah, meningkatnya capaian kinerja Program Perangkat Daerah, serta terpenuhinya Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (temuan bahan material).

Capaian target persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah pada tahun 2021 sebesar 99,94 persen belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor penghambat pencapaian target antara lain kurangnya ketelitian admin SiRUP dalam melakukan penginputan kegiatan yang akan dilelang/dipihakketigakan. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya capaian persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pada tahun 2022 mencapai 100 persen dimana pengadaan berdasarkan RUP yang diusulkan masing-masing OPD sudah berproses melalui UKPBJ sehingga capaianpengadaan barang/jasa mencapai target yang ditetapkan. Jumlah paket pengadaan di SIRUP sebesar 12.133 paket yang terdiri dari 243 paket proses tender/seleksi, 9.033 paket pengadaan langsung, 94 paket penunjukan langsung, 2.685 paket ePurchasing, dan 78 paket dikecualikan.

Tahun 2021 capaian persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa belum mencapai target dengan capaian 99 persen disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya: a) masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian masalah, b) prasarana dan sarana yang belum memadai, c) keterbatasan petugas pelayanan. Mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa sebesar 98,66 persen. Dalam penilaian survey kepuasan pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa tahun 2022 dimana persentase survey kepuasan layanan mencapai nilai rata-rata 98,66 persen diperoleh pada pengisian survey layanan. Berdasarkan nilai yang dicapai, maka dalam hal pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai persentase kepuasan layanan yaitu adanya pertambahan pengguna layanan sedangkan sarana dan prasara kurang memadai. Tahun 2022 capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan nilai 72,40 dengan kategori BAIK, mengalami peningkatan nilai indeks dari tahun 2021 dengan nilai 71,55 dengan kategori BAIK.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan sekretariat daerah tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.113.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100
Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	%	Belum dilakukan pengukuran	90,59	80	88,89	88,89
Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran	%	36,67	35,14	39,22	45,94	49,62
Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan	%	17 (371 kasus)	20 (305 kasus)	34,17 (208 kasus)	4,43 (302 kasus)	
Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	Angka	2,4	2,4	3,9	4	4
Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	65	70	75	79,32	
Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	%	97	98	98	98	
Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99,94	100	
Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99	98,66	

Sumber: OPD Lingkup Sekretariat Daerah, Tahun 2023

2.3.4.2 SEKRETARIAT DEWAN

Salah satu tugas DPRD adalah pembahasan rancangan PERDA sebelum ditetapkan. Secara umum Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan sekretariat dewan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.114.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PROLEGDA yang terealisir	%	81,25	37,5	75	73,33	80
Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	85
Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	%	100	100	75	100	75

Sumber : LkjIP Sekretariat Dewan Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2023

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa persentase PROLEGDA yang terealisir pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 80 persen disbanding Tahun 2022 yang hanya sebesar 73,33 Persen. Meskipun mengalami peningkatan tetapi belum mencapai 100 persen rencana Prolegda 2023, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ketidaksiapan OPD pemrakarsa Ranperda dalam menyiapkan dokumen Naskah Akademik dan Draft Ranperda sebagai kelengkapan dalam pengajuan Ranperda serta Ranperda yang diajukan tidak tepat.

Selanjutnya pada indikator persentase jumlah program kerja DPRD terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 85% dari kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, Pergantian kepemimpinan dan perubahan dalam prioritas kebijakan daerah mempengaruhi keselarasan antara program kerja DPRD dan program RPJMD serta RKPD. Ketika prioritas berubah, beberapa program yang sebelumnya terintegrasi mungkin tidak lagi relevan atau perlu disesuaikan, selanjutnya DPRD juga melakukan peninjauan kembali dan menyesuaikan program kerja mereka untuk lebih sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan feedback dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Penyesuaian ini menyebabkan beberapa program tidak terintegrasi sepenuhnya dalam jangka pendek.

Capaian kinerja persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya Tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung fultuatif, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan capaian 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya pergantian kepemimpinan daerah di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan adanya penyesuaian administrasi dan kebijakan, serta rotasi atau pergantian anggota DPRD yang baru tanpa transisi yang memadai menyebabkan kehilangan kontinuitas dan pengetahuan institusional yang penting untuk memastikan integrasi yang baik dengan program-program legislasi daerah.

2.3.4.3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tabel II.115.
Capaian Kinerja Program Urusan Perencanaan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD	%	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan capaian kinerja program	%	5,54	-8,49	3,68	0,5	0,5
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang PPM	%	100	100	100	80	100
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA	%	100	100	100	90	95
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	99	90	95

Sumber : BAPPELITBANGDA

2.3.4.4 KEUANGAN

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Persetujuan bersama Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni disetujui bersama pada tanggal 30 Desember 2022. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan, kordinasi dan sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Ranperda APBD dapat disetujui bersama tepat waktu yakni 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota. Berdasarkan capaian tahun 2023 ini terlihat bahwa 24 kabupaten/kota telah menyampaikan Ranperda dan

Ranperkada APBD tepat waktu hal ini di dorong dengan komitmen yang tinggi dari kabupaten/kota untuk dapat menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan capaian tahun 2022 sejumlah 24 kabupaten/kota telah menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban APBD tepat waktu hal ini di dorong dengan komitmen yang tinggi dari kabupaten/kota untuk dapat menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan data realisasi belanja daerah hingga akhir tahun 2023 dari alokasi belanja daerah sebesar Rp. 10.156.734.331.527,00, telah terealisasi sebesar Rp. 9.529.048.625.670,16 atau capaian sebesar 93,82 persen. Dari capaian tersebut terlihat bahwa Persentase Serapan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik dan di harapkan mampu mencapai target setelah Realisasi Belanja APBD Audited, Kemampuan daerah untuk menyerap belanja sesuai target sangat di tentukan oleh pencapaian target pendapatan. Realisasi Belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan yang signifikan hingga awal Desember pada akhir tahun anggaran 2023. Persentase serapan belanja daerah tahun anggaran 2023 akan terus naik dengan pengimputan realisasi pada tiap-tiap OPD perangkat Daerah terkhusus pada pengimputan realisasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan baik di Lembaga Pendidikan maupun Bantuan Operasional Sekolah sehingga Persentase serapan belanja daerah dapat mencapai target 95 persen. Pencapaian realisasi anggaran ini tidak lepas dari komitmen pimpinan terkait kinerja pendapatan dan percepatan serapan anggaran disetiap OPD yang terkait dengan priorotas dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan capaian tahun 2023 Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat waktu. Hal ini dapat di capai dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Penyampaian

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat disampaiakan tepat waktu yakni 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Manajemen Aset daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan area intervensi yang mengelola dan menentukan rentang dan tingkat aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis dan target kinerja pengelolaan barang milik daerah yang ingin dicapai. Dilihat dari data manajemen aset daerah badan keuangan dan aset daerah pada area intervensi yang terbagi dari beberapa indikator antara lain data base aset, pengelolaan aset, sertifikasi aset dan penertiban aset yang mencapai 91,53 persen yang telah mencapai target yang telah di tentukan. Pencapaian ini tidak lepas dari proses pengelolaan, inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah serta peran dari tiap-tiap perangkat daerah yang aktif dalam mendukung kegiatan rekonsiliasi aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait dengan bidang tanah yang bersertifikat, Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan permohonan penerbitan Sertifikat tanah kepada 24 Kepala Kantor Pertananahan Kabupaten/Kota, progres persertifikatan tanah pemerintah provinsi Sulawesi selatan berjumlah 916 bidang tanah dengan rincian 742 bidang tanah yang telah bersetifikat dan 174 bidang tanah yang belum bersertifikat. Persentase Tanah Pememerintah Provinsi yang Telah bersertifikat yang di targetkan dalam dokumen perencanaan telah mencapai target dengan capaian 81,04 % Dari capaian kinerja yang telah dihasilkan. Ada beberapa faktor yang mendorong pencapaian tersebut antara lain dukungan dari Korsupgah KPK melalui Rencana Aksi Program Penertiban Aset Daerah, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) atas penanganan hukum secara litigasi/non litigasi terhadap penyelesaian aset bermasalah serta Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang Pertanahan yang memperlancar proses inventarisasi dan pengamanan dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh BKAD dan pengelola barang di seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel juga turut andil dalam membantu menghimpun dan menertibkan administrasi pengelolaan barang dan aset daerah yang dimiliki dengan memanfaatkan sistem informasi. Meskipun demikian masih ada juga beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam pengelolaan aset ini yakni terkait masih adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan tersebut, demikian juga beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertifikatkan selain atas nama Pemerintah Provinsi.

Capaian untuk indikator opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 menunjukkan capaian yang yang sesuai target yang diharapkan yaitu WTP setelah sebelumnya mendapat opini WDP pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material serta lancer dalam melakukan pengendalian intern yang memadai. Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 hingga 2023 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

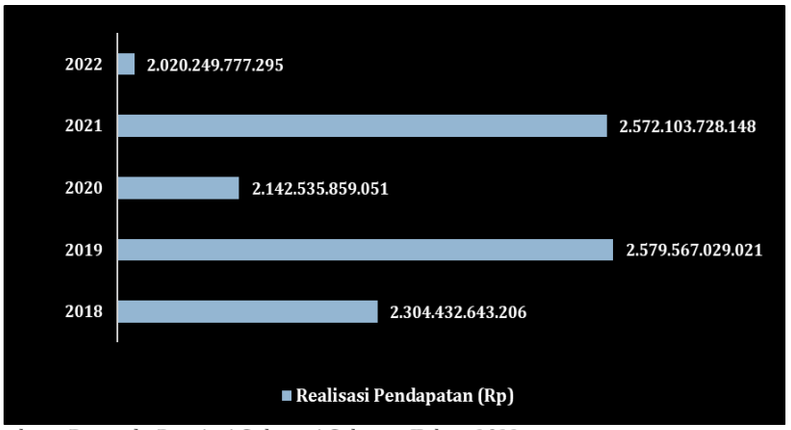
Tabel II.116.
Opini BPK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	%	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI, 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian Pendapatan Daerah dibandingkan dengan komponen pendapatan transfer dan komponen lain lain Pendapatan Daerah yang sah, hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. AD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setelah merebaknya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan PAD pada tahun 2020, pengelolaan PAD pada tahun 2021 berhasil meningkat kembali sebagai dampak titik balik mulai pulihnya perekonomian negara dan daerah. Hal ini tergambar dari persentase peningkatan PAD tahun 2021 dari target sebesar 5 persen, dapat dicapai sebesar 14,88 persen. Realisasi penerimaan PAD tahun 2021 juga telah melampaui realisasi PAD pada masa sebelum pandemi di 2019. Capaian persentase peningkatan PAD tersebut ditunjang oleh pertumbuhan pembayaran pajak yang merupakan hasil upaya digitalisasi pembayaran pajak secara non tunai diantaranya melalui QRIS yang sejalan dengan kebutuhan wajib pajak di masa pandemi. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah juga ditunjang kenaikan harga nikel serta membaiknya mobilitas masyarakat yang berdampak pada naiknya konsumsi BBM. Selain pajak daerah, pertumbuhan PAD yang tinggi pada tahun 2021 juga didukung meningkatnya penerimaan sektor Lain-Lain PAD yang Sah berupa pembayaran klaim pada unit-unit Rumah Sakit Daerah yang berstatus BLUD serta hasil upaya optimalisasi melalui pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi PAD melalui mekanisme sewa Barang Milik Daerah. Tahun 2023 persentase PAD terhadap Pendapatan mengalami peningkatan sebesar 6,53 persen dari tahun 2022 atau dengan capaian sebesar 54,1 persen. Secara Umum Capaian Pendapatan yang dikelola masing masing UPT Pendapatan telah mencapai target sesuai yang diharapkan dengan capaian 90,13 persen pada periode Desember tahun 2022 dengan total realisasi pendapatan pada UPT pendapatan kabupaten/kota sebesar Rp. 2.020.249.777.298,-.

Grafik II.73.
Realisasi Pendapatan pada UPT Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 3,11 poin dari capaian tahun 2020. Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terdapat 4 komponen penyusun pendatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat komponen tersebut, factor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah komponen pajak daerah yang mengalami peningkatan 14,88 persen dan komponen retribusi daerah dengan peningkatan sebesar 14,39 persen.

Tabel II.117.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	43,23	41,54	44,65	54,1	54,40

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp. 5,18 Trilyun atau sebesar 90,13 persen dari target sebesar Rp. 5,75 Trilyun. Meski tidak mencapai 100 persen, namun dibandingkan tahun 2022 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp. 317,94 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,53 persen. Pajak Daerah berkontribusi sebesar 88,5 persen atas peningkatan PAD tahun 2022 dengan peningkatan terbesar bersumber dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kegiatan Masyarakat berupa angka, yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Untuk mendapatkan nilai IKM, yakni dengan membagi antara total dari nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, lalu hasilnya dikalikan nilai penimbang. Nilai IKM atas pelayanan pajak kendaraan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023 dengan capaian 83,62 persen pada tahun 2023.

Tabel II.118.
IKM Pelayanan Pajak Kendaraan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
IKM Pelayanan Pajak Kendaraan	%	77,1	76,63	79,26	79,98	83,62

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu di bidang pendapatan PAD tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen disebabkan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja telah dianalisis, disusun dan disahkan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan laporan dapat direviu oleh atasan dan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan keuangan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.119.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Keuangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota dalam menyampaiakan Ranperda dan Ranperkada APBD untuk dievaluasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Serapan Belanja Daerah	%	95,58	88,87	94,5	93,69	97,41
Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	91,53	91,53	105,03
Persentase Tanah Pemprov yang sudah bersertifikat	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	56,22	81,62	114,53
Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD						
Persentasi Peningkatan PAD	%	4,82	-6	14,06	9,58	6,53

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.4.5 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren fluktuatif dimana capaian tahun 2023 sebesar 63 persen belum mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pemenuhan Kebutuhan ASN dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui jalur CASN yaitu CPNS dan PPPK baik PPPK jabatan fungsional guru maupun PPPK jabatan fungsional lainnya. Pada tahun 2021, telah dibuka sekitar 349 formasi jalur CPNS, 63 Formasi jalur PPPK Jabatan Fungsional dan 8.350 formasi untuk jalur PPPK Jabatan Fungsional Guru. Tahun 2022 telah dibuka sekitar 10.463 Formasi jalur PPPK, 49 Formasi jalur PPPK Jabatan Teknis, 10,385 formasi untuk jalur PPPK Jabatan Fungsional Guru dan 29 formasi untuk jalur PPPK tenaga kesehatan. Tahun 2024 usulan Formasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kebutuhan CASN/ P3K, Alhamdulillah dipenuhi 100% oleh Kemenpan RI dengan Jumlah Formasi P3K sebesar 12.425 yang terdiri dari 12.419 formasi untuk P3K dan 6 Formasi untuk CASN berdasarkan Surat Nomor B/1005/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2023 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan formasi ini berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja, Jumlah ASN yang akan pensiun, Anjab dan ABK, serta prioritas pembangunan/potensi daerah. Adanya komitmen pimpinan dan staf, budaya organisasi serta peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengadaan CPNS maupun PPPK dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Data yang ada hingga Desember adalah tenaga pendidikan sebanyak 11.105 orang, tenaga kesehatan sebanyak 1.975 orang dan tenaga fungsional lainnya sebanyak 2.322 sedangkan untuk tenaga pelaksana sebanyak 4.586 orang dengan total keseluruhan 19.988 orang non eselon.

Persentase ASN yang menduduki jabatan Strukutural dan Fungsional Berbasis Talenta Tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 90 persen meningkat sebesar 7,45 persen dari tahun 2021 melalui pelaksanaan Assestment terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Madya, Muda dan Pertama. Persentase ASN yang menduduki jabatan Strukutural dan Fungsional Berbasis Talenta tahun 2021 sebesar 83,76 persen meningkat sebesar 1,76 poin dari tahun 2020 sebesar 82 persen melalui pelaksanaan Assestment terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Madya, Muda Dan Pertama. Pelaksanaan Assement ini dilaksanakan terhadap Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang potensial dalam Pengisian Talent Pool dan Talent management telah di laksanakan sejak tahun 2020 guna mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Dimana ASN sebagai tokoh utama dalam

menjalankan tugas pemerintahan wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pada tahun yang akan datang.

Dengan berlakuknya Permenpan No.8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS diperlukan dukungan perangkat daerah untuk menyelesaikan penilaian pada masing-masing indikator penilaian yang terdapat pada aplikasi e-kinerja. Persentase ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik tahun 2023 sebesar 93 persen secara persentasi di tahun 2023 masih sebesar 93 persen dikarenakan penilaian kinerja juga semakin kompleks.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan kepegawaian tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada atabel berikut :

Tabel II.120.
Persentase ASN yang menduduki jabatan Strukutural dan Fungsional

Indikator	Satuan	Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	%	Belum diukur	57	56	63	63	63
Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis talenta	%	Belum diukur	80	82	83,76	90	90
Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	Belum diukur	88	90	90,83	93	93

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2023

2.3.4.6 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi adalah mengukur capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan kesuluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi antar Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penunjang Inovasi di Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresisasi setiap langkah segenap unsur dalam berinovasi. Adapun capaian persentase Perangkat Daerah yang mendapat penghargaan inovasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.121.
Capaian Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	%	11,32	5,67	11,32	11,32	18,75

Sumber : BAPPELITBANGDA

2.3.4.7 PENGAWASAN

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 76,29 persen melampaui jumlah target tahun 2022 sebesar 75.4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komitmen inspektorat dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan regulasi dan peran komitmen pimpinan. Akan tetapi pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 75,94 %. Sehingga diharapkan tindaklanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP dilakukan dengan menyusun kegiatan monitoring ataupun koordinasi tindaklanjut sebagai upaya koordinasi intensif pengelolaan tindaklanjut dengan seluruh perangkat kerja.

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota mengalami tren fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023 dengan capaian sebesar 73,51 persen mengalami penurunan sebesar 3,56 poin dari tahun 2022 yang mencapai 69,55 persen serta belum mencapai target yang ditetapkan. Belum tercapainya target persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Umum dan teknis kabupaten/kota disebabkan beberapa LHP atas Pemeriksaan Reguler kabupaten/kota terbit diakhir tahun sehingga belum dapat tertindaklanjuti sampai dengan tanggal 31 Desember.

Capaian persentase OPD yang Nilai SAKIPnya meningkat tahun 2019 hingga 2022 mencapai 100 persen. Sementara itu untuk persentase perangkat daerah yag dievalusai dengan kategorui implementasi SAKIP minimal “BB” untuk tahun 2023 baru mencapai 50 %. Inspektorat melakukan penilaian SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah. Hasil evaluasi capaian nilai SAKIP merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam memenuhi ketersediaan dokumen dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

Kebijakan Pengawasan Pemerintah telah disusun menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah dan telah disahkan oleh kepala daerah menjadi peraturan gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh inspektur menyusun tim Pengawasan Prioritas Daerah. Peran penting komitmen pimpinan dalam melaksanakan kebijakan terkait pengawasan menjadi salah faktor terlaksanannya tugas-tugas dibidang pengawasan Kebijakan. Pengawasan Pemerintah telah disusun menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah dan telah disahkan oleh kepala daerah menjadi peraturan gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh inspektur menyusun tim Pengawasan Prioritas Daerah.

Pada tahun 2022 jumlah pengaduan yang berasal dari beberapa perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan telah ditindaklanjuti 100 persen dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Pengaduan ini dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi yang secara umum dalam bentuk pemeriksaan terhadap indisipliner, penyalahgunaan wewenang jabatan, pelanggaran kode etik dan gratifikasi kepada perangkat daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengoptimalkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Consulting dan sosialisasi yang intens. Tahun 2023 Inspektorat Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti seluruh Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap OPD baik

secara langsung ataupun dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Go Clean yang memudahkan masyarakat memantau hasil laporan pengaduan masyarakat.

Presentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 sejumlah 8 pengaduan yang telah ditindaklanjuti 100 persen yang keluarannya dalam bentuk 8 laporan hasil pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pada tahun 2021 meliputi indisipliner, perceraian, pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengoptimalkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Consulting dan sosialisasi yang intens. Tahun 2022 Inspektorat Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti seluruh Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti baik secara langsung ataupun dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Go Clean yang memudahkan masyarakat memantau hasil laporan pengaduan masyarakat. Dan untuk tahun 2023 juga telah ditindaklajuti 100%.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan pengawasan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.122.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengawasan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2023	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	75,94	67,92	64,56	73,93	76,29
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	73,51	68,83	68,1	70,04	69,55
Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat menjadi “BB”	%	50	100	100	100	100
Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.8 PENGELOLAAN PENGHUBUNG

Pada tahun 2021 capaian persentase pelayanan tamu daerah belum mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya: a) Belum optimalnya pembangunan gedung Kantor, Mess dan Anjungan TMII di Jakarta, b) Keterbatasan unit mobil dinas dan jumlah kamar, c) Adanya pandemi

covid-19, d) Belum optimalnya kualitas dan Kompetensi ASN maupun tenaga magang. Tahun 2022 dan Tahun 2023 persentase pelayanan tamu daerah mencapai 83 persen dan 85 persen berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kuisioner terhadap tamu Badan Penghubung Daerah.

Kurangnya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata daerah, belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait, masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi, dukungan stakeholder dalam Kebudayaan daerah belum optimal, TMII tutup selama masa PPKM, pandemic covid-19, serta masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penghambat pencapaian target kinerja persentase peningkatan promosi dan kerjasama daerah pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2023 tidak ada capaian peningkatan promosi dan kerjasama daerah disebabkan tidak adanya penangungjawab dari kegiatan dimaksud.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan penghubung tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.123.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengelolaan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pelayanan tamu daerah	%	50	13	20	83	85
Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	%	50	0	0	0	0

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.3.4.9 PEMERINTAHAN UMUM

Capaian persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara tahun 2023 mencapai 100 persen melalui pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Jumlah peserta gerakan bela negara sejumlah 500 orang.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2023 dengan capaian 101.67 persen. Sejumlah 150 orang mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tahun 2023 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan peningkatan capaian adalah karena masifnya pendidikan politik baik yang dilakukan oleh parpol dan lembaga-lembaga pemerintah.

Peran aktif dari tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB serta dukungan dari seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan mendorong pencapaian target kinerja hingga tahun 2023 mencapai 100 persen. Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaa narkoba di tingkat kabupaten/kota mendorong pencapaian target kinerja 100 persen penurunan penyalahgunaan narkoba. Dukungan terkait kebijakan penyalaghunaan narkoba melalui penetapan PERDA tentang Penyalahgunaan Narkotika diperlukan untuk mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja program.

Dukungan dari tokoh-tokoh agama khususnya yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah menjadi faktor pendorong capaian target kinerja persentase wilayah sulsel berpotensi konflik agama yang ditangani mencapai 150 persen hingga tahun 2023. Tahun 2022 capaian kinerja penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat melampaui target kinerja dengan jumlah kasus tahun 2021 sebesar 21 kasus menurun menjadi 17 kasus pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong diantaranya; a) Optimalisasi peran forum kewasapadaan dini daerah maupun forum kewaspadaan dini masyarakat dalam deteksi dini potensi konflik yang ada, b) Meningkatnya sinergitas forum-forum yang ada di masyarakat seperti FOKDM, FKUB, FPK dan forum keagamaan lainnya, c) Meningkatnya sosialisasi konflik di masyarakat. Kinerja FKUB dan instansi terkait sangat baik dalam mengatasi perselisihan-perselisihan antara maupun intra umat beragama sehigga tidak membesar menjadi konflik.

Kinerja instansi terkait yang tergabung dalam FORKOPIMDA, FKDD dan Forum lainnya sangat baik dalam meredam permasalahan-permasalahan kecil sehingga tidak membesar menjadi konflik sehingga capaian penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat mengalami peningkatan dan mencapai 100 persen pada tahun 2022.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan pemerintahan umum tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.124.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	75	100	100
Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99,73	115,29	101.67
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100
Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100
Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100
Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	73,75	100	150

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

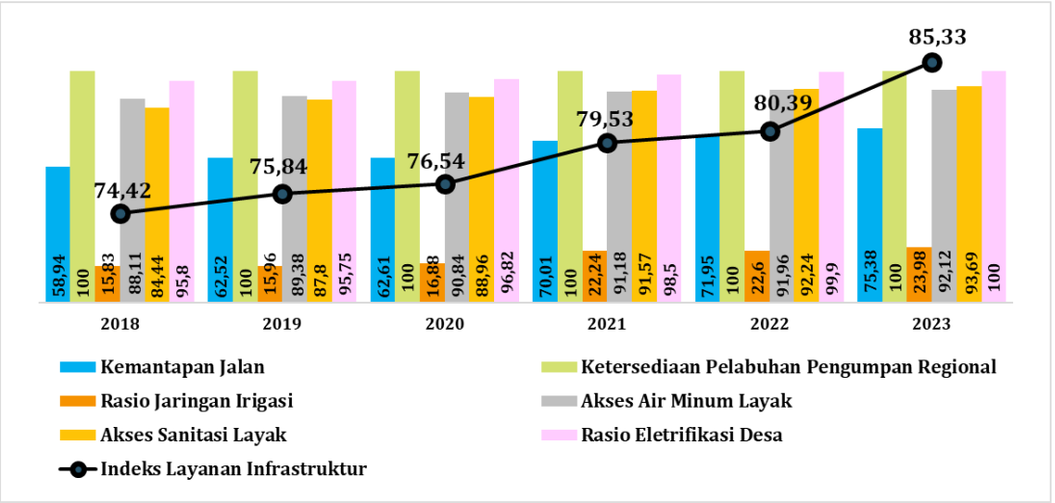
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR

Nilai Indeks Layanan Infrastruktur Sulawesi Selatan pada kurun waktu 6 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan nilai indeks dengan nilai indeks mencapai 85,33 poin pada tahun 2023. Peningkatan nilai indeks juga dipengaruhi dengan meningkatnya keseluruhan kompenen pembentuk indeks layanan

infrastruktur. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Layanan Infrastruktur antara lain: 1) Tersedia dan berfungsinya simpul transportasi berupa pelabuhan pengumpan regional dan terminal pada pusat kegiatan; 2) Meningkatnya kualitas dan layanan jaringan irigasi yang melayani lahan pertanian di Sulawesi Selatan yang diindikasikan dengan persentase luas lahan budidaya pertanian yang terlayani oleh jaringan irigasi mencapai 23,98 persen pada tahun 2023; 3) Meningkatnya kemantapan jalan provinsi yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kondisi jalan pada tahun 2023 yaitu jalan provinsi kondisi baik sepanjang 948.74 Km (47,1 persen) dan jalan provinsi kondisi sedang sepanjang 569,51 Km (28,27 persen); 4) Meningkatnya Akses Air Minum Layak mencapai 92,12 persen pada tahun 2023, 5) Meningkatnya Akses Sanitasi Layak mencapai 93,69 persen pada tahun 2023, serta 6) Rasio Elektrifikasi Desa mencapai 100 persen pada tahun 2023. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

Grafik II.74.
Indeks Layanan Infrastruktur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.4.2 PRODUKTIVITAS TOTAL DAERAH

Produktivitas total daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,55 persen. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja serta peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Data selebgkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.125.
Produktifitas Total Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja (Jiwa)	4.030.400	4.275.807	4.412.782	4.559.375	4.694.483
PDRB ADHK (Rp.Milyar)	330.506,38	328.154,57	343.402,51	360.874,18	377.162,17
Produktifitas Total Daerah (Rp.1000/Angkatan Kerja)	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92	80.341,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.4.3 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PERKAPITA

Capaian Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Peningkatan jumlah rumah tangga mempengaruhi peningkatan jumlah pengeluaran rumah tangga makanan dan bukan makanan dalam sebulan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.126.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Rumah Tangga	Rp	1.022.418	1.057.864	1.104.097	1.142.611	1.252.551
Jumlah Rumah Tangga	Ruta	2.032.175	2.074.699	2.094.308	2.113.231	2.264.530
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp/Ruta	0,503	0,509	0,527	0,541	0,553

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

2.4.4 PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PERKAPITA

Pengeluaran konsumsi non pangan menunjukkan persentase capaian yang berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022, dengan rata-rata persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita sebesar 51,37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non pangan sedikit lebih besar dibanding dengan pengeluaran konsumsi pangan. Pengeluaran terbesar dari Dari 6 komponen pengeluaran konsumsi non pangan berapa pada biaya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.127.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Kelompok Komoditas Non Pangan	Rp.	534.484	541.681	570.615	576.388	655.371
Total Pengeluaran	Rp.	1.022.418	1.057.864	1.104.097	1.142.611	1.252.551
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	%	52,27	51,21	51,68	50,44	52,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

2.4.5 NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai tukar petani ini merupakan

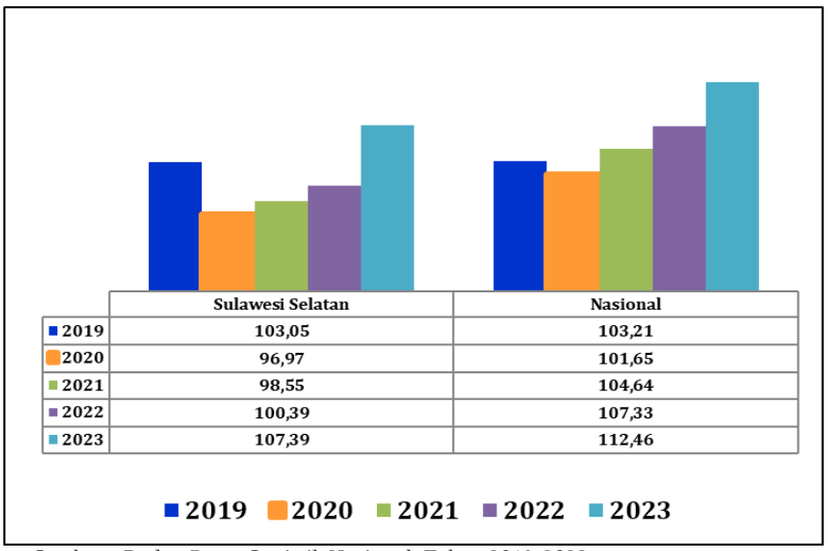
perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Nilai tukar juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel II.128.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani Sulawesi Selatan	Ribu Rp	103,05	96,97	98,55	100,39	107,39
Nilai Tukar Petani Nasional	Ribu Rp.	103,21	101,65	104,64	107,33	112,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Grafik II.75.
Perbandingan NTP Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemic covid 19, namun pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yang didukung oleh peningkatan nilai tukar petani seluruh sub sektor. Secara keseluruhan nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 masih dibawah capaian nilai tukar petani nasional.

Tabel II.129.
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Sub Sektor	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tanaman Pangan	95,31	95,96	94,16	91,77	100,56
Hortikultura	104,48	106,28	105,03	117,87	125,40
Tanaman Perkebunan	94,26	95,90	107,11	117,56	125,53
Peternakan	99,66	100,38	101,41	104,46	107,31

Sub Sektor	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan	105,61	97,54	104,19	109,70	-
Perikanan Tangkap	107,16	99,64	107,43	109,27	-
Perikanan Budidaya	106,33	96,06	101,90	110,00	-
Nelayan	-	-	-	-	111,50
Pembudidayaan Ikan	-	-	-	-	111,35
Nelayan dan Pembudidayaan Ikan	-	-	-	-	111,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

2.4.6 PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA

Capaian persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Namun pada tahun 2022 persentase desa berstatus swasembada mengalami penurunan sebesar -19,9 persen atau dengan capaian 113 desa swasembada dari sejumlah 3.051 total desa. Desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun capaian yang diperoleh telah mengalami peningkatan namun persentasenya masih sangat kecil jika dibanding jumlah keseluruhan desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini disebabkan karena pada umumnya desa berstatus swasembada baru dikemukan pada beberapa desa yang merupakan ibukota kecamatan. Data selengkapnya pada atbel berikut.

Tabel II.130.
Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa	Desa	Desa	3.051	3.051	3.051	3.051
Jumlah Desa Swasembada	Desa	Desa	81	100	141	113
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	%	2,65	3,28	4,62	3,70

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2024

2.4.7 RASIO EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PDRB (INDIKATOR KETERBUKAAN EKONOMI)

Nilai Ekspor Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,86 persen. Dari 16 komoditas ekspor Sulawesi Selatan, jenis komoditas yang memberikan kontribusi peningkatan nilai ekpor terbesar adalah komoditas Nikel dengan nilai 1.179,45 US$. Sedangkan nilai Impor Sulawesi Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 76,57 persen. Jenis komoditas Impor yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Bahan Bakar

Mineral sebesar 1.021 persen dari tahun 2021. Capaian rasio ekspor dan impor terhadap PDRB pada tahun 2022 mencapai 154,28 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.131.
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Ekspor	Juta US$	1.557	1.474	1.866	2.559	2.341
Nilai Impor	Juta US$	1.154	800	653	1.153	1.085
Net Eksport	Juta US$	403	674	1.213	1.406	1.256
Nilai PDRB di konversi, Milyar Rp. ke Juta US$	Juta US$	35,64	34,56	38,09	24,06*	22,98*
Rasio Ekspor + Import Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	Angka	76,07	65,80	68,13	154,28	149,09

**Asumsi = 1 US$ = Rp.15.000,-*
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.4.8. RASIO KETERGANTUNGAN

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator yang dapat berfungsi sebagai indikator demografi maupun indkator ekonomi. Sebagai indikator demografi, rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui beban ketergantungan penduduk yang belum atau tidak produktif terhadap penduduk usia produktif disuatu wilayah. Sedangkan sebagai indikator ekonomi, rasio ketergantungan untuk mengetahui suatu daerah dapat digolongkan dalam kategori maju atau masih tahap berkembang.

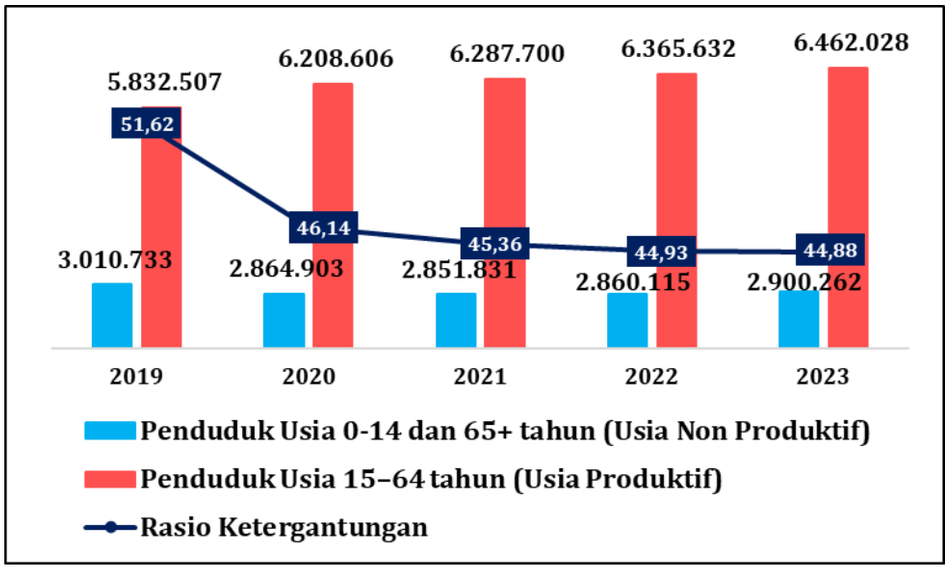
Tabel II.132.
Rasio Ketergantungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Capaian					
	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia 0 – 14 thn	Jiwa	2.457.016	2.213.433	2.226.095	2.208.567	2.229.262
Penduduk Usia 65+ thn	Jiwa	553.717	651.470	625.736	651.548	671.000
Jumlah penduduk Usia 0-14 dan 65+ thn	Jiwa	3.010.733	2.864.903	2.851.831	2.860.155	2.900.262
Penduduk Usia 15 – 64 thn (Usia Produktif)	Jiwa	5.832.507	6.208.606	6.287.700	6.365.632	6.462.028
Rasio Ketergantungan	Per 100 penduduk produktif	51,62	46,14	45,36	44,93	44,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Provinsi Sulawesi Selatan sedang memasuki bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022. Demikian pula beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif menggambarkan tren penurunan dari tahun ke tahun.

Grafik II.76.
Rasio Ketergantungan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.4.9. ANGKA KRIMINALITAS

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu. Data angka kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 10.951 kasus atau 41 persen dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Bantaeng sebesar 127 kasus atau 0,5 persen dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022. Capaian penyelesaian tindak pidana pada tahun 2022 sebesar 61,18 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,94 persen.

Tabel II.133.
Angka Kriminalitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kriminalitas	Kasus	16.730	15.158	15.210	26.684	25.533

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2024

2.5 CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

2.5.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2023

Indikator Kineja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 6 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator tujuan dan sasaran terdapat pada uraian aspek kesejahteraan masyarakat (subBab 2.2) dan aspek daya saing daerah (subBab 2.4).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka ditetapkan sejumlah 63 Program Prioritas untuk mendukung pencapaian IKU Gubernur Sulawesi Selatan.

Berikut matriks pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 berdasarkan target RPJMD Provinsi Sulawesi 2018-2023 yang ditetapkan. Uraian narasi atau penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator program prioritas terdapat pada uraian aspek pelayanan umum (sub Bab 2.3).

Tabel II.134.
Capaian IKU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1	**Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Huruf/ Angka**	**B**	**B (60,07)**	**B (61,18)**	**B (66,16)**	**BB (74,21)**	**A (81-90)**	**91,62**
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (65,06)	B (63,02)	B (65,01)	B (68,08)	B (68,78)	A (>89-90)	77,28
Sasaran 2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	B (4,00)	B (4,02)	A- (4,10)	A-(4,34)	A- (4,34)	A (4,51-5,0)	96,23
Tujuan 2	**Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah**	**Indeks Williamson**	**Angka**	**0,639**	**0,620**	**0,568**	**0,567**	**0,570**	**0,607**	**93,90**
Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	75,95	78,07	79,44	81,33	85,33	83,40	102,31
Tujuan 3	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**	**PDRB Per Kapita ADHB**	**Rp. Juta**	**57,18**	**55,68**	**59,65**	**65,59**	**69,70**	**65,98**	**105,64**
		Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**8,69**	**8,99**	**8,53**	**8,66**	**8,70**	**7,45**	**85,63**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(Maret)		
Sasaran 4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33	5,69	131,41
Sasaran 5	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Angka	0,389	0,382	0,377	0,365	0,377 (Maret)	0,380	100,79
Tujuan 4	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**	**IPM**	**Angka**	**71,66**	**71,93**	**72,24**	**72,82**	**74,60**	**73,05**	**102,12**
Sasaran 6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	64,64	65,29	65,76	66,34	66,88	67,05	99,75
Sasaran 7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	77,58	77,80	77,94	78,41	82,51	77,86	105,97
Sasaran 8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76,01	76,32	74,76	76,37	75,24	77,23	97,42
Sasaran 9	Meningkatnya aktualisas	Angka Kriminalitas	Angka	11.387	15.158	15.210	26.684	25.533	24.438	95,71

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat									
Tujuan 5	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**6,92**	**-0,70**	**4,65**	**5,09**	**4,51**	**5,04-6,52**	**89,48**
Sasaran 10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Rp/Angk. Kerja	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92	80.341,58	77.349,12	103,87
Tujuan 6	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**	**IKLH**	**Poin**	**75,12**	**71,75**	**73,23**	**74,17**	**74,30**	**72,84**	**102**
Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO2Eq	0,89	0,96	1,13	1,36	1,66	1,347	123,24

2.5.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan malakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2018-2022 atau capaian indikator kinerja daerah (IKD) sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.135.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,91	-0,71	4,64	5,09	4,51
2	Laju Inflasi	%	2,35	2,04	2,40	5,77	2,81
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Triliun Rp	57,18	55,68	59,66	65,59	69,70
4	Indeks Gini	Angka	0,391	0,382	0,377	0,365	0,377
5	Indeks Wiliamson	Indeks	0,639	0,620	0,568	0,567	0,570
6	Tingkat Kemiskinan	%	8,56	8,99	8,53	8,66	8,70
7	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	759,58	776,84	784,98	782,32	788,85
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	1,63	1,65	1,40	1,50	1,57
9	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	91,44	91,01	91,47	91,34	91,30
10	Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,11	1,13	1,13	1,17	1,22
11	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	6,34	6,50	6,45	6,00	6,12
12	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	3,88	3,94	4,07	4,05	4,12
13	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1,17	1,19	1,18	1,21	
14	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05
15	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	4,62	4,67	4,75	5,10	5,13
16	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	8,44	8,53	9,41	9,43	8,62
17	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,8	14,48	14,58	14,64	14.69
18	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	13,17	12,76	12,49	12,90	12.85

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
19	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	7,35	7,35	8,91	9,31	7,41
20	Pertumbuhan PDRB Industri	%	9,92	-4,57	3,02	9,86	4.26
	KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,66	71,93	72,24	72,82	74,60
2	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,43	70,57	70,66	70,97	71,22
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,26	8,38	8,46	8,63	8,76
4	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,36	13,45	13,52	13,53	13,54
5	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	11.118	11.079	11.184	11.430	11,840
6	Indeks Pendidikan	Angka	64,64	65,29	65,76	66,34	66,88
7	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas	Tahun	92,45	92,56	92,49	93,31	93.83
8	Indeks Kesehatan	Angka	77,58	77,80	77,94	78,41	78,80
9	Prevalensi Balita Stunting	%	30,6	Tidak ada Survey	27,4	27,2	27,4
10	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	%	62,9	63,4	64,73	66,18	63,60
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
12	Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	200.304	269.817	252.349	205.725	
13	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	95,03	93,69	94,28	95,49	
14	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	36,9	36,9	37,32	39,81	40,41
	SENI, BUDAYA, DAN OLAHRAGA						
1	Jumlah lembaga sanggar kesenian per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	471	468	468	468	468
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Per 10.000	1	1	1	1	1

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
		penduduk					
3	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	26	74	74	74	74
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
	Pendidikan						
1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	86,09	86,44	87,07	86,49	88,04
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	60,14	60,32	60,35	60,44	70,11
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun	%	70,85	70,89	71,21	70,81	71
4	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	0,71	1,35	1,02	3,62	0,41
5	Angka Kelulusan (AL)	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
6	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	97,2	92,07	93,82	95,34	99,25
7	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Angka	1:14	1:13	1:13	1:13	1:12
8	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	92,54	93,58	94,16	94,54	94,91
9	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	98,69	98,84	94,83	99,16	98,65
	Kesehatan						
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	919	791	844	1.117	1.438
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	991	843	892	1.176	1.474
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	714	623	681	954	1.274
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	5,69	5	5	8	10
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	6,2	5	6	8	11

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	5,86	4	4	7	9
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	94	86	129	119	133
8	Rasio Posyandu peratuan Balita	Angka per 1000 balita	11,95	12,64	16,6	14,42	14,71
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Angka per 1000 Penduduk	1,2	1,2	1,7	1,9	1,3
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	17	18	23	22	27
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	41	43	60	60	66
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	82	81,9	99,76	93,86	19,17 (terdapat perubahan DO, sebelumnya denominator

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
							20% dari sasaran bumil, juknis baru denominator seluruh total bumil
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	90,97	92,44	95,04	94,8	91,52
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96,15	73,82	83,51	94,3	95,7
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	99,6	91,8	98,3
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	98,50	63,3	102,9	99,6	112,5
17	NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	2,32	0,9	1,72	2,9	3,4
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	70,8	71,59	69,43	78,29	88,34
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	61	45	49	59,6	58
20	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	214	160	169	228	288
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	8	6	7,8	9,8	11

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	61	50	61	71	58
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	88	89	87	87	86
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
25	Penderita Diare yang ditangani	Orang	145.457	28.228	5.168	87.402	110.774
26	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0,11	0,09	0,11	0,19	0,20
27	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,019	0,02	0,026	0,26	0,27
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	89,96	88,63	98,4	98,57	100,18
30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	87,96	86,58	88,65	88,15	86,52
31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	90,35	91,91	91,33	91,1	88,72
32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	62,87	59,08	60,23	58,56	8,67 (terdapat perubahan DO, sebelumnya denominator 15% dari sasaran

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
							bayi resiko tinggi, juknis baru denominator seluruh sasaran bayi
33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	69,71	65,52	75,25	83,75	82,40
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	83,43	91,10	93,4	87,4	91
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100
36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
37	CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam	%	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	39,84	34,78	38,98	40	47,1
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0,00345	0,00341	0,00319	0,00319	0,00328
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	89,77	93,79	93,98	97,36	97,37
4	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	%	62,13	72,5	76	77,86	72,86
5	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	12,08	12,65	13,03	52,31	59,33

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	89,38	90,84	91,18	91,96	92,12
7	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman	%	Belum diukur	44,39	46,22	46,39	17,81
8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan	%	35,6	25,53	23,15	25,15	25,64
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	%	87,8	88,96	91,57	92,24	93,69
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman	%	4,7	4,74	3,97	12,92	12,83
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	70	75	80	86	
12	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	2,53	2,53	2,16	2,23	2,27
13	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	25	25	21,87	25	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,200	0,219	0,216	0,217	0,218
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,048	0,139	0,139	0,139	0,139
	Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000 penduduk	42,13	42,27	47,69	39,4	
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	99,59	
3	Persentase Penegakan PERDA	%	89,00	100	100	99,67	
	Sosial						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	57,11	77	88,22	95,95	78
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	57,02	77,3	90,71	94,6	96
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	88,29	87,98	78
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok	%	100	100	0	0	0

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya						
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	0	0	0	0
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	20,01	15,63	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	2,10	13,94	17,3	48,8	0
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	1000
	PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
	Tenaga Kerja						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	62,9	63,40	64,73	66,18	63,60
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	95,03	93,69	94,21	95,49	
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1,72	2,23	0	1,24	
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	33,33	57,33	60,98	30,6	
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	4,36	3,29	5,6	9,49	
6	Keselamatan dan perlindungan	%	100	59,99	30	48,73	
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	52,89	29,34	16,35	47,55	
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	5,38	13,50	12,35	60	
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	70,00	0	100	90	
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	98,75	80	81,25	85	
12	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	95,03	93,69	94,28	95,49	

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
13	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ketas	%	45,81	45,14	46,61	46,35	
14	Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	36,85	21,18	37,32	39,81	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,10	48,16	54,38	54,8	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	25,88	25,88	26,88	25,88	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	69	74	72	74	
4	Rasio KDRT	%	0,019	0,0065	0,07*	0,07*	
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,09	0,06	0,07*	0,07*	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,32	48,16	49	50	
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	21	35	22	23	
9	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	101,32	99,58	100,18	104*	
10	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat	%	100,79	97,24	102,03	106,72	
11	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat	%	106,11	102,46	97,03	112,2*	
12	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	105,20	99,58	121,83	108,2*	
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	100,60	100,38	97,13	100,9*	
	Pangan						
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	363,76	332,21	363,8	367,91	334,94
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	47,88	53,27	61,83	55,04	58,20
3	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	24,96	13,66	13,62	18,23	27,55
4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	3.879	3.168	3.484,4	3.593	

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	112,67	86,16	94,78	171,65	158,19
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	83,4	80,4	80,1	83,1	
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	78,69	81,81	80,92	81,83	
9	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	16,29	7,49	25,64	74,07	100
	Pertanahan						
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	92	57	88	33	32,48
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	43	67	50	66,67	50
3	Penyelesaian izin lokasi pertanahan	%	100	49	42	121	118
	Lingkungan Hidup						
1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Indeks Kualitas Air	%	81,47	54,00	56,82	57,79	57,95
7	Indeks Kualitas Udara	%	88,69	88,73	89,13	90,35	90,58
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	61,14	63,56	55,4	55,46	56,22

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
9	Indeks Kualitas Air Laut	%	Belum diukur	70,22	84,82	85,59	84,30
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,12	71,74	73,23	74,17	74,30
11	Laporan Inventarisasi GRK	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	2.914.632	3.500.000	589.007,56	4.934.631	
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	62,86	18,46	18,46	29,6	
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	17	12	16	18	
17	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	73,33	72,83	51,12	54,48	74,00
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	0,94	0,94	0,96	0,99	0,98
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	0,92	0,94	0,95	0,97	
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,29	0,32	0,36	0,39	
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Ada					
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	94,39	94,00	95,43	99,42	98,00
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	43,00	46,00	47,79	96,51	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	17,38	17,83	98,89	99,42	
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	23	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	43	45	95	96	98
4	Persentase LPM Berprestasi	%	24,33	24,33	0	0	
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Posyandu aktif	%	99,89	99,89	99,91	97,06	97,06
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,05	2,51	1,04	1,04*	1,15
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,45	2,45	2,29	2,22	
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak/keluarga	3	3	3	3	
4	Rasio Akseptor KB	%	63,05	71,07	71,07	71,7*	
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	71,74	71,86	71,66	61,2	
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	31	29,07	27,4	27,4	
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	46,99	35	22	22*	
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,7	13,05	20	26,1	
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,26	24,24	23,1	13	
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	17,32	17,24	18,4*	18,45*	

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	84,91	78,75	74,5*	72,5*	
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	72,31	70,54	70,21*	70*	
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	72,33	71,49	70,8*	70*	
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	23	23	23*	23*	
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	17,00	18,00	78,5	78,5*	
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,30	100,41	98,64*	98,64*	
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	74,39	76,07	76,98*	75,98*	
18	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,04	0,02	0,04*	0,04*	
19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	71,01	71,01*	65,4	
20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	75	44,21	75	75*	
21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	1,5	0,13	1,5	1,5*	
	Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Jiwa	14,749	7,143	8,514	14,005	14.925
2	Rasio ijin trayek		0,38	1,99	0,26	0,2	0,22
3	Persentase layanan angkutan darat	%	87	90	94	97	97
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS	Unit	89	89	127	127	132
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/Kendaraan	0,08	0,09	0,1	0,108	0,006
6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	10.771.413	11.067.590	11.531.427	12.702.2	16.232.

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
						31	937
	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	65,07	85,30	87,17	87,52	86,16
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	43,98	49,59	59,69	94,24	96,51
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	22,87	21,93	31,44	13,48	20,51
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase koperasi aktif	%	65,31	64,22	55,66	50	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,52	99,40	99,71	99,71	
	Penanaman Modal dan Investasi						
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun rupiah	10,21	12,54	16,6	14,25	
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	1,548	2.506	4.506	5.748	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ proyek	8	3	3,69	2,26	
4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	2,4	6,1	1,2	1,6	
	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	9,46	8,17	8,17	8,73	
2	Persentase wirausaha muda	%	18,30	13,80	17,24	31,3	
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	96	64	64	100	
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	22,38	24,57	24,68	28,16	
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	8,42	6,70	9,07	9,34	
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	246	0	84	119	
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	317	0	52	217	
	Statistik						

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persandian						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	7	5	0	10	
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	2	2	1	3	
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	5	3	11	2	
	Perpustakaan						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1.098.180	106.933	154.913	1.325.445	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Laki-Laki	Orang	487.600	52.037	69.376	669.359	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perempuan	Orang	610.580	54.896	85.537	656.086	
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	582.490	10.028.442	9.256.186	10.348.732	
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	0,428	0,035	0,035	0,23	
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	394.251	66.408	45.256	45.910	
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3.500	2.350	4.032	31.098	

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	56	40	33,3	79,49	
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	368	1.313	1.433	1.865	
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN						
	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	kunjungan	8.681.275	367.926	1.612.737	7.590.063	
2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	174.817	6.598	3.654	70.997	
3	Lama kunjungan Wisata	Hari	5	2	1	3	
4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	401.800.000	60.200.000	66.500.000	299.770.000	
	Pertanian						
1	Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,11	1,13	1,13	1,11	
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	6,34	6,50	6,33	5,91	
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	3,88	3,94	4,07	4,05	
4	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1,18	1,21	1,23	1,25	
5	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton	150.462	121.244	136.039	127.383	
6	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton	250.289	235.801	237.898	235.149	
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Susu)	Ton	1.888	2.302	2.398	2.318	
	Kehutanan						
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	55,73	60,42	65,61	71,14	
2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	17,43	0,7	0,08	0,03	
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhada	%	75,67	75,67	75,67	75,67	

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	p total luas kawasan hutan						
	Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	97,8	97,53	98,2	99,89	
2	Rasio ketersediaan daya listrik	%	98,00	90,00	101	99,41	
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	15,57	16,6	0	34,79	
	Perdagangan						
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US$1000	1.463.153.049	1.384.609.057	1.677.394.840	2.358.937.318	
2	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	0,89	0,98	1,08	Tidak diukur	
	Perindustrian						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	1.189	1.062	1.635	2.103	
	Transmigrasi						
1	Persentase transmigran umum	%	100	0	100	100	
	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	%	81,1	101,34	110,98	99,70	
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	17,52	10,51	19,11	27,39	
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah	Kelompok	55	21	60	86	
	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	314	314	314	314	
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	40	12,89	18,11	29,43	
	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	174.620	50.174,24	77.770,07	128.535,41	
	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	436,55	389.208,2	429.431,2	436.749,	

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
						6	
4	Nilai Tukar Nelayan	%	107,6	99,65	107,43	109,29	
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	58,69	52,33	57,74	58,27	
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Angka	1,56	1,57	1,57	2,33	
7	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	398.565,3	389.208,2	429.431,2	436.749,6	
8	Konsumsi Ikan	%	120,52	119,09	114,45	110,85	
	Penunjang Urusan						
	Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	99	97	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	96	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100
	Keuangan						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	43,23	41,54	44,65	54,1	

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0,58	0,64	3,61	2,29	
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	42,19	41,69	38,92	31,08	
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	9,01	13,11	10,63	10,1	
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	28,96 : 71,04	32,19 : 67,81	0 (PMDN 77/2020)	0 (PMDN 77/2020)	
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	17,49	14,47	16,19	20,37	
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun	15	15	20	20	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,1	0,1	0,1	0,03	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,6	0,6	0,17	0,48	
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	59	56	56	56	
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	8.536	7.907	13.781	12.906	
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	16.243	16.030	16.160	16.147	
	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	46	46	50	94,44	
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	50	50	100	100	
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	50	0	50	41,86	
	Pengawasan						

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaaan APIP	%	67,92	64,56	73,93	76,29	
2	Persentase pemyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis	%	68,83	68,1	70,04	69,55	
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	18	18	21	18	
	Sekretariat Dewan						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan.Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	ASPEK DAYA SAING						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp.Juta/Ruta	0,503	0,509	0,527	0,541	
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	52,27	51,21	51,68	50,44	
3	Nilai Tukar Petani	Ribu Rupiah	103,05	96,97	98,55	100,39	
4	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	%	2,65	3,28	4,62	3,7	
5	Produktivitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92	
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	76,07	65,8	68,13	154,28	
7	Rasio Ketergantungan	Angka	51,62	46,14	45,36	44,93	
8	Angka Kriminalitas	Angka	16.730	15.158	15.210	26.684	

Sumber: BPS dan OPD Provinsi Sulawesi Selatan

2.5.3 Capaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan diukur dari ketercapaian indikator pada 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.136.
Target dan Capaian Indikator SPM
Provinsi Sulawesi Selatan (Permendagri No 59 Tahun 2021)

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**PENDIDIKAN**					
1.1	**Pendidikan Menengah**					
1	warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	83,68	86,2	100	100
2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
1.2	**Pendidikan Khusus**					
3	warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	82,73	84,94	100	100
4	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
2	**KESEHATAN**					
2.1	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi**					
5	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
2.2	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi**					

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM**					
3.1	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota**					
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota**					
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**					
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi**					
7	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi**					
8	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	30	100	100
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**					
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi**					
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**					
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti**					

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
10	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100	7,4	100	100	100
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti**					
11	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	100	15,22	17,30	100	100
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti**					
12	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100	100	100	100	100
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti**					
13	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100	100	100	100	100
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi**					
14	Jumlah Warga Negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	100	100	100	100

Sumber : OPD Pengelola SPM Prov. Sulsel, Tahun 2023, diolah

2.5.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai amanat Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020 hingga 2023 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.137.
Outcome dan Output Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
	PENDIDIKAN										
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	76,62	80,55	83,68	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	Sekolah	498	496	495
						2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	0	8.205	0
						3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	0	13.823	0
						4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	189.543	219.616	224.726
						5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima	Orang	93.043	129.616	129.596

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							pembebasan biaya pendidikan				
						6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	4.768	2.336	5.496
						7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	4.299	5.783	4.974
						8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	14.676	15.215	15.814
						9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	9.751	10.015	10.114
						10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	5.292	5.292	4.221
						11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	4.050	1.380	2.989
						12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	3.336	3.511	3.503
						13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Orang	2.124	2.221	2.241

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							(Negeri dan Swasta)				
						14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	7.487	8.531	8.333
						15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	4.315	5.232	4.864
						16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	413	456	369
						17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	264	285	227

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						18)	Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	16	67	66
						19)	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	28	73	72
						20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	1.089	404	2.790
						21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	728	208	1.696
2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	80,06	80,84	82,73	1)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sekolah	51	74	69
						2)	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	0	0	0
						3)	Jumlah peserta didik pada pendidikan	Orang	1.829	4.414	6.009

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan				
						4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	726	861	660
						5)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	1.118	1.284	1.148
						6)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	60	76	651
						7)	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	236	4.540	267
						8)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	949	1.131	551
						9)	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	61	61	44

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						10)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	85	61	88
	KESEHATAN										
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0,20	1,69	18,34	1)	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	RS	6	6	6
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100	41,80	80	2)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	RS	32	30	24
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	3)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	4	4
						4)	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pos	80	58	65
						5)	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	800	580	650
						6)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	90	90	98

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						7)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Jenis	Edukasi PHBS = 80 Edukasi Covid 19 = 70	Edukasi PHBS = 2 Edukasi Covid 19 = 58	2 jenis edukasi, masing-masing 65 kali
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100	100	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis Logistik (Obat, Alat Kesehatan)	55	31 jenis Obat, 34 jenis Alkes	21 jenis Alkes, 14 jenis obat-obatan
						2)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	Orang	22	22	22
						3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	Kali	1	1	1
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		0	0	Bukan Kewenangan	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	-	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS	m	-	Surat Keterang	Surat Keterang

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							kewenangan provinsi (m)			an	an
						3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	Bukan Kewenangan	Bukan Kewenangan	Bukan Kewenangan	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						3)	Luas kawasan permukiman sepanjang	Ha	N/A	Surat	Surat

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)			Keterangan	Keterangan
						4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60,06	60,33	72,84	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	55,62	77,16	47,86
						2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	58,07	76,01	43,59
						3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui	%	100	100 (Surat	0 Layanan	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota			Keterangan)	pelayanan air minum cirah intas kab/kota blm dilaksanakan dan dianggarkan pd thn 2024. Pelaksanaan thn 2022 merupakan penyusunan DED yang dilaksanakan oleh Balai Besar	2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan	Ada
						3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	Lembaga	0	Surat Keterangan	1
						4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						5)	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Kerjasama	1	1	1

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
					sungai Sulawesi Selatan sedangkan pembangunan fisik baru dilaksanakan 2023 hingga 2024 sehingga baru dpt dilaksanakan di 2024 (Kebutuhan pemenuhan pelayanan air minum						

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
					curah lintas kab/kota di sulsel yaitu : 1. SPAM AJATAPARENG :411 jenis dan 2. SPAM MAMMINASATA : 80 Sambungan Rumah)						
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0	100 (Surat Keterangan)	100 (Layanan pelayanan air minum cirah intas	1)	Jumlah SPALD Regional	Unit	0	0	0
						2)	Total kapasitas SPALD Regional	m3	0	0	0
						3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	m3	0	0	0
						4)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Unit	17	14	14
						5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha	Lembag	0	0	0

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
					kab/kota blm dilaksanakan dan dianggarkan pd thn 2024. Pelaksanaan thn 2022 merupakan penyusunan DED yang dilaksanakan oleh Balai Besar sungai Sulawesi Selatan sedangkan		Provinsi Pengelola Limbah	a			

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
					pembangunan fisik baru dilaksanakan 2023 hingga 2024 sehingga baru dpt dilaksanakan di 2024 (Kebutuhan pemenuhan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di sulsel yaitu : 1.						

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
					SPAM AJATAPARENG :411 jenis dan 2. SPAM MAMMINASATA : 80 Sambungan Rumah)						
6	Rasio kemantapan jalan	%	66,62	70,01	71,95	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Km	2009,35	2009,35	2009,35
						2)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						3)	Panjang jalan yang dibangun	Km	75,93	72,95	9,44
						4)	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	487	100,4	0
						5)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Km	9,79	3,43	0
						6)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Meter	315	190	0
						7)	Panjang jalan yang direkonstruksi	Km	16,43	83,87	25,33

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							atau direhabilitasi				
						8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Meter	0	0	0
						9)	Panjang jalan yang dipelihara	Km	1.927,18	1871,31	1534,62
						10)	Panjang jembatan yang dipelihara	Meter	80	80	433
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		N/A	2,74	2,19	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Kali	0	3	4
						2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Orang	100	9.140	200
						3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Orang	98	250	200
						4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya				
						8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
						13)	Tersedianya data dan informasi	Ada/Tid	Tidak Ada	Tidak	Tidak

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ak Ada		Ada	Ada
						14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
	PERUMAHAN RAKYAT										
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	503.986	28.573	120.863
						2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	22.817	12.795	581
						3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	KK / Jiwa	34.130 / 85.690	28.708	581
						4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	272	9.757	44
						5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	6	1.199	0
						6)	Jumlah unit rumah korban bencana	Unit	73	1.284	0

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi				
						7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	100	677	0
						8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jiwa	1.200	719	1.179
						9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ha	3.559.067	41,60	0
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	30 (Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak relokasi)	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	285	411	0
						2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	22.466	671	0
						3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	285	1.375	0
						4)	Jumlah rumah tangga penerima layanan	Ruta	22.466	354	0

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM				
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	6,46	18,03	25,39	1)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh ≥ 10-15 Ha	Ha	1.183,79	1.183,79	1.183,79
						2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	318	125	372
						3)	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	Unit	76,53	213,46	300,52
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	100	35,46	1)	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Kawasan	166	28	44
						2)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang	257	128	20
						3)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Pengembang	227	302	207
						4)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Pengembang	47	88	20
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	1)	Jumlah pelanggaran dan Pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Pengaduan	14.190	3.241	3.722
						2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	46.151	43.973	36.353
						3)	Jumlah sarana prasarana minimal yang	Unit	464	464	345

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							dipenuhi				
						4)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	4	6	8
						5)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	4	5	5
						6)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	SOP	6	6	6
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	28,57	40,00	53,33						
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	1)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Dokumen RPB	1	3	2
						2)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Dokumen	1	Tidak Ada	1
						3)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	Dokumen	1	Tidak Ada	1
4	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	1)	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	3	1	1
						2)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Kegiatan		Kegiatan Sosialisasi, Komunik	Ada (Laporan Pelaksanaan

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										asi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	Kegiatan Monev SPM Kab/Kota Tahun 2022)
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	1 (satu) Dokumen Kaji Cepat Bencana Provinsi	1 (satu) Dokumen Kaji Cepat Bencana Provinsi
						2)	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Tim Reaksi Cepat 13 Kabupaten)	Ada (SK Tim Reaksi Cepat BPBD Prov. Sulsel Tahun 2022)
						3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi	Ada/	Ada	Ada	Ada

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							korban bencana provinsi	Tidak Ada			
						4)	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (4.466 Paket)	Ada (9.000 Paket/53. 217 Barang)
	SOSIAL										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	35,12	100	100	1)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	131	Surat Keterangan	263
						2)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	131	Surat Keterangan	263
						3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Panti	5	Surat Keterangan	14
						4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jalur alat Ramp Reglet alat cetak huruf Tongkat	20 7 6	Ada 4 (Kaki palsu bawah lutut, Alat bantu	39

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										dengar, Kursi Roda, Tongkat)	
						5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	LKS	5	Surat Keterangan	5
						6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	17	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						7)	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ksehatan) yang disediakan di dalam panti	Jenis		Surat Keterangan	Surat Keterangan
						8)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	Orang	5	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						9)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	Paket	3	Surat Keterangan	3
						10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	3	Surat Keterangan	1
						11)	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di	Tenaga Pengajar	64	Surat Keterang	7

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							dalam panti	Tenaga Honorer Pengurus Panti	28 8	an	
						12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	131	Surat Keterangan	Tidak Ada
						13)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	131	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						14)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	131	Surat Keterangan	263
						15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	131	Surat Keterangan	Tidak Ada
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	3,88	100	100	1)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	250	170	6.985
						2)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	250	170	6.985
						3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Panti	10	2 Asrama di UPT	16

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										PPSBK Nirannuang Bulukumba; 6 Asrama di UPT PPSBR Makkaraeso Maros; 2 Ruang Kamar di UPT PPRSA Inang Matutu	
						4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	5	7	710
						5)	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Jenis	48	15	24
						6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	8	12 perawat diluar panti dan	4

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										2 perawat dalam panti	
						7)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Stetoskop Alat Pnegukur Suhu	1 1	7 Alkes	9
						8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	2	12 dokter diluar panti, 1 dokter dalam panti, dan 1 tenaga Psikolog	5
						9)	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	46	34	46
						10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	9	5
						11)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di	Paket	4	6	7

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							dalam panti				
						12)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	Orang	250	170	78
						13)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	250	170	6.985
						14)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	250	170	183
						15)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	250	170	284
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	1)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	2178	75	75
						2)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	2178	75	75
						3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Asrama	10	9 asrama yang ada di panti; 2 Intensive	9 asrama yang ada di panti Sda 2 Intensive

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										care Ruang (Isolasi)	care (Ruang Isolasi)
						4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	5	10 Kursi Roda, 5 Walker dan 8 Tripod	12 alat bantu (kursi Roda, Kursi Roda Reclining, Tongkat 3 kaki/Tripod, Tongkat 4 kaki/walker, Kloset Portable, Kaca mata dan Tongkat Kruk Lengan)

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jenis	8	7	14
						6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	3	2	1
						7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	4	3
						8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	2	10 Dokter di luar panti	4 Dokter di dalam panti
						9)	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	13	18	17
						10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	5	2
						11)	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	2.178	36	7
						12)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	Orang	2.178	75	75
						13)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan	Orang	2.178	75	10

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							penelusuran keluarga				
						14)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	1	16
						15)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	Orang	11	13	12
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	0	100	1)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	819	Surat Keterangan	1.222
						2)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	819	Surat Keterangan	1.222
						3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Asrama	7	Surat Keterangan	8
						4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	0	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Paket	7	Surat Keterangan	3
						6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	5	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental,	Paket	4	Surat	3

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti			Keterangan	
						8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	1	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						9)	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	7	Surat Keterangan	8
						10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	3	Surat Keterangan	1
						11)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	819	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	Orang	819	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	819	Surat Keterangan	1
						14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan	Orang	0	Surat Keterang	Surat Keterang

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							pelayanan penulusuran keluarga			an	an
						15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Orang	0	Surat Keterangan	Surat Keterangan
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	15,63	100	100	1)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Orang	5.979	9.494 (6.790 jiwa korban bencana alam; 2.704 jiwa korban bencana sosial)	26.921
						2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	93	4.054 (2.704 Korban bencana Sosial yang menerima Paket sandang;	2.917 (2324 Korban bencana Sosial yang menerima Paket sandang

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										1.350 korban bencana Alam yang menerima paket sandang)	593 korban bencana Alam yang menerima paket sandang)
						3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Titik	23	48	101
						4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Paket	2.161	952	670
						5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	5.979	215 (40 org anak di Kab.Luwu Utara; 30 org remaja dan dewasa di Kab.Wajo; 35 org dewasa di	19 Jiwa 6 KK korban bencana yang menerima kunjungan ke Desa Pallamea ng Kec.Mattiro Sompe

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										Kab.Luwu; 45 org anak dan 35 org dewasa di Kab.Majene Sulbar)	Kabupaten Pinrang
						6)	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	60	1.360 tenaga Tagana dan 36 tenaga Pelopor Perdamaian	982 tenaga Tagana dan 56 tenaga Pelopor Perdamaian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
	TENAGA KERJA										
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	95,83	91,67	66,67	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Dokumen	1	1	1
						2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	89.06	101,10	94,1
						3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Perusahaan	0	2	3

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						4)	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Kab/ Kota	0	22	24
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,003	0,048	1,26	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	%	0	20	9,09
						2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	51,85	86,89	56,42
						3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		2,42	59,21	104,72
						4)	Persentase penganggur yang dilatih	%	0,12	30,12	0,4
						5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	%	92,5	86,55	60,42
						6)	Persentase penyerapan lulusan	%	10,81	63,82	71,43
						7)	Persentase LPK yang terakreditasi	%	7,34	27,81	34,43
						8)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		0	-	17,86
						9)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		0	-	1
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		0,821619328	0,825394857	Rp.82.540.089	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0,074	-	0,41
						2)	Persentase lembaga pemerintah, swasta	%	45,13	-	-

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas				
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	60,47	47,07	93,33	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	29,89	100	0,16
						2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	%	148,25	0,56	0,64
						3)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	Orang	0	43.927	43.616
						4)	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	%	6,22	7,33	39,6
						5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	133,07	30,30	98,32
						6)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	%	0,27	3,27	28,27
						7)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2,23	0,21	1,49
						8)	Jumlah mogok kerja		5	3	30
						9)	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	3	1	0
						10)	Jumlah perselisihan kepentingan	Perselisihan	26	4	23
						11)	Jumlah perselisihan hak	Perselisi	93	6	54

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
								han			
						12)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Perselisihan	0	-	0
						13)	Jumlah perselisihan PHK	Perselisihan	331	33	292
						14)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	1.845	153	1.035
						15)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Perselisihan	196	4	112
						16)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	LKS	4	3	4
						17)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Rp	3.165.876	3.165.876	3.165.876
						18)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	%	62,67	41,86	30,6
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	3,30	5,60	79,77	1)	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	Rekomendasi	0	4	0
						2)	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas	SPP AKL	0	2	2

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							provinsi				
						3)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	Orang	0	5.191	31.650
						4)	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	Lowongan	8.617	18.284	13.594
						5)	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	Orang	-	19	52
						6)	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Orang	11	11	15
						7)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	LPTKS	70	6	3
						8)	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Derah Provinsi	LPPRT	0	-	1
						9)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	Penempatan	20.870	17.424	1.375
						10)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Orang	-	-	99,53

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							yang difasilitasi kepulangannya				
						11)	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	%	-	20	61,54
						12)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	Pos	100	100	33,33
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	160,15	100	63,38	1)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Perusahaan	606	-	606
						2)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	Perusahaan	9.085	-	9.125
						3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	Perusahaan	8.076	-	8.742
						4)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	Perusahaan	14.133	10.518	14.133
						5)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	Perusahaan	13.123	-	13.123
						6)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	Perusahaan	6..567	12.113	6.281
						7)	Jumlah penyidikan tindak pidana		-	2	14

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							ketenagakerjaan				
						8)	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	Perusahaan	5.373	7.334	15.133
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	22,05	41,89	36,64	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Lembaga	53	52	50
						2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	Program / Kegiatan	105/ 228	51	88/137
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	3,10	6,41	2,74	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	2	1	1
						2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	3	3	3
						3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100
						4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	14	10	20
						5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan	Lembaga	32	Tidak Ada	Tidak Ada

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)				
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	%	34,51	31,79	25,83	1)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Program		4	3
						2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Lembaga	1	16	16
						3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%		100	100
						4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	0	9	20
						5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Lembaga	14	Tidak Ada	Tidak Ada
	PANGAN										
1	Persentase Cadangan Pangan	%	15,19	411,04	102,61	1)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Gudang	18 LPM	25 LPM	Tidak Ada
						2)	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		Ada	Ada	Ada
							Ketersediaan Pangan Utama	%	338		374,04

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							Rata2 Jumlah ketersediaan Pangan Utama		299.418.432.000		
							Jumlah Penduduk				8.956.181
							Jumlah produksi padi Tahun 2020 adalah 4.678.413 ton gkg dan konversi padi menjadi beras = 64,02%				5.090.637,23
						3)	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Ton	4.607,07	140	140
							Cadangan Beras Total Provinsi Sulsel Tahun 2020 = 0,5% x 8.851.240 Jiwa x 104,1 kg/Kap/tahun/1000				
							Cadangan Beras Total Provinsi = 20% x 4.607,07 Ton	Ton	921,41		
							Jadi Persentase Cadangan Pangan dengan Rumus / Perhitungan adalah = 140 Ton/921,41 Ton x 100%	%	15,19		
						4)	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal		0	0	0
						5)	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kegiatan	9	6	8
						6)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen
						7)	Tersedianya informasi situasi	Ada/Tid	Ada	1	1

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							kerentanan pangan dan gizi Provinsi	ak Ada		Dokumen	Dokumen
						8)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tertangani	20 Klp
						9)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak ada pengajuan permintaan cadangan pangan	Tidak ada pengajuan permintaan cadangan pangan
						10)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
	PERTANAHAN										
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	99,60	100	100	1)	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	%	83,33	100	100
						2)	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	83,33	100	100
						3)	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	%	96,00	100	100
						4)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	%	83,33	100	100
2	Persentase pengadaan	%	94,5	73,63	50,39						

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu										
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	%	100	93,76	100						
	LINGKUNGAN HIDUP										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	71,74	73,23	74,14	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap:				
							Indeks Kualitas Air (IKA)		54,00	56,82	57,79
							Indeks Kualitas Udara (IKU)		88,73	89,13	90,35
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		63,56	55,40	55,46
							Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		70,22	84,82	85,59
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	70,73	80	61,97	1)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	%	100	100	100
						2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	%	78,57	185,71	171,42
						3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	%	19,40	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan	%	4,48	27,78	72,22

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH				
						5)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	%	100	100	100
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	%	100	100	100
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	12,82	15,38	55,56	2)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	%	100	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	47,41	36,27	35,45	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	147	3	2
							Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	13	7	5
							Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi	Lembaga	3.378	2	0

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan				
							Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	274	25	58
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	100	17,58	31,09	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	375	65	205
						2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	36	33	48
						3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Desa	31.181	90	18
						4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	184	33	303
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,13	2,29	2,29	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Dokumen	2	1	1

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							yang di-Perdakan				
						2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		21,9	21,5	21,5
						3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		40	27,4	27,4
						4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	69	
						5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	%	20	50	40
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%		71,66	56,62	1)	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100	92,42	70,27
						2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0,18	18,41	12,91
						3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						4)	Persentase pelayanan KB Pasca	%	28,5	24,93	9,53

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							Persalinan				
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,86	14,26	26,13	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Kabupaten/ Kota	12	10	12
						2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	68,34	68,34	135,12
	PERHUBUNGAN										
1	Rasio konektivitas provinsi		70,50	0,69	0,69	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	%	31,25	43,75	43,75
						2)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	%	100	100	100
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi		0,45	0,45	0,46	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan provinsi	%	5,5	3,25	1,95
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	97,83	97,44	100	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,82	97,4	100

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	Kominfo					2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	97,82	97,4	100
						3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	55,56	35,48	24,11	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100	240	112
						2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	84,78	84,78	97
						3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi	%	33	51,2	97

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
						4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	37	97,67	100
						5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	1,78	5,81	2,96
						6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	83,11	86,88	100
						7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	8,03	50,00	44,33
						8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	32,60	30,7	94,87
						9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	32,60	30,7	94,87

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	21,73	61,5	97,44
						11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	8,03	40,15	44,33
						12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	26,08	66,6	97
						13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	61,53	15,56	66,67
						14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	70,78	79,97	90,94	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	%	89,75	83,26	51
						2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	31,21	51,97	51,49
						3)	Persentase diseminasi dan layanan	%	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1	Meningkatnya Koprasi yang berkualitas	%	7,59	28,69	22,73	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	21,88	20	6
						2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		46,71	100
						3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	7,31	100	0,73
						4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	26,83	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				
						5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	17,24	1,1	0,05
						6)	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	2,23	4,96	0,08
						7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	3,45	1,10	0
						8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah	%	16,2	0,09	0

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				
						9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	24,48	0,042	0
						10)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	40	0,043	0
						11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	40	0,05	0
						12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	40	0,01	0

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	20,43	7,62	45	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	%	28,59	15,08	0,14
						2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	10,84	48,21	0,65
						3)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	%	0,35	6,71	45
						4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,19	39,97	0,54
						5)	Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	3,07	59,98	1,22
						6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	15,91	11,55	0,75
						7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	3,97	56,05	0,46
	PENANAMAN MODAL										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	22,81	32,37	-14,11	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Belum Tersedia	Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberia	Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberia

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										n Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi	n Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
						2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Belum Tersedia	Belum tersedia (Surat Keterangan)	Belum ada Standar Operasional Prosedur yang dibuat terkait pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal
						3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman		Belum Tersedia	Belum tersedia	Belum dilaksana

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							modal			(Surat Keterangan)	kan evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2021, baru sampai pada tahap pelaksanaan Sosialisasi Perda
						4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kegiatan	1	10	7
						5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	1	0	0
						6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	4	8	1
						7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		104	15	33
						8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		24.376	40.165	30.691 (10.162 Perizinan;

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
											20.529 Non Perizinan)
						9)	Laporan realisasi penanaman modal		12,5 T	16,6 T	14,2 T
						10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			99	0
						11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		144	30	460
						12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Data dan Informasi	3	6	3
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,09	0,21	0,24	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Pemuda	4.748	345	5.531
						2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Pemuda	0	5	5
						3)	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Pemuda	110	4.445	6.511
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	%	2,34	4,07	3,71	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan	Pengelola	53.422	96.726	87.119

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						manajemen organisasi kepemudaan				
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	52	108	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Pelatih	1.151	1.226	1.248
						2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Atlit	340	4.046	4.268
						3)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	0	15	46
						4)	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Pemuda	0	200	255
						5)	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	0	25	25
	STATISTIK PROVINSI										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Survei	0	0	0
						3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		0	3	3
						4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Survei	0	0	0

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		0	0	8
						6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	%	0	33,3	41
						7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	%	100	33,3	41
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100						
	PERSANDIAN PROVINSI										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	19,07	24,65	32,71	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	25	33	50
						2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	8,16	80	83,33

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						3)	Persentase system elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	0	20,69	34,48
						4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	100	100	100
	KEBUDAYAAN										
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	33,36	33,33	16,67	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	2	11	2
						2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Obyek	3	11	2
						3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	2	11	2
						4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta		55	176	1

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							peningkatan kapasitas tata kelola)				
						5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar Budaya	6	3	18
						6)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar Budaya	2	7	3
						7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Cagar Budaya	0	0	0
						8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Cagar Budaya	2	7	2
						9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	6	3	3
						10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Koleksi Museum	300	250	536
							Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Pengunjung	9.204	25.803	101.638
						11)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana		0		32

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							museum				
						12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			1.162	536
						13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	7	1	7
						14)	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Tim	5	7	7
						15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Ahli CB	33	6	7
						16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	SDM	3	31	25
						17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	SDM	3	3	1
						18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Sarpras	3	5	7
						19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	7	14	9
	PERPUSTAKAAN PROVINSI										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			6,31	67,21	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	112,82	100,41	111,8
						2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	1,2	69,95	14,31

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,1	0,04	0,33
						4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	8,08	36,03	49,69
						5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		2.987	50.931	529.671
						6)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	Judul / Exp	488 / 763	17.144 judul dan 17.726 exp	17.560 exp
						7)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	Judul	4497	45.256	5.497
						8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	Perpustakaan	35	45	45
						9)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	Terbitan	1121	1.661	1.265
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		11,93	13,28	78,49	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Judul / Rol	4.049 / 82	4.049 judul dan 82 rol	4.049 judul dan 82 rol
						2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Naskah	1	6	6
						3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang	Judul / Exp	186 / 345	186 judul dan 346	186 judul dan 346

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							ada di wilayahnya (item)			exp	exp
	KEARSIPAN PROVINSI										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			73.995	46,05	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,63	95,98	16,72
						2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	88,61	100	24,47
						3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	68,57	45,00	0,595
						4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN+G15 melalui JIKN	%	4,17	0	0,004
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			100	100	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Berkas	490	23	23
						2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Kabupaten	2	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	OPD	2	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Khazanah	1	2	4
						5)	Pencarian arsip statis yang		870	856	1

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK				
						6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Izin	64	122	493
	URUSAN PILIHAN										
	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	4.051.291,9	4.817.918,6	4.532.552,5	1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	WPP	4	713	713
						2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	SIUP	352	407	444
						3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	%	50,00	45,45	68,4
						4)	Jumlah izin/pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Izin	3.291	SIPI (10 - 30 GT) = 2.190 Unit Kapal SIKPI =	SIUP = 44 unit kapal 10-30 GT; BPKP = 552 unit

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										180 Unit Kapal BPKP (>5 - 10 GT) = 450 Unit Kapal	kapal >5-10 GT
						5)	Jumlah kapal yang+G12 terdaftar	Unit Kapal	3.291	3.227	1.020
						6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Izin Usaha	23	17	26
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	1,48	63,87	94,01	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	11,87	0,01	6,13
						2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	%	28,57	28,57	71,42
						3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Unit	359	357	403
						4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang	Izin	23	17	5

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Usaha			
						5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Izin Usaha	186	145	9
						6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		31	19	9
						7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	POKMA SWAS	45	54	75
						8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Izin Usaha	186	145	3
	PARIWISATA										
1	Persentase pertumbuhan	%	-96,23	-44,76	176,41	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Kawasan	1	2	1

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan									(Kawasan geopark Maros_pangkep dan Kawasan Benteng Somba Opu)	
						2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		5	1. Pembangunan toilet, 2. Pembuatan papan informasi 3. Pembuatan papan penunjukarah 4. Musholla 5. Pusat Informasi	11

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										6. Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	
						3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Rp	285.159,84	427.990.700	1.087.000.000
						4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata		179	113 Hotel dan Restoran	Rp.6.767.064.864.781
						5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi		77	81	52
						6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	3,08	1,13	1,5
						7)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Hari	1,54	1,6	1,5
						8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Wisman	6.598	3.645	14.310
						9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Wisnus	367.926	1.612.737	7.487.899
						10)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Promosi	1	15	0

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						11)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Event	0	0	0
						12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Travel	1	98	39
						13)	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	%	4,02	11,54	17
						14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%		100	100
						15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi		7	2
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%		338,33	60,44						
3	Tingkat hunian akomodasi	%		27,94	26,62						
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%		1,18	1,38						
	PERTANIAN										
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	3,42	529,57	523,97	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Paket	420	19.253	14.763

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman holtikultura	Pohon	665.515	496.199	729.294
						3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Dokumen	474	865	607
						4)	Prasarana pertanian yang digunakan		438,99	100	100
						5)	Pengendalian penganggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Ha	17.932	22.215	18.970
						6)	Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana	Ha	45.028	61.037	33.334
						7)	Penerbitan izin usaha pertanian	Izin Usaha	213	289	241
						8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	%	0	100	100
						9)	Persentase sarana pertanian yang digunakanPersentase fasilitasi penganggulangan bencana	%	71,51	70,01	91,41
						10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	%	100	100	100
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	3,84	-66,61	-89,21						
	KEHUTANAN										

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	15,80	24,04	26,8	1)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	%	0	100	67
						2)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	%	100	100	67
						3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	12.510	13.023	12.163,2
						4)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	%	0,0002	0,04	0,00314
						5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	%	0,69	0,08	0,0265
						6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	%	55	55	71,71
						7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						9)	Pemulihan ekosistem pada Tahura		Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						10)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura		Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						11)	Jumlah ketersediaan penyuluh	%	47,88	57,33	64,5

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							kehutanan				
						12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	%		Surat Keterangan	98,35
						13)	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	%	58,33	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	KTH	400	428	505
						15)	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
						16)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor			1	1
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%	0,70	0,08	0,03						
3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	29,43	65,61	71,14						
	Energi dan Sumber Daya Mineral										
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai	%	100	100	1,05	1)	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah	Ada/ Tidak	Ada	Ada (Peratura	Ada (Peratura

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda						provinsi (ada/tidak)	Ada		n Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)	n Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)
						2)	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peta Potensi Air Tanah)	Ada (Peta Potensi Air Tanah)
						3)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)	Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)
						4)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)
						5)	Perda/Pergub terkait penetapan nilai	Ada/	Ada	Ada	Ada

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							perolehan air tanah	Tidak Ada		(Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Nilai perolehan Air Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan)	(Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Nilai perolehan Air Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan)
						6)	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039)	2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039)
						7)	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara)	2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara)
						8)	Perda/Pergub terkait IUJP	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)	dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
						9)	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Ada/ Tidak Ada	Ada	Tidak Ada dikarenakan terhitung sejak 10 Desember 2020, seluruh kewenangan Pemerint	Ada (Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tentang Penetapa

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										ah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat secara utuh sampai dengan diterbitkannya Rancangan	n Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan)

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										Peraturan Presiden terkait pendelegasian kewenangan	
						10)	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas Bumi belum di optimalkan di Sulsel	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas Bumi belum di optimalkan di Sulsel
						11)	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										Bumi belum di optimalkan di Sulsel	Bumi belum di optimalkan di Sulsel
						12)	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada yang melakukan pemintaan perizinan (Bukan Kewenangan Provinsi)	Tidak Ada yang melakukan pemintaan perizinan
						13)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Pergub berkaitan tersebut masih sesuai Permen	Tidak ada Pergub berkaitan tersebut masih sesuai permen ESDM

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
											Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
						14)	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non	Rekomendasi Penilaian Kesesuaian untuk IUPTLS sebanyak 12 rekomendasi

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										perizinan terpadu satu pintu pada pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan)	
						15)	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listtik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Tidak Ada dikarenakan sudah menjadi kewenangan pusat	Tidak ada masih berdasarkan PerPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 42 ayat 4 yang merubah Pasal 5

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
											Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
						16)	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada yang bermohon	Tidak ada karena berdasarkan PerPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 42 yang merubah Pasal 5 Undang-Undang

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
											No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lampiran 1 sektor ESDM, hal tersebut masuk dalam

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
											kewenangan Menteri
						17)	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga istrik tegangan rendah	Izin	8	Ada (Data Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021)	Rekomendasi Penilaian Kesesuaian untuk IUJPTL sebanyak 48 rekomendasi
						18)	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Ruta	56	Ada dengan pembangunan LTSHE 2 Lokasi Tahun 2021	Total RT berlistrik sebanyak 179 RT

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
2	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	98,18	98,49	98,8	1)	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Ada/Tidak Ada		Tidak Ada yang melakukan perizinan tersebut	Tidak Ada yang melakukan perizinan tersebut
	PERDAGANGAN										
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas		-5,37	21,15	40,63	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	%	12	16,67	50
						2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	%	0	13,33	13,33
						3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	%		6,2	9,16
						4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	%		44,4	18,18
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	81,69	64,04	100	1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Pengaduan	71	64	41
						2)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi			0	0
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	80,60	49,34	258,6	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau			7	6
						2)	Indeks Kinerja BPSMB			8	8

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
4	Tertib Usaha	%		100	100	1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	%		0	0
						2)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	%		0	0
						3)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	%		0	100
						4)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual minum di tempat	%		0	0
						5)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%		100	100
5	Persentasi kinerja realisasi pupuk	%	30,00	78,52	93,3	1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	%			0,000172 53
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	%	24,01	59,15	88	1)	Jumlah barang beredar yang diawasi		20.410	30.000	30.000
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%			24,95	1)	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi	%		100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							Tersedianya bangunan pusat distribusi				
							Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi				
							Beroperasinya pusat industri				
							Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani				
						2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%		1. Beras : 1,43%, 2. Gula pasir : 2,13%, 3. Minyak Goreng : 28,06% 4. Tepung terigu : 9,46% 5. Daging sapi : 3,42% 6. Daging ayam :	1. Beras : 6,72 % 2. Gula Pasir : 7,91% 3. Minyak Goreng : 34,65% 4. Tepung Terigu : 17,45% 5. Daging Sapi : 6,56% 6. Daging Ayam : 12,7%

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										10,12% 7. Telur : 2,11% 8. Cabe rawit : 126,19% 9. Susu kental manis : 0%	7. Telur : 19,63% 8. Cabe Rawit : 104,9% 9. Susu Kental Manis : 14,07 %
						3)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	%		100	100
	PERINDUSTRIAN										
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi Tahun 2019 berjumlah: 76 Tahun 2020 berjumlah: 75	%	-0,013	0	-48	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah				Tersediannya Data Jumlah industri besar tahun 2021 dan tahun 2022
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan	%		75	110,33 (Hanya 2	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya	%	100	100	75

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				yang ditetapkan dalam RPIP dan RIPIN)		menjadi perda = 100%				
	Pertumbuhan Sektor Industri = 10,81%				78,63						
	Kontribusi Industri NonMigas terhadap PDRB: 16,41%				154,27						
	Nilai Ekspor Produk Industri (Juta USD): 1.756,29				0,06						
	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Org) : 33.000				56,06						
	Nilai Investasi (Rp. Milyar) : 1.265,88				48,81						
	Penanaman Modal-PMA (USD Juta) : 38,95 - PMDN (Rp. Milyar) : 759,53				2,57						
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan	%	50	100	100	1)	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	%	100	Diterbitkannya	Izin Usaha

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait									Izin Usaha Industri Besar (IUI) = 1. PT. Cahaya Dinamika Persada. Dan 2. PT. Teguh Wira Pratama	Industri Besar (IUI) = 1. PT. Tirta Fresindo Jaya 2. PT. Nutrindo Bogarasa 3. PT. Ocean Champ Seafood 4. PT. Semen Tonasa 5. PT. Karunia Abadi
						2)	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan				
						3)	Persentase jumlah penetapan izin usaha				

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi				
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		100	0 (Sudah ada izin yang dikeluarkan namun belum dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap industri terkait)				Surat keterangan berupa pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala dinas		Diterbitkannya Izin Perluasan Usaha Industri Besar (IPUI) = PT. Karunia Abadi
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	%		100	0 (Bahwa izin bukan	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1		Surat keterangan berupa pernyataa		Surat keterangan berupa pernyataa

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait				kewenangan secara langsung (Rekomendasi) tetapi pengawasan terkait izin tersebut menjadi kewenangannya)		provinsi		n yang ditandatangani oleh kepala dinas		n yang ditandatangani oleh kepala dinas
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125 (Tersedia)	Tersedia		1)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota				Data industri semester I berdasarkan klasifikasi yang terdaftar

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
											di SIINas
	Keterkaitan informasi industri tersedianya industri dengan batas waktu 0-6 bulan				50						Data 24 kab/kota berdasarkan informasi produksi, kapasitas produksi dan bahan penolong
	Kelengkapan informarsi industri meliputi: Informasi produksi dan kapasitas produksi, informasi bahan baku dan bahan penolong				20						
	Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri				70						
	TRANSMIGRASI										

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	0	0	0
						2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Permukiman	3	2	6
						3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Satuan Permukiman	8	4	5
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN										
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN										
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	9,14	10,05	10,37						
2	Rasio PAD	%	1,18	0,91	54,11						
3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	%	46,95	52,21	58,34						
4	Opini Laporan Keuangan		WDP	WTP	WTP						
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 3	Level 3	Level 3						
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 2	Level 2	Level 2						
	PENGADAAN										

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama	%	0	100	1,2						
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	53,67	6,03	4,18						
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	83,39	44,47	27,19						
4	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dab Koperasi pada pelaksanaan Barang dan Jasa	%			8,15						
	KEPEGAWAIAN										
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru	%	2,58	73,59	75,43						

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	dan tenaga kesehatan)										
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,28	20,91	28,5						
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,28	100	100						
	MANAJEMEN KEUANGAN										
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93,05	83,83	1,66						
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	86,52	96,51	2,79						
3	Assets Management		Ada	Ada	Ada						
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	0,76	3,24	2,59						
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK										
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	%	33,55	92,02	95,3						

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)										
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	21,82	24,85	17,09						

Tabel II.138.
Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	KESEJATERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	90,84	91,3
2	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka	95,95	94,91
3	Persentase Balita Stunting	%	18,59	27,4
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,99	65,66
5	Persentase penduduk yang bekerja	%	94,84	95,76
6	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	38,03	40,41
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	42,48	54,40
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
9	Pencapaian skor pola pangan harapan	%	87,1	
10	Penguatan Cadangan pangan (Data Timpang)	%	100	100
11	Pendapatan daerah rawan pangan (Data Timpang)	%	100	100
12	Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	24,29	21,60
13	Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	10,07	1,22
14	Produksi sektor pertanian	Triliun Rp	183,34	
15	Kontribusi sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	1,92	4,12
16	Produksi Sektor Perkebunan	Triliun Rp	14,37	
17	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	93,55	
18	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0,09	5,13
19	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	7,18	8,64
20	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,14	14,49
21	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	15,22	12,85
22	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	8,3	
23	Pertumbuhan PDRB Industri	%	9,73	4,26
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
	PENDIDIKAN			
24	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	%	62	92,95
25	Persentase SMA/SMK yang	%	93,90	99,95

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)			
26	persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	57,25	60
27	persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	82	86,86
28	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	%	1 : 13	1 : 12
30	Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	46,35	46,85
31	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	100	91,1
32	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	51,O5	50,57
	KESEHATAN			
33	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	%	100	33,33
34	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	100	88
35	Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	7,5	5,30
36	Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	13	9,9
37	Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah ‘	%	100	86,93
38	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100
39	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100
40	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	100	100
41	Rasio Tenaga Kesehatan persatuan penduduk	%	100	27,86
42	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	%	100	77,72
43	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	100	100
44	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	%	100	100
45	Rasio tenaga kesehatan persatuan	(/100.000	23	60

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	penduduk	Penduduk)		
46	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	100	100
47	Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	%	100	100
48	Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	%	100	100
49	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	70	72
50	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	23
51	Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	%	100	100
52	Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	%	100	98,76
53	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi	%	100	87
54	Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan	%	100	99,8
55	Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman	%	100	85
56	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%	85	87,5
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
61	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	%	80	67,19
62	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	%	100	100
63	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	100
64	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	%	100	100
65	Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota	%	100	100
66	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	100	100
67	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	%	100	100
68	Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi	%	16	NA
69	Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitasi	%	100	100
70	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang	Kawasan	15	15

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya			
71	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	75,09	75,39
72	Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat	%	74,25	74,25
73	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	%	80	80
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
74	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	100	27,01
75	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	100	60
76	Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	93	97,54
77	persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	**%**	100	100
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAt			
79	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	100	100
80	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100	100
81	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100
82	Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100
83	Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100
	SOSIAL			
84	Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	%	100	100
85	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan social	%	100	100
86	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	3,7	100
87	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	dasar tuna susila didalam panti			
88	Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	%	100	100
89	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	100	100
90	Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	%	100	100
91	Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100	100
92	Persentase TMP yang dikelola	%	3,7	100
	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR			
	TENAGA KERJA			
93	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	100	75
94	Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	100	15
95	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	77,08	82
96	Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	85,00	100
97	Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	%	4.35	9,69
98	Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	59.41	62,82
99	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	60.00	67,42
101	Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	47,22	47,34
102	Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	**%**	85.00	87,16
103	Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	**%**	84,00	84,29
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
104	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi %	%	35	58
105	Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	%	75	61
106	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg	%	50,00	60

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	terstandarisasi			
107	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	%	60	75
108	Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate	%	87	89
109	Persentase kabupaten/Kota Layak Anak	%	83	91,66
110	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	50	60
	PANGAN			
111	Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	**%**	60	0
112	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%):	**%**	Beras 386,08 , Jagung 58, 20 , Kedelai 27,55	Beras 334,94 Jagung 207,72 Kedelai 0,28
113	Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari) Kkal/ Kapita/ hari	Kkal/Kapita/hari	3.929.20	4.616
114	Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari) gr/Kapita/hari	gr/Kapita/hari	174.5	158,19
115	Jumlah Daerah Rawan Pangan	Daerah	19	5
116	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100
	PERTANAHAN			
117	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100
118	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100
119	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP			
120	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100
121	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	%	40,5	7,12
122	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	100	100
123	Cakupan limbah yang dikelola	%	100	100
124	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	26	29,89
125	Persentase pengakuan keberadaan	%	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
126	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	100	100
127	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan	%	5 Penghargaan	111 penghargaan
128	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
129	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	98	68,9
130	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	100	95,52
131	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	40,00	50,12
132	Persentase Pasangan ber akte nikah	%	37	51,04
133	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	90,00	93,92
134	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	47	97,75
135	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	100	100
136	Persetase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100
137	Persentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
138	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik)	%	100	99,42
139	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,33	5,45
140	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	15	48,75
141	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	0,88	4,3
142	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	%	11.81	3,14
143	Persentase Desa yang diFasilitasi	%	25,05	50,33
144	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	1,57	1,44
145	Persentase Posyandu aktif	%	99,98	97,06

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
146	Persentase PKK aktif	%	100	100
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
147	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	**%**	45,82	25
148	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	65,5	60
149	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	25	25
	PERHUBUNGAN			
150	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	32,40	72
151	Persentase Layanan Angkutan Darat;	%	58	97
152	Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang	605.000	
153	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	30	3,07
154	Jumlah Terminal Bis terkelola Terminal	terminal	16	7
155	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	orang	1.105.000	2.302.399
156	Jumlah pelabuhan strategis provinsi Lokasi	pelabuhan	11	11
157	Persentase pelabuhan yang beroperasi	%	35	100
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
158	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	100	100
159	Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	%	100	100
160	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	poin	3,00	3,09
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
161	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	50	12
162	Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	40	10
163	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	50	20
164	Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	30	20
165	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	40	20
166	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan	%	40	20

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	Koperasi			
167	Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	40	20
168	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	50	10
169	Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	11	11
170	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	3	3
	PENANAMAN MODAL			
171	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan	%	100	100
172	Jumlah Realisasi PMA	Rp. Triliun	16,54	4,983
174	Jumlah Realisasi PMDN	Rp. Triliun	20,84	11,468
175	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	90	90
176	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	100	100
177	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	100	100
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
178	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	25	40
179	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	2,03	2,33
188	Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	%	200	43
189	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	100	75
190	Persentase organisasi pramuka aktif	%	100	100
	STATISTIK			
191	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	100	80
	PERSANDIAN			
192	Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	%	60	69,57
	KEBUDAYAAN			
193	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	4,5	0,34
194	Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	%	9,4	7,5
195	Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi	%	5,6	3,89
196	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	1	0,29

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
197	Persentase Kunjungan ke musium	%	100	100
	PERPUSTAKAAN			
198	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	orang	250.000	353
199	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	100	100
	KEARSIPAN			
200	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	75,47	92
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN			
	PARIWISATA			
201	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	1,0	62
202	Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	%	20,8	12,5
203	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	%	100	367,1
204	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	%	100	75,73
205	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	13	18,75
206	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	5,45	1,55
207	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	12	14,92
	PERTANIAN			
208	Jumlah produksi Talas Satoimo	Ton	26.432,55	0
209	Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	331	0
210	Produktifitas Padi kw/Ha	Kw/Ha	50,43	50,80
211	Produktifitas Jagung kw/Ha	Kw/Ha	55,73	57,54
212	Produtifitas Kopi kg/Ha	Kg/Ha	588,1	503,86
213	Produktifitas Kakao kg/Ha	Kg/ha	39.000	82.527
214	Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	unit	1.655	6.073
215	Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	1.495,55	850.440
216	Produksi Daging	Ton	187.450	143.114
217	Produksi Telur	Ton	214.274	275.595
218	Produksi Susu	Ton	2.159	1.961
219	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp.	465.893.180.426	11.331.727.857.600
220	Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp.	8.000.000.000	10.172.090.000
223	Persentase Penurunan Serangan OPT	%	4,5	24
224	Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	%	81,15	68
226	Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP	angka	0,5	0,5
	KEHUTANAN			

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
228	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	283	7.240,4
229	Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan M3	Ton	92.336,62	77.201,56
230	Persentase kerusakan hutan pertahun	%	14,82	0,05
231	Cakupan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	%	65,47	73,27
232	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata Jenis	Jenis	2	2
233	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	%	16,76	30,67
234	Jumlah DAS yang direhabilitasi DAS	DAS	2	2
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
235	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	95	93,52
236	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99	99,89
237	Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	%	99,50	100
	PERDAGANGAN			
238	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100	50
239	Persentase Penerbitan SKA	%	100	104,44
240	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100
244	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100	100
245	Nilai Ekspor Perdagangan	$	171.081.215	2.156.183.887
	PERINDUSTRIAN			
246	Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	7	35,44
	TRANSMIGRASI			
247	Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	100	100
248	Persentase penempatan transmigrasi	%	100	100
249	Persentase penempatan transmigrasi	%	100	100
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
250	Produksi garam rakyat	Ton	48.450	114.959,9
255	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	%	100	61,62
256	Cakupan luas kawasan	%	67,31	68,09

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	konservasi perairan yang dikelola secara %			
257	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	9.210,12 M	13.795,6
258	Produksi perikanan tangkap Ton	Ton	413.030,8	504.709
259	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	30,25	22,93
260	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	78,95	89,47
261	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	27,17	38,49
262	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp.Milyar	15.958,39	18.313,8
263	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.298.391,1	4.115.586,5
264	Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	100	112,58
265	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	89,85	56,35
267	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp.Milyar	317.28	496,1
268	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi Ton	Ton	5.544,1	6.998,2
269	Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	%	100	97,40
	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
270	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	**%**	100	**100**
271	Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	**%**	100	100
272	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	**%**	100	88,89
273	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	**%**	35,55	49,62
276	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	**%**	100	100
280	Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	**%**	100	100
	SEKRETARIAT DEWAN			
281	Persentase PROLEGDA yang terealisir	**%**	100	73,33
282	Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	**%**	100	100
283	Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	**%**	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	PENUNJANG URUSAN			
	PERENCANAAN			
284	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	%	100	100
285	Persentase peningkatan capaian kinerja program	%	0,5	0,5
286	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	%	100	100
287	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	%	95	95
288	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	95	95
	PENGADAAN / KEUANGAN			
289	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	%	100	100
290	Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100	100
291	Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100	100
292	Persentase Serapan Belanja Daerah	%	96	93,51
293	Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu	%	100	100
299	Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	%	92	96,63
300	Persentase Tanah Pemprov Yang Sudah Bersertifikat	%	58	66,43
301	Persentasi Peningkatan PAD	%	5	6,5
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
302	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	%	65	65
303	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional	%	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	berbasis talenta;			
304	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	95	95
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
305	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	%	100	100
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
306	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	%	3	18,75
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
307	Persentase Pelayanan tamu daerah	%	100	83
308	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	%	100	0
	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
309	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	79,50	79,80
310	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	72,50	75,23
311	Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	%	100	100
312	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah 100	%	100	100
313	Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100
314	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100
	PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
315	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	%	20	100
316	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	82,01	101,67
317	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan	%	20	100
318	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	%	40	100
319	Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	%	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
320	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	**%**	10 % (40 kasus)	125
	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI			
321	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Juta	Rp.	384.000	566.224
322	Nilai Tukar Petani Ribu Rp 11.841	Rp	118,41	114,25
323	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	21,09	50,44

Sumber : Perubahan RPJMD 2018 – 2023, BPS, Data Sektoral OPD 2024.

2.5.5 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Suistanable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan provinsi. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2020 hingga 2022 dari 17 tujuan sejumlah 206 indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.139.
Capaian Pembangunan Berlanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan			
	1.2	Pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, Perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskiman disemua dimensi, sesuai definisi nasional	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompoh umur	8,7
	1.4.	Pada Tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khusunya masyarakat miskin dan rentan memiliki hal yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan serta sumber daya alam, tehnologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses pelayanan dasar	a. Akses layanan air minum :46,39% (2022);
				b. Akses layanan sanitasi dasar :92,24% (2022);
				c. Akses fasilitas kebersihan dasar : 87,22%(2022)
			Proporsi penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki ha katas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	a. Persentase rumah tangga dengan rumah milik sendiri : 87,68%;
				b. Persentase rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak :

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
				2,20%
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan			
	2.1	Pada Tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khusunya orang miskin dan meraka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun	Prevelensi kecukupan konsumsi pangan	10,79% (2022)
	2.2	Pada Tahun 2030 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja Perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula	Prevelensi kekurangan gizi	Prevelensi balita stunting :27,20% (2022);
				Prevelensi balita wasted :8,30 (2022)
			Prevelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	3,78% (2022)
			Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimun di bawah 1400 kkal/kapita/hari	9 % (2019)
			Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	2,7% (2022)
			Prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	75,88% (2022)
	2.3.	Pada Tahun 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya Perempuan, masyarkat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	79.717.835 (2022)

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
		nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif		
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia			
	3.1.	Pada Tahun 2030 mengurangi resiko angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran	Proporsi Perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang proses melahirkan ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih	98,94%
			Persentase Perempuan pernah kawin 15 – 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitasi kesehatan	96,01
	3.2.	Pada tahun 2030 mengahiri kematian bayi baru lahir dan Balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per1000 kelahiran hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% immunisasi dasar lengkap pada bayi	87,90 (2019)
	3.3.	Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkolosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Kejadian malaria per 1000 orang	0,10 (2019)
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	21 (2021)
	3.7	Mencapai cakupan Kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan Kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang	Unmeet need pelayanan kesehatan	4,22 (2021)
			Cakupan jaminan kesehatan nasional	a. BPJS Kesehatan non penerima bantuan iuran (Non-PBI):22,57 (2021);
				b. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) : 52,61

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
				(2021)
	3.8	Memperkuat pelaksanaan the framework convention on tobacco control WHO di seluruh negara sebagai Langkah yang tepat	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 Tahun	29,04 (2022)
	3.9	Mendukung Penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang The trips Agreement and public healt, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dari hak kekayaan intelektual terlait keleluasaan untuk melindungi Kesehatan Masyarakat dan khusunya menyediakan akses obat bagi semua.	Proporsi fasilitas Kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	95,20 (2022)
4	Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkat kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua			
	4.1	Pada Tahun 2030 menjamin bahwa semua anak Perempuan dan laki-laki menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat	106,65
			Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat	87,15
			Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	88,04
			Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun	8,95 (2021)
	4.2	Pada Tahun 2030 menjamin bahwa semua anak Perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan dasar	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan anak usia dini (PAUD)	30,56 (2022)

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
	4.3	Pada Tahun 2030 menjamin akses yang sama bagi semua Perempuan dan laki-laki terhadap Pendidikan tehnik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan tinggi (PT)	42,63 (2022)
	4.4.	Pada tahun 2030 meningkatkan secara significant jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan tehnik dan kejuruan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	a. 15 – 24 tahun : 94,81 (2022)
				b. 15 – 59 tahun :73,16 (2022)
	4.5	Pada tahun 2030 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat Pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi Masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, Masyarakat penduduk asli dan ank dalam kondisi rentan	Rasio angka partisipasi murni (APM) Perempuan/Laki-Laki di SMA/SMK/MA/Sederajat dan rasio angka partisipasi kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki	a. Laki-laki :60,27
				b. Perempuan : 60,88
				c. Laki-Laki dan Perempuan :60,57
	4.6	Pada tahun 2020 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun Perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 Tahun	93,83
			Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 24 Tahun	99,87
			Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 29 Tahun	97,39
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan			
	5.3	Menghapus semua praktek berbahaya seperti perkawinan usia	Proporsi Perempuan umur 20 – 24 tahun yang kawin	9,33 (2022)

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
		anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan	atau hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	
	5.5	Menjamin Partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi Perempuan untuk memimpin disemua Tingkat pengambilan Keputusan	Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen daerah	25,88 (2021)
			Proporsi Perempuan yang berada pada wilayah managerial	32,14 (2021)
	5.7	Meningkatkan penggunaan tehnologi yang memampukan, khuusnya tehnologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telopon genggam	69,83
6.	Menjamin ketersediann serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua			
	6.1	Pada Tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Persentase rumah yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	92,12
	6.2.	Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktek buang air besar ditempat sembarang, memberi perhatian khsuus pada kebutuhan kaum Perempuan serta kelompok masyarakat rentan	Proporsi polulasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	87,22 (2022)
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	92,24 (2022)
	6.3.	Pada tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separoh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan Kembali barang daur ulang yang aman secara global	Kualitas air permukaan sebagai air baku	52,38 (2020)
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua			
	7.1.	Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang	Rasio elektrifikasi	99,99

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
		terjangkau andal dan modern		
			Rasio penggunaan gas rumah tangga	93,53
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua			
	8.1.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestic bruto pertahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	4,11 (2022)
			PDRB perkapita atas dasar harga berlaku	65,59 juta rupiah (2022)
			PDRB perkapita atas dasar harga konstan	39,12 juta rupiah (2022)
	8.2	Mencapai Tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui deversifikasi, peningkatan dan inovasi tehnologi termasuk focus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB ril per orang bekerja pertahun	0,43 (2022)
	8.3	Menggalakkan kebijakan Pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	46,27 (2021)
			Persentase tenaga kerja formal	37,23
			Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	91,61 (2021)
	8.5.	Pada Tahun 2030 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua Perempuan dan laki-laki termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama lainnya	Upah rata-rata perjam pekerja (rupiah/jam)	17.257 (2022)
			Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	4,33

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
			Tingkat setengah pengangguran	7,09
	8.6	Pada tahun 2030, secara subtansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh Pendidikan atau pelatihan	Persentase usia muda (15 – 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	22,61
	8.9.	Pada Tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia menurut provinsi asal	9.858.971 (2021)
9.	Membangun infrfastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif yang berkelanjutan serta mendorong inovasi			
	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas andal, berkelanjutan dan Tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan focus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Jumlah transfortasi dan barang berdasarkan moda transfortasi :	
			a. Perkembangan Penumpang domestic angkutan udara	846,52
			b. Perkembangan penumpang internasional angkutan udara	31,76
			c. Perkembangan penunpang angkutan laut	70,82
			d. Perkembangan barang perdagangan dalam negeri	1,03
	9.7	Secara sifnifikan meningkatkan akses terhadap terhadap tehnologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang ditahun 2020	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	69,33
			Proporsi individu yang menggunakan internet	69,95
10.	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara			
	10.1	Pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada Tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Koefisien Gini	0,377

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
			Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	8,7
			Jumlah desa tertinggal	109 (2021)
			Jumlah desa mandiri	17 (2021)
	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktek yang diskriminatif dan mempromosikan legislasi kebijakan dan Tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	Indeks kebebasan sipil	83,39 (2022)
11.	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan			
	11.1.	Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman terjangkau termasuk penataan Kawasan kumuh serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	69,9 (2022)
	11.2.	Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap system transfortasi yang aman, terjangkau, mudah akses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transfortasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua	Proporsi pupolasi yang medapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	66,45 (2020)
			Persentase penduduk terlayani transfortasi umum	7,83
	11.6.	Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusu pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah perkotaan	Indeks kualitas udara	90,35
	11.7.	Pada tahun 2030 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk Perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kerasan dalam 12 bulan terakhir	0,04 (2020)

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
13.	Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya			
	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam disemua negara	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana	0
16	Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan yang berkelanjutan menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembangaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkat			
	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 tahun terakhir Sulawesi Selatan	0,04 (2021)
	16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di Tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lau yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik	32,00 (2021
	16.7	Menjamin pengambilan Keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representative di setiap tingkatan	Indeks Lembaga demokrasi Sulawesi Selatan	69,66 (2022)
	16.9	Pada tahun 2030, Memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Persentase anak umur 0 – 4 tahun yang memiliki akte kelahiran	78,30% (2021)
			Persentase anak berumur 0 – 17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran	78,31% (2021)
			Persentase anak berumur 0 – 17 tahun yang memiliki akta kelahiran	91,47 (2021)
17	Menguatkan saran pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan yang berkelanjutan			
	17.18	Mengoperasionalkan secara penuh baik tehnologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas tehnologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan tehnologi yang memampukan, khususnya tehnologi informasi dan komunikasi	Proporsi individu yang menggunakan internet	66,95
	17.18	Pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan	Perentase konsumen badan pusat statistic (BPS) yang	90,16

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian 2023
		kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil untuk meningkatkan secara signifikan ketresediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	merasa puas dengan kualitas data statistik	
			Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistic BPS sebagai rujukan utama	98,8
	17.19	Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan Pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestic bruto yang mendukung pengembangan kapasitas statiatik dinegara berkembang	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data Badan Pusat statistik	90,2
			Persentase konsumen yang menggunakan data badan pusat statistic dalam perencanaan dan evaluasi Pembangunan nasional	100

Sumber : Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan 2023 (BPS) dan Lampiran Perpres Nomor: 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2.6 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 2023

2.6.1 EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2023

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1. Mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel II.140.
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Dinas Pendidikan	6	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	1
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
3	UPT Transfusi Darah	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1
4	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah	4	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	1
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	3	3	2	3	3	2	2	0	0	1	1
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	1
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
15	Satuan Polisi Pamong Praja	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2
17	Dinas Sosial	7	6	6	6	6	6	6	6	1	0	0	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
20	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16	15	15	15	15	15	15	15	1	0	0	1
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
24	Dinas Perhubungan	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	10	9	9	9	9	9	9	9	1	0	0	1
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	2
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	10	10	10	10	10	10	10	1	0	0	1

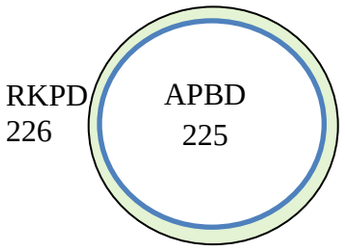
No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
38	Biro Hukum	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
39	Biro Organisasi	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
40	Biro Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
41	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	1
42	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
46	Badan Pendapatan Daerah	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	1
47	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
49	Badan Penghubung Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
50	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
	Jumlah	234	226	226	225	226	226	225	225	18	0	1	19

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

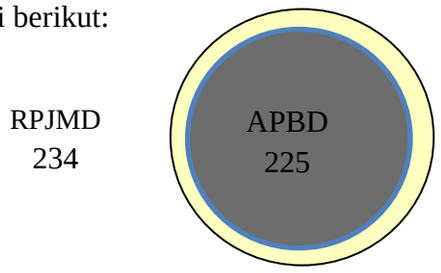
1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 234 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2023 juga berjumlah 226 program (jumlah pada kolom 4).
   b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 18 program diantara kedua dokumen tersebut**.**
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 226 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 226 program (jumlah pada kolom 5).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD sudah **konsisten.**
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 226 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 225 program (jumlah pada kolom 6). Untuk kesesuaian program yang sama antara RKPD dan APBD sejumlah 223 program namun, dari sejumlah program dalam RKPD dan APBD tersebut secara total jumlah terdapat selisih 1 yang tidak sama antara jumlah APBD dan RPKD (jumlah pada kolom 13).
   b. Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah program yang ada di RKPD namun tidak terdapat dalam APBD.

   Konsistensi program antara RKPD dan APBD tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



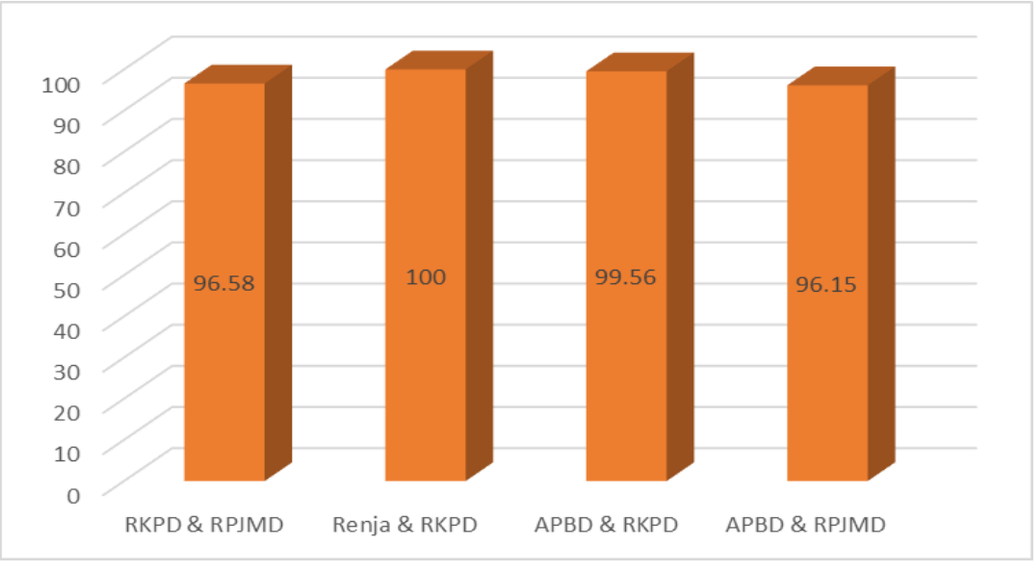
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 240 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 225 program (kolom 10). Dengan demikian terdapat 19 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 14).
   b. Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

   Konsistensi program antara RJPMD dan APBD tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Tingkat kesesuaian program dan kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik II.77.
Tingkat Kesesuaian Program
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penjabaran jumlah program RPJMD ke dalam RKPD secara umum sudah dilaksankan secara normative sesuai yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam kedua dokumen perencanaan tersebut, Sementara untuk Renja OPD terhadap RKPD sudah konsisten. Namun demikian, dalam penjabaran program RKPD ke dalam APBD hanya sebesar 99,56 Persen hal ini disebabkan terdapat selisih lebih 1 program sedangkan Penjabaran RPJMD kedalam APBD juga masih belum mencapai 100%, perbedaan tersebut karena terdapat beberapa program tidak mendapatkan alokasi Anggaran yang dikarenakan oleh kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II.141.
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	14	14	14	14	14	14	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	18	18	18	18	18	18	0	0	0
3	UPT Transfusi Darah	6	6	6	6	6	6	0	0	0
4	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah	12	12	12	12	12	12	0	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	4	4	3	4	3	3	0	1	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	9	9	9	9	9	9	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	4	4	4	4	4	4	0	0	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	4	4	4	4	4	4	0	0	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	4	4	4	4	4	0	0	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	5	5	5	5	5	5	0	0	0
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	4	4	4	4	4	4	0	0	0
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	21	20	21	20	20	20	1	1	0
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	13	13	13	13	13	13	0	0	0
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18	18	17	18	17	17	0	1	1
15	Satuan Polisi Pamong Praja	16	16	16	16	16	16	0	0	0
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	10	10	10	0	0	0
17	Dinas Sosial	15	15	14	15	14	14	0	1	1
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	20	20	20	20	20	0	0	0
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23	23	22	23	22	22	0	1	1
20	Dinas Ketahanan Pangan	16	16	15	16	15	15	0	1	1
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32	32	32	32	32	32	0	0	0
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	16	16	16	16	16	0	0	0
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	12	12	12	12	12	0	0	0
24	Dinas Perhubungan	20	20	20	20	20	20	0	0	0
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	11	10	11	10	10	10	1	1	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15	15	15	15	15	15	0	0	0
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	13	13	13	13	0	0	0
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16	16	15	16	15	15	0	1	1
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	21	21	20	21	20	20	0	1	1
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17	17	16	17	16	16	0	1	1
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	22	20	22	20	20	20	2	2	0
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13	12	13	12	12	12	1	1	0
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	8	8	8	8	8	0	0	0
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17	16	17	16	16	16	1	1	0
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22	22	19	22	19	19	0	3	3
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7	7	7	7	7	7	0	0	0
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	11	11	11	11	11	11	0	0	0
38	Biro Hukum	9	9	9	9	9	9	0	0	0
39	Biro Organisasi	10	10	10	10	10	10	0	0	0
40	Biro Umum	10	10	10	10	10	10	0	0	0
41	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	18	18	17	18	17	17	0	1	1
42	Biro Pengadaan Barang/Jasa	9	8	7	8	7	7	1	2	1
43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	18	18	18	18	18	18	0	0	0
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18	18	18	18	18	18	0	0	0
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14	14	14	14	14	14	0	0	0
46	Badan Pendapatan Daerah	12	12	12	12	12	12	0	0	0
47	Badan Kepegawaian Daerah	12	12	12	12	12	12	0	0	0
48	Badan Pengembangan Sumber Daya	9	9	8	9	8	8	0	1	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Manusia									
49	Badan Penghubung Daerah	7	7	7	7	7	7	0	0	0
50	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	12	12	12	12	12	12	0	0	0
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	13	13	13	13	13	0	0	0
	Jumlah	**680**	**673**	**665**	**673**	**659**	**659**	**7**	**21**	**14**

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 680 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 673 (jumlah pada kolom 4).
   b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen terdapat selisih sebesar 7 kegiatan (jumlah pada kolom 9).
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 98,79%.
2. RKPD dan APBD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 680 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 665 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 659 (jumlah pada kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 21 kegiatan (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 21 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 97.79%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan anggaran dalam pelaksaan kegiatan yang masih kurang.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2023 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja Perangkat daerah, RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II.142.
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	95	95	95	95	95	95	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	57	57	58	57	57	57	0	1	1
3	UPT Transfusi Darah	13	13	13	13	13	13	0	0	0
4	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah	24	24	23	24	23	23	0	1	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	21	21	21	21	21	21	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	5	5	5	5	5	5	0	0	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	5	5	5	5	5	0	0	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	5	5	5	5	5	0	0	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	6	6	6	6	6	6	0	0	0
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	6	6	6	6	6	6	0	0	0
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	58	58	64	58	58	58	0	6	6
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	44	44	48	44	44	44	0	4	4
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	58	58	58	58	58	58	0	0	0
15	Satuan Polisi Pamong Praja	46	46	46	46	46	46	0	0	0
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	32	32	32	32	32	0	0	0
17	Dinas Sosial	44	44	44	44	44	44	0	0	0
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41	41	41	41	41	41	0	0	0
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	46	46	46	46	46	0	0	0
20	Dinas Ketahanan Pangan	48	48	48	48	48	48	0	0	0
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80	80	82	80	80	80	0	2	2
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42	42	42	42	42	42	0	0	0
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	41	41	41	41	41	0	0	0
24	Dinas Perhubungan	39	39	39	39	39	39	0	0	0
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	28	28	32	28	28	28	0	4	4
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26	26	28	26	26	26	0	2	2
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38	38	38	38	38	38	0	0	0
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49	49	51	49	49	49	0	2	2
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	45	45	47	45	45	45	0	2	2
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39	39	39	39	39	39	0	0	0
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	56	56	67	56	56	56	0	11	11
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31	31	33	31	31	31	0	2	2
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16	16	21	16	16	16	0	5	5
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37	37	38	37	37	37	0	1	1
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40	40	40	40	40	40	0	0	0
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	18	18	18	18	18	18	0	0	0
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	31	31	32	31	31	31	0	1	1
38	Biro Hukum	20	20	21	20	20	20	0	1	1
39	Biro Organisasi	27	27	28	27	27	27	0	1	1
40	Biro Umum	39	39	40	39	39	39	0	1	1
41	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	32	32	33	32	32	32	0	1	1
42	Biro Pengadaan Barang/Jasa	17	17	18	17	17	17	0	1	1
43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	75	75	76	75	75	75	0	1	1
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	65	65	65	65	65	65	0	0	0
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	62	62	62	62	62	62	0	0	0
46	Badan Pendapatan Daerah	76	76	77	76	76	76	0	1	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47	Badan Kepegawaian Daerah	70	70	71	70	70	70	0	1	1
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29	29	30	29	29	29	0	1	1
49	Badan Penghubung Daerah	16	16	19	16	16	16	0	3	3
50	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	48	48	49	48	48	48	0	1	1
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51	51	54	51	51	51	0	3	3
	Jumlah	**1940**	**1940**	**1998**	**1940**	**1939**	**1939**	**0**	**60**	**60**

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1940 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 1940 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten.
   b. Untuk jumlah sub kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100%.
2. RKPD dan APBD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1940 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1998 (jumlah pada kolom 5). Terdapat perbedaan Jumlah subkegiatan sebanyak 60 Subkegiatan ((jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 60 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan pada RKPD yang tidak dianggarkan namun dalam APBD mendapatkan alokasi Anggaran.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 102.98%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan alokasi anggaran dalam pelaksaan sub kegiatan.
3. Renja-PD dan APBD
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1940 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1998 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1939 (jumlah pada kolom 8), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 60 (jumlah pada kolom 11).

Dari 60 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan pada RKPD yang tidak dianggarkan namun dalam APBD mendapatkan alokasi Anggaran.

B. Konsistensi Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan

apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.143.
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
1	Dinas Pendidikan	3,035,072,969,147.82	3,033,067,969,147.00	99.93	3,033,067,969,147.00	100.00	3,117,910,013,772.00	102.73	(2,005,000,001)	84,842,044,625.00	-5%	82,837,044,624.18	-6%
2	Dinas Kesehatan	190,605,115,937.00	198,019,072,434.00	103.89	198,019,072,434.00	100.00	288,126,681,277.00	151.16	7,413,956,497	90,107,608,843.00	-5%	97,521,565,340.00	-8%
3	UPT Transfusi Darah	17,057,748,860.76	16,917,748,861.00	99.18	16,917,748,861.00	100.00	12,178,770,426.00	71.40	(140,000,000)	(4,738,978,435.00)	0%	(4,878,978,434.76)	0%
4	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah	8,521,921,652.21	8,521,921,652.00	100.00	8,521,921,652.00	100.00	8,613,153,494.00	101.07	(0)	91,231,842.00	0%	91,231,841.79	0%
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	24,802,045,395.94	24,802,045,396.94	100.00	24,802,045,396.94	100.00	15,281,678,898.00	61.61	1	(9,520,366,498.94)	1%	(9,520,366,497.94)	1%
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	176,817,805,894.49	176,817,805,894.00	100.00	176,817,805,894.00	100.00	162,890,187,190.00	92.12	(0)	(13,927,618,704.00)	1%	(13,927,618,704.49)	1%
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	139,238,459,131.20	139,238,459,131.00	100.00	139,238,459,131.00	100.00	125,308,404,564.00	90.00	(0)	(13,930,054,567.00)	1%	(13,930,054,567.20)	1%
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	181,793,019,210.49	181,793,019,210.49	100.00	181,793,019,210.49	100.00	128,927,586,978.00	70.92	-	(52,865,432,232.49)	3%	(52,865,432,232.49)	4%
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	42,482,635,219.66	41,952,635,219.66	98.75	41,952,635,219.66	100.00	39,256,981,690.00	92.41	(530,000,000)	(2,695,653,529.66)	0%	(3,225,653,529.66)	0%
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	46,954,723,169.70	46,554,723,169.70	99.15	46,554,723,169.70	100.00	37,088,930,170.00	78.99	(400,000,000)	(9,465,792,999.70)	1%	(9,865,792,999.70)	1%
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	62,557,525,837.08	61,697,525,836.59	98.63	61,697,525,836.59	100.00	55,390,332,924.00	88.54	(860,000,000)	(6,307,192,912.59)	0%	(7,167,192,913.08)	1%
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	531,036,680,381.47	249,745,442,398.75	47.03	249,745,442,398.75	100.00	167,428,530,646.00	31.53	(281,291,237,983)	(82,316,911,752.75)	4%	(363,608,149,735.47)	28%
13	Dinas Bina Marga dan Bina	227,587,148,734.92	308,254,959,536.63	135.44	308,254,959,536.63	100.00	237,177,773,109.00	104.21	80,667,810,802	(71,077,186,427.63)	4%	9,590,624,374.08	-1%

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
	Konstruksi												
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	51,936,929,055.00	51,936,929,055.00	100.00	51,936,929,055.00	100.00	36,846,640,064.00	70.94	-	(15,090,288,991.00)	1%	(15,090,288,991.00)	1%
15	Satuan Polisi Pamong Praja	42,750,318,359.67	46,702,735,091.00	109.25	46,702,735,091.00	100.00	50,781,622,592.00	118.79	3,952,416,731	4,078,887,501.00	0%	8,031,304,232.33	-1%
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65,753,373,110.00	59,432,212,170.00	90.39	59,432,212,170.00	100.00	19,140,840,910.00	29.11	(6,321,160,940)	(40,291,371,260.00)	2%	(46,612,532,200.00)	4%
17	Dinas Sosial	75,907,875,008.76	74,131,818,239.00	97.66	74,131,818,239.00	100.00	49,981,924,673.00	65.85	(1,776,056,770)	(24,149,893,566.00)	1%	(25,925,950,335.76)	2%
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39,747,657,208.50	38,423,479,310.00	96.67	38,423,479,310.00	100.00	38,423,479,310.00	96.67	(1,324,177,899)	-	0%	(1,324,177,898.50)	0%
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20,727,200,121.92	18,674,922,921.00	90.10	18,674,922,921.00	100.00	18,411,416,482.00	88.83	(2,052,277,201)	(263,506,439.00)	0%	(2,315,783,639.92)	0%
20	Dinas Ketahanan Pangan	42,353,705,686.45	1,043,648,004,714.10	2,464.12	1,043,648,004,714.10	100.00	24,635,492,911.00	58.17	1,001,294,299,028	(1,019,012,511,803.10)	55%	(17,718,212,775.45)	1%
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	195,436,434,486.46	143,710,195,326.35	73.53	143,710,195,326.35	100.00	92,800,400,587.00	47.48	(51,726,239,160)	(50,909,794,739.35)	3%	(102,636,033,899.46)	8%
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18,278,328,882.98	18,213,328,882.98	99.64	18,213,328,882.98	100.00	10,381,108,310.00	56.79	(65,000,000)	(7,832,220,572.98)	0%	(7,897,220,572.98)	1%
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29,774,702,071.78	27,061,901,647.00	90.89	27,061,901,647.00	100.00	27,535,927,168.00	92.48	(2,712,800,425)	474,025,521.00	0%	(2,238,774,903.78)	0%
24	Dinas Perhubungan	94,765,068,389.21	95,422,080,089.00	100.69	95,422,080,089.00	100.00	41,730,689,323.00	44.04	657,011,700	(53,691,390,766.00)	3%	(53,034,379,066.21)	4%

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	39,206,670,617.75	31,771,670,618.00	81.04	31,771,670,618.00	100.00	61,623,242,840.00	157.18	(7,435,000,000)	29,851,572,222.00	-2%	22,416,572,222.25	-2%
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	47,975,923,757.80	42,751,313,848.00	89.11	42,751,313,848.00	100.00	28,949,940,574.00	60.34	(5,224,609,910)	(13,801,373,274.00)	1%	(19,025,983,183.80)	1%
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24,255,796,854.91	24,255,796,855.00	100.00	24,255,796,855.00	100.00	19,340,080,449.00	79.73	0	(4,915,716,406.00)	0%	(4,915,716,405.91)	0%
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43,368,448,707.56	40,980,948,708.00	94.49	40,980,948,708.00	100.00	55,984,041,304.00	129.09	(2,387,500,000)	15,003,092,596.00	-1%	12,615,592,596.44	-1%
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	89,348,800,712.00	88,948,800,712.00	99.55	88,948,800,712.00	100.00	42,055,669,058.00	47.07	(400,000,000)	(46,893,131,654.00)	3%	(47,293,131,654.00)	4%
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45,206,184,676.23	75,931,206,834.00	167.97	75,931,206,834.00	100.00	42,528,104,860.00	94.08	30,725,022,158	(33,403,101,974.00)	2%	(2,678,079,816.23)	0%
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	110,739,562,704.60	206,230,541,274.93	186.23	206,230,541,274.93	100.00	100,020,581,653.00	90.32	95,490,978,570	(106,209,959,621.93)	6%	(10,718,981,051.60)	1%
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,079,575,738.00	83,254,734,203.00	97.86	83,254,734,203.00	100.00	35,069,096,149.00	41.22	(1,824,841,535)	(48,185,638,054.00)	3%	(50,010,479,589.00)	4%
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	490,018,971,275.11	566,920,523,311.00	115.69	566,920,523,311.00	100.00	594,437,042,381.00	121.31	76,901,552,036	27,516,519,070.00	-1%	104,418,071,105.89	-8%
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	40,094,867,033.00	39,785,115,108.00	99.23	39,785,115,108.00	100.00	22,539,699,098.00	56.22	(309,751,925)	(17,245,416,010.00)	1%	(17,555,167,935.00)	1%
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63,399,015,597.81	45,913,842,262.44	72.42	45,913,842,262.44	100.00	35,582,237,672.00	56.12	(17,485,173,335)	(10,331,604,590.44)	1%	(27,816,777,925.81)	2%
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7,564,749,061.59	7,564,749,062.00	100.00	7,564,749,062.00	100.00	3,816,552,772.00	50.45	0	(3,748,196,290.00)	0%	(3,748,196,289.59)	0%

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	1,230,102,161,415.20	1,230,307,161,415.00	100.02	1,230,307,161,415.00	100.00	62,875,975,392.00	5.11	205,000,000	(1,167,431,186,023.00)	63%	(1,167,226,186,023.20)	91%
38	Biro Hukum	24,092,944,771.75	23,852,944,771.75	99.00	23,852,944,771.75	100.00	23,667,580,048.00	98.23	(240,000,000)	(185,364,723.75)	0%	(425,364,723.75)	0%
39	Biro Organisasi	12,859,200,706.00	12,854,200,706.00	99.96	12,854,200,706.00	100.00	4,226,538,960.00	32.87	(5,000,000)	(8,627,661,746.00)	0%	(8,632,661,746.00)	1%
40	Biro Umum	204,071,218,622.59	204,064,218,623.00	100.00	204,064,218,623.00	100.00	194,967,740,111.00	95.54	(7,000,000)	(9,096,478,512.00)	0%	(9,103,478,511.59)	1%
41	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	10,057,328,624.24	132,205,270,793.00	1,314.52	132,205,270,793.00	100.00	7,084,462,724.00	70.44	122,147,942,169	(125,120,808,069.00)	7%	(2,972,865,900.24)	0%
42	Biro Pengadaan Barang/Jasa	8,511,676,759.62	8,282,066,684.31	97.30	8,282,066,684.31	100.00	3,573,906,217.00	41.99	(229,610,075)	(4,708,160,467.31)	0%	(4,937,770,542.62)	0%
43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	400,721,261,671.34	400,721,261,671.34	100.00	400,721,261,671.34	100.00	332,481,809,450.00	82.97	-	(68,239,452,221.34)	4%	(68,239,452,221.34)	5%
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	79,302,218,106.59	70,006,390,752.75	88.28	70,006,390,752.75	100.00	53,891,396,652.00	67.96	(9,295,827,354)	(16,114,994,100.75)	1%	(25,410,821,454.59)	2%
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,711,999,011,920.84	2,272,958,684,664.00	83.81	2,272,958,684,664.00	100.00	2,846,715,807,816.00	104.97	(439,040,327,257)	573,757,123,152.00	-31%	134,716,795,895.16	-11%
46	Badan Pendapatan Daerah	196,215,531,579.21	186,292,089,415.97	94.94	186,292,089,415.97	100.00	199,061,156,579.00	101.45	(9,923,442,163)	12,769,067,163.03	-1%	2,845,624,999.79	0%
47	Badan Kepegawaian Daerah	31,532,028,777.00	29,057,475,657.92	92.15	29,057,475,657.92	100.00	28,573,224,728.00	90.62	(2,474,553,119)	(484,250,929.92)	0%	(2,958,804,049.00)	0%
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40,021,689,487.77	40,021,689,487.00	100.00	40,021,689,487.00	100.00	28,344,480,835.00	70.82	(1)	(11,677,208,652.00)	1%	(11,677,208,652.77)	1%
49	Badan Penghubung Daerah	25,412,376,716.00	24,541,197,716.00	96.57	24,541,197,716.00	100.00	20,208,424,736.00	79.52	(871,179,000)	(4,332,772,980.00)	0%	(5,203,951,980.00)	0%
50	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	66,011,230,895.42	65,427,499,912.00	99.12	65,427,499,912.00	100.00	47,496,542,954.00	71.95	(583,730,983)	(17,930,956,958.00)	1%	(18,514,687,941.42)	1%

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27,669,961,765.07	27,669,961,765.07	100.00	27,669,961,765.07	100.00	291,069,492,613.00	1,051.93	0	263,399,530,847.93	-14%	263,399,530,847.93	-21%
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	66,011,230,895.42	65,427,499,912.00	99.12	65,427,499,912.00	100.00	47,496,542,954.00	71.95	(583,730,983)	(17,930,956,958.00)	1%	(18,514,687,941.42)	1%
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27,669,961,765.07	27,669,961,765.07	100.00	27,669,961,765.07	100.00	291,069,492,613.00	1,051.93	0	263,399,530,847.93	-14%	263,399,530,847.93	-21%
JUMLAH		**11,610,478,992,169.00**	**12,180,409,753,841.70**	**104.91**	**12,180,409,753,841.70**	**100.00**	**10,330,999,431,660.00**	**88.98**	**569,930,761,672.77**	**(1,849,410,322,181.74)**	**100%**	**(1,279,479,560,508.97)**	**100%**

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2024

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas, antara lain adalah sebagai berikut:

a. RKPD terhadap RPJMD
   1) Jumlah pagu indikatif di dalam RKPD terdapat perbedaan dengan kerangka pendanaan RPJMD, dimana dalam RPJMD sebesar Rp.11.610.478.992.169.00 sementara dalam RKPD sebesar Rp12.180.409.753.841.70 Dengan demikian terdapat selisih Rp.569.930.761.672.77 atau 1.00%
   2) Pagu indikatif RKPD dan kerangka pendanaan RPJMD diperuntukkan pada semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

b. APBD terhadap RKPD
   1) Jumlah pagu indikatif di dalam APBD terdapat perbedaan terhadap kerangka pendanaan di dalam RKPD, dimana dalam APBD sebesar Rp.10.330.999.431.660.00 sementara dalam RKPD sebesar Rp.12.180.409.753.841.70 Dengan demikian terdapat selisih Rp. 95,231,282,193.20 atau 15.18%
   2) Pada APBD terdapat 9 (sembilan) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan angggaran yang lebih besar dari pagu RKPD dengan persentase penambahan, sejumlah 44 (Empat puluh empat) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD.

c. APBD terhadap RPJMD
   1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RPJMD secara persentase belih sebesar 11.02% dari pada RPJMD, dengan total selisih Rp.1.279.479.560.508.97.

Pada APBD terdapat 9 (Sembilan) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan angggaran yang lebih besar dari pagu RPJMD, sejumlah 44 (Empat puluh empat) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu indikatif RPJMD.

C. Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023

Terkait penggambaran Pelaksanaan Capaian Kinerja pada subkegiatan pada pelaksanan RKPD tahun 2021 terdapat 1846 Subkegiatan dengan jumlah indikator sebanyak 3085 dengan rata-rata capaian kinerja outcome 87.49% dengan interpretasi Tinggi (T) dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 68.84% dengan interpretasi Sedang (S) untuk penggambaran pencapaian kinerja subkegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel II.144.
Capaian SubKegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
(1)	*(2)*	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	95	154	119	0	35	100.00	75.31	T	T
2	Dinas Kesehatan	57	347	255	83	9	31.22	10.23	R	R
3	UPT Transfusi Darah	13	13	0	12	1	100.00	75.22	T	T

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
4	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah	24	24	2	22	0	91.67	88.60	T	T
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	5	3	1	1	99.45	38.91	T	R
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	21	22	0	21	1	100.00	135.17	T	ST
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	5	6	1	4	1	100.01	80.28	ST	T
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	5	4	0	1	57.81	91.41	R	T
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	5	5	0	0	52.09	71.17	R	R
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	6	6	5	0	1	55.36	65.94	R	R
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	6	6	1	3	2	100.00	98.57	T	T
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	58	105	15	66	24	100.00	39.14	T	R
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	44	48	20	24	4	82.05	86.46	T	T
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	58	68	14	52	2	93.83	67.73	T	R
15	Satuan Polisi Pamong Praja	46	51	8	43	0	91.01	77.49	T	T
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	32	17	12	3	100.00	91.15	T	T
17	Dinas Sosial	44	70	41	29	0	75.30	56.98	T	R
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41	46	4	35	7	100.00	76.49	T	T
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	46	26	5	15	69.39	80.00	R	T
20	Dinas Ketahanan Pangan	48	48	9	35	4	96.48	82.07	T	T
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80	112	56	46	10	89.13	42.68	T	R
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42	43	3	0	40	100.00	93.03	T	T
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	41	1	40	0	97.56	84.32	T	T
24	Dinas Perhubungan	39	40	6	33	1	96.92	80.61	T	T
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	28	32	1	25	6	99.73	72.90	T	R
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26	29	24	5	0	54.71	87.34	R	T
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38	55	2	47	6	100.00	55.45	T	R
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49	119	21	98	0	82.56	40.66	T	R
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	45	52	14	32	6	100.00	82.75	T	T
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39	39	5	30	4	100.00	98.91	T	T
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	56	69	26	37	6	85.39	64.60	T	R
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31	104	78	17	9	100.00	25.21	T	R
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16	89	79	2	8	100.00	15.25	T	R
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37	38	2	31	5	100.00	78.20	T	T
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40	48	29	13	6	77.45	59.65	T	R
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	18	23	0	23	0	100.00	73.00	T	R
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	31	43	6	36	1	96.64	69.92	T	R
38	Biro Hukum	20	26	22	4	0	57.51	70.75	R	R
39	Biro Organisasi	27	37	6	26	5	100.00	69.58	T	R
40	Biro Umum	39	40	5	1	34	100.00	77.56	T	T
41	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	32	35	21	14	0	53.87	85.59	R	T

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
42	Biro Pengadaan Barang/Jasa	17	18	3	15	0	94.93	90.18	T	T
43	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	75	75	60	2	13	100.00	86.04	T	T
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	65	65	6	53	6	99.13	87.48	T	T
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	62	62	12	50	0	92.44	84.18	T	T
46	Badan Pendapatan Daerah	76	77	1	76	0	98.70	74.89	T	R
47	Badan Kepegawaian Daerah	70	71	2	69	0	98.54	98.51	T	T
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29	30	4	26	0	97.59	88.36	T	T
49	Badan Penghubung Daerah	16	19	4	15	0	84.06	65.73	T	R
50	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	48	49	9	38	2	92.81	92.77	T	T
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51	65	3	60	2	100.00	66.24	T	R
	Jumlah	**1940**	**2752**	**1060**	**1411**	**281**	**89.12**	**73.54**	**T**	**R**

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja subkegiatan dengan jumlah sukegiatan sebanyak 1940 menunjukkan pencapaian kinerja subKegiatan yang mendapat predikat tinggi (T), dengan interpretasi pencapaian yakni: terdapat 1060 Subkegiatan yang belum tercapai atau secara persentase mencapai 38.51%, untuk Kegiatan dengan interpretasi sesuai sebanyak 1411 atau 51.27% dan ada 281 capaian Kegiatan yang melampaui atau sebesar 10.21%.

Capaian outcome program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.145.
Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2023

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Dinas Pendidikan	13	34.83	13	0	0
2	Dinas Kesehatan	14	27.44	10	2	2
3	UPT Transfusi Darah	4	39.51	4	0	0
4	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah	6	42.45	0	6	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	5	22.86	4	1	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	5	56.56	2	3	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	5	58.05	2	3	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	4	43.90	0	2	2
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	43.32	4	0	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	4	34.44	4	0	0
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	4	49.02	0	4	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	14	31.42	13	1	0
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	6	45.74	4	1	1
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13	49.97	1	12	0
15	Satuan Polisi Pamong Praja	6	55.01	2	4	0
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	29.61	0	0	6
17	Dinas Sosial	13	41.35	11	2	0
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	44.33	2	6	9
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	64.26	2	0	11
20	Dinas Ketahanan Pangan	11	40.08	5	3	3
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20	50.93	6	9	5
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	32.68	0	0	15
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	39.93	5	6	1
24	Dinas Perhubungan	13	26.02	13	0	0
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	8	49.91	1	7	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	49.23	13	0	1
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	55.49	2	6	1
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	55.56	2	5	0
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	14	54.66	10	1	3
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	66.12	1	5	0
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	18	21.64	6	2	10
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	35.18	6	2	1
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16	27.48	9	1	6
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9	46.28	2	5	2
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13	56.90	7	3	3
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4	47.87	1	3	0
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	6	30.31	3	1	2
38	Biro Hukum	5	36.89	5	0	0
39	Biro Organisasi	4	46.57	4	0	0
40	Biro Umum	3	29.57	0	0	3
41	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	8	29.13	7	1	0
42	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6	30.01	6	0	0
43	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	31.83	6	0	0
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9	38.01	0	7	2

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10	26.26	3	5	2
46	Badan Pendapatan Daerah	5	48.32	0	5	0
47	Badan Kepegawaian Daerah	6	32.39	1	5	0
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	45.47	1	3	0
49	Badan Penghubung Daerah	5	34.02	0	5	0
50	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	9	31.81	2	7	0
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	53.32	1	6	2
	Jumlah	**449**	**41.45**	**206**	**150**	**93**

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat 449 indikator kinerja outcome dalam RKPD Tahun 2023.
2. Rata-rata capaian kinerja anggaran seluruh program pembangunan daerah tersebut adalah 41.45%.
3. Sejumlah 206 outcome belum mencapai target dari yang ditetapkan, sementara 150 outcome mencapai target 100%, dan 93 outcome melampaui target yang ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan realisasi program dan kegiatan RKPD berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
   1) Faktor utama yang mempengaruhi Tidak tercapainya target indikator antara lain tidak dialokasikannya Anggaran dalam APBD.
   2) recofusing anggaran sehingga diperlukan penataan ulang penggangaran dan belanja daerah
   3) Tidak diperoleh data yang valid dan terferifikasi dari perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab program/kegiatan.
   4) Tidak dilaksanakan karena perubahan peraturan perundangan dan/ atau kewenangan yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan.
   5) Permasalahan teknis lainnya seperti, lelang yang terlambat, cuaca, dan lain-lain.

b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
   1) Dianggarkan dalam APBD.
   2) Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
   3) Anggaran yang tersedia mencukup untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

c. Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
   1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN.
   2) Dukungan stakeholders terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
   3) Penetapan target lebih rendah dari anggaran yang tersedia.
   4) Adanya rescheduling pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
   1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
   2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
   3) Pengelolaan data yang baik.

D. Review Capaian Kinerja RPJMD

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.146.
Review Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter																			
	Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif																		
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Huruf/Angka**	**B**	**A (81 – 90)**							**A (81 – 90)**							
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**Nilai SAKIP Provinsi**	**Huruf/Angka**	**B**		**85,502,119,309**						**A(>80 – 90)**		**85.57**	**46.49**	belum tercapai	T	R	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	Persentasi	5%	100 %	6,330,130,000	100.0	1,444,200,669.0	100.0	22.81	Sesuai	100 %	17,318,187,264.0	100.00	22.81	sesuai	ST	R	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan	Persentasi	57%	65 %	6,415,458,969	65.0	3,464,394,177.0	100.0	54.00	Sesuai	65 %	18,421,808,344.0	100.00	54.00	sesuai	ST	S	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		pegawai ASN																	
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Persentasi	88%	95 %		95.0		100.0		Sesuai	95 %		100.00		sesuai	ST		Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	Persentase	80%	100 %		100.0		100.0		Sesuai	100 %		100.00		sesuai	ST		Badan Kepegawaian Daerah
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	Persentasi	100%	100 %	9,280,135,220	100.0	1,992,119,438.0	100.0	21.47	Sesuai	100 %	20,430,198,499.0	100.00	21.47	sesuai	ST	R	Biro Organisasi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentasi	97%	75.5 %	16,094,112,029	75.5	12,686,841,057.0	100.0	78.83	Sesuai	75.5 %	40,942,685,595.0	100.00	78.83	sesuai	ST	T	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
		% Penyelesaian tindak lanjut	Persentase	97%	79.5 %		79.5		100.0		Sesuai	79.5 %		100.00		sesuai	ST		Inspektorat Provinsi Sulawesi

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP																	Selatan
		% OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat (Prioritas)	Persentase	100	100%		100.0		100.0		Sesuai	100%		100.00		sesuai	ST		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD (Prioritas)	Persentasi	100%	100 %	15,627,002,010	100.0	7,926,067,386.0	100.0	50.72	Sesuai	100 %	44,307,794,712.6	100.00	50.72	sesuai	ST	S	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase peningkatan capaian kinerja program (Prioritas)	Persentasi	100	0.5 %		0.5		100.0		Sesuai	0.5 %		100.00		sesuai	ST		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	indeks	60%	3.2 %	4,500,000,000	3.1	6,892,254,099.0	96.6	153.16	Belum Tercapai	3.2 %	12,299,568,236.0	96.56	153.16	belum tercapai	ST	ST	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
7	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai	Nilai 2.40	5 Nilai	20,993,044,772	3.0	21,012,414,826.0	60.0	100.09	Belum Tercapai	5 Nilai	60,516,812,875.5	60.00	100.09	belum tercapai	R	ST	Biro Hukum

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	HUKUM	pada Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
		Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	Persentasi	100	100 %		90.0		90.0		Belum Tercapai	100 %		90.00		belum tercapai	T		Biro Hukum
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	Persentasi	11.81% dari 1.524 BUMDES	11.81 %	6,262,236,309	2.0	4,204,396,930.0	16.9	67.14	Belum Tercapai	11.81 %	901,936,800.0	16.93	67.14	belum tercapai	SR	S	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa yang diFasilitasi	Persentasi	2.255 DESA	25.05 %		5.0		20.0		Belum Tercapai	25.05 %		20.00		belum tercapai	SR		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Indeks Pelayanan Publik**	**indeks**	**B**		**27,749,170,618**						**A (4,51 – 5,0)**		**231.25**	**85.20**	Melampaui	ST	T	
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	Persentasi	100	3 %	6,992,500,000	18.8	1,985,484,542.0	625.0	28.39	Melampaui	3 %	24,666,924,704.0	625.00	28.39	Melampaui	ST	R	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10	PROGRAM	Persentase	Persentasi	80%	100 %				100.0	149.68	Sesuai	100 %		100.00	149.68	sesuai	ST	ST	Dinas

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	layanan informasi dan komunikasi publik				19,256,670,618	100.0	28,823,217,011.0					52,201,805,118.0						Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
		Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	Persentasi	100%	100 %		100.0		100.0		Sesuai	100 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persentase		84 %	1,500,000,000	84.0	370,495,871.0	100.0	24.70	Sesuai	84 %	4,315,672,696.0	100.00	24.70	sesuai	ST	R	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel																		
	Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	**Indeks Williamson**	**Indeks**	**0.639**	**0.600**							**0.600**							
	Sasaran 3: Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**76.06**		**353,441,833,382**						**83.4**		**67.83**	**108.22**	belum tercapai	S	ST	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase	58	75.09 %	187,201,679,087	75.4	188,106,108,393.0	100.4	100.48	Melampaui	75.09 %	654,609,506,590.0	100.39	100.48	Melampaui	ST	ST	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase	Persentase	20.48%	80 %				34.0		Belum Tercapai	80 %		34.01		belum	SR		Dinas Bina

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)					27.2									tercapai			Marga dan Bina Konstruksi
13	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	Orang		1105000	27,000,100,000	100.0	891,189,751.0	0.0	3.30	Belum Tercapai	1105000	110,840,772,580.0	0.01	3.30	belum tercapai	SR	R	Dinas Perhubungan
		Persentase pelabuhan yang beroperasi	Persentase	100	0 %		10.0		100.0		Sesuai	0 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Perhubungan
14	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase	97%	99 %	16,277,888,192	99.0	1,765,515,206.0	100.0	10.85	Sesuai	99 %	47,218,853,801.0	100.00	10.85	sesuai	ST	R	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	Persentase		99.5 %		100.0		100.5		Melampaui	99.5 %		100.50		Melampaui	ST		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA (SPM/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Prioritas)	Persentase	59.33%	63.37 %	87,263,073,569	45.0	52,655,600,989.0	71.0	60.34	Belum Tercapai	63.37 %	311,204,721,172.0	71.01	60.34	belum tercapai	S	S	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Cakupan	Persentase	100%	100 %				25.9		Belum Tercapai	100 %		25.86		belum	SR		Dinas

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai					25.9									tercapai			Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	Persentase	89.77	93 %	9,765,813,300	93.0	11,813,288,549.8	100.0	120.97	Sesuai	93 %	16,212,208,960.0	100.00	120.97	sesuai	ST	ST	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	Persentase	2.84	100 %		100.0		100.0		Sesuai	100 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	Persentase	17.10	100 %		100.0		100.0		Sesuai	100 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	Persentase	74%	89.62 %	25,933,279,234	-	111,878,930.0	-	0.43	Belum Tercapai	89.62 %	51,108,112,187.0	0.00	0.43	belum tercapai	SR	R	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Cakupan Pembinaan	Persentase	100	100 %		50.0		50.0		Belum Tercapai	100 %		50.00		belum tercapai	SR		Dinas Sumber

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Layanan Air Minum Kab/Kota (SPM)																	Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif																		
	Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	**PDRB Perkapita**	**Juta Rp.**	**56,98**	**65,98**							**65,98**							
		Angka Kemiskinan	**%**	**8.69**	**7.45**							**7.45**							
	Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	**Tingkat Penganggur an Terbuka (TPT)**	**%**	**4.62**		**155,070,893,083**						**6.27**		**95.01**	**24.86**	belum tercapai	ST	R	
18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	Persentase	20	1 %	11,371,340,438	0.6	1,027,321,452.0	62.0	9.03	Belum Tercapai	1 %	28,586,492,063.0	62.00	9.03	belum tercapai	R	R	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
		Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	Persentase	30	20.8 %		4.2		20.0		Belum Tercapai	20.8 %		20.05		belum tercapai	SR		Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
19	PROGRAM PEMASARAN	Persentase Capaian	Peningkata	58.27	100 %	23,627,767,371	14.8	5,819,548,319.	14.8	24.63	Belum Tercapai	100 %	66,210,377,54	14.79	24.63	belum tercapai	SR	R	Dinas Kebudayaan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PARIWISATA	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) (Prioritas)	n Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)					0					8.0						Dan Kepariwisataan
		Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) (Prioritas)	Persentase	116	100 %		184.5		184.5		Melampaui	100 %		184.45		Melampaui	ST		Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkunganny a	Kawasan	0	15 Kawasan	109,404,185,674	10.0	16,727,117,479 .0	66.7	15.29	Belum Tercapai	15 Kawasan	308,598,763,7 24.0	66.67	15.29	belum tercapai	S	R	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
21	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Persentase	4.36%	4.35 %	995,000,000	9.7	383,415,773.0	222.8	38.53	Melampaui	4.35 %	3,562,477,560. 0	222.76	38.53	Melampaui	ST	R	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	Persentase	59.78%	59.41 %		62.8		105.7		Melampaui	59.41 %		105.74		Melampaui	ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	PROGRAM	Persentase	Persentase	98.75%	77.08 %				106.4	78.03	Melampaui	77.08 %		106.38	78.03	Melampa	ST	T	Dinas

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan				3,145,599,600	82.0	2,454,443,574.0					11,958,882,514.0			ui			Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	Persentase	70%	85 %		100.0		117.6		Melampaui	85 %		117.65		Melampaui	ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA	Rp. triliun	4.54	4.5 Rp. Triliun	1,800,000,000	3.5	606,665,720.0	77.8	33.70	Belum Tercapai	4.5 Rp. Triliun	4,887,034,000.0	77.78	33.70	belum tercapai	T	R	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Realisasi PMDN	Rp. triliun	5.67	5.67 Rp. Triliun		8.9		156.1		Melampaui	5.67 Rp. Triliun		156.08		Melampaui	ST		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Persentase	6.04%	29.45 %	4,727,000,000	0.2	1,890,090,200.0	0.8	39.98	Belum Tercapai	29.45 %	15,197,136,700.0	0.81	39.98	belum tercapai	SR	R	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Persentase	9.46%	12.06 %		12.1		100.0		Sesuai	12.06 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		mandiri																	
	Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	**Rasio Gini**	**Nilai**	**0.391**		**208,872,315,562**						**0.381**		**260.56**	**181.90**	Melampaui	ST	ST	
25	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	Persentase	39.88	36.37 %	10,763,514,632	27.0	1,376,328,823.0	74.3	12.79	Belum Tercapai	36.37 %	29,940,543,896.0	74.26	12.79	belum tercapai	S	R	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO UMKM	Cakupan UMKM yang diberdayakan	Persentase	10	10 %	6,567,785,125	2.0	2,627,591,046.0	20.0	40.01	Belum Tercapai	10 %	17,730,423,875.0	20.00	40.01	belum tercapai	SR	R	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	Persentase	10	10 %	3,214,188,519	-	3,456,196,000.0	-	107.53	Belum Tercapai	10 %	8,677,038,572.0	0.00	107.53	belum tercapai	SR	ST	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)		10 Produk	5 %		-		-		Belum Tercapai	5 %		0.00		belum tercapai	SR		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
28	PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase Jumlah Pemegang	Persentase	14.90	16.76 %	13,431,917,000	30.0	188,659,400.0	179.0	1.40	Melampaui	16.76 %	42,452,173,500.0	179.00	1.40	Melampaui	ST	R	Dinas Lingkungan Hidup dan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan																	Kehutanan
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	Persentase	100	100 %	200,000,000	100.0	99,992,000.0	100.0	50.00	Sesuai	100 %	535,892,500.0	100.00	50.00	sesuai	ST	R	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase ketersediaan data sarana dan prasarana	Persentase	100	100 %		100.0		100.0		Sesuai	100 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	Persentase	100%	3.7 Jiwa	11,023,223,559	-	2,813,823,910.0	-	25.53	Belum Tercapai	3.7 Jiwa	31,063,528,909.0	0.00	25.53	belum tercapai	SR	R	Dinas Sosial
		Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	Persentase	100	100 %		86.0		86.0		Belum Tercapai	100 %		86.00		belum tercapai	T		Dinas Sosial
31	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Daging	Ton	138164039 Kg	187450880 Kg	159,740,787,727	126,387,829.0	3,461,800,669.5	67.4	2.17	Belum Tercapai	187450880 Kg	33,500,408,977,918.0	67.42	2.17	belum tercapai	S	R	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Telur	Ton	162594471 Kg	222171678 Kg		238,589,441.0		107.4		Melampaui	222171678 Kg		107.39		Melampaui	ST		Dinas Peternakan dan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																			Kesehatan Hewan
		Produksi Susu	Ton	3240432 Kg	2159626 Kg		1,927,010.0		89.2		Belum Tercapai	2159626 Kg		89.23		belum tercapai	T		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah produksi Talas Satoimo	Ton	5.432,55	7000 Ton		-		-		Belum Tercapai	7000 Ton		0.00		belum tercapai	SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktifitas Padi	Kw/Ha	48,23 Kw/Ha	50.43 Kw/Ha		51.6		102.4		Melampaui	50.43 Kw/Ha		102.38		Melampaui	ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	331	121 Ha		-	374,683,945,476.0	-		Belum Tercapai	121 Ha		0.00		belum tercapai	SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktifitas Kakao	Kg/Ha	634 Kg/Ha	634 Kg/Ha		726.0		114.5		Melampaui	634 Kg/Ha		114.51		Melampaui	ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktifitas Jagung	Kw/Ha	53,27 Kw/Ha	55.73 Kw/Ha		57.6		103.4		Melampaui	55.73 Kw/Ha		103.41		Melampaui	ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Cakupan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	377 Unit	300 Unit		12,871.0		4,290.3		Melampaui	300 Unit		4290.33		Melampaui	ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produtifitas Kopi	Kg/Ha	588 Kg/Ha	588 Kg/Ha		561.0		95.4		Belum Tercapai	588 Kg/Ha		95.41		belum tercapai	ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	266,50 Ton	323.02 Ton		1,366.9		423.2		Melampaui	323.02 Ton		423.16		Melampaui	ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	Persentase	1.41 % dari 3038 Kelompok Binaan LPM	1.57 %	3,187,311,650	1.6	6,189,660,465.0	100.0	194.20	Sesuai	1.57 %	3,179,352,637.0	100.00	194.20	sesuai	ST	ST	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase PKK aktif	Persentase	97.71 % dari Total 3.344 PKK	98.94 %		98.9		100.0		Sesuai	98.94 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Posyandu aktif	Persentase	99.89% dari 10.988	99.98 %		100.0		100.0		Sesuai	99.98 %	-	100.00		sesuai	ST		Dinas Pemberdayaan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Posyandu															Masyarakat dan Desa
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	Persentase	10	10 %	743,587,350	0.1	371,181,462.0	1.0	49.92	Belum Tercapai	10 %	2,034,110,850.0	1.00	49.92	belum tercapai	SR	R	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter																		
	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**71.66**	**73.05**							**73.05**							
	Sasaran 6: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	**Indeks Pendidikan**	**Nilai**	**64.64**		**1,007,055,419,147**						**67.05**		**49.43**	**89.35**	belum tercapai	SR	T	
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SPM Prioritas)	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	Persentase	74,23%	100 %	1,003,200,000,000	35.0	964,744,192,597.0	35.0	96.17	Belum Tercapai	100 %	3,027,185,287,047.0	35.00	96.17	belum tercapai	SR	T	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	Persentase	50.05 %	62 %		31.2		50.3		Belum Tercapai	62 %		50.26		belum tercapai	SR		Dinas Pendidikan
		Persentase SMA/SMK	Persentase	90 %	93.9 %		31.2		33.2		Belum Tercapai	93.9 %		33.18		belum tercapai	SR		Dinas Pendidikan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)																	
		Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	Persentase	80%	100 %		35.0		35.0		Belum Tercapai	100 %		35.00		belum tercapai	SR		Dinas Pendidikan
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Prioritas)	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama (Prioritas)	Persentase	54.25	57.25 %	3,855,419,147	48.3	562,650,119.0	84.3	14.59	Belum Tercapai	57.25 %	8,234,911,794.0	84.28	14.59	belum tercapai	T	R	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan	Persentase	0	82		48.3		58.8		Belum Tercapai	82		58.84		belum tercapai	R		Dinas Pendidikan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		pelayanan pendidikan berbasis TIK																	
	Sasaran 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Kesehatan**	**Nilai**	**77.58**		**236,797,801,905**						**77.86**		**77.05**	**61.59**	belum tercapai	T	S	
36	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Persentase	317%	300	14,616,632,150	300.0	33,606,988,160.0	100.0	229.92	Sesuai	300	65,864,362,050.0	100.00	229.92	sesuai	ST	ST	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Peningkatan Prestasi olahraga	Persentase	291.4	200 %		200.0		100.0		Sesuai	200 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	23 %	11,984,000,000	27.9	911,415,500.0	121.1	7.61	Melampaui	23 %	28,246,193,630.0	121.13	7.61	Melampaui	ST	R	Dinas Kesehatan
		Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	Persentase	80%	100%				-		Belum Tercapai	100%		0.00		belum tercapai	SR		**UPT Transfusi Darah**
		Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	Persentase	100	1 %		1.0	159,265,620.0	100.0		Sesuai	1 %		100.00		sesuai	ST		UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah
		Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	Persentase	100	1 %		1.0		100.0		Sesuai	1 %		100.00		sesuai	ST		UPT Laboratorium dan Pelayanan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																			Kesehatan Daerah
		Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	Persentase	100	100 %		-		-		Belum Tercapai	100 %		0.00		belum tercapai	SR		UPT RSK Gigi dan Mulut
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentase	90%	100 %		90.0	1,169,010,000.0	90.0		Belum Tercapai	100 %		90.00		belum tercapai	T		Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	80	100 %		100.0		100.0		Sesuai	100 %		100.00		sesuai	ST		Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
		Persentase Kapasitas SDM Kesehatan yang ditingkatkan	Persentase	100%	100 %			5,472,547,686.0	-		Belum Tercapai	100 %		0.00		belum tercapai	SR		Rumah Sakit Khusus Daerah
		Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah	Persentase	100%	100 %				-		Belum Tercapai	100 %		0.00		belum tercapai	SR		Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		memperoleh pendidikan kompetensi teknis																	
		Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	Persentase	42.9	100 %				-		Belum Tercapai	100 %		0.00		belum tercapai	SR		Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentase	24	24 %		90.0	1,169,010,000.0	375.0		Melampaui	24 %		375.00		Melampaui	ST		Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM/Prioritas)	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	Unit	17% (1 Unit)	6.8	210,197,169,755	33.3	150,831,029,072.7	33.3	71.76	Belum Tercapai	6.8	686,068,953,855.8	33.30	71.76	belum tercapai	SR	S	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100 %	6.8		100.0		100.0		Sesuai	6.8		100.00		sesuai	ST		Dinas Kesehatan
		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	Persentase	85%	100 %		86.4		86.4		Belum Tercapai	100 %		86.40		belum tercapai	T		Dinas Kesehatan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	11%	13 %		9.9		76.2		Belum Tercapai	13 %		76.15		belum tercapai	T		Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100%	100 %		100.0		100.0		Sesuai	100 %		100.00		sesuai	ST		Dinas Kesehatan
		Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	5.5%	7.5 %		6.5		86.7		Belum Tercapai	7.5 %		86.67		belum tercapai	T		Dinas Kesehatan
		Rasio Kebutuhan Transfusi Darah	Persentase	78.5	90 %		41.0	8,655,370,193.0	45.6		Belum Tercapai	90 %		45.56		belum tercapai	SR		UPT Transfusi Darah

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Terhadap Ketersediaan Stok Darah																	
		Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	Persentase	100			1.0	3,939,346,542.0	100.0		Sesuai			100.00		sesuai	ST		UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah
		Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	Persentase	100	100 %		1.0	3,939,346,542.0	1.0		Belum Tercapai	100 %		1.00		belum tercapai	SR		UPT RSK Gigi dan Mulut
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentasi	90%			80.0	1,854,672,443.0	80.0		Belum Tercapai			80.00		belum tercapai	T		Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	60			80.0	1,854,672,443.0	80.0		Belum Tercapai			80.00		belum tercapai	T		Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	100 %	100 %		80.0	1,854,672,443.0	80.0		Belum Tercapai	100 %		80.00		belum tercapai	T		Rumah Sakit Khusus Daerah
		Cakupan Ketersediaan	Persentase	100%	100 %		22.1	1,293,707,172.	22.1		Belum Tercapai	100 %		22.12		belum tercapai	SR		Rumah Sakit

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat						0											Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	60	100 %		80.0	1,854,672,443.0	80.0		Belum Tercapai	100 %		80.00		belum tercapai	T		Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	Persentase	85	85 %		85.0	1,842,956,867.0	100.0		Sesuai	85 %		100.00		sesuai	ST		Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
	Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Nilai**	**76.01**		**2,125,501,000**						**77.23**		**142.25**	**69.87**	Melampaui	ST	S	
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% Kab/Kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	Persentase	0,52%	75 %	1,435,501,000	46.0	989,961,958.0	61.3	68.96	Belum Tercapai	75 %	3,106,756,100.0	61.33	68.96	belum tercapai	R	S	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																			Keluarga Berencana
		% Lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi	Persentase	10%	35 %		46.0		131.4		Melampaui	35 %		131.43		Melampaui	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% Kab/Kota yang menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	Persentase	21%	50 %	690,000,000	117.0	675,916,108.0	234.0	97.96	Melampaui	50 %	1,274,010,300.0	234.00	97.96	Melampaui	ST	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Sasaran 9: Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	**Angka kriminalitas**	**Kasus**	**25.121 (2018)**		**1,232,304,783,586**						**24.438**		**93.88**	**4.00**	belum tercapai	ST	R	
41	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	Persentase	100%	100 %	2,370,000,000	100.0	4,525,973,606.0	100.0	190.97	Sesuai	100 %	-	100.00	190.97	sesuai	ST	ST	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	KETERTIBAN UMUM (SPM)	akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)																	
42	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Persentase/ Dokumen	1.75%	9 Dokumen	1,228,220,266,319	8.0	53,195,988,898.0	88.9	4.33	Belum Tercapai	9 Dokumen	3,679,979,284,050.0	88.89	4.33	belum tercapai	T	R	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara AlQuran (Prioritas)	Persentase	10%	35.75 %		49.6		138.8		Melampaui	35.75 %		138.80		Melampaui	ST		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	Persentase	10%	10 %		8.0		79.5		Belum Tercapai	10 %		79.50		belum tercapai	T		Biro Kesejahteraan Rakyat
43	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	Persentase	20% (N/A)	20 %	314,485,324	20.0	2,837,374,011.0	100.0	902.23	Sesuai	20 %	874,625,959.5	100.00	902.23	sesuai	ST	ST	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	Persentase	0% (pengguna)	40 %	1,400,031,943	20.0	1,302,516,677.0	50.0	93.03	Belum Tercapai	40 %	3,893,677,029.2	50.00	93.03	belum tercapai	SR	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	Persentase	100%	100 %		100.0		100.0		Sesuai	100 %		100.00		sesuai	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan																		
	Tujuan 5: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**6.92**	**5,04 – 6,52**							**5,04 – 6,52**							
	Sasaran 10: Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	**Produktifitas Total Daerah**	**Rp / Angkatan Kerja**	**82.027.871**		**435,549,515,803**						**77,349,122**		**396.73**	**13.15**	Melampaui	ST	R	
45	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persentase	5,00%	5 %	20,701,915,345	18.0	2,033,618,888.0	360.0	9.82	Melampaui	5 %	49,956,207,069.0	360.00	9.82	Melampaui	ST	R	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Persentase Penggunaan Benih Padi	Persentase	70,00%	81.15 %		68.0		83.8		Belum Tercapai	81.15 %		83.80		belum tercapai	T		Dinas Tanaman Pangan,

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Bersertifikat																	Hortikultura dan Perkebunan
46	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	Persentasi	30,18%	78.95 %	28,594,223,229	89.5	25,347,693,829.0	113.3	88.65	Melampaui	78.95 %	80,980,057,803.8	113.32	88.65	Melampaui	ST	T	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp. Miliar	Rp. 6.525.95 M	9210.12 Rp. M		139,777.9		1,517.7		Melampaui	9210.12 Rp. M		1517.66		Melampaui	ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan tangkap	Ton	398.565,2 Ton	413030.8 Ton		492,159.5		119.2		Melampaui	413030.8 Ton		119.16		Melampaui	ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase	30.25	30.25 %		22.9		75.8		Belum Tercapai	30.25 %		75.80		belum tercapai	S		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Persentase	27.17	27.17 %		-		-		Belum Tercapai	27.17 %		0.00		belum tercapai	SR		Dinas Kelautan dan Perikanan
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. Miliar	Rp. 9.594.52 M	15958.39 Rp. M	15,894,535,000	18,157.9	1,861,833,577.0	113.8	11.71	Melampaui	15958.39 Rp. M	47,230,035,000.0	113.78	11.71	Melampaui	ST	R	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan budidaya	Ton	3.662.761,4 ton	4298391.1 Ton		4,128,072.6		96.0		Belum Tercapai	4298391.1 Ton		96.04		belum tercapai	ST		Dinas Kelautan dan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																			Perikanan
		Persentase ketersediaan benur berkualitas	Persentase	100	100 %		122.6		122.6		Melampaui	100 %		122.58		Melampaui	ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
48	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	Persentasi	55.73	65.47 %	9,024,330,850	73.3	1,909,727,670.0	111.9	21.16	Melampaui	65.47 %	22,897,424,050.0	111.93	21.16	Melampaui	ST	R	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	M3	132100	92336.62 M3		77,201.6		83.6		Belum Tercapai	92336.62 M3		83.61		belum tercapai	T		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Kerusakan Hutan pertahun	Persentase	17.43	14.82 %		0.1		0.3		Belum Tercapai	14.82 %		0.34		belum tercapai	SR		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	4.042 Ton	283 Ton		7,240.4		2,558.4		Melampaui	283 Ton		2558.44		Melampaui	ST		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Peternakan	Rp	9412084000 Rp	0	343,283,866,054	37,568,634,800.0	107,951,432.0	97.3	0.03	Belum Tercapai	0	944,695,486,694.0	97.28	0.03	belum tercapai	ST	R	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp.	369485250000 Rp	465.893.180.426 Rp		11,331,727,857,600.0	29,235,560,234.0			Belum Tercapai	465.893.180.426 Rp		2432.26		Melampaui	ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp.	3578350000 Rp	8.000.000.000 Rp		10,172,090,000.0				Belum Tercapai	8.000.000.000 Rp		127.15		Melampaui	ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																			dan Perkebunan
50	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	166.373.20 Ton	5544.1 Ton	2,846,770,325	7,235.8	1,052,205,814.5	130.5	36.96	Melampaui	5544.1 Ton	7,812,513,513.9	130.51	36.96	Melampaui	ST	R	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	Persentase	100	100 %		88.0		88.0		Belum Tercapai	100 %		88.03		belum tercapai	T		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. Miliar	Rp. 293,120 Milyar	317.28 Milyar		502.6		158.4		Melampaui	317.28 Milyar		158.40		Melampaui	ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
51	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri	Persentase	6%	7 %	14,180,000,000	1.2	9,757,966,591.0	17.3	68.81	Belum Tercapai	7 %	40,284,423,382.6	17.29	68.81	belum tercapai	SR	S	Dinas Perindustrian dan perdagangan
52	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	$ US	57950717 $ US	1710812150 $ US	1,023,875,000	5,484,826,417.7	279,963,531.0	320.6	27.34	Melampaui	1710812150 $ US	1,981,755,000.0	320.60	27.34	Melampaui	ST	R	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Nilai**	**64.76**	**72.84**							**72.84**							
	Sasaran 11: Terpeliharanya kualitas	**Potensi Penurunan emisi GRK**	**Juta Ton CO2Eq**	**0.86**		**106,422,394,139**						**1.347**		**190.08**	**36.09**	Melampaui	ST	R	

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim																		
53	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Persentase	100%	200%	47,592,086,164	100.0	201,084,621.0	100.0	0.42	Sesuai	200%	141,268,768,074.0	100.00	0.42	sesuai	ST	R	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase tanggap darurat bencana yg tertangani (Prioritas)	Persentase	100%	100 %		147.0	6,847,032,707.0	147.0		Melampaui	100 %		147.00		Melampaui	ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Aparat kesiapsiagaan bencana yg terlatih	Persentase	100%	2.0		138.0		138.0		Melampaui	2.0		138.00		Melampaui	ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	Persentase	100%	100 %		144.0		144.0		Melampaui	100 %		144.00		Melampaui	ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	rasio	0.5	1	4,651,400,000	1.0	1,277,085,490.0	100.0	27.46	Sesuai	1	11,426,195,800.0	100.00	27.46	sesuai	ST	R	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
55	PROGRAM	Jumlah DAS	Das	2	2 DAS				-	- .00	Belum Tercapai	2 DAS		0.00	0.00	belum	SR	R	Dinas

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAS	yang direhabilitasi				2,725,940,000	-	-					7,877,820,000.0			tercapai			Lingkungan Hidup dan Kehutanan
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	Persentase	3,41 %	5.4 Ton penurunan emisi Co2 eq	2,610,295,500	75.8	261,198,377.0	1,403.9	10.01	Melampaui	5.4 Ton penurunan emisi Co2 eq	7,216,040,654.0	1403.89	10.01	Melampaui	ST	R	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
57	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B	Cakupan limbah yang dikelola	Persentase	74%	98 %	5,707,815,512	75.0	435,459,038.0	76.5	7.63	Belum Tercapai	98 %	23,130,315,657.0	76.53	7.63	belum tercapai	T	R	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
58	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	Persentase	97%	95 %	665,306,352	95.0	9,540,000.0	100.0	1.43	Sesuai	95 %	2,195,762,094.0	100.00	1.43	sesuai	ST	R	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
59	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	Ton	140.338,9 ton	48450 Ton	14,997,300,000	111,622.6	8,838,269,191.0	230.4	58.93	Melampaui	48450 Ton	41,608,300,000.0	230.39	58.93	Melampaui	ST	S	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan	Persentase	4,35%	100 %		56.6		56.6		Belum Tercapai	100 %		56.57		belum tercapai	R		Dinas Kelautan dan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Prasarana Pendukung Produksi Perikanan																	Perikanan
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Persentase	67.31	67.31 %		68.1		101.2		Melampaui	67.31 %		101.16		Melampaui	ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
60	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase	89.85	89.85 %	11,021,800,611	83.6	2,693,570,950.0	93.1	24.44	Belum Tercapai	89.85 %	32,560,835,612.3	93.09	24.44	belum tercapai	ST	R	Dinas Kelautan dan Perikanan
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase	26	32.40	15,650,000,000	38.0	2,245,561,143.0	117.3	14.35	Melampaui	32.40	26,245,597,210.0	117.28	14.35	Melampaui	ST	R	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persentase	15	58 %		55.0		94.8		Belum Tercapai	58 %		94.83		belum tercapai	ST		Dinas Perhubungan
		Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Jumlah		20 Ruas		78.0		390.0		Melampaui	20 Ruas		390.00		Melampaui	ST		Dinas Perhubungan
		Cakupan prasarana	Persentase	15 %	30 %		60.0		200.0		Melampaui	30 %		200.00		Melampaui	ST		Dinas Perhubunga

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-(%)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		Realisasi 2023 (Triwulan IV)		2023 (Triw IV)										
					Kinerja	Rp	Capaian	Rp			Predikat Kinerja 2023	Target	Rp	% (K)	% (Rp)	K		Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		LLAJ dalam kondisi baik																	n
		Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang		605000 Orang		600,000.0		99.2		Belum Tercapai	605000 Orang		99.17		belum tercapai	ST		Dinas Perhubungan
		Jumlah Terminal Bis terkelola	Terminal		16 Terminal		16.0		100.0		Sesuai	16 Terminal		100.00		sesuai	ST		Dinas Perhubungan
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	Persentase	46%	74 %	800,450,000	81.2	177,468,339.0	109.7	22.17	Melampaui	74 %	3,574,165,512.0	109.66	22.17	Melampaui	ST	R	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bagaimana capaian kinerja Outcome Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023, dari total indikator yang akan dicapai dapat digambarkan bahwa terdapat 96 indikator dengan predikat sangat Tinggi, 20 indikator dangan predikat Tinggi, terdapat 6 indikator dengan predikat sedang, 5 indikator dengan predikat rendah, sedangkan untuk predikat sangat rendah terdapat 36 indikator.

2.7. Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan Tahun Berjalan

Seperti halnya dengan pengukuran capain kinerja yang lain maka evaluasi capaian anggaran dan kinerja berdasarkan urusan dibagi dalam 3 lategori yakni: a. kategori rendah (dibawah 0-25 persen), b. untuk kategori sedang (25-50 persen), sedangkan realisasi anggaran, c. kategori tinggi (diatas 50 persen).

Evaluasi dan Realisasi anggaran dan kinerja pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan urusan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 masih pada kategori sedang dengan klasifikasi realisasi mulai dari 0-25 persen.

Hal dimaksud digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja masih dalam kategori Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk dalam kategori Rendah;
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja dalam kategori Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk dalam kategori Tinggi;
3. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata-rata capaian kinerja masih dalam kategori Rendah, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk dalam kategori Rendah;
4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja masih dalam kategori Sangat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk dalam kategori Tinggi;
5. Urusan Penunjang Urusan pemerintah dengan raat-rata capaian kinerja masih dalam kategori Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk dalam kategori Rendah;
6. Unsur pengawasan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja masih dalam kategori Sangat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran masuk dalam kategori Rendah; dan
7. Unsur pemerintahan umum rata-rata capaian kinerja dalam kategori Rendah, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk dalam kategori Rendah;

Tabel II.147.
Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2024

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
							K (%)	Rp.(%)	K	Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Urusan Pemerintahan Wajib	**4.973.287.045.903,00**	**5.085.044.117.421,00**	**2.232.229.595.844,08**	**57,42**	**42,71**	**20,08**	**R**	**R**
1		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**4.544.366.450.809,00**	**4.458.815.655.155,00**	**1.995.277.145.860,08**	**51,33**	**55,96**	**19,41**	**R**	**R**
1	**01**	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	3.224.840.059.237,00	3.225.317.613.802,00	1.473.582.925.718,00	37,91	14,60	14,60	**R**	**R**
1	**02**	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	913.785.799.644,00	737.633.726.963,00	326.106.305.854,48	8,39	18,69	18,69	**T**	**R**
1	**03**	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	244.415.227.107,00	354.578.754.155,00	126.931.913.312,00	3,27	28,26	28,26	**ST**	**R**
1	**04**	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	28.106.816.878,00	22.233.555.625,00	9.190.333.465,60	0,24	15,51	15,51	**R**	**R**
1	**05**	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	77.988.640.740,00	64.886.062.079,00	34.416.748.848,00	0,89	26,58	26,58	**R**	**R**
1	**06**	Urusan Pemerintahan Bidang	55.229.907.203,00	54.165.942.531,00	25.048.918.662,00	0.64	1,89	12,83	**R**	**R**

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
							K (%)	Rp.(%)	K	Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sosial								
2		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**428.920.595.094,00**	**626.228.462.266,00**	**236.952.449.984,00**	**6,10**	**29,46**	**20,74**	**R**	**R**
2	**07**	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	9.633.188.776,00	39.028.372.597,00	20.036.181.715,00	0,52	17,05	27,64	**R**	**R**
2	**08**	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.892.428.994,00	15.892.428.994,00	6.542.588.664,00	0,17	233,36	20,99	**ST**	**R**
2	**09**	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	31.381.860.260,00	56.071.836.830,00	11.930.732.553,00	0,31	8,37	21,34	**R**	**R**
2	**10**	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	175.000.000,00	175.000.000,00	50.583.180,00	0,00	80,00	29,27	**T**	**R**
2	**11**	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	22.772.573.643,00	151.868.581.801,00	76.278.615.567,00	1,96	9,80	17,29	**R**	**R**
2	**12**	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.533.566.614,00	10.533.566.614,00	4.773.372.162,00	0,12	0,00	22,55	**R**	**R**
2	**13**	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	29.613.356.297,00	29.232.088.462,00	8.698.953.475,00	0,22	4,34	15,28	**R**	**R**
2	**14**	Urusan Pemerintahan Bidang	2.708.227.200,00	2.708.227.200,00	689.449.970,00	0,02	0,00	7,42	**R**	**R**

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
							K (%)	Rp.(%)	K	Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	97.858.138.886,00	97.098.298.731,00	18.961.029.601,00	0,49	8,27	13,70	R	R
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	40.084.734.639,00	43.308.731.555,00	16.249.165.316,00	0,42	14,72	22,03	R	R
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	33.148.665.252,00	35.613.656.351,00	11.674.606.787,00	0,30	32,38	18,99	R	R
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	19.252.719.937,00	19.153.532.377,00	9.158.746.605,00	0,24	11,99	15,96	R	R
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	50.844.036.778,00	52.036.815.090,00	21.693.550.323,00	0,56	16,84	35,05	R	R
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1.550.000.000,00	713.271.900,00	194.032.245,00	0,00	12,50	21,70	R	R
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	650.000.000,00	725.143.300,00	275.984.600,00	0,01	9,62	25,57	R	R
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	25.510.167.738,00	34.756.980.384,00	12.457.371.948,00	0,32	8,27	24,75	R	R
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	36.911.930.080,00	36.911.930.080,00	17.241.157.480,00	0,44	26,77	22,31	R	R
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	400.000.000,00	400.000.000,00	46.327.793,00	0,00	36,07	11,59	R	R

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
							K (%)	Rp.(%)	K	Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3		**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**1.209.592.992.330,00**	**1.246.900.118.789,00**	**344.427.936.335,00**	**8,86**	**19,58**	**15,09**	**R**	**R**
3	03	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7.631.164.430,00	8.894.614.430,00	2.155.855.365,00	7,48	7,48	14,23	**R**	**R**
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	173.404.450.478,00	178.806.380.061,00	25.900.176.320,00	67,03	67,03	14,04	**R**	**R**
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4.233.464.000,00	12.512.545.319,00	5.055.031.135,00	0,00	0,00	22,23	**R**	**R**
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	932.394.452.001,00	937.318.712.879,00	284.792.405.915,00	19,19	19,19	19,03	**R**	**R**
3	28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	7.485.495.000,00	5.426.334.400,00	880.809.050,00	2,06	2,06	16,98	**R**	**R**
3	29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	6.041.216.905,00	24.225.271.045,00	10.545.656.840,00	46,67	46,67	11,67	**R**	**R**
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	77.892.749.516,00	79.566.261.155,00	15.098.001.710,00	14,25	14,25	22,50	**R**	**R**
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	510.000.000,00	149.999.500,00	-	0,00	0,00	0,00	**R**	**R**
4		**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**553.565.347.799,00**	**472.231.728.141,00**	**161.743.060.652,00**	**4,16**	**27,79**	**24,05**	**R**	**R**
4	**01**	Sekretariat Daerah	98.511.390.142,00	196.038.813.451,00	54.250.731.156,00	1,40	55,58	26,83	R	R
4	**02**	Sekretariat Dprd	455.053.957.657,00	276.192.914.690,00	107.492.329.496,00	2,77	0,00	21,26	R	R

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
							K (%)	Rp.(%)	K	Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5		**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**2.982.441.773.726,00**	**2.563.388.939.651,00**	**951.146.273.195,38**	**24,47**	**14,85**	**19,19**	**R**	**R**
5	**01**	Perencanaan	61.791.134.246,00	49.868.136.568,00	21.633.290.407,00	0,56	14,81	22,87	**R**	**R**
5	**02**	Keuangan	2.831.539.904.373,00	2.420.295.777.835,00	892.850.653.113,38	22,97	32,60	17,67	**R**	**R**
5	**03**	Kepegawaian	25.812.295.397,00	28.473.332.617,00	13.465.004.761,00	0,35	14,91	20,19	**R**	**R**
5	**04**	Pendidikan Dan Pelatihan	36.795.959.976,00	38.128.088.162,00	14.045.726.453,00	0,36	24,59	17,18	**R**	**R**
5	**05**	Penelitian Dan Pengembangan	4.096.268.450,00	3.788.214.000,00	1.419.967.986,00	0,04	0,00	24,29	**R**	**R**
5	**07**	Pengelolaan Penghubung	22.406.211.284,00	22.835.390.469,00	7.731.630.475,00	0,20	2,22	12,92	**R**	**R**
6		**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**70.041.513.791,89**	**59.953.714.000,00**	**23.555.517.455,00**	**0,61**	**18,82**	**19,43**	**R**	**R**
6	**01**	Inspektorat Daerah	70.041.513.791,89	59.953.714.000,00	23.555.517.455,00	0,61	18,82	19,43	R	R
8		**Unsur Pemerintahan Umum**	**531.596.353.676,00**	**532.424.145.931,00**	**174.181.185.409,00**	**4,48**	**18,78**	**25,11**	**R**	**R**
8	**01**	Kesatuan Bangsa Dan Politik	531.596.353.676,00	532.424.145.931,00	174.181.185.409,00	4,48	18,78	25,11	R	R
		Jumlah	**10.320.525.027.225,90**	**9.959.942.763.933,00**	**3.887.283.568.890,46**	**100,00**	**23,76**	**20,49**	**R**	**R**

Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

2.8. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang akan direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa dating dengan kondisi saat perencanaan dibuat.

Berdasarkan hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan Masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program Pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023, maka sub bab ini merumuskan permasalahan pembangunand daerah ke dalam dua kelompok permasalahan yaitu permasalahan di level makro dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.8.1. Permasalahan Terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.8.1.1. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Belum Optimal

Reformasi Birokarasi belum dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan permerintah di Tingkat Provinsi, indeks reformasi birokrasi digunakan sebagai indikator dalam mengukur tata kelola pemerintahan. Dalam evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB pada tahun 2023 nilai yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 8,05 point jika dibandingkan dengan tahun 2022 (66,16 predikat Baik) menjadi 74,21 denga kategori Sangat Baik. Walapun demikian masih diperlukan penerapan akselerasi tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya bisa dirasakan oleh Masyarakat. Pembangunan zona integritas perlu mendapat perhatian lebih disebabkan hingga tahun 2023 belum ada satu pun perangkat daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM).

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP yang merepesentaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras. Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 masih mendapatkan predikat Baik dengan nilai 68,78 dan hanya naik sebesar 0,7 point jika dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini pun belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu predikat A. Dengan demikian kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu perlu ditingkatkan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dirasakan Masyarakat.

2.8.1.2. Pembangunan infrastruktur yang belum merata

Ketimpangan dalam hal Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa daerah di Sulawesi Selatan memiliki Tingkat Pembangunan yang lebih tinggi daripada daerah lainnya. Hal ini ditandai dengan indeks Williamson Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebesar 0,570 dan indeks layanan infrastruktur sulawei Selatan Tahun 2023 sebesar 85,33%.

Ketersediaan jalan yang terdapat Sulawesi Selatan masih belum memadai daalam mendukung pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Total Panjang jalan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 2014,24 kilometer dengan kondisi mantap 1449,2 kilometer (71,95%) dan tidak mantap sebesar 565.033 kilometer

(28,05 %). Dengan kondisi permukaan jalan yang baik sebesar 890,46 kilometer (44,21%), sedang sebesar 558,74 kilometer (21,74 %), rusak ringan sebesar 205,19 kilometer (10,18 %), dan rusak berat 359.84 kilometer (17,86%).

Diperlukan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat terutamanya kerjasama antara tingkatan level pemerintah, swasta dan Masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

2.8.1.3. Meningkatnya Ketimpangan Pengeluaran Masyarakat

Gini ratio adalah sebuah indikator yang menggambarkan secara keseluruhan mulai dari pendapatan hingga distribusi. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini ratio di Sulawesi Selatan pada Maret 2023 sebesar 0,377 dan mengalami peningkatan sebesar 0,012 jika dibandingkan dengan September 2022 (0,365). Dengan disparitas perkotaan dan perdesaan yang masih tinggi, masing masing gini ratio perkotaaan sebesar 0,386 dan perdesaan sebesar 0,339. Walaupun gini ratio Sulawesi Selatan masih berada di bawah nasional (0,386), namun Sulawesi Selatan termasuk berada di posisi ke 7 dengan nilai indeks gini ratio yang tinggi dan berada di bawah Sulawesi Tenggara (0,371). Hal ini sebabkan oleh distribusi pendapatan, akses Pendidikan dan peluang pekerjaan.

Meningkatnya rasio gini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik, kepuasan publk dan meningkatnya Tingkat kriminalitas

2.8.1.4. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran Tebuka (TPT) periode Agustus 2022 (4,51%) dan Agustus 2023 (4,33%) menunjukan grafik menurun sebesar 0.18 persen. Angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan dengan 4 provinsi lainnya di regional Sulawesi, diantaranya Sulawesi Barat (2,27%), Sulawesi Tengah (2,95%), Gorontalo (3,06%), Sulawesi Tenggara (3,15%).

Tahun 2023 Penduduk usia kerja Sulawesi Selatan sebesar 7,15 Juta orang, dengan kelompok bukan angkatan kerja sebesar 2,45 juta orang dan Angkatan kerja sebesar 4,69 juta orang. Angka pengangguran Tahun 2023 menyentuh 4,49 juta orang , yang equivalen dengan terdapat 203,5 ribu orang berada di posisi penganganggguran. Untuk mengatasi ini dibutuhkan koordinasi pentahelix, dimana didalamnya ada dunia industry, perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta. Agar dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing dalam kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industry.

2.8.1.5. Meningkatnya angka kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan yang dihadapi di seluruh dunia dan menjadi isu global dan nasional. Angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan menurut perhitungan BPS sejak periode Maret 2022 hingga Maret 2023 terus mengalami peningkatan, dimana Maret 2022 sebesar 777,44 jiwa atau 8,63%, September 2022 sebesar 782.32 jiwa atau 8,66% dan Maret 2023 sebesar 788,85 jiwa atau sebesar 8,7%.

Kenaikan jumlah penduduk miskin ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sektor padat karya seperti pertanian, kehutanan, perikanan; industri pengolahan; jasa Pendidikan; transportasi dan lainnya tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketersediaan data dan informasi penduduk miskin yang akurat dan termuktakhirkan juga diperlukan agar pengentasan

kemiskinan dapat tepat sasaran dan dijadikan salah satu instrument penting dalam perumusan strategi, prioritas dan kebijakan Pembangunan. Agar program pemberantasan kemiskinan dapat tepat sasaran, maka diperlukan dukugan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.

2.8.1.6. Masih kurang kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetitif dan inklusif

Sumber daya manusia menjadi bagian dari fakor penentu keberhasilan Pembangunan dimana peran sumber daya manusia meruapakan motor penggerak serta bagian dari proses tujuan Pembangunan. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 74,60, meningkat 0,64 point dibandingkan capaian tahun sebelumnya (73,96). Akan tetapi salah indikator pendukung kualitas sumber daya manusia yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 masih berkisar di angka 8,76 tahun. Artinya dari 3.995.280 orang usia 25 tahun ke atas, secara rata-rata hanya menamatkan jenjang Pendidikan formal selama 8,76 tahun atau setara dengan SMP kelas 3.

Indikator lain yang menunjukan rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat, semakin tinggi jenjang Pendidikan semakin rendah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Berdasarkan data BPS, Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 untuk APS Kelompok Umur 7-12 tahun sebesar 99,49 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 93,22 persen, kelompok umur 16-18 tahun sebesar 71 persen dan kelompok umur 19-24 tahun hanya sebesar 34,47 persen.

2.8.1.7. Belum optimalnya kemampuan daerah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Hampir sepanjang tahun 2023, Sulawesi Selatan mengalami kekeringan yang berkepenjangan imbas fenomena El Nino, yang kemudian berdampak pada gagal panen dan krisis pangan. Beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami kekeringan dan alih fungsi lahan yang kemudian berdampak pada kurang air irigasi untuk pertanian, 153 ha laha pertanian mengalami gagal panen.

Selain itu, kemarau Panjang tersebut juga membuat Masyarakat tersiksa, dimana suplai air besih berkunag, pemadaman Listrik bergilir dan cuaca yang panas. Pemadaman Listrik ini berdampak juga kepada perekonomian Masyarakat utamanya pada industri kecil dan menengah yang menyebabkan peningkatan harga satuan produksi dan pelayanan Kesehatan menjadi tidak optimal.

2.8.2. PERMASALAHAN TERKAIT PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.8.2.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Permasalahan yang dirumuskan pada urusan pemerintah wajib pelayanan dasar dirumuskan berdasarkan ketercapaian indikator kinerja masing-masing urusan. Dari 6 urusan tersebut, terdapat 1 urusan yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menunjukkan capaian kinerja yang baik ditahun 2022, sehingga hanya perlu dioptimalkan dan tidak terdapat permasalahan yang mendasar pada pencapaian kinerja urusan tersebut. Adapun 5 urusan yang masih terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerjanya urusannya adalah sebagai berikut :

1. **Pendidikan**
    a. Partisipasi sekolah anak usia 16 – 18 tahun yang merupakan standar pelayanan minimal belum mencapai 100%;
    b. Partisipasi warga negara usia 4 – 18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus yang merupakan standar pelayanan minimal belum mencapai 100%;
    c. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah menurun di tahun 2023;
    d. Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan kelompok umur penduduk Usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun masih dibawah rata-rata nasional;
    e. Perkembangan jumlah kondisi ruang kelas pendidikan SMA/SMK dengan kondisi baik **menurun** dan kondisi rusak ringan/ sedang **meningkat**;
    f. Angka Partisipasi Kasar berdasarkan jejang pendidikan tingkat SMP/MTs dibawah rata rata nasional;
    g. Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan jenjang pendidikan SMP Sederajat dibawah rata rata nasional;
    h. Belum optimal ketersediaan, distribusi dan kualitas tenaga pendidik (guru);
    i. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan belum optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi pengangguran;
    j. Belum efektinya pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
2. **Kesehatan**
    a. Upaya kesehatan yang dilakukan belum optimal, dapat diliihat dari meningkatnya jumlah kematian bayi pada tahun 2023; meningkatnya Angka kematian bayi, balita dan neonatal per 1000 kelahiran hidup; Meningkatnya Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;
    b. Belum optimalnya SDM kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar, dapat dilihat dengan menurunnya Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan;
    c. Menurunnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani;
    d. Belum optimalnya pengelolaan manajemen data dan informasi kesehatan serta regulasi kesehatan, saat ini belum ada regulasi manajemen sistem informasi kesehatan provinsi.

3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
    a. Ruas jalan kewenangan provinsi dalam kondisi mantap masih sebesar 75,38 persen, salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan pendanaan APBD;
    b. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 40 persen, salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan pendanaan APBD;
    c. Masih rendahnya akses air minum layak melalui jaringan perpipaan pada tahun 2023 yaitu sebesar 25,25 persen dan Persentase rumah

tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman masih dibawah 50 persen. Hal ini disebabkan diantaranya yaitu :

- Keterbatasan pendanaan APBD dan masyarakat untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum;
- Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal;
- Kinerja kelembagaan belum optimal dalam menerapkan good governance sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat;
- Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum tidak optimal.

d. Masih rendahnya rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli;
e. Belum optimalnya ruang terbuka hijau.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio rumah layak huni masih rendah, beberapa penyebabnya adalah :
   - Harga rumah yang sesuai standar belum terjangkau bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan di bawah MBR;
   - Akses terhadap kredit perumahan atau pembiayaan sering kali sulit dijangkau oleh MBR, syarat-syarat yang ketat dan suku bunga yang tinggi menjadi penghalang utama;
   - Tidak semua masyarakat memiliki alokasi dana untuk perbaikan atau pembangunan rumah;
   - Pembangunan inftastruktur yang belum merata menyebabkan daerah-daerah tertentu tertinggal terhadap akses fasilitas dasar seperti air bersih, listrik dan transportasi, yang kemudian berdampak pada kualitas rumah yang dibangun.
b. Tahapan perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih belum transparan dan akuntabel;

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) masih rendah;
b. Kebijakan publik yang tidak efektif dikarenakan penegakan hukum yang lemah dan kebijakan yang tidak merata;
c. Masih terdapatnya ancaman konflik sosial dan konflik agama yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
d. Belum luasnya jangkauan sosialisasi dan pengawasan serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
e. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

6. Sosial

a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial menurun drastis;
b. Menurunnya PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

c. Menurunnya persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan jaminan sosial;
d. Pendataan data DTKS dan P3KE masih belum valid dan akurat, sehingga penyaluran bantuan terhadap masyarakat miskin belum tepat sasaran;

2.8.2.2. Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Adanya permasalahan pada data/ identitas kependudukan bagi Calon Pekerja Imigran Indonesia (CPMI);
b. Belum terdapat keseragaman persepsi Kabupaten/ Kota dalam melakukan verifikasi akun siap kerja dan verifikasi perjanjian penempatan CPMI;
c. Masih banyaknya CPMI yang tidak memiliki ijazah atau surat keterangan pernah sekolah sebagai pengganti sertifikat kompetensi khususnya di Perkebunan;
d. Belum optimalnya penyelesaian Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro sebagai dasar dalam pembangunan ketenagakerjaan pada masing-masing Kabupaten/Kota;
e. Belum optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan oleh perusahaan perusahaan;
f. Perlindungan tenaga kerja yang masih rendah yang dapat dilihat dari menurunnya persentase besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta Jamsostek;
g. Menurunnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan, disebabkan oleh kurangnya tenaga fungsional pengawas ketenagakerjaan, dimana jumlah pengawasan ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diperiksa;
h. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang menurun;
i. Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan belum maksimal.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terhadao isu gender serta manfaat/peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan sehingga berdampak pada rendahnya penganggaran pembangunan yang responsif gender dan menurunnya indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Selatan, Menurunnya persentase Kab/Kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG;
b. Menurunnya persentase kab/kota yang meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga;
c. Pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal dan indeks perlindungan anak yang belum optimal.

3. Pangan

a. Menurunnya ketersediaan pangan utama beras dan kedelai yang diimbangi dengan tingginya konsumsi padi-padi terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah;
b. Menurunnya ketersediaan protein perkapita;
c. Belum optimalnya penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang);

d. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pola konsumsi kandungan energi dan protein serta kualitas bahan pangan produk pertanian yang rendah belum memenuhi standa yang mutu pangan.

4. Pertanahan

a. Terjadinya permasalahan/ konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah, swasta dengan pemerintah dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah;
b. Belum tersedianya data dan informasi asset pertanahan yang jelas dan akurat serta bisa diakses stakeholder yang berkepeintingan;
c. Belum adanya data dan informasi spasial dan aspasial yang andal dan terintegrasi sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan, khusunya bidang perumahan dan permukiman;
d. Masih adanya asset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibiarkan dan tidak jelas peruntukannya;

5. Lingkungan Hidup

a. Rendahnya kualitas air diakibatkan oleh pencemaran oleh limbah domestik, industri, perikanan, peternakan, perikanan dan pertambangan.
b. Permasalahan daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan selauran pembuangan air, penataan sungai serta pembuatan sumur resapan;
c. Belum optimalnya komitmen dalam mitigasu dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai sektor yang berkontribusi.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil sehingga Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk belum 100%;Tidak seluruh bayi yang lahir memiliki akte kelahiran, bahkan tidak seluruh penduduk memiliki akte kelahiran; dan Tidak seluruh pasangan menikah memiliki akte nikah.
b. Terbatasnya kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain : belum seluruh desa memiliki BUMDes; masih adanya desa belum terjangkau oleh jaringan komunikasi (blankspot);
b. Tata kelola pemberdayaan masyarakat desa belum optimal yang menunjang kebutuhan dan kolaboratif inovatif untuk kemajuan desa;
c. Belum sinergisnya program/ kegiatan pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik secara parsial maupun sektoral ditingkat desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Masih rendahnya masyarakat yang mengikuti program KB;
b. Persebaran dan mobilitas penduduk yang belum merata sehingga berdampak pada kesejahteraan antarwilayah yang juga belum merata;
c. Rendahnya pemahaman remaha tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal;

d. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga.

9. Perhubungan

a. Transportasi perkotaan di Sulawesi Selatan masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan transportasi, efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan masih kurang, dukungan pemerintah dalam penyelenggaran transportasi belum maksimal;
b. Transportasi Layanan Angkutan Darat : koordinasi antar instansi belum optimal dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas; ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan belum sepenuhnya memadai, peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor perlu ditingkatkan;
c. Transportasi Laut : masih terbatasnya fasilitas pembangunan di sulawesi selatan, infrastruktur pelabuhan yang sudah tua memerlukan perbaikan dan renovasi, pengawasan terhadap operasional transportasi laut sering kali kurang optimal sehingga masih ada kapal yang beroperasi tanpa memenuhi standar keselamatan.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Kematangan keamanan siber pada lingkup pemerintah Sulawesi Selatan masih rendah, disebabkan antara lain oleh kurangnya literasi terkait awareness keamanan siber, sistem monitoring keamanan jaringan dan aplikasi yang belum optimal sehingga menyebabkan tidak adanya alert system untuk mendeteksi secara dini anomali trafik yang bisa menjadi step awal masuknya serangan.;
b. Belum adanya sistem keamanan jaringan dan aplikasi khusus sehingga jaringan dan aplikasi pemprov sulsel sangat rentan terhadap serangan;
c. Masih kurangnya SDM Sulawesi Selatan yang berkompetensi untuk keamanan siber, penanggulangan insiden siber dan security operation center serta analyst kerentannan keamanan siber;
d. Dalam pelayanan data dan informasi berbasis elektronik permasalahan yang terjadi adalah mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi dan belum dilaksanakan secara penuh oleh perangkat daerah.

11. Koperasi Usaha kecil dan Menengah

a. Fungsi dan kelembagaan koperasi belum optimal;
b. Masih terbatasnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap perbankan;
c. Belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya;
d. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi koperasi dan UMKM.

12. Penanaman Modal

a. Belum semua Kabupaten/ Kota menyediakan Mall Pelayanan Publik dikarenakan tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai dan belum melaksanakan pembangunan MPP, sehingga menghambat pelayanan perizinan;
b. Promosi dan informasi investasi masih perlu ditingkatkan sehingga calon investor dapat mengetahui potensi yang ada di Sulawesi Selatan.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga belum optimal;
b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial masih sangat rendah;
c. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih rendah.

14. Statistik

a. Masih kurangnya kualitas data statistik sektoral;
b. Masih kurangnya ketersediaan aparatur statistika di provinsi sulawesi selatan;

15. Persandian

a. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana APU (Alat Pendukung Utama) Persandian;
b. Masih rendahnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

16. Kebudayaan

a. Promosi budaya tradisional Sulawesi Selatan masih kurang optimal baik di dalam dan luar negeri;
b. Masih rendahnya cagar budaya Sulawesi Selatan yang dilestarikan;
c. Peluang masuk yang besar dari pengaruh negatif budaya asing ke Provinsi Sulawesi Selatan.

17. Perpustakaan

a. Ketersediaan bahan pustaka masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat;
b. Minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan;
c. Peran kelembagaan dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam pengembangan pelayanan perpusatakaan di Provinsi Sulawesi Selatan;
d. Perlu adanya penguatan Lembaga perpustakaan di desa-desa baik SDM, sarana prasarana penunjang dan bahan pustaka.

18. Kearsipan

a. Belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Daerah;
b. Identifikasi dan penelusuran arsip bernilai sejarah belum efektif;
c. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif.

2.8.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Permasalahan urusan pemerintahan pilihan terbagi atas delapan urusan yang rumusan permasalahannya didasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah diukur pada tahun sebelumnya. Adapun permasalahan pada masing-masing urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pariwisata

a. Masih rendahnya kontribusi PDRB Pariwisata;
b. Belum semua Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan memiliki destinasi wisata unggulan;
c. Keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung peningkatan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal;

d. Pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan industri pariwisata di Sulawesi Selatan belum optimal;
e. Belum optimalnya pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata.

2. Pertanian

a. Perubahan iklim yang tidak menentu seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem dan fenomena el nino mempengaruhi produksi pertanian di Sulawesi Selatan;
b. Kondisi jaringan irigasi dan fasilitas penyimpanan belum optimal;
c. Keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan informasi pertanian;
d. Fluktuasi harga hasil pertanian yang tidak menentu serta kurangnya akses ke pasar yang lebih luas membuat pendapatan petani sering kali tidak stabil. Kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan juga mengakibatkan kerugian pascapanen.

3. Kehutanan

a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum optimal;
b. Menurunnya produksi hasil hutan bukan kayu;
c. Belum optimalnya pemegang izin perhutanan sosial yang menjalan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan;
d. Belum optimalnya penyeleggaraan penyuluhan kehutanan.
e. Tingkat degradasi hutan dan lahan masih tinggi pada Daerah Aliran Sungai (DAS).

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor ketenagalistrikan khususnya inspektur ketenagalistrikan sebagai pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
b. Porsi EBT dalam bauran energi nasional belum optimal.

5. Perdagangan

a. Menurunnya nilai ekspor perdagangan tahun 2023;
b. Fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
c. Promosi produk industri lokal masih kurang;
d. Daya saing produk lokal yang masih lemah.

6. Perindustrian

a. Pertumbuhan industri pengolahan non migas belum optimal;
b. Belum semua produk industri unggulan telah terstandarisasi dan tersertifikasi;
c. Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi.

7. Transmigrasi

a. Ketidaksesuaian antara keterampilan dasar calon transmigran dengan kebutuhan dasar daerah penempatan;
b. Masih sulitnya implementasi manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk kerjasama antar daerah.

8. Kelautan dan Perikanan

f. pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi;
g. Kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan masih rendah disebabkan pemenuhan dokumen perizinan tidak ada/ tidak lengkap/ masa berlaku habis karena prose perizinan melalui OSS, tidak adanya

aksesibilitas untuk mengurus perizinan menyebabkan pelaku usaha belum memahami pemenuhan standar/ aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku.

h. Menurunnya nilai produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan oleh penurunan nilai produksi rumput laut dan nilai produksi bandeng. Nilai produksi rumput lau berkontribusi sekitar 50% terhadap total nilai produksi budidaya;
i. Terbatasnya jumlah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan perikanan.

2.8.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. **Perencanaan Pembangunan**
   a. Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan evaluasi sebagai dasar antara perencanaan pembangunan daerah;
   b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
   c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
   d. Belum optimalnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
2. **Keuangan**
   a. Terlambatnya ketersediaan SSH sebagai dasar pengadaan dalam dokumen penganggaran perangkat daerah;
   b. Terjadi tumpan tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK masih sering terjadi;
   c. Masih kurangnya efektifitas pengelolaan APBD;
   d. Belum optimalnya pengelolaan asset pemprov Sulawesi Selatan yang ditandai dengan masih rendahnya persentase tanah Pemprov yang sudah bersertifikat.
3. **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**
   a. Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN belum optimal;
   b. Sistem Merit belum sepenuhnya dilakukan;
   c. Masih banyaknya pejabat ASN yang belum mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural.
4. **Penelitian dan pengembangan**
   a. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;
   b. Belum optimalnya pengembangan inovasi untuk peningkatan daya saing daerah.
5. **Pengawasan**
   a. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP;
   b. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa memenuhi peran sebagai penjamin mutu dan konsultan pada area kebijakan tata kelola, resiko dan pengendalian bagi pimpinan dan pemerintahan provinsi.

2.9. ISU STRATEGIS

2.9.1. ISU STRATEGIS GLOBAL

2.9.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDGs, terjadi penutupan sekolah, tempat kerja, pusat-pusat perbelanjaan dan layanan pemerintah. Setelah beberapa decade melakukan pengentasan kemiskinan global secara terus menerus, periode krisis dan guncangan covid-19 mengakibatkan hilang kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan selama sekitar tiga tahun antara (2020-2022). Berdasarkan data World Bank hampir 700 juta orang diseluruh dunia saat ini hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Selain itu Perempuan dan anak Perempuan juga menanggung beban yang berat dalam kemunduran SDGs, dan mendorong dunia untuk semakin jauh dari kesetaraan gender. Menurut data kependudukan PBB, Tahun 2023 lebih dari 40 persen Perempuan di seluruh dunia tidak dapat menggunakan hak mereka dalam pengambilan Keputusan mendasar.

Kemudian krisis iklim pun menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak saat ini, tahun 2023 merupakan tahun terpanas dalam Sejarah yang didorong oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan diperparah oleh fenomena cuaca El Nino. Rekor pemanasan global ini telah memperburuk banyak peristiwa cuaca ekstrem di Sebagian besar dunia pada tahun 2023 seperti gelombang panas yang hebat dan kebakaran hutan di Kanada dan Amerika Serikat serta kekeringan berkepanjangan dan banjir.

Sebagai upaya penyelamatan pencapaian target TPB/SDGs perlu dibutuhkan komitmen lebih dari para pemimpin yang dilakukan dengan menjadikan target SDG's sebagai prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.9.1.2. Ketegangan Geopolitik Global

Perang Rusia dan Ukraina di eropa belum juga mereda, Konflik Hamas dan Israel muncul kembali yang menimbulkan krisis kemanusiaan parah di jalur Gaza. Perang Israel – Hamas kembali menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia pada 7 Oktober 2023 yang telah meningkatkan resiko geopolitik di pasar keuangan dan telah menaikan minyak dunia sebesar 5 persen. Konflik-konflik ini menyebabkan ketegangan antara Amerika Serikat dengan China dan Barat dengan Rusia.

Konflik Israel-Palestina kembali memicu inflasi secara global yang dipicu oleh ketidakstabilan pasokan energi dan pangan yang berujung pada naiknya harga minyak dan komoditas. Selain itu ketidakpastian global juga dipicu oleh ketegangan Amerika dan Cina, dimana IMF melaporkan pada kuartal III 2023 tekanan inflasi masih ada dan pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan atau bahkan. Pemilihan umum yang akan berlangsung di tahun 2024 di beberapa negara (Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, India dan Amerika Serikat) juga akan

mempengaruhi kondisi geopolitik dan perekonomian global utamanya iklim investasi.

Meski demikian, kondisi geopolitik dunia tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Indonesia yang cukup stabil, begitu pula Sulawesi Selatan pada awal tahun 2024 berhasil mengendalikan inflasi. Saat ini Sulawesi Selatan untuk Bulan Januari 2024 mencapai 2,38 persen year on year (yoy) atau dibawah rata-rata inflasi nasional 2,57 persen.

2.9.1.3. Krisis Pangan Global

Konflik, guncangan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim yang ekstrem, dan melonjaknya harga pupuk telah menyebabkan krisis pangan dengan skala belum pernah terjadi sebelumnya, sebanyak 783 juta orang menghadapi kelaparan kronis. World Food Programme (WFP) PBB menyatakan lebih dari 333 juta orang menghadapi Tingkat kerawanan pangan yang akut pada tahun 2023, dan tidak tahu dari mana akan mendapatkan makanan berikutnya. Jumlah ini merupakan peningkatan yang mengejutkan yaitu hampir 200juta orang dibandingkan dengan tangkat sebelum pandemi Covid-19.

Mengatasi krisis pangan dunia, Pemerintah Indonesia memiliki strategi agar pangan Indonesia bisa mandiri yaitu melalui kedaulatan pangan. Pemerintah berusaha mengurangi rawan pangan dari 72 daerah pada tahun 2022 menjadi 61 daerah pada tahun 2024. Badan Pangan Nasional (BAPANAS) telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan, yang berisikan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan kajian kesiapsiagaan krisis pangan dan menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan.

Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dari wilayah timur, berdasarkan angka sementara BPS pada tahun 2023 luas panen di Sulawesi Selatan sebesar 0,97 juta hekater dengan produksi padi sekitar 4,94 juta ton gabah kering giling (GKG). Dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2023 sebesar 2,84 juta ton.

2.9.1.4. Perlambatan Ekonomi Global

Perekonomian dunia pasca pandemi masih menemukan jalan yang sulit untuk naik, sejumlah factor yang mempengaruhi perlambatan ekonomi global itu diantaranya adalah inflasi inti yang masih relatif tinggi, suku Bunga yang tinggi, beban utang yang tinggi, perdagangan dan investasi global yang melambat imbas fragmentasi geopolitik yang meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju cenderung melambat, bahan terkontraksi oleh inflasi tinggi dan suku bunga, daya beli dan investasi berkurang. Melambatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara perekonomian besar diikuti dengan melambatnya komditas global yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomi Indonesia khususnya melalui jalur perdangan.

Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2023 menurun 11,33 persen secara tahunan dibandingkan tahun 2022. Harga komoditas unggulan pendulang ekspor mengalami penurunan akibat penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor.

Mengutip dari data BPS, total nilai ekspor Indonesia pada Januari-Desember 2023 mencapai 258,82 miliar dollar AS, turun 1,33 persen dibandingkan ekspor 2022 yang sebesar 275,96 miliar dollar AS. Berdasarkan data BPS, eksport yang dikirim melalui Pelabuhan Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2023 mencapai 210,61 juta dollar AS, lima komoditas utama yang diekspor pada bulan Oktober 2023 yaitu nikel, besi dan baja; ikan dan udang; biji biji berminyak; serta garam, belerang dan kapur dengan distribusi persentasi masing-masing sebesar 55,24 persen, 22,20 persen, 5,84 persen dan 2,51 persen.

2.9.2. Isu Strategis Nasional

2.9.2.1. Inflasi

Inflasi merupakan Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus dalam jangka waktu tertentu dimana kenaikan harga beberapa barang dapat mengakibatkan kenaikan harga barang yang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang kemudian memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Kondisi Inflasi di Indonesia pada sebesar 2,57 persen year on year (yoy) di Januari 2024, merupakan salah satu yang terendah di dunia dan dikalahkan oleh Jepang, Arab Saudi, Italia dan China. Perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bisa merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam tim pegendalian inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Penjelasan kondisi inflasi nasional adalah sebagai berikut :

1. Inflasi inti pada Januari 2024 sebesar 0,20% (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,14% (mtm). Realisasi inflasi inti disumbang oleh komoditas emas, perhiasa, biaya sewa rumah, dan biaya kontrak rumah.

2. Kelompok volatile food pada Januari 2024 inflasi sebesar 0,01% (mtm), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,42 (mtm). Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan pasokan komoditas aneka cabai seiring perbaikan produksi. Penurunan inflasi volatile food lebih lanjut tertahan oleh inflasi komoditas tomat, bawang merah, dan beras. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi 7,22% (yoy), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnnya sebesar 6,73% (yoy).

3. Kelompok administrated prices pada Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,48 (mtm), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,39 (mtm). Deflasi dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara pasca berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubbsidi. Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,74% (yoy), relative stabil dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya.

Berdasarkan data BPS, pada bulan Januari 2024 inflasi di Sulawesi Selatan pada tahun Januari 2024 mencapai 2,38 persen (yoy) atau dibawah rata-rata nasional.

2.9.2.2. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi seseorang hidup dengan kurang dari US$ 1,9 per hari atau setara kurang lebih Rp. 45.000 per hari. Untuk memastikan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana Arahan Presiden RI, Kemenko PMK memprakarsai Inpres Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang "Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" ditetapkan pada 8 Juni 2022 yang selaras dengan SDGs yang menarget penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Inpres No. 4 Tahun 2022 telah menginstruksikan kepada 22 Kementerian dan 6 Lembaga serta seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk bekerja sama antar kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui keterpaduan dan sinergi program kegiatan dalam rangka penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Upaya penurunan jumlah penduduk miskin termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem di atas, selama ini telah dan akan terus dilanjutkan melalui tiga strategi, yaitu (1) pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial; (2) peningkatan pendapatan Masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi Masyarakat miskin; dan (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan sarana dan prasarana permukiman atau infrastruktur dasar lainnya.

Menurut data BPS September 2023, angka kemiskinan Ekstrem Nasional belum mencapai angka o dan masih dibesaran 1,74%, begitupula halnya dengan Provinsi Sulawesi Selatan masih di besaran 1,01% dan masih kurang 0,02% untuk menyentuh angka 0.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 melakukan rencana program, diantaranya :

1. Memberikan bantuan jaminan Kesehatan bagi Masyarakat yang terdaftar P3KE;
2. Pemberian bantuan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) khususnya kepada Rumah Tangga kurang mampu, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima barang yang akan diserahkan;
3. Pemberian bantuan pemasangan baru listrik khususnya kepada Rumah Tangga kurang mampu, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima barang yang akan diserahkan;
4. Intervensi bantuan daerah rentan rawan pangan dan gizi bibit holtikultura, bibit tanaman pangan, benih ikan, ungags/ ternak kecil;
5. Bantuan pangan rumah tangga miskin;
6. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, bibit holtikultura, benih ikan;
7. Bantuan pengembangan pangan local, bantuan bibit dan benih pisang, benih jagung manis/pulut;
8. Pemberian Bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat berupa bantuan Sarana usaha Garam Rakyat /Paket Sarana Inovasi Garam pada kelompok masuarakat usaha garam rakyat di Kabupaten/Kota;
9. Memberdayakan masyarakat pesisir dalam kegiatan penanaman/rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir yang dang dapat berdampak pada usaha ekonomi masyarakat pesisir;
10. Perlindungan Nelayan Calon Penerima Asuransi (orang) Jumlah nelayan yang mendafatkan perlindungan social dari Masyarakat P3KE;

11. Pemberian Bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat berupa bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut di Kab/Kota;
12. Bantuan penyediaan benih/benur kepada kelompok masyarakat pembudidaya di kabupaten/kota;
13. Bantuan benih ikan tawar diperairan umum darat di kabupaten/kota;
14. Pemberian bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan rumpon/rumah ikan di kabupaten/kota;
15. Pemberian bantuan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan berupa, Bantuan mesin, fish finder, rakkang, jaring ikan) di kabupaten/kota;
16. Berbagai pemberian Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan seperti Bantuan Usaha Ekonomi Produktif , Pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama Kepada Masyarakat Miskin Ekstrim;

2.9.2.3. Standar Pelayanan Minimal

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan. dengan dilaksanakannya peraturan ini maka akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

a. Pelayanan pendidikan menengah;
b. Pelayanan pendidikan khusus;
c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
d. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;

e. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
f. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
g. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
h. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
i. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
j. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
k. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
l. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
m. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
n. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

2.9.2.4. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun, peningkatan ini diikuti dengan menurunnya angka kelahiran serta kematian. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industri. Pada rentang tahun 2020 sampai tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi, dengan puncak peningkatan jumlah penduduk usia produktif diperkirakan saat Indonesia berusia 100 tahun yaitu di tahun 2045 dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Pada tahun 2020, sebanyak lima Provinsi di Inonesia telah berada pada tahap akhir bonus demografi sedangkan lainnya masih berada dalam tahap awal demografi, lima Provinsi yang berada pada tahap akhir bonus demografi adalah DKI Jakarta, DI, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, Indonesia perlu menyiapkan generasi penerus berkualitas dan melakukan pemerataan Pembangunan antarwilayah mengingat karakteristik kepulauan yang dimiliki Indonesia.

Bonus demografi memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Tak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang justru dapat menjadi ancaman bagi negara. Dampak positif dari bonus demografi adalah ketersediaan tenaga kerja, membantu perkembangan ekonomi sebuah negara karena semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja, dan Pertumbuhan sektor pemerintah yang lain. Namun demikian momen bonus demografi ini tidak hanya akan menghadirkan keuntungan bagi sebuah negara. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, maka fenomena ini akan membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah yang diantaranya adalah meningkatnya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang, Peningkatan jumlah angka lansia yang drastis dan mendominasi masyarakat suatu negara merupakan yang dinamakan aging population.

Berdasarkan data Tahun 2023 BPS , jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa, dengan 69,13 % penduduk Indonesia berada di jenjang usia produktif (15-64 tahun), 23,89% penduduk berusia 0-14 tahun, dan 6,98 % penduduk berusia 65 tahun ke atas, sehingga Rasio ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 44,65 %. Kemudian Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 9.312.019 jiwa, dengan jumlah usia produktif (15-64 tahun) sebesar 6.439.352 jiwa, sedangkan usia tidak produktif sebesar 2.872.667 jiwa. Untuk mengantisipasi bonus demografi yang terjadi pemerintah perlu sebagai fasilitator utama perlu melakukan langkah-langkah dalam menyediakan segala sarana dan prasarana dengan cukup. Misalkan dari segi kesehatan, untuk menjaga seorang individu agar tetap bertahan hidup hingga dan selama masa produktifnya maka perlu alat kesehatan yang memadai dan dari segi pendidikan, pemerintah juga bisa menyediakan sekolah atau sarana prasarana lain yang cukup untuk membentuk sumber daya manusia bersaing.

2.9.3. Isu Strategis Daerah

2.9.3.1. Optimalisasi Peran Sulawesi Selatan sebagai Gerbang Indonesia Timur

Sulawesi Selatan dikenal sebagai pintu gerbang Kawasan Indonesia Tumur, dikarenakan terletak ditengah-tengah wilayah kepulauan Indonesia dan sebagai penghubungan antara Kawasan barat dan timur Indonesia, serta berbatasan dengan laut yang menghubungkan benua Asia dan Australia. Dalam memantapkan peran sebagai poros utama pertumbuhan maritim Indonesia, Sulawesi Selatan meningkatkan pembangunan perhubungan laut dilanjutkan untuk meningkatkan pelayanan angkutan laut sehingga makin mampu menghubungan seluruh wilayah Tanah Air sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan serta peningkatan daya saing, efisiensi proses produksi dan distribusi dan pemasaran. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis.

Nilai ekspor yang dikirim melalui Pelabuhan Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebesar US$ 2218,47 Juta, dengan eksport terbesar adalah nikel (US$ 1232,26 juta) dan eksport terbesar melalui pelabuhan Malili dengan nilai ekspor sebesar US$ 823,34 Juta, Pelabuhan Makassar sebesar US$ 608,77 Juta, Pelabuhan Biringkassi sebesar US$ 39,73 juta, Pelabuhan Balantang Malili sebesar US$ 18,38 juta, Pelabuhan Hasanuddin sebesar US$ 9,94 juta, Pelabuhan Pare-pare US$ 4,23 juta, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar sebesar US$ 0,82 juta, Pelabuhan Masamba sebesar US$ 0,01 juta dan Palopo sebesar US$ 0. Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Selatan menurut sektor lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 72,73 % sedangkan transportasi hanya sebesar 13,02 %. Dengan demikian peran Pelabuhan masih harus lebih ditingkatkan untuk lebih berperan dalam meningkatan perekonomian di Sulawesi Selatan, regional dan nasional dan meningkatkan integritas dan konektivitas sistem perekonomian.

2.9.3.2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Pembangunan Sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Selatan merupakan proses yang tidak akan berakhir yang sesuai dengan amanat UUD Negara 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan SDM yang berkualitas dapat dilakukan melalui investasi bidang Pendidikan dan Kesehatan. Untuk menghadapi bonus demografi, Tingkat Pendidikan dan keahlian Masyarakat Sulawesi Selatan harus ditingkatkan. Saat ini beberapa perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan diiantaranya;

1. Terdapat 3 Universitas Negeri di Sulawesi Selatan, yang masing-masing yaitu Universitas Hasanuddin (Kota Makassar dan Kabupaten Gowa); Universitas Negeri Makassar (Kota Makassar, Kota Parepare dan Kabupaten Gowa); dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Kota Makassar dan Kabupaten Gowa).

2. Terdapat 6 Institut Negeri di Sulawesi Selatan, yaitu Institut Teknologi Bacharuddin Jusif Habibie (Kota Parepare); Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Mengkendek (Kabupaten Tana Toraja); Institut Agama Islam Negeri Palopo (Kota Palopo); Institut Agama Islam Negeri Parepare (Kota Parepare); Institut Agama Islam Negeri Bone (Kabupaten Bone); dan Institut seni dan Budaya Indonesia.

3. Terdapat 1 Sekolah Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN di Kota Makassar.

4. Terdapat 10 Politeknik Negeri di Sulawesi Selatan, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan Negeri Bone (Kabupaten Bone); Politeknik Negeri Media Kreatif PSDD Makassar (Kota Makassar); Politeknik Negeri Ujung Pandang (Kabupaten Maros); Politeknik Teknologi Negeri Bone; Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa (Kabupaten Gowa); Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene; Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (Kota Makassar); Politeknik Pariwisata Makassar; Politeknik ATI (Kementerian Perindustrian) Makassar; Politeknik Kesehatan Makassar.

Pembangunan politeknik menjadi prioritas utama dalam memperluas akses Pendidikan tinggi, dikarenakan Sulawesi Selatan ingin menciptkan entrepreneur baru yang berkualitas, menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai untuk meningkatkan produktivitas daerah; lulusan politeknik memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan Pendidikan menengah; kelebihan pendapatan akan menjadi Tabungan daerah yang bermanfaat untuk menopang aging population; dan memberikan akses yang kepada Pendidikan politeknik, secara tidak langsung mencegah Masyarakat Sulawesi Selatan dari pernikahan dini setidak dalam kurun waktu 4-5 tahun agar dapat menurunkan potensi terjadinya ledakan penduduk.

Pembangunan SDM berkualitas juga berkaitan dengan ketersediaan layanan Kesehatan yang berkualitas dan tersebar di seluruh kelompok Masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pemberdayaan Gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Selain pemerataan akses Kesehatan, kualitas layanan Kesehatan juga menjadi perhatian. Layan berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*sustanable).* Artinya semua jenis pelayanan kesehatan

yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan. serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah membangun Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie di Kota Parepare dan Tahun 2023 memabangun Rumah Sakit Regional La Mappapening di Kabupaten Bone. Rumah sakit regional dibangun bertujuan agar Masyarakat dapat menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi menjadi pusat rujukan utama dalam pelayanan kesehatan. Pemerataan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Rumah Sakit Regional menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang ditujukan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai usia harapan hidup yang lebih baik. Kemudian ketersediaan tenaga dokter (umum dan spesialis) dan perawat perlu ditingkatkan untuk mendukung SDM Sulawesi Selatan yang berkualitas.

2.9.3.3. Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani

Kebutuhan terhadap pangan adalah kebutuhan dasar manusia, pentingnya pangan bagi manusia juga diakui oleh negara dengan menjadikan urusan pangan sebagai salah satu urusan wajib. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercemin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Ketahanan pangan Sulawesi Selatan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi ketahanan pangan di Indonesia dan berperan sebagai lumpung pangan nasional khususnya di kawasan timur Indonesia, dengan produksi gabah kering giling di Sulawesi Selatan sebesar 4,94 juta ton dan jika dikonversi menjadi beras sekisar 2,84 juta ton, dengan kebutuhan Masyarakat Sulawesi Selatan sekisar 1 juta ton lebih, sehingga terdapat kelebihan sekisar hampir 2 juta ton.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam ketahanan pangan adalah terjadinya krisis pangan dunia, laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari laju pertumbuhan pangan, adanya perubahan iklim dan bencana alam, konversi lahan pertanian ke non pertanian dan adanya konflik global seperti Rusia dan Ukraina. Selain itu fenomena El Nino yang terjadi di Tahun 2023 yang memberikan dampak kepada produksi gabah yang turun dikarenakan kekeringan yang cukup Panjang, sehingga harus diantisipasi untuk di perencanaan Pembangunan selanjutnya.

2.9.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses bisnis. Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Berbagai aspek kehidupan manusia seakan-akan tercerabut dari akarnya akibat loncatan-loncatan teknologi. Loncatan teknologi tersebut terutama dengan berkembangnya teknologi digital, mulai dari massifnya penggunaan internet (internet of things/IoT) hingga Artificial Intelligence (AI). Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan 20 tahun kedepan.

Beberapa manfaat yang dibawa dalam transformasi digital adalah efisiensi operasional yang mempersingkat proses bisnis melalui penggunaan teknologi cerdas dan sistem yang terintegrasi; inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau Masyarakat; peningkatan produktivitas melalui alat-alat kolaborasi online, analisis data real time dan akses terhadap informasi lebih cepat; flesibilitas dan mobilitas yang memungkinkan pegawai untuk bekerja dari mana saja, kapan saja dan dengan perangkat apapun; dukungan keberlanjutan yang dapat mengurangi konsumsi kertas, energi dan limbah fisik dan proses yang lebih ramah lingkungan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi presisi berbasis drone dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobile untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan e-commerce produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Disrupsi teknologi akan merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya.

2.9.3.5. Tata Kelola pemerintahan yang efektif

Kinerja tata Kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi menjadi sebesar 74,21. perubahan paradigma reformasi birokrasi menuntut tata Kelola pemerintah yang lebih adaptif dan efektif sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan perkembangan zaman, melalui penguatan kapasitas dan kemampuan berpikir sumber daya aparatur dengan perubahan pada sistem dan pola kerja, terutamanya pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis resiko, riset dan inovasi di semua tahapan pemerintahan yaitu perencanaan, penganggaran, kepegawian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Selain itu penguatan pada digitalisasi pemerintahan dan penguatan pelayanan publik juga perlu dimaksimalkan. Kolaborasi pentahelix (akademisi, bisnis, Masyarakat, pemerintah dan media) untuk mencipatakan tata keloa pemerintahan yang baik, adaptif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Meskipun menghadapi beberapa tantangan, reformasi birokrasi harus terus dilakukan dengan tidak berfokus hanya pada administrasi saja tapi juga harus berorientasi pada hasil Pembangunan daerah yang berdampak kepada Masyarakat

sesuai dengan isu yang berkembang seperti penggunaan produk dalam negeri, penanggulangan kemiskinan, inflasi dan yang lainnya.

2.10. INOVASI DAERAH

Riset merupakan kegiatan sistematis dan terorganisir yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, memvalidasi pengetahuan yang sudah ada dan/atau mengembangkan teori baru. Tujuan utama dari riset adalah menjelaskan hubungan antara variabel, menguji hipotesiss dan/atau memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat. Riset yang dilakukan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Berikut riset yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024.

Tabel II.148.
Inovasi Daerah

No	Judul	Pelaksana	Tipe Swakelola
1	Kajian Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Lensa Analitica	Swakelola Tipe 3
2	Peranan Kelembagaan Sosial dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Sulawesi Selatan	Tim Peneliti Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Swakelola Tipe 1
3	Kajian Pengembangan Potensi Perikanan Berkelanjutan di Sulawesi Selatan Melalui Implementasi Strategi Blue Economy	LP2M UNHAS	Swakelola Tipe 2
4	Kajian Pengembangan Pertanian Berkelanjutan sebagai Strategi Menghadapi Perubahan Iklim Global	ELSTUDIKA	Swakelola Tipe 3
5	Kajian Strategi Pelestarian Hutan Lindung di Sulawesi Selatan	LP2M UNHAS	Swakelola Tipe 2
6	Pemanfaatan Serat Tandan Kosong Kelapa Hybrid serat Gelas Menjadi Komposit untuk dijadikan material plafon rumah	PNUP	Swakelola Tipe 2
7	Perlindungan dan	LP2M UNHAS	Swakelola Tipe 2

No	Judul	Pelaksana	Tipe Swakelola
	Penguatan Industri Beras Tarone untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat Seko Luwu Utara Melalui Hak Indikasi Geografis (HAKI KEMENKUMHAM RI)		

Hasil riset yang dilakukan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan serta potensi masyarakat. Selain itu, dukungan anggaran menjadi investasi kritis dan strategis dalam kegiatan riset karena berperan dalam kelancaran dan keberhasilan suatu riset. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, peneliti dapat fokus pada tujuan riset tanpa harus terkendala finansial yang dapat menghambat kemajuan penelitian.

Selain melaksanakan riset, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan juga bertugas melakukan pendampingan dan pembinaan inovasi bagi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. Pengembangan dan penerapan suatu inovasi menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif atau daya saing daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan inovasi daerah dalam berbagai sektor terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan senantiasa memperhatikan dan penekanan pada tujuan dan arah pembangunan daerah maupun penguatan potensi dan kearifan lokal yang ada.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan

"pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi".

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi dari tahun 2017 s.d. 2020 yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, 8.016, dan 17.779 inovasi. Pada tahun 2021, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 25.124 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

Daftar inovasi yang diterapkan pada 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.149.
Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2021 pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1.	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Aplikasi BajuBodo (Belanja Langsung Melalui Order Online)
2.	Biro Organisasi	K' MIRNA Pi (Knowledge Management Repository Dalam Replikasi Inovasi Pelayanan Publik)
3.	Sekretariat DPRD	Sistem Informasi E - Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembentukan Kompi Dan Pleton Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
5.	Dinas Pendidikan (UPT SMA Negeri 4 Wajo)	USB (Ujian Sekolah Berdiferensiasi)

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Judul Inovasi
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Halo Rumah Idamanku
7.	Dinas Sosial (UPT Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mappakasunggu)	WIDURI (Wisata Edukasi Layanan Ramah Lansia)
8.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	SI PENGOLAH LIMBAH B3 (Sistem Pelayanan Administrasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)
9.	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	SSVT (South Sulawesi Virtual Trip)
10.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SI BALUNG LESTARI SULSEL (Sapi Bali Unggul dan Lestari)
11.	Dinas Perindustrian	Inovation Care (Pembuatan Power Hammer & Belt Grinding)
12.	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	LAPAS TB RO (Layanan Pendampingan Pasien TB Resisten Obat)
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	SIPAKARAJA (Sistem Pendaftaran Online, Skrining Penyakit, Dan Konsultasi Rawat Jalan)
14.	Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi	SILEWAI (Sistem Layanan Kesehatan Jiwa Terintegrasi)
15.	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	Pembentukan Tim Rekruiter Klien Ibu Hamil Untuk Pelayanan Kesehatan Gratis
16.	Rumah Sakit Sayang Rakyat	PIO SAYANG (Pelayanan Informasi Obat)

sumber: indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 16 inovasi yang diterapkan di tahun 2021 dan terdata di situs Indeks Inovasi Daerah Kemendagri. Dapat dilihat jumlah lahirnya inovasi baru di tahun 2021 menurun sebanyak 38% dari tahun sebelumnya. Dari 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Selatan, hanya 16 OPD yang menerapkan inovasi di tahun 2021. Dengan demikian, hanya 30% OPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang berpartisipasi dalam penerapan inovasi di tahun 2021 yang artinya menurun dari tahun sebelumnya.

Pada penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kemendagri, Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan sebanyak 17 inovasi dari 29 inovasi yang diinput di aplikasi. Dimana penilaian IID di tahun 2021

melaporkan inovasi yang diterapkan pada 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020 saja. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki predikat Inovatif dari hasil penilaian tersebut dengan skor sebanyak 49,24. Sistem penilaian di tahun 2021 berbeda dengan penilaian di tahun 2020 yang menggunakan total skor kematangan seluruh inovasi. Sementara di tahun 2021 menggunakan hasil rata-rata dari skor kematangan seluruh inovasi. Namun, di tahun 2021 predikat Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari Sangat Inovatif menjadi Inovatif. Sehingga perlu meningkatkan jumlah inovasi dan skor kematangannya lebih banyak lagi agar kembali mencapai predikat Sangat Inovatif.

A. Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2022

Daftar inovasi yang diterapkan pada 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.150.
Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2022 pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Website Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Badan Pendapatan Daerah	Bapenda Sulsel Mobile
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	PRC (Pasukan Reaksi Cepat) Andalan Sul-Sel
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Aplikasi e-RUBIK (Rumah Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja)
5.	Dinas Sosial (UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng)	MADANI (Manajemen Pelayanan & Pemberdayaan Integratif)
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SiMPAS (Sistem Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan)
7.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Website Satu Data Sulawesi Selatan
8.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SIKEPO (Sistem Informasi Kemitraan Peternakan Online)
9.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (UPT Pelayanan Inseminasi Buatan Dan Produksi Semen)	SILAJU E-Semen Beku (Sistem Layanan Penjualan Elektronik Semen Beku)
10.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (UPT Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan)	DISREMVET (Digitalisasi Sistem Rekam Medik Veteriner)
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Teknologi Pembangkit Listrik Hybrid Tenaga Surya dan Bayu dengan Sistem Kontrol Berbasis Android untuk Kebtuhan Energi Listrik Petani Tambak/Garam
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	LIPASABBEKU (Layanan Integritas Dan Pengembangan Sistem Administrasi Berbasis

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Judul Inovasi
		Kependudukan)
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	Ambulance Peduli RSUD Haji Makassar
14.	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	Pelayanan Perawatan Luka (Woundcare) Modern Homecare
15.	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	Physiotherapy Homecare

sumber: indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id dan hasil pendataan Bidang Litbang)

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 15 inovasi yang diterapkan di tahun 2022 dan sebagian terdata di situs Indeks Inovasi Daerah Kemendagri. Jumlah penerapan inovasi baru di tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya. Namun, dari 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Selatan, hanya 11 OPD yang menerapkan inovasi di tahun 2022. Dengan demikian, angka partisipasi OPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan menurun ke 20% dalam penerapan inovasi di tahun 2022.

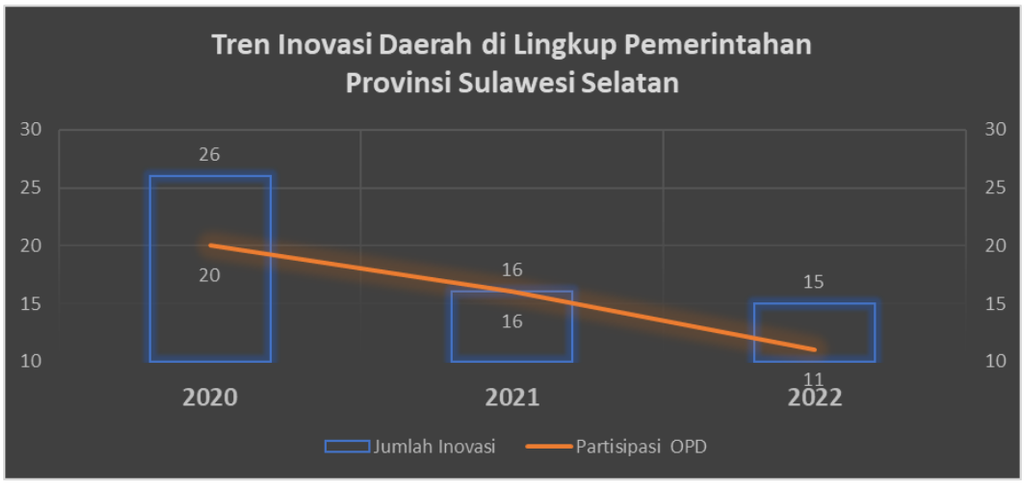
Pada penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kemendagri, Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan sebanyak 18 inovasi dari 48 inovasi yang diinput. Dimana penilaian IID di tahun 2022 melaporkan inovasi yang diterapkan pada 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2021 saja. Hasil penilaian IID akan diumumkan di Bulan Oktober – November oleh Kemendagri.

B. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022

Penilaian Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Kemendagri tiap tahun. Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Bagi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan penilaian Indeks Inovasi Daerah merupakan motivasi untuk mewujudkan daerah Sulawesi Selatan sebagai daerah yang inovatif. Namun, tentu saja perlu dukungan dari Organisasi Pemerintahan Daerah yang berada di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi untuk mewujudkan hal itu. OPD harus berpartisipasi dalam menciptakan inovasi baru di tiap tahunnya agar penilaian IID pada Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan predikat Sangat Inovatif hingga Terinovatif tiap tahunnya. Penilaian IID ini dengan maksud untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Grafik II.78.
Tren Perkembangan Inovasi Daerah di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022



Namun berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan inovasi di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan. Lahirnya inovasi baru lebih banyak di tahun 2020 lalu menurun di tahun 2021 sebanyak 38% dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2022 inovasi yang baru diterapkan berjumlah sama dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, partisipasi OPD dalam melahirkan inovasi baru semakin berkurang dari tahun ke tahun. Data OPD yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.151.
Jumlah Inovasi Tiap OPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan tidak termasuk dalam OPD Lingkup Pemprov Sulsel, namun melaporkan inovasinya melalui admin Pemprov Sulawesi Selatan

No.	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Total Inovasi
1.	Inspektorat Daerah	1	-	-	**1**
2.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	**-**
3.	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	**-**
4.	Biro Hukum	-	-	-	**-**
5.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	1	**1**
6.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	-	**1**
7.	Biro Organisasi	1	1	-	**2**
8.	Biro Umum	-	-	-	**-**
9.	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	**-**
10.	Sekretariat DPRD	-	1	-	**1**
11.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	-	-	**3**

No.	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Total Inovasi
12.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
13.	Badan Pendapatan Daerah	2	-	1	**3**
14.	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
15.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	-	-	**1**
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	-	**1**
18.	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	1	1	**2**
20.	Dinas Pendidikan	-	1	-	**1**
21.	Dinas Kesehatan	1	-	-	**1**
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	-	-	**1**
23.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	1	1	**2**
24.	Dinas Sosial	-	1	1	**2**
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	1	**1**
26.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	-	-	**1**
27.	Dinas Ketahanan Pangan	1	-	-	**1**
28.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	1	-	**1**
29.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
30.	Dinas Perhubungan	1	-	-	**1**
31.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	-	1	**1**
32.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
33.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	-	-	**2**
34.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-
35.	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	1	1	-	**2**
36.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	-	-	**3**
37.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	-	-	**1**
38.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	-

No.	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Total Inovasi
39.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1	3	**4**
40.	Dinas Kehutanan	1	-	-	**1**
41.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	1	**1**
42.	Dinas Perindustrian	-	1	-	**1**
43.	Dinas Perdagangan	1	-	-	**1**
44.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	1	**1**
45.	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	-	1	-	**1**
46.	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	-	1	3	**4**
47.	Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi	1	1	-	**2**
48.	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	1	-	-	**1**
49.	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	-	1	-	**1**
50.	Rumah Sakit Sayang Rakyat	1	1	-	**2**
51.	UPT Transfusi Darah	-	-	-	-
52.	UPT Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-
53.	UPT RSK Gigi dan Mulut	-	-	-	-
Total		26	16	15	**57**

Sumber: indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id dan hasil pendataan Bidang Litbang)

Berdasarkan tabel di atas, dari 53 OPD sebanyak 37 OPD yang memiliki inovasi baru selama 3 tahun terakhir. Sementara 16 OPD lainnya belum sama sekali melaporkan inovasi baru selama 3 tahun terakhir di Bidang Litbang Bappelitbangda. Perangkat daerah yang terbanyak memiliki inovasi selama 3 tahun terakhir adalah RSUD Haji Makassar yaitu sebanyak 4 inovasi. OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memiliki 4 inovasi yang diterapkan oleh UPT yang dibawahi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya OPD Bappelitbangda, Bapenda, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki jumlah 3 inovasi selama 3 tahun terakhir.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2025 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2025 yang meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2025 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2023, awal tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 di Sulawesi Selatan, serta potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas dalam rangka menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah. Keuangan daerah memuat realisai pendapatan dan belanja daerah serta memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2023 dan kondisi perkembangan ekonomi tahun 2023, target tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Arah kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2023 maupun perkiraan tahun 2025, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Nasional untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ekonomi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang positif sebesar 4,51 % (c to c) pada tahun 2023, kondisi ini mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun 2023 sebelumnya yang mencapai 5,09 % (c to c). Ketegangan geopolitik antarnegara yang terjadi antara rusia dengan ukraina serta konflik timur tengah, telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (KIL}, kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, peningkatan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus {DTK) untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk

pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis dana lainnya.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,67 – 6,82 persen; Tingkat Kemiskinan 8,20 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,03 persen; Gini Rasio 0,365; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 74,55 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, diarahkan pada **"*Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing",*** dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (tata kelola), Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (infrastuktur), Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (pengembangan wilayah dan hilirisasi), Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (Sosial Ekonomi), Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (Lingkungan Hidup), Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

3.1.1 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relative stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2024. Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2025, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan

tetap digenjot. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2025. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif diwilayah Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor –sebagai komoditas nir nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Sulawesi selatan terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Sulawesi selatan menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industry maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industry berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemic menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat renewable lebih muda untuk dapat sustainable dan environmental friendly serta dapat mendukung kampanye global green economy,

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2023 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 antara lain; komoditas ekspor Sulawesi Selatan tidak terdampak perang dagang Amerika dan Tiongkok, peningkatan konsumsi rumah tangga, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Menjelang datangnya tahun 2024, perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar

3%[4]. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Suasana geopolitik yang berubah
2. Terjadinya perang Rusia-Ukraina
3. Konflik Timur Tengah (Palestina-Israel)
4. Pesatnya perkembangan teknologi digital
5. Perubahan iklim
6. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda
7. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto
8. Tuntutan ekonomi keuangan hijau
9. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,17% (yoy)[1] dan pada akhir tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 5,05 % (C to C) . Kemudian pada tahun 2024 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,3 –5,9 % sedangkan tahun 2025 sebesar 5,3 –5,7 %.

Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2023 yang dinilai stabil dan resilien tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Di sektor pasar modal, IHSG posisi 30 November 2023 tercatat menguat sebesar 3,36% secara ytd ke level Rp7.080,74. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2023 tetap terjaga dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp6.902,98 triliun (tumbuh 8,99% secara yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp8.198,80 triliun (tumbuh 3,43% secara yoy). Adapun untuk sektor keuangan non bank, akumulasi pendapatan premi Perusahaan Asuransi posisi Oktober 2023 mencapai sebesar Rp264,23 triliun (tumbuh 3,54% secara yoy) dan dari industri Perusahaan Pembiayaan, piutang pembiayaan mencapai

Rp463,12 triliun (tumbuh sebesar 15,02% secara yoy)[2]. Capaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan tahun 2023 di atas, tentu patut kita syukuri bersama. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan kuat di tengah perlambatan perekonomian serta tingginya ketidakpastian global.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh positif, Pertumbuhan ekspor barang disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diprakirakan meningkat; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran varian baru COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2025, walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Daerah

Ekonomi Sulsel diprakirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diprakirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diprakirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2023 diprakirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diprakirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi

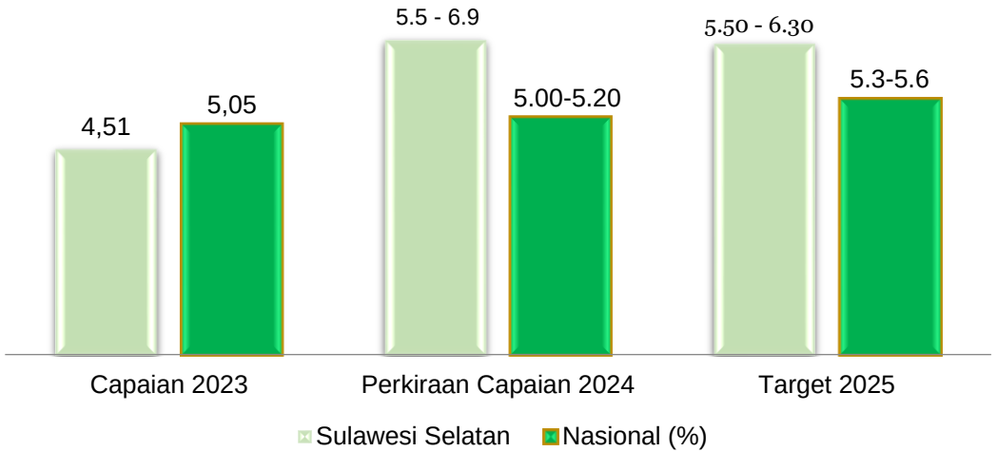
dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2023.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2024 diprakirakan kembali ke rentang sasaran 3,0±1,0% (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diprakirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2024.

3.1.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan ditahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya tumbuh sebesar 4,51 persen atau masih dibawah capain nasional yang mencapai 5,05 persen masih mengalami perkembangan yang fluktuatif, maka ditahun 2024 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5– 6,90 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-5,20 persen. Sementara untuk ditahun 2025 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,50 – 6,30 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,6 persen.

Grafik III.1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional,
Capaian Tahun 2023, Perkiraan Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

Laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 menurut struktur jika dilihat dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,69 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,69 persen; konstruksi sebesar 14,17 persen dan industri pengolahan sebesar 12,85 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,40 persen.

Tabel III. 1
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,38	2,57	0,09	22,54	22,13	21,69
B.	Pertambangan dan Penggalian	-0,59	0,32	13,63	4,75	5,10	5,13
C.	Industri Pengolahan	3,02	9,73	4,26	12,50	12,89	12,85
D.	Pengadaan Listrik, Gas	10,87	14,69	8,63	0,07	0,07	0,07
E.	Pengadaan Air	4,07	6,48	2,94	0,10	0,10	0,09
F.	Konstruksi	4,14	1,59	5,20	14,42	14,08	14,17
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,50	6,55	4,75	14,59	14,64	14,69
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,21	21,20	8,54	3,08	3,95	4,47
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,96	17,74	6,61	1,21	1,32	1,34
J.	Informasi dan Komunikasi	6,39	5,25	6,86	5,56	5,35	5,35
K.	Jasa Keuangan	1,14	1,15	2,91	3,63	3,58	3,53
L.	Real Estate	2,58	3,86	5,02	3,62	3,49	3,45
M, N.	Jasa Perusahaan	6,23	14,16	9,28	0,43	0,46	0,49
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	2,92	1,99	3,36	4,49	4,12	4,01
P.	Jasa Pendidikan	3,67	2,83	2,79	5,36	5,06	4,91
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,77	8,64	7,33	2,35	2,32	2,35
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	7,56	9,56	11,22	1,30	1,33	1,41
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**4,64**	**5,10**	**4,51**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

3.1.1.4.2 PDRB Perkapita

Sedangkan untuk PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 65,59 juta. Dan pada tahun 2023 ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 65,98 juta, kemudian untuk tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 70,07 Juta dan di tahun 2025 ditergetkan mencapai sebesar Rp. 74,55 Juta.

Grafik III.2.
PDRB Perkapita Sulawesi Selatan,
Capaian 2022, Perkiraan 2023, Target 2024 dan 2025



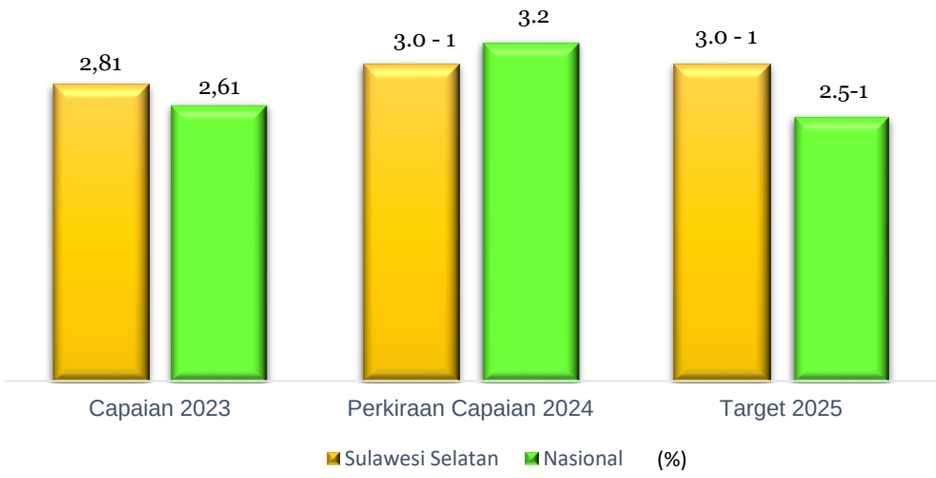
Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

3.1.1.4.3 Inflasi

Inflasi di tahun 2023 sebesar 2,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 117,35. Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi (y-on-y) tertinggi terjadi di Makassar sebesar 2,89 persen dengan IHK sebesar 117,49. Sedangkan inflasi (y-on-y) terendah terjadi di Palopo sebesar 2,21 persen dengan IHK sebesar 115,60. Tren kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan kacang panjang. Menyikapi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi berbagai program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Inflasi utamanya disumbang oleh kelompok transportasi, khususnya pada komoditas bensin dan angkutan udara, sebagai dampak dari kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan mobilitas yang meningkat pada momen Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama pada komoditas telur ayam ras, beras, dan rokok kretek filter. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2024 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2025 sebesar 3,0-1,0 persen.

Grafik III.3.
Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025



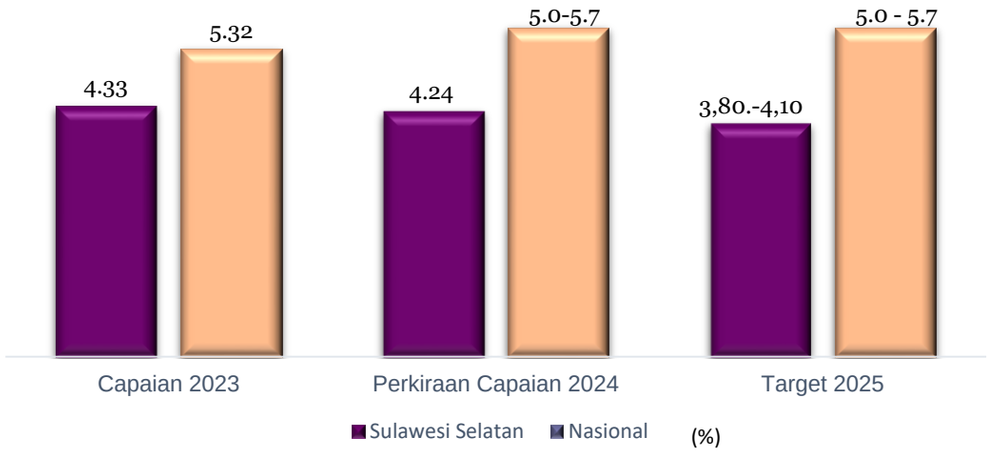
Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

3.1.1.4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 35,84 persen pada Tahun 2023 atau setara dengan 1,60 juta orang.

Melihat dari kondisi saat ini, , Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2024 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,24 persen atau masih lebih rendah jika dibandingkan dari capaian tahun 2023 yang mencapai 4,33 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,32 persen. Sementara untuk tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah sulawesi selatan sebesar 3,80-4,10 persen atau lebih rendah dari target Nasional yaitu 5,0-5,7 persen.

Grafik III.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025



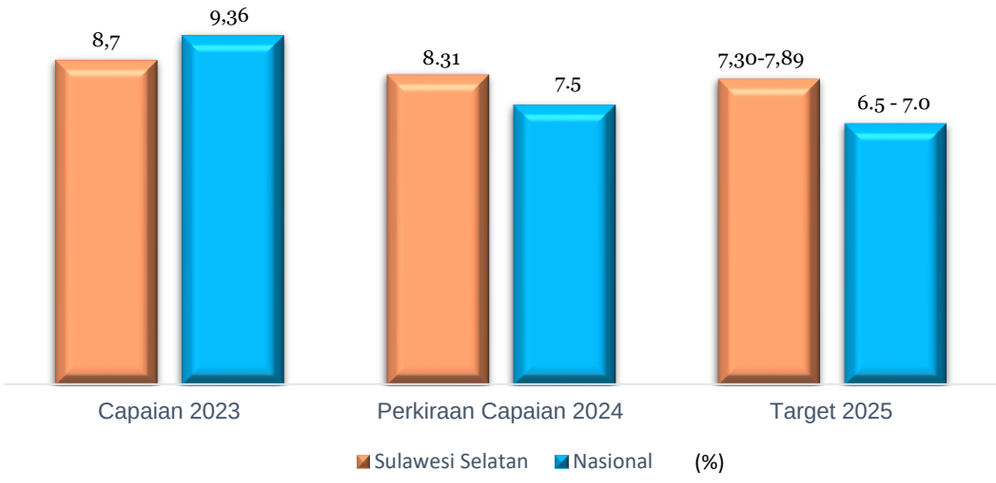
Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

3.1.1.4.5 Kemiskinan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2023 berjumlah 788,85 ribu orang, mengalami kenaikan sebesar 11,41 ribu orang dibanding tahun 2022 yang berjumlah 777,44 ribu orang . Penduduk miskin di daerah perkotaan secara tahunan mengalami peningkatan, peningkatan ini terjadi sebab adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang mengakibatkan beberapa usaha tutup dan berujung sumber pendapatan masyarakat yang semakin menurun.

Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 di prediksi akan mencapai 8,31 persen. Namun pada tahun 2025, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang belum pulih secara merata serta makin meningkatnya jumlah penduduk miskin dan perkotaan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 7,30-7,89 persen atau diatas target Nasional yaitu 6.5-7.5 persen.

Grafik III.5.
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

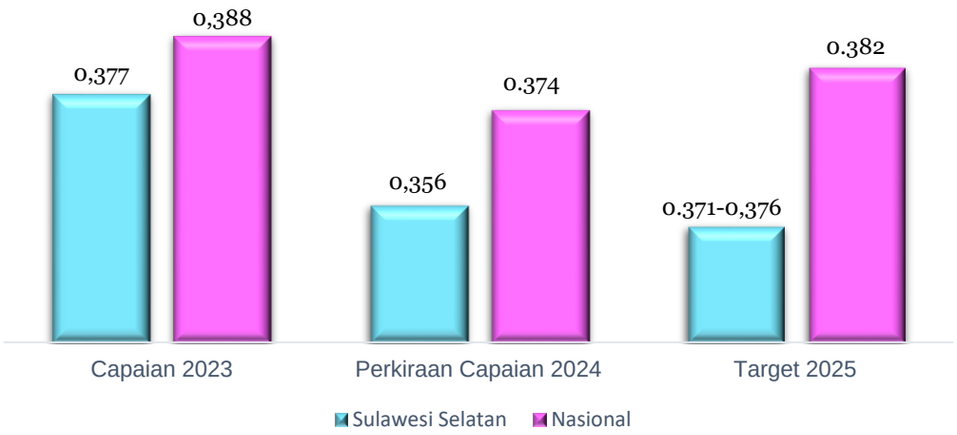
3.1.1.4.6 Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2023 mencapai sebesar 0,377, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,388. Untuk tahun 2023, Gini Ratio di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 di prediksi akan mencapai angka 0,356, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,374, atau diatas angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2025, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,371-0,376, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,382 atau diatas angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan penurunannya dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan 2025. Fluktuasi Gini Ratio ini disebabkan karena dampak ekonomi nasional yang

mengalami pemulihan sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Grafik III.6.
Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional
Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2025 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada

hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Gambar III.1.
Tema RKP Tahun 2025

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Gambar III.2.

Arah Kebijakan RKP Tahun 2025

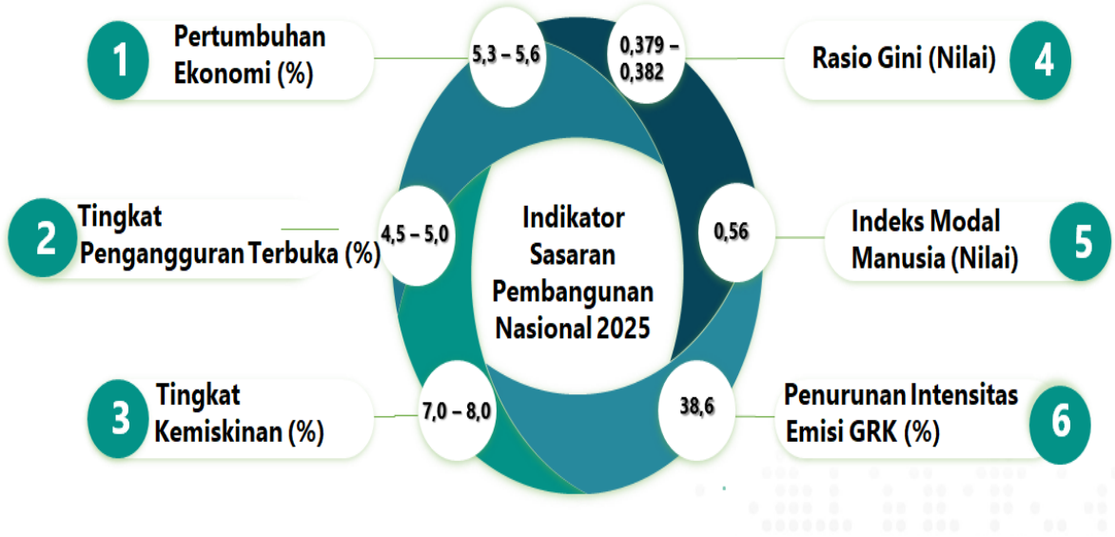


Sumber : *Rancangan awal RKP tahun 2025*

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional, yaitu sebagai berikut :

Gambar III.3.

Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: Rancangan awal RKP tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2025, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
5. Menurunkan kemiskinan;
6. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
8. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
11. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD 2024-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2024–2026 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa konsekuensi adanya penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada Undang-undang HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan Kabupaten/Kota.

Penerapan UU HKPD diproyeksikan akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 16,09 persen pada tahun 2025 yang disumbang oleh penurunan PKB sebesar 35,67 persen dan BBNKB sebesar 24,96 persen. Penghitungan proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB ini dihitung berdasarkan data objek yang tercatat pada sistem Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sulawesi Selatan. Potensi pajak daerah baru dari pajak alat berat (PAB) dan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diproyeksikan akan menambah pendapatan daerah walaupun tidak signifikan. Selain hal tersebut, di Provinsi Sulawesi Selatan masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Apabila melihat kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 5,96 persen, sedangkan untuk realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar 6,53 persen yang menunjukan adanya peningkatan kemampuan dari masyarakat seiring dengan berangsur normalnya aktivitas masyarakat.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan pada tahun 2025, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek

legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pembayaran;
2) Pemenuhan target realisasi Pajak dan Retribusi sebesar 100% Non-tunai.
3) Penempatan Kasir/Teller Bank RKUD di seluruh Kasir PAD;
4) Penambahan dan penguatan kerjasama dengan penyedia aplikasi dompet digital (Gopay, OVO, Tokopedia, dan sejenisnya) dalam pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis elektronik;
5) Pembenahan database dan aplikasi penanganan piutang secara realtime;
6) Pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bekerjasama dengan UPT PKB Dinas Perhubungan sebagai syarat Uji KIR.
7) Penguatan Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik Kab/Kota se-Sulsel;
8) Peningkatan Efektivitas Kerjasama Bapenda dengan Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah;
9) Peningkatan kegiatan Penertiban/pemeriksaan PKB secara door to door dan di jalan raya bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulsel dan Jasaraharja;
10) Peningkatan koordinasi dan regulasi bersama seluruh stakeholder dalam pendataan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam menunjang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
11) Perhitungan ulang struktur dan besaran tarif retribusi;
12) Peningkatan kompetensi petugas pelayanan retribusi;
13) Peningkatan dan revitalisasi prasarana dan sarana pendukung objek retribusi;
14) Perbaikan tata kelola (penatausahaan, pengamanan, sertifikasi) aset daerah;
15) Identifikasi dan inventarisasi aset berdasarkan penggunaannya;
16) Meningkatkan promosi dan pemanfaatan aset daerah;
17) Peningkatan profesionalisme BUMD;
18) Pemetaan penyertaan modal berdasarkan potensi kinerja BUMD.

Selanjutnya terkait penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap memperhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah sesuai dengan penetapan Undang-undang HKPD sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer di Tahun 2025. Adapun untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditujukan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah.

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk

pelaksanaan amanat kebijakan pendapatan daerah dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2025 arah kebijakan pendapatan daerah akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah dalam bentuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah seperti ;

a. Pemenuhan target realisasi Pajak dan Retribusi sebesar 90% Non-tunai (Kepgub No.835/III/Tahun 2022 tentang Peta Jalan Implementasi ETPD Prov. Sulsel 2022-2025);
b. Penempatan Kasir Bank RKUD di seluruh Kasir PAD;
c. Peningkatan kerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Digital pada semua OPD Pengelola PAD (e-commerce, e-wallet/tapcash);
d. Penyedia Plank-elektronik untuk pengelolaan Ret. Pelayanan Kepelabuhan, tempat rekreasi dan Olahraga, serta pengelolaan tempat khusus parkir; dan
e. Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis elektronik.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

a. Penguatan Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik Kab/Kota se-Sulsel;
b. Peningkatan Efektivitas Kerjasama Bapenda dengan Reskrim Polda Sulsel dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah; dan
c. Peningkatan kegiatan Penertiban/pemeriksaan PKB secara door to door dan di jalan raya bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulsel dan Jasaraharja.

Kerjasama antar instansi terkait juga terus dilakukan bersama Bank Indonesia dengan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), melakukan kerjasama dengan Kanwil Pajak dan Kanwil Bea Cukai, host to host dengan Kantor perizinan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam membeli kendaraan baru sesuai alamat domisili di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penerimaan Pajak Daerah.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) akan tetap di koordinasikan bersama seluruh stakeholder dalam upaya pendataan terhadap penjualan antara Wajib Pungut (WAPU) dan pengguna BBM.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui optimalisasi peningkatan SDM (Diklat PPNS, Juru Sita dan diklat perhitungan nilai asset. Dengan didukung peninjauan regulasi dan peninjauan tarif retribusi. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan diusahakan untuk menambah porsi saham kepemilikan sehingga dapat meningkatkan deviden ke Pemerintah Provinsi, dan selanjutnya pada kelompok lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi kebijakan untuk mendorong penggunaan jasa giro pada kas daerah dengan tujuan mencapai efisiensi, pengurangan risiko, peningkatan transparansi, dan optimalisasi pengelolaan keuangan. Penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terkait kebijakan ini, termasuk mempertimbangkan kebijakan perbankan, kerjasama dengan lembaga keuangan, dan kebutuhan infrastruktur pendukung seperti perangkat lunak keuangan

yang memadai. Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dalam meningkatkan efektivitas BLUD dalam rangka peningkatan PAD dan kemandirian pembiayaan BLUD seperti Rumah Sakit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diklat dan Pelabuhan. kebijakan optimalisasi pendapatan akan ditujukan pada keberlangsungan upaya pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi menjadi PAD baru.

3.2.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2022-2026

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp4.813.602.612.187,00 mengalami penurunan sebesar Rp647.575.308.756,00 atau 11,86% dari target Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan perubahan kebijakan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi opsen PKB dan BBNKB berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan PAD diuraikan dalam beberapa jenis yakni:

3.2.2.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp4.173.517.521.481,00, menurun Rp683.989.552.605,00 atau 14,08% dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); diproyeksikan sebesar Rp1.144.934.021.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp557.241.859.000,00 atau 32,74% dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2024. Target tersebut adalah penyesuaian Undang Undang HKPD dimana Opsen PKB di terapkan sebesar 66% dari Pajak Terutang.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); diproyeksikan sebesar Rp870.453.180.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp241.767.251.000,00 atau 21,74% dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2024. Target tersebut adalah penyesuaian Undang Undang HKPD dimana Opsen PKB di terapkan sebesar 66% dari Pajak Terutang.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); diproyeksikan sebesar Rp1.125.141.299.500,00, mengalami peningkatan sebesar Rp57.817.049.500,00 atau 5,42% dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2024. Target tersebut disusun berdasarkan tren pertumbuhan realisasi PBB-KB dan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025.
4. Pajak Air Permukaan; diproyeksikan sebesar Rp220.685.272.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp15.771.308.703,00 atau 7,67% dibandingkan target APBD Tahun 2024. Target tersebut disusun

berdasarkan tren pertumbuhan realisasi Pajak Air Permukaan dan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025.

5. Pajak Rokok; diproyeksikan sebesar Rp764.032.798.789,00 berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan menunggu terbitnya Peraturan Dirjen terbaru tentang estimasi alokasi pajak rokok.
6. Pajak Alat Berat; diproyeksikan sebesar Rp6.779.751.000,00 yang dihitung berdasarkan realisasi tahun 2019.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); diproyeksikan sebesar Rp41.491.199.000,00 berdasarkan tren pertumbuhan realisasi 3 tahun terakhir Kabupaten/Kota. Jenis pajak ini termasuk objek pajak baru yang bersumber dari pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

3.2.2.1.2 Retribusi Daerah

Proyeksi Retribusi Daerah sebesar Rp300.667.135.819,00, meningkat sebesar Rp258.423.594.419,00 atau 611,75% dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pemindahan pencatatan penerimaan BLUD yang awalnya berada pada Komponen Lain-lain PAD yang sah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.137.026.747.150,00, meningkat sebesar Rp934.802.977,00 atau 0,69% dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh naiknya proporsi saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada BUMD (Lembaga Keuangan/Aneka Usaha) dan Perusahaan Milik Swasta

3.2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Untuk Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada RKPD TA. 2025 ditargetkan sebesar Rp202.391.207.737,00, menurun sebesar Rp222.944.153.547,00 atau 52,42% dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2024. Penurunan tersebut sebagian besar bersumber dari rincian Pendapatan BLUD yang pencatatannya beralih ke Komponen Retribusi Daerah sesuai PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2.2 Pendapatan Transfer

Rencana penerimaan pendapatan transfer pada tahun 2025 diproyeksikan sementara sebesar Rp4.545.043.968.000,00 untuk selanjutnya menunggu informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 melalui portal kementerian Keuangan. Hal tersebut sesuai regulasi pedoman penyusunan APBD beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2024 diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024**.**

3.2.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.9.800.066.800,00 dimana angka tersebut masih mengacu dengan nilai pada Target Pendapatan APBD TA. 2024.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2022-2023, target APBD Pokok Tahun 2024 serta proyeksi pendapatan tahun 2025 dan 2026 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

URAIAN	REALISASI		TARGET 2024	PROYEKSI TAHUN RENCANA 2025 *)	PROYEKSI TAHUN 2026 (1 TAHUN SETELAH TAHUN RENCANA)**)
	2022	2023			
Pendapatan Asli Daerah	**5.075.689.254.356,00**	**5,801,319,086,208.00**	**5,461,177,920,943.00**	**4.813.602.612.187,00**	**7,349,098,161,037.91**
Pajak Daerah	4.408.955.704.325,00	4,974,162,369,090.00	4,857,507,074,086.00	4.173.517.521.481,00	6,373,742,825,500.83
Retribusi Daerah	42.907.998.400,00	49,131,817,751.00	42,243,541,400.00	300.667.135.819,00	56.460.808.773,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	135.785.593.949,00	159,362,075,963.00	136,091,944,173.00	137.026.747.150,00	172.135.755.620,80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	488.039.957.682,00	618,662,823,404.00	425,335,361,284.00	202.391.207.737	746,758,771,142.73
Pendapatan Transfer	**4.134.714.575.000,00**	**4,322,253,099,000.00**	**4,557,831,416,000.00**	**4.545.043.968.000,00**	**4.605.669.834.188,82**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	274.247.055.000,00	259,896,213,000.00	269,084,641,000.00	269.084.641.000,00	277.155.920.505,33
Dana Alokasi Umum	2.340.040.525.000,00	2,525,244,049,000.00	2,712,463,777,000.00	2.712.463.777.000,00	2.692.945.506.294,09
Dana Alokasi/Transfer Khusus	1.520.426.995.000,00	1,482,541,340,000.00	1,563,495,550,000.00	1.563.495.550.000,00	1.580.996.910.389,40
Dana Insentif Daerah	-	54,571,497,000.00	12,787,448,000.00	-	54.571.497.000,00

URAIAN	REALISASI		TARGET 2024	PROYEKSI TAHUN RENCANA 2025 *)	PROYEKSI TAHUN 2026 (1 TAHUN SETELAH TAHUN RENCANA)**)
	2022	2023			
Lain - lain Pendapatan yang Sah	**144.554.199.861,00**	**9,509,890,000.0**	**9,800,066,800.00**	**9.800.066.800,00**	**8,078,942,642.99**
Hibah	144.554.199.861,00	9,509,890,000.00	9,800,066,800.00	9.800.066.800,00	8.078.942.642,99
Dana Penyesuaian	-	-	-		-
Jumlah	**9.354.958.029.217,00**	**10,133,082,075,208.00**	**10.028.809.403.743,00**	**9.368.446.646.987,00**	**11,962,846,937,869.70**

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2024
**) Proyeksi Tahun 2025*
***) Proyeksi RPD Tahun 2026*

Selama kurun waktu tahun 2022-2026, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Rencana penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 9.368.446.646.987,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 660.362.756.756,00 atau 6,58% dari target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.10,02 triliun lebih. Penurunan terjadi disebabkan oleh adanya kebijakan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi opsen PKB dan BBNKB. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama kurun waktu 2022-2026 dapat diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata-rata sebesar 50,57%, pendapatan transfer sebesar 48,40% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,03%. Adapun besaran kontribusi masing-masing sumber pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel III. 3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

Tahun 2022-2026

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025*)	2026**)
I	**Pendapatan Asli Daerah**	**41,54**	**44,66**	**54,25**	**55,53**	**57,43**
A	Pajak daerah	35,90	85,05	84,78	85,88	85,72
B	Retribusl daerah	0,39	0,85	1,06	0,84	0,82
C	Hasil pengel. Kekada yg	1,23	2,58	2,76	2,64	2,57
D	Lain - lain PAD yang sah	4,02	10,51	11,40	10,64	10,89
II	**Pendapatan Transfer**	**57,66**	**54,19**	**44,40**	**43,55**	**41,65**
A	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	2,91	6,31	5,73	5,70	5,51
	- Bagi Hasil Pajak	74,97	78,78	80,12	0	0
	- Bagi Hasil SDA	91,26	21,22	19,88	0	0
B	Dana Alokasi Umum	25,09	43,13	57,14	56,80	56,89
C	Dana Alokasi Khusus	29,61	50,11	37,13	36,91	37,00
D	Dana Insentif Daerah	100	0,45	0	0,59	0,60
III	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**0,80**	**1,15**	**1,35**	**0,92**	**0,92**
A	Hibah	0,80	100	100	100	100
B	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2024
**) Proyeksi Tahun 2024 dalam RPD Prov. SulselTahun 2024-2026*
***) Proyeksi Tahun 2025*

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap

perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengah ketentuan perundang-undangan serta pembayaran utang belanja daerah tahun sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.3.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset

sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.3.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3.4. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025, dan alokasi anggaran pelampauan

target Tahun Anggaran 2024 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022- 2026
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET 2024	PROYEKSI 2025 *)	PROYEKSI TAHUN 2026 (1 TAHUN SETELAH TAHUN RENCANA)**)
		2022	2023			
1	**BELANJA DAERAH**	**9,406,862,731,245**	**9,995,582,075,208**	**10,113,809,403,743.00**	**9.204.446.647.729,31**	**11,797,846,937,869.70**
1.1	**BELANJA OPERASI**	**5,659,091,736,128**	**5,951,050,828,076**	**6.919.117.406.919.00**	**5.224.735.581.315,31**	5,990,310,456,651.80
1.1.1	Belanja Pegawai	3,114,232,139,368	3,242,569,954,051	3.599.439.910.986.00	3.844.724.675.346,63	3,667,344,609,047.60
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,235,536,073,905	2,383,376,553,331	2.571,734.906.953.00	1.253.579.235.968,68	2,192,947,978,804.20
1.1.3	Belanja Bunga	2,481,726,343	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	0,00	10,000,000,000	34,000,000,050.00	30.000.000.000,00	20,000,000,000.00
1.1.5	Belanja Hibah	303,751,796,512	312,474,320,694	710.432.588.930.00	92.921.670.000,00	105,737,868,800.00
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,240,225,000.	2,630,000,000	3.510.000.000.00	3.510.000.000,00	4,280,000,000.00
1.2	**BELANJA MODAL**	**1,627,018,355,261**	**1,689,637,708,972**	**942.544.980.007.00**	**900.000.000.000,00**	**2,749,262,386,192.92**
1.2.1	Belanja Modal	1,627,018,355,261	1,689,637,708,972	942.544.980.007.00	900.000.000.000,00	2,749,262,386,192.92
1.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**50,000,000,000**	**61,297,248,214**	**150.000.000.000.00**	**100.000.000.000,00**	**50,000,000,000.00**
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	50,000,000,000	61,297,248,214	150.000.000.000.00	100.000.000.000,00	50,000,000,000.00
1.4	**BELANJA TRANSFER**	**2,070,752,639,856**	**2,293,596,289,946**	**2.102.147.016.817.00**	**2.979.711.066.414,00**	**3,008,274,095,025.00**
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	1,625,075,631,356	1,775,932,742,946	1.707.712.415.259.00	2,600,171,570,129.00	2,740,810,548,025.0
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	445,677,008,500	517,663,547,000	394.434.601.558.00	379.539.496.285,00	267,463,547,000.00

Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
**) Proyeksi Tahun 2024*
***) Proyeksi RPD Tahun 2025*

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp. 9.204.446.647.729,31**yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 5.224.735.581.315,31** Belanja Modal sebesar **Rp. 900.000.000.000,00** Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 100.000.000.000,00** serta Belanja Transfer sebesar **Rp. 2.979.711.066.414,00** Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi danmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal perhitungan pendapatan dan belanja diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2022-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Pembayaran pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang menjadi kewajiban untuk pembayaran cicilan pokoknya setiap tahun.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT.Bank Sulselbar setiap tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan untuk tahun 2025

penyertaan modal tersebut direncanakan.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan ditahun 2025 penyertaan modal kepada BUMD (Perseroda) direncanakan, .

Selengkapnya realisasi, target dan proyeksi pembiayaan tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 5
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022– 2026

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi APBD 2022	Target Realisasi APBD 2023	Target APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1.	**Penerimaan Pembiayaan**	219,428,919,963		**219.000.000.000**		
1.1.	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	219,428,919,963		**219.000.000.000**		
1.2.	Pencairan dana cadangan	-				
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-				
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-				
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-				
1.7.	Penerimaan Piutang Daerah	-				
1.8.	Penerimaan Pengembalian Investasi Perusda	-				
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	167,524,217,935				
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-				
2.2.	Penyertaan Modal (investasi)				30,000,000,000	35,000,000,000
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-				
2.4.	Pembayaran Pinjaman Daerah	167,524,217,935	135,000,000,0000	134,000,000,000	134,000,000,000	135,000,000,000
	Jumlah Pembiayaan Netto	51,904,702,028.	135,000,000,000	85.000.000.000	-164,000,000,000	-170,000,000,000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-			

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2024

3.2.5 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.2.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selain bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

3.2.5.2 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas gubernur serta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berikesinambungan dan berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Tabel III. 6
Mitra Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Mendukung Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
1.	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Regional Development Policy Advisor for Sulawesi Region (JICA RDPA)	1) Mendukung Penguatan Kapasitas Manajemen Pembanguan Daerah di Wilayah Sulawesi 2) Mengidentifikasi isu & program pembangunan daerah yang menjadi prioritas.

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			3) Memfasilitasi inisiatif dan kolaborasi berdasarkan hasil pengidentifikasian isu & program pembangunan daerah. 4) Memfasilitasi skema JICA untuk menunjang penguatan kapasitas pembangunan daerah.
2.	USAID ERAT	memperkuat efektifitas Pemerintah Daerah melalui peningkatan mutu pelaksanaan kebijakan dan penyediaan pelayanan di daerah.	1) Penguatan fungsi binwas provinsi ke kab/kota terkait SPM, perencanaan dan penganggaran dalam isu Perkawinan Anak, Stunting, IPM Pendidikan (pra sekolah dan wajib belajar 12 tahun) 2) Pemanfaatan data dan produksi pengetahuan untuk peningkatan kinerja layanan public 3) Pemanfaatan data SP4N LAPOR untuk pencegahan korupsi dan pemantauan pelayanan public 4) Penguatan akses informasi melalui PPID dan partisipasi publik di tingkat provinsi 5) Penguatan peran swasta dalam link and match pendidikan vokasi dan industri " 6) peningkatan kualitas belanja dan tata kelola keuangan daerah
3.	UNICEF	Pendidikan	1) Penanganan Anak Tidak Sekolah berbasis Aksi Kolaborasi bertujuan untuk memastikan anak usia sekolah 7 – 18 tahun bersekolah dan dapat menyelesaikan Wajib Belajar 12 tahun. 2) Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif 3) Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa 4) Penguatan Ketrampilan Abad 21 (Kecakapan Hidup) - pengembangan kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke 21 yaitu pengembangan kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berfikir kritis, pemecahan masalah, negosiasi dan ketrampilan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan 5) Pendidikan dalam keadaan darurat (Satuan Pendidikan Aman Bencana)

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
		Perlindungan Anak	1) Penguatan untuk Kebijakan Perlindungan Anak 2) Optimalisasi Peran Anak dan Remaja 3) Perilaku Positif dan Norma Sosial 4) Penguatan Layanan Perlindungan Anak 5) Perlindungan Anak dalam situasi Darurat
		Kesehatan	1) Memperkuat layanan Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, melalui penguatan AMPSR 2) Memperkuat layanan kesehatan anak a) Penguatan layanan Manegement Terpadu Balita Sakit (MTBS) untuk Bayi -Balita b) Memperkuat layanan Imunisasi pada anak Bayi - Balita c) Memperkuat layanan Tuberkolosis (TB) pada anak sekolah 3) Memperkuat layanan kesehatan essensial pada kondisi darurat, melalui kesiap-siangaan Kab/Kota untuk menghadapi kondisi darurat. (Persiapan Rencana Kontigensi)
		Nutrisi	1) Memperkuat program gizi anak dan pencegahan stunting 2) Memperkuat program pencegahan dan tatalaksanan wasting 3) Memperkuat program gizin remaja dan gizi ibu
4.	USAID MOMENTUM Private Healthcare Delivery (USAID MPHD)	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi dengan Meningkatkan cakupan dan pemerataan kualitas pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir milik swasta.	1) Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Fasyankes Swasta (Primer dan Rujukan) di wilayah intervensi: Meningkatkan ketersediaan dan kesiapan fasyankes swasta untuk pemberian layanan KIA berkualitas, dan Penguatan system rujukan efektif dan efisian dengan **pemanfaatan platform SISRUTE MATNEO** dan adanya perjanjian kerjasama kabupaten kota terkait system

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			rujukan. 2) Meningkatnya kualitas layanan KIB yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan primer dan rujukan dengan jenis kegiatan Pendampingan rumah sakit (RS) swasta untuk meningkatkan mutu layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Meningkatkan kepatuhan fasyankes swasta terhadap standar mutu klinis, mendorong budaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dan pada pelaksanaan program kesehatan, Memberdayakan pasien, keluarga dan masyarakat 3) Menguatnya kebijakan, komitmen pemerintah dan peran pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan untuk keterlibatan sektor swasta. Melalui Tim Kelompok Kerja Penurunan AKI AKB (Tim POKJA)
5.	FHI360 Program USAID-MADANI	Memperkuat kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/ORMAS) untuk berkontribusi positif/konstruktif dalam pembangunan di daerah dan lahirnya toleransi/nilai-nilai inklusif di tengah masyarakat.	1) Peningkatan/Penguatan Kapasitas, Legitimasi dan Keberlanjutan fasililitasi potensi pemuda dalm pembangunan, melalui Technical Assistensi (TA) dari Servis Provider (SP) dan Provincial Support Program (PSP). 2) Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dengan Pemerintah Lokal (Pemda). 3) Bantuan teknis dan hibah dana langsung kepada OMS/ORMAS Lokal. 4) Pembentukan Forum Aksi Bersama (Forum Belajar) yang berbasis Multistakholders di tingkat Kabupaten/Kota.
6.	USAID IUWASH Tangguh	Proyek lima tahun untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman, serta perilaku higiene (WASH) di daerah perkotaan yang rentan dan memperkuat layanan	1) Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Sektor WASH dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA); 2) Peningkatan Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Aman, Berketahanan Iklim, dan Inklusif Masyarakat Miskin; 3) Peningkatan PSDA untuk

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
		WASH dan pengelolaan sumber daya air (PSDA) yang berketahanan iklim. Bermitra dengan Pemerintah Indonesia, USAID IUWASH Tangguh mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan akses air dan sanitasi untuk semua (Tujuan 6) dan menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman , tangguh, dan berkelanjutan (Tujuan 11).	Mendukung Layanan Air Minum yang Tangguh; dan 4) Peningkatan Adopsi Perilaku dan Peningkatan Partisipasi dan Peran Kepemimpinan Perempuan yang Berkontribusi pada Peningkatan WASH dan PSDA.
7.	Australia - Indonesia Centre (DFAT)	The Partnership for Australia-Indonesia Research (**PAIR**)	1) Transportasi, Logistik dan Rantai Pasok: Bagaimana kereta api, jalur laut, dan jalanan terhubung melalui sistem transportasi antar moda (*intermodal transport*). Bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari proses logistik dan rantai pasok yang handal, mengarah pada peningkatan konektivitas antar pelabuhan, kota, dan pedesaan. 2) Komoditas (Rumput Laut): Eksplorasi ekonomi pangan dan integrasinya dengan sistem transportasi, logistik dan rantai pasok. Bagaimana menciptaka pergerakan barang yang cepat, handal, dan efisien dari ladang pertanian ke Pelabuhan 3) Kalangan Muda: Menautkan kesehatan dan kesejahteraan (*health and wellbeing*) kalangan muda dengan pemberdayaan ekonomi, keterampilan, dan pelatihan. 4) GEDSI (Jender, Kesetaraan, Disabilitas dan Inklusi Sosial) – isu lintas sektor dalam berbagai fokus riset PAIR
8.	ICRAF - World Agroforestry (CANADA)	Perencanaan pembangunan, Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim, Gender	1) Penguatan tatakelola penggunaan lahan dan penyusunan kebijakan mitigasi dan adaptasi PI 2) Peningkatan kapasitas Pemda

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berbasis lahan secara cerdas iklim 3) Peningkatan kebijakan peraturan dan kelembagaan mitigasi dan adaptasi PI 4) Peningkatan Kapasitas Petani dalam mengakses lahan dan mengelolanya dengan baik
9.	Save the Children Indonesia (Multi Donor)	Perlindungan Anak dan Pekerja, Kesehatan, Mata Pencaharian Keluarga	
10.	AIHSP (Australia Indonesia Health Security Partnership)	Peningkatan Ketahanan Kesehatan secara komprehensif melalui Pendekatan 'One Health'	Sistim Pemerintah Indonesia yang lebih kuat untuk ***mencegah***, ***mendeteksi*** dan ***merespon*** kesehatan masyarakat serta darurat kesehatan hewan. Yang berfokus pada Isu Kesehatan Manusia, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Lingkungan.
11.	International Organization for Migration (IOM)	Humanitarian	
12.	Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) Multi Donor	Pengelolaan Pengetahuan (Program inti Yayasan BaKTI) Program INKLUSI – BaKTI (Didanai oleh DFAT Australia) Kerjasama UNICEF BaKTI – Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak (SAFE4C) dan Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Berbasis Online (OCSEA) Kerjasama UNICEF BaKTI – WASH (Air, Sanitasi dan Kebersihan)	Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial Perlindungan Anak Mendukung Layanan WASH yang Dikelola dengan Aman dan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan
13.	Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM)	Penguatan Tata Kelola Lanskap dan SDA Berkelanjutan; Perhutanan Sosial; Adaptasi Perubahan Iklim; Inklusi	1) Peningkatan kapasitas masyarakat desa 2) Pendampingan kelompok masyarakat untuk peningkatan ekonomi melalui pengembangan

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
		Sosial	usaha lokal 3) Peningkatan akses kelola lahan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui skema-skema Perhutanan Sosial 4) Meningkatkan aksi kolaboratif bersama multistakeholder (POKJA PPS Provinsi, POKJA PPS Kabupaten, POKJA PRKD) 5) Mendorong inklusi dan akuntabilitas sosial di desa 6) Membangun sistem komunitas cerdas iklim di lanskap DAS
14.	Institut of Community Justice (ICJ) Makassar	Advokasi, pemberdayaan masy dan layanan bantuan hukum	
15.	Yayasan Lestari Mulia	Lingkungan dan Kesehatan	Memperkuat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat
16.	Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Yayasan PerDIK).	Disabilitas dan Inklusi Sosial	Pelayanan Publik yang ramah untuk semua
17.	Yayasan Lestari Mulia	Lingkungan dan Kesehatan	
18.	YASMIB Sulawesi	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	1) Mendorong Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif pada Pemerintah Daerah dan Desa 2) Mendorong Kebijakan layanan public yang responsive gender dan inklusif. 3) Pencegahan Perkawinan Anak, Stunting dan Anak Tidak Sekolah 4) Penguatan Keterbukaan Infornasi Publik 5) Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa
19	Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan	Anggaran & Lingkungan	1) Perencanaan dan penganggaran pembangunan lingkungan yang responsive gender 2) Transfer anggaran provinsi berbasis ekologi
20	PKBI SULAWESI SELATAN	Kesehatan, Keluarga berencana dan Inklusi Sosial	

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
21	Yayasan Hadji Kalla	Tematik : Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan dan Lingkungan Berbasis wilayah : Pemberdayaan Desa	1) Beasiswa level perguruan tinggi 2) Peningkatan kapasitas manajemen PAUD dan SD 3) Tanggap darurat bencana 4) Bantuan sembako dhuafa 5) Pelatihan kader pelatih senam jantung sehat 6) Penghijauan kota 7) Integrasi energi terbarukan dan ekonomi peternak sapi 8) Pemberdayaan ekonomi-sosial-lingkungan desa tertinggal
22.	Forum Komunitas Hijau	Sosial lingkungan hidup	
23.	PW MUSLIMAT NU	Pemanfaatan TIK dalam pengembangan Dakwah Washatiyah	
24.	Lembaga Studi Kebijakan Publik	Penelitian, pelatihan, Pemberdayaan masyarakat pada bidang Tata kelola Pemerintahan, Kebijakan Publik, politik dan gender	
25.	KOALISI PEREMPUAN INDONESIA WAILAYAH SULSEL	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	
26.	Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel	Demokrasi,, Kepemiluan, Politik, Hukum dan HAM, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, Inklusi, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Toleransi dan keberagaman, dll	
27.	Yayasan Ruang kerja Ukhuwah	Sosial, Pendidikan, Kemanusiaan dan Lingkungan	

Sumber : Diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

3.2.5.3 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar". Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.2.5.4 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) PinjamanDaerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun pada tahun 2025 merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, sekaligus merupakan tahun terakhir pencapaian kondisi Sulawesi Selatan yang diinginkan terwujud pada visi RPJPD 2005-2025. Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang diimplementasikan dengan: 1) menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya yaitu pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, penguatan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting, dan penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan 2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025; 3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; dan 4) melibatkan secara aktif *stakholde*r di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah, maka rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: 1) RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025; (2) RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041; 3) RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026; 4) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026; 5) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023; 6) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; 7) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025; 8) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan 9) Pembangunan Rendah Karbon.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran tercapainya indikator. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sesuai RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis sebagi berikut:
   a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
   b. Optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata. Tujuan kedua ini dijabarkan melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah.,
3. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata. Tujuan ketiga ini dijabarkan kedalam sasaran strategis sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja
   b. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas
   c. Menurunya angka kemiskinan
   d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif
   e. Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan. Tujuan keemepat ini dijabarkan pada sasaran strategis terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan capaian pada tahun 2023, disajikan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1.
Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran			Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran		Capaian Tahun 2023	Target RPD 2025	Kondisi Akhir RPD 2026
Tujuan 1	**Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel**		**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**74,21 (BB)**	**68,76 (B)**	**70,21 (BB)**
	Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	68,78 (B)	69,27 (B)	70,03 (BB)
	Sasaran 2	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	A- (4,34)	A-(4,01 –4,50)	A (4,51-5,00)
Tujuan 2	**Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata**		**4**	**Indeks Williamson**	**0,567 (2022)**	**0,662**	**0,653**
	Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	81,20	82,34	82,73
Tujuan 3	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**		**6**	**PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)**	**69,70**	**74,55**	**78,4**
			7	**Gini Rasio**	**0,377**	**0,356**	**0,352**
	Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,33	4,03	3,83
	Sasaran 5	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	9	Pertumbuhan ekonomi	4,51	5,67-6,82	5,71-6,91
	Sasaran 6	Menurunnya Angka kemiskinan	10	Angka Kemiskinan	8,70	8,20	8,09
	Sasaran 7	Meningkatnya Kualitas SDM yang	11	IPM (Indeks Pembangunan	74,60	74,49	74,98

Tujuan/Sasaran			Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran		Capaian Tahun 2023	Target RPD 2025	Kondisi Akhir RPD 2026
		Kompetitif dan Inklusif		Manusia)			
	Sasaran 8	Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,19	93,78	93,90
Tujuan 4	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara Berkelanjutan**		**13**	**IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)**	**74,29**	**73,62**	**73,72**
	Sasaran 9	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	14	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)/ Penurunan Emisi GRK (%)	1.360.000	2.075.597/ 35 persen	2.356.390/ 37 persen

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPD 2024-2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

4.2.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada gambar berikut.

Gambar IV. 1.
Penekanan Tema RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas per Maret 2024

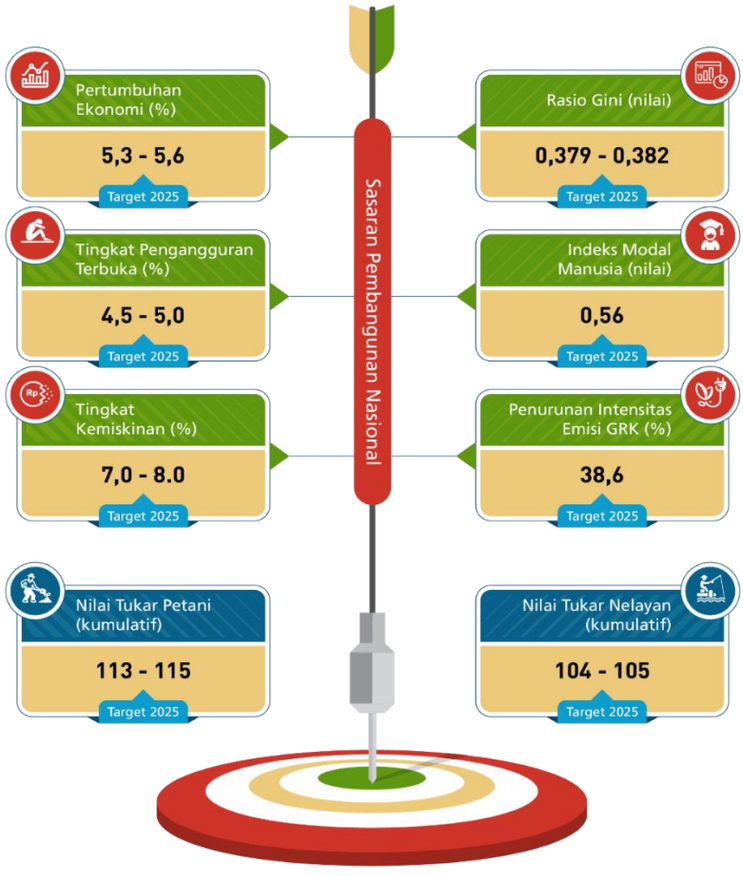
Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun awal dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan

pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesia Emas 2045.

4.2.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Gambar IV. 2.
Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas per Maret 2024

4.2.1.3.Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar IV. 3. .
Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

4.2.1.4.Agenda Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Gambar di bawah ini memperlihatkan lima Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025.

Gambar IV. 4.
Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

4.2.1.5. Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Wilayah pada RKP Tahun 2025

RKP 2025 memetakan arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Prioritas intervensi kebijakan pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2.
Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Indikator Makro	Target Tahun 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50 – 6,30
Kemiskinan (%)	7,30 – 7,89
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80 – 4,10
Indeks Modal Manusia	0,52
Rasio Gini	0,371 – 0,376
Intensitas Emisi GRK (%)	37,00

Dalam RKP Tahun 2025 telah ditetapkan pula sejumlah intervensi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional di Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

Tabel IV.3.
Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan berdasarkan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokohideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul,berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkansistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Penyediaan sarana pendukung untuk ternak (terutama kontainer untuk inseminasi buatan) di Kabupaten Maros • Bantuan benih ikan, terutama di Kabupaten Takalar • Pengembangan Kawasan Tebu di Kabupaten Takalar,Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone • Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraankehutanan di 12 kabupaten

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
	• Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di 12 kabupaten untuk meningkatkan ketahanan bencana • Pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa • Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di area Metropolitan Mamminasata • Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial • Pembangunan jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasata • Fasilitasi *business matchmaking startup digital* • Fasilitasi *digital technopreneur* • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian
	• Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (prioritas), Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Pengembangan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Pontap di Kota Palopo • Penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar–Parepare • Pengembangan sarana pengelolaan rumah produksi bersama komoditi garam terpadu di Pangkep dan Jeneponto • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital • Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan sentra usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jeneponto • Rehabilitasi ballroom celebes convention center gedung sentra industri kecil menengah di Kota Makassar • Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan • Pengendalian sedimen Sungai Radda • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	• Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) • Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga • Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Fasilitasi literasi digital
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Penguatan industri logam dasar • Hilirisasi industri kakao • Hilirisasi industri rumput laut • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Hub Sultan Hasanuddin
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Pemugaran permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung pemerataan ekonomi • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Makassar • Pengembangan sistem angkutan umum massal di Wilayah Metropolitan Makassar
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan Wilayah

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
	Metropolitan Makassar
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	• Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional di Geopark Maros Pangkep • Bantuan pelaksanaan giat warisan budaya di Kota Makassar • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing"** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.4.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2023	Target RPD 2025	Hasil Pembahasan Rakortek	Target RKPD 2025
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	68,78 (B)	69,27 (B)	Tidak dibahas	69,27 (B)
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	2	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	A-(4,34)	A-(4,35-4,50)	A-(4,35-4,50)	A-(4,35-4,50)
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	3	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	81,97	82,34	Tidak dibahas	82,34
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	5,67-6,82	5,50-6.30	5,50-6.30
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	5	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,33	4,03	3,8 - 4,1	3,8 - 4,1
		Menurunya angka kemiskinan	6	Tingkat Kemiskinan	Angka	8,70	8,20	7,30 - 7,89	7,30 - 7,89
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	7	IPM	Angka	74,60	74,80	Tidak dibahas	74,80
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,19	93,78	Tidak dibahas	93,78
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	9	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)/ Penurunan Intensitas Emisi GRK	Juta Ton CO_2Eq/ %	1.360.000	2.075.597/ 35 %	37 %	37 %

Prioritas Pembangunan Tahun 2025 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2025, disajikan pada tabel IV.3 sebagai berikut :

Tabel IV.5.
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran
1	Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatkan tata kelola penyeLenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi
				Optimalnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
2	Belum optimalnya upaya peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson
				Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Hilirisasi komoditas unggulan berbasis sumber daya alam belum optimal	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Produktifitas Total Daerah
				Meningkatnya petumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi
4	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Angka kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran
			dan merata		Gini Rasio
				Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka
				Menurunya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
				Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	IPM
				Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Kualitas Lingungan Hidup belum optimal	Belum Optimalnya Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH
				Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

Prioritas Pembangunan 2025 yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPD 2024-2026 yang disajikan pada tabel 4.4 menggambarkan arah kebijakan RPD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025.

Tabel IV.6.
Keterkaitan RPD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB
				9	Gini Rasio
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran terbuka
		Menurunya angka kemiskinan	Menurunya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)

4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

4.2.3.1. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang konsisten dan berkesesuaian dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Perumusan strategi pembangunan daerah diharapkan menjadi arahan dan pedoman (*guideline)* dalam menetapkan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah uang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2025, telah dirumuskan 12 (Dua Belas) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
4. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
5. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatkan iklim investasi dan usaha;
7. Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan;
8. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi;
9. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
10. Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial;
11. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.7.

Tujuan Sasaran dan Strategi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1.	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yangakuntabel	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
		2.	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	2.	Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
2.	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	3.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	3.	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan
3	Meningkatkan produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	4.	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	4.	Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secaramerata	5.	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	5.	Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandangdisabilitas di berbagai bidang pembangunan serta meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
		6.	Menurunnya Angkakemiskinan	6.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha
				7.	Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan
		7.	Meningkatnya KualitasSDM yang Kompetitif	8.	Meningkatkan pemerataanakses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
			dan Inklusif		inklusi
				9.	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
		8.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	10.	Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial
				11	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	9.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	12.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

4.2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mengantisipasi isu strategis daerah dan turunan dari strategi. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan dan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.8.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2025
Tujuan 1	**Mengoptimalkan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel**		1	**Indeks Reformasi Birokrasi**			
	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas	Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
	2.	Optimalnya kualitaspelayanan Publik	3	Indeks Layanan Publik	2.	Meningkatkan akses data,informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaanpublik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas data,informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2025
Tujuan 2	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata**		4	**Indeks Williamson**			
	3.	Meningkatnya aksesibilitas Infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	3.	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastrukturwilayah yang berkeadilan	Peningkatan aksesibilitas terhadaplayanan infrastruktur yang berkualias memenuhistandar GESI (GenderEquality andSocial Inclusion)
Tujuan 3	**Meningkatkan produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah**		6.	**Produktifitas Total Daerah**			
	4.	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas	7.	Pertumbuhan ekonomi	4.	Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan
					5.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha	Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah
Tujuan 4	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata**		8	**PDRB Perkapita ADHB**			
			9	**Gini Rasio**			
	5.	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.	Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan serta meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerjadi berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas
	6.	Menurunnya AngkaKemiskinan	11	Angka Kemiskinan	7.	Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin, penguatan pemberdayaan masyarakat, pemberian

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2025
						serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan	kemudahan akses usaha dan pasar berbasis potensilocal serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat miskin
							Mendorong Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga ketrampilan untuk kemandirian PPKS dan peningkatanpendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor
	7.	Meningkatnya KualitasSDM yang kompetitif dan inklusif	12	IPM	8.	Meningkatkan pemerataan akses dankualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi	Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan yang adaptif dan merata serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas
							Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan
					9.	Meningkatkan pemerataan akses dankualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan kesehatan dengan (1) Pemenuhan sarana prasarana; (2) Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM Kesehatan secara bertahap dan menyeluruh termasuk SDM Kesehatan mental dan disabilitas; (3) Penyusunan kebijakan dan perbaikan baseline data
							Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting
	8.	Meningkatnya kualitasdan kesetaraan genderdalam	13	Indeks Pembangunan	10.	Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial	Peningkatan kualitas pelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,dan

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2025
		pembangunan		Gender (IPG)			pengawasan pembangunan daerah
							Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi
							Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan
					11	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan
Tujuan 5	**Meningkatkan kualitaslingkungan hidup yang berkelanjutan**		14	**IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)**			
	9.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasidan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi PenurunanEmisi GRK	12.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi danmitigasi terhadap perubahan iklim	Pemantapan pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutandan berkeadilan
							Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
							Pemantapan kemampuanadaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim

4.3. KESELARASAN DAN KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025, maka diperlukan keselarasan dan konsistensi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 baik pada kebijakan dalam dokumen RPD maupun kebijakan pembangunan nasional yang merupakan acuan dan pedoman terhadap pembangunan daerah. Sinkronisasi diwujudkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

4.3.1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPD

RKPD sebagai perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPD yang tergambarkan melalui keselaranan prioritas pembangunan dengan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan pada RPD 2024-2026, keselarasan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.9.
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPD untuk Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB
				9	Gini Rasio
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran terbuka
		Menurunya angka kemiskinan	Menurunya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan	Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan	13	Indeks Pembangunan Gender

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
		Gender dalam Pembangunan	Gender dalam Pembangunan		(IPG)
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)

Selanjutnya, untuk memastikan seluruh tujuan dan sasaran prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025 dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, maka perlu dirumuskan program prioritas tahun 2025, sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV.10.
Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel**	**Indeks reformasi birokrasi**	Indeks	**74,67**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	**Nilai SAKIP Provinsi**	**Huruf/ Angka**	**69,27 (B)**	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	Persentase	75	BPSDM
		Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	Persentase	75	
		Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase	100	
		Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	Sertifikat	7 Sertifikat	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	Persentase	65,3	BKD
		Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta	Persentase	86	
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Persentase	94	
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	Persentase	100	Biro Organisasi
4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD	Persentase	100	Bappeleitbangda
		Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap APBD	Persentase	100	
		Rata-rata capaian kinerja program Prioritas Pembangunan daerah	Angka	92	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	82	Inspektorat
		Persentase penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Persentase	75	
		Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	Persentase	100	
6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi	Persentase	55	Diskominfo
		Persentase Unit kerja yang terkoneksi jaringan internet intra pemerintah Sulawesi Selatan	Persentase	45	
	Sasaran 2: Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	**Indeks Layanan Publik**	**Indeks**	**A-(4,35-4,50)**	
7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	Nilai	45	Diskominfo
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persentase	93	Dinas PTSP
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentasi hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	Persentase	40	Bappelitbangda
		Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi dan teknologi	Persentase	15	
II	**Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata**	**Indeks Williamson**	**Indeks**	**0,462**	
	Sasaran 3. Meningkatnya aksesibilitas Infrastruktur wilayah	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**82,34**	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase	77,00	Dinass BMBK
11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	Ha	6.445	Dinas SDACKTR
		Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	Persentase	100	
12	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang beroperasi dan terpelihara	Persentase	100	Dinas Perhubungan
		Jumlah penumpang melalui pelabuhan	Orang	1.950.253	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISRIKAN	Persentase rumah tangga berlistrik	Persentase	100	Dinas ESDM
14	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPM)**	**Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (SPM)**	Persentase	100	Dinas SDACKTR
		Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi (SPM)	Persentase	100	
15	**PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SPM)**	**Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air sanitasi layak (SPM)**	Persentase	96	Dinas SDACKTR
		Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik kewenangan provinsi (SPM)	Persentase	100	
16	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani Kewenangan Provinsi	Persentase	11,39	Dinas Perkimtan
17	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak pada kawasan permukiman	Persentase	33,33	
		Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	Persentase	31,43	
		Persentase Jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	Persentase	38,33	
18	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (SPM)**	**Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni(SPM)**	Persentase	100	
		Persentase warga Negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layah huni	Persentase	100	
III	**Tujuan : Meningkatkan produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah**	**Produktifitas Total Daerah**	**Rp/- Angkatan Kerja**	**84.248.042,86**	
	Sasaran 5: Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persentase**	**5,50– 6,30**	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
23	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rupiah	11.960.232.411	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	451.818,7	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase	30	
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Persentase	31,23	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	Persentase	89,47	
24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Rupiah	22.187.160.000	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.417.925,7	
		Persentase ketersediaan benur berkualitas	Persentase	90	
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	2	Dinas TPHBUN
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	2	
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase	2	
		Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rupiah	56.301.484.133	
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	Persentase	1,18	Dinas Peternakan
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	Persentase	2,16	
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	Persentase	2,81	
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah	Persentase	2,30	
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	Rupiah	411.540.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi olahan ikan	Ton	6.273,44	
		Persentase pengujian mutu produk perikanan	Persentase	100	
27	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri	Persentase	8	Dinas Perindag
28	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPORT	Nilai Ekspor Perdagangan	US $	2.262.549.068,38	
29	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	Persentase	0,62	Dinas Pariwisata
30	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Usaha Bagi Pelaku UMKM	Persentase	10	Dinas KopUMKM

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
IV.	**Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata**	**PDRB Perkapita ADHB**	**Rp.**	**74,55**	
		Gini rasio	**Angka**	**0,371 – 0,376**	
	Sasaran 4 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah Daerah	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**Persentase**	**3,80 – 4,10**	
19	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Persentase	4,92	Disnaker
		Persentase daya serap tenaga kerja	Persentase	60,35	
20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	0,29	Dispora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Persentase	4,20	
21	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Persentase	90	Disnaker
		Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	Persentase	100	
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM dan Wirausaha yang memiliki TK >3	Persentase	13%	DiskopUMKM
	Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kemiskinan	**Angka Kemiskinan**	**Nilai**	**7,30 – 7,89**	
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial dari yang ditargetkan	Persentase	100	Dinsos
32	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap luasan lahan pertanian	Poin	0,0080	Dinas TPHBUN
		Nilai Produksi Hasil ternak	Rupiah (Juta)	10.664.347	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan,	Persentase	2,6	Dinas LH

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
33	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	kelola usaha, kelola kawasan) Kelompok Tani Hutan			
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	Persentase	100	Dinsos
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase	100	
35	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (SPM)**	**Persentase pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi tuna sosial dalam panti**	Persentase	100	Dinsos
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti (SPM)	Persentase	100	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti (SPM)	Persentase	100	
		Persentase penyandang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti (SPM)	Persentase	100	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti (SPM)	Persentase	100	
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**74,80**	
36	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SPM)**	**Persentase jumlah warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)**	Persentase	100	Dinas Pendidikan
		Persentase jumlah warga negara usia 14 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (SPM)	Persentase	100	
		Persentase siswa/i SMA/ SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	Persentase	91,00	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Persentase siswa/i SMA / SMK yang bebas Narkoba	Persentase	96,86	
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	% Pemenuhan SDMK Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase	86	Dinas Kesehatan
38	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM)**	**% Rumah Sakit yang Terakreditasi**	Persentase	90	
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) / berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (SPM)	Persentase	100	
		% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	Persentase	96%	Dinas Kesehatan
		% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	Persentase	90,5%	
		Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)	Persentase	76%	
		Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	Persentase	98%	
		Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	Per 100.000/ Penduduk	9,5/100.000 Penduduk	
		% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan skrining penyakit tidak menular	Persentase	90%	
39	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi olah raga	Persentase	2,00	Dispora
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Persentase	75	
	Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan gender dalam pembangunan	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**Nilai**	**93,78**	
40	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG di Tingkat Provinsi	Persentase	70	Dinas PPPA
		Persentase ARG di Tingkat Provinsi	Persentase	43	
		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	Persentase	36	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
41	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kab/Kota yg berpredikat KLA (Kab/Kota Layak Anak)	Persentase	91.66	
42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	Persentase	58.33	
V.	**Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**74,54**	
	Sasaran 9: Terpeliharanya kulitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**Juta ton CO2 eq**	**2.075.597/ Turun 37 %**	
43	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Persentase	28,23	Dinas LH
		Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	Persentase	11,97	
		Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	Persentase	0,028	
		Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	Persentase	3,63	
44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (DISNAK)	Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	Persentase	100	Dinas Peternakan
45	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penurunan emisi GRK sektor energi	Persentase	1,4	Dinas ESDM
46	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penurunan emisi GRK sektor transportasi	Ton Co2 eq	364.193	Dinas Perhubungan
		Cakupan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi	Persentase	6	
		Jumlah penumpang melalui terminal	Orang	688.548	
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase	35,27	
47	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	822.559,65	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Dinas Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Jumlah produksi garam rakyat	Ton	6	
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	Persentase	22	
48	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi Penurunan Emisi GRK sektor persampahan dan limbah	Ton CO2eq	16.436	Dinas LH
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase	57	Dinas LH
50	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Persentase	100	BPBD
		Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani	Persentase	100	
		Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	Persentase	100	
		Persentase apparat kesiapsiagaan yang terlatih	Persentase	100	

4.3.2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 - 2026 dan mendukung prioritas nasional tahun 2025 yang merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel IV.11.
Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
1.	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Prioritas Nasional 1: Memperkokohideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PN 1
		Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	PN 7
2.	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PN 6
3.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yangberkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksimelalui peran aktif koperasi	PN 3
		Prioritas Nasional 5: Melanjutkanhilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PN 5
4.	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PN 4
5.	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Prioritas Nasional 2: Memantapkansistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2
		Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alamdan budaya, peningkatan toleransiantar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PN 8

Hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional tahun 2025 dapat dilihat sebagai mana pada tabel berikut.

Tabel IV.12.
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah		Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah		
1.	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP Provinsi 3. Indeks Pelayanan Publik	PN 1: Memperkokohideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Indeks Demokrasi Indonesia
			PN. 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan	1. Return on Aset (ROA) BUMN (%) 2. Indeks Integritas Nasional 3. Indeks Materi Hukum 4. Indeks Pelayanan Publik 5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 6. Indeks Persepsi Korupsi 7. Indeks Pembangunan Hukum 8. Rasioa Perpajakan terhadap PDB (%) 9. Tingkat Inflasi (%)
2.	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	1. Indeks Williamson 2. Indeks Layanan Infrastruktur	PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Terbangunnya sistem perlindungan sosialyang adaptif bagi seluruh penduduk (%) 2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) 3. Persentase penyandang disabilitas yangbekerja di sektor formal (%) 4. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) 5. Persentase desa mandiri (%) 6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
3.	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	1. Pertumbuhan ekonomi	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) 2. Rasio Kewirausahaan (%) 3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadapPDB (%) 4. Rasio PDB Pariwisata (%)

No	Prioritas Pembangunan Daerah		Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah		
			serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Devisa Pariwisata (miliar USD) 6. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 7. Aset Perbankan/PDB (%) 8. Aset Dana Pensiun/PDB (%) 9. Aset Asuransi/PDB (%) 10. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 11. Total Kredit/ PDB (%) 12. Inklusi Keuangan (%)
			PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SumberDaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) 3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 4. Biaya Logistik (% PDB)
4.	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. PDRB Perkapita ADHB 2. Rasio Gini 3. Tingkat Pengangguran Terbuka 4. Angka Kemiskinan 5. Indeks Pembangunan Manusia 6. Indeks Pembangunan Gender	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Hasil Pembelajaran a. Rata-rata nilai PISA b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun) c. Harapan Lama Sekolah 2. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) 3. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 4. Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6. Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaPerempuan (%) 7. Usia Harapan Hidup (tahun) 8. Kesehatan Ibu dan Anak

No	Prioritas Pembangunan Daerah		Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah		
				a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi *Stunting* (pendek dansangat pendek) pada balita (%) 9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000penduduk) 10. Cakupan Kepesertaan JaminanKesehatan Nasional (%) 11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga(IPKK) 12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
5.	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Penurunan Emisi GRK	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Asia Power Index (*Military Capability*) 2. Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)[a)] 3. Proporsi Penduduk yang Merasa AmanBerjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 4. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) 5. Indeks Ketahanan Energi 6. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) 7. Akses rumah tangga perkotaan terhadapair siap minum perpipaan (%) 8. Rumah Tangga dengan Akses SanitasiAman (%) 9. Indeks Ekonomi Hijau 10. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 11. Timbulan sampah terolah di fasilitaspengolahan sampah (%) 12. Indeks Pengelolaan KeanekaragamanHayati 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 14. Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)
			PN 8 : Memperkuat Penyelarasan	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

No	Prioritas Pembangunan Daerah		Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah		
			Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama(IKUB) 3. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Selanjutnya sebagai dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Nasional tahun 2025, maka provinsi Sulawesi Selatan menetapkan program pembangunan daerah yang selaras dan menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV.13.

Keselarasan Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
Prioritas Nasional 1: Memperkokohideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul,berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik			
Prioritas Nasional 2: Memantapkansistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Penyediaan sarana pendukung untuk ternak (terutama kontainer untuk inseminasi buatan) di Kabupaten Maros	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	1,18 %
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	2,16
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	2,81
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah	2,30
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Akseptor	125 000 ekor
			Jumlah Kelahiran	750 00 ekor
			Jumlah Penyediaan Straw	162 500 dosis
			Jumlah Penyediaan Bull Eksotik	5 ekor
			Jumlah ternak yang dipelihara pada UPT PT HPT	196 ekor
			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak	500 ton
		Sub Kegiatan Pengendalian	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak	2 Laporan

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	
	• Bantuan benih ikan, terutama di Kabupaten Takalar	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya	Rp. 15.198,47 Milyar
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.093.705,8 Ton
			Persentase Ketersediaan Benur Berkualitas	100 %
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan	100 ha
			Jumlah produksi nener / benur yang berkualitas	18.700.000.000 ekor
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan di perairan darat	127.000 Unit
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota	115 unit (untuk 24 kab/kota)
	• Pengembangan Kawasan Tebu di Kabupaten Takalar,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	2%

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
	Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaraan Benih Tanaman	Luas Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	6.000 Ha
		Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaraan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4 Laporan
	• Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraankehutanan di 12 kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase aksespengelolaan Kawasan hutan lindung dan hutan produksi	11,97 %
			Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	35,23 %
			Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar Kawasan hutan negara	3,63 %
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	0,028 %
		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaa Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase penataan pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang tepat sasaran	0,01 %
		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Unit	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	1 Dokumen

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
			Wilayah Provinsi	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di 12 kabupaten untuk meningkatkan ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi Penurunan Emisi GRK sektor persampahan dan limbah	16.435.36 Ton CO2eq
		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara dan luas pemeliharaan tanaman	241 Ha
		Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen
	• Pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	2%
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaraan Benih Tanaman	Luas Bantuan Benih Tanaman Hortikultura	325.500 Ha
		Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaraan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	4 Laporan
	• Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu diarea Metropolitan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi Penurunan Emisi GRK sektor persampahan dan limbah	16.435.36 Ton CO2eq

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
	Mamminasata	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH	24 Kab/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pembinaan Layanan TPA Kewenangan Provinsi	100%
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
		Sub Kegiatan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Insfrastruktur Sampah		
	• Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Penyiapan perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Hektar
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen
	• Pembangunan jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasata	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota (SPM)	a. 100%
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	b. Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum	b. 100%

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	Kewenangan Provinsi	
		Sub Kegiatan : a. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan b. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota; c. Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM d. Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi		
	• Fasilitasi business matchmaking startup digital			
	• Fasilitasi digital technopreneur			
	• Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persetase Petani yang menerapkan teknologi	55 %
		Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibina/diberdayakan	15 Kelompok
		Sub Kegiatan Desiminasi	Jumlah Desiminasi Informasi	2 DOkumen

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Informasi, Tehnis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tehnis, Sosila, Ekonomi, dan Inovasi Pertanian	
	• Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (prioritas), Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan : Sub Kegiatan :	a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan air limbah domestik regional lintas kab/Kota (SPM) b. Cakupan pembinaan layanan air limbah domestik kewenangan provinsi	a. 96 % b. 100%
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Air Limbah Domestik regional		
		Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air limbah domestik		
	• Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat Pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	94,11 %
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola	400 Jenis
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayat	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen
		Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 Ha
	•	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	112 Ha
Prioritas Nasional 3:	• Pengembangan sarana	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Hilirasasi Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 9.029,52 Milyar

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	prasarana Pelabuhan Perikanan Pontap di Kota Palopo		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	404.932,2 Ton
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	27,07 %
			Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	26,79 %
			Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai dengan standar operasional	68,42 %
		Kegiatan Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi	Jumlah pelabuhan yang ditetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi	7 Pelabuhan Perikanan
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pekabuhan Perikanan yang tersedia	7 Unit (untuk 7 pelabuhan perikanan)
	• Penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar–Parepare	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN:	• Jumlah dokumen rencana perkeretapian provinsi	• 1 dokumen
	•	Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		
		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan		

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Perkeretapian Kewenangan Provinsi		
	• Pengembangan sarana pengelolaan rumah produksi bersama komoditi garam terpadu di Pangkep dan Jeneponto	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Promosi Produk UMKM	3%
			Persentase UMKM yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha	10%
		Keg. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang melakukan Inkubasi usaha pada usaha mikro	150.000 pelaku usaha
		Sub Keg. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.500 unit usaha
	• Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim			
	• Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital			
	• Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha	10%
		Kegiatan Pengembangan	Jumlah Usaha Kecil yang	150.000 pelaku

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
	sentra usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jeneponto	Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	melakukan Inkubasi usaha pada usaha mikro	usaha
		Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.500 unit usaha
	• Rehabilitasi ballroom celebes convention center gedung sentra industri kecil menengah di Kota Makassar	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 unit
		Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	12 Laporan
	• Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Sektor Pariwisata yang mendapatkan pelatihan	3 %
			Presentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	15 %
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	7 kali

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	220 orang
	• Pengendalian sedimen Sungai Radda • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi			
	• Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Konektivitas Regional dan Penguatan Konektivitas Regional	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaran Jalan Sub Kegiatan : a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan b. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	• Jumlah dokumen perencanaan	• 8 Dokumen
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	• Jumlah dokumen rencana	• 1 Dokumen

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Sub Kegiatan a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi b. Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	induk pengembangan jaringan jalan provins • Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli • Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi • Jumlah laporan penyedia jasa kontruksi berkinerja baik	• 39 % • 2 KALI • 1 LAPORAN
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	• PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• Persentase jumlah warga negara usia 16-18 tshun ysng berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) • Persentase jumlah warga nergara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendudukan Khususn (SPM)	

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
			• Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran • Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (Indikator RPJMD Pokok)	
		• Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	• Persentase Tamatan SMK yang bekerja 1 Tahun Setelah Tamat	
		• Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	• Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah menengah kejuruan	
		• Sosialisasi Revitalisasi peningkatan sekolah menengah kejuruan	•	• 24 Kab/Kota
	• Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) (Dinas Peternakan)	• PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	• Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	10 %
		• Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas	• Jumlah Dosis Vaksin dan Obat-Obatan dan Vitamin (PHMS)	267. 800 DOsis

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		• Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	• Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulanga n Penyakit Hewan dan Zoonosis	24 Laporan
	• Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan Lainnya (Rabies) (Dinas Kesehatan)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	• Jumlah Kab/Kota yang dilakukan peningkatan kapasitas, bimtek, pemantauan dan supervisi program penyakit menular dan tidak menular	24 Kab/Kota
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	• Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga	• PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	•	
		• Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	•	
		• Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan	• Jumah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	• 6 Unit

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Prasarana Olahraga di Tingkat Provinsi		
	• Pembangunan kualitas keluarga	• PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	• Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	• 50,16%
		• 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	• Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi	• 24 Layanan
		• 2.08.04.1.02.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak bagi Kewenangan Provinsi	• Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	• 3 dokumen
	•	• 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	• Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi	• 45%
	•	• 2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	• Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	• 24 lembaga

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
	•	• PROGRAM PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	• Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi • Persentase ARG di Tingkat Provinsi • Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	• 65% • 40% • 35,5%
	•	• .08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	• Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan social	• 25,5%
	•	• 2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	• Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/Profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi	• 48 Lembaga
	•	• Program Peningkatan Kualitas Keluarga	• Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	• 50,16%
	•	• 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas	• Jumlah layanan edukasi Keluarga	• 24 Layanan

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	yang diedukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi	
	•	• 2.08.04.1.02.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak bagi Kewenangan Provinsi	• Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	• 3 dokumen
	• Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Fasilitasi literasi digital	•	•	•
	• Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan	• PROGRAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah • Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori	

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
	anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal)		Minimal Baik • Persentase Penurunan temuan berdasarkan LHP	
		• Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah tepat waktu	
		• Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		• Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Layanan Pendidikan	•	• 24 Kab/Kota
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Penguatan industri logam dasar	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industry	8 %
			Persentase Peningkatan Industri yang dibina dan dikembangkan	6 %
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	•	
		koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	4 Dokumen
	• Hilirisasi industri kakao	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pertumbuhan jumlah industry	8 %

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
	• Hilirisasi industri rumput laut	INDUSTRI		
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Peningkatan Industri yang dibina dan dikembangkan	6 %
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 DOkumen
	• Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan pengelolaan SIINAS	5 %
			Persentase Peningkatan Penyediaan Informasi Industri berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	5 %
		Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
		Sub kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informas Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informas Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen
	• Pengembangan Bandara Hub	•	•	•

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
	Sultan Hasanuddin			
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Pemugaran permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo	• Program : Program Kawasan Permukima	• Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	• 11,39 %
		• Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	• Luas Kawasan Kumuh Tertangani	• 60 Ha
		• Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	• Luas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	• 60 Ha
	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung pemerataan ekonomi	• PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
		• Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		
		• Sub Kegiatan Penguatan	• Julah Kepala Keluarga	• 100 Kepala

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		SDM dala Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Transmigrasi yang Dibina	Keluarga
		• Kegiatan Penguatan Insfrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		
		• Sub Kegiatan Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	• Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan	• 10 Satuan Permukiman
	• Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Makassar	•	•	•
	• Pengembangan sistem angkutan umum massal di Wilayah Metropolitan Makassar	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi • Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	• 364.193 Ton Co2 eq • 35,27 %
		• Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1		

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
		(satu) Daerah Provinsi		
		• Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar			
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan	• Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional di Geopark Maros Pangkep	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	100 %
			Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	100 %
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	8.275.000 Kunjungan

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	**Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang selaras dengan Kolom (2)**	**Indikator**	**Target Tahun 2025**
1	2	3	4	5
budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	107.500 Orang
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 laporan
	• Bantuan pelaksanaan giat warisan budaya di Kota Makassar	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	1,92%
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	1 Kegiatan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	7 Obyek
	• Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan			

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang pada pasal 153 menyebutkan bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Olehnya itu dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 harus memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD, untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan RKPD tahun 2025 yang diintegrasikan ke dalam aplikasi *e–planning* yang terintegrasi pula pada dokumen penyusunan RKPD dan *e-budgeting* di dalam penyusunan anggaran (SIPD Kemendagri.

Pada RKPD tahun 2025 terdapat sejumlah pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 1420 usulan dan yang telah di integrasikan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 985 usulan berdasarkan pada hasil telaahan dari tim penyusun RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.14.
Hasil Pembahasan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	OPD	Usulan	Diterima
1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	626	411
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	93	69
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	46
4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	81	60
5	SEKRETARIAT DAERAH	48	43
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	34	33
7	DINAS SOSIAL	21	18
8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	43	2
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	10
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	6
11	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4	5
12	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	15	0
13	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6	0
14	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	34	17
15	DINAS KESEHATAN	12	0
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	0

No.	OPD	Usulan	Diterima
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	13	0
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	7	7
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	0	0
20	DINAS PENDIDIKAN	276	258
21	DINAS PERHUBUNGAN	0	0
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	0
23	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	29	0
	TOTAL	**1420**	**985**

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

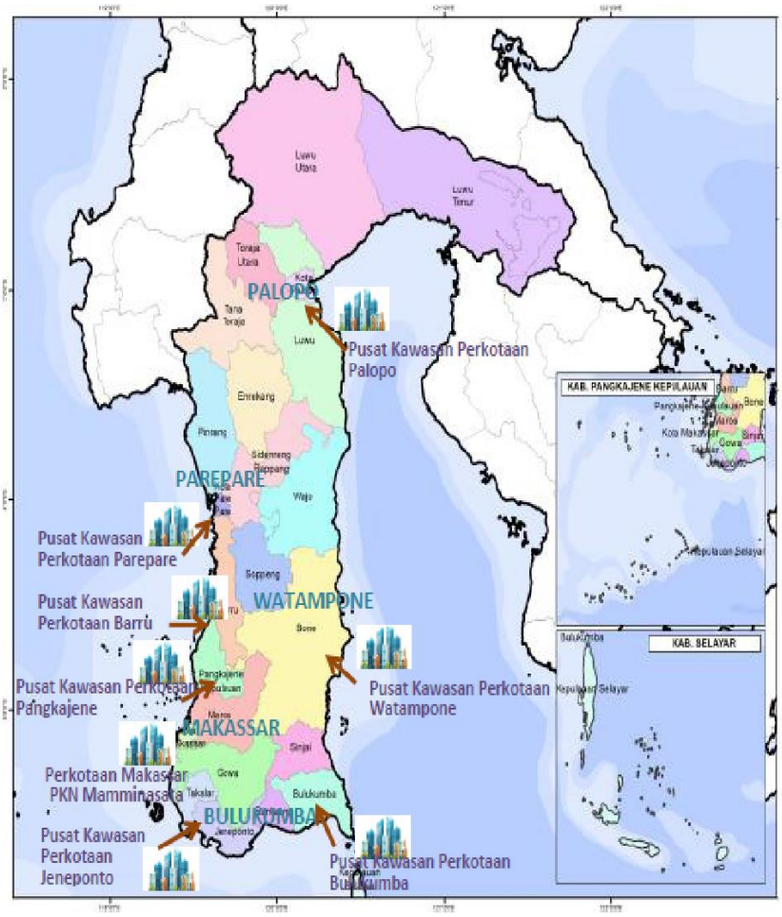
Sebagai upaya mendukung pencapaian tema dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2025-2029 di Sulawesi Selatan yaitu Gerbang Indonesia Timur dan Lumbung Pangan, maka kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau sebagaimana Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 yang sejalan dengan tema pembangunan Tahun 2025 yang diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

5.1. Arahan Nasional Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan wilayah Sulawesi Selatan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan yang mengacu pada Visi Indonesia 2045 dan rencana pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana umum tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

RTRWN menetapkan sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi nasional dan/atau pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi dan/atau pusat kegiatan industri dan jasa skala provinsi yaitu Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare. Selain itu RTRWN juga menetapkan kawasan andalan yaitu kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah yang meliputi Kawasan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Bulukumba-Watampone dan Sekitarnya, Kawasan Parepare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan laut Kapoposang, Kawasan Andalan laut Teluk Bone, Kawasan Andalan Laut Sangkarrang-Takabonerate, dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar.

Gambar V. 1.
Arahan Pengembangan Kawasan Perkotaan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: PP 13 Tahun 2017 Tentang RTRWN, diolah Bappelitbangda, 2024

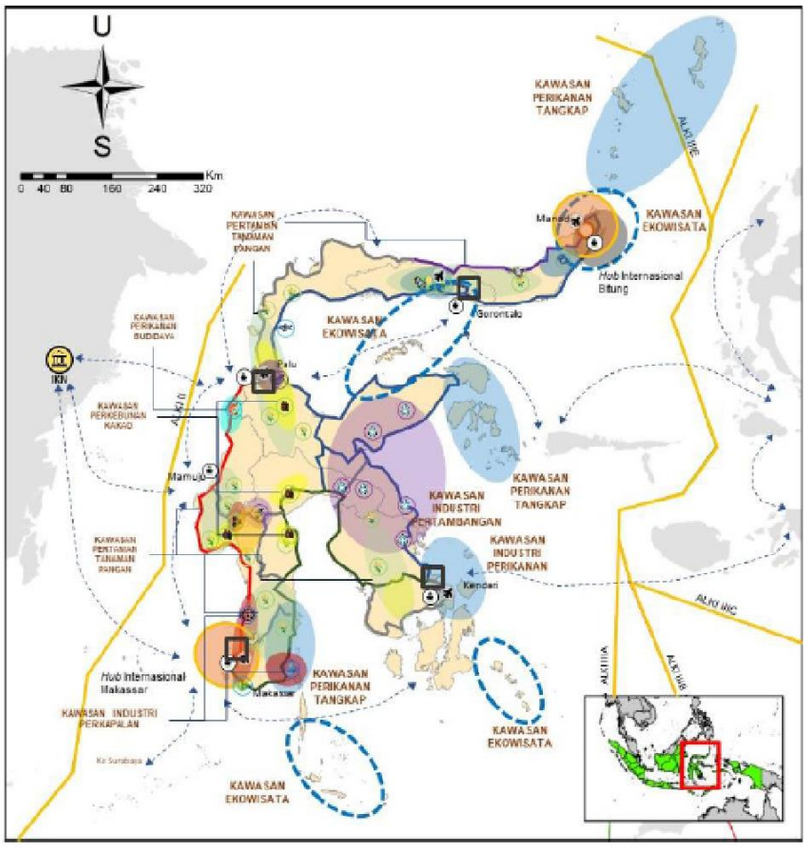
Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan pada Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, yang diarahkan pada perkuatan transformasi wilayah Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam mengamanatkan sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi berupa: 1) pembangunan sumber daya manusia unggul; 2) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; 3) pembangunan sarana prasarana; 4) penguatan tata kelola pemerintahan; dan 5) peningkatan ketahanan social, budaya dan ekologi.

Fokus kebijakan pembangunan Sulawesi diprioritaskan pada pengembangan kawasan yang meliputi kawasan pariwisata, kawasan industry; kawasan perikanan; serta kawasan pertanian dan perkebunan; pengembangan perkotaan yang meliputi wilayah Metropolitan dan kawasan perkotaan; dan pengembangan simpul transportasi yang meliputi bandar udara pengumpul, pelabuhan pengumpul, jalan arteri Trans Sulawesi dan jalur Kereta Api antar kota.

Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, mengarahkan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema “Gerbang Indonesia Timur dan Lumbung Pangan” yang akan diwujudkan melalui Transformasi Sosial dengan prioritas arah kebijakan berupa pencegahan stunting, percepatan eliminasi penyakit menular antara lain malaria, tuberculosis dan pneumonia, peningkatan rata

rata lama sekolah dan kualitasnya melalui wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu system Registrasi Sosial Ekonomi. Transformasi Ekonomi dengan prioritas arah kebijakan berupa pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry, penyiapan peningkatan dan pengembangan pusat pusat pertumbuhan baru di Kawasan Perkotaan Mamminasata, peningkatan konektivitas dengan melanjutkan pengerjaan kereta api antar kota Makassar-Parepare, Pelabuhan Makassar, pembangunan jalan Trans Sulawesi dan pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin, perluasan jaringan *broadband*, pengembangan pasokan listrik dan jaringan listrik cerdas serta pengembangan system interkoneksi, penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal, pengembangan system perumahan public yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola, dan peremamajaan kota secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Gambar V. 2.
Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi



Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Tahun 2024

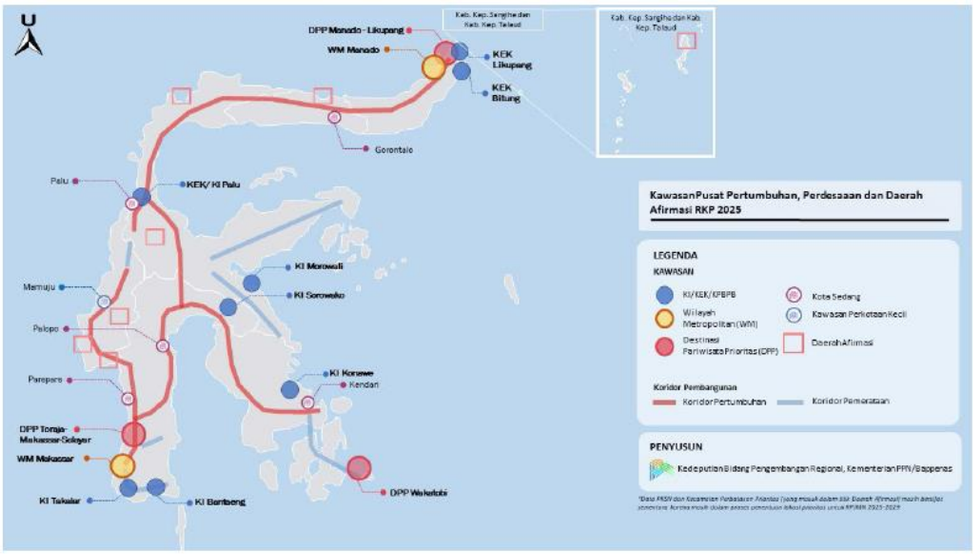
Transformasi tata kelola dengan prioritas arah kebijakan pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur derah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah dan pengelolaan asset daerah, peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital, dan perbaikan sata persampahan dan penguatan ekosistem untuk reformasi kelembagaan, perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pada Transformasi Supremasi Hukum dengan prioritas arah kebijakan peningkatan kapasitas fiscal daerah dan

sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional dan transformasi system penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocate general*. Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi dengan prioritas arah kebijakan peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local, penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga hilir, pengembangan irigasi di WS Walanae-Cenranae dan WS Saddang untuk mendukung lumbung pangan, pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui system terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestic, dan peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Jenelata serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air.

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yaitu bangsa yang berdaulat, maju dan berkelanjutan , yang salah satu tujuan utama pembangunannya adalah mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan tema pembangunan untuk Pulau Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA yang diukur melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,3 – 7,9 persen dan kontribusi sebesar 7,40 persen serta Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,2 – 3,7 persen.

Rancangan RKP 2025 memuat pokok pokok intervensi kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana yang arah kebijakan umumnya berfokus pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sedangkan arah kebijakan kewilayahan diprioritaskan pada pengurangan kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan serta pengelolaan pusat pertumbuhan, sebagaimana termuat dalam gambar dan tabel berikut:

Gambar V. 3.
Kawasan Pusat Pertumbuhan, Perdesaan dan Daerah Afirmasi Wilayah Pulau Sulawesi



Sumber: Permen. PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2025

Tabel V. 1.
Sasaran Pembangunan Daerah Pulau Sulawesi Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,43 – 5,85	12,72 – 13,28	5,50 – 6,30	5,96 – 6,46	5,23 – 5,46	5,23 – 5,79
Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,51	0,51	0,52	0,54	0,50	0,50
Rasio Gini (Nilai)	0,339 – 0,352	0,298 – 0,302	0,371 – 0,376	0,365 – 0,371	0,394 – 0,400	0,345 -0,349
Tingkat Kemiskinan (%)	5,59 – 6,19	11,06 – 11,56	7,30 – 7,89	10,04 – 10,54	14,2 – 14,5	9,00 – 9,73
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,01 – 5,56	2,25 – 2,94	3,80 – 4,10	2,54 – 3,04	2,87 – 3,08	1,41 – 2,00
Persentase Intensitas Emisi GRK (%)	54,9	77,96	37,00	28,93	59,58	61,65

Sumber: Permen. PPN/Kepala BAPPENAS, Nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025, Tahun 2024

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dalam tataran pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pembangunan nasional dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, khususnya pusat produksi pertanian, dan perikanan di kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Wajo dan Soppeng; pusat pengolahan sumber daya alam di kabupaten Pangkajene Kepulauan, Luwu Timur, dan Luwu; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan di kabupaten Barru dan Kota Parepare; pusat pengembangan jasa pariwisata di Kota Makassar dan

kabupaten Maros; dan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kota Palopo dan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang meliputi Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Bone, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai.

Sebagai upaya untuk memastikan tercapainya target pembangunan sebagaimana yang telah disekapati dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024, maka perlu menjabarkan keterkaitan antara target pembangunan Tahun 2025 dengan Indikator makro pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel V. 2.

Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dengan Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan			Indikator Makro Pembangunan		Keterangan
				Indikator	Target RKPD 2025	Indikator	Target RKP /Rakortekrenbang	
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	74,67			
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,35	Tidak termuat dalam RPD
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	69,27 (B)			
						Indeks Reformasi Hukum (IRH)	50,45	Tidak termuat dalam RPD
						Indeks Integritas Nasional	73,85	Tidak termuat dalam RPD
						Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tidak termuat dalam RPD
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	A-(4,35-4,50)	Indeks Pelayanan Publik	4,34	
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan	4	Indeks Williamson	0,462			

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan			Indikator Makro Pembangunan		Keterangan
			Indikator		Target RKPD 2025	Indikator	Target RKP /Rakortekrenbang	
	berkualitas dan merata	**merata**						
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	**5**	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**82,34**			
						Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	**6,0**	Tidak termuat dalam RPD
						Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	**1.680**	Tidak termuat dalam RPD
3	**Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah**	**Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah**	**6**	**Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)**	**84.248.042,86**			
						Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	**6,8**	Tidak termuat dalam RPD
						Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	**80,86**	Tidak termuat dalam RPD
						Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	**12,51 – 12,58**	Tidak termuat dalam RPD
3	**Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan**	**Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas**	**7**	**Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**5,67-6,82**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**5,67-6,82**	Tidak termuat dalam RPD
						Koefisien Variasi Harga	**8,67**	Tidak termuat dalam RPD

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan			Indikator Makro Pembangunan		Keterangan
			Indikator		Target RKPD 2025	Indikator	Target RKP /Rakortekrenbang	
	Daerah					**Antarwilayah Tingkat Provinsi (%)**		
						Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	**36,5**	Tidak termuat dalam RPD
						Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	**78,22**	Tidak termuat dalam RPD
						Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	**0,19**	Tidak termuat dalam RPD
						Kontribusi PDRB Provinsi (%)	**3,25**	Tidak termuat dalam RPD
						Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	**0,6**	Tidak termuat dalam RPD
						Tingkat Inflasi (%)	**1 - 3**	Tidak termuat dalam RPD
4	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan**	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**	**8**	**PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)**	**74,55**	**PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)**	**78,98 -79,06**	
			9	**Gini Rasio (%)**	**0,356**	**Rasio Gini (%)**	**0,371-0,376**	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan			Indikator Makro Pembangunan		Keterangan
			Indikator		Target RKPD 2025	Indikator	Target RKP /Rakortekrenbang	
	merata					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	44,5-45,0	Tidak termuat dalam RPD
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03	
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,3	Tidak termuat dalam RPD
						Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	Tidak termuat dalam RPD
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Menurunya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan (%)	8,09	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30 – 7,89	
						Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	10,79	Tidak termuat dalam RPD
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM	74,80			
						Indeks Modal Manusia	74,49	Tidak termuat dalam RPD
						Indeks Pembangunan	70,34 - 70,35	Tidak termuat

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan			Indikator Makro Pembangunan		Keterangan
			Indikator		Target RKPD 2025	Indikator	Target RKP /Rakortekrenbang	
						Kualitas Keluarga (IPKK)		dalam RPD
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	**13**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**93,78**			
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**0,36**	Tidak termuat dalam RPD
5	**Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup**	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan**	**14**	**IKLH**	**74,54**			
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	**15**	**Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)**	**2.075.597**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**	**37%**	

Sumber: Berita Acara Rakortekrenbang Tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Bappelitbangda Prov. Sulsel, diolah Tahun 2024.

5.2. Evaluasi Pencapaian Pembangunan Pada Kawasan Pembangunan

Perwujudan Sulawesi Selatan sebagaimana diamanatkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 tergambarkan pada pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2023 yang jika dibandingkan tahun 2022 secara umum menunjukkan peningkatan kinerja yang ditandai dengan peningkatan capaian kinerja makro pembangunan. Hal ini antara lain terlihat pada kinerja ekonomi selama tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 persen. Pertumbuhan positif ini terjadi pada semua kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang bertumbuh sebesar 13,63 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, namun masih di bawah capaian nasional dan belum mencapai target yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 6,70 persen – 7,30 persen.

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada tahun 2023, juga menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang diindikasikan dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 sebesar 4,51 persen menjadi sebesar 4,33 persen pada tahun 2023. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah peduduk bekerja sebanyak 137,3 ribu orang pada Agustus 2023 dibandingkan dengan Agustus 2022. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap tenaga kerja sebesar 35,84 persen, perdagangan besar dan eceran yang menyerap tenaga kerja sebesar 17,53 persen dan industry pengolahan yang menyerap tenaga kerja sebesar 9,02 persen. Berdasarkan status pekerjaan utama, pekerja Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 masih didominasi oleh pekerja informal sebesar 62,77 persen, namun jika dibandingkan dengan Agustus Tahun 2022, terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan formal menjadi sebesar 37,23 persen pada Tahun 2023 yang juga diiringi dengan peningkatan persentase penduduk bekerja tamatan SMA/SMK dan Diploma IV, S1, S2, S3.

Akan tetapi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan kemiskinan pada tahun 2023 masih belum optimal yang ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan sebesar 0,07 persen poin pada Maret 2023 menjadi sebesar 8,70 persen dibandingkan dengan Maret 2022 sebesar 8,63 persen, dikarenakan meningkatnya persentase penduduk miskin di perdesaan yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas makanan dan terkontraksinya pertumbuhan pada sector padat karya.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan Sulawesi Selatan berdasarkan Kawasan Pembangunan tahun 2023 menunjukkan bahwa target sasaran makro setiap kabupaten/kota cenderung belum tercapai terutama untuk indicator tingkat kemiskinan pada semua kawasan pembangunan, sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

5.2.1. Pembangunan Kawasan Makassar

Pembangunan kawasan Makassar dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran Kawasan Makassar yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam. Pembangunan kawasan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan kontribusi rata-rata 49.63 persen pertahun, yang didominasi oleh lapangan

usaha perdagangan dan jasa dengan kontribusi sebesar 17,51 persen, lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 17,17 persen dan lapangan usaha industry pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,23 persen yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, sebagaimana peran kawasan Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa regional di Kawasan Timur Indonesia yang memacu tumbuhnya investasi rata-rata sebesar 7,15 persen per tahun atau rata rata investasi sebesar Rp. 97,36 triliun (atas dasar harga berlaku). Pencapaian kinerja pembangunan makro di Kawasan Makassar dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan sebagaimana table berikut:

Tabel V. 3.
Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Makassar dan sekitarnya Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2023	Capaian 2023	Target Tahun 2024
Makassar	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,81 – 6,41	5,31	5,65
	Tingkat Kemiskinan	%	3,75	5,07	4,07
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	13,22	10,6	11,41
	Gini Ratio	Nilai	0,376	0,387	0,383
	IPM	Nilai	82,74	83,52	84,07
Gowa	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 – 6,54	5,82	7.,67
	Tingkat Kemiskinan	%	6,34	7,42	6,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,15	3,43	3,13
	Gini Ratio	Nilai	0,325	0,376	0,353
	IPM	Nilai	71,53	71,57	72,26
Maros	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,56 – 6,08	5,00	5,10
	Tingkat Kemiskinan	%	7,99	9,65	8,18
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,00	3,65	4,90
	Gini Ratio	Nilai	0,346	0,372	0,351
	IPM	Nilai	71,05	71,63	72,23
Takalar	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,93 – 6,57	3,86	5,70
	Tingkat Kemiskinan	%	7,23	8,29	7,47
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,98	3,58	2,49
	Gini Ratio	Nilai	0,339	0,365	0,364
	IPM	Nilai	68,71	68,90	69,51
Pangkajene Kepulauan	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,60 – 6,13	4,75	4,79
	Tingkat Kemiskinan	%	11,78	13,40	12,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,95	5,05	5,10
	Gini Ratio	Nilai	0,325	0,354	0,324
	IPM	Nilai	70,00	70,59	71,03

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2024

PDRB Kawasan Makassar pada Tahun 2023, berkontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Selawesi Selatan yang semakin meningkat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PDRB

dari 49,74 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 50,01 persen pada tahun 2023 yang dikontribusikan oleh Kota Makassar, kabupaten Maros dan kabupaten Gowa.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Makassar, maka semua kabupaten/kota di Kawasan Makassar memiliki ketercapaian yang baik untuk indicator Indeks Pembangunan manusia namun sebagai kawasan yang menjadi episentrum sosial dan ekonomi di Sulawesi Selatan capaian IPM di Kawasan Makassar masih perlu ditingkatkan. Ketercapaian target pada indicator tingkat kemiskinan dan gini ratio pada Kawasan Makassar masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, sedangkan untuk indicator tingkat pengangguran terbuka hanya kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal dan pada indicator laju pertumbuhan ekonomi hanya kabupaten Takalar yang pencapaian targetnya belum tercapai.

5.2.2. Pembangunan Kawasan Bulukumba

Sebagai upaya mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan, maka kebijakan pengembangan kawasan Bulukumba yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan khususnya perikanan tangkap dan peningkatan akses kelola kawasan hutan dengan skema perhutanan social, serta optimalisasi fungsi dan peningkatan produktifitas Kawasan Industri Bantaeng sebagai kawasan industry prioritas nasional. Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan.

Tabel V. 4.
Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Bulukumba dan sekitarnya Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2023	Capaian 2023	Target Tahun 2024
Bulukumba	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,95 – 5,25	4,11	5,15
	Tingkat Kemiskinan	%	6,18	7,22	6,77
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,27	1,31	2,55
	Gini Ratio	Nilai	0,349	0,379	0,350
	IPM	Nilai	70,61	71,21	71,69
Jeneponto	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68 – 6,23	1,90	5,66
	Tingkat Kemiskinan	%	12,16	13,06	12,63
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,21	2,13	2,72
	Gini Ratio	Nilai	0,328	0,340	0,328
	IPM	Nilai	65,38	65,90	66,34
Sinjai	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,39 – 5,86	5,71	5,61
	Tingkat Kemiskinan	%	7,90	8,55	8,18
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,53	1,69	2,21
	Gini Ratio	Nilai	0,350	0,345	0,346
	IPM	Nilai	69,06	68,92	69,58
Bantaeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,12 – 6,82	5,56	8,84
	Tingkat Kemiskinan	%	7,40	9,18	8,40
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,08	3,71	3,34

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2023	Capaian 2023	Target Tahun 2024
	Gini Ratio	Nilai	0,324	0,336	0,310
	IPM	Nilai	70,07	70,57	70,97
Kepulauan Selayar	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,27 – 7,03	3,68	5,19
	Tingkat Kemiskinan	%	10,54	12,27	11,03
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,33	1,98	1,83
	Gini Ratio	Nilai	0,336	0,345	0,339
	IPM	Nilai	68,60	69,20	69,44

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2024

PDRB di Kawasan Bulukumba merupakan PDRB kawasan yang paling sedikit berkontribusi terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang hanya sebesar 10,17 persen, yang dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi PDRB kabupaten Kepulauan Selayar, kabupaten Bantaeng dan kabupaten Jeneponto.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten di Kawasan Bulukumba, maka semua kabupaten di Kawasan Bulukumba memiliki ketercapaian yang baik untuk indicator Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Indeks Pembangunan Manusia. Pada target indicator tingkat kemiskinan, semua kabupaten pada Kawasan Bulukumba masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, sedangkan pada indicator Gini Ratio, semua kabupaten juga masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, kecuali kabupaten Sinjai.

5.2.3. Pembangunan Kawasan Watampone

Pengembangan kawasan pembangunan Watampone diprioritaskan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah untuk memacu pemulihan ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha mikro dan kecil, pemenuhan standar pelayanan minimal, utamanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Kawasan Watampone berkontribusi sebesar 13,21 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa kontribusi PDRB kawasan Watampone terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, khususnya pada kabupaten Bone dan kabupaten Wajo. Kawasan Watampone memberikan kontribusi cukup besar terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,33 persen mengingat peran kawasan Watampone sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan. Pencapaian kinerja makro pembangunan di Kawasan Watampone, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel V. 5.
Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten pada Kawasan Watampone Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2023	Capaian 2023	Target Tahun 2024
Bone	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 – 6,67	3,77	5,99
	Tingkat Kemiskinan	%	8,66	10,53	9,90
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,06	2,88	2,20
	Gini Ratio	Nilai	0,380	0,389	0,365
	IPM	Nilai	67,37	67,81	68,31
Wajo	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,35 – 5,79	1,43	6,76
	Tingkat Kemiskinan	%	5,85	6,73	6,04
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	2,10	2,47
	Gini Ratio	Nilai	0,334	0,362	0,364
	IPM	Nilai	70,12	71,10	71,54
Soppeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,44 – 7,25	3,33	6,15
	Tingkat Kemiskinan	%	5,82	7,48	7,26
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,22	4,34	3,28
	Gini Ratio	Nilai	0,379	0,390	0,374
	IPM	Nilai	69,81	70,58	70,79

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2024.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten di Kawasan Watampone, maka semua kabupaten pada indicator tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi serta Gini ratio masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, sedangkan untuk indicator tingkat pengangguran terbuka hanya kabupaten Soppeng yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal. Dan pada ketercapaian indicator Indeks Pembangunan Manusia, semua kabupaten memiliki ketercapaian yang baik.

5.2.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan sekitarnya

Pengembangan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional, yang dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan peran kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan konektivitas serta infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diprioritaskan pada pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan.

Pembangunan kawasan Parepare selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berkontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Selatan sebesar 16,25 persen dengan dominasi lapangan usaha terbesar adalah pertanian dengan kontribusi sebesar 29,68 persen, industry pengolahan sebesar 21,64 persen dan konstruksi dengan kontribusi sebesar 10,88 persen. Pencapaian kinerja pembangunan di Kawasan Parepare, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel V. 6.
Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Parepare Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2023	Capaian 2023	Target Tahun 2024
Parepare	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77 – 6,36	3,88	5,05
	Tingkat Kemiskinan	%	4,08	5,34	4,95
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,82	5,86	5,43
	Gini Ratio	Nilai	0,351	0,381	0,368
	IPM	Nilai	78,70	79,03	79,94
Sidenreng Rappang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51 – 6,01	3,28	5,76
	Tingkat Kemiskinan	%	4,78	5,14	4,52
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,65	3,29	3,47
	Gini Ratio	Nilai	0,328	0,345	0,343
	IPM	Nilai	72,18	72,71	72,25
Barru	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,85 – 6,64	3,51	5,33
	Tingkat Kemiskinan	%	6,67	8,46	7,74
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,11	5,89	5,25
	Gini Ratio	Nilai	0,336	0,371	0,355
	IPM	Nilai	72,27	72,36	72,39
Pinrang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68 – 6,19	2,18	5,60
	Tingkat Kemiskinan	%	7,16	8,90	8,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00	3,64	2,65
	Gini Ratio	Nilai	0,353	0,340	0,352
	IPM	Nilai	72,11	72,84	72,57
Enrekang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64 - 6,19	2,33	5,90
	Tingkat Kemiskinan	%	10,93	12,69	11,32
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,33	1,53	0,47
	Gini Ratio	Nilai	0,344	0,365	0,336
	IPM	Nilai	73,79	73,88	74,21

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2024.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Parepare, maka semua kabupaten/kota di Kawasan Parepare memiliki ketercapaian yang baik untuk indicator Indeks Pembangunan Manusia demikian halnya dengan indicator Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan ketercapaian target pada indicator tingkat kemiskinan masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, demikian halnya dengan ketercapaian indicator Gini Ratio masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, kecuali di kabupaten Pinrang.

5.2.5. Pembangunan Kawasan Palopo

Pembangunan Kawasan Palopo diprioritaskan pemulihan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui penguatan peran Kawasan Palopo sebagai bagian dari

Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan Kawasan Strategis Nasional Toraja yang juga sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pembangunan kawasan Palopo dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan UMKM, penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Peran kawasan Palopo terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencapai rata-rata 15,22 persen pertahun. Kontribusi tertinggi disumbang oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 44,03 persen, kemudian lapangan usaha pertanian sebesar 22,34 persen dan pengadaan listrik dan gas dengan kontribusi sebesar 16,93 persen. Pencapaian kinerja pembangunan di kawasan Palopo, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel V. 7.
Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2023	Capaian 2023	Target Tahun 2024
Palopo	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,84 - 6,45	4,34	5,65
	Tingkat Kemiskinan	%	6,75	7,69	7,17
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,91	7,81	7,87
	Gini Ratio	Nilai	0,333	0,367	0,360
	IPM	Nilai	78,84	79,45	79,94
Luwu	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49 - 5,99	5,64	6,09
	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	12,71	11,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,72	3,70	3,75
	Gini Ratio	Nilai	0,373	0,341	0,353
	IPM	Nilai	71,57	72,16	72,68
Luwu Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,10 – 6,80	5,12	4,94
	Tingkat Kemiskinan	%	12,56	12,66	12,12
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,87	2,63	2,73
	Gini Ratio	Nilai	0,324	0,342	0,338
	IPM	Nilai	70,35	71,34	71,52
Luwu Timur	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,72 - 3,63	9,66	2,86
	Tingkat Kemiskinan	%	5,02	6,93	6,08
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,26	5,42	4,26
	Gini Ratio	Nilai	0,381	0,393	0,382
	IPM	Nilai	74,31	74,35	74,87
Tana Toraja	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,18 - 6,90	3,66	5,59
	Tingkat Kemiskinan	%	11,34	12,48	11,19
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,48	3,37	2,26
	Gini Ratio	Nilai	0,328	0,350	0,344
	IPM	Nilai	70,10	70,73	71,13

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2023	Capaian 2023	Target Tahun 2024
Toraja Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,19 – 6,92	3,94	5,32
	Tingkat Kemiskinan	%	9,27	12,12	10,38
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,03	2,60	1,95
	Gini Ratio	Nilai	0,361	0,348	0,345
	IPM	Nilai	70,26	71,23	71,57

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2024.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Palopo, maka semua kabupaten/kota di Kawasan Palopo memiliki ketercapaian yang baik untuk indicator Indeks Pembangunan Manusia, namun sebagai kawasan yang menjadi episentrum sosial ekonomi di wilayah teluk Bone, capaian Indeks Pembangunan Manusia masih perlu dioptimalkan Ketercapaian target pada indicator tingkat kemiskinan masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, sedangkan untuk indicator tingkat pengangguran terbuka hanya kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Tana Toraja yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal, sedangkan pada indicator Tingkat Pengggangguran Terbuka hanya kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Toraja Utara yang berkinerja baik dan pada indicator Gini Ratio, hanya kabupaten Luwu dan kabupaten Toraja Utara yang berkinerja baik.

5.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Rancangan RKP Tahun 2025 mengarahkan tema pembangunan Pulau Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA dengan target kinerja pembangunan yang meliputi Kontribusi PDRB sebesar 7,4 persen; Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,3 – 7,9 persen; dan TPT sebesar 3,2 – 3,7 persen. Target kinerja pembangunan tersebut, kemudian dijabarkan kedalam pokok pokok intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Tahun 2025 sebagai sasaran pembangunan daerah pada tiap tiap provinsi. Namun terdapat perbedaan indicator maupun besaran target kinerja sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang berbeda antara Rancangan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, dikarenakan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan masih mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

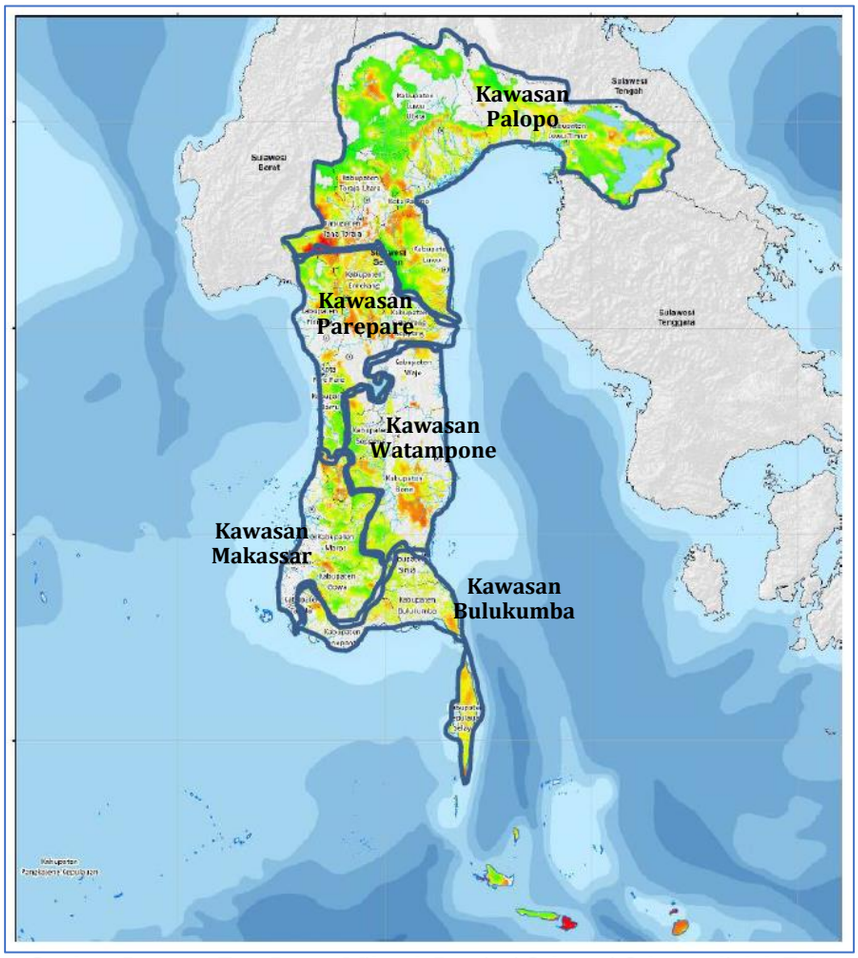
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2025, mengamanatkan Tema Pembangunan Tahun 2025 adalah **Peningkatan perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**. Tema pembangunan ini sejalan dengan arahan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 pada Tahapan I Tahun 2025-2029 yaitu **penguatan fondasi transformasi** yang dilaksanakan melalui transformasi dan landasan transformasi serta penguatan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah.

Memperhatikan kinerja pembangunan dan mengacu pada kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi Selatan yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal, maka pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 dilakukan berdasarkan substansi transformasi dan landasan transformasi yang difokuskan pada penguatan transformasi yaitu (1) pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan dan

perlindungan sosial; (2) hilirisasi sumber daya alam dan produktivitas tenaga kerja; (3) penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan; (4) pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah; dan (5) perkuatan ketahanan social, budaya dan ekologi.

Fokus pembangunan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu sebagai pusat industry pengolahan sumber daya alam, pusat jasa perdagangan dan pariwisata, sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam berbasis mitigasi dan adaptasi bencana yang didukung oleh pelayanan jaringan prasarana wilayah yang berkualitas serta keterkaitan dan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan melalui sinergitas antar wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 melalui pendekatan pembangunan wilayah berbasis pembangunan kawasan pembangunan yang didasarkan pada arahan kebijakan pembangunan nasional dengan mengacu pada rencana tata ruang baik rencana tata ruang wilayah nasional maupun rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota.

Gambar V. 4.
Kawasan Pembangunan Sulawesi Selatan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata yang diiringi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana serta mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025, sejalan dengan

substansi transformasi dan landasan transformasi yang diamanatkan dalam kebijakan pembangunan jangka panjang yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi dalam mendukung pelaksanaan prioritas nasional.

Transformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan manusia Sulawesi Selatan yang unggul, dengan derajat kesehatan yang tinggi dan merata, tingkat dan kualitas pendidikan yang tinggi dan merata, serta standar hidup yang layak untuk semua yang terkait dengan Prioritas Nasional 4 dengan memprioritaskan pengendalian penyakit menular, pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum yang bermuara pada pelayanan publik berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terkait dengan Prioritas Nasional 7 akan diprioritaskan pada pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah, peningkatan kapasitas fiscal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai pendapatan yang tinggi melalui pengembangan kawasan pembangunan berdasarkan potensi wilayah, pengembangan ekonomi biru di kawasan andalan laut Teluk Bone dan Selat Makassar, penerapan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan, diiringi dengan implementasi transformasi digital, penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan rantai pasok global, dalam rangka memperkuat peran Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA. Transformasi ekonomi terkait dengan Prioritas Nasional 2 dalam kerangka penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang akan diprioritaskan pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian hortikultura, perkebunan, perikanan dan perhutanan yang didukung dengan pemanfaatan teknologi digital, Prioritas Nasional 3 dalam kerangka melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja, kewirausahaan, dan industry melalui peran aktif koperasi yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pelabuhan perikanan, peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital serta infratruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu transformasi ini juga terkait dengan Prioritas Nasional 5, yang terkait dengan upaya hilirisasi dan pengembangan industry berbasis sumber daya alam yang diprioritaskan pada hilirisasi industry kakao, rumput laut yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital di sector logistic dan dukungan infrastruktur transportasi udara.

Sedangkan landasan transformasi yakni Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia yang terkait dengan Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi diprioritaskan pada pengembangan smart government, penguatan kapasitas aparatur daerah, peningkatan kapasitas fiscal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah dan Prioritas Nasional 1, yaitu memperkokoh ideology Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia yang diprioritaskan pada penguatan kesetaraan masyarakat

atas informasi public dan penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berkespresi, berserikat dan berpendapat.

Demikian juga dengan landasan transformasi berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengendalian alih fungsi lahan hutan dan pertanian, serta memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, pada seluruh kawasan pembangunan tersebut. Landasan transformasi ini terkait dengan Prioritas 8 yaitu perkuatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya yang diprioritaskan pada fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan terkait pariwisata di Kawasan Makassar yang merupakan bagian dari DPP Selayar-Makassar-Toraja.

Sasaran pembangunan tersebut digambarkan dengan indikator pembangunan sebagaimana tabel berikut.

Tabel V. 8.
Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RPD Tahun 2025	Rancangan Awal RKP Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67 – 6,82	5,6 – 6,3
Tingkat Kemiskinan	%	8,09	7,30 – 7,89
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,03	3,70 – 4,10
Gini Rasio	Nilai	0,356	0,371 – 0,376
Share PDRB	%	-	3,3 – 3,3
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,49	-
IKLH	Nilai	73,62	78,03
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,01 – 4,50 (A-)	4,34 (A-)
Indeks Modal Manusia	Nilai	-	0,54
Persentase Intensitas Emisi GRK	%	-	37,0

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, dan Rancangan Awal RKP Tahun 2025, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 bertujuan untuk mendukung proses transformasi ekonomi dengan prioritas arah kebijakan peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sector unggulan yaitu pertanian, perikanan dan pariwisata yang didukung oleh hilirisasi komoditas unggulan wilayah, khususnya hilirisasi industry nikel, industry kakao, dan industry rumput laut serta penguatan industry logam dasar, penguatan UMKM, penguatan pusat pertumbuhan wilayah, penguatan dan pengembangan pemampu dan ekosistem ekonomi kreatif, peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar inklusif melalui peningkatan aksesibilitas, peningkatan konektivitas dan pemerataan jangkauan infrastruktur wilayah serta penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah. Pada transformasi sosial dengan arah kebijakan peningkatan akses dan kualitas pembelajaran yang didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas berbasis pemenuhan SPM, peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan kesehatan berbasis pemenuhan SPM dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, serta pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan; pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan pemberdayaan masyarakat, pemberian kemudahan akses

berusaha, dan peningkatan kualitas layanan dasar dengan mendorong kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga.

Transformasi tata kelola dilakukan dengan arah kebijakan pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga; peningkatan kompetensi dan kinerja ASN, peningkatan kualitas data dan informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi. Sedangkan pada Transformasi Supremasi Hukum dengan prioritas arah kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan nasional, peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi dengan arah kebijakan prioritas berupa pemantapan pengelolaan sector unggulan secara berkelanjutan dan berkeadilan, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penyediaan SDM berkompoten, sarana dan prasarana dan system komunikasi pencarian pertolongan (SAR), peningkatan kualitas pelembagaan PUG dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta peningkatan partisipasi perempuan dalam lapangan kerja formal. Sedangkan pada pembangunan kewilayahan, diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan penguatan kerjasama antar daerah di Sulawesi, pengembangan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung konektivitas laut backbone logistik, penguatan ketahanan ekologi melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan SPAM Regional Mamminasata dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan mengacu pada rencana tata ruang dan dijabarkan ke dalam lima kawasan pembangunan yaitu Kawasan Makassar, Kawasan Bulukumba, Kawasan Watampone, Kawasan Parepare, dan Kawasan Palopo sebagai berikut.

5.3.1. Kawasan Makassar

Pengembangan kawasan Makassar dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat peran Kawasan Makassar sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan kontributor utama PDRB Sulawesi Selatan. Selain itu Kawasan Makassar juga merupakan Kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata yaitu Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar yang meliputi TN Bantimurung Bulusaraung, KPPN Makassar, dan Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan. Untuk itu pengembangan Kawasan Makassar dilakukan dengan strategi meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan arah kebijakan penyiapan peningkatan dan pengembangan pusat pusat pertumbuhan baru berbasis pengembangan komoditas unggulan dan pengembangan kawasan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah serta peningkatan promosi wisata dan peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata.

Selain itu strategi pembangunan Kawasan Makassar dalam kerangka transformasi ekonomi lainnya adalah meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan dan insentif

penanaman modal serta pengembangan kapasitas usaha ekonomi melalui peningkatan kualitas ketenagakerjaan serta penguatan kapasitas kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menurunkan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat, utamanya di Kota Makassar yang angka gini rasio pada tahun 2023 sebesar 0,395 di atas rata rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Strategi pengembangan Kawasan Makassar dilakukan dengan meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan arah kebijakan penyiapan peningkatan dan pengembangan pusat pusat pertumbuhan baru berbasis pengembangan komoditas unggulan dan pengembangan kawasan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah. Pengembangan wilayah Kawasan Makassar, yang didukung oleh peningkatan jangkauan dan kualitas serta pemerataan infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur sumber daya air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air baku guna mendukung peningkatan produktivitas komoditas sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta penanganan permukiman kumuh, peningkatan kualitas transportasi public khususnya pengembangan system angkutan umum massal, dan peningkatan konektivitas, khususnya bandar udara, pelabuhan dan jaringan kereta api dalam rangka penguatan dukungan Sulawesi Selatan terhadap Ibukota Nusantara serta peningkatan kemantapan jalan.

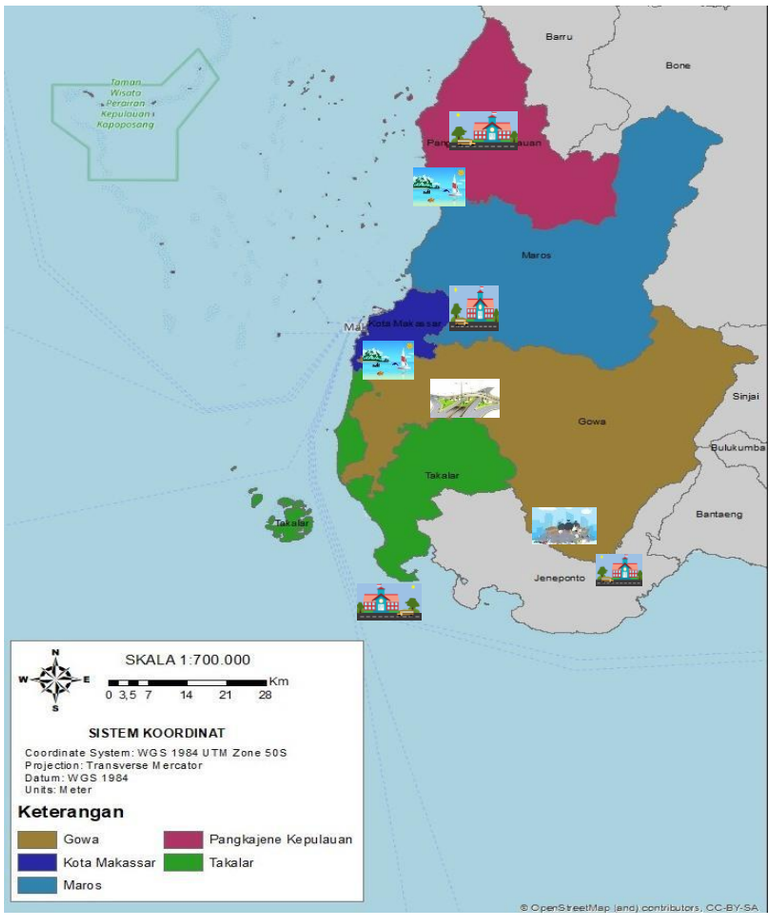
Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif melalui reformasi system kesehatan nasional, pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting serta peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kawasan Makassar, khususnya di kabupaten Pangkejene Kepulauan dan kabupaten Maros yang persentase penduduk miskinnya di atas rata rata provinsi.

Kawasan Makassar merupakan bagian dari wilayah Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar yang merupakan Kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang meliputi TN Bantimurung Bulusaraung, KPPN Makassar, dan Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan. Untuk itu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, maka dilakukan strategi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan promosi wisata dan peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata. Sebagai upaya menurunkan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dilakukan pengembangan kapasitas usaha ekonomi melalui penguatan kapasitas kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Strategi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana merupakan salah satu prioritas pembangunan yang capaiannya terwujud pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), untuk itu pencapaiannya pada Kawasan Makassar yang merupakan target utama penurunan emisi GRK mengingat Kawasan Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasta akan dilakukan melalui arah kebijakan

penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon dan penyediaan infrastruktur persampahan regional untuk mewujudkan kawasan Makassar sebagai kawasan perkotaan yang layak huni. Selain itu pada Kawasan Makassar yang merupakan salah satu kawasan rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya banjir, cuaca ekstrim, dan bahaya gelombang tinggi dan abrasi dengan kelas bahaya tinggi akan dilakukan intervensi berupa peningkatan ketangguhan bencana untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang hijau dan tangguh.

Gambar V. 5.
Arah Pengembangan Kawasan Makassar Tahun 2025



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024.

Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan wisata berbasis kepulauan dan geopark serta potensi komoditas pertanian dan perikanan melalui pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, pengembangan wisata bahari yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Optimalisasi peran Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pusat pelayanan jasa dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja investasi dan meningkatkan kembali *share* ekspor Sulawesi Selatan.

Walaupun nilai IPM kabupaten di Kawasan Makassar menunjukkan peningkatan, namun perlu untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indeks

pendidikan di kabupaten Pangkejene Kepulauan, kabupaten Takalar dan kabupaten Maros dan dan Indeks Kesehatan di kabupaten Takalar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Pangkajene Kepulauan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Selain itu, Kawasan Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata, yang merupakan target utama penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui peningkatan penggunaan system angkutan massal perkotaan. Sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada penanganan bencana hidrometeorologi berupa bahaya banjir, cuaca ekstrim, dan bahaya gelombang tinggi dan abrasi dengan kelas bahaya tinggi.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Makassar tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pada kawasan perkotaan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 9.
Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Pembangunan Makassar Tahun 2025

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025
Makassar	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,06
	Tingkat Kemiskinan	%	3,65
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,05
	Gini Ratio	Nilai	0,378
	IPM	Nilai	84,50
Gowa	Pertumbuhan Ekonomi	%	8,08
	Tingkat Kemiskinan	%	5,71
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,06
	Gini Ratio	Nilai	0,348
	IPM	Nilai	72,84
Maros	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,52
	Tingkat Kemiskinan	%	7,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,84
	Gini Ratio	Nilai	0,346
	IPM	Nilai	72,78
Takalar	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,11
	Tingkat Kemiskinan	%	7,09
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,42
	Gini Ratio	Nilai	0,358
	IPM	Nilai	70,05
Pangkep	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20
	Tingkat Kemiskinan	%	12,19
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,04
	Gini Ratio	Nilai	0,319
	IPM	Nilai	71,60

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disajikan intervensi program pembangunan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan baik sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan maupun sasaran pembangunan nasional. Beberapa intervensi program pembangunan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional yang juga diharapkan dapat dikontribusikan melalui pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Makassar digambarkan sebagai berikut.

Tabel V. 10.
Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Pembangunan Makassar
Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
1.	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Seluruh Kab/Kota
			Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat	Seluruh Kab/Kota
	PN. 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan		Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Seluruh Kab/Kota
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Seluruh Kab/Kota
			Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar	Kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Takalar
2.	PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemugaran permukiman kumuh	Kabupaten Maros
			Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan	Kota Makassar
			Pengembangan sistem angkutan umum massal	Kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Takalar
3.	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan	Peningkatan Produktivitas dan Nilai	Penyempurnaan pembangunan jalur KA	Kota Makassar

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
	Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Tambah Produk Unggulan Daerah	Trans Sulawesi Makassar-Parepare	
			Pengembangan sarana pengelolaan rumah produksi bersama komoditi garam terpadu	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
			Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim	Kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Takalar
			Peningkatan cakupan layanan infrastuktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital	Kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Takalar
			Rehabilitasi Ballroom Celebes Convention Center gedung sentra usaha kecil menengah	Kota Makassar
			Pengembangan jejaring desa wisata	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
			Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Takalar
	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SumberDaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Penguatan industry logam dasar	Kabupaten Takalar
			Hilirisasi industry kakao	Kota Makassar
			Hilirisasi industry rumput laut	Kota Makassar
			Pemanfaatan teknologi digital di sector logistic	Kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Takalar
			Pengembangan Bandara Hub Sultan Hasanuddin	Kota Makassar

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
4.	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan	Kabupaten Gowa, kabupaten Maros, kabupaten Pangkajene Kepulauan, kabupaten Takalar
			Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)	Kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Takalar
			Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya	Kota Makassar
			Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi prasarana olahraga	Kota Makassar
			Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Kota Makassar
			Pembangunan kualitas keluarga	Semua Kab/Kota
			Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota
			Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini	Semua Kab/Kota
			Fasilitasi literasi digital	Semua Kab/Kota
	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penyediaan sarana pendukung untuk ternak (terutama container untuk inseminasi buatan)	Kabupaten Maros

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
5.	Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
			Bantuan benih ikan	Kabupaten Takalar
			Pengembangan Kawasan Tebu	Kabupaten Takalar, kabupaten Gowa
			Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan	Kabupaten Maros dan kabupaten Takalar
			Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative untuk meningkatkan ketahanan bencana	Kabupaten Maros dan kabupaten Takalar
			Pengembangan kawasan hortikultura	kabupaten Gowa
			Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di area Metropolitan Mamminasata	Kota Makassar, kabupaten Gowa
			Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Kabupaten Maros, kabupaten Pangkajene Kepulauan
			Pembangunan jaringan distribusi utama SPAM Regional Mamminasata	Kabupaten Gowa, kabupaten Takalar, Kota Makassar
			Failitasi *Business Matchmaking Startup Digital*	Kota Makassar
			Fasilitasi *Digital Technopreneur*	Kota Makassar
			Pemanfaatan teknologi digital di sector pertanian	Kabupaten Maros, kabupaten Gowa
			Sistem pengelolaan air limbah domestic terpusat skala permukiman	Kabupaten Pangkajene Kepulauan,
			Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi	Kabupaten Maros, kabupaten Pangkajene Kepulauan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
	PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional di Geopark Maros-Pangkep	Kabupaten Maros, kabupaten Pangkajene Kepulauan
			Bantuan pelaksanaan giat warisan budaya	Kota Makassar
			Penyediaan SDM berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Kabupaten Gowa, Kota Makassar

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024.

Selain kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui Prioritas Nasional, pembangunan sasaran pembangunan juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan tematik provinsi, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel V. 11.
Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten/Kota pada Kawasan Makassar Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Makassar	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	20,6
	Penurunan Gizi Buruk	%	8,2
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	5,38
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	5.814
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	85.614
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	66,16
Gowa	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	18,8
	Penurunan Gizi Buruk	%	9,1
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	5,38
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	473
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	72,19
Maros	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	29,7
	Penurunan Gizi Buruk	%	5,1
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	4,31
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	532
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	75,26
Takalar	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	18,8
	Penurunan Gizi Buruk	%	10,4
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	2,68
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	150
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	70,72
Pangkajene Kepulauan	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	25
	Penurunan Gizi Buruk	%	7,8
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	9,12
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	573
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	73,91

Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2024

5.3.2. Kawasan Bulukumba

Pengembangan kawasan Bulukumba dilakukan melalui pendekatan pemerataan dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seiring dengan ditetapkannya KPPN Selayar dan KSPN Takabonerate sebagai bagian dari daerah Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Baru. Untuk itu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, maka

dilakukan strategi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan promosi wisata dan peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata, khususnya di kabupaten Kepulauan Selayar dan kabupaten Bulukumba yang diiringi dengan pengembangan kapasitas usaha ekonomi melalui penguatan kapasitas kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas.

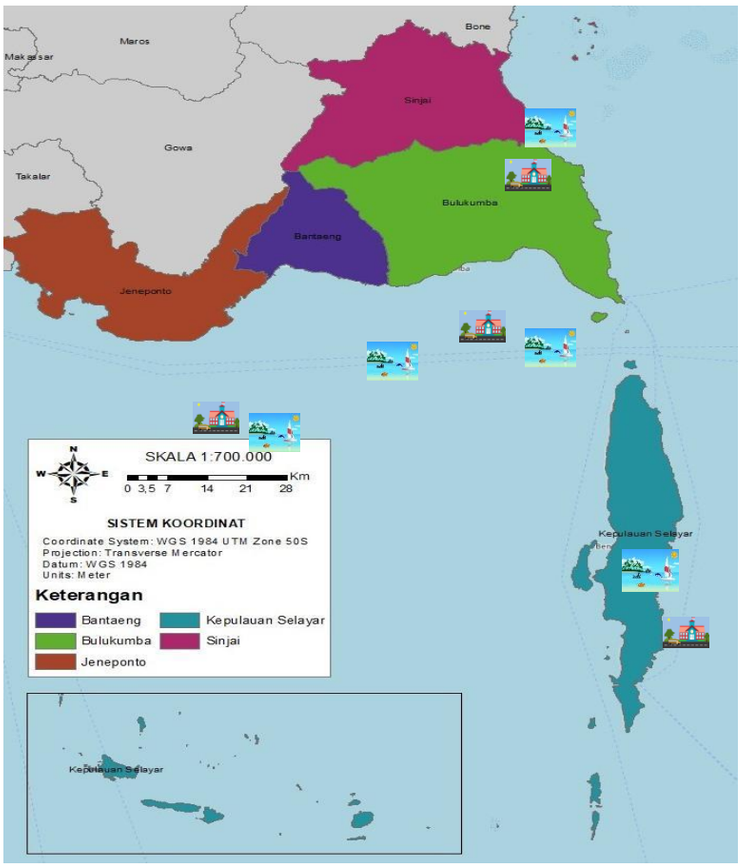
Selain strategi peningkatan pertumbuhan perkonomian daerah, dalam mewujudkan pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata maka strategi pengembangan kawasan Bulukumba dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja yang dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan khususnya komoditas garam secara terpadu dan pengembangan sentra UKM di kabupaten Jeneponto, peningkatan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, khususnya peningkatan kapasitas Kawasan Industri Bantaeng yang merupakan kawasan industry prioritas nasional.

Kawasan Bulukumba merupakan salah kawasan yang akan diprioritaskan penanganannya pada Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang yang kompetitif dan inklusif untuk meningkatkan capaian IPM kabupaten Tahun 2023 di Kawasan Bulukumba di bawah rata rata capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan menurunkan angka kemiskinan yang diprioritaskan pada Kabupaten Banteng, Kepulauan Selayar dan kabupaten Jeneponto yang angka kemiskinannya masih di atas provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata diprioritaskan pada pemenuhan akses dan layanan dasar, khususnya pemenuhan kebutuhan air minum, penanganan permukiman kumuh dan penyelenggaraan jalan berupa peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic guna meningkatkan konektivitas antara Kawasan Bulukumba sebagai pusat produksi komoditas pertanian dan perikanan dengan pusat distribusi.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan peningkatan IKLH melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sedangkan pembangunan yang berketahanan bencana diprioritaskan pada Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bulukumba yang merupakan kabupaten dengan potensi rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya cuaca ekstrim dan potensi bahaya tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi.

Gambar V. 6.
Arah Pengembangan Kawasan Bulukumba Tahun 2025



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Pembangunan kawasan Bulukumba diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan wisata berbasis kepulauan, pengembangan potensi komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, pengembangan wisata bahari dan peningkatan konektivitas yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah.

Pembangunan Kawasan Bulukumba pada Tahun 2025 akan diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang yang kompetitif dan inklusif mengingat capaian IPM kabupaten Tahun 2023 di Kawasan Bulukumba di bawah rata rata capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan melalui penurunan angka kemiskinan dengan memperhatikan capaian persentase kemiskinan kabupaten Tahun 2023 di Kawasan Bulukumba di atas rata rata capaian persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pembagunan berketahanan bencana diprioritaskan pada Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bulukumba yang merupakan kabupaten dengan potensi rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya cuaca ekstrim dan potensi bahaya tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Bulukumba tahun 2025 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan

penyerapan tenaga kerja dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 12.
Sasaran Pembangunan Kabupaten Kawasan Pembangunan Bulukumba
Tahun 2025

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Bulukumba	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,56
	Tingkat Kemiskinan	%	6,44
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,48
	Gini Ratio	Nilai	0,345
	IPM	Nilai	72,31
Jeneponto	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,07
	Tingkat Kemiskinan	%	12,11
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,59
	Gini Ratio	Nilai	0,323
	IPM	Nilai	66,90
Sinjai	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,02
	Tingkat Kemiskinan	%	7,88
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,11
	Gini Ratio	Nilai	0,318
	IPM	Nilai	67,40
Bantaeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	9,25
	Tingkat Kemiskinan	%	8,08
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,19
	Gini Ratio	Nilai	0,306
	IPM	Nilai	71,56
Kepulauan Selayar	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60
	Tingkat Kemiskinan	%	10,44
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,75
	Gini Ratio	Nilai	0,335
	IPM	Nilai	69,94

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disajikan intervensi program pembangunan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan baik sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan maupun sasaran pembangunan nasional. Beberapa intervensi program pembangunan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional yang juga diharapkan dapat dikontribusikan melalui pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Bulukumba digambarkan sebagai berikut.

Tabel V. 13.
Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Pembangunan Bulukumba
Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Seluruh Kabupaten

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
1.		Akuntabel dan Inovatif		
			Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat	Seluruh Kabupaten
	PN. 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan		Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Seluruh Kabupaten
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Seluruh Kabupaten
2.	PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pengembangan sistem angkutan umum massal	Kabupaten Sinjai, kabupaten Kepulauan Selayar
3.	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pengembangan sarana pengelolaan rumah produksi bersama komoditi garam terpadu	Kabupaten Jeneponto
			Pengembangan jejaring desa wisata	Kabupaten Bulukumba, kabupaten Kepulauan Selayar, kabupaten Sinjai
			Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	semua kabupaten
			Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan sentra usaha kecil dan menengah	Kabupaten Jeneponto
3.	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SumberDaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Hilirisasi industry rumput laut	Kabupaten Bulukumba, kabupaten Sinjai, kabupaten Jeneponto

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
4.	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan	Semua kabupaten
			Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)	Semua kabupaten
			Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya	Semua kabupaten
			Pembangunan kualitas keluarga	Semua kabupaten
			Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan	Semua kabupaten
			Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini	Semua kabupaten
			Fasilitasi literasi digital	Semua kabupaten
5.	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan	Semua kabupaten
			Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative untuk meningkatkan ketahanan bencana	Semua kabupaten
			Pengembangan kawasan hortikultura	Kabupaten Bantaeng
			Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Semua kabupaten
			Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi	Semua kabupaten
	PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai		Penyediaan SDM berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Kabupaten Bulukumba, kabupaten Kepulauan Selayar

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
	Masyarakat yang Adil dan Makmur			

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024.

Selain kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui Prioritas Nasional, pembangunan sasaran pembangunan juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan tematik provinsi, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel V. 14.
Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten pada Kawasan BulukumbaTahun 2025

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Bulukumba	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	28,7
	Penurunan Gizi Buruk	%	5,8
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	7,90
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	2.151
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	70,29
Jeneponto	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	28,7
	Penurunan Gizi Buruk	%	5,7
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	10,89
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	73,75
Sinjai	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	28,5
	Penurunan Gizi Buruk	%	4,6
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	2,78
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	77,34
Bantaeng	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	10,8
	Penurunan Gizi Buruk	%	1,8
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	11,07
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	150
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	76,12
Kepulauan Selayar	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	26,3
	Penurunan Gizi Buruk	%	6,2
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	3,58
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	Meningkat
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	Meningkat
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	74,86

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel, diolah Tahun 2024.

5.3.3. Kawasan Watampone

Pengembangan kawasan Watampone dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pemulihan pertumbuhan ekonomi, yang didasarkan pada peran dan fungsi kawasan Watampone sebagai pusat perdagangan dan jasa regional sekaligus sebagai pusat pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan lumbung pangan nasional. Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kawasan Watampone dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan produktivitas sector tanaman pangan, perkebunan, khususnya komoditas tebu, kelautan dan perikanan serta pengembangan pengembangan sector pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja sector unggulan daerah. Selain itu sebagai upaya meningkatkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan akan dilakukan penanganan permukiman kumuh di kabupaten Wajo.

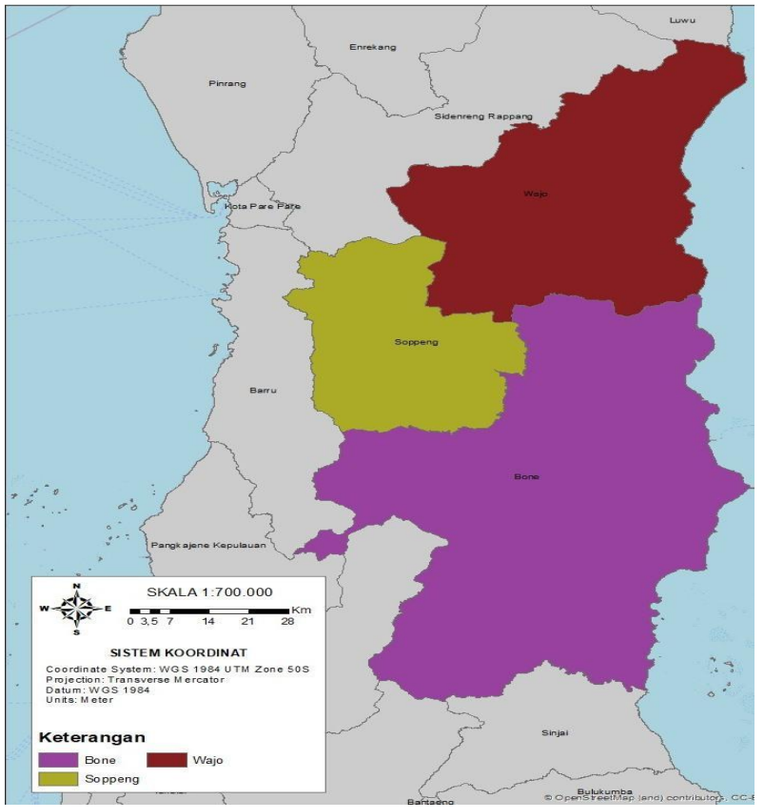
Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif di kawasan Watampone merupakan salah satu prioritas pembangunan Sulawesi Selatan dengan memperhatikan capaian IPM di kawasan Watampone

Tahun 2023 yang lebih rendah daripada rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Watampone akan dicapai melalui strategi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat mengingat capaian komponen IPM yaitu Usia harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah kabupaten di Kawasan Watampone lebih rendah daripada capaian rata-rata provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di kawasan Watampone yang merupakan pusat produksi komoditas pertanian dan perikanan, maka akan dilakukan strategi peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah guna mendukung konektivitas antara pusat produksi dengan pusat distribusi melalui peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic dan peningkatan kualitas infrastruktur pada pelabuhan pengumpan regional serta dukungan peningkatan kapasitas bandar udara yang menunjang konektivitas regional Pulau Sulawesi antara Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan peningkatan IKLH melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengarusutamakan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada Kabupaten Bone, kabupaten Soppeng dan kabupaten Wajo yang merupakan kabupaten dengan potensi rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya cuaca ekstrim dan bahaya banjir dengan kelas bahaya tinggi dan potensi bahaya tanah longsor dengan kelas bahaya sedang – tinggi.

Gambar V. 7.
Arah Pengembangan Kawasan Watampone Tahun 2025



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Pembangunan kawasan Watampone diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan lumbung pangan nasional dengan mengembangkan potensi komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, dan peningkatan konektivitas yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada Kabupaten Bone, kabupaten Soppeng dan kabupaten Wajo yang merupakan kabupaten dengan potensi rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya cuaca ekstrim dan bahaya banjir dengan kelas bahaya tinggi dan potensi bahaya tanah longsor dengan kelas bahaya sedang – tinggi.

Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif di kawasan Watampone merupakan salah satu prioritas pembangunan Sulawesi Selatan dengan memperhatikan capaian IPM di kawasan Watampone Tahun 2023 yang lebih rendah daripada rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Watampone akan dicapai melalui strategi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat mengingat capaian komponen IPM yaitu Usia harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah kabupaten di Kawasan Watampone lebih rendah daripada capaian rata-rata provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Watampone Tahun 2025 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerjadengan target sebagai berikut.

Tabel V. 15.
Sasaran Pembangunan Kabupaten Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2025

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Bone	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,40
	Tingkat Kemiskinan	%	9,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,17
	Gini Ratio	Nilai	0,359
	IPM	Nilai	68,51
Wajo	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,17
	Tingkat Kemiskinan	%	5,71
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44
	Gini Ratio	Nilai	0,358
	IPM	Nilai	72,12
Soppeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,56
	Tingkat Kemiskinan	%	6,87
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,22
	Gini Ratio	Nilai	0,369
	IPM	Nilai	71,28

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disajikan intervensi program pembangunan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan baik sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan maupun sasaran pembangunan nasional. Beberapa intervensi program pembangunan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional yang juga diharapkan dapat dikontribusikan melalui pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Watampone digambarkan sebagai berikut.

Tabel V. 16.
Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Pembangunan Watampone
Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
1.	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Seluruh kabupaten
			Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat	Seluruh kabupaten
	PN. 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan		Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Seluruh kabupaten
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Seluruh kabupaten
2.	PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemugaran permukiman kumuh	kabupaten Wajo
			Pengembangan Kawasan transmigrasi untuk mendukung pemerataan ekonomi	Kabupaten Wajo, kabupaten Soppeng
			Pengembangan sistem angkutan umum massal	Kabupaten Bone
3.	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Peningkatan cakupan layanan infrastuktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital	Semua kabupaten
			Pengembangan jejaring desa wisata	Semua kabupaten
			Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan semtra usaha kecil dan menengah	Semua kabupaten
	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan		Hilirisasi industry kakao	Kabupaten Bone

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
	Mengembangkan Industri Berbasis SumberDaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
			Pemanfaatan teknologi digital di sector logistic	Kabupaten Bone
4.	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan	semua kabupaten
			Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)	semua kabupaten
			Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya	semua kabupaten
			Pembangunan kualitas keluarga	semua kabupaten
			Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan	semua kabupaten
			Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan ana usia dini	semua kabupaten
			Fasilitasi literasi digital	semua kabupaten
5.	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Tebu	kabupaten Bone
			Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan	semua kabupaten

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
			kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan	
			Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative untuk meningkatkan ketahanan bencana	semua kabupaten
			Pengembangan kawasan hortikultura	semua kabupaten
			Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	semua kabupaten
			Pemanfaatan teknologi digital di sector pertanian	semua kabupaten
			Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi	semua kabupaten
	PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		Penyediaan SDM berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	semua kabupaten

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024.

Selain kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui Prioritas Nasional, pembangunan sasaran pembangunan juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan tematik provinsi, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel V. 17.
Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten pada Kawasan WatamponeTahun 2025

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Bone	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	28,7
	Penurunan Gizi Buruk	%	5,8
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	7,90
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Produktivitas Perkebunan	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
	IKLH	Nilai	74,86
Wajo	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	22,4
	Penurunan Gizi Buruk	%	8,0
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	4,19
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	71,53
Soppeng	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	18
	Penurunan Gizi Buruk	%	4,3
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	0,96
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	74,39

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel, diolah Tahun 2024

5.3.4. Kawasan Parepare

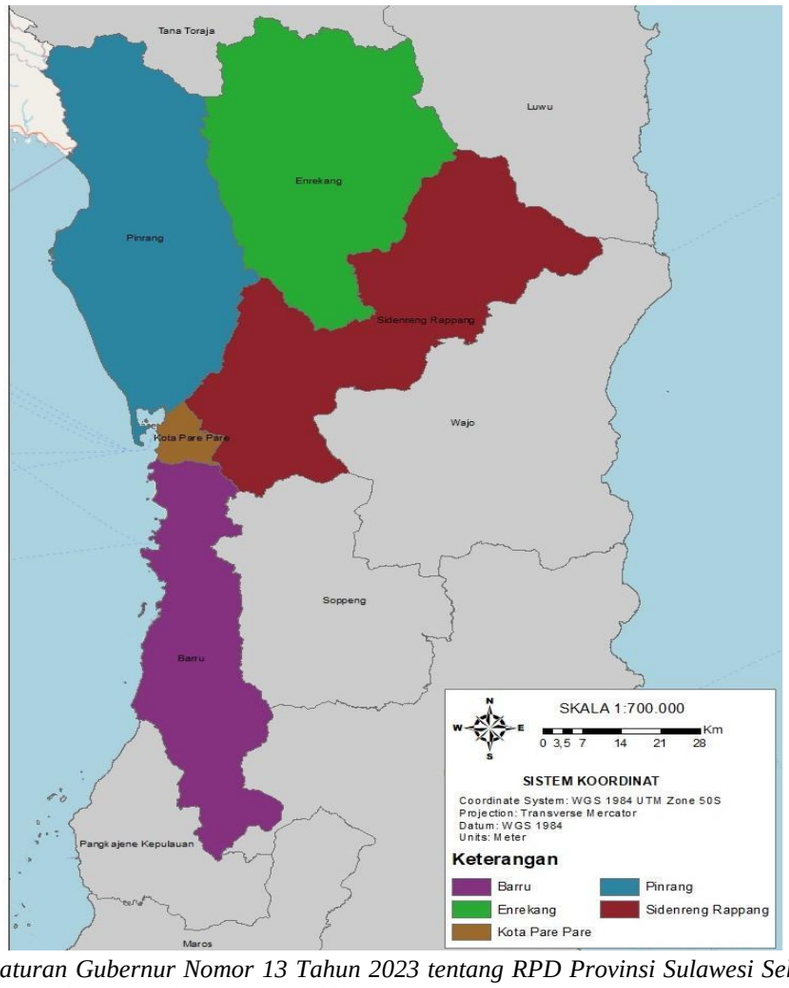
Pengembangan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dan pengembangan ekonomi maritim dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan. Sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Parepare maka akan dilakukan pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten Sidenreng Rappang dan mendukung pengembangan ekonomi hijau akan dilakukan pengembangan kawasan hortikultura di kabupaten Enrekang.

Selain upaya tersebut, perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dilakukan di Kawasan Parepare dengan meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif sebagai upaya mendukung peningkatan ekspor melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pengolahan sumber daya alam yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan, khususnya di kabupaten Pinrang dan kabupaten Enrekang yang angka kemiskinannya lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan rata rata provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif dilakukan

melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di kabupaten Barru, kabupaten Pinrang dan Sidenreng Rappang yang capaian IPM Tahun 2023 lebih rendah daripada capaian IPM rata rata Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada komponen UHH, Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah.

Dalam rangka peningkatan pembangunan infarstruktur yang berkualitas dan merata dilakukan penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat yang terintegrasi melalui pengembangan jalan lintas Pulau Sulawesi, pembangunan jalur KA Makassar Parepare dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional serta pemenuhan dan peningkatan akses air minum. Sedangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana dilakukan melalui pemeliharaan kualitas lingkungan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada kabupaten dan kota dengan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, gelombang ekstrim dan abrasi kelas bahaya tinggi khususnya kota Parepare, kabupaten Barru dan kabupaten Pinrang dan potensi bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi di seluruh Kawasan Parepare.

Gambar V. 8.
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kawasan Parepare
Tahun 2025



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Pembangunan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan

dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai lumbung pangan, optrimalisasi fungsi Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat dan peningkatan kemantapan jalan provinsi. sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada kabupaten dan kota dengan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, gelombang ekstrim dan abrasi kelas bahaya tinggi khususnya kota Parepare, kabupaten Barru dan kabupaten Pinrang dan potensi bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi di seluruh Kawasan Parepare.

Perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dilakukan di Kawasan Parepare diprioritaskan pada kualitas dan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif sebagai upaya mendukung peningkatan ekspor melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pengolahan sumber daya alam yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan, khususnya di kabupaten Pinrang dan kabupaten Enrekang yang angka kemiskinannya lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan rata rata provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di kabupaten Barru, kabupaten Pinrang dan Sidenreng Rappang yang capaian IPM Tahun 2023 lebih rendah daripada capaian IPM rata rata Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada komponen UHH, Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Parepare tahun 2025 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 18.
Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Kota Kawasan Parepare Tahun 2025

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Parepare	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,46
	Tingkat Kemiskinan	%	4,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,35
	Gini Ratio	Nilai	0,362
	IPM	Nilai	80,40
Sidenreng Rappang	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,17
	Tingkat Kemiskinan	%	4,13
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,42
	Gini Ratio	Nilai	0,338
	IPM	Nilai	72,31
Barru	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74
	Tingkat Kemiskinan	%	7,73
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,22
	Gini Ratio	Nilai	0,350
	IPM	Nilai	72,10
Pinrang	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,01

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
	Tingkat Kemiskinan	%	7,71
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,59
	Gini Ratio	Nilai	0,347
	IPM	Nilai	72,85
Enrekang	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,32
	Tingkat Kemiskinan	%	10,80
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,41
	Gini Ratio	Nilai	0,331
	IPM	Nilai	74,50

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disajikan intervensi program pembangunan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan baik sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan maupun sasaran pembangunan nasional. Beberapa intervensi program pembangunan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional yang juga diharapkan dapat dikontribusikan melalui pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Parepare digambarkan sebagai berikut.

Tabel V. 19.
Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Parepare Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
1.	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Seluruh Kab/Kota
			Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat	Seluruh Kab/Kota
	PN. 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan		Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Seluruh Kab/Kota
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Seluruh Kab/Kota
2.	PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pengembangan Kawasan transmigrasi untuk mendukung pemerataan ekonomi	kabupaten Sidenreng Rappang
				Kabupaten Barru

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
	Kemiskinan		Pengembangan sistem angkutan umum massal	
3.	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Peningkatan cakupan layanan infrastuktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital	Seluruh kabupaten/kota
			Peningkatan cakupan layanan infrastuktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital	Seluruh kabupaten/kota
			Pengembangan jejaring desa wisata	Kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang, kabupaten Barru
			Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan sentra usaha kecil dan menengah	seluruh kabupaten/kota
	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SumberDaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		Pemanfaatan teknologi digital di sector logistic	Kota Parepare
4.	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan	Kabupaten Sidenreng Rappang, kabupaten Pinrang, kabupaten Enrekang, kabupaten Barru
4.	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)	Seluruh kabupaten/kota

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
	Disabilitas			
			Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya	Seluruh kabupaten/kota
			Pembangunan kualitas keluarga	Seluruh kabupaten/kota
			Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan	Seluruh kabupaten/kota
			Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini	Seluruh kabupaten/kota
			Fasilitasi literasi digital	Seluruh kabupaten/kota
5.	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Bantuan benih ikan	Kabupaten Pinrang, kabupaten Barru
			Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan	semua kabupaten
			Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative untuk meningkatkan ketahanan bencana	semua kabupaten
	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan kawasan hortikultura	Kabupaten Enrekang,

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
5.				
			Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	semua kabupaten
			Failitasi *Business Matchmaking Startup Digital*	Kota Parepare
			Fasilitasi *Digital Technopreneur*	Kota Parepare
			Pemanfaatan teknologi digital di sector pertanian	Seluruh kabupaten
			Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi	Seluruh kabupaten
	PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		Penyediaan SDM berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Kabupaten Enrekang, kabupaten Barru

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024.

Selain kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui Prioritas Nasional, pembangunan sasaran pembangunan juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan tematik provinsi, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel V. 20.
Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten/Kota pada Kawasan Parepare Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Parepare	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	21,7
	Penurunan Gizi Buruk	%	7,7
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	1,73
	Realisasi Investasi	%	Meningkat
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	2.151
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	71,12
Sidenreng Rappang	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	21,4

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
	Penurunan Gizi Buruk	%	5,1
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	11,16
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	73,92
Barru	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	17,1
	Penurunan Gizi Buruk	%	8,2
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	9,14
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	78,55
Pinrang	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	12,6
	Penurunan Gizi Buruk	%	4,4
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	5,28
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	73,52
Enrekang	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	29,9
	Penurunan Gizi Buruk	%	1,1
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	10,16
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	Meningkat
	Produktivitas Peternakan	%	Meningkat
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	77,07

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel, diolah Tahun 2024

5.3.5. Kawasan Palopo

Pengembangan kawasan Palopo dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat peran Kawasan Palopo sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Sulawesi Selatan setelah Kawasan Makassar.

Strategi pengembangan Kawasan Palopo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dilakukan dengan strategi hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dan pengembangan maritime melalui pengembangan industry pengolahan dan industry jasa hasil perkebunan, peternakan dan perikanan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas. Selain itu pengembangan Kawasan Palopo sebagai Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan melalui strategi penguatan pusat-pusat pertumbuhan, dengan arah kebijakan pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata dan pengembangan dan penguatan kewirausahaan, khususnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka pengurangan beban pengeluaran beban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di kabupaten Toraja Utara, kabupaten Tana Toraja, kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Utara yang persentase angka kemiskinan Tahun 2023 lebih tinggi daripada persentase angka kemiskinan rata rata Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu untuk mendukung pemerataan ekonomi dan penanganan kemiskinan, maka akan dilakukan pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten Luwu Timur.

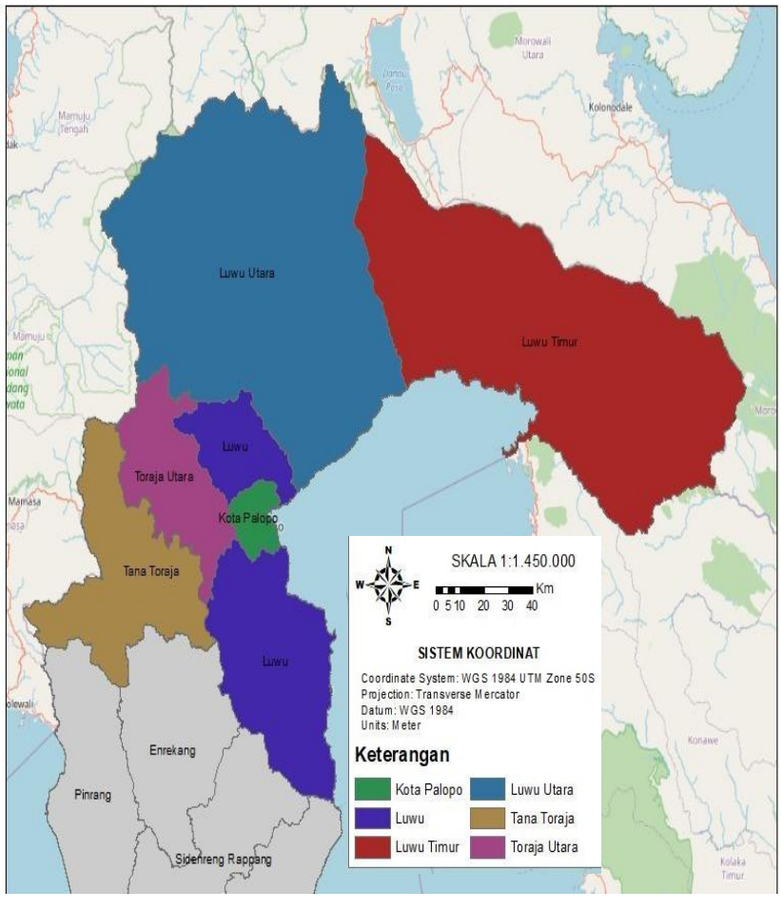
Memperhatikan besarnya kontribusi kabupaten Luwu Timur terhadap perekonomian wilayah kawasan Palopo, maka strategi lain dalam pengembangan kawasan Palopo adalah mengoptimalkan kontribusi industry pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dan regional Sulawesi Selatan melalui peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan di Kota Palopo. Sedangkan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif di Kawasan Palopo dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berupa reformasi system kesehatan nasional dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dan pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya di kabupaten Tana Toraja, kabupaten Toraja Utara, kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Luwu yang capaian IPM Tahun 2023 lebih rendah daripada capaian IPM rata rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kawasan Palopo diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jaringan sumber daya air guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, peningkatan kemantapan jalan provinsi dan peningkatan kualitas sarana pelabuhan pengumpan regional serta dukungan peningkatan kapasitas bandar udara dalam upaya meningkatkan konektivitas antara Kawasan Palopo sebagai pusat produksi dengan kawasan lainnya yang merupakan pusat distribusi serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui pengelolaan sir limbah domestic terpusat skala permukiman di kabupaten Luwu dan Luwu Utara.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan dan peningkatan kualitas seta pemerataan sarana dan prasararana kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas khususnya pada wilayah dalam kawasan yang stategis dan dapat mendorong peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana dilakukan melalui pemeliharaan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada pada kabupaten dan kota dengan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim dan potensi bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi di seluruh Kawasan Palopo dengan memprioritaskan pengendalian daya rusak air, khususnya di Sungai Radda kabupaten Luwu Utara.

Gambar V. 9.
Arah Pengembangan Kawasan Palopo Tahun 2025



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Pembangunan kawasan pembangunan Palopo dilakukan melalui pendekatan penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah dalam rangka pengurangan

beban pengeluaran beban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di kabupaten Toraja Utara, kabupaten Tana Toraja, kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Utara yang persentase angka kemiskinan Tahun 2023 lebih tinggi daripada persentase angka kemiskinan rata rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif di Kawasan Palopo dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berupa reformasi system kesehatan nasional, dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dan pembangunan dan peningkatan kualitas seta pemerataan sarana dan prasararana kesehatan pendidikan serta pelatihan vokasi, khususnya di kabupaten Tana Toraja, kabupaten Toraja Utara, kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Luwu yang capaian IPM Tahun 2023 lebih rendah daripada capaian IPM rata rata Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada pada kabupaten dan kota dengan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim dan potensi bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi di seluruh Kawasan Palopo.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Palopo tahun 2025 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 21.
Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Kota Kawasan Pembangunan Palopo Tahun 2025

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Palopo	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,06
	Tingkat Kemiskinan	%	6,78
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,53
	Gini Ratio	Nilai	0,355
	IPM	Nilai	79,53
Luwu	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,50
	Tingkat Kemiskinan	%	10,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,70
	Gini Ratio	Nilai	0,348
	IPM	Nilai	73,28
Luwu Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,35
	Tingkat Kemiskinan	%	11,53
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,69
	Gini Ratio	Nilai	0,334
	IPM	Nilai	71,97
Luwu Timur	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,28
	Tingkat Kemiskinan	%	5,73
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,15
	Gini Ratio	Nilai	0,377
	IPM	Nilai	75,30
Tana Toraja	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,00
	Tingkat Kemiskinan	%	10,64
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,24
	Gini Ratio	Nilai	0,339

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
	IPM	Nilai	71,70
Toraja Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73
	Tingkat Kemiskinan	%	9,74
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,93
	Gini Ratio	Nilai	0,340
	IPM	Nilai	72,12

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disajikan intervensi program pembangunan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan baik sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan maupun sasaran pembangunan nasional. Beberapa intervensi program pembangunan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional yang juga diharapkan dapat dikontribusikan melalui pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Palopo digambarkan sebagai berikut.

Tabel V. 22.
Program Pembangunan Prioritas pada Kawasan Palopo Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
1.	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Seluruh Kab/Kota
			Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat	Seluruh Kab/Kota
	PN. 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan		Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Seluruh Kab/Kota
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Seluruh Kab/Kota
2.	PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pengembangan Kawasan transmigrasi untuk mendukung pemerataan ekonomi	Kabupaten Luwu Timur, kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, kabupaten Toraja Utara
3.	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan	Peningkatan Produktivitas dan	Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi	Kota Palopo

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
	Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	dan gim	
			Peningkatan cakupan layanan infrastuktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital	Kota Palopo
			Pengembangan jejaring desa wisata	Kabupaten Tana Toraja, kabupaten Toraja Utara
			Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Kota Palopo
			Pengembangan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan	Kota Palopo
			Pengendalian sedimen Sungai Radda	Kabupaten Luwu Utara
			Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan semtra usaha kecil dan menengah	Seluruh kabupaten/kota
	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SumberDaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		Penguatan industry logam dasar	Kabupaten Luwu Timur
			Hilirisasi industry kakao	Kabupaten Luwu Utara
			Pemanfaatan teknologi digital di sector logistic	Kota Palopo
4.	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan	Kota Palopo, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu Timur

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
			Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)	Seluruh kabupaten/kota
			Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya	Seluruh kabupaten/kota
			Pembangunan kualitas keluarga	Seluruh kabupaten/kota
			Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan	Seluruh kabupaten/kota
			Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini	Seluruh kabupaten/kota
			Fasilitasi literasi digital	Seluruh kabupaten/kota
5.	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan	seluruh kabupaten
			Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative untuk meningkatkan ketahanan bencana	Seluruh kabupaten
			Pengembangan kawasan hortikultura	Seluruh Kabupaten
			Penyiapan dan pengembangan perhutanan social	Seluruh Kabupaten
			Failitasi *Business Matchmaking Startup Digital*	Kota Palopo
			Fasilitasi *Digital Technopreneur*	Kota Palopo
			Pemanfaatan teknologi digital di	seluruh kabupaten

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Kabupaten/Kota Prioritas
			sector pertanian	
			Sistem pengelolaan air limbah domestic terpusat skala permukiman	kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara
			Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi	Seluruh Kabupaten
	PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		Penyediaan SDM berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu, kota Palopo

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024.

Selain kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui Prioritas Nasional, pembangunan sasaran pembangunan juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan tematik provinsi, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel V. 23.
Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Palopo	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	20,5
	Penurunan Gizi Buruk	%	8,7
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	8,46
	Realisasi Investasi	%	Meningkat
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	2.151
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	74,72
Luwu	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	27,1

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
	Penurunan Gizi Buruk	%	7,0
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	5,49
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	76,54
Luwu Utara	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	10,5
	Penurunan Gizi Buruk	%	3,5
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	13,17
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	83,63
Luwu Timur	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	21,0
	Penurunan Gizi Buruk	%	5,1
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	14,32
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	2.457
	Produktivitas Perikanan	%	Meningkat
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	81,74
TanaToraja	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	31,9
	Penurunan Gizi Buruk	%	0,70
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	17,36
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	Meningkat
	Produktivitas Peternakan	%	Meningkat
	Kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	4.862
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
	IKLH	Nilai	74,30
Toraja Utara	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	23,7
	Penurunan Gizi Buruk	%	0,2
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	11,10
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	Meningkat
	Produktivitas Peternakan	%	Meningkat
	Kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	9.728
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	77,38

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel, diolah Tahun 2024

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan, dimana merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah dapat digambarkan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 9,368,446,647,729.31 yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 4,813,602,612,929.31 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 4,545,043,968,000.00 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 9,800,066,800.00 Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2025, dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 9,204,446,647,729.31 dan pengeluaran pembiayan sebesar Rp. - 164,000,000,000

Belanja daerah tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel VI.1.
Rincian Kerangka Pendanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025

NO.	URAIAN	TARGET	PROYEKSI
		TA. 2025	TA. 2026
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**9,368,446,647,729.31**	**11.962.846.937.869,70**
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**4,813,602,612,929.31**	**7,349,098,161,037.91**
4.1.1	Pajak Daerah	4,075,829,305,531.31	6,373,742,825,500.83
4.1.2	Retribusi Daerah	298,132,735,819.00	56.460.808.773,56
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	137,026,747,150.00	172.135.755.620,80
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	302,613,824,429.00	746,758,771,142.73
4,2	**Pendapatan Transfer**	**4,545,043,968,000.00**	**4.605.669.834.188,82**
4.2.1	**Dana Perimbangan**	**4.545.043.968.000,00**	**4.605.669.834.188,82**
4.2.1.1	**Dana Transfer Umum**	**2,981,548,418,000.00**	**2,970,101,426,799.42**
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	269,084,641,000.00	277.155.920.505,33
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	2,712,463,777,000.00	2.692.945.506.294,09
4.2.1.2	**Dana Transfer Khusus**	**1,563,495,550,000.00**	**1.580.996.910.389,40**
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	335,138,944,000.00	338,890,401,712.47
4.2.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1,228,356,606,000.00	1,242,106,508,676.93

NO.	URAIAN	TARGET	PROYEKSI
		TA. 2025	TA. 2026
1	2	3	4
4.2.2	**Dana Insentif Daerah**	**0**	**54.571.497.000,00**
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**9,800,066,800.00**	**8,078,942,642.99**
4.3.1	Hibah	9,800,066,800.00	8,078,942,642.99
5	**BELANJA DAERAH**	**9,204,446,647,729.31**	**11,797,846,937,869.70**
5.1.	**Belanja Operasi**	**5,859,276,360,124.66**	**5,990,310,456,651.80**
5.1.01	Belanja Pegawai	3,837,694,903,669.63	3,667,344,609,047.60
5.1.02	Belanja Barang & Jasa	1,919,732,681,455.03	2,192,947,978,804.20
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	88,698,775,000.00	105,737,868,800.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,150,000,000.00	4,280,000,000.00
5.2.	**Belanja Modal**	**1,166,065,418,891.60**	**2,749,262,386,192.92**
5.2.01	Belanja Modal	1,166,065,418,891.60	2,749,262,386,192.92
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**160,000,000,000.00**	**50,000,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	160,000,000,000.00	50,000,000,000.00
5.4.	**Belanja Transfer**	**2,019,104,868,713.05**	**3,008,274,095,025.00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes	1,701,641,321,713.05	2,740,810,548,025.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes	317,463,547,000.00	267,463,547,000.00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-164,000,000,000**	**-165.000.000.000,00**
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	134,000,000,000.00	135.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00

Sumber : RPD Provinsi Sulsel Tahun 2024-2026

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 5 (Lima) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif dengan 2 sasaran dan dijabarkan dalam 9 (Sembilan program prioritas, prioritas kedua Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata dengan 1 (satu) sasaran dijabarkan ke dalam 9 (Sembilan) Program, Prioritas pembangunan ke 3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata dengan 5 (Lima) sasaran yang dijabarkan kedalam 25 (Dua Puluh Lima) program, dan untuk prioritas pembangunan ke 4 (Empat) Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2025 adalah sebanyak 4 (Empat) prioritas pembangunan dengan 9 (sembilan) sasaran, dan 50 (Lima Puluh) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel VI.2. berikut.

Tabel VI.2.
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	75%	3.659.521.967	12.401.631.470	BPSDM
					Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	75%			
					Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100%			
					Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	7 Sertifikat			
			2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	65,3	5.518938200	4.968.669.826	BKD
					Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	86			
					Persentase ASN berkinerja baik dan sangat	94			

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					baik				
			3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	100%	3.604.445.846	5.376.672.313	Biro Organisasi
			4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD	100 %	5.981.772.438	5.996.279.540	Bappelitbangda
					% Konsistensi Program RKPD terhadap APBD	100 %			
					Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah	92%			
			5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	82%	19.751.106.000	22.268.888.087,54	Inspektorat Daerah
					% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	75%			
					% OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat	100%			
			6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi	55%	3.574.000.000	5.932.751.030,00	DISKOMIMPO
					Persentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Jaringan	45%			

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Internet Intra Pemerintah Pemerintah Sulawesi Selatan				
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	45%	5.438631.270	16.353.083.557,00	DISKOMIMPO
			8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	93%	1.120.000.000	1.770.720.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.	40 %	2.785.000.000	7.051.084.930	Bappelitbangda
					Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi	15 %			
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	77,00	596.100.311.479	691.647.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	6445	134.116.183.943,55	139.112.170.413,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	100			
			12	PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	1.950.253	3.830.000.000,00	240.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				PELAYARAN	Jumlah Unit Pelabuhan Pengumpul yang beroperasi	100		17.550.000.000,0	Dinas Perhubungan
			13	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISRIKAN	Persentase Rumah Tangga berListrik	100	2.466.052.372,00	11.119.174.431,00	Dinas ESDM
			14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	100	102.565.000.000	81.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi	100			
			15	PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Air Limbah Domistik Regional Lintas kab/Kota (SPM)	97	150.000.000,00	156.640.841,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik kewenangan provinsi	100			
			16	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	11,39 %	3.045.477.093	10.773.749.911	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
			17	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase rumah tangga yang berakses air minum	33,33%	21.363.021.857	37.591.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	layak dan aman di kawasan permukiman				Pemukiman, Dan Pertanahan
					Persentase kawasan permukiman yang terbangun drainase	31,43%			
					Persentase kawasan permukiman yang terbangun jalan lingkungan	38,33%			
			18	Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni(SPM)	100%	1.666.573.617,00	5.705.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
					Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni(SPM)	100%			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara merata	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	19	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	4,92	745.753.240,00	889.815.064,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	63.35			
			20	PROGRAM PENGEMBANGAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	0,29	5.045.501.655,00	4.400.000.000	Dinas Kepemudaan dan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	ekonomi mandiri				Olahraga
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	4,2			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			21	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	90,00%	5.803.435.124,00	4.055.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Prosentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	100,00%			
			22	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	13 %	6.871.800.000,00	4.628.750.000	Dinas Koprasi
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkualitas	23	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	11960232411	27.305.000.000	34.323.754.548	Perikanan dan Kelautan
					Jumlah produksi perikanan tangkap	451.818,7			
					Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30			
					Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	31,23			
					Persentase Pelabuhan	89,47			

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran Tahun 2026	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional				
			24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	22187160000	7.653.000.000,00	12.397.925.000	Perikanan dan Kelautan
					Jumlah Produksi perikanan budidaya	4417925,7			
					Persentase ketersediaan benur berkualitas	90			
			25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2	181.459.324.600	246.118.587.470,38	Dinas Pertanian Tpdan Perkebunan
					Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	2			
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	2			
					Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	56301484133			Dinas Pertanian Tpdan Perkebunan
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	1,18	10.646.083.382,00	12.561.000.000	Dinas Peternakan
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	2,16			
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	2,81			
					Persentase Peningkatan	2,30			

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran Tahun 2026	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Populasi Ternak Perah				
			26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	411.540.000	1.630.400.000,00	3.237.250.000	Perikanan dan Kelautan
					Produksi olahan ikan	6.273,44			
					Persentase pengujian mutu produk perikanan	100			
			27	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	8	4.446.672.433,00	17.800.000.000	Dinas Perindusterian
			28	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPORT	Nilai Ekspor Perdagangan	2.262.549.068,38	540.000.000,00	2.940.000.000	Dinas Perdagangan
			29	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	0,62	3.575.321.888,00	2.222.244.389	Dinas Pariwisata
			30	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	10	2.683.424.157,00	5.416.564.752	Dinas Koprasi
					Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	3			
		Menurunya angka kemiskinan	31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	100%	2.330.969.099,00	2.882.239.109	Dinas Sosial

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran Tahun 2026	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			32	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Luas Areal Pertanian yang terdampak pembangunan Prasarana terhadap Luas Lahan Pertanian	0,01	60.241.468.610,00	76.888.279.000,	Dinas TPHBun
					Nilai Produksi Hasil Ternak	10.664.347	586.189.700,00	9.560.000.000,	Dinas Peternakan
			33	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH	2,60	334.504.400,00 ,	4.057.920.000,	Dinas Kehutanan
			34	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	100%	1.457.984.600,00	1.574.857.231	Dinas Sosial
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%			
			35	PROGRAM	Persentase Pelayanan dan	100%	3.051.582.500,00	4.572.302.666	Dinas Sosial

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				REHABILITASI SOSIAL(SPM)	pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti				
					Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			Dinas Sosial
					Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			Dinas Sosial
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			Dinas Sosial
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			Dinas Sosial
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif	36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	91	1.025.442.490.735,00	1.024.655.690.735,00	Dinas Pendidikan
					Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	96,86			Dinas Pendidikan
					Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun	100			Dinas Pendidikan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)				
					Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	100			Dinas Pendidikan
					Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	100			Dinas Pendidikan
			37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	% Pemenuhan SDMK Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	86%	1.722.485.000,00	700.000.000	Dinas Kesehatan
			38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Rumah Sakit yang Terakreditasi	90%	120.548.707.961,00	201.744.521.099	Dinas Kesehatan
					Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%			Dinas Kesehatan
					Persentase penduduk/warga	100%			Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran Tahun 2026	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)				
					% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	96%			Dinas Kesehatan
					% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	90,5%			Dinas Kesehatan
					Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)	76%			Dinas Kesehatan
					Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	98%			Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	9,5/100.000 Penduduk			Dinas Kesehatan
					% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular	90%			Dinas Kesehatan
			39	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING	Peningkatan Prestasi olah raga	2	104.091.930.788,00	444.412.533.565	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Persentasi ketersediaan	75			

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				KEOLAHRAGAAN	sarana dan prasarana olahraga				
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	40	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi	70%	665.000.000,00	1.250.000.000,00	Pemberdayaan Perempuan dan anak
					Persentase ARG di Tingkat Provinsi	43%			
					Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	36%			
			41	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	91,66%	472.705.000,00	810.000.000,00	
			42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	58,33%	495.092.400,00	750.000.000,00	
4	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Secara Berkelanjutan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	43	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	28,23	6.927.847.280,00	8.111.824.000	Dinas Kehutanan
					Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	11,970			
					Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	0,028			Dinas Kehutanan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran Tahun 2026	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	3,63			
			44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (DISNAK)	Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	100	209.083.600,00	2.364.670.000	Dinas Peternakan
			45	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Energi (Ton CO2 eq)	1,4	1.527.104.753,00	3.131.989.920,00	Dinas ESDM
			46	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	35,27	8.724.000.000,00	2.100.000.000,00	Dinas Perhubungan
					Prosentase Layanan Angkutan Darat;	97		2.350.000.000,00	Dinas Perhubungan
					Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B Pertahun	6.885.482.864		4.400.000.000,00	Dinas Perhubungan
					Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	65,45		6.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
					Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	0,33		2.100.000.000,00	Dinas Perhubungan
			47	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN,	Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara	822.559,65	9.735.000.000,00	12.553.400.000,0	Perikanan dan Kelautan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2025		Perkiraan Anggaran Tahun 2026	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	berkelanjutan				
					Jumlah produksi garam rakyat	6,00			
					Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	22,00			
			48	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi emisi GRK dari sektor limbah	16436	703.619.800,00	3.650.000.000,00	DPLH
			49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	57	127.000.000,00	1.000.000.000,00	DPLH
			50	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100	6.012.360.000,00	9.892.989.745	BPBD
					Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	100			BPBD
					Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	100			BPBD

Sumber : RPD Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2024-2026

6.3. Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Perumusan Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 untuk RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi dikabupaten/kota.

Perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal,serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian Tujuan dan Sasaran pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 yang disertai dengan indikator dan terget kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel VI.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL									9.368.446.647.729,31							11.053.249.138.283,54	
						DINAS PENDIDIKAN			3.242.339.119.627,00							3.342.220.059.238,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.234.059.818.725,00							3.334.845.059.238,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3.234.059.818.725,00							3.334.845.059.238,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	2.225.996.089.297,00						100	2.167.115.059.237,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	100							100		
	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	4.298.260.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	4.000.000.000,00	
	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	557.397.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	28.199.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	28.199.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.198.322.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	129.749.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.937.133.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	240.663.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu											
							Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	168.595.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	2.213.026.635.509,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	2.146.340.059.237,00	
	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17500 Orang/ Bulan	2.212.818.475.309,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.145.640.059.237,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	208.160.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	173.604.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	-	1.000.000.000,00	
	1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.099.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	144.705.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN	100 %	24.319.850,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	-	1.400.000.000,00	
	1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	557 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	9.199.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.559.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	7.559.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun											
							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN											
							Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	3.016.590.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	-	6.150.000.000,00	
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.794.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	439.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	27.321.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2024 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	192.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	91.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		2.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.655.537.008,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	-	3.550.000.000,00	
	1	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	1.922.017.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		1.950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar											
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor											
							Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	195.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	10 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	538.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.532.994.030,00			-	-	ASN	-	2.550.000.000,00	
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							-	-	0	-	-	-	-	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.532.994.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	1.268.147.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	2.125.000.000,00	
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	302.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar											
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor											
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	965.477.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	91,00	1.003.388.729.428,00						92,75	1.161.480.000.001,00	
							Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	96,86							98,34		
							Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	100							100		
							Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	100							100		
							Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	100							100		
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase jumlah warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (SPM) Persentase siswa/i SMA/ SMK yang bebas buta aksara Al-Quran Persentase siswa/i SMA / SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok) Persentase Tamatan SMA yang lulus Perguruan Tinggi yang Berakreditasi A	100 % 100 % 91 % 96,86 % 100 %	571.421.330.979,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa	100% 98,34% 92,75% 100%	639.625.000.000,00	
	1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)											
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	10.905.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	4.362.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.878.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1.245.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula											
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.001.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah											
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit	14.540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		10.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir											
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	4 Unit	1.252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Siswa		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	1.01	0016	Pembangunan Kantin Sekolah											
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.001.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	16.357.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		16.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.831.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1.220.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1.220.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	1.424.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	34.729.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		30.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah											
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	198.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	5.132.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	6.540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	419.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	18.864.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		100.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta didik	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		5.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		15.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50 Orang	25.723.157.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		25.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas											
							Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	586 Satuan Pendidikan	3.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		3.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas											
							Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	586 Satuan Pendidikan	361.373.210.051,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		365.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas											
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	20 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	198.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK											
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	287.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10 Buku	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.878.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Unit	18.429.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		9.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah											
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	406.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	30 Ruang	18.175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		18.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium											
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	610.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	11.995.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		11.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah											
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	406.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0076	Penataan Ruang/Sudut Baca											
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	2 Ruang	203.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir											
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	406.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Tamatan SMK yang bekerja 1 tahun Setelah tamat	50.80 %	375.492.035.487,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa	-	474.400.000.001,00	
	1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)											
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	11.632.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		10.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	2.817.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa											
							Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Ruang	11.632.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		9.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Ruang	10.905.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		100.500.000.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.191.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	2.817.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula											
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang	1.252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	5.816.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		4.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir											
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit	406.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0012	Pembangunan Kantin Sekolah											
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	313.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	375.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	1.220.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1.627.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	25 Paket	10.991.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		9.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah											
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	193.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	342.186.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	327.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	419.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	75.456.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		85.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Peserta didik	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30 Peserta Didik	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		8.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	15 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	15 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan											
							Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	443 Satuan Pendidikan	4.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		4.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan											
							Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	443 Satuan Pendidikan	204.007.848.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		214.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan											
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0048	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	174.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK											
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik											
							Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	20 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10 Buku	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Unit	7.111.877.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		7.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik											
							Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	813.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	2.873.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.220.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah											
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	813.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0068	Penataan Ruang/Sudut Baca											
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	4.016.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		3.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir											
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	406.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah											
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1.220.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik											
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1.220.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.424.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan											
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase warga negara usia 4 – 18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada pendidikan Khusus	86 %	56.475.362.962,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa	-	47.455.000.000,00	
	1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	5.816.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	626.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula											
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	939.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah											
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	876.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	751.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	594.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah											
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	532.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0012	Pembangunan Ruang Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	438.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas											
							Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang	375.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)											
							Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang	344.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)											
							Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)											
							Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang	406.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)											
							Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang	313.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	203.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	203.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas											
							Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	199.381.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)											
							Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	203.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)											
							Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	203.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)											
							Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	203.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	1.014.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah											
							Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	10 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	342.186.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	143.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	4 Unit	419.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	4.150.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		3.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus											
							Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Peserta Didik	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	10 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus											
							Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus											
							Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	86 Satuan Pendidikan	24.736.030.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		26.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus											
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	86 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK											
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0064	Penataan Ruang/Sudut Baca											
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik											
							Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	406.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	913.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.749.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1 Ruang	769.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik											
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah											
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	459.797.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	443.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir											
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	402.831.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah											
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	366.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	325.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula											
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	325.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang	325.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	321.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus											
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10 Buku	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	75,76	2.100.000.000,00						76,91	2.750.000.000,00	
							Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	86							87		
	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Perangkat Kurikulum Muatan lokal pada satuan pendidikan menengah yang dievaluasi dan dikembangkan	95.5 %	1.425.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa	-	1.250.000.000,00	
	1	01	03	1.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah											
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah											
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	1 Buku	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah											
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	10 Orang	1.225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah											
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Perangkat Kurikulum Muatan lokal pada satuan pendidikan khusus yang dievaluasi dan dikembangkan	95.30 %	675.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa	-	1.500.000.000,00	
	1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus											
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus											
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	1 Buku	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus											
							Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus											
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus											
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	1 : 13	2.400.000.000,00						1 : 13	500.000.000,00	
							Persentase Guru SMA yang bersertifikat	54,09							54,79		
							Persentase Guru SMK yang bersertifikat	47,97							48,53		
	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan khusus yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	74 %	2.400.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik	-	500.000.000,00	
	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	100 %	175.000.000,00						100 %	1.250.000.000,00	
	1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Menengah Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	93 %	175.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan	-	500.000.000,00	
	1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	1.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Khusus Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	85.17 %	0			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan	-	750.000.000,00	
	1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	1.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	1.02	0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
6	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	47,60 %	0						48,75	1.750.000.000,00	
	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Bahasa dan Sastra Daerah Provinsi yang didata	44 %	0			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik	-	1.750.000.000,00	
	1	01	06	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1 Kamus	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	06	1.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	3 Bahasa	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	06	1.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	1 Publikasi	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	1 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	06	1.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	1 Buku	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	10 Peserta Didik	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X					NON URUSAN			8.279.300.902,00							7.375.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.279.300.902,00							7.375.000.000,00	
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	8.279.300.902,00						100	7.375.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	100							100		
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	36.399.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	-	350.000.000,00	
	X	XX	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18.199.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.199.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	240.939.850,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	-	400.000.000,00	
	X	XX	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	25.989.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	214.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN	100 %	0			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	150.000.000,00	
	X	XX	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	10 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	221.794.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	500.000.000,00	
	X	XX	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	93.204.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	128.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.631.266.552,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	5.750.000.000,00	
	X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.631.266.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		5.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	148.900.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	225.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	51.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	97.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
						DINAS KESEHATAN			**503.379.283.720,00**							**503.361.784.620,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			503.379.283.720,00							503.361.784.620,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			503.379.283.720,00							503.361.784.620,00	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Rata-rata Nilai SKP ASN % Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	98,2 (Nilai) 92 (Nilai) 90 %	280.213.401.248,00							279.945.901.248,00	
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	570.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Dokumen	470.000.000,00	
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	300.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	150.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Laporan	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	270.033.591.864,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tersusunya Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	12 Laporan	270.033.591.864,00	
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	704 Orang/ Bulan	269.921.591.864,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tersusunya Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	610 Orang/ Bulan	269.921.591.864,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	8.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tersusunya Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	25 Dokumen	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tersusunya Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	1 Laporan	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tersusunya Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tersusunya Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	3 Laporan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tersusunya Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah	3.784 Unit	120.750.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	95% 50Unit 3.884Unit	120.750.000,00	
	1	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.250.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.250.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.250.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan	1.927.059.384,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya pelayanan Administrasi kepegawaian tepat waktu	100% 4Laporan 5Laporan 95%	1.726.559.384,00	
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	259 Paket	200.500.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya pelayanan Administrasi kepegawaian tepat waktu	620 Paket	0	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	1.716.559.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya pelayanan Administrasi kepegawaian tepat waktu	4 Dokumen	1.716.559.384,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya pelayanan Administrasi kepegawaian tepat waktu	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu yang Difasilitasi	520 Orang	767.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	1Unit 95% 540Orang 100% 40Orang	767.000.000,00	
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	90.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	100.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	12.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	40 Laporan	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	54 Unit	420.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 95% 54Unit 35Unit	423.000.000,00	
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	370.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Paket	373.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Laporan	770.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Laporan	800.000.000,00	
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	720.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	64 Unit	5.605.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	64 Unit	5.605.000.000,00	
	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	315.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	80.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Unit	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	60.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Unit	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Rumah Sakit yang Terakreditasi	90%	220.445.882.472,00						95%	220.695.883.372,00	
							Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%							100%		
							Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%							100%		
							% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	96%							97%		
							% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	90,5%							91%		
							Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)	76%							77%		
							Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	98%							99%		
							Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	9,5/100.000 Penduduk							9/100.000 Penduduk		
							% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular	90%							95%		
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	% Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga Persentase Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan Rasio jumlah TT (Tempat Tidur) terhadap jumlah penduduk % Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	42,46 % 100 % 1,8 Rasio 100 %	100.347.874.437,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara tepat waktu	42,46 % 100 % 1,8 Rasio 100 %	100.397.874.437,00	
	1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya											
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	88.096.853.437,00	Kab. Bone, Ponre, Mappe Sangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara tepat waktu	0 Unit	88.096.853.437,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)											
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	550.000.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara tepat waktu	1 Layanan	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	300.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara tepat waktu	50 Unit	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	563.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara tepat waktu	4 Unit	563.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara tepat waktu	1 Dokumen	780.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	10.058.021.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara tepat waktu	60 Paket	10.058.021.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	% Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan	100 %	119.195.008.035,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100 %	119.395.008.935,00	
	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana											
							Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	100.116 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	104.667 Orang	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.208 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4.399 Orang	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	2.872.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	2.872.641.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	988.179.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	988.179.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	12.214.259.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	12.314.259.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	349.999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	2.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	3.049.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	3.049.455.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	130 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	130 Orang	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	91.800.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	91.900.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	690.304.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	690.304.935,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2 Unit	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga											
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1.826.423 Keluarga	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	104.667 Keluarga	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	% Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	100 %	203.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100 %	203.000.000,00	
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	203.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	203.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	% Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) > 10 Kali % RS Kelas B yang dibimtek terkait Izin Berusaha Berbasis Resiko % RS melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)	70 % 100 % 75 %	700.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	70 % 100 % 75 %	700.000.000,00	
	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	123 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5 Unit	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit											
							Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	70 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	70 Unit	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	123 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% Pemenuhan SDMK Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	86 %	700.000.000,00						86 %	700.000.000,00	
	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	% Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan % Puskesmas dengan Dokter % RSUD Kabupaten/Kota dengan Dokter Spesialis 4 Dasar dan 3 Penunjang	84 % 99 % 76 %	200.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	84 % 99 % 76 %	200.000.000,00	
	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30.261 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	30 Orang	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga SDMK yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pelatihan Terakreditasi	780 Orang	500.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	780 Orang	500.000.000,00	
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	620 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	250 Orang	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	10 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar	100 %	250.000.000,00						100 %	250.000.000,00	
	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	% Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang diterbitkan	85 %	250.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	87%	250.000.000,00	
	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	189 Sarana	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	189 Sarana	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	55 %	1.770.000.000,00						60%	1.770.000.000,00	
	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	% Capaian Pelaksanaan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 %	150.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	150.000.000,00	
	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	% Capaian Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.287.160.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	1.287.160.000,00	
	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
							Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	627.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	627.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	% Capaian Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	332.840.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	332.840.000,00	
	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	332.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	332.840.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPT TRANSFUSI DARAH			7.431.504.104,00							10.963.989.290,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.051.531.804,00							10.183.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			7.051.531.804,00							10.183.000.000,00	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	0						100	280.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang difasilitasi Jumlah Tamu yang Difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Persentase Capaian Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Orang 520 Orang 1 Unit 90 % 100 %	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Unit 95% 540Orang 100% 40Orang	130.000.000,00	
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	130.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Unit 54 Unit 90 % 100 %	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 95% 54Unit 35Unit	10.000.000,00	
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Unit	10.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit 64 Unit 90 % 100 %	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	95% 100% 4Unit 64Unit	140.000.000,00	
	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	140.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Darah Pada Fasilitas Kesehatan	81	7.051.531.804,00						82	9.903.000.000,00	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			3.001.531.804,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		5.303.000.000,00	
	1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit	300.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	50 Unit	80.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	3.001.531.804,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60 Paket	4.923.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pasien Yang Dilayani % Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan Persentase Layanan Kesehatan yang Tersedia Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.800 Orang 100 % 90 % 100 % 100 %	0			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	95% 100% 100% 100% 100% 10.000Orang	100.000.000,00	
	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	100.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	% Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) > 10 Kali Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Operasional Sesuai Standar Izin Fasilitas Kesehatan % RS Kelas B yang dibimtek terkait Izin Berusaha Berbasis Resiko % RS Kelas B yang dibimtek terkait Izin Berusaha Berbasis Resiko % RS melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)	70 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 75 %	4.050.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100% 100% 100% 100% 80% 100% 95%	4.500.000.000,00	
	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	4.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit	4.500.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	X					NON URUSAN			379.972.300,00							780.989.290,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			379.972.300,00							780.989.290,00	
15	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	379.972.300,00						100	780.989.290,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang difasilitasi Jumlah Tamu yang Difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Persentase Capaian Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Orang 520 Orang 1 Unit 90 % 100 %	80.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Unit 95% 540Orang 100% 40Orang	191.000.000,00	
	X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	8.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	X	XX	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	23.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	X	XX	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	10.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	40 Laporan	150.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (UPT. RSKD DADI) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Realisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan 12 Laporan 90 % 100 %	299.972.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan 95% 12Laporan 100% 12Laporan 12Laporan	589.989.290,00	
	X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.972.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	199.989.290,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	390.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
						UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH			10.463.051.609,00							10.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.463.051.609,00							10.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			10.463.051.609,00							10.000.000,00	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	3.339.247.644,00						100	10.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	87.030.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Dokumen 13Dokumen 95%	0	
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	60.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8Laporan 12Laporan 12Laporan 36Laporan 95%	10.000.000,00	
	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	10.000.000,00	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Laporan	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Capaian Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan 5 Laporan 90 % 100 %	119.848.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 4Laporan 5Laporan 95%	0	
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	211 Paket	119.848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	620 Paket	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang difasilitasi Jumlah Tamu yang Difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Persentase Capaian Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Orang 520 Orang 1 Unit 90 % 100 %	630.000.000,00			-	-	-	1Unit 95% 540Orang 100% 40Orang	0	
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Unit 54 Unit 90 % 100 %	215.826.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 95% 54Unit 35Unit	0	
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	215.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Unit	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (UPT. RSKD DADI) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Realisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan 12 Laporan 90 % 100 %	1.868.170.644,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan 95% 12Laporan 100% 12Laporan 12Laporan	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	527.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.340.215.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit 64 Unit 90 % 100 %	358.373.000,00			-	-	-	95% 100% 4Unit 64Unit	0	
	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	259.011.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	49.362.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Unit	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	85	6.955.569.775,00						86	0	
							Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan , Sarana, Prasarana dan Alat Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			4.897.269.775,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	
	1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	2 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Unit	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	50 Unit	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	4 Unit	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	3.547.269.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	60 Paket	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pasien Yang Dilayani % Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan Persentase Layanan Kesehatan yang Tersedia Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.800 Orang 100 % 90 % 100 % 100 %	2.050.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	95% 100% 100% 100% 100% 10.000Orang	0	
	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	% Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) > 10 Kali Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Operasional Sesuai Standar Izin Fasilitas Kesehatan % RS Kelas B yang dibimtek terkait Izin Berusaha Berbasis Resiko % RS Kelas B yang dibimtek terkait Izin Berusaha Berbasis Resiko % RS melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)	70 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 75 %	8.300.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 100% 100% 100% 80% 100% 95%	0	
	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	3 Unit	8.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknisi Sumber Daya Manusia Kesehatan	90	168.234.190,00						90	0	
	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Persentase SDM Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan % Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan % Puskesmas dengan Dokter % RSUD Kabupaten/Kota dengan Dokter Spesialis 4 Dasar dan 3 Penunjang	100 % 90 % 84 % 99 % 76 %	5.412.190,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	77% 100% 100% 85% 95%	0	
	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	5.412.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Orang	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			162.822.000,00			-	-	-		0	
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	20 Orang	162.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250 Orang	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Dokumen	0	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
						UPT RSK GIGI DAN MULUT			8.936.097.280,00							15.000.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.936.097.280,00							15.000.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			8.936.097.280,00							15.000.000.000,00	
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	8.936.097.280,00						100	15.000.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			8.936.097.280,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000.000,00	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	8.936.097.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit Kerja	15.000.000.000,00	UPT RSK GIGI DAN MULUT
						RSUD LABUANG BAJI			**96.592.013.411,00**							**101.244.907.424,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			96.592.013.411,00							100.481.907.424,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			96.592.013.411,00							100.481.907.424,00	
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	74.606.077.611,00						100	83.378.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Dokumen 13Dokumen 95%	370.500.000,00	
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	185.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	75.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	85.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	7.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	7.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	7.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	4.500.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8Laporan 12Laporan 12Laporan 36Laporan 95%	61.500.000,00	
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	20.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	5.500.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Laporan	30.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	6.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola oleh perangkat daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Persentase Capaian Realisasi Administrasi Barang Milik	45 Unit 3.784 Unit 90 %	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	95% 50Unit 3.884Unit	40.000.000,00	
	1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	40.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 4Laporan 5Laporan 95%	856.000.000,00	
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	620 Paket	650.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	6.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Orang	200.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang difasilitasi Jumlah Tamu yang Difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Persentase Capaian Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Orang 520 Orang 1 Unit 90 % 100 %	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Unit 95% 540Orang 100% 40Orang	400.000.000,00	
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	40 Laporan	400.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Unit 54 Unit 90 % 100 %	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 95% 54Unit 35Unit	1.750.000.000,00	
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Unit	1.000.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Unit	750.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (UPT. RSKD DADI) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Realisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan 12 Laporan 90 % 100 %	3.570.077.611,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan 95% 12Laporan 100% 12Laporan 12Laporan	5.400.000.000,00	
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.570.077.611,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	5.400.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Orang yang Dilayani BLUD Jumlah orang yang dilayani melalui BLUD Jumlah Orang yang dilayani melalui BLUD Jumlah Pasien Yang Dilayani Persentase peningkatan pendapatan BLUD	8634 Orang 57000 Orang 20366 Orang 9.800 Orang 0,09 %	71.036.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	60000Orang 10.000Orang 0,09% 8984Orang 20772Orang	74.500.000.000,00	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	71.036.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit Kerja	74.500.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	100	21.985.935.800,00						100	17.103.907.424,00	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	21.985.935.800,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		17.103.907.424,00	
	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit	750.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	21.499.766.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	50 Unit	14.303.907.424,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi											
							Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	5 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5 Unit	300.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	486.169.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60 Paket	1.750.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	X					NON URUSAN			0							763.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			0							763.000.000,00	
22	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	0						100	763.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8Laporan 12Laporan 12Laporan 36Laporan 95%	13.000.000,00	
	X	XX	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	6.500.000,00	RSUD LABUANG BAJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	6.500.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit 64 Unit 90 % 100 %	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	95% 100% 4Unit 64Unit	750.000.000,00	
	X	XX	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Unit	750.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
						RSUD HAJI MAKASSAR			**52.372.063.035,00**							**49.238.456.072,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			52.372.063.035,00							49.238.456.072,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			52.372.063.035,00							49.238.456.072,00	
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	48.248.766.399,00						100	48.922.452.152,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Unit 54 Unit 90 % 100 %	326.314.247,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 95% 54Unit 35Unit	0	
	1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	326.314.247,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	RSUD HAJI MAKASSAR
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Orang yang Dilayani BLUD Jumlah orang yang dilayani melalui BLUD Jumlah Orang yang dilayani melalui BLUD Jumlah Pasien Yang Dilayani Persentase peningkatan pendapatan BLUD	8634 Orang 57000 Orang 20366 Orang 9.800 Orang 0,09 %	47.922.452.152,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60000Orang 10.000Orang 0,09% 8984Orang 20772Orang	48.922.452.152,00	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	47.922.452.152,00	Kota Makassar, Tamalate, Jongaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit Kerja	48.922.452.152,00	RSUD HAJI MAKASSAR
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	62	316.003.920,00						63	316.003.920,00	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			316.003.920,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		316.003.920,00	
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	0	Kota Makassar, Tamalate, Jongaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	50 Unit	0	RSUD HAJI MAKASSAR
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	116 Paket	316.003.920,00	-	-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60 Paket	316.003.920,00	RSUD HAJI MAKASSAR
25	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	75	3.807.292.716,00						80	0	
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			3.807.292.716,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	179 Orang	3.807.292.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	250 Orang	0	RSUD HAJI MAKASSAR
						RS KHUSUS DAERAH DADI			**47.133.138.749,00**							**57.904.621.149,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.133.138.749,00							57.904.621.149,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			47.133.138.749,00							57.904.621.149,00	
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rata-rata Nilai SKP ASN % Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program	11 % 95 (Nilai) 100 % 95 (Nilai)	46.831.315.319,00						11 % 95 (Nilai) 100 % 95 (Nilai)	57.686.357.295,00	
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (UPT. RSKD DADI)	12 Laporan	1.831.315.319,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan 95% 12Laporan 100% 12Laporan 12Laporan	2.686.357.295,00	
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.831.315.319,00	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	2.686.357.295,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Orang yang dilayani melalui BLUD	20366 Orang	45.000.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60000Orang 10.000Orang 0,09% 8984Orang 20772Orang	55.000.000.000,00	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	45.000.000.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit Kerja	55.000.000.000,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam Kondisi Baik (UPT.RSKD DADI)	100 %	301.823.430,00						100 %	218.263.854,00	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSKD DADI	100 %	301.823.430,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100% 100% 4Unit 95% 85% 100% 1,9% 26Unit1 42,46% 100% 23,52% 100% 51Unit	218.263.854,00	
	1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit	0	RS KHUSUS DAERAH DADI
	1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit	100.000.000,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	129.873.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	50 Unit	68.263.854,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	171.950.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60 Paket	50.000.000,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
						RSK IBU DAN ANAK PERTIWI			**13.772.000.078,00**							**0**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.522.000.078,00							0	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.522.000.078,00							0	
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	0						100	0	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0			-	-	-	8Laporan 12Laporan 12Laporan 36Laporan 95%	0	
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/ Bulan	0	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	610 Orang/ Bulan	0	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	100	1.522.000.078,00						100	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			415.267.350,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	
	1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	0	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	3 Unit	0	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	415.267.350,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	50 Unit	0	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit											
							Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	40 Unit	0	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	15 Unit	0	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pasien Yang Dilayani % Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan Persentase Layanan Kesehatan yang Tersedia Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.800 Orang 100 % 90 % 100 % 100 %	1.106.732.728,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	95% 100% 100% 100% 100% 10.000Orang	0	
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8.500 Dokumen	1.106.732.728,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	10.000 Dokumen	0	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
30	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Yang Mengikuti Pelatihan	100	0						100	0	
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			0			-	-	-		0	
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang	0	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250 Orang	0	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
	X					NON URUSAN			12.250.000.000,00							0	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			12.250.000.000,00							0	
31	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	12.250.000.000,00						100	0	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Orang yang Dilayani BLUD Jumlah orang yang dilayani melalui BLUD Jumlah Orang yang dilayani melalui BLUD Jumlah Pasien Yang Dilayani Persentase peningkatan pendapatan BLUD	8634 Orang 57000 Orang 20366 Orang 9.800 Orang 0,09 %	12.250.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60000Orang 10.000Orang 0,09% 8984Orang 20772Orang	0	
	X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	12.250.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN DARI BLUD	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Unit Kerja	0	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
						RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH			**14.862.703.400,00**							**17.550.000.000,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.253.703.809,00							16.850.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			14.253.703.809,00							16.850.000.000,00	
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN % Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	92,5 (Nilai) 100 % 98,5 (Nilai) 1.85 %	13.500.000.000,00						92,5 (Nilai) 100 % 98,5 (Nilai) 1.85 %	13.750.000.000,00	
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Orang yang Dilayani BLUD	8634 Orang	13.500.000.000,00			-	-	Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	8634 Orang	13.750.000.000,00	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	13.500.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	1 Unit Kerja	13.750.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalm Kondisi Baik (UPT. RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah)	76.5 %	753.703.809,00						77%	3.100.000.000,00	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Diadakan	4 Unit	753.703.809,00			-	-	Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	4 Unit	3.100.000.000,00	
	1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	200.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	3 Unit	1.000.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	486.169.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	50 Unit	2.000.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit											
							Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	17.534.009,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	15 Unit	50.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	27 Paket	50.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	60 Paket	50.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
	X					NON URUSAN			608.999.591,00							700.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			608.999.591,00							700.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN	98,5 (Nilai) 1.85 % 100 % 92,5 (Nilai)	608.999.591,00						98,5 (Nilai) 1.85 % 100 % 92,5 (Nilai)	700.000.000,00	
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	608.999.591,00			-	-	-	12Laporan 95% 12Laporan 100% 12Laporan 12Laporan	700.000.000,00	
	X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	608.999.591,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	700.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
						RSUD SAYANG RAKYAT			**19.098.236.527,00**							**22.334.765.000,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			913.989.948,00							0	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			913.989.948,00							0	
35	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	427.820.148,00						100	0	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	427.820.148,00			-	-	-	100 %	0	
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	427.820.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0	RSUD SAYANG RAKYAT
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik (UPT RSUD Sayang Rakyat)	75 %	486.169.800,00						85%	0	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSUD Sayang Rakyat	75 %	486.169.800,00			-	-	-	75 %	0	
	1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	0	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	486.169.800,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-	50 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT
	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit											
							Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	7 Unit	0	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT
	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	0	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT
	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit											
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100 Paket	0	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	60 Paket	0	RSUD SAYANG RAKYAT
37	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase tenaga kesehatan RSUD yang telah ditingkatkan kapasitasnya	12 %	0						20%	0	
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis (UPT RSUD Sayang Rakyat)	12 Orang	0			-	-	-	12 Orang	0	
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	0	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250 Orang	0	RSUD SAYANG RAKYAT
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	0	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Dokumen	0	RSUD SAYANG RAKYAT
	X					NON URUSAN			18.184.246.579,00							22.334.765.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			18.184.246.579,00							22.334.765.000,00	
38	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	18.184.246.579,00						100	22.334.765.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.627.896.579,00			-	-	-	12Laporan 95% 12Laporan 100% 12Laporan 12Laporan	3.500.000.000,00	
	X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.627.896.579,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	3.500.000.000,00	RSUD SAYANG RAKYAT
	X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Orang yang Dilayani BLUD	8634 Orang	15.556.350.000,00			-	-	-	60000Orang 10.000Orang 0,09% 8984Orang 20772Orang	18.834.765.000,00	
	X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	15.556.350.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	1 Unit Kerja	18.834.765.000,00	RSUD SAYANG RAKYAT
						RSUD LA MAPPAPENNING			**17.353.675.145,00**							**34.466.642.660,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.353.675.145,00							34.466.642.660,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			17.353.675.145,00							34.466.642.660,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	15.118.023.536,00						100	31.500.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
							Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12,13							15,16		
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang difasilitasi Jumlah Tamu yang Difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Persentase Capaian Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Orang 520 Orang 1 Unit 90 % 100 %	1.406.144.744,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Unit 95% 540Orang 100% 40Orang	1.200.000.000,00	
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.406.144.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	1.200.000.000,00	RSUD LA MAPPAPENNING
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.211.878.792,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.300.000.000,00	
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	945.744.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.100.000.000,00	RSUD LA MAPPAPENNING
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.266.134.792,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	14.200.000.000,00	RSUD LA MAPPAPENNING
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Orang yang Dilayani BLUD Jumlah orang yang dilayani melalui BLUD Jumlah Orang yang dilayani melalui BLUD Jumlah Pasien Yang Dilayani Persentase peningkatan pendapatan BLUD	8634 Orang 57000 Orang 20366 Orang 9.800 Orang 0,09 %	2.500.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	60000Orang 10.000Orang 0,09% 8984Orang 20772Orang	15.000.000.000,00	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.500.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit Kerja	15.000.000.000,00	RSUD LA MAPPAPENNING
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.235.651.609,00							2.966.642.660,00	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			2.235.651.609,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		2.966.642.660,00	
	1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0 Unit	264.242.000,00	RSUD LA MAPPAPENNING
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	50 Unit	92.400.660,00	RSUD LA MAPPAPENNING
	1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi											
							Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	30 Unit	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5 Unit	110.000.000,00	RSUD LA MAPPAPENNING
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	2.235.651.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60 Paket	2.500.000.000,00	RSUD LA MAPPAPENNING
						DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI			**185.307.180.313,00**							**456.850.958.773,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			185.307.180.313,00							456.850.958.773,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			185.307.180.313,00							456.850.958.773,00	
41	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	41.619.183.847,00						100	45.575.858.731,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	14 dokumen	628.675.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	14Dokumen	1.345.587.392,00	
	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	234.111.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		385.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		82.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.209.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	22.460.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	74.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		82.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	235.529.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		575.587.392,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	20 Laporan	34.212.874.955,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	36.728.231.339,00	
	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	243 Orang/ Bulan	34.101.819.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		36.608.176.139,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	111.055.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		120.055.200,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	102.792.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3Laporan	245.000.000,00	
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13.309.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		90.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	63.514.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.969.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		45.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	1648660600 Rupiah	25.040.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1648660600Rupiah	25.040.000,00	
	1	03	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	25.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.040.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	71.619.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Laporan	110.000.000,00	
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	39.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	32.077.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.192.757.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200Unit	1.457.500.000,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	27.576.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	603.432.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		550.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30.332.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		27.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	45.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	157.120.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		165.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.328.816.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		550.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.823.323.192,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	3.699.500.000,00	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	896.688.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		900.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	116.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		49.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.810.352.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.750.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.562.101.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.965.000.000,00	
	1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	1.242.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		690.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		665.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	299.821.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		610.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
42	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	77	142.937.782.666,00						78	410.327.214.566,00	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	142.937.782.666,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	410.327.214.566,00	
	1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi											
							Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	18.69 KM	6.077.667.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4 Jembatan	3.784.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		2.050.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan											
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan											
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	15.69 KM	88.156.676.466,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		205.877.214.566,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	4 Jembatan	24.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		10.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	1.248.282.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan											
							Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	19.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		189.300.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2014.23 KM	170.357.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		600.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan											
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
43	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	92	750.213.800,00						93	947.885.475,00	
	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	534.326.200,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	3Kali	294.442.275,00	
	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli											
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	100 Orang	534.326.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		294.442.275,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-	9.640.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	2Kali	200.000.000,00	
	1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI											
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	9.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	206.247.600,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1Laporan	453.443.200,00	
	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	40 Paket Pekerjaan	142.094.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		414.073.200,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	42 Bangunan Konstruksi	44.233.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		19.450.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	25 Badan Usaha	19.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		19.920.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
						UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN			8.979.664.052,00							8.010.257.200,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.979.664.052,00							5.010.257.200,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5.979.664.052,00							5.010.257.200,00	
44	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	5.979.664.052,00						-	5.010.257.200,00	
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.950.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	1.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1	03	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	1.950.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1648660600Rupiah	0	
	1	03	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.012.219.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200Unit	5.010.257.200,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.961.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	5.010.257.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		5.010.257.200,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan	562.050.552,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	473.922.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	401.494.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	371.494.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	X					NON URUSAN			3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
45	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	3.000.000.000,00						-	3.000.000.000,00	
	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.000.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	10Unit	3.000.000.000,00	
	X	XX	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar											
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		3.000.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
						UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI			1.429.163.016,00							0	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.429.163.016,00							0	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.429.163.016,00							0	
46	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	1.035.546.116,00						-	0	
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan	20.550.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	0	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	1648660600 Rupiah	9.100.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1648660600Rupiah	0	
	1	03	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.826.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200Unit	0	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.826.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	929.295.216,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.332.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	813.963.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	66.774.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	66.774.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
47	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	393.616.900,00						-	0	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	393.616.900,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	0	
	1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	18.69 KM	393.616.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
						UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO			4.023.411.256,00							2.822.367.600,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.903.411.256,00							2.702.367.600,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.903.411.256,00							2.702.367.600,00	
48	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	1.151.036.056,00						-	0	
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan	102.558.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	0	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	102.558.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan	1.048.477.956,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.478.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	962.999.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO
49	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	2.752.375.200,00						-	2.702.367.600,00	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	2.752.375.200,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	2.702.367.600,00	
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	73 Jembatan	102.367.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		102.367.600,00	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan											
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	52 KM	2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		2.600.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0.5 KM	50.007.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO
	X					NON URUSAN			120.000.000,00							120.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			120.000.000,00							120.000.000,00	
50	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	120.000.000,00	
	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		120.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO
						UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II ENREKANG			3.644.270.628,00							120.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.644.270.628,00							120.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.644.270.628,00							120.000.000,00	
51	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	838.230.628,00						-	120.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan	58.780.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	0	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	58.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II ENREKANG
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan	659.450.628,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.303.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II ENREKANG
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	614.147.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II ENREKANG
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	120.000.000,00	
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		120.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II ENREKANG
52	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	2.806.040.000,00						-	0	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	2.806.040.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	0	
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II ENREKANG
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan											
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	53 KM	2.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II ENREKANG
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0.5 KM	56.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II ENREKANG
						UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PARE PARE			3.406.404.632,00							2.650.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.406.404.632,00							2.650.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.406.404.632,00							2.650.000.000,00	
53	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	606.722.012,00						-	0	
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan	54.230.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	0	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	54.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PARE PARE
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan	552.492.012,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.261.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PARE PARE
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	462.230.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PARE PARE
54	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	2.799.682.620,00						-	2.650.000.000,00	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	2.799.682.620,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	2.650.000.000,00	
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	99.948.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PARE PARE
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan											
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	31 KM	2.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		2.650.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PARE PARE
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0.5 KM	49.734.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PARE PARE
						UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV MAKASSAR			5.619.512.890,00							4.650.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.619.512.890,00							4.650.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5.619.512.890,00							4.650.000.000,00	
55	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	819.514.872,00						-	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	47.999.700,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	0	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	47.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV MAKASSAR
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	771.515.172,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.490.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV MAKASSAR
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	725.024.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV MAKASSAR
56	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	4.799.998.018,00						-	4.650.000.000,00	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	4.799.998.018,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	4.650.000.000,00	
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	99.998.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV MAKASSAR
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan											
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	93 KM	4.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		4.650.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV MAKASSAR
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	61 KM	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV MAKASSAR
						UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V BONE			4.477.544.828,00							3.850.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.477.544.828,00							3.850.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4.477.544.828,00							3.850.000.000,00	
57	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	477.627.208,00						-	0	
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	47.833.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	47.833.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V BONE
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan	429.793.608,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.948.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V BONE
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	343.844.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V BONE
58	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	3.999.917.620,00						-	3.850.000.000,00	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	3.999.917.620,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	3.850.000.000,00	
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	99.949.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V BONE
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan											
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	77 KM	3.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		3.850.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V BONE
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0.5 KM	49.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V BONE
						UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI BULUKUMBA			4.068.415.406,00							22.602.356.357,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.068.415.406,00							22.602.356.357,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4.068.415.406,00							22.602.356.357,00	
59	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	1.116.122.264,00						-	0	
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan	72.636.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Laporan	0	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	72.636.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI BULUKUMBA
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan	1.043.486.064,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.671.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI BULUKUMBA
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	982.814.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI BULUKUMBA
60	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	2.952.293.142,00						-	22.602.356.357,00	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	2.952.293.142,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	22.602.356.357,00	
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	8 Jembatan	299.989.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI BULUKUMBA
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan											
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	31 KM	2.602.356.357,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		22.602.356.357,00	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI BULUKUMBA
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0.5 KM	49.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0	UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI BULUKUMBA
						DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG			**211.931.962.390,00**							**93.615.427.552,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			211.931.962.390,00							93.615.427.552,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			211.931.962.390,00							93.615.427.552,00	
61	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 % 100 Nilai 100 Nilai	40.021.277.363,00						100Nilai 100Nilai 100%	43.375.112.143,00	
	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	429.606.045,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	9Dokumen	791.580.240,00	
	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	98.201.545,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	3 Dokumen	120.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	46.733.800,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	56.080.560,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	24.706.800,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	120.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	29.468.700,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	120.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.916.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	37.099.680,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.578.800,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Laporan	120.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	82.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	3 Laporan	98.400.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Berita Acara	120.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	32.393.460.018,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	20Dokumen	35.989.995.287,00	
	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/ Bulan	32.183.460.018,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	269 Orang/ Bulan	35.689.995.287,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	60.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	3Dokumen	270.000.000,00	
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	0	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Laporan	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Laporan	90.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	251260000 Rupiah	20.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	251260000Rupiah	120.000.000,00	
	1	03	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							0	0 0	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	30.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	3Laporan	251.000.000,00	
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	0	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	30 Paket	11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	50 Orang	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	5 Orang	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	226 Unit	860.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	226Unit	737.000.000,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							0	1 0	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	54 Paket	24.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	50 Paket	24.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN		24.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							0	24 0	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	50 Paket	24.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							0	0 0	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	24.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	600.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	65 Unit	1.571.686.023,00			-	-	Aparatur ASN	65Unit	1.296.000.000,00	
	1	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							0	1 0	541.686.023,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur ASN	0 Unit	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	30.000.000,00	-	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	30 Paket	36.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	15 Unit	720.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	400.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Unit	480.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	3.700.144.077,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12Laporan	2.713.879.176,00	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							-	-	1.990.493.301,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	944.228.400,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							0	0 0	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							-	-	1.709.650.776,00	-	-	-	-	Masyarakat	12 Laporan	1.709.650.776,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	51 Unit	956.381.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	51Unit	1.205.657.440,00	
	1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	18 0	706.381.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	20 Unit	847.657.440,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							0	0 0	0	-	-	-	-	Aparatur ASN	10 Unit	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar											
							0	2 0	75.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	2 Unit	90.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	Aparatur ASN	100 Unit	22.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							0	4 0	105.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Unit	126.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							0	1 0	50.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	-	-	-	Aparatur ASN	1 Unit	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
62	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	6445 Ha 100 %	30.765.644.000,00						6138Ha 100%	45.951.003.809,00	
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai/ Embung yang ditangani Jumlah pembinaan pengelolaan di wilayah sungai Persentase ketersediaan perencanaan teknis pengelolaan SDA	4 Lokasi 4 Wilayah Sungai 100 %	5.130.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	4Lokasi 4Wilayah Sungai 100%	7.258.000.000,00	
	1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai											
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.1 KM	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tello Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	2 KM	6.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir											
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	10 Unit	12.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	4 Lembaga	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	4 Lembaga	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya											
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	1 Unit	1.100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	4.700.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	4.3 KM	5.640.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	1 Dokumen	36.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	0 Lembaga	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	2 Lembaga	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	1 Dokumen	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	1 Dokumen	22.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing											
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0 KM	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	2 KM	11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya											
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	5 Unit	11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya											
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	3 Dokumen	360.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.635.644.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	100Dokumen 38% 367,88Ha	38.693.003.809,00	
	1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan											
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	10.14 KM	2.040.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi											
							Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	0 Bendung	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Bendung	210.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5 KM	21.615.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	15.25 KM	21.435.707.520,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi											
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	670.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Bendung	668.296.160,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak											
							0	0 0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	12.6 KM	12.768.000.129,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	2 Lembaga	11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa											
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	5 Dokumen	1.560.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi											
							Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	0 Lembaga	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	2 Lembaga	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi											
							Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	0 DI	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	5 DI	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
63	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	100	129.000.000.000,00						100	151.000.000,00	
							Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi	100							100		
	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan SPAM Kab./Kota persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM	24 Kab./Kota 100 %	129.000.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	100% 24Kab./Kota 0%	151.000.000,00	
	1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	24 Kabupaten/Kota	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24 Kabupaten/Kota	31.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota											
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	1000 Liter/Detik	128.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	1000 Liter/Detik	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	24 Kabupaten/Kota	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pembinaan layanan TPA kewenangan provinsi	100 %	60.000.000,00						100 %	47.000.000,00	
	1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah pembinaan pengelolaan Sampah Kab./Kota	24 Kab./Kota	60.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24Kab./Kota	47.000.000,00	
	1	03	04	1.01	0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	24 Kabupaten/Kota	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24 Kabupaten/Kota	36.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	24 Kabupaten/Kota	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24 Kabupaten/Kota	11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
65	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air sanitasi layak Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kewenangan Provinsi	96 % 100 %	60.000.000,00						97% 100%	156.000.000,00	
	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah pembinaan pengelolaan air limbah domestik Kab./Kota	24 Kab./Kota	60.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24Kab./Kota	156.000.000,00	
	1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	24 Kabupaten/Kota	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	24 kabupaten/kota	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24 kabupaten/kota	36.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	05	1.01	0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											
							Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya	24 Lembaga	0	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	-	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	1 Lembaga	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
66	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pembinaan layanan drainase kewenangan provinsi	0 %	0						0 %	60.000.000,00	
	1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Drainase Kab./Kota	0 Kab./Kota	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	24Kab./Kota	60.000.000,00	
	1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan											
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Sistem Drainase Perkotaan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat		0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	0	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
67	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pamerintah yang difasilitasi	95 %	6.232.798.027,00						95 %	1.728.000.000,00	
	1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bangunan Gedung dan Rumah Negara Jumlah lokasi bangunan gedung difasilitasi	100 % 10 Lokasi	6.232.798.027,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	100% 10Lokasi	1.728.000.000,00	
	1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara											
							Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	10 Rumah Negara	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	10 Rumah Negara	120.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	1.01	0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											
							Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	2 Bangunan Gedung Cagar Budaya	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	2 Bangunan Gedung Cagar Budaya	36.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	4 Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat	2 Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	24 Kabupaten/Kota	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	24 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.542.798.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	8 Dokumen	276.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0 Bangunan Gedung	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	3 Bangunan Gedung	36.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
68	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi	82.4 %	4.792.243.000,00						83,6 %	1.225.311.600,00	
	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan Persentase ketersediaan perencanaan teknis penataan lingkungan	10 Kawasan 100 %	4.792.243.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	10Kawasan 100%	1.225.311.600,00	
	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya											
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	3.911.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	3 Kawasan	120.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	621.093.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	745.311.600,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya											
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	3 Dokumen	240.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	09	1.01	0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	24 kabupaten/kota	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	24 kabupaten/kota	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
69	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	92.7 %	1.000.000.000,00						94,05%	922.000.000,00	
	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang disusun/ditetapkan	2 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	2Dokumen	112.000.000,00	
	1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang											
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	2 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang											
							Jumlah publikasi informasi penataan ruang	0 Publikasi	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	2 Publikasi	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang											
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	30 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	100 Orang	52.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah fasilitasi perencanaan tata ruang	24 Kab./Kota	425.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	24Kab./Kota	510.000.000,00	
	1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang											
							Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	4 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	4 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	75 Orang	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota											
							Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	4 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota											
							Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	330.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota											
							Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	2 Berita Acara	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.02	0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota											
							Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah layanan informasi pemanfatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	3 Layanan	175.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	3Layanan	120.000.000,00	
	1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha											
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Layanan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang											
							Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	0 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	4 Laporan	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha											
							Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0 Layanan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Layanan	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang											
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang											
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah wilayah yang dikendalikan pemanfaatan ruangnya	5 Kab./Kota	250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	5Kab./Kota	180.000.000,00	
	1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang											
							Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	5 Kasus	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	3 Kasus	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang											
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang											
							Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	2 Kasus	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	2 Kasus	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	4 Laporan	60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR											
							Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang											
							Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	0 Berita Acara	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Berita Acara	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK											
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	1.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal											
							Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0 Berita Acara	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	2 Berita Acara	0	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
						UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG			5.411.401.976,00							6.234.348.476,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.411.401.976,00							6.234.348.476,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5.411.401.976,00							6.234.348.476,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 Nilai 100 % 100 Nilai	5.196.401.976,00						100Nilai 100Nilai 100%	5.372.348.476,00	
	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	9Dokumen	82.000.000,00	
	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							0	5 0	10.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							0	5 0	10.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Laporan	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	10.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	20Dokumen	60.000.000,00	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							0	4 0	10.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	3Dokumen	36.000.000,00	
	1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							0	1 0	8.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Laporan	36.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	226 Unit	4.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	226Unit	12.000.000,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							0	90 0	2.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	54 Paket	6.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	90 0	2.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN		6.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	5.154.401.976,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12Laporan	5.182.348.476,00	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							0	12 0	33.638.640,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	100.884.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							0	12 0	5.120.763.336,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	5.081.464.476,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
71	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pembinaan pengelolaan SDA Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	100 % 6445 Ha	215.000.000,00						6138Ha 100%	862.000.000,00	
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai/ Embung yang ditangani Jumlah pembinaan pengelolaan di wilayah sungai Persentase ketersediaan perencanaan teknis pengelolaan SDA	4 Lokasi 4 Wilayah Sungai 100 %	15.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	4Lokasi 4Wilayah Sungai 100%	180.000.000,00	
	1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir											
							0	1 0	5.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	10 Unit	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi											
							0	1 0	5.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	2 Lembaga	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi											
							0	1 0	5.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan daerah jaringan irigas Luas lahan irigasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jaringan Irigas	38 % 360.980.00 Ha 100 Dokumen	200.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	100Dokumen 38% 367,88Ha	682.000.000,00	
	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
							-	-	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	633 KM	600.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	489,82 0	50.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	58 Bendung	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak											
							Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	489,82 KM	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	5 KM	0	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
	1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi											
							Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	489,82 DI	50.000.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	5 DI	22.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
						UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG			2.141.814.296,00							2.937.605.656,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.141.814.296,00							2.937.605.656,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			2.141.814.296,00							2.937.605.656,00	
72	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 Nilai 100 % 100 Nilai	1.926.814.296,00						100Nilai 100Nilai 100%	2.073.605.656,00	
	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	9Dokumen	88.000.000,00	
	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							0	3 0	10.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	33.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							0	2 0	10.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Laporan	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	10.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	20Dokumen	55.000.000,00	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							-	-	10.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000,00			-	-	Aparatur ASN	3Dokumen	33.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							0	1 0	8.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur ASN	1 Laporan	33.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	226 Unit	4.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	226Unit	11.000.000,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							0	90 0	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	54 Paket	5.500.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							0	90 0	2.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN		5.500.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.884.814.296,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12Laporan	1.886.605.656,00	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	16.628.400,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							0	12 0	1.874.014.296,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	1.869.977.256,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
73	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	6.445 Ha 100 %	215.000.000,00						6138Ha 100%	864.000.000,00	
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai/ Embung yang ditangani Jumlah pembinaan pengelolaan di wilayah sungai Persentase ketersediaan perencanaan teknis pengelolaan SDA	4 Lokasi 4 Wilayah Sungai 100 %	15.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur ASN	4Lokasi 4Wilayah Sungai 100%	180.000.000,00	
	1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir											
							0	644,5 0	5.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur ASN	10 Unit	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi											
							0	644,5 0	5.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur ASN	2 Lembaga	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	644,5 0	5.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan daerah jaringan irigas Luas lahan irigasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jaringan Irigas	38 % 360.980 Ha 100 Dokumen	200.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	100Dokumen 38% 367,88Ha	684.000.000,00	
	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
							0	2022,2 0	100.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	633 KM	600.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi											
							0	0 0	50.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	58 Bendung	60.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak											
							0	0 0	0	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	5 KM	0	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
	1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi											
							0	2022,2 0	50.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat	5 DI	24.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG
						UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE			3.308.200.892,00							4.031.346.020,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.308.200.892,00							4.031.346.020,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.308.200.892,00							4.031.346.020,00	
74	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 % 100 Nilai 100 Nilai	3.093.200.892,00						100Nilai 100Nilai 100%	3.239.346.020,00	
	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	9Dokumen	77.000.000,00	
	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							0	5 0	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	2 0	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Laporan	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	10.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	20Dokumen	55.000.000,00	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							0	4 0	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	3Dokumen	33.000.000,00	
	1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							0	1 0	8.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Laporan	33.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	226 Unit	4.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	226Unit	11.000.000,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							0	90 0	2.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	54 Paket	5.500.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							0	90 0	2.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN		5.500.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	3.051.200.892,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12Laporan	3.063.346.020,00	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							0	12 0	18.030.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	36.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	12 0	3.033.170.892,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	3.027.346.020,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
75	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pembinaan pengelolaan SDA Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	100 % 18.994 Ha	215.000.000,00						6138Ha 100%	792.000.000,00	
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai/ Embung yang ditangani Jumlah pembinaan pengelolaan di wilayah sungai Persentase ketersediaan perencanaan teknis pengelolaan SDA	4 Lokasi 4 Wilayah Sungai 100 %	15.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	4Lokasi 4Wilayah Sungai 100%	165.000.000,00	
	1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir											
							0	1899,40 0	5.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	10 Unit	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi											
							0	1899,40 0	5.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	2 Lembaga	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi											
							0	1899,40 0	5.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan daerah jaringan irigas Luas lahan irigasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jaringan Irigas	38 % 360.980 Ha 100 Dokumen	200.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	100Dokumen 38% 367,88Ha	627.000.000,00	
	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
							0	3798,80 0	100.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	633 KM	550.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi											
							0	0 0	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	58 Bendung	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak											
							0	0 0	0	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	5 KM	0	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
	1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi											
							0	18.994 0	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	5 DI	22.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE
						UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA			1.803.084.055,00							2.563.284.085,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.803.084.055,00							2.563.284.085,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.803.084.055,00							2.563.284.085,00	
76	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 Nilai 100 % 100 Nilai	1.588.084.055,00						100Nilai 100Nilai 100%	1.771.284.085,00	
	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	9Dokumen	77.000.000,00	
	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							0	5 0	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							0	2 0	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Laporan	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	10.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	20Dokumen	55.000.000,00	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							0	4 0	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000,00			-	-	Aparatur ASN	3Dokumen	33.000.000,00	
	1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							0	1 0	8.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur ASN	1 Laporan	33.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	226 Unit	4.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	226Unit	11.000.000,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							0	90 0	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	54 Paket	5.500.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	90 0	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN		5.500.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.546.084.055,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12Laporan	1.595.284.085,00	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							0	12 0	37.156.859,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	89.759.537,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							-	-	1.508.927.196,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	1.505.524.548,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
77	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pembinaan pengelolaan SDA Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	100 % 11.210 Ha	215.000.000,00						6138Ha 100%	792.000.000,00	
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai/ Embung yang ditangani Jumlah pembinaan pengelolaan di wilayah sungai Persentase ketersediaan perencanaan teknis pengelolaan SDA	4 Lokasi 4 Wilayah Sungai 100 %	15.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	4Lokasi 4Wilayah Sungai 100%	165.000.000,00	
	1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir											
	1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi											
							0	1121 0	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	2 Lembaga	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi											
							0	1121 0	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Pengguna Air	1 Dokumen	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan daerah jaringan irigas Luas lahan irigasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jaringan Irigas	38 % 360.980 Ha 100 Dokumen	200.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	100Dokumen 38% 367,88Ha	627.000.000,00	
	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
							0	2242 0	100.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	633 KM	550.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi											
							0	2242 0	50.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	58 Bendung	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak											
							0	0 0	0	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	5 KM	0	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
	1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi											
							0	11.210 0	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat Pengguna Air	5 DI	22.000.000,00	UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA
						UPT KAWASAN CPI			4.326.981.560,00							2.201.720.016,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.326.981.560,00							2.201.720.016,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4.326.981.560,00							2.201.720.016,00	
78	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 Nilai 100 % 100 Nilai	4.326.981.560,00						100Nilai 100Nilai 100%	2.201.720.016,00	
	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	9Dokumen	27.600.000,00	
	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							-	-	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Dokumen	24.000.000,00	UPT KAWASAN CPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							0	3 0	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	4 Laporan	3.600.000,00	UPT KAWASAN CPI
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	20Dokumen	3.600.000,00	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							0	1 0	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	12 Laporan	3.600.000,00	UPT KAWASAN CPI
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	3Dokumen	3.600.000,00	
	1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Laporan	3.600.000,00	UPT KAWASAN CPI
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	20 Unit	18.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	226Unit	21.600.000,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							0	10 0	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	54 Paket	18.000.000,00	UPT KAWASAN CPI
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	10 0	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN		3.600.000,00	UPT KAWASAN CPI
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	4.096.981.560,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12Laporan	1.905.320.016,00	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	210.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	93.816.000,00	UPT KAWASAN CPI
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							0	12 0	3.886.981.560,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	1.811.504.016,00	UPT KAWASAN CPI
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	200.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	51Unit	240.000.000,00	
	1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur ASN	1 Unit	240.000.000,00	UPT KAWASAN CPI
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			**29.605.044.220,00**							**77.047.426.087,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.105.044.220,00							75.181.568.698,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			29.105.044.220,00							75.181.568.698,00	
79	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 % 100 % 100 %	21.290.544.220,00						100% 100% 100%	20.837.818.787,00	
	1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	150.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.364.718.949,00	
	1	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	70.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	894.787.014,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	72.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	42.350.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	42.350.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	105.883.470,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Laporan	146.248.465,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	12.653.848.105,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	11.453.515.249,00	
	1	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	12.553.848.105,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	97 Orang/ Bulan	10.947.282.741,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	42.350.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	93.170.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	225.512.508,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	18.150.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	48.400.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Laporan	18.150.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan	42.556.120,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4Laporan	223.850.000,00	
	1	04	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.713.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	42.350.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.068.520,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	90.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	26.774.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	90.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	15.358.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Laporan	30.250.000,00	
	1	04	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	15.358.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	30.250.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	529.456.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Laporan	1.008.600.000,00	
	1	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	121.180.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38.081.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	163.350.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	16.797.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	121.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	217.529.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120 Orang	272.250.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	135.866.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	242.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	993.177.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Laporan	755.063.526,00	
	1	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.532.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	45.249.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	98.626.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	121.063.526,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	808.769.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	484.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.787.440.385,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Laporan	742.000.000,00	
	1	04	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	228.945.717,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.882.432.168,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	48.839.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	60.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	321.223.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	181.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	206.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	3.160.578.110,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Laporan	2.993.249.106,00	
	1	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	522.591.885,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	546.346.062,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.637.986.225,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	2.446.903.044,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	958.130.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Laporan	2.266.571.957,00	
	1	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	106.580.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Unit	1.508.213.090,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	352.530.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Unit	272.787.667,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	49.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	85.571.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Persentase warga Negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	100 % 100 %	2.000.000.000,00						100% 100%	5.705.000.000,00	
	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	5 Dokumen	114.259.400,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	5Dokumen	1.700.000.000,00	
	1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani											
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	56.668.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus											
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi											
							Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	57.591.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi											
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi											
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	150 Orang	200.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	150Orang	970.000.000,00	
	1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana											
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	50 Orang	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator											
							Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	30 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	30 Orang	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana											
							Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	10 orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	10 orang	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	30 Orang	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	30 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	30 Orang	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	10 Unit Rumah	1.685.740.600,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	10Unit Rumah	3.035.000.000,00	
	1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana											
							Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	28 Unit Rumah	1.685.740.600,00	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	10 Unit Rumah	3.035.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
81	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	11,39 %	2.500.000.000,00						19,67 %	10.773.749.911,00	
	1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	137.155.100,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1Dokumen	1.334.821.560,00	
	1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	137.155.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Laporan	532.228.560,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	200 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	200 Orang	802.593.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh Tertangani	60 Ha	2.362.844.900,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	80Ha	9.438.928.351,00	
	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
							Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	60 Ha	2.362.844.900,00	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	9.438.928.351,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
82	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak pada kawasan permukiman Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	38,33 % 33,33 % 31,43 %	2.814.500.000,00						45% 40% 42,85%	37.441.500.000,00	
	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Terbangun PSU	17 Kawasan	2.814.500.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	20Kawasan	37.441.500.000,00	
	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	29.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	10 Dokumen	2.420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman											
							Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi	2.698.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	98 Lokasi	33.646.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	29.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Laporan	495.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	05	1.01	0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang											
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	29.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Laporan	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	05	1.01	0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	1 Dokumen	29.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	715.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
83	1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	14,49 %	500.000.000,00						21,74 %	423.500.000,00	
	1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	15 Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	500.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	15Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	423.500.000,00	
	1	04	06	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan	500.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Laporan	423.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000,00							1.865.857.389,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			500.000.000,00							1.865.857.389,00	
84	2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100 %	75.105.100,00						100 %	461.103.090,00	
	2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi	5 Lokasi	75.105.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7Lokasi	461.103.090,00	
	2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum											
							Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5 Dokumen	75.105.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	461.103.090,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
85	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 %	99.902.300,00						100 %	765.723.399,00	
	2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	6 Kasus	99.902.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7Kasus	765.723.399,00	
	2	10	04	1.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	49.966.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	419.623.399,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	10	04	1.01	0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Berita Acara	49.936.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Berita Acara	346.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi yang diterbitkan	100 %	324.992.600,00						100 %	639.030.900,00	
	2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	324.992.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Dokumen	639.030.900,00	
	2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	250.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	379.030.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	10	10	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	74.992.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			**46.337.972.141,00**							**52.041.114.264,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			46.217.972.141,00							51.791.114.264,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			46.217.972.141,00							51.791.114.264,00	
87	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	44.380.072.141,00						100	45.330.755.887,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	413.343.100,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	11Dokumen	558.343.100,00	
	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	12 Dokumen	330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Dokumen	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	63.343.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Dokumen	63.343.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Dokumen	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Dokumen	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Laporan	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4 Laporan	45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32 Laporan	21.809.386.735,00			-	-	-	32Laporan	21.198.742.755,00	
	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	21.674.261.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	150 Orang/ Bulan	20.975.617.755,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	37.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	77.052.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	41.107.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	54.107.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	20.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Dokumen	35.516.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	36.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	18 Laporan	56.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	320 unit	28.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	320unit	42.000.000,00	
	1	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	2 Dokumen	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3 Dokumen	17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	360 Laporan	95.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	360Laporan	410.000.000,00	
	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	150 Paket	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	148 Dokumen	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	120 Orang 250 Unit	620.041.401,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	120Orang 250Unit	1.206.251.000,00	
	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	50 Paket	32.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	250 Paket	27.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	180 Paket	32.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	180 Paket	62.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	12 Dokumen	44.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	37.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	12 Laporan	47.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	477.490.401,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	100 Laporan	814.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	8.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	200 Dokumen	28.551.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Dokumen	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	717.979.513,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	9Unit	1.147.979.513,00	
	1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	627.979.513,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4 Unit	627.979.513,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4 Unit	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Paket	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Unit	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	10 Unit	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.421.321.392,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	24Laporan	20.167.439.519,00	
	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.589.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	12 Laporan	35.589.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.395.732.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	12 Laporan	20.131.850.519,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	85 Unit	275.000.000,00			-	-	-	85Unit	600.000.000,00	
	1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	205.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Unit	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Unit	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
88	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 %	1.621.000.000,00						100 %	5.245.000.000,00	
	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	100 %	926.000.000,00			-	-	Masyarakat	100%	4.035.000.000,00	
	1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat											
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP											
							Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	1 Dokumen	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	250 Unit	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	16 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		270.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
							Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	50 Laporan	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan											
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	277 laporan	475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		890.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia											
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	240 Orang	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	50 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		1.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	685.000.000,00			-	-	Masyarakat	100%	980.000.000,00	
	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK	-	-	Masyarakat	25 Laporan	370.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Laporan	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK	-	-	Masyarakat	70 Laporan	240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	30 Laporan	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK	-	-	Masyarakat	25 Laporan	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah											
							Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS)	8 orang	10.000.000,00			-	-	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	8orang	230.000.000,00	
	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	5 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	25 Laporan	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03	0003	Pembentukan Sekretariat PPNS											
							Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	- Dokuman	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS											
							Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	22 laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	30 laporan	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
89	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	84.900.000,00						100 %	845.000.000,00	
	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	28.300.000,00			-	-	Masyarakat	100%	355.000.000,00	
	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)											
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	28.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	28.300.000,00			-	-	Masyarakat	100%	350.000.000,00	
	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana											
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	28.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	28.300.000,00			-	-	Masyarakat	100%	140.000.000,00	
	1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	28.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	2 Dokumen	140.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
90	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	% Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100	132.000.000,00						100	370.358.377,00	
	1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraa n Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	50 %	76.000.000,00			-	-	-	50% 50%	169.655.000,00	
	1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	1.01	0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	40 Orang	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Orang	49.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	90 % 90 %	56.000.000,00			-	-	Masyarakat	100% 100%	200.703.377,00	
	1	05	04	1.02	0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	24 Laporan	110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	1.02	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	24 Laporan	90.703.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X					NON URUSAN			120.000.000,00							250.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			120.000.000,00							250.000.000,00	
91	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	120.000.000,00						100	250.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	85 Unit	120.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	85Unit	250.000.000,00	
	X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	30 Unit	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**13.904.561.478,00**							**19.618.001.717,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.904.561.478,00							19.618.001.717,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			13.904.561.478,00							19.618.001.717,00	
92	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 Nilai 100 % 100 Nilai	10.181.369.478,00						100Nilai 100Nilai 100%	12.208.001.717,00	
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	623.876.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	16Dokumen	659.000.000,00	
	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	169.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	64.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	69.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	64.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	86.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Laporan	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	189.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Laporan	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	5.902.409.078,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	6.055.041.717,00	
	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	5.760.201.878,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	45 Orang/ Bulan	5.830.041.717,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20.982.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	101.224.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	159.547.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3Laporan	295.000.000,00	
	1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	59.547.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	700 Orang 1 Unit	763.968.304,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Unit 800Orang	1.531.710.000,00	
	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	21.710.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99.966.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	527.501.504,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	2.343.817.145,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24Laporan	2.827.250.000,00	
	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	448.742.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	770.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.895.075.061,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	2.057.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	387.751.451,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	27Unit	840.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	308.521.451,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Unit	500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	29.230.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
93	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100 % 100 % 100 %	3.723.192.000,00						100% 100% 100%	7.410.000.000,00	
	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah orang yang terlayani dalam pemberian informasi wilayah rawan bencana	100 Orang	256.000.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	100Orang	450.000.000,00	
	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)											
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	256.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	200 Orang	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	982.165.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	100%	1.780.000.000,00	
	1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi											
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	262.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana											
							Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	200 Orang	172.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	200 Orang	500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana											
							Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Keluarga	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
							Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	128.653.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana											
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	169.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	200 Orang	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat yang responsif	100 %	1.632.180.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	100%	2.800.000.000,00	
	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	55000 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	60000 Orang	2.230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	632.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	12 Laporan	570.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	5 Laporan	852.847.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	5Laporan	2.380.000.000,00	
	1	05	03	1.04	0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi											
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	2 Kegiatan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	3 Kegiatan	1.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah											
							Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	530.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan											
							Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	24 kabupaten/kota	152.847.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	24 kabupaten/kota	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL			**59.555.748.261,00**							**55.791.027.159,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.757.119.754,00							19.630.067.430,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			19.757.119.754,00							19.630.067.430,00	
94	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	97.4 Nilai 90 Nilai 100 %	5.638.869.754,00						90Nilai 100% 97.6Nilai	8.351.108.385,00	
	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	135.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	19Dokumen	417.298.370,00	
	1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	352.582.626,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	11.085.724,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	11.093.130,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	6.223.156,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	4.573.734,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	7 Laporan	31.740.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 Laporan	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	30Laporan	52.900.000,00	
	1	06	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	52.900.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1Laporan	300.000.000,00	
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	1000 Orang 61 Unit	426.750.001,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	61Unit 1000Orang	851.333.644,00	
	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16.750.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	10 Paket	10.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	31 Paket	24.799.520,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	10 Paket	30.153.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	80.153.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	300 Laporan	705.648.124,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	4.497.119.753,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	24Laporan	5.741.320.790,00	
	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	637.200.906,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	692.348.964,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.859.918.847,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	5.048.971.826,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	158 Unit	530.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	158Unit	988.255.581,00	
	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	396.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	7 Unit	306.830.580,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	7 Unit	23.276.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	31.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	110 Unit	35.072.700,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	21.160.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	3 Unit	575.466.301,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	30 Unit	26.450.000,00	DINAS SOSIAL
95	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 % 100 %	1.900.000.000,00						100% 100%	2.032.841.721,00	
	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	150.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kab/Kota	70Dokumen	144.535.602,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	70 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kab/Kota	70 Dokumen	144.535.602,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan Kemampuan dari yang ditargetkan	100 %	1.750.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)	100%	1.888.306.119,00	
	1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)	200 Orang	1.276.663.623,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	269 Keluarga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)	100 Keluarga	326.704.581,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	200 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)	200 Lembaga	284.937.915,00	DINAS SOSIAL
96	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100 %	150.000.000,00						100 %	307.198.764,00	
	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan kedaerah kabupaten/kota asal	300 Orang	150.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Orang Terlantar	300Orang	307.198.764,00	
	1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal											
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	300 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Orang Terlantar	300 Orang	307.198.764,00	DINAS SOSIAL
97	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti Persentase pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi tuna sosial dalam panti Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	5.228.250.000,00						100% 100% 100% 100% 100%	4.436.784.669,00	
	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	115 Orang	750.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Penyandang Disabilitas	115Orang	442.594.992,00	
	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	695.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Penyandang Disabilitas	45 Orang	245.456.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial											
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Penyandang Disabilitas	50 Orang	12.094.792,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas											
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	20 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Penyandang Disabilitas	20 Orang	105.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Penyandang Disabilitas	2 Dokumen	79.244.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)	425 Orang	2.675.000.000,00			-	-	Anak Terlantar	425Orang	2.345.012.614,00	
	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	340 Orang	2.239.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Terlantar	425 Orang	1.653.320.730,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang											
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	340 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Anak Terlantar	425 Orang	76.083.954,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses											
							Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	340 Orang	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Anak Terlantar	425 Orang	65.570.608,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	340 Orang	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Anak Terlantar	425 Orang	63.304.422,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial											
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	340 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Anak Terlantar	425 Orang	144.565.120,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari											
							Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	425 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Anak Terlantar	425 Orang	241.657.780,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	425 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Anak Terlantar	425 Orang	100.510.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)	75 Orang	1.077.250.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	75Orang	908.140.586,00	
	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	75 Orang	866.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	75 Orang	608.217.750,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang											
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	75 Orang	16.187.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses											
							Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	75 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	75 Orang	48.668.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	75 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	75 Orang	31.933.023,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial											
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	75 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	75 Orang	33.856.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari											
							Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	75 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	75 Orang	55.881.973,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	75 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	75 Orang	49.916.440,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan											
							Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lanjut Usia Terlantar	12 Orang	63.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti (SPM)	60 Orang	60.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gelandangan dan Pengemis	60Orang	126.282.932,00	
	1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial											
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gelandangan dan Pengemis	60 Orang	29.370.080,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gelandangan dan Pengemis	2 Dokumen	96.912.852,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan pelayanan dalam panti	100 Orang	666.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	100Orang	614.753.545,00	
	1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	100 Orang	405.478.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang											
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	100 Orang	15.741.982,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses											
							Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	100 Orang	0	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	100 Orang	16.437.617,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial											
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	100 Orang	52.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari											
							Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	100 Orang	90.127.846,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal											
							Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	100 Orang	7.617.600,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Wanita Tuna Susila	2 Dokumen	26.450.000,00	DINAS SOSIAL
98	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial dari yang ditargetkan	100 %	4.880.000.000,00						100 %	3.078.896.524,00	
	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI sesuai kewenangan provinsi	40 Orang	250.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Anak Adopsi	40Orang	125.153.465,00	
	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI											
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	40 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Anak Adopsi	40 Orang	125.153.465,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100 %	4.630.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Fakir Miskin, Eks Kusta	100%	2.953.743.059,00	
	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	700 Keluarga	1.290.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Fakir Miskin, Eks Kusta	400 Keluarga	1.004.600.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	667 Keluarga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Fakir Miskin, Eks Kusta	400 Keluarga	729.070.974,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	667 Orang	3.140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Fakir Miskin, Eks Kusta	110 Orang	1.220.071.885,00	DINAS SOSIAL
99	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi	100 %	1.860.000.000,00						100 %	1.306.891.223,00	
	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	3700 Orang	1.860.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Korban Bencana alam dan Sosial	3700Orang	1.306.891.223,00	
	1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan											
							Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	3000 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Korban Bencana alam dan Sosial	3000 Orang	834.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	500 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Korban Bencana alam dan Sosial	500 Orang	170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial											
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	300 Orang	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Korban Bencana alam dan Sosial	200 Orang	302.891.223,00	DINAS SOSIAL
100	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100 %	100.000.000,00						100 %	116.346.144,00	
	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	2 Makam	100.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Taman Makam Pahlawan	2Makam	116.346.144,00	
	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi											
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Taman Makam Pahlawan	2 Makam	116.346.144,00	DINAS SOSIAL
	X					NON URUSAN			39.798.628.507,00							36.160.959.729,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			39.798.628.507,00							36.160.959.729,00	
101	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	97.4 Nilai 90 Nilai 100 %	39.798.628.507,00						90Nilai 100% 97.6Nilai	36.160.959.729,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	25.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	19Dokumen	0	
	X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	6 Laporan	0	DINAS SOSIAL
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 Laporan	39.731.379.413,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30Laporan	35.899.483.759,00	
	X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang/ Bulan	39.681.379.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	330 Orang/ Bulan	35.802.273.502,00	DINAS SOSIAL
	X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Laporan	97.210.257,00	DINAS SOSIAL
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	1000 Orang 61 Unit	42.249.094,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	61Unit 1000Orang	261.475.970,00	
	X	XX	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.249.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	261.475.970,00	DINAS SOSIAL
						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			**37.329.610.268,00**							**42.180.376.447,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.168.110.268,00							41.756.050.447,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			37.168.110.268,00							41.756.050.447,00	
102	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 Nilai 100 % 100 Nilai	33.048.610.268,00						100Nilai 100Nilai 100%	33.220.020.447,00	
	2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	305.472.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	100%	462.000.000,00	
	2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	181.472.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	315.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	18.375.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	15.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	18.375.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	15.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	17 Laporan	42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	11 Laporan	36.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	30.303.322.252,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	100%	30.196.350.000,00	
	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	30.168.322.252,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	190 Orang/ Bulan	30.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	10.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	5.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	18 Laporan	180.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	105.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Nilai	178.500.000,00	
	2	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	190 Dokumen	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	190 Dokumen	147.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	60 Orang	31.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	270.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	100%	425.685.750,00	
	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	2 Paket	56.085.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	264.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	5.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	100%	26.250.000,00	
	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	26.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.178.327.232,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	100%	1.143.397.340,00	
	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	618.825.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	649.766.250,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	559.502.232,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	493.631.090,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	881.488.684,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	787.837.357,00	
	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	835.478.684,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Unit	739.526.857,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57 Unit	46.010.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	57 Unit	48.310.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
103	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro	95	206.442.500,00						96	163.750.000,00	
	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota Persentase peningkatan pengetahuan SDM Kabupaten/Kota	100 % 100 %	206.442.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Disnaker Kabupaten/Kota	100% 100%	163.750.000,00	
	2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro											
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	191.442.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Disnaker Kabupaten/Kota	1 Dokumen	148.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	24 Orang	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Disnaker Kabupaten/Kota	24 Orang	15.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
104	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	87	1.563.643.560,00						90	5.662.230.000,00	
							Prosentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	100							100		
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	1.485.855.200,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga kerja/UKM/KUM/Disabilitas/Instruktur	100% 100%	5.525.730.000,00	
	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi											
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	520 Orang	1.450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga kerja/UKM/KUM/Disabilitas/Instruktur	960 Orang	5.446.980.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja											
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	35.855.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga kerja/UKM/KUM/Disabilitas/Instruktur	20 Lembaga	78.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase meningkatnya produktivitas UKM	65 %	15.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Perusahaan Menengah	70%	31.500.000,00	
	2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	3 Perusahaan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Perusahaan Menengah	9 Perusahaan	31.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Balai Pelatihan Kerja	100 % 100 %	62.788.360,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Perusahaan Menengah	100% 100%	105.000.000,00	
	2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	17 Dokumen	62.788.360,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Perusahaan Menengah	12 Dokumen	105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
105	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase daya serap tenaga kerja Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	63.30 % 9.60 %	889.503.640,00						9.70% 63.75%	703.500.000,00	
	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan antar kerja	100 %	12.691.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja/Pencari Kerja	100%	26.250.000,00	
	2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja											
							Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	5000 Orang	12.691.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja/Pencari Kerja	5000 Orang	26.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya data dan informasi pasar dan bursa kerja di Kabupaten/Kota	100 %	636.904.700,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja/Pencari Kerja dan Perusahaan	100%	147.000.000,00	
	2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	15000 Orang	36.904.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja/Pencari Kerja dan Perusahaan	15000 Orang/500 perusahaan Orang	42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja											
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja/Pencari Kerja dan Perusahaan	1500 Orang	105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	-	219.907.040,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pekerja Migran Indonesia	100% 100%	498.750.000,00	
	2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)											
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pekerja Migran Indonesia	200 Orang	52.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.04	0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	150 Orang	219.907.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pekerja Migran Indonesia	150 Orang	446.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja asing di Kabupaten/Kota	100 %	20.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja Asing	100%	31.500.000,00	
	2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	450 Orang	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja Asing	450 Orang	31.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
106	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	52.00 % 63.75 %	974.910.300,00						64.00% 54.00%	1.103.550.000,00	
	2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi pelaksanaan Syarat-syarat Kerja di Perusahaan	100 %	70.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perusahaan	100%	92.400.000,00	
	2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial											
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perusahaan	35 Perusahaan	10.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial											
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	2 Perusahaan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perusahaan	8 Perusahaan	10.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja											
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perusahaan	1 Laporan	71.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan yang dapat dicegah dan diselesaikan	100 % 35 %	429.732.100,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja dan Perusahaan	100% 37%	496.650.000,00	
	2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 Perkara	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja dan Perusahaan	30 Perkara	36.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	56.841.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja dan Perusahaan	50 Perkara	68.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi											
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	372.891.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja dan Perusahaan	3 Lembaga	391.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Falisitasi dewan pengupahan dalam menetapkan UMP/UMK Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial	100 % 125000 Orang	475.178.200,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja	150000Orang 100%	514.500.000,00	
	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)											
							Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	420.178.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja	1 Surat Keputusan	441.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)											
							Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja	1 Surat Keputusan	15.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											
							Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1000000 Orang	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kerja	1000000 Orang	57.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	100 % 87.00 %	485.000.000,00						100% 88.00%	903.000.000,00	
	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase pelayanan K3 di perusahaan Persentase pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan Persentase permasalahan hukum yang tertangani Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja	100 % 16 % 100 % 100 %	485.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perusahaan	100% 100% 100% 17%	903.000.000,00	
	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan											
							Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	5000 Perusahaan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perusahaan	900 Perusahaan	630.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan											
							Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	120 Kasus	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perusahaan	110 Kasus	152.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan											
							Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	3500 Perusahaan	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perusahaan	5000 Perusahaan	120.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			161.500.000,00							424.326.000,00	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			161.500.000,00							424.326.000,00	
108	3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	100 %	37.500.000,00						100 %	77.826.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Data dan Informasi calon areal pengembangan kawasan transmigrasi	100 %	37.500.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	100%	77.826.000,00	
	3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan											
							Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi											
							Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1000 Hektar	17.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	1000 Hektar	35.826.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
109	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi	100 %	74.000.000,00						100 %	241.500.000,00	
	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (KSAD, Kelayakan Lokasi, Verifikasi dan Penyuluhan Calon TPS, dan Monitoring dan Evaluasi)	100 %	74.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	100%	241.500.000,00	
	3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	24.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	2 Laporan	47.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran											
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	0 Dokumen	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	57.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi											
							Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	25 Kepala Keluarga	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	25 Kepala Keluarga	31.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi											
							Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	20 Kepala Keluarga	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	40 Kepala Keluarga	63.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi											
							Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Transmigran dan Kawasan Transmigrasi	4 Lokasi	42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
110	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	100 %	50.000.000,00						100 %	105.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase meningkatnya pengetahuan dan keterampilan transmigran Persentase SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan	100 % 100 %	50.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100% 100%	105.000.000,00	
	3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman											
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	75 Kepala Keluarga	52.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman											
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	3 Satuan Permukiman	52.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA			**16.453.896.372,00**							**20.655.787.457,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.968.396.372,00							18.606.870.457,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			13.607.253.347,00							16.601.870.457,00	
111	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	95,5 Nilai 79,5 Nilai 100 %	10.221.253.347,00						100% 96Nilai 80Nilai	10.790.170.457,00	
	2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	215.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	375.000.000,00	
	2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 %	8.777.369.703,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	8.700.170.457,00	
	2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	8.777.369.703,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Orang/ Bulan	8.700.170.457,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	225.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	90%	465.000.000,00	
	2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	125.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Paket	265.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	90 %	858.883.644,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	95%	875.000.000,00	
	2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	858.883.644,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	875.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipeliharah	100 %	145.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	375.000.000,00	
	2	08	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	145.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		375.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
112	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi	70	585.000.000,00						75	1.250.000.000,00	
							Persentase ARG di Tingkat Provinsi	38,5							39		
							Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	38							38,5		
	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG	86 %	235.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat DaerahProvinsi dan OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/ calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	86,5%	462.000.000,00	
	2	08	02	1.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat DaerahProvinsi dan OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/ calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	1 Kebijakan	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi											
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat DaerahProvinsi dan OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/ calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	1 Laporan	127.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi											
							Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	48 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat DaerahProvinsi dan OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/ calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	48 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	26 %	300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi, Politik,hukum, Perempuan kelompok rentan, kader partai politik, DP3A Kab/kota , LBHn OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/ calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	26,5%	613.000.000,00	
	2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	24 Lembaga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi, Politik,hukum, Perempuan kelompok rentan, kader partai politik, DP3A Kab/kota , LBHn OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/ calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	24 Lembaga	613.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yg terstandarisasi	16 Lembaga	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha	17Lembaga	175.000.000,00	
	2	08	02	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	24 Lembaga	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha	24 Lembaga	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	24 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha	24 Orang	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
113	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani	58.33 % 95 %	1.206.980.000,00						95% 62.50%	1.676.700.000,00	
	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg difasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	14 %	126.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lokasi Percontohan 2. Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kota	14,5%	276.700.000,00	
	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lokasi Percontohan 2. Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	101.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	24 Perangkat Daerah	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lokasi Percontohan 2. Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kota	24 Perangkat Daerah	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan/anak korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi	95 %	985.480.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perempuan dan Anak Korban ktP/ktA, Lembaga Masyarakat, Jejaring Layanan di Provinsi , Kab/Kota	95%	1.030.000.000,00	
	2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	48 Orang	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perempuan dan Anak Korban ktP/ktA, Lembaga Masyarakat, Jejaring Layanan di Provinsi , Kab/Kota	48 Orang	665.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	24 Layanan	235.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perempuan dan Anak Korban ktP/ktA, Lembaga Masyarakat, Jejaring Layanan di Provinsi , Kab/Kota	24 Layanan	365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	38 %	95.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	38,5%	370.000.000,00	
	2	08	03	1.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	2 Dokumen	135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	48 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	48 Orang	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	24 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	24 Orang	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
114	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	58.33 %	840.000.000,00						62,50%	875.000.000,00	
	2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi Oleh Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga Tingkat Provinsi	3 Layanan	760.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengelola Puspaga dan Masyarakat Pengguna Layanan Puspaga Tk. Provinsi	3Layanan	760.000.000,00	
	2	08	04	1.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	3 Dokumen	760.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengelola Puspaga dan Masyarakat Pengguna Layanan Puspaga Tk. Provinsi	3 Dokumen	760.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi	45,5 %	80.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pengelola Puspaga Tk. Kab/Kota	46%	115.000.000,00	
	2	08	04	1.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	11 Lembaga	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pengelola Puspaga Tk. Kab/Kota	12 Lembaga	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	48 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pengelola Puspaga Tk. Kab/Kota	48 Orang	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	1.02	0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pengelola Puspaga Tk. Kab/Kota	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak yang terupdate	89 %	130.000.000,00						90%	450.000.000,00	
	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi	87 %	130.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi) 2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga Mitra DP3A Dalduk KB (Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi)	88%	450.000.000,00	
	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi											
	2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi) 2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga Mitra DP3A Dalduk KB (Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi)	2 Dokumen	275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi) 2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga Mitra DP3A Dalduk KB (Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi)	2 Dokumen	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
116	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota yg berpredikat KLA (Kab/Kota Layak Anak)	91.66 %	285.000.000,00						95,83%	810.000.000,00	
	2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yg difasilitasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha	84,5 %	130.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	85%	370.000.000,00	
	2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi											
							umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	24 perangkat daerah	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	24 perangkat daerah	245.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	60 %	155.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	65%	440.000.000,00	
	2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi											
							Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	48 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	48 Orang	145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota											
							Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak											
							Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
117	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	58.33 %	339.020.000,00						62,50%	750.000.000,00	
	2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg difasilitasi dalam pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak	17,5 %	105.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	1. Unsur di Desa/Kel yang Terkait Pencegahan Kekerasan Seksual/Pornografi terhadap Anak 2. Unsur Pembina di Tingkat Kab/Kota	18%	345.000.000,00	
	2	08	07	1.01	0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi											
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi	24 Orang	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	1. Unsur di Desa/Kel yang Terkait Pencegahan Kekerasan Seksual/Pornografi terhadap Anak 2. Unsur Pembina di Tingkat Kab/Kota	24 Orang	345.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	91 %	120.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah Terkait Provinsi dan Kab/Kota 2. Pengelola PATBM Desa/Kelurahan Lokasi Percontohan 3. Pembina PATBM Kab/Kota dari Unsur Pemerintah dan non Pemerintah 4. Pengelola Lembaga Layanan AMPK Anak Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	91,5%	225.000.000,00	
	2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi											
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	24 Orang	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah Terkait Provinsi dan Kab/Kota 2. Pengelola PATBM Desa/Kelurahan Lokasi Percontohan 3. Pembina PATBM Kab/Kota dari Unsur Pemerintah dan non Pemerintah 4. Pengelola Lembaga Layanan AMPK Anak Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	24 Orang	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	1.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi											
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	24 Layanan	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	1. Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah Terkait Provinsi dan Kab/Kota 2. Pengelola PATBM Desa/Kelurahan Lokasi Percontohan 3. Pembina PATBM Kab/Kota dari Unsur Pemerintah dan non Pemerintah 4. Pengelola Lembaga Layanan AMPK Anak Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	24 Layanan	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota	38,5 %	114.020.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	39%	180.000.000,00	
	2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	69.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	1 Dokumen	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	1.03	0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	1 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1.361.143.025,00							2.005.000.000,00	
118	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	30 %	170.000.000,00						30,5 %	295.000.000,00	
	2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	17,5 %	105.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/Kota dan Desa	18%	195.000.000,00	
	2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/Kota dan Desa	1 Dokumen	195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian penduduk yg tersedia di tingkat Provinsi	2 Dokumen	65.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/Kota dan Desa	2Dokumen	100.000.000,00	
	2	14	02	1.02	0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)											
							Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/Kota dan Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
119	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	65,36 %	220.000.000,00						65,37 %	475.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	17,50 %	160.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pembina dan Pengelola/Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	17,75%	395.000.000,00	
	2	14	03	1.01	0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal											
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pembina dan Pengelola/Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Laporan	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	1.01	0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	85.000.000,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pembina dan Pengelola/Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Dokumen	190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja											
							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	0 Daerah	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pembina dan Pengelola/Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Daerah	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesertaan ber-KB	26 %	60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pembina dan Pengelola/Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	26,5%	80.000.000,00	
	2	14	03	1.02	0001	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pembina dan Pengelola/Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
120	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	26 %	971.143.025,00						26,5 %	1.235.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah	18 %	793.143.025,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pembina/Pengelola /Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	18,5%	935.000.000,00	
	2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											
	2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pembina/Pengelola /Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Organisasi	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pembina/Pengelola /Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Organisasi	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	1.01	0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK											
							Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	633.143.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pembina/Pengelola /Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Dokumen	765.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS	26 %	178.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pembina/Pengelola /Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	26,5%	300.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	14	04	1.02	0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga											
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pembina/Pengelola /Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Laporan	170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga											
							Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Organisasi	103.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Pembina/Pengelola /Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Organisasi	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X					NON URUSAN			1.485.500.000,00							2.048.917.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.485.500.000,00							2.048.917.000,00	
121	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	95,5 Nilai 79,5 Nilai 100 %	1.485.500.000,00						100% 96Nilai 80Nilai	2.048.917.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	157.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengelola Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	100%	351.411.500,00	
	X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	8.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengelola Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	1 Dokumen	9.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengelola Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	1 Dokumen	9.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengelola Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	1 Dokumen	8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengelola Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	1 Dokumen	8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengelola Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	6 Laporan	315.411.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 %	95.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. ASN Lingkup DP3A Dalduk KB 2. Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel	100%	105.000.000,00	
	X	XX	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. ASN Lingkup DP3A Dalduk KB 2. Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel	2 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. ASN Lingkup DP3A Dalduk KB 2. Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel	12 Laporan	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. ASN Lingkup DP3A Dalduk KB 2. Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan kinerja ASN	79 Rata-rata Nilai	30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB	79,5Rata-rata Nilai	100.000.000,00	
	X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB	1 Paket	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB	3 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	458.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	90%	892.505.500,00	
	X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	5 Paket	9.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	2 Paket	47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	4 Laporan	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	305.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	5 Laporan	736.005.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	100 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	90 %	195.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Dalduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	95%	200.000.000,00	
	X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1550 Laporan	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Dalduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	1500 Laporan	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Dalduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	3 Laporan	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Dalduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	5 Laporan	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipeliharah	100 %	550.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1 Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Dalduk KB Prov. Sulsel 2 Kantor DP3A Dalduk KB dan UPT.PPA Prov. Sulsel	100%	400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1 Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Dalduk KB Prov. Sulsel 2 Kantor DP3A Dalduk KB dan UPT.PPA Prov. Sulsel	12 Unit	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS KETAHANAN PANGAN			**49.189.105.427,00**							**30.077.181.125,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.551.329.427,00							29.623.609.216,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			48.551.329.427,00							29.623.609.216,00	
122	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	0.75 Nilai 100 % 100 Nilai	20.586.074.862,00						100% 100Nilai 0.80Nilai	23.109.749.216,00	
	2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	336.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	5Dokumen	336.600.000,00	
	2	09	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	234.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	2 Dokumen	234.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	3 Laporan	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	15.338.726.653,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12Laporan	17.109.258.936,00	
	2	09	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	15.214.726.653,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	110 Orang/ Bulan	16.984.258.936,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	31.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	31.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Laporan	4.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Laporan	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	09	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	20 Unit	38.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20Unit	38.100.000,00	
	2	09	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	26.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	26.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	151.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	3Laporan	206.400.000,00	
	2	09	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Paket	110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	2 Orang	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	23.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	30 Orang	23.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	23.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	30 Orang	23.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	4 Unit	517.320.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	4Unit	530.320.000,00	
	2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Paket	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	109.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Paket	109.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Paket	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Paket	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	19.880.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.880.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	303.440.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	4 Laporan	303.440.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit	650.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	2Unit	975.000.000,00	
	2	09	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Paket	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	2.719.833.009,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	6Laporan	3.029.975.080,00	
	2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	645.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	3 Laporan	671.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.044.833.009,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Laporan	2.318.725.080,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Unit	834.095.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	15Unit	884.095.200,00	
	2	09	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	215.929.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	14 Unit	315.929.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	58.166.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	58.166.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	5 Unit	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	4 Unit	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Unit	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
123	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat yang Aktif	76 %	3.849.688.450,00						77%	830.000.000,00	
	2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Diadakan	4 Unit	3.849.688.450,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat, Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani	4Unit	830.000.000,00	
	2	09	02	1.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya											
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	18 Unit	3.644.688.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat, Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani	2 Unit	325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	02	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	105.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat, Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani	2 Laporan	105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	02	1.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
							Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	2 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat, Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani	2 Unit	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
124	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Ketersediaan Beras (%)	356,574	16.475.962.815,00						356,574	3.272.560.000,00	
							Tingkat Ketersediaan Jagung (%)	54,612							54,612		
							Tingkat Ketersediaan Kedelai (%)	17,74							17,74		
							Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	3543,56							3543,56		
							Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)	127,362							127,362		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Angka Kecukupan Energi (kkal/orang/hari)	2100							2100		
							Angka Kecukupan Protein (gr/orang/hari)	57							57		
							Persentase Cadangan Pangan	0,015							0,015		
	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Distribusi Pangan, Informasi Neraca dan Harga Pangan Pokok Strategis	3 Dokumen	10.185.506.751,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	3Dokumen	2.208.160.000,00	
	2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	20 Laporan	678.016.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya											
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	60 Dokumen	6.075.369.351,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	1.207.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	14 Laporan	1.062.709.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis											
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi											
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	12 Laporan	513.922.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi											
							Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	440.122.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	173.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	12 Unit	435.367.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Unit	297.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi											
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	380.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Laporan	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Masyarakat, Pesantren, Sekolah, Kelompok Unit Usaha, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi	144 Ton	4.830.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Masyarakat, Mitra Perangkat Daerah	148Ton	290.000.000,00	
	2	09	03	1.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal											
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Masyarakat, Mitra Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	144 Ton	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Masyarakat, Mitra Perangkat Daerah	148 Ton	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.02	0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	144 Ton	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Masyarakat, Mitra Perangkat Daerah	148 Ton	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0,5 Ton	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Masyarakat, Mitra Perangkat Daerah	0.5 Ton	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	09	03	1.02	0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
							Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	266 Ton	4.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Masyarakat, Mitra Perangkat Daerah	13 Ton	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
							Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Masyarakat, Mitra Perangkat Daerah	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Dokumen	30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah	1Dokumen	30.000.000,00	
	2	09	03	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Data Angka Kecukupan Gizi	2 Data	1.430.456.064,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Masyatakat	2Data	744.400.000,00	
	2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
							Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Masyatakat	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	7 Laporan	988.325.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Masyatakat	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Masyatakat	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan	192.130.764,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Masyatakat	1 Laporan	194.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
125	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5.80 %	4.840.647.700,00						5,60%	1.936.300.000,00	
	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	347.101.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota	1Dokumen	100.000.000,00	
	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota											
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	347.101.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Intervensi Bantuan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	30 %	4.493.545.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kelompok Tani, Kabupaten/Kota, Masyarakat	30%	1.836.300.000,00	
	2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kelompok Tani, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	1.02	0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi											
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	20 Dokumen	3.411.740.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kelompok Tani, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	1.636.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	709.703.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kelompok Tani, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi											
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	347.101.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kelompok Tani, Kabupaten/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
126	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	2.798.955.600,00						100 %	475.000.000,00	
	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar	2 Dokumen	2.798.955.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kelompok Tani, Unit Usaha, Masyatakat	2Dokumen	475.000.000,00	
	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan											
							Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Sertifikat	319.080.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kelompok Tani, Unit Usaha, Masyatakat	2 Sertifikat	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan											
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kelompok Tani, Unit Usaha, Masyatakat	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kelompok Tani, Unit Usaha, Masyatakat	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kelompok Tani, Unit Usaha, Masyatakat	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											
							Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kelompok Tani, Unit Usaha, Masyatakat	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											
							Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Dokumen	1.554.875.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kelompok Tani, Unit Usaha, Masyatakat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X					NON URUSAN			637.776.000,00							453.571.909,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			637.776.000,00							453.571.909,00	
127	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 % 100 Nilai 0.75 Nilai	637.776.000,00						100% 100Nilai 0.80Nilai	453.571.909,00	
	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit	637.776.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2Unit	453.571.909,00	
	X	XX	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	637.776.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	453.571.909,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			**158.245.319.115,00**							**168.733.339.882,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.645.000.000,00							8.660.000.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.645.000.000,00							8.660.000.000,00	
128	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	83,33 %	100.000.000,00						100%	100.000.000,00	
	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pemenuhan dokumen telaah RPPLH	80 %	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	100%	100.000.000,00	
	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi											
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan	0 %	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	0%	0	
	2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD											
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	0 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	0 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi Penurunan Emisi GRK sektor persampahan dan limbah	16.435.36 Ton CO2eq	1.500.000.000,00						17697.36 Ton CO2eq	3.650.000.000,00	
	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH	24 Kab/Kota	1.300.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	24Kab/Kota	2.950.000.000,00	
	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut											
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	3 Dokumen	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	3 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi											
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1300 Dokumen	500.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	1350 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang direhabilitasi	2 Lokasi	200.000.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	2Lokasi	700.000.000,00	
	2	11	03	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi											
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	2 Kegiatan	700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
130	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	94,11 %	325.000.000,00						100%	750.000.000,00	
	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola	400 Jenis	325.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	425Jenis	750.000.000,00	
	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	04	1.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya											
							Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 Ha	150.000.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	27 Ha	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	04	1.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	15 Ha	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	112 Ha	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
131	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah yang dikelola	98,66 %	100.000.000,00						98,67 %	100.000.000,00	
	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3	2300000 Ton	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	2400000Ton	100.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	250 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
132	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rasio Tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	40,63 %	100.000.000,00						41,17 %	800.000.000,00	
	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	65 Usaha/Kegiatan	100.000.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	70Usaha/Kegiatan	800.000.000,00	
	2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH											
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	3 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	10 Dokumen	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	170 Badan Usaha	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
133	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	66,67 %	50.000.000,00						100%	200.000.000,00	
	2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan	10 Masyarakat Hukum Adat	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	15Masyarakat Hukum Adat	200.000.000,00	
	2	11	07	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	3 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	15 Dokumen	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
134	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	86,7 %	150.000.000,00						100%	1.000.000.000,00	
	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	1304 Lembaga	150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1504Lembaga	1.000.000.000,00	
	2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup											
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	24 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	24 Dokumen	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	08	1.01	0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi											
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	100 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1000 Orang	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	08	1.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	120 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	480 Keluarga	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
135	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	94,11 %	50.000.000,00						100%	360.000.000,00	
	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	160 Penghargaan	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	170Penghargaan	360.000.000,00	
	2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	25 Entitas	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah	170 Entitas	360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
136	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	120.000.000,00						100 %	700.000.000,00	
	2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani	32 Rekomendasi	120.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	34Rekomendasi	700.000.000,00	
	2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi											
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	3 Perkara	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	17 Perkara	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	3 Pengaduan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	17 Pengaduan	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
137	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentasesampah perkotaan yang tertangani	57 %	150.000.000,00						58%	1.000.000.000,00	
	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional	40 %	150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	50%	1.000.000.000,00	
	2	11	11	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional											
							Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			155.600.319.115,00							160.073.339.882,00	
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			155.600.319.115,00							160.073.339.882,00	
138	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata nilai SKP ASN perangkat daerah Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	95 95 95	143.832.517.799,00						95 95 95	145.153.595.882,00	
	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaaan penganggran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	25 Dokumen	400.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	25Dokumen	975.000.000,00	
	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	2 Dokumen	340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	70.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	16 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	4 Laporan	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	15 Laporan	123.286.760.348,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	15Laporan	125.976.802.824,00	
	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	897 Orang/ Bulan	123.143.760.348,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	897 Orang/ Bulan	125.558.802.824,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	12 Dokumen	36.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	24 Dokumen	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Laporan	140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	14 Laporan	95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	6 Laporan	90.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	6Laporan	235.000.000,00	
	3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	10 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	4 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	1.609.030.000 Rp.	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1.609.030.000 Rp.	46.000.000,00	
	3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	12 Laporan	6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	7 Laporan	595.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	7Laporan	853.760.000,00	
	3	28	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	2 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	798 Paket	440.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	798 Paket	440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	88.760.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	70 Orang	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	165 Orang	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Laporan	1.715.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	7Laporan	2.108.843.501,00	
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	2 Paket	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	450.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	3 Paket	663.843.501,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	3 Paket	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	5 Paket	270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	12 Laporan	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	100 Laporan	650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	10 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	20 Unit	525.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	25Unit	1.920.000.000,00	
	3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	10 Unit	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	2 Paket	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	5 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Unit	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	5 Unit	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	11.749.857.451,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	4Laporan	11.337.289.557,00	
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	4 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.004.227.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	12 Laporan	555.786.110,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.690.630.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	12 Laporan	10.726.503.447,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diperlihara	8 Laporan	5.460.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	8Laporan	1.700.900.000,00	
	3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	31 Unit	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	499 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	499 Unit	840.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	2.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	5 Unit	2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	38.400.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	30 Unit	38.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	1 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	4 Unit	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	4 Unit	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah											
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	20 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Instansi Pemerintah	20 Ha	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	28,23	8.759.881.316,00						35,23	10.511.824.000,00	
							Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	11,97							12,02		
							Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	0,028							0,027		
							Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	3,63							3,73		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase penataan pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang tepat sasaran	0,01 %	125.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	0,01%	175.000.000,00	
	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan											
							Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1 Unit	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan											
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan KPH yang disahkan	100 %	58.560.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat	100%	58.560.000,00	
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan											
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	24 Dokumen	58.560.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat	24 Dokumen	58.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu dari pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung Jumlah produksi hasil hutan kayu dari pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	4000 Ton 43000 M3	120.029.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	43000M3 4000Ton	120.160.000,00	
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi											
							Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung											
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	30.029.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	30.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi											
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	10 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	10 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	10 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara dan luas pemeliharaan tanaman	241 Ha	3.205.503.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	337Ha	5.439.264.000,00	
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)											
							Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara											
							Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	150 Ha	1.836.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	230 Ha	3.349.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara											
							Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	113.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	20 Ha	260.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan											
							Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan											
							Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	35 Ha	854.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	35 Ha	1.188.876.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan											
							Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	2 Unit	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	3 Unit	21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug											
							Jumlah Gully Plug yang Terbangun	6 Unit	59.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	10 Unit	98.820.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan											
							Jumlah Dam Penahan yang terbangun	6 Unit	227.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	6 Unit	465.218.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan	1.780.029 Ha	2.338.289.316,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1.780.029Ha	1.758.840.000,00	
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
							Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	2 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
							Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	24 Laporan	304.971.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	24 Laporan	348.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan											
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	1780029 Ha	1.823.318.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1.780.029 Ha	1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal											
							Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	2 Operasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	2 Operasi	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu dari perizinan IUIPHHBK	1300 Ton	40.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	1300Ton	40.000.000,00	
	3	28	03	1.06	0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi											
							Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Managemen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	1 Unit Managemen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi											
							Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	1 Unit Managemen	30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	1 Unit Managemen	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	40000 M3	160.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	40000M3	207.500.000,00	
	3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi											
							Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	4 Laporan	147.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi											
							Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1 Unit Managemen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	1 Unit Managemen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi											
							Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	1 Unit Managemen	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	1 Unit Managemen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase benih/bibit yang tersertifikasi	70 %	2.712.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	70%	2.712.500.000,00	
	3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih											
							Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	7 Sertifikat	52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	7 Sertifikat	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih											
							Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	3 Sertifikat	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	3 Sertifikat	17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit											
							Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	7 Sertifikat	52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	7 Sertifikat	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit											
							Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	12 Laporan	52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	12 Laporan	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih											
							Luas Sumber Benih yang Dibangun	1 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1 Ha	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan											
							Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	480000 Batang	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat		2.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan											
							Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	5 Unit Usaha	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	5 Unit Usaha	37.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
140	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah laporan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1Laporan	150.000.000,00	
	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
141	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) Kelompok Tani Hutan	2,6 %	2.657.920.000,00						2,81 %	4.057.920.000,00	
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH Madya yang difasilitasi Jumlah KTH pemula menjadi KTH Madya	20 Kelompok 24 Kelompok	2.657.920.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	24Kelompok 24Kelompok	4.057.920.000,00	
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	53 Kelompok	2.291.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	53 Kelompok	3.691.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan											
							Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	243 Orang	166.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	243 Orang	166.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial											
							Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Hektar	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	2000 Hektar	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
142	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif	25,00 %	200.000.000,00						29,17 %	200.000.000,00	
	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase forum DAS yang terbentuk di Kabupaten/Kota	25 %	200.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	29%	200.000.000,00	
	3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS											
							Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	1 Lembaga	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah											
							Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	4 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta	4 Dokumen	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						UPT Pengelolaan Limbah B3			5.200.000.000,00							8.136.317.909,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.200.000.000,00							8.136.317.909,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			5.200.000.000,00							8.136.317.909,00	
143	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti Rata-rata nilai SKP ASN perangkat daerah	95 % 95 % 95 %	5.200.000.000,00						95% 95% 95%	8.136.317.909,00	
	2	11	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan pengelolaan Limbah B3 UPTD PLB3	1 Laporan	5.200.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1Laporan	8.136.317.909,00	
	2	11	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.200.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1 Unit Kerja	8.136.317.909,00	UPT PENGELOLAAN LIMBAH B3
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			**11.711.965.786,00**							**0**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.711.965.786,00							0	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11.711.965.786,00							0	
144	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 100 100	11.411.959.223,00						100 100 100	0	
	2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	175.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	14Dokumen	0	
	2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Dokumen	7.798.087.590,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	0	
	2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	7.698.087.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	55 Orang/ Bulan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	83.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	14 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	1 Laporan	19.065.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3Unit	0	
	2	12	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.065.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	62.270.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4Laporan	0	
	2	12	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	44.530.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Paket	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	354.500,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	16.849.900,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	536.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	50 Orang	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	8 Dokumen	354.192.563,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5Unit	0	
	2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.518.200,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8.476.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	10.054.800,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Paket	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.048.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Paket	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	67.256.800,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	231.583.863,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12.882.900,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.772.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	1.400.013.126,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13Unit	0	
	2	12	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	750.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	650.013.126,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.271.951.944,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2Laporan	0	
	2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	1.271.451.944,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	331.378.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	26Unit	0	
	2	12	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	170.260.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.918.600,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	28.200.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
145	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persentase Penduduk ber- KTP per Satuan Penduduk	52 % 100 % 99.50 % 99.50 %	60.000.000,00						99.65% 99.65% 100% 54%	0	
	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen pelayanan yang mendapatkan an Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	5.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3Dokumen	0	
	2	12	02	1.01	0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2Laporan	0	
	2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1 Laporan	5.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2Laporan	0	
	2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk											
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
146	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan	100	90.006.563,00						100	0	
							Persentase Bayi ber-Akta Kalahiran	97.80%							98		
							Persentase Pasangan ber-Akta Nikah yang dilaporkan	39.95%							40		
							Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan Akta Kelahiran	96.80%							97		
							Persentase Penerbitan Akta Cerai yang dilaporkan	100							100		
							Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	96.80%							97		
	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	50.000.000,00			-	-	-	-	0	
	2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	2 Laporan	7.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3Laporan	0	
	2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil											
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil											
							Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Hasil Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	33.006.563,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2Laporan	0	
	2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	33.006.563,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
147	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100 %	137.000.000,00						100 %	0	
	2	12	04	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kependudukan Skala Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Dokumen	0	
	2	12	04	1.01	0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumah Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2 Laporan	35.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3Dokumen	0	
	2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2 Laporan	52.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2Laporan	0	
	2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	30 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	60 Orang	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
148	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Profil Kependudukan	100 %	13.000.000,00						100 %	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi	1 Dokumen	13.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Dokumen	0	
	2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi											
							Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen	13.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**23.038.026.718,00**							**29.421.853.142,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.997.026.718,00							29.254.957.574,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			22.997.026.718,00							29.254.957.574,00	
150	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja (Evaluasi Renja PD) Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 Nilai 100 Nilai 100 %	16.034.984.723,00						100Nilai 100% 100Nilai	21.628.853.207,00	
	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	262.071.276,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	16Dokumen	718.242.795,00	
	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	80.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	251.224.092,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	40.270.579,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.008.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	36.009.743,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	37.023.792,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.050.526,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Laporan	233.714.586,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12.498.000.797,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Dokumen	16.688.693.863,00	
	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	12.418.000.797,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	85 Orang/ Bulan	16.269.128.899,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	70.685.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	123.901.109,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	14 Laporan	224.978.112,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	54 unit	5.004.862,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	54unit	48.365.509,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	13	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.004.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	48.365.509,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	15.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	262.561.306,00	
	2	13	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Unit	130.056.668,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Paket	120.895.885,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		11.608.752,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun											
							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas											
							Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN											
							Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	75 Unit	466.438.823,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	75Unit	816.111.512,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 Paket	7.201.103,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Paket	8.719.444,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	407.196.130,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Paket	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Paket	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.237.720,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Paket	45.221.472,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Paket	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	56.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	235.411.128,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	63.563.337,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	6 Unit	25.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6Unit	111.547.490,00	
	2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	57.242.370,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar											
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor											
							Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	54.305.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	36 Laporan	2.658.468.963,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	36Laporan	2.269.546.996,00	
	2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	29.726.964,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.611.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	444.416.881,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	507.141.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.760.716.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.795.403.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	56 Unit	105.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	56Unit	713.783.732,00	
	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	643.175.269,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar											
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor											
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	13.366.093,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	57.242.370,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah											
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
151	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	14,56	260.000.000,00						15,88	351.000.000,00	
							Persentase pengentasan desa tertinggal	5,95							4,63		
	2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang Difasilitasi	180 Desa	260.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	90Desa	351.000.000,00	
	2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	1.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa											
							jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
152	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	2,64 %	150.000.000,00						3,97 %	1.053.000.000,00	
	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa/ Pihak Ketiga	30 Desa	150.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	60Desa	1.053.000.000,00	
	2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	20 Dokumen	351.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	20 Dokumen	351.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan											
							jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	20 Dokumen	351.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
153	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang di Fasilitasi	22,94 %	1.125.000.000,00						28,76	4.525.000.302,00	
	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1000 Aparat	1.125.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2000Aparat	4.525.000.302,00	
	2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa											
							Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	3 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	144.830.351,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa											
							jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	8 Dokumen	468.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa											
							jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	120 Orang	468.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	1.055.169.951,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa											
							jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	60 Orang	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	120 Orang	468.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD											
							Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	60 Orang	200.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	120 Orang	468.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0013	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa											
							Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	0 Desa	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	0 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	1.01	0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
154	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Difasilitasi dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1,64	5.427.041.994,00						1,67	1.697.104.064,00	
							Prosentase Posyandu Aktif;	100							100		
							Prosentase PKK Aktif	100							100		
							Persentase BUM Desa Yang Difasilitasi	3,97							5,29		
	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Lembaga Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan	20 Kegiatan	5.427.041.994,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	25Kegiatan	1.697.104.064,00	
	2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat											
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	143.104.064,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	15 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	20 Lembaga	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	400.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	468.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	221.950.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Laporan	384.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5 Dokumen	468.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Laporan	4.550.091.882,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	10 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	30 Keluarga	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X					NON URUSAN			41.000.000,00							166.895.567,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			41.000.000,00							166.895.567,00	
155	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja (Evaluasi Renja PD) Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 Nilai 100 Nilai 100 %	41.000.000,00						100Nilai 100% 100Nilai	166.895.567,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	36.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	16Dokumen	42.003.735,00	
	X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	36.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	42.003.735,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Dokumen	124.891.832,00	
	X	XX	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24 Dokumen	124.891.832,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						DINAS PERHUBUNGAN			**75.709.496.851,00**							**61.356.615.528,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.104.077.048,00							52.326.615.528,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			68.104.077.048,00							52.326.615.528,00	
154	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	32.054.077.048,00						100	4.660.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	650.482.049,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	960.000.000,00	
	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.482.049,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	28.153.594.999,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	200.000.000,00	
	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198 Orang/ Bulan	27.953.594.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	2	15	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	250.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	700.000.000,00	
	2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	222 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.400.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	250.000.000,00	
	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	300.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	2	15	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	550.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	700.000.000,00	
	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	750.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.850.000.000,00	
	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
155	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	35,27	18.350.000.000,00						36,76	16.450.000.000,00	
							Prosentase Layanan Angkutan Darat;	97							97		
							Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B Pertahun	688548,2864							748666,0064		
							Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	65,454							67,254		
							Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	0,328							0,348		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	
	2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi											
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi											
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-	800.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	6.400.000.000,00	
	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi											
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	9 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan											
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	20 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100 Unit	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-	750.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	6.200.000.000,00	
	2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B											
							Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		4.325.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B											
							Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	3 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		975.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	550.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	900.000.000,00	
	2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi											
							Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi											
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi											
							Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	-	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	300.000.000,00	
	2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin											
							Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	150.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	500.000.000,00	
	2	15	02	1.07	0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ											
							Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum											
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	15.000.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	400.000.000,00	
	2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi											
							Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48 Unit	14.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	400.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	600.000.000,00	
	2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	
	2	15	02	1.10	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	
	2	15	02	1.12	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	200.000.000,00	
	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
							Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	24 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	400.000.000,00	
	2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi											
							Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	250.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	250.000.000,00	
	2	15	02	1.15	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
156	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	1950252,984	17.475.000.000,00						2120531,184	29.816.615.528,00	
							Jumlah pelabuhan Pengumpan yang beroperasi	11							11		
	2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	-	-	150.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Dokumen	200.000.000,00	
	2	15	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
							Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	228 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	228 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	-	-	150.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	50Dokumen	200.000.000,00	
	2	15	03	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	12 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	75.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	
	2	15	03	1.05	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi											
							Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi											
							Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-	-	200.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	
	2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	450.000.000,00	
	2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional											
							Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.08	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional											
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional											
							Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	16.650.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	28.766.615.528,00	
	2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	3 Unit	14.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		17.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional											
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	11 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	9 Unit	9.966.615.528,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											
							Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	6 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	9 Laporan	1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	2	15	03	1.11	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
							Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.11	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Rencana Perkeretaapian Provinsi	1	225.000.000,00						1	1.400.000.000,00	
	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.100.000.000,00	
	2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian											
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	1.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	225.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	200.000.000,00	
	2	15	05	1.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	1.03	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	
	2	15	05	1.06	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	1.06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	X					NON URUSAN			7.605.419.803,00							9.030.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.605.419.803,00							9.030.000.000,00	
158	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	7.605.419.803,00						100	9.030.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.305.419.803,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	9.030.000.000,00	
	X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.305.419.803,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		9.030.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	300.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	X	XX	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			**48.296.150.871,00**							**35.560.369.750,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.296.150.871,00							35.560.369.750,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			47.496.150.871,00							32.964.004.577,00	
159	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 100 99	28.996.150.871,00						100 100 100	15.383.147.887,00	
	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00			-	-	-	1Dokumen	155.000.000,00	
	2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	11.801.239.324,00			-	-	-	1Laporan	11.377.399.026,00	
	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ Bulan	11.701.239.324,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	81 Orang/ Bulan	11.363.226.761,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	14.172.265,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	1819 Unit	49.999.900,00			-	-	-	1824Unit	22.000.000,00	
	2	16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	67.123.000,00			-	-	-	2Laporan	374.500.000,00	
	2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4.778.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	29.945.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	109.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	32.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Orang	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	450 Orang 103 Unit	1.043.084.449,00			-	-	-	500Orang 105Unit	2.270.632.861,00	
	2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	37.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.084.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Laporan	11.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	699.999.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	2.036.632.861,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	78 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit	444.409.542,00			-	-	-	5Unit	238.600.000,00	
	2	16	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	414.409.542,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	177.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	61.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	5.115.469.506,00			-	-	-	2Laporan	30.000.000,00	
	2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.065.469.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	76 Unit	10.374.825.150,00			-	-	-	76Unit	915.016.000,00	
	2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	344.825.150,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	16 Unit	800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	65.016.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
160	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	45 Nilai	12.000.000.000,00						50 Nilai	11.820.000.000,00	
	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Layanan Informasi Publik	7 Layanan	12.000.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7Layanan	11.820.000.000,00	
	2	16	02	1.01	0014	Relasi Media											
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	5.706.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten											
							Jumlah Konten Informasi Publik	700 Konten	844.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.840.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik											
							Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1.150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1000 Komunitas	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik											
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		570.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik											
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		910.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	10 Media	1.320.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		3.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
161	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Unit kerja yang terkoneksi jaringan internet intra pemerintah Sulawesi Selatan Persentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi	45 % 55 %	6.500.000.000,00						60% 47%	5.760.856.690,00	
	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aplikasi Yang Memanfaatkan Sub Domain sulselprov.go.id	79 Aplikasi	6.500.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	80Aplikasi	5.760.856.690,00	
	2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah											
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	6 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		296.553.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah											
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	150 Aplikasi	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		14.574.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE											
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE											
							Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi											
							Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	36 perangkat daerah	5.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		4.799.729.090,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			500.000.000,00							1.779.474.574,00	
162	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	92 %	500.000.000,00						94%	1.779.474.574,00	
	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Tersedia	328 Dataset	500.000.000,00			-	-	-	330Dataset	1.779.474.574,00	
	2	20	02	1.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang	165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		640.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral											
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	35 Persentase	135.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		460.474.574,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional											
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar											
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia											
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			300.000.000,00							816.890.599,00	
163	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	2.75 Nilai	300.000.000,00						3 Nilai	816.890.599,00	
	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Area Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	4 Area	268.000.000,00			-	-	-	4Area	685.890.599,00	
	2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi											
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	81.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	174.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	57.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	101.390.599,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	36 Perangkat Daerah	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	39 Perangkat Daerah	366.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi Pada Pemerintah Daerah Provinsi	3 Entitas	32.000.000,00			-	-	-	3Entitas	131.000.000,00	
	2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	36 Perangkat Daerah	32.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	39 Perangkat Daerah	131.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			**25.586.204.578,00**							**28.325.556.306,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.341.204.578,00							28.140.556.306,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			25.341.204.578,00							28.140.556.306,00	
164	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nila SKP Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program PD Persentase Temuan LHP yang selesai di tindak lanjuti	91,65 Angka 98 Angka 100 %	16.954.832.360,00						91,65 98 100	20.660.556.306,00	
	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 Persen	74.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	55.000.000,00	
	2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan secara tepat waktu	100 Persen	11.044.142.213,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	12.968.000.000,00	
	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	11.029.142.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.950.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Barang Miliki Daerah Tepat Waktu	100 Persen	16.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	29.000.000,00	
	2	17	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.700.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	17.000.000,00	
	2	17	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	140.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	238.000.000,00	
	2	17	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		23.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	890.833.238,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.573.556.306,00	
	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	490.833.238,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		768.556.306,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	716.138.677,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	350.000.000,00	
	2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	616.138.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.483.018.232,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	4.150.000.000,00	
	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.683.018.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	580.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.280.000.000,00	
	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		950.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		190.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
165	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	12 %	300.000.000,00						12 %	650.000.000,00	
							Prosentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	10							10		
	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Derah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	45 Unit Usaha	150.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	-	400.000.000,00	
	2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Derah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	50 unit	150.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	-	250.000.000,00	
	2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
166	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan di periksa Persentase Koperasi yang meningkat kepatuhannya	20 % 20 %	355.000.000,00						20 % 20 %	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 Koperasi	180.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	-	0	
	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi											
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di awasi dan di periska	50 Unit Usaha	175.000.000,00			-	-	-	-	0	
	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							-	-	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
167	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	20 %	400.000.000,00						20 %	0	
							Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	20 %							20 %		
	2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	20 %	400.000.000,00			-	-	-	-	0	
	2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan											
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	120 Unit Usaha	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
168	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	20 %	2.898.265.000,00						20 %	1.500.000.000,00	
	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang	2.898.265.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	-	1.500.000.000,00	
	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	2.898.265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
169	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	20 %	400.000.000,00						20 %	430.000.000,00	
	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	20 %	400.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	-	430.000.000,00	
	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	50 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
170	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	10 %	2.223.107.218,00						10 %	900.000.000,00	
	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1000 Unit Usaha	2.223.107.218,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	900.000.000,00	
	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan											
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1000 Unit Usaha	1.629.827.682,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan											
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 Orang	593.279.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
171	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	10	1.810.000.000,00						10	4.000.000.000,00	
							Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	3							3		
	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	100 orang	1.810.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	4.000.000.000,00	
	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi											
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1000 Unit Usaha	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM											
							Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	275 Orang	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	X					NON URUSAN			245.000.000,00							185.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			245.000.000,00							185.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nilau SKP Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program PD Persentase Temuan LHP yang selesai di tindak lanjuti	91,65 98 100	245.000.000,00						91,65 98 100	185.000.000,00	
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 Persen	225.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	165.000.000,00	
	X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan secara tepat waktu	100 Persen	20.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	20.000.000,00	
	X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			**19.056.479.780,00**							**20.115.000.000,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.030.479.780,00							20.078.000.000,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			19.030.479.780,00							20.078.000.000,00	
173	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-rata Capaian Indikator kinerja Program Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 100 86	16.038.388.480,00						88 100 100	16.643.000.000,00	
	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	311.862.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	9Dokumen	369.000.000,00	
	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.495.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.366.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Laporan	27.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Laporan	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Laporan	12.786.515.776,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	13.190.000.000,00	
	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	12.636.515.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	88 Orang/ Bulan	13.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola oleh perangkat daerah	1423 Unit	10.972.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1423Unit	14.000.000,00	
	2	18	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.967.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.005.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	49.996.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Laporan	57.000.000,00	
	2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	88 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	24.996.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	27.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang di fasilitasi Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana umum	40 Orang 17 Unit	557.363.700,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	17Unit 40Orang	590.000.000,00	
	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	20.008.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	15 Paket	23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	49.395.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	38.449.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Paket	42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	50.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Laporan	53.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	399.506.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Laporan	430.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 Unit	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Unit	0	
	2	18	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	1.913.278.204,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	1.990.000.000,00	
	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	677.736.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	690.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.235.541.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1423 Unit	408.398.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1423Unit	433.000.000,00	
	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	243.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Unit	260.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	135.331.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Unit	140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.451.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	7.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
174	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	90 %	540.000.100,00						93%	830.000.000,00	
	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitasi/insentif yang menjadi kewenangan daerah provinsi	100 %	220.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	480.000.000,00	
	2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi											
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase wilayah sulawesi selatan yang telah disusun kedalam peta potensi investasi	100 %	320.000.100,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	350.000.000,00	
	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi											
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)											
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2 Daerah	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi											
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	320.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
175	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun) Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	7 (Rp.Triliun) 8 Rp. Triliun	300.000.000,00						8 (Rp.Triliun) 9 Rp. Triliun	400.000.000,00	
	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase calon investor yang masuk	100 %	300.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	400.000.000,00	
	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Dokumen	230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
176	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	93 %	410.000.000,00						95%	440.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang diterbitkan	100 %	410.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	440.000.000,00	
	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120 Pelaku Usaha	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	28000 Pelaku Usaha	130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
							Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	28000 Pelaku Usaha	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	120 Pelaku Usaha	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko											
							Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	28000 Kegiatan Usaha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	28000 Kegiatan Usaha	130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
177	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	59 %	1.642.091.200,00						60%	1.710.000.000,00	
	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	100 %	1.642.091.200,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	1.710.000.000,00	
	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal											
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan usaha	500.729.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	40 Kegiatan usaha	530.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	900 Kegiatan usaha	265.363.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1000 Kegiatan usaha	280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	875.998.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	320 Pelaku Usaha	900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
178	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	88 %	100.000.000,00						90%	55.000.000,00	
	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	100 %	100.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100%	55.000.000,00	
	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	X					NON URUSAN			26.000.000,00							37.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			26.000.000,00							37.000.000,00	
179	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-rata Capaian Indikator kinerja Program Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 100 86	26.000.000,00						88 100 100	37.000.000,00	
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	26.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	9Dokumen	37.000.000,00	
	X	XX	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**66.033.391.740,00**							**464.417.533.565,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			64.893.391.740,00							462.717.533.565,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			64.893.391.740,00							462.717.533.565,00	
180	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata nilai SKP ASN perangkat daerah Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program	100 100 100	19.885.324.440,00						100 100 100	23.875.000.000,00	
	2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	792.116.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	12dokumen	825.000.000,00	
	2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	532.116.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	7 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	12 Laporan	70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	7 Laporan	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkata daerah	48 laporan	14.888.614.793,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Gaji dan tunjangan, Laporan keuangan	48laporan	16.285.000.000,00	
	2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/ Bulan	14.648.614.793,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Gaji dan tunjangan, Laporan keuangan	117 Orang/ Bulan	16.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Gaji dan tunjangan, Laporan keuangan	12 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	60.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Gaji dan tunjangan, Laporan keuangan	12 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Gaji dan tunjangan, Laporan keuangan	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Gaji dan tunjangan, Laporan keuangan	4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	60.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Gaji dan tunjangan, Laporan keuangan	18 Laporan	80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Gaji dan tunjangan, Laporan keuangan	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola perangkat daerah	10 unit	35.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kantor	10unit	45.000.000,00	
	2	19	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kantor	4 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kantor	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kantor	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	30 laporan	194.406.252,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kepegawaian	30laporan	650.000.000,00	
	2	19	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	156 Paket	144.406.252,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kepegawaian	156 Paket	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Laporan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana umum	6 unit	1.130.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	6unit	1.720.000.000,00	
	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	200.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	10 Paket	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	12 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Administrasi umum perangkat daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	5 unit	150.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	5unit	800.000.000,00	
	2	19	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	2 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	2 Paket	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	1 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	2 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 laporan	1.508.746.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Jasa penunjang urusan perangkat daerah	24laporan	1.600.000.000,00	
	2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.508.746.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Jasa penunjang urusan perangkat daerah	12 Laporan	1.600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	15 unit	1.186.439.895,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	15unit	1.950.000.000,00	
	2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	676.439.895,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	4 Unit	600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	160.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	6 Unit	300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	2 Unit	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	22 Unit	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	2 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	2 Unit	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	2 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	2 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Barang milik daerah	3 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
181	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	1 % 5 %	1.965.000.000,00						5,50% 1,50%	4.450.000.000,00	
	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	1.270 orang	1.665.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	1.460orang	2.950.000.000,00	
	2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi											
							Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang	680.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	460 Orang	800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	16 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	16 Unit	400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda											
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	11 Orang	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi											
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi											
							Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	100 Persentase	400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi											
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	215 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	250 Orang	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi											
							Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	150 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	200 Orang	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi											
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	420 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemuda	460 Orang	600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya	49 organisasi	300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi/lembaga kepemudaan	49organisasi	1.500.000.000,00	
	2	19	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda											
							Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100 Persentase	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi/lembaga kepemudaan	100 Persentase	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi											
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1 Organisasi	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi/lembaga kepemudaan	1 Organisasi	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
182	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan Prestasi olahraga	75 % 0,11 %	42.293.067.300,00						100 % 0,5 %	432.992.533.565,00	
	2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet pelajar potensial	370 orang	4.293.067.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atlet P2OTB, PPLP, dan SMANKO	375orang	381.992.533.565,00	
	2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha											
							Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atlet P2OTB, PPLP, dan SMANKO	3 Unit	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	8 Dokumen	770.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atlet P2OTB, PPLP, dan SMANKO	8 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi											
							Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	6 Unit	3.023.067.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atlet P2OTB, PPLP, dan SMANKO	6 Unit	377.992.533.565,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah even olahraga	30 even	19.200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kejuaraan multi even dan single even	30even	23.000.000.000,00	
	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	290 Orang	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kejuaraan multi even dan single even	300 Orang	12.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi											
							Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kejuaraan multi even dan single even	1 Kegiatan	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi											
							Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	30 Kegiatan	17.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kejuaraan multi even dan single even	25 Kegiatan	10.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi	100 %	2.300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atllet dan pelatih daerah	100%	8.000.000.000,00	
	2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah											
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	250 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atllet dan pelatih daerah	520 Orang	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga											
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	120 Orang	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atllet dan pelatih daerah	135 Orang	5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)											
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atllet dan pelatih daerah	2 Pelatda	300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi											
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atllet dan pelatih daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi											
							Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	325 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Atllet dan pelatih daerah	350 Orang	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan organisasi olahraga	100 %	16.500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi olahraga	100%	20.000.000.000,00	
	2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait											
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2 Dokumen	16.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi olahraga	1 Dokumen	20.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
183	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi organisasi pramuka aktif	100 %	750.000.000,00						100 %	1.400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan organisasi kepramukaan	100 %	750.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gerakan Pramuka	100%	1.400.000.000,00	
	2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi											
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gerakan Pramuka		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	1.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi											
							Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gerakan Pramuka		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi											
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	2 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gerakan Pramuka		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	1.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan											
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organiasasi	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gerakan Pramuka		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X					NON URUSAN			1.140.000.000,00							1.700.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.140.000.000,00							1.700.000.000,00	
184	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata nilai SKP ASN perangkat daerah Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	100 100 100	1.140.000.000,00						100 100 100	1.700.000.000,00	
	X	XX	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah	100 %	120.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	500.000.000,00	
	X	XX	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	30 laporan	200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30laporan	400.000.000,00	
	X	XX	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	117 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	117 Orang	400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 laporan	820.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24laporan	800.000.000,00	
	X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	820.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN			**38.697.150.091,00**							**45.296.879.659,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.177.086.522,00							36.102.800.762,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			27.177.086.522,00							36.102.800.762,00	
185	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata nilai SKP ASN perangkat daerah Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	100 100 100	22.035.618.147,00						100 100 100	28.060.189.762,00	
	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	293.376.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Persen	334.291.000,00	
	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	230.376.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	247.144.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.828.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	10.319.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.652.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	9.084.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.690.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	3.874.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.830.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	63.870.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	16.226.376.117,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Persen	20.445.360.762,00	
	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	16.089.686.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	110 Orang/ Bulan	20.139.138.762,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.479.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	21.502.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	48.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	182.125.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.497.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	5.771.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	30.841.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	63.883.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	24.225.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Laporan	25.436.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.148.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	7.505.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	52.945.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2Persen	92.392.000,00	
	2	22	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	38.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	72.392.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	370.132.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Persen	514.637.000,00	
	2	22	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	45.375.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Unit	47.643.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	217.376.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	110 Paket	228.244.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	57.381.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Orang	123.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	115.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	994.826.542,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Persen	1.275.452.000,00	
	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.322.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	22.880.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	414.409.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	660.026.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.933.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	72.706.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.702.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	21.219.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.480.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	154.242.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	335.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Laporan	344.379.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	330.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Persen	584.325.000,00	
	2	22	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	162.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	75.075.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	173.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	105.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	173.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.139.321.488,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Persen	3.974.660.000,00	
	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	895.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	1.108.343.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.244.321.488,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	2.866.317.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	628.641.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100Persen	839.072.000,00	
	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	111.716.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	117.301.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	336.925.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	27 Unit	406.271.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	57.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	57.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
186	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	1,92%	1.285.473.300,00						2,88%	2.528.562.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	525.385.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1Kegiatan 1Kegiatan	749.894.000,00	
	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	7 Objek	356.585.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	9 Objek	185.414.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	168.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	3 Unit	564.480.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	282.237.700,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4Kegiatan 4Kegiatan	1.398.182.000,00	
	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya											
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	150.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Objek	777.315.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	132.087.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	3 Laporan	620.867.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	477.850.600,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2Kegiatan 2Kegiatan	380.486.000,00	
	2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat											
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	381.600.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Objek	178.361.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat											
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	125 Orang	96.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	150 Orang	202.125.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
187	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	7,5%	238.750.300,00						8%	696.092.000,00	
	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	238.750.300,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	3Kegiatan 3Kegiatan	696.092.000,00	
	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	150 Orang	138.767.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	160 Orang	508.892.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	99.982.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	35 Lembaga	187.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
188	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi.	4,5%	100.000.000,00						5%	288.000.000,00	
	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-	100.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	18Orang 18Orang	288.000.000,00	
	2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi											
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	18 Orang	288.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
189	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Cagar Budaya yang dilestarikan	0,4	1.366.472.400,00						0,8	729.957.000,00	
	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	116.383.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5Cagar budaya 5Cagar Budaya	247.164.000,00	
	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	116.383.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5 Objek	247.164.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	1.250.089.400,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5Cagar budaya 5Cagar Budaya	482.793.000,00	
	2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1.150.259.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5 Objek	323.672.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	99.830.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Objek	159.121.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
190	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase Peningkatan Kunjungan ke musium	20	2.150.772.375,00						30	3.800.000.000,00	
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	2.150.772.375,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	3Museum 3Museum	3.800.000.000,00	
	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu											
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	500 Unit	404.838.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	500 Unit	1.004.838.728,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum											
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	3 Unit	1.408.250.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	5 Unit	2.158.250.772,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	218.455.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2 Unit	318.455.250,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2 Unit	119.227.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	2 Unit	318.455.250,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.520.063.569,00							9.194.078.897,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			11.520.063.569,00							9.194.078.897,00	
191	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	0,62	2.366.578.569,00						0,62	3.192.815.897,00	
	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-	103.242.500,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2Daya Tarik Wisata	304.559.000,00	
	3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi											
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	103.242.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2 Lokasi	304.559.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	2.084.172.069,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	3Destinasi	2.504.176.897,00	
	3	26	02	1.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi											
							Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	1 Lokasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Lokasi	75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1.520.501.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	173.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	350.488.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	11 Unit	1.936.537.508,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi											
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	105.386.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2 Lokasi	206.204.389,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	57.796.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	113.185.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	179.164.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2Unit Usaha	384.080.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	26	02	1.04	0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar											
							Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	2 Usaha Pariwisata	73.691.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2 Usaha Pariwisata	191.060.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	02	1.04	0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata											
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	105.473.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	193.020.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
192	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	100	2.702.739.000,00						100	1.905.913.000,00	
							Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	100							100		
	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-	2.702.739.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	8.990.000Kunjungan	1.905.913.000,00	
	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri											
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1.201.603.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	10 Dokumen	679.590.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata											
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	51.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	153.450.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri											
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	8 Kegiatan	1.072.873.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
193	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	18,75	5.150.000.000,00						18,75	2.925.000.000,00	
	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-	5.000.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1Kab./Kota	2.650.000.000,00	
	3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik											
							Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	2.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	150.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1Kab./Kota	275.000.000,00	
	3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											
							Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
194	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	3%	1.300.746.000,00						3,7%	1.170.350.000,00	
							Prosentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	15%							20%		
	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-	-	1.000.746.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	9Kegiatan	939.350.000,00	
	3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata											
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	500.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	235 Orang	379.350.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	05	1.01	0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI											
							Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	120 Orang	500.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	400 Orang	560.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	300.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2Kegiatan	231.000.000,00	
	3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif											
							Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	75 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	185 Orang	231.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			**34.834.295.089,00**							**37.311.930.080,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			34.793.295.089,00							37.311.930.080,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			34.393.295.089,00							36.911.930.080,00	
197	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	32.943.295.089,00						100	34.408.930.080,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	100							100		
	2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu	12/10 Dokumen/Laporan	150.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12/10Dokumen/Laporan	495.805.100,00	
	2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	6 Dokumen	225.135.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	22.896.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	23	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	22.896.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.182.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	28.470.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	6 Laporan	17.771.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	6 Laporan	153.453.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	15/27 Laporan/Dokumen	27.824.671.055,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	15/27Laporan/Dokumen	28.946.679.297,00	
	2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/ Bulan	27.749.671.055,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	180 Orang/ Bulan	28.724.227.497,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Dokumen	101.433.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Dokumen	121.018.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	6/2 Laporan/Dokumen	5.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6/2Laporan/Dokumen	6.734.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	23	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	6.734.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	20.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	100%	12.776.000,00	
	2	23	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	20.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	5 Unit	12.776.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	880.709.795,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	100%	1.494.703.548,00	
	2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	20.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	7 Paket	50.006.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	701.709.795,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	20 Paket	977.435.248,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	35.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	10 Paket	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Laporan	60.052.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Laporan	351.890.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	20.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	5 Dokumen	20.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	3.638.464.239,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	48Laporan	3.136.213.135,00	
	2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Laporan	1.100.005.428,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.638.464.239,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Laporan	2.036.207.707,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	24 Unit	424.450.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	24Unit	316.019.000,00	
	2	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	295.938.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	6 Unit	117.885.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	78.512.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	8 Unit	48.134.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	5 Unit	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
198	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	400 Orang	1.250.000.000,00						500 Orang	2.110.000.000,00	
	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Persentase Pemanfaatan Layanan Wahana Pusat Peraga IPTEK Daerah Persentase Perpustakaan yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	112 Perpustakaan 100 % 100 %	1.150.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	100% 100% 124Perpustakaan	1.910.000.000,00	
	2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi											
							Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	22 Perpustakaan	150.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	24 Perpustakaan	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	90 Perpustakaan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	100 Perpustakaan	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi											
							Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang	100.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	100 Orang	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
							Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	3 Layanan	400.000.000,00	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	3 Layanan	1.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka											
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar	200.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	200 Eksemplar	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik											
							Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	200.000.000,00	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	3 Perpustakaan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca	100 %	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	100%	200.000.000,00	
	2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											
							Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	6 Orang	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	6 Orang	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
							Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	14 Perpustakaan	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	20 Perpustakaan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
199	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	100 %	200.000.000,00						100 %	393.000.000,00	
	2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam	30 Karya	100.000.000,00			-	-	Penerbit	30Karya	200.000.000,00	
	2	23	03	1.01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit	100.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penerbit	10 Penerbit	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Pelestarian Naskah Kuno	50 Naskah	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	50Naskah	143.000.000,00	
	2	23	03	1.03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan											
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	50 Eksemplar	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	50 Eksemplar	143.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	100 Eksemplar	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	100Eksemplar	50.000.000,00	
	2	23	03	1.04	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara											
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100 Eksemplar	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kelompok Masyarakat	100 Eksemplar	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			400.000.000,00							400.000.000,00	
200	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	200.000.000,00						100%	400.000.000,00	
	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	100 %	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah/LKD Kabupaten/Kota	100%	100.000.000,00	
	2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi											
							Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	59 Lembaga	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah/LKD Kabupaten/Kota	69 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis	100 %	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	100%	100.000.000,00	
	2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis											
							Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	37 Arsip	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang Mengelola Arsip Secara Baku Berbasis IT	18 Lembaga 40 Perangkat Daerah	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah/LKD Kabupaten/kota	24Lembaga 45Perangkat Daerah	200.000.000,00	
	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	18 Pengguna	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah/LKD Kabupaten/kota	24 Pengguna	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	40 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah/LKD Kabupaten/kota	45 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
201	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100	200.000.000,00						100	0	
	2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-	-	100.000.000,00			-	-	-	100%	0	
	2	24	03	1.01	0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun											
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	500 Berkas	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Berkas	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun											
							Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2500 Arsip	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2500 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	-	-	100.000.000,00			-	-	-	100%	0	
	2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip											
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	50 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip											
							Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2500 Arsip	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2500 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X					NON URUSAN			41.000.000,00							0	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			41.000.000,00							0	
202	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	41.000.000,00						100	0	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	100							100		
	X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	20.000.000,00			-	-	-	100%	0	
	X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	180 Paket	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	21.000.000,00			-	-	-	100%	0	
	X	XX	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			**93.757.689.961,00**							**109.063.045.009,00**	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			93.757.689.961,00							109.063.045.009,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			93.757.689.961,00							109.063.045.009,00	
200	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	99,6 Huruf/Angka 97 Huruf/Angka 100 %	37.552.874.635,00						99,65Huruf/Angka 100% 98Huruf/Angka	43.401.190.461,00	
	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	463.150.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	9Dokumen	1.405.169.500,00	
	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	129.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	368.397.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	15.180.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	18.975.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	18.975.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	24.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	28.462.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	11 Laporan	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	213.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Laporan	705.180.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Laporan	27.042.444.524,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	45Laporan	30.202.039.586,00	
	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang/ Bulan	26.927.274.524,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	217 Orang/ Bulan	30.069.594.086,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	6.325.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	3.415.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	6.325.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	29.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	34.155.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	71.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Laporan	82.225.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	53 Laporan	57.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	53Laporan	111.780.000,00	
	3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	2.530.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	100.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	9.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	1986874004 Rp	30.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2036545854Rp	34.500.000,00	
	3	25	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	34.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Laporan	373.336.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7Laporan	429.336.400,00	
	3	25	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	57.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	189 Paket	185.703.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	217 Paket	213.558.450,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	5.060.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.250.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	6.037.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	48.983.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	56.330.450,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	70 Orang	62.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Orang	28.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	2574 Orang 120 Unit	1.618.015.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2960Orang 138Unit	2.026.217.825,00	
	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.295.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Paket	30.239.825,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	774.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Paket	890.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	37 Paket	115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	89.320.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	102.718.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	140.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	161.460.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	528.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	715.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	11.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	200.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13Unit	345.000.000,00	
	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Unit	230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163 Laporan	5.453.928.611,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	163Laporan	5.552.397.150,00	
	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	879.277.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	950.001.506,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	137 Laporan	4.499.650.776,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	139 Laporan	4.502.395.644,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	42 Unit	2.315.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48Unit	3.294.750.000,00	
	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Unit	1.897.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	115.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	16 Unit	132.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Unit	115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Unit	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
201	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan Jumlah produksi garam rakyat Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	78.44 % 6,000 Ton 822.559,65 Ha	9.507.815.326,00						100% 847.122,4Ha 6,900Ton	12.553.400.000,00	
	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	70 Hektar 14 Unit	6.481.165.326,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	14Unit 81Hektar	7.230.092.500,00	
	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	578435,53 Ha	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	24563 Ha	1.970.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
							Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	77 Ha	5.581.165.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	81 Ha	4.140.280.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
							Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	100 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	100 Orang	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/											
							Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	41 Dokumen	1.019.812.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	16.750.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	12Rekomendasi	19.262.500,00	
	3	25	02	1.02	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha											
							Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	4 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	8 Dokumen	6.325.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan											
							Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	4 Dokumen	12.937.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	3.009.900.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	100% 6900Ton	5.304.045.000,00	
	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
							Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	720 Orang	2.859.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	720 Orang	4.754.045.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
							Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kelompok	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	10 Kelompok	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	22 Kelompok	450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
202	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	11960232411	31.854.000.000,00						11991430000	33.179.504.548,00	
							Jumlah produksi perikanan tangkap	451818,7							460858,1		
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30							31		
							Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	31,23							31,86		
							Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	89,47							100		
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	16.067.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	131Kelompok 131Kelompok 500Unit 500Unit	12.465.000.000,00	
	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan											
							Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap											
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	20 Unit	6.375.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	25 Unit	5.750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap											
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	500 Unit	9.592.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	460 Unit	6.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	450.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	16Kelompok 81Unit 16Kelompok 81Unit	1.058.000.000,00	
	3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan											
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		125.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap											
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	35 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	75 Unit	932.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-	16.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	17Rekomendasi	18.400.000,00	
	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil											
							Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	20 Persentase	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	17 Persentase	18.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	15.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	165Dokumen	16.500.000,00	
	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT											
							Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	143 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	164 Dokumen	11.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT											
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-	15.306.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	8Pelabuhan 19Pelabuhan	19.621.604.548,00	
	3	25	03	1.06	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan											
							Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	7 Pelabuhan Perikanan	156.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	8 Pelabuhan Perikanan	294.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Unit	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	8 Unit	19.154.704.548,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan											
							Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	19 Layanan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	19 Layanan	172.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
203	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	22187160000	10.007.000.000,00						22530900000	12.291.550.000,00	
							Jumlah Produksi perikanan budidaya	4417925,7							4506248,3		
							Persentase ketersediaan benur berkualitas	90							95		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	5.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	10Rekomendasi	5.750.000,00	
	3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan											
							Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	5 Rekomendasi	5.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	22.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	14Laporan	25.300.000,00	
	3	25	04	1.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14 Rekomendasi	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	14 Rekomendasi	25.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-	4.580.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	684Unit 60Orang 684Unit 60Orang	4.460.500.000,00	
	3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut											
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	568 Unit	4.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	683 Unit	3.916.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut											
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Unit	253.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi											
							Jumlah Pembudidaya	50 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	60 Orang	69.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	284 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	284 Unit	107.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-	5.400.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100Hektar 100Hektar 158Unit 20900000Ekor 158Unit 20900000Ekor	7.800.000.000,00	
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit	4.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	120 Unit	4.110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	38 Unit	3.690.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
204	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	100	2.521.000.000,00						100	4.400.150.000,00	
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	2.371.000.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1179Dokumen 13Kelompok	4.211.650.000,00	
	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi											
							Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	568 Pelaku Usaha	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	12 Pelaku Usaha	87.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1054 Pelaku Usaha	2.125.000.000,00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1155 Pelaku Usaha	3.908.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi											
							Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	12 Pelaku Usaha	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	12 Pelaku Usaha	75.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)											
							Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	13 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	13 Kelompok Masyarakat	130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah											
							Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	150.000.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	26Dokumen	188.500.000,00	
	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi											
							Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	70 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	14 Pelaku Usaha	57.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi											
							Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	70 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	6 Pelaku Usaha	67.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi											
							Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	115 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	6 Pelaku Usaha	63.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
205	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	411540000	2.315.000.000,00						432110000	3.237.250.000,00	
							Produksi olahan ikan	6273,44							6398,91		
							Persentase pengujian mutu produk perikanan	100							100		
	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	55.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	85Rekomendasi	63.250.000,00	
	3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	31.625.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.01	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar											
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	85 Rekomendasi	27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	85 Rekomendasi	31.625.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-	2.050.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	120Unit Usaha 70Unit Usaha	2.932.500.000,00	
	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing											
							Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	5 Kegiatan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	120 Kegiatan	2.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar											
							Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	5 Kegiatan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	70 Kegiatan	632.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	210.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2Laporan	241.500.000,00	
	3	25	06	1.03	0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Dokumen	115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.03	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir											
							Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Sistem Informasi	126.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			**439.693.683.076,00**							**440.865.810.050,00**	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			356.835.955.514,00							340.596.819.108,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			356.835.955.514,00							340.596.819.108,00	
206	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 109 100	13.529.773.575,00						100 109 100	21.839.688.200,00	
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	11 Dokumen	1.132.061.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	11Dokumen	2.989.688.200,00	
	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	528.371.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	3 Dokumen	828.371.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	29.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	2 Dokumen	75.810.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	32.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	2 Dokumen	50.456.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	42.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	1 Dokumen	35.050.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	498.765.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	7 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi aparatur	100 %	258.018.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	100%	1.550.000.000,00	
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	258.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	1 Laporan	1.550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Laporan	10.805.217.625,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan NON ASN	2Laporan	12.500.000.000,00	
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.564.000.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan NON ASN	1 Laporan	2.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.241.216.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan NON ASN	1 Laporan	10.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1.334.476.150,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor, UPT, Balai	1Laporan	4.800.000.000,00	
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	534.476.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor, UPT, Balai	48 Unit	3.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor, UPT, Balai	5 Unit	1.600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
207	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2	321.889.799.328,00						2	235.948.255.908,00	
							Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	2							2		
							Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	2							2		
							Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	56301484133							56312744429		
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Bantuan Alsintan Luasan Bantuan Pupuk	25000 Unit 133613 Ha	138.081.414.100,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	30.0000Unit 140.293Ha	131.120.259.908,00	
	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian											
							Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	138.081.414.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	2 Laporan	131.120.259.908,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Kelompok Pengolahan Yang dibina Jumlah Perbanyakan Benih Sumber Jumlah Sertifikat Penangkaran Benih/Bibit Luas Bantuan Benih Tanaman Pangan	38 Kelompok 126 Ha 242 Sertifikat 115500 Ha	183.808.385.228,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	341.775Ha 1.534Sertifikat 121.275Ha 132Ha 254Sertifikat 36Kelompok 6.000Ha	104.827.996.000,00	
	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih											
							Jumlah Sertifikat Benih	500 Sertifikat	350.104.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	551 Sertifikat	2.139.420.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan											
							Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	12 laporan	183.458.280.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	12 laporan	102.688.576.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
208	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap luasan lahan pertanian	0,0080 Poin	19.906.984.600,00						0,0084 Poin	73.608.000.000,00	
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Luas areal yang terdampak pembangunan prasarana pertanian	5.250 Ha	19.906.984.600,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	5.500Ha	73.608.000.000,00	
	3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	6.243.733.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	1 Dokumen	41.208.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani											
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	8.423.161.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	1 Dokumen	22.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya											
							Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	5.240.089.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	5 Unit	10.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
209	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT yang tertangani terhadap luas srangan OPT	84 Ha	601.398.992,00						88.2 Ha	3.400.875.000,00	
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan OPT hortikultura yang tertangani Luas serangan OPT perkebunan yang tertangani Luas serangan OPT tanaman pangan yang tertangani	338.415 Ha 119.700 Ha 26.495 Ha	601.398.992,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	27.819Ha 125.685Ha 355.336Ha	3.400.875.000,00	
	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40 Ha	601.398.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	44 Ha	3.400.875.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
210	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase petani yang menerapkan teknologi Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	55 % 20 %	907.999.019,00						20% 60%	5.800.000.000,00	
	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan	158 Orang	403.989.821,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	165Orang	1.700.000.000,00	
	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian											
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	403.989.821,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	165 Orang	1.700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	504.009.198,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	20Kelompok	4.100.000.000,00	
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian											
							Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	1.028.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	2 Dokumen	2.100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	502.980.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	20 Kelompok	2.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	X					NON URUSAN			82.857.727.562,00							100.268.990.942,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			82.857.727.562,00							100.268.990.942,00	
211	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 109 100	82.857.727.562,00						100 109 100	100.268.990.942,00	
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	11 Dokumen	220.132.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	11Dokumen	929.800.000,00	
	X	XX	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	31.193.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	29.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	188.939.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	-	4 Laporan	900.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tersedia	14 Laporan	81.388.289.562,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	14Laporan	96.839.885.142,00	
	X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/ Bulan	80.999.642.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	700 Orang/ Bulan	95.529.885.142,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	X	XX	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	168.515.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	1 Laporan	550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	134.224.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	12 Laporan	550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	X	XX	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	85.906.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	1 Dokumen	210.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi aparatur	100 %	300.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.550.000.000,00	
	X	XX	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	1.550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	949.305.800,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor, UPT, Balai	-	949.305.800,00	
	X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	949.305.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor, UPT, Balai		949.305.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			**54.188.599.648,00**							**57.942.289.045,00**	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			53.072.739.648,00							57.063.639.045,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			53.072.739.648,00							57.063.639.045,00	
212	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 109 95	28.432.873.648,00						100 109 95	26.016.219.045,00	
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	699.309.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7Dokumen	1.430.000.000,00	
	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	173.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Dokumen	143.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.159.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	14.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	21.450.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	28.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.261.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	35.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	281.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	500.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	185.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Laporan	686.400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.620.191.648,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7Laporan	21.510.025.045,00	
	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/ Bulan	20.276.692.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	132 Orang/ Bulan	21.010.025.045,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	96.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	28.756.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	14.848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Laporan	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	58.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36 Laporan	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan	227.500.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5Laporan	250.250.000,00	
	3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	35.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5 Orang	71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5 Orang	71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5 Orang	71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	664.473.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6Laporan	600.600.000,00	
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Paket	21.450.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	563.254.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11 Paket	500.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	7.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Unit	97.500.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4Unit	107.250.000,00	
	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	97.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 Unit	107.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.354.287.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3Laporan	1.042.294.000,00	
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	7.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	821.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.035.144.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.526.277.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.769.613.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5Laporan	1.075.800.000,00	
	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1.116.413.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	143.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	25.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	242.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	14.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Unit	605.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
213	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	2,16 % 2,81 % 2,30 % 1,18 %	9.448.400.000,00						2,37% 2,20% 1,20% 2,90%	11.811.000.000,00	
	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Ketersediaan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Laporan	4.530.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas	3Laporan	6.047.000.000,00	
	3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas	6 Dokumen	650.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi											
							Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	3.840.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas	3 laporan	4.968.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner											
							Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang	390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas	10 Orang	429.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Akseptor Jumlah Kelahiran Jumlah Penyediaan Bull Eksotik Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak Jumlah ternak yang dipelihara pada UPT PT HPT	125000 Ekor 75000 Ekor 5 Ekor 500 Ton 196 Ekor	4.310.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5Ekor 206Ekor 530Ton 135000Ekor 81000Ekor	5.335.000.000,00	
	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	4.310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 laporan	5.335.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Distributor yang diawasi peredarannya	1 Laporan	68.400.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Distributor/Depo/Poultry Petshop	1Laporan	429.000.000,00	
	3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan											
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	3 Laporan	68.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Distributor/Depo/Poultry Petshop	3 Laporan	429.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Laporan Ketersediaan BibitTernak Yang Bersumber dari Daerah Provinsi Lain	2 Laporan	540.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2Laporan	0	
	3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain											
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	35 Ekor	540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50 Ekor	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
214	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Produksi Hasil ternak	10.664.347 Rupiah (Juta)	7.070.979.000,00						11079740,32	9.560.000.000,00	
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Prasarana Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana UPT BK3H yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana UPT PIB PS yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana UPT PMPP yang direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana UPT PT HPT yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	3 Laporan 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit	7.070.979.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1Unit 3Laporan 1Unit 1Unit 1Paket	9.560.000.000,00	
	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian											
							Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Dokumen	198.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	484.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Laporan	338.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya											
							Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	3.480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Unit	5.460.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	1.01	0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2.926.339.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Unit	3.564.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
215	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	10 %	5.587.104.000,00						10 %	7.311.750.000,00	
	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dosis Vaksin dan Obat-Obatan dan Vitamin (PHMS)	267800 Dosis	3.584.536.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	275800Dosis	3.510.000.000,00	
	3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular											
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	270.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.01	0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis											
							Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	24 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24 Dokumen	2.700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.859.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	540.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Pemasukan Hewan yang diawasi Peredarannya Jumlah Pengawasan Pemasukan Produk Hewan yang diawasi Peredarannya Jumlah Pengawasan Pemasukan Produk Hewan yang diawasi Peredarannya Jumlah Pengeluaran Hewan yang diawasi Peredarannya Jumlah Pengeluaran Produk Hewan yang diawasi Peredarannya Jumlah Pengeluaran Produk Hewan yang diawasi Peredarannya Jumlah Pengeluaran Produk Hewan yang diawasi Peredarannya	1867800 Ekor 19900600 Butir 19900600 Kg 13890900 Ekor 18560900 Butir 2257000 Kg 24000 Lembar	344.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Pedagang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20800000Butir 25000Lembar 18980000Butir 2456700Kg 1998000Ekor 20800000Kg 14238090Ekor	800.000.000,00	
	3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)											
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 Laporan	344.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Pedagang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-	1.398.568.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	150Sampel 455Ekor 490Sampel 1Laporan 1Dokumen 3800Sampel 1000Sampel 120Sampel	2.715.750.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan											
							Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1 Laporan	91.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	214.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner											
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Dokumen	1.307.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2 Dokumen	2.501.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Laporan	260.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2Laporan	286.000.000,00	
	3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)											
							Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	8 Dokumen	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10 Dokumen	214.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.04	0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan											
							Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	4 Orang	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Orang	71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
216	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	100 %	2.533.383.000,00						100 %	2.364.670.000,00	
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2 Laporan	2.443.383.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2Laporan	2.250.000.000,00	
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian											
							Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	6 Dokumen	106.083.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6 Dokumen	1.800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani											
							Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	50 Kelompok	2.337.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50 Kelompok	450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1 Laporan	90.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1Laporan	114.670.000,00	
	3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peternak, Petugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Unit	114.670.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	X					NON URUSAN			1.115.860.000,00							878.650.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.115.860.000,00							878.650.000,00	
217	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	95 100 109	1.115.860.000,00						100 109 95	878.650.000,00	
	X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan	208.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5Laporan	228.000.000,00	
	X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	208.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Paket	228.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	842.860.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6Laporan	579.150.000,00	
	X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	836.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	572.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	X	XX	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	7.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Unit	65.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4Unit	71.500.000,00	
	X	XX	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			**23.788.936.218,00**							**38.770.396.361,00**	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			23.788.936.218,00							38.770.396.361,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			23.788.936.218,00							38.770.396.361,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	83.18 % 100.92 Nilai 87.11 Nilai	21.042.039.790,00						87.05% 101.43Nilai 91.47Nilai	32.462.566.224,00	
	3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	378.754.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	640.340.800,00	
	3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	155.959.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	286.463.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	53.245.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	167.373.720,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	57.803.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	63.583.740,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	21.759.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	23.935.780,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	89.985.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	98.984.160,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	17.365.671.025,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	18.260.211.757,00	
	3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/ Bulan	17.155.046.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120 Orang/ Bulan	17.910.292.177,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	534 Dokumen	62.704.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	700 Dokumen	120.695.520,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	90.388.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	164.290.680,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.620.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	9.144.480,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8.870.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	10.644.240,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	41.040.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	45.144.660,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	15.220.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	87.261.600,00	
	3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	15.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Orang	87.261.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	746.566.700,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	10.398.192.182,00	
	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.002.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Paket	12.026.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.061.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Paket	18.767.870,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.185.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	65.104.160,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	160.316.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	162.650.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	10.139.643.052,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	636.262.342,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	940.564.822,00	
	3	29	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	607.956.342,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		608.956.342,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	28.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Unit	331.608.480,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.364.911.973,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.476.457.618,00	
	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	283.564.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	311.921.170,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.081.347.273,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.164.536.448,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milikdaerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	534.653.750,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	659.537.445,00	
	3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	167.511.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	184.262.705,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	52.334.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Unit	66.704.160,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	277.707.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Unit	305.478.580,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	0 Unit	103.092.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
219	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	90 %	162.335.800,00						92%	287.201.650,00	
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pengguna air tanah berbasis konservasi pada wilayah CAT (cekungan Air Tanah)	30 %	126.996.200,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	31%	226.328.090,00	
	3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah											
							Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	57.606.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Dokumen	149.999.640,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	69.389.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Laporan	76.328.450,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah Obyek Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)	8.50 %	35.339.600,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	8.75%	60.873.560,00	
	3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah											
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	5 Dokumen	15.339.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	12 Dokumen	38.873.560,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Laporan	22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
220	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	12 %	454.376.000,00						13%	1.463.252.300,00	
	3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase WIUP yang ditetapkan	22 %	100.594.600,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	304.157.640,00	
	3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	120 Dokumen	100.594.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	125 Dokumen	304.157.640,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP yang ditetapkan	22 %	270.851.800,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	537.168.840,00	
	3	29	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	27.166.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	6 Laporan	89.358.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	222.370.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	50 Laporan	396.444.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.03	0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10 Laporan	21.315.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	50 Laporan	51.365.640,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang ditetapkan	22 %	64.611.900,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	330.154.580,00	
	3	29	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	64.611.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	330.154.580,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan perizinan usaha jasa pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diawasi	26 %	18.317.700,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	27%	291.771.240,00	
	3	29	03	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	18.317.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	291.771.240,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
221	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Penurunan emisi GRK sektor energi	1,4 %	1.325.281.400,00						1,5 %	1.496.000.000,00	
	3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	95.281.400,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	161.000.000,00	
	3	29	05	1.05	0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas											
							-	-	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		61.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.05	0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas											
							Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	35.281.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	1.230.000.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	1.335.000.000,00	
	3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT											
							Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		35.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT											
							-	-	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		1.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
222	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100 %	804.903.228,00						100 %	3.061.376.187,00	
	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah badan usaha yang dibina dan diawasi	9.5 %	72.537.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	9.7%	79.790.700,00	
	3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	25 Laporan	72.537.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	79.790.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase jumlah Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang dibina/diawasi	7.9 %	82.512.600,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	8.1%	244.867.559,00	
	3	29	06	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri											
							Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	10 Dokumen	49.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	40 Dokumen	202.015.736,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	06	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri											
							Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Laporan	33.207.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	42.851.823,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase jumlah Rumah Tangga penerima manfaat	0.91 %	649.853.628,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0.93%	2.736.717.928,00	
	3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu											
							Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	200 Keluarga	561.324.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	500 Keluarga	1.615.798.890,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	3 Laporan	28.116.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Laporan	366.992.274,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
							Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Dokumen	32.517.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	338.382.840,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3 Laporan	27.895.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Laporan	415.543.924,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Cabang Dinas ESDM Wilayah I Maros			200.846.022,00							361.522.722,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			200.846.022,00							361.522.722,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			200.846.022,00							361.522.722,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	87.11 Nilai 83.18 % 100.92 Nilai	141.176.022,00						87.05% 101.43Nilai 91.47Nilai	295.885.722,00	
	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	113.153.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	124.469.180,00	
	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Paket	74.757.100,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.012.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	16.514.080,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	30.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	33.198.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	14.201.222,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	156.213.442,00	
	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.201.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	156.213.442,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milikdaerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	13.821.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	15.203.100,00	
	3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	13.821.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	15.203.100,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
224	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	90 %	9.560.000,00						90 %	10.516.000,00	
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pengguna air tanah berbasis konservasi pada wilayah CAT (cekungan Air Tanah)	30 %	9.560.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	31%	10.516.000,00	
	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	10 Laporan	9.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Laporan	10.516.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
225	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	12 %	26.250.000,00						12 %	28.875.000,00	
	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP yang ditetapkan	22 %	26.250.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	28.875.000,00	
	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Dokumen	26.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	42 Dokumen	28.875.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
226	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100 %	23.860.000,00						100 %	26.246.000,00	
	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah badan usaha yang dibina dan diawasi	9.5 %	10.060.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	9.7%	11.066.000,00	
	3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	8 Laporan	10.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	11.066.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase jumlah Rumah Tangga penerima manfaat	0.91 %	13.800.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0.93%	15.180.000,00	
	3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
							Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	13.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	15.180.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I MAROS
						Cabang Dinas ESDM Wilayah II Gowa			200.740.527,00							220.814.579,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			200.740.527,00							220.814.579,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			200.740.527,00							220.814.579,00	
227	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	83.18 % 100.92 Nilai 87.11 Nilai	111.994.527,00						87.05% 101.43Nilai 91.47Nilai	123.193.979,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	73.494.527,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	80.843.979,00	
	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.499.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Paket	40.149.810,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.999.959,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Paket	10.999.955,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.999.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	21.999.978,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	6.994.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	7.694.236,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	17.130.700,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	18.843.770,00	
	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.130.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	18.843.770,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milikdaerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	21.369.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	23.506.230,00	
	3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	21.369.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	23.506.230,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
228	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	90 %	12.225.000,00						90 %	13.447.500,00	
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pengguna air tanah berbasis konservasi pada wilayah CAT (cekungan Air Tanah)	30 %	12.225.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	31%	13.447.500,00	
	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	10 Laporan	12.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Laporan	13.447.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
229	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	12 %	35.291.000,00						12 %	38.820.100,00	
	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP yang ditetapkan	22 %	35.291.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	38.820.100,00	
	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Dokumen	35.291.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	42 Dokumen	38.820.100,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
230	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100 %	41.230.000,00						100 %	45.353.000,00	
	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah badan usaha yang dibina dan diawasi	9.5 %	23.759.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	9.7%	26.134.900,00	
	3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	6 Laporan	23.759.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	26.134.900,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase jumlah Rumah Tangga penerima manfaat	0.91 %	17.471.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0.93%	19.218.100,00	
	3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
							Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	17.471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	19.218.100,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II GOWA
						Cabang Dinas ESDM Wilayah III Palopo			200.967.600,00							221.064.360,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			200.967.600,00							221.064.360,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			200.967.600,00							221.064.360,00	
231	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	83.18 % 100.92 Nilai 87.11 Nilai	120.707.600,00						87.05% 101.43Nilai 91.47Nilai	132.778.360,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	86.481.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	95.129.760,00	
	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.922.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Paket	34.014.860,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.963.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Paket	38.459.300,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.448.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	11.493.020,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10.147.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	11.162.580,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	6.216.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	6.837.600,00	
	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	6.837.600,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milikdaerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	28.010.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	30.811.000,00	
	3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	30.811.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
232	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-	9.350.000,00						-	10.285.000,00	
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	9.350.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	31%	10.285.000,00	
	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	9.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Laporan	10.285.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
233	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	12 %	31.260.000,00						12 %	34.386.000,00	
	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP yang ditetapkan	22 %	31.260.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	34.386.000,00	
	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Dokumen	31.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	42 Dokumen	34.386.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
234	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100 %	39.650.000,00						100 %	43.615.000,00	
	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah badan usaha yang dibina dan diawasi	9.5 %	16.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	9.7%	17.600.000,00	
	3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	17.600.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase jumlah Rumah Tangga penerima manfaat	0.91 %	23.650.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0.93%	26.015.000,00	
	3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
							Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	23.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	26.015.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PALOPO
						Cabang Dinas ESDM Wilayah IVBulukumba			200.069.000,00							220.075.900,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			200.069.000,00							220.075.900,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			200.069.000,00							220.075.900,00	
235	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	87.11 Nilai 83.18 % 100.92 Nilai	123.839.000,00						87.05% 101.43Nilai 91.47Nilai	136.222.900,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	85.683.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	94.251.520,00	
	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Paket	23.247.400,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.541.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Paket	22.595.870,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.932.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	21.925.750,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	26.482.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10.745.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	11.820.380,00	
	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.745.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	11.820.380,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milikdaerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	27.410.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	30.151.000,00	
	3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	27.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	30.151.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
236	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	90 %	10.000.000,00						90 %	11.000.000,00	
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pengguna air tanah berbasis konservasi pada wilayah CAT (cekungan Air Tanah)	30 %	10.000.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	31%	11.000.000,00	
	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Laporan	11.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
237	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	12 %	22.495.000,00						12 %	24.744.500,00	
	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP yang ditetapkan	22 %	22.495.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	24.744.500,00	
	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Dokumen	22.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	42 Dokumen	24.744.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
238	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100 %	43.735.000,00						100 %	48.108.500,00	
	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah badan usaha yang dibina dan diawasi	9.5 %	14.565.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	9.7%	16.021.500,00	
	3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	14.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	16.021.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase jumlah Rumah Tangga penerima manfaat	0.91 %	29.170.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0.93%	32.087.000,00	
	3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
							Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	29.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	32.087.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IVBULUKUMBA
						Cabang Dinas ESDM Wilayah V Bone			200.089.484,00							220.098.432,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			200.089.484,00							220.098.432,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			200.089.484,00							220.098.432,00	
239	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	87.11 Nilai 83.18 % 100.92 Nilai	150.809.484,00						87.05% 101.43Nilai 91.47Nilai	165.890.432,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	111.940.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	123.134.660,00	
	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.733.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Paket	56.906.300,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	23.027.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Paket	25.330.030,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.122.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	15.534.420,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	23.058.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	25.363.910,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	11.400.884,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	12.540.972,00	
	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.400.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	12.540.972,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milikdaerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	27.468.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	30.214.800,00	
	3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	27.468.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	30.214.800,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
240	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	90 %	7.590.000,00						90 %	8.349.000,00	
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pengguna air tanah berbasis konservasi pada wilayah CAT (cekungan Air Tanah)	30 %	7.590.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	31%	8.349.000,00	
	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	7.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Laporan	8.349.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
241	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	12 %	20.295.000,00						12 %	22.324.500,00	
	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP yang ditetapkan	22 %	20.295.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	22.324.500,00	
	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Dokumen	20.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	42 Dokumen	22.324.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
242	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100 %	21.395.000,00						100 %	23.534.500,00	
	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah badan usaha yang dibina dan diawasi	9.5 %	8.330.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	9.7%	9.163.000,00	
	3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	8.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	9.163.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase jumlah Rumah Tangga penerima manfaat	0.91 %	13.065.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0.93%	14.371.500,00	
	3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
							Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	13.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	14.371.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V BONE
						Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Pare-Pare			200.142.000,00							220.156.200,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			200.142.000,00							220.156.200,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			200.142.000,00							220.156.200,00	
243	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	87.11 Nilai 83.18 % 100.92 Nilai	124.583.000,00						87.05% 101.43Nilai 91.47Nilai	137.041.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	91.135.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	100.249.160,00	
	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Paket	29.353.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Paket	24.953.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.198.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Paket	13.418.460,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	29.567.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	32.523.700,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	14.167.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	15.584.140,00	
	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.167.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	15.584.140,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milikdaerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	19.280.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	21.208.000,00	
	3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	19.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	21.208.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
244	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	90 %	7.900.000,00						90 %	8.690.000,00	
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pengguna air tanah berbasis konservasi pada wilayah CAT (cekungan Air Tanah)	30 %	7.900.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	31%	8.690.000,00	
	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	7.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1 Laporan	8.690.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
245	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	12 %	35.240.000,00						12 %	38.764.000,00	
	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP yang ditetapkan	22 %	35.240.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	24%	38.764.000,00	
	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Dokumen	35.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	42 Dokumen	38.764.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
246	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100 %	32.419.000,00						100 %	35.660.900,00	
	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah badan usaha yang dibina dan diawasi	9.5 %	13.805.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	9.7%	15.185.500,00	
	3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	2 Laporan	13.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	1 Laporan	15.185.500,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase jumlah Rumah Tangga penerima manfaat	0.91 %	18.614.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	0.93%	20.475.400,00	
	3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
							Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	18.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	20.475.400,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI PARE-PARE
						UPT Jasa Laboratorium			306.026.100,00							336.628.710,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			306.026.100,00							336.628.710,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			306.026.100,00							336.628.710,00	
247	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	87.11 Nilai 83.18 % 100.92 Nilai	306.026.100,00						87.05% 101.43Nilai 91.47Nilai	336.628.710,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	29	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pendapatan kewenangan perangkat daerah	100 %	248.707.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	273.577.810,00	
	3	29	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	248.707.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	273.577.810,00	UPT JASA LABORATORIUM
	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	57.319.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	63.050.900,00	
	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	57.319.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	63.050.900,00	UPT JASA LABORATORIUM
						DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			**32.546.106.594,00**							**89.164.000.000,00**	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			28.106.106.594,00							83.888.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.255.000.000,00							8.707.000.000,00	
251	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	95 98 0,2	25.000.000,00						95 98 0,2	375.000.000,00	
	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	5.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	25.000.000,00	
	3	30	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	350.000.000,00	
	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
252	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	100%	110.000.000,00						100%	730.000.000,00	
							Prosentase Penerbitan SKA	100%							100%		
	3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Persentase Surat/Rekomendasi yang terbit	1 Data 4900 Dokumen 4 Kali	10.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	5Kali	110.000.000,00	
	3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Surat/Rekomendasi yang terbit	4900 Dokumen	100.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	5000Dokumen	620.000.000,00	
	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA											
							Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4800 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		620.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
253	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	300.000.000,00						100 %	840.000.000,00	
	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 Persen	300.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	100Persen	840.000.000,00	
	3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		470.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas											
							Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
254	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	1.020.000.000,00						100 %	2.552.000.000,00	
	3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	10.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	100Persen	72.000.000,00	
	3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		72.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	22 Komoditi	1.000.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	22Komoditi	2.420.000.000,00	
	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		2.300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-	10.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2Kali	60.000.000,00	
	3	30	04	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
255	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan (U$)	2262549068	750.000.000,00						2601931429	875.000.000,00	
	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-	750.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	2173586837US Dollar	875.000.000,00	
	3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	05	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor											
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		425.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
256	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan sertifikasi mutu produk	100	1.040.000.000,00						100	3.160.000.000,00	
	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	480.000.000,00	
	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen											
							Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen											
							Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	30 Pengaduan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.000.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	2.230.000.000,00	
	3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi											
							Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	3000 Sertifikat	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian											
							Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	2500 laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	06	1.02	0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi											
							Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	30 Sertifikat	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		1.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	450.000.000,00	
	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
257	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	100	10.000.000,00						100	175.000.000,00	
	3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-	10.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	100Persen	175.000.000,00	
	3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi											
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	75 UMKM	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			24.851.106.594,00							75.181.000.000,00	
258	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	95 98 0,2	18.841.106.594,00						95 98 0,2	21.929.000.000,00	
	3	31	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	70.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	583.000.000,00	
	3	31	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		180.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	31	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		23.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	17.946.277.020,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	19.170.000.000,00	
	3	31	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/ Bulan	17.906.277.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		19.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	60.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	116.000.000,00	
	3	31	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		31.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	50.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	31	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	452.829.574,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	1.335.000.000,00	
	3	31	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	432.829.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		1.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	262.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	525.000.000,00	
	3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
259	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	8	5.500.000.000,00						8,5	52.170.000.000,00	
	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-	5.500.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	52.170.000.000,00	
	3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		270.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		5.700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		8.700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		37.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
260	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	3 %	360.000.000,00						4%	530.000.000,00	
	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	-	360.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	530.000.000,00	
	3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi											
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	9 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)											
									350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
261	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase peningkatan pengelolaan SIINAS	4,5	150.000.000,00						5	552.000.000,00	
	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	150.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	552.000.000,00	
	3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		270.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas											
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		220.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas											
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		62.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X					NON URUSAN			4.440.000.000,00							5.276.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			4.440.000.000,00							5.276.000.000,00	
262	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	95 98 0,2	4.440.000.000,00						95 98 0,2	5.276.000.000,00	
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	5.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	25.000.000,00	
	X	XX	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	120.000.000,00	
	X	XX	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	58.000.000,00	
	X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		58.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	120.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	773.000.000,00	
	X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		23.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.195.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	3.800.000.000,00	
	X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		3.800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.000.000,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-	-	500.000.000,00	
	X	XX	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	-		500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			3.720.106.252,00							6.969.248.842,00	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**3.720.106.252,00**							**6.969.248.842,00**	
260	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	2.020.106.252,00						100	3.931.666.650,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	200.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	435.000.000,00	
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		235.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120laporan	100.000.000,00	
	4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	702.754.072,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.430.000.000,00	
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	182.754.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		770.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	617.352.180,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	666.666.650,00	
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	617.352.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		666.666.650,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	450.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.300.000.000,00	
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		250.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
261	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang Difasilitasi, Dimonitoring dan dievaluasi	100	1.700.000.000,00						100	3.037.582.192,00	
	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-	700.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.097.582.192,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	300.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	7 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Dokumen	397.582.192,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	850.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.460.000.000,00	
	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	44 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Dokumen	860.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	24 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24 Dokumen	250.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	24 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24 Laporan	350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	150.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	480.000.000,00	
	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah											
							Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	60 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	70 Dokumen	200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta											
							Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	15 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Dokumen	100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama											
							Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	35 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	40 Laporan	180.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			**123.959.309.575,00**							**74.267.862.678,00**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			123.959.309.575,00							74.267.862.678,00	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**123.959.309.575,00**							**74.267.862.678,00**	
262	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	2.304.722.335,00						100	3.840.000.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	224.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	330.000.000,00	
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	125.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120laporan	170.000.000,00	
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	40.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	
	4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	49.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	160.000.000,00	
	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	455.790.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	625.000.000,00	
	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	315.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	230.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	800.000.000,00	
	4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		300.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.070.722.335,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.375.000.000,00	
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	330.722.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		450.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	110.210.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	280.000.000,00	
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	90.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
263	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	% Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimamfaatkan	99,3	121.654.587.240,00						99,4	70.427.862.678,00	
							Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	46,35							46,4		
	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-	23.330.587.240,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	57.597.862.678,00	
	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	3 Unit	1.044.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Unit	5.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual											
							Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	150 Lembaga	22.286.587.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	280 Lembaga	52.597.862.678,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-	78.125.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	12.080.000.000,00	
	4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	77.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	11.580.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-	20.199.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	750.000.000,00	
	4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	74.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	20.075.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						BIRO HUKUM			**23.864.944.511,00**							**6.716.382.192,00**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			23.864.944.511,00							6.716.382.192,00	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**23.864.944.511,00**							**6.716.382.192,00**	
264	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	1.824.083.814,00						100	1.923.214.658,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	34.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	34.000.000,00	
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		10.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.214.658,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120laporan	4.214.658,00	
	4	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.214.658,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		4.214.658,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	141.240.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	210.000.000,00	
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	91.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	451.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	445.000.000,00	
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	110.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	250.000.000,00	
	4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		250.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	996.004.556,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	810.000.000,00	
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	996.004.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		810.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	87.624.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	170.000.000,00	
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	67.624.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	BIRO HUKUM
265	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dan dievaluasi	100	22.040.860.697,00						100	4.793.167.534,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	100							100		
	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	-	990.860.697,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.593.167.534,00	
	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan											
							Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40 Dokumen	508.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	40 Dokumen	818.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan											
							Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	800 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1200 Dokumen	75.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya											
							Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	20 Dokumen	50.167.534,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Dokumen	50.167.534,00	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota											
							Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	500 Dokumen	357.288.163,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	500 Dokumen	650.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	21.050.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	3.200.000.000,00	
	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum											
							Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	6 Kasus	20.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Kasus	2.200.000.000,00	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM											
							Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Kasus	1.000.000.000,00	BIRO HUKUM
						BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**4.370.938.335,00**							**5.560.450.000,00**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4.370.938.335,00							5.560.450.000,00	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**4.370.938.335,00**							**5.560.450.000,00**	
266	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	1.219.326.835,00						100	1.701.500.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	135.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	335.000.000,00	
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		195.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		140.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	64.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120laporan	164.000.000,00	
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							-	-	64.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		164.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	162.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	202.500.000,00	
	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	577.312.092,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	600.000.000,00	
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	577.312.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		600.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	281.014.743,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	400.000.000,00	
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	271.014.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
267	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100	2.651.611.500,00						100	3.058.950.000,00	
	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	-	658.950.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Dokumen	858.950.000,00	
	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	460.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	560.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	198.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	298.950.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	-	922.661.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Dokumen	1.100.000.000,00	
	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	922.661.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	1.100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-	1.070.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Dokumen	1.100.000.000,00	
	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	1.070.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	1.100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
268	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Prosentase capaian program prioritas pembangunan daerah	100	500.000.000,00						100	800.000.000,00	
	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	300.000.000,00			-	-	-	1Dokumen	500.000.000,00	
	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	150.000.000,00	-	-	-	-	-	1 Laporan	250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	200.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1Dokumen	300.000.000,00	
	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			**6.568.168.504,00**							**7.655.165.294,00**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			6.568.168.504,00							7.655.165.294,00	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**6.568.168.504,00**							**7.655.165.294,00**	
269	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	3.216.674.384,00						100	3.546.233.504,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	88.874.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	108.960.137,00	
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	88.874.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		108.960.137,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	629.963.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	559.735.232,00	
	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		10.805.964,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	173.973.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	447.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		548.929.268,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	239.710.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	198.109.340,00	
	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	239.710.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		198.109.340,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.370.070.484,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.678.796.528,00	
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	34.530.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		41.422.862,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.335.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.637.373.666,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	888.055.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.000.632.267,00	
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	357.260.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		438.001.741,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	80.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		99.054.670,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		463.575.856,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
270	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Presentase Kesesuaian rencana dengan pengadaan barang/ jasa	100	3.351.494.120,00						100	4.108.931.790,00	
							Presentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang / jasa	100							100		
	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	984.230.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	1.206.665.980,00	
	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	73.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	90.049.700,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	837.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	1.026.566.580,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	73.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	90.049.700,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	1.223.500.720,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Laporan	1.500.011.882,00	
	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan	683.496.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	837.966.488,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	466.554.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	571.995.694,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	73.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	90.049.700,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1.143.763.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5Dokumen	1.402.253.928,00	
	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang	440.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120 Orang	540.298.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	281.754.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	345.430.649,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	421.309.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	516.525.079,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						BIRO ORGANISASI			**25.453.303.733,00**							**8.416.962.313,00**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			25.453.303.733,00							8.416.962.313,00	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**25.453.303.733,00**							**8.416.962.313,00**	
271	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	24.153.303.733,00						100	3.040.290.000,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	363.716.178,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	950.000.000,00	
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	291.716.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							-	-	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	39.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120laporan	80.000.000,00	
	4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							-	-	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	25.000.000,00	
	4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	22.154.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	50.000.000,00	
	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	22.154.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	629.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	755.000.000,00	
	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		130.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	946.587.555,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	866.400.000,00	
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	946.587.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		866.400.000,00	BIRO ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	313.890.000,00	
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		313.890.000,00	BIRO ORGANISASI
272	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	100	1.300.000.000,00						100	5.376.672.313,00	
	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	500.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	2.016.252.117,00	
	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	790.252.117,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	551.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	675.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-	800.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	3.360.420.196,00	
	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja											
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	700.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	316.252.117,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	500.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	844.168.079,00	BIRO ORGANISASI
						BIRO UMUM			**143.808.579.234,00**							**0**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			143.808.579.234,00							0	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**143.808.579.234,00**							**0**	
273	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	143.808.579.234,00						100	0	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	270.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	0	
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	140.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							-	-	130.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	70.517.359.909,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120laporan	0	
	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	464 Orang/ Bulan	69.647.359.909,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	350.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	450.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							-	-	30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.125.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1778 Dokumen	1.100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	750.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	550.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	200.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.600.000.000,00			-	-	-	-	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1978 Laporan	13.000.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18 Dokumen	250.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.151.800.942,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							-	-	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	11.751.800.942,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.070.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	750.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	8.552.483.639,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.002.079.720,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	26 Paket	240.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	240.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	7.070.403.919,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	17.928.934.744,00			-	-	-	-	0	
	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	120 Paket	7.000.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	120 Paket	2.100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	120 Paket	8.828.934.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-	1.843.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0	
	4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	1.700.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							-	-	130.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0	BIRO UMUM
						SEKRETARIAT DPRD			**198.461.782.839,00**							**350.386.674.348,00**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			198.461.782.839,00							350.386.674.348,00	
	4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**			**198.461.782.839,00**							**350.386.674.348,00**	
274	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	97.997.530.015,00						100	148.726.451.452,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	723.539.388,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	9Dokumen	1.461.535.180,00	
	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	115.592.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	3 Dokumen	122.527.776,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	114.433.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	333.299.261,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	101.517.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	319.608.599,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	117.824.653,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	240.507.981,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	103.138.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	115.895.952,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	60.022.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	6 Laporan	63.624.244,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	111.010.723,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	6 Laporan	266.071.367,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	15.208.306.020,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12Laporan	17.949.901.397,00	
	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	14.455.396.617,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	120 Orang/ Bulan	15.657.220.428,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	92.481.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	4 Dokumen	98.030.055,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	110.338.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	4 Dokumen	434.958.883,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 do Dokumen	129.046.369,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	4 Dokumen	486.586.151,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	116.917.714,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	357.132.777,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	102.714.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	5 Dokumen	363.277.858,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	116.497.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	18 Laporan	462.687.469,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	84.912.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	5 Dokumen	90.007.776,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Barang Milik Daerah oleh Perangkat Daerah	12 Laporan	206.051.810,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12Laporan	218.414.919,00	
	4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	106.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	112.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100.051.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	106.054.919,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumkah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	396.304.446,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12Dokumen	610.882.713,00	
	4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	88.956.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	2 Paket	210.894.102,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	67.100.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	145.326.918,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	131.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	40 Orang	139.775.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	108.382.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	8 Orang	114.885.853,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	12 Laporan	1.078.608.170,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12Laporan	5.181.924.661,00	
	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	59.003.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	2 Paket	168.543.596,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	98.932.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	25 Paket	338.068.768,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	94.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	10 Paket	460.451.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	140.879.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	3 Paket	573.332.069,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	138.862.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	3 Paket	730.193.932,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	366.436.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	2.296.422.669,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	180.105.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	614.912.347,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	1.077.241.431,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	4Unit	3.831.476.000,00	
	4	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	507.141.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	983.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	87.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	983.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	5 Paket	561.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	199.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	741.576.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	561.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	10.394.569.014,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12Laporan	13.982.662.674,00	
	4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	641.898.841,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	24 Laporan	3.171.412.771,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	9.752.670.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	96 Laporan	10.811.249.903,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	73 Unit	1.380.953.093,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	73Unit	14.507.612.820,00	
	4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	208.683.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	22 Unit	149.204.949,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	202.695.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	25 Unit	1.115.856.823,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	159.059.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	4 Unit	168.602.922,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	106.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	2 Unit	112.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	358.510.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	10 Unit	6.952.021.628,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	346.003.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	10 Unit	6.009.566.498,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 Orang	66.232.138.114,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	85Orang	81.443.772.733,00	
	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	85 Orang/ Bulan	65.060.071.794,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	85 Orang/ Bulan	77.689.182.434,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	864.514.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	7 Paket	3.036.385.179,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											
							0	0 0	307.552.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	85 Orang	718.205.120,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	12 Laporan	1.299.818.529,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12Laporan	9.538.268.355,00	
	4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	85 Dokumen	116.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan		342.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	136.536.529,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	250.728.721,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	121.582.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	128.876.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	925.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	5 Paket	8.816.162.714,00	SEKRETARIAT DPRD
275	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Prolegda yang terealisasi	100 %	100.464.252.824,00						100 %	201.660.222.896,00	
							% Jumlah Program Kerja DPRD yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD	100 %							100 %		
							Jumlah Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya	15							15		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan	12 Dokumen	9.064.113.585,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12Dokumen 12Dokumen	14.485.440.400,00	
	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	658.478.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12 Dokumen	697.987.736,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12 Dokumen	4.564.648.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12 Dokumen	9.442.527.854,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen	1.446.703.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12 Dokumen	1.533.505.685,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	741.974.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	6 Dokumen	1.528.493.305,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD											
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	700.307.378,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	752.925.820,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	500 Orang	952.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	100 Orang	530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran	3 Dokumen	6.923.624.780,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	3Dokumen 3Dokumen	12.533.042.266,00	
	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	788.614.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	835.931.883,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	789.974.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	837.373.349,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.352.036.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	2.917.158.410,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.263.076.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	2.928.860.704,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	1.239.379.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	2 Dokumen	2.373.741.742,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.490.543.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	2.639.976.178,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Kegiatan Komisi-komisi	5 Laporan	25.979.739.730,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	5Laporan 5Laporan	46.618.524.114,00	
	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	1.849.835.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	4 Laporan	1.960.825.259,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1.451.538.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	4 Laporan	1.538.630.312,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat											
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	1.451.194.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	4 Laporan	1.538.266.265,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	1.406.413.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	4 Laporan	1.490.798.660,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	1.276.116.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	4 Laporan	1.352.683.501,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1.710.068.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	1.812.672.419,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	14.620.524.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	4 Dokumen	34.577.756.288,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah											
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	2.214.048.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	2.346.891.410,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	4 Dokumen	6.786.167.140,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	4Dokumen 4Dokumen	10.267.337.169,00	
	4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.363.802.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	6 Dokumen	6.745.631.140,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli											
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 Orang	710.474.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	16 Orang	753.102.687,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi											
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	18 Orang	852.569.079,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	18 Orang	903.723.224,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 Dokumen	554.744.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	60 Dokumen	588.028.644,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD											
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	431.011.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	456.872.351,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	773.565.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	60 Dokumen	819.979.123,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Laporan	31.819.585.678,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	3Laporan 3Laporan	90.576.395.624,00	
	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD											
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	831.866.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	881.778.808,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses											
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	29.872.718.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	3 Dokumen	85.574.616.816,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	150 Orang	1.115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	150 Orang	4.120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	963.370.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1Laporan 1Laporan	1.021.172.624,00	
	4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD											
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	182.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Dokumen	193.259.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	781.050.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Laporan	827.913.424,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah	5 Dokumen	9.870.878.555,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	5Dokumen 5Dokumen	12.954.131.367,00	
	4	02	02	1.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah											
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5 Dokumen	9.704.091.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	5 Dokumen	12.777.336.559,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi											
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	166.787.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12 Dokumen	176.794.808,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD, Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD	12 Laporan	9.056.772.956,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12Laporan 12Laporan	13.204.179.332,00	
	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	4.322.345.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12 Dokumen	6.701.686.357,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD											
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	119.452.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1 Laporan	126.619.832,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	1.224.080.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12 Dokumen	2.781.524.946,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.623.149.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	12 Dokumen	2.780.538.088,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	767.745.386,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terfasilitasinya kinerja DPRD	4 Dokumen	813.810.109,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			**64.095.616.026,00**							**66.701.278.748,00**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			64.095.616.026,00							66.701.278.748,00	
	5	01				PERENCANAAN			61.172.086.926,00							61.162.179.818,00	
276	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 Nilai 100 % 98 Nilai	52.054.523.473,00						100% 100Nilai 99Nilai	46.955.855.656,00	
	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	14 Laporan / Dokumen	650.381.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	15Laporan / Dokumen	1.057.801.529,00	
	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	181.102.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	3 Dokumen	244.241.377,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	138.792.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	4 Dokumen	311.010.177,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	330.486.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	8 Laporan	502.549.975,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	28 Laporan / Dokumen	30.669.232.567,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	28Laporan / Dokumen	31.157.814.796,00	
	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	30.234.108.667,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	200 Orang/ Bulan	30.122.814.796,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	74.623.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Dokumen	369.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	56.112.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2 Laporan	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	32.768.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	271.620.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Laporan	216.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	11 Laporan / Dokumen	141.207.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	11Laporan / Dokumen	384.000.000,00	
	5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	21.148.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	21.857.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	6 Laporan	144.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	98.201.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	3 Laporan	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang terlayani administrasi	196 Orang	406.402.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	202Orang	760.000.000,00	
	5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	196 Paket	111.150.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	202 Paket	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	196 Dokumen	127.321.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	202 Dokumen	170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	196 Orang	85.850.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	202 Orang	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196 Orang	82.081.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	202 Orang	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	142 Laporan / Dokumen	3.368.589.398,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	152Laporan / Dokumen	2.990.000.000,00	
	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	157.722.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Paket	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.099.030.998,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Paket	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	90.226.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Paket	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	321.941.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Laporan	220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	1.657.166.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	80 Laporan	1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	42.500.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Dokumen	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	11.052.039.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	4Unit	1.520.000.000,00	
	5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	216.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2 Unit	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.836.039.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2 Unit	1.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	2.869.637.028,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	24Laporan	3.317.000.000,00	
	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.998.772,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Laporan	117.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.854.638.256,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Laporan	3.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	68 Unit	2.897.033.080,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	68Unit	5.769.239.331,00	
	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 Unit	483.732.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	41 Unit	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	210.381.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Unit	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	49.944.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	3 Unit	234.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.299.156.480,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2 Unit	3.234.864.331,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	853.817.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	10 Unit	1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
277	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap APBD Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD Rata-rata capaian kinerja program Prioritas Pembangunan daerah	100 % 100 % 92 Angka	4.009.389.950,00						93Angka 100% 100%	5.996.279.540,00	
	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Evaluasi Pembangunan daerah dengan Dokumen Perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	2.490.552.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100%	3.491.279.540,00	
	5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya											
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	189.206.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.301.345.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Dokumen	3.141.279.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100 %	294.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100%	600.000.000,00	
	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	151.275.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah											
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200 Orang	70.387.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	200 Orang	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi											
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100 Buku	72.596.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100 Buku	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	1.152.417.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100%	1.775.000.000,00	
	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi											
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	175.432.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Laporan	275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	616.984.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	8 Laporan	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	72 Dokumen	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	48 Dokumen	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase data yang dikelolah dalam sistem informasi pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan daerah	100 %	72.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100%	130.000.000,00	
	5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											
						Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3 Dokumen	72.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	3 Dokumen	130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
278	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N	100	5.108.173.503,00						100	8.210.044.622,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM	100						100		
							Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang ekonomi dan SDA Tahun N	100						100		
							Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA	100						100		
							Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang Infrastruktur dan kewilayahan Tahun N	100						100		
							Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100						100		
	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perencanaan yang ditindak lanjuti PD Lingkup Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 % 100 % 100 %	1.702.648.865,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Suls	100% 100% 100%	2.736.681.540,00	
	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	74.985.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Suls	1 Dokumen	273.668.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	158.654.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Suls	2 Laporan	273.668.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	272.919.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Suls	1 Laporan	465.235.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	471.505.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	492.602.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	337.362.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Laporan	547.336.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	387.222.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Laporan	684.172.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Perekonomian dan SDA Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	100 % 100 % 100 %	1.702.351.135,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100% 100% 100%	2.736.681.542,00	
	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	199.748.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	293.767.324,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	126.080.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Laporan	379.556.284,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	456.613.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Laporan	604.125.655,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	173.670.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	275.907.788,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	358.287.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Laporan	414.754.085,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	387.951.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Laporan	768.570.406,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 % 100 %	1.703.173.503,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100% 100% 100%	2.736.681.540,00	
	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	193.129.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	462.783.075,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	190.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Laporan	384.682.373,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	472.145.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Laporan	494.187.073,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	270.600.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	500.387.673,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	277.509.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Laporan	382.629.473,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	299.398.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Laporan	512.011.873,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.923.529.100,00							5.539.098.930,00	
279	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi dan teknologi Persentasi hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	15 % 40 %	2.923.529.100,00						16% 50%	5.539.098.930,00	
	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengaembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	764.105.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	3Laporan	1.223.821.056,00	
	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	227.247.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	528.644.056,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	536.858.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	695.177.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengaembangan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen	266.013.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	3Dokumen	628.754.000,00	
	5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	133.006.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	314.377.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	133.006.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	314.377.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengaembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	7 Dokumen	949.505.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	7Dokumen	1.602.466.880,00	
	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	200.802.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	2 Dokumen	711.262.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	200.685.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	2 Dokumen	576.827.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	161.400.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	314.377.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	215.217.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	171.400.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	appelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	14 OPD	943.904.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	14OPD	2.084.056.994,00	
	5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	219.904.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	619.976.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	209.904.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	320.054.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	223.016.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	321.589.214,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan											
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	97.741.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	246.955.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	193.336.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab/Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	575.481.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**2.393.720.657.288,00**							**3.302.400.273.016,00**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.393.720.657.288,00							3.302.400.273.016,00	
	5	02				KEUANGAN			2.393.720.657.288,00							3.302.400.273.016,00	
280	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 100 100	45.344.516.008,00						100 100 100	45.169.516.008,00	
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.950.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100%	2.750.000.000,00	
	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	15 Dokumen	750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	6 Dokumen	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	4 Dokumen	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74 Laporan	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	49 Laporan	1.050.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	27.504.516.008,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100%	27.369.516.008,00	
	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	25.024.516.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	139 Orang/ Bulan	25.024.516.008,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3077 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	3077 Dokumen	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	17 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	11 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	11 Dokumen	445.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	980.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	25 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	380.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100%	400.000.000,00	
	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	13 Laporan	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.200.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100%	5.550.000.000,00	
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	963 Paket	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	435 Paket	750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen	3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	16 Dokumen	3.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	50 Orang	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100 Orang	1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	2.230.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100%	2.400.000.000,00	
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	50 Paket	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	50 Paket	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	630.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	12 Laporan	650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	12 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.180.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100%	1.400.000.000,00	
	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2.180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	50 Unit	1.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100%	250.000.000,00	
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	12 Laporan	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	4.700.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	100%	5.050.000.000,00	
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel		2.300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel	1 Unit	1.800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	216 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	BKAD SulSel		950.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
281	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tepat Waktu Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu Evaluasi Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tepat Waktu Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.340.156.141.280,00						100% 100% 100% 100% 100%	3.249.330.757.008,00	
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	7.175.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	100%	6.520.000.000,00	
	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	2 Dokumen	255.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	2 Dokumen	135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	53 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	53 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD											
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	53 Dokumen	90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	53 Dokumen	90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	3.550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	1.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	3 Dokumen	700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran											
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	3.300.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kabupaten/Kota	100% 100%	3.650.000.000,00	
	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	24 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kabupaten/Kota	24 Laporan	600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	24 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kabupaten/Kota	24 Laporan	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	74 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kabupaten/Kota	74 Laporan	650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	24 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kabupaten/Kota		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	29 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kabupaten/Kota	361 Dokumen	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	6.530.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	100%	6.340.000.000,00	
	5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	2.880.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.910.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3000 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	721 Dokumen	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	8 Dokumen	750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	13 Dokumen	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	28 Laporan	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	4 Dokumen	280.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	75 Orang	900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.600.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	100%	5.100.000.000,00	
	5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	131 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	131 Dokumen	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	517 Laporan	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1166 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi											
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	9 Dokumen	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.950.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	15 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	25 Dokumen	700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	600 Orang	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	288 Orang	900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	2.317.551.141.280,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya	100%	3.227.720.757.008,00	
	5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya	1 Laporan	2.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan											
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	267.463.547.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya	4 Laporan	267.463.547.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	40.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya	4 Laporan	50.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	2.007.887.594.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya	4 Laporan	2.908.057.210.008,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
282	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Penetapan Status Penggunaan BMD Sesuai Ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMD Ditetapkan Tepat Waktu Persentase Tanah Pemerintah Provinsi Yang Telah Bersertifikat Cakupan Barang Milik Daerah Yang Dimanfaatkan	100 % 100 % 100 % 100 %	8.220.000.000,00						100% 100% 100% 100%	7.900.000.000,00	
	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	8.220.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	100%	7.900.000.000,00	
	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga											
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	6 Dokumen	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	5 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	178 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	191 Laporan	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	54 Laporan	1.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	55 Laporan	1.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	2.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	5 Laporan	2.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Laporan	850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	3 Laporan	600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59 Dokumen	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Perangkat Daerah	59 Dokumen	1.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH			**259.839.462.733,00**							**262.897.143.626,00**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			259.839.462.733,00							262.897.143.626,00	
	5	02				KEUANGAN			259.839.462.733,00							262.897.143.626,00	
283	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	255.760.490.094,00						100	258.723.374.587,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	932.178.300,00			-	-	-	12Dokumen	1.196.245.700,00	
	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	225.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	312.665.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	214.609.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	319.514.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	137.134.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	137.134.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	144.015.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	43.316.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	114.719.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	111.465.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	53.599.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	58.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	42.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	213.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	202.130.923.934,00			-	-	-	12Laporan	202.180.530.234,00	
	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	484 Orang/ Bulan	201.245.821.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	484 Orang/ Bulan	201.245.821.134,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	36.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	42.840.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400.646.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	436.711.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	91.386.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	92.342.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	31.668.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	178.333.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	173.619.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	142.962.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	154.262.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.265.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	3.265.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	347.258.000,00			-	-	-	12Laporan	198.149.000,00	
	5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12.719.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	13.283.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	152.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	105.977.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Laporan	5.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Laporan	4.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	159.986.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	57.887.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	4.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	785.364.200,00			-	-	-	12Laporan	815.110.100,00	
	5	02	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	302.442.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	287.206.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	117.826.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	118.670.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	365.094.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	409.233.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.131.967.400,00			-	-	-	100%	1.925.918.800,00	
	5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11 Unit	241.956.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	11 Unit	270.905.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	484 Paket	102.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	484 Paket	143.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	207.728.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	88.070.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	244.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	635.658.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN											
							Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	20 Orang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Orang	6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	120.547.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Orang	541.285.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	6.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Orang	210.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	201.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150 Orang	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.365.430.850,00			-	-	-	100%	4.088.761.100,00	
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	107.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100 Paket	107.712.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Paket	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	336.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Paket	269.347.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	2.682.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.542.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	376.101.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	408.668.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	575.503.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	329.576.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	3.648.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	228.542.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	397.059.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	24.616.824.554,00			-	-	-	100%	24.740.044.554,00	
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	221.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Paket	344.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	400 Unit	7.616.104.554,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400 Unit	7.616.104.554,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16.297.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	11 Unit	16.297.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	212.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	212.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.121.181.224,00			-	-	-	32Laporan	12.423.953.467,00	
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	211.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	111.990.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	6.718.524.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	5.982.238.536,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.850.394.651,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.094.666.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	3.479.330.280,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.329.361.632,00			-	-	-	12Laporan	11.154.661.632,00	
	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	155 Unit	1.114.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	155 Unit	844.030.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	654.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	155 Unit	654.840.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	165 Unit	495.085.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	165 Unit	545.085.720,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	592 Unit	55.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	592 Unit	55.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit	422.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Unit	467.670.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	8.587.535.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	26 Unit	8.587.535.912,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
284	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentasi keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	100	969.376.000,00						100	994.042.500,00	
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	575.258.800,00			-	-	-	100%	511.946.900,00	
	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	81.244.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	12.108.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	78.664.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	13.458.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	22.135.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	21.704.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	24.788.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	22.129.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD											
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	27.429.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	20.578.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	24.720.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	19.366.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	66.073.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	60.374.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	38.395.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	38.395.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	211.805.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	303.833.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	394.117.200,00			-	-	-	100%	482.095.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	338.386.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	427.816.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi											
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	12 Dokumen	55.731.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	54.278.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
285	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Peningkatan PAD	100	3.109.596.639,00						100	3.179.726.539,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	3.109.596.639,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	3.179.726.539,00	
	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	757.418.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	769.499.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	170.355.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	124.463.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	90.833.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	84.054.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	359.576.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	443.464.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	319.557.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	288.107.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	91.795.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	889.145.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	955.632.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	25 Laporan	300.702.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Laporan	300.702.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	122.006.439,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	122.006.439,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						UPT Pendapatan Wilayah Pangkep			481.701.050,00							481.701.050,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			481.701.050,00							481.701.050,00	
	5	02				KEUANGAN			481.701.050,00							481.701.050,00	
286	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	481.701.050,00						-	481.701.050,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	481.701.050,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	481.701.050,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	346.031.650,00	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	346.031.650,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	57.300.000,00	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	57.300.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	3.024.300,00	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	3.024.300,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	75.345.100,00	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	75.345.100,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP
						UPT Pendapatan Wilayah Barru			481.351.600,00							481.351.600,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			481.351.600,00							481.351.600,00	
	5	02				KEUANGAN			481.351.600,00							481.351.600,00	
287	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	481.351.600,00						-	481.351.600,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	481.351.600,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	481.351.600,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	338.189.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	338.189.600,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	46.250.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	46.250.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	2.304.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	2.304.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	94.608.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	94.608.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU
						UPT Pendapatan Wilayan Selayar			436.968.600,00							436.968.600,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			436.968.600,00							436.968.600,00	
	5	02				KEUANGAN			436.968.600,00							436.968.600,00	
288	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	436.968.600,00						-	436.968.600,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	436.968.600,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	436.968.600,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	303.418.600,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	303.418.600,00	UPT PENDAPATAN WILAYAN SELAYAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	43.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	43.000.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAN SELAYAR
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	1.050.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	1.050.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAN SELAYAR
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	89.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	89.500.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAN SELAYAR
						UPT Pendapatan Wilayah Gowa			925.884.550,00							925.884.550,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			925.884.550,00							925.884.550,00	
	5	02				KEUANGAN			925.884.550,00							925.884.550,00	
289	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	925.884.550,00						-	925.884.550,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	925.884.550,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	925.884.550,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	618.528.550,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	618.528.550,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	72.120.000,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	72.120.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	9.999.900,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	9.999.900,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	225.236.100,00	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	225.236.100,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA
						UPT Pendapatan Wilayah Maros			555.205.700,00							555.205.700,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			555.205.700,00							555.205.700,00	
	5	02				KEUANGAN			555.205.700,00							555.205.700,00	
290	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	555.205.700,00						-	555.205.700,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	555.205.700,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	555.205.700,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	350.707.800,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	350.707.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	48.720.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	48.720.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	6.000.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	6.000.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	149.777.900,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	149.777.900,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS
						UPT Pendapatan Wilayah Sidrap			667.172.650,00							667.172.650,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			667.172.650,00							667.172.650,00	
	5	02				KEUANGAN			667.172.650,00							667.172.650,00	
291	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	667.172.650,00						-	667.172.650,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	667.172.650,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	667.172.650,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	479.581.550,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	479.581.550,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	94.350.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	94.350.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	1.049.100,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	1.049.100,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	92.192.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	92.192.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP
						UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng			506.539.000,00							506.539.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			506.539.000,00							506.539.000,00	
	5	02				KEUANGAN			506.539.000,00							506.539.000,00	
292	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	506.539.000,00						-	506.539.000,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	506.539.000,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	506.539.000,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	364.072.000,00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	364.072.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	63.280.000,00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	63.280.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	12.000.000,00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	12.000.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	67.187.000,00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	67.187.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG
						UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara			537.759.650,00							537.759.650,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			537.759.650,00							537.759.650,00	
	5	02				KEUANGAN			537.759.650,00							537.759.650,00	
293	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	537.759.650,00						-	537.759.650,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	537.759.650,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	537.759.650,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	362.130.450,00	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	362.130.450,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	46.200.000,00	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	46.200.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	36.349.800,00	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	36.349.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	93.079.400,00	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	93.079.400,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA
						UPT Pendapatan Wilayah Enrekang			491.935.250,00							491.935.250,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			491.935.250,00							491.935.250,00	
	5	02				KEUANGAN			491.935.250,00							491.935.250,00	
294	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	491.935.250,00						-	491.935.250,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	491.935.250,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	491.935.250,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	322.976.850,00	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	322.976.850,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	65.100.000,00	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	65.100.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	2.408.400,00	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	2.408.400,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	101.450.000,00	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	101.450.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG
						UPT Pendapatan Wilayah Palopo			573.465.100,00							573.465.100,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			573.465.100,00							573.465.100,00	
	5	02				KEUANGAN			573.465.100,00							573.465.100,00	
295	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	573.465.100,00						-	573.465.100,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	573.465.100,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	573.465.100,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	454.320.100,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	454.320.100,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	33.900.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	33.900.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	1.845.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	1.845.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	83.400.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	83.400.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO
						UPT Pendapatan Wilayah Takalar			498.715.200,00							498.715.200,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			498.715.200,00							498.715.200,00	
	5	02				KEUANGAN			498.715.200,00							498.715.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	498.715.200,00						-	498.715.200,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	498.715.200,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	498.715.200,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	335.808.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	335.808.400,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	57.560.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	57.560.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	1.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	1.999.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	103.347.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	103.347.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR
						UPT Pendapatan Wilayah Pare-Pare			594.275.600,00							594.275.600,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			594.275.600,00							594.275.600,00	
	5	02				KEUANGAN			594.275.600,00							594.275.600,00	
297	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	594.275.600,00						-	594.275.600,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	594.275.600,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	594.275.600,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	388.255.600,00	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	388.255.600,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	71.990.000,00	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	71.990.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	2.100.000,00	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	2.100.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	131.930.000,00	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	131.930.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE
						UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba			579.246.050,00							579.246.050,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			579.246.050,00							579.246.050,00	
	5	02				KEUANGAN			579.246.050,00							579.246.050,00	
298	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	579.246.050,00						-	579.246.050,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	579.246.050,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	579.246.050,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	401.881.050,00	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	401.881.050,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	41.050.000,00	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	41.050.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	2.805.000,00	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	2.805.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	133.510.000,00	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	133.510.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA
						UPT Pendapatan Wilayah Pinrang			650.427.050,00							650.427.050,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			650.427.050,00							650.427.050,00	
	5	02				KEUANGAN			650.427.050,00							650.427.050,00	
299	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	650.427.050,00						-	650.427.050,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	650.427.050,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	650.427.050,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	427.327.150,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	427.327.150,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	101.500.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	101.500.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	17.040.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	17.040.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	104.559.900,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	104.559.900,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG
						UPT Pendapatan Wilayah Soppeng			479.326.800,00							479.326.800,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			479.326.800,00							479.326.800,00	
	5	02				KEUANGAN			479.326.800,00							479.326.800,00	
300	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	479.326.800,00						-	479.326.800,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	479.326.800,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	479.326.800,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	330.913.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	330.913.200,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	56.910.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	56.910.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	2.303.700,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	2.303.700,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	89.199.900,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	89.199.900,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG
						UPT Pendapatan Toraja Utara			441.207.900,00							441.207.900,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			441.207.900,00							441.207.900,00	
	5	02				KEUANGAN			441.207.900,00							441.207.900,00	
301	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	441.207.900,00						-	441.207.900,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	441.207.900,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	441.207.900,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	298.907.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	298.907.900,00	UPT PENDAPATAN TORAJA UTARA
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	38.450.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	38.450.000,00	UPT PENDAPATAN TORAJA UTARA
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	23.850.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	23.850.000,00	UPT PENDAPATAN TORAJA UTARA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	80.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	80.000.000,00	UPT PENDAPATAN TORAJA UTARA
						UPT Pendapatan Tana Toraja			511.097.150,00							511.097.150,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			511.097.150,00							511.097.150,00	
	5	02				KEUANGAN			511.097.150,00							511.097.150,00	
302	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	511.097.150,00						-	511.097.150,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	511.097.150,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	511.097.150,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	397.797.150,00	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	397.797.150,00	UPT PENDAPATAN TANA TORAJA
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	45.600.000,00	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	45.600.000,00	UPT PENDAPATAN TANA TORAJA
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	300.000,00	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	300.000,00	UPT PENDAPATAN TANA TORAJA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	67.400.000,00	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	67.400.000,00	UPT PENDAPATAN TANA TORAJA
						UPT Pendapatan Wilayah Wajo			724.541.950,00							724.541.950,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			724.541.950,00							724.541.950,00	
	5	02				KEUANGAN			724.541.950,00							724.541.950,00	
303	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	724.541.950,00						-	724.541.950,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	724.541.950,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	724.541.950,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	559.431.950,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	559.431.950,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	53.400.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	53.400.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	1.500.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	1.500.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	110.210.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	110.210.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO
						UPT Pendapatan Wilayah Sinjai			455.771.400,00							455.771.400,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			455.771.400,00							455.771.400,00	
	5	02				KEUANGAN			455.771.400,00							455.771.400,00	
304	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	455.771.400,00						-	455.771.400,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	455.771.400,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	455.771.400,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	266.101.400,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	266.101.400,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	57.950.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	57.950.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	36.000.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	36.000.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	95.720.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	95.720.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI
						UPT Pendapatan Wilayah Makassar I (Selatan)			987.960.700,00							987.960.700,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			987.960.700,00							987.960.700,00	
	5	02				KEUANGAN			987.960.700,00							987.960.700,00	
305	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	987.960.700,00						-	987.960.700,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	987.960.700,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	987.960.700,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	678.791.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	678.791.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	94.191.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	94.191.900,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	12.000.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	202.977.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	202.977.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)
						UPT Pendapatan Wilayah Belopa			544.593.100,00							544.593.100,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			544.593.100,00							544.593.100,00	
	5	02				KEUANGAN			544.593.100,00							544.593.100,00	
306	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	544.593.100,00						-	544.593.100,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	544.593.100,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	544.593.100,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	376.221.100,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	376.221.100,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	57.950.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	57.950.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	1.500.000,00	-	-	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	1.500.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	108.922.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	108.922.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA
						UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto			436.987.600,00							436.987.600,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			436.987.600,00							436.987.600,00	
	5	02				KEUANGAN			436.987.600,00							436.987.600,00	
307	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	436.987.600,00						-	436.987.600,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	436.987.600,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	436.987.600,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	275.381.800,00	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	275.381.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	61.850.000,00	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	61.850.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	17.179.800,00	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	17.179.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	82.576.000,00	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	82.576.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO
						UPT Pendapatan Wilayah Bone			648.745.050,00							648.745.050,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			648.745.050,00							648.745.050,00	
	5	02				KEUANGAN			648.745.050,00							648.745.050,00	
308	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	648.745.050,00						-	648.745.050,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	648.745.050,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	648.745.050,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	408.955.250,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	408.955.250,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	88.500.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	88.500.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	6.499.800,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	6.499.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	144.790.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	144.790.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur			662.532.700,00							662.532.700,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			662.532.700,00							662.532.700,00	
	5	02				KEUANGAN			662.532.700,00							662.532.700,00	
309	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	662.532.700,00						-	662.532.700,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	662.532.700,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	662.532.700,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	418.407.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	418.407.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	79.979.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	79.979.800,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	45.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	45.000.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	119.145.100,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	119.145.100,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR
						UPT Pendapatan Wilayah Makassar II (Utara)			943.129.200,00							943.129.200,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			943.129.200,00							943.129.200,00	
	5	02				KEUANGAN			943.129.200,00							943.129.200,00	
310	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	943.129.200,00						-	943.129.200,00	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	943.129.200,00			-	-	-	12Laporan 12Laporan	943.129.200,00	
	5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Sarana dan Prasarana	608.065.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500 Sarana dan Prasarana	608.065.200,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	86.160.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	86.160.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen Ketetapan	12.000.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	236.904.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen SSPD	236.904.000,00	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)
						BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			**26.013.458.841,00**							**32.004.233.018,00**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			26.013.458.841,00							32.004.233.018,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			26.013.458.841,00							32.004.233.018,00	
311	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 98 100	24.163.458.841,00						100 100 100	27.035.563.192,00	
	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	101.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	30Dokumen	262.851.900,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Dokumen	36.682.182,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	22.278.173,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	11.353.663,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	18.404.571,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	13.552.319,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	7.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan	14.739.263,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan	145.841.729,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54 Laporan	21.289.484.786,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	54Laporan	22.260.218.679,00	
	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ Bulan	21.231.484.786,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	140 Orang/ Bulan	22.091.949.232,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Dokumen	31.121.171,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Dokumen	31.951.997,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4 Dokumen	4.165.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	10.500.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	11.179.754,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan	79.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	2847 Unit	12.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2847Unit	76.206.250,00	
	5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Dokumen	19.837.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	6.612.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Laporan	6.612.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	3 Laporan	9.918.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Laporan	13.225.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	5 Laporan	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Laporan	1.387.038.796,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	8Laporan	1.656.593.438,00	
	5	03	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Unit	23.143.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	7 Paket	32.401.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.335.038.796,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	1.318.694.688,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	13.225.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Dokumen	33.062.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	3 Orang	37.691.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	170 Orang	112.412.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	14.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	150 Orang	85.962.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	550 Orang 259 Unit	1.061.622.259,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	268Unit 600Orang	1.387.646.250,00	
	5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	117 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	119 Paket	79.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	51 Paket	691.622.259,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		33.062.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	56 Paket	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		46.287.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	70.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		1.983.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	110.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		391.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275 Laporan	150.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	135 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		46.287.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		39.675.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	36 Unit	126.580.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	43Unit	456.262.500,00	
	5	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		39.675.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		99.187.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	81.580.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		119.025.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		66.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		66.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		66.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4Laporan	116.782.925,00	
	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1100 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		52.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		5.692.925,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		26.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		31.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	114 Unit	170.482.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	116Unit	819.001.250,00	
	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	90.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		345.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	28 Unit	482.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		25.788.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		85.962.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		66.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		66.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
312	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	94 % 86 % 65,3 %	1.850.000.000,00						87% 95% 65,6%	4.968.669.826,00	
	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Kepegawaian Persentase Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Persentase Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu Persentase Pengangkatan ASN sesuai dengan Rencana kebutuhan yang transparan	100 % 100 % 100 % 100 %	600.510.620,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100 % 100% 100% 100%	834.413.257,00	
	5	03	02	1.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	29.388.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	64.364.356,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	1.981.860,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Dokumen	6.272.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK											
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	124.282.360,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	240.295.473,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	18.448.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	40.442.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	13.987.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	32.693.522,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian											
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	36.299.260,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	58.586.882,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	12.838.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	38.233.475,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN											
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	312.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Lembaga	240.486.839,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	2.046.480,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	47.743.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.689.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	9.484.309,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	20.875.620,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	10.535.696,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	24.672.540,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	45.274.465,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang obyektif dan tepat waktu	100 %	610.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100%	1.554.091.206,00	
	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen	140.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4 Dokumen	342.909.306,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Laporan	628.660.193,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	320.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	582.521.707,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	371.017.110,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100%	1.587.690.874,00	
	5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN											
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	80 Orang	49.405.510,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100 Orang	185.150.265,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center											
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	120.694.420,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	608.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	3.108.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	47.651.130,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	28.814.660,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	114.354.062,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	15.794.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	65.155.475,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	100 Orang	14.564.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100 Orang	41.806.738,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	9.415.840,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	35.126.922,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	02	1.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	300 Orang	36.627.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	300 Orang	127.074.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	14.000.490,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	79.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	100 Orang	9.963.520,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100 Orang	44.965.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN											
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	14.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	51.127.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN											
							Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	130 Orang	35.451.290,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	140 Orang	129.019.265,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	19.177.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4 Dokumen	58.560.961,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Evaluasi Kinerja Pegawai Berbasis TI Persentase Pelayanan Pembinaan ASN yang terselesaikan Persentase Pemberian Penghargaan Pegawai	100 % 100 % 100 %	268.472.270,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100% 100% 100 %	992.474.489,00	
	5	03	02	1.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	56.717.430,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	159.432.004,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	48.340.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	136.816.857,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	12.976.920,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	74.720.721,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai											
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	14.811.885,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	10 Orang	95.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai											
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1000 Orang	35.954.490,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1000 Orang	100.700.572,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur											
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	21.275.430,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	69.203.515,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	48 Orang	53.366.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	50 Orang	120.976.349,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	15.065.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	25 Laporan	103.155.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai											
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	4.490.310,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	20 Dokumen	63.479.603,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	5.473.105,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	68.769.868,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA			**41.872.561.806,00**							**42.777.266.087,00**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			19.113.511.767,00							17.341.176.340,00	
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			19.113.511.767,00							17.341.176.340,00	
313	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	5.454.021.568,00						100	9.422.768.204,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	730.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	33Dokumen	1.039.885.000,00	
	5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	550.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	744.554.900,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	75.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	75.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	110.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	25 Laporan	144.930.100,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	52.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	56Laporan	209.494.100,00	
	5	04	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	70.640.700,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	73.580.400,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	65.273.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	230.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17Laporan	720.957.600,00	
	5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	150 Paket	285.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	220.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	435.957.600,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	804.669.548,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	60Unit	1.683.738.948,00	
	5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	110.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Paket	328.987.600,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	284.669.548,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24 Paket	384.669.548,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	60.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Paket	299.265.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	670.816.800,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	250.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	49Unit	775.000.000,00	
	5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Paket	215.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	210.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	250.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	40 Unit	350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.950.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24Laporan	3.779.240.536,00	
	5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.300.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.836.792.468,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.650.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.942.448.068,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	437.352.020,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	64Unit	1.214.452.020,00	
	5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	82.352.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Unit	382.352.020,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Unit	225.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	210.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	310.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		297.100.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
314	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	75	13.659.490.199,00						100	7.918.408.136,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	75						100		
							Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100						100		
							Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	7 Sertifikat						8 Sertifikat		
	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	10.169.490.199,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30Orang 3550Orang	3.092.491.434,00	
	5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	229.499.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											
							Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	219.499.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3450 Orang	10.059.490.199,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3550 Orang	2.373.994.434,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	110.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		269.499.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	3.490.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24Kab/Kota 610Orang	4.825.916.702,00	
	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional											
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	162.461.600,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi											
							Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	142.881.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota											
							Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	30 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Orang	132.731.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	405.386.886,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga											
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	527.555.300,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3590 Orang	3.220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	610 Orang	3.004.091.316,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	450.809.600,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X					NON URUSAN			22.759.050.039,00							25.436.089.747,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			22.759.050.039,00							25.436.089.747,00	
315	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	100	22.759.050.039,00						100	25.436.089.747,00	
							Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	100							100		
							Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	83,18							87,05		
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	70.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	33Dokumen	150.400.000,00	
	X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		75.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	75.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	22.177.050.039,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	56Laporan	23.780.672.287,00	
	X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	21.797.050.039,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	150 Orang/ Bulan	23.326.671.887,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	334.126.400,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	35.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	74.710.200,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	45.163.800,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	122.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	60Unit	402.523.660,00	
	X	XX	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	122.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	402.523.660,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	49Unit	545.000.000,00	
	X	XX	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	395.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	390.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	64Unit	557.493.800,00	
	X	XX	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	390.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Unit	557.493.800,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
						BADAN PENGHUBUNG			**16.549.183.815,00**							**17.376.643.006,00**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			16.549.183.815,00							17.376.643.006,00	
	5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG			16.549.183.815,00							17.376.643.006,00	
316	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 Nilai 95 Nilai 65 %	11.650.830.140,00						96Nilai 67% 100Nilai	12.233.371.647,00	
	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	131.250.000,00			-	-	-	100%	137.812.500,00	
	5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.014.931.120,00			-	-	-	100%	7.365.677.676,00	
	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ Bulan	6.939.931.120,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	54 Orang/ Bulan	7.286.927.676,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola ole perangkat daerah	100 %	56.310.000,00			-	-	-	100%	59.125.500,00	
	5	07	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	18.750.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	350000000 Rupiah	18.810.000,00			-	-	-	350000000Rupiah	19.750.500,00	
	5	07	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 %	18.930.000,00			-	-	-	85%	19.876.500,00	
	5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	82 Paket	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	18.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	19.687.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	54 Orang	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Tamu Yang difasilitasi	100 %	1.123.909.680,00			-	-	-	100%	1.180.105.164,00	
	5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	277.008.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Paket	290.859.345,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	137.116.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Paket	143.971.905,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	41.980.680,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Paket	44.079.714,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	372.804.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	391.444.200,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	295.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	309.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	85 %	420.000,00			-	-	-	85%	441.000,00	
	5	07	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.380.139.840,00			-	-	-	100%	1.449.146.832,00	
	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.139.840,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	21.146.832,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	835.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	876.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	525.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	551.250.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.905.949.500,00			-	-	-	100%	2.001.246.975,00	
	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	930.705.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	31 Unit	977.240.460,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar											
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	189.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	43 Unit	198.450.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	786.004.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	825.304.515,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang Terfasilitasi	95 %	180.000,00			-	-	-	95%	189.000,00	
	5	07	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Laporan	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
317	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Pelayanan Badan Penghubung Daerah	87 %	4.898.353.675,00						88%	5.143.271.359,00	
	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	100 %	4.898.353.675,00			-	-	-	100%	5.143.271.359,00	
	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat											
							Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	4.898.113.675,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	5.143.019.359,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat											
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	60.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya											
							Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya											
							Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	60.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	63.000,00	BADAN PENGHUBUNG
						INSPEKTORAT			59.407.721.757,00							89.771.570.999,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			59.407.721.757,00							89.771.570.999,00	
	6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**			**59.407.721.757,00**							**89.771.570.999,00**	
318	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	98,46 0 98,00	39.722.016.897,00						0% 98,46% 98,46%	62.996.033.099,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	700.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.050.000.000,00	
	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	37.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	37.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	187.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	187.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	31.988.609.317,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	52.520.498.945,00	
	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1920 Orang/ Bulan	31.723.633.964,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2.040 Orang/ Bulan	52.123.035.916,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	82.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	123.868.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.175.853,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	189.263.779,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	16.125.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.470.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	23.205.750,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	100 %	21.230.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	31.845.000,00	
	6	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.474.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	15.711.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.756.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	16.134.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai capaian kinerja bulanan pegawai Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN	99 % 85 %	1.314.601.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	88% 100%	1.671.902.100,00	
	6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket	159.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	183 Paket	239.760.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	97.969.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	146.954.100,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	160 Dokumen	299.241.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	170 Dokumen	448.861.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	757.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	110 Orang	836.326.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah	100 %	1.530.653.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	2.027.244.600,00	
	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Paket	15.750.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	11 Paket	14.250.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Paket	12.855.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	185.823.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24 Paket	173.735.550,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	66.018.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Paket	99.027.750,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	462.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	693.300,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	210.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	315.600.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	897.949.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Laporan	1.346.923.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	48.409.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	705.445.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.058.167.500,00	
	6	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Unit	42.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	33 Paket	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit	577.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	59 Unit	866.167.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersedian jasa penunjang urusan kantor	100 %	2.851.572.780,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	3.730.517.454,00	
	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	8.100.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	512.128.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	768.193.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.334.043.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	2.954.224.254,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	609.905.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	905.857.500,00	
	6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	47.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	70.686.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	362.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	544.050.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	76.081.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Unit	114.121.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	27.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	150.000.000,00	INSPEKTORAT
319	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP % OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat % Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	82 % 100 % 75 %	16.627.145.600,00						83% 76% 100%	22.650.218.400,00	
	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Kabupaten/Kota yang dimonitoring Cakupan perangkat daerah yang diawasi kinerjanya Cakupan perangkat daerah yang diawasi laporan keuangannya Cakupan perangkat daerah yang direviu dokumen perencanaannya	100 % 100 % 100 % 100 %	12.339.151.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 100% 100% 100%	17.718.227.400,00	
	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	92 Laporan	2.213.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	92 Laporan	3.684.822.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	92 Laporan	5.039.691.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	92 Laporan	6.929.537.400,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	135 Laporan	860.784.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	144 Laporan	1.141.176.600,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	56 Laporan	422.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	56 Laporan	633.180.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	57 Laporan	2.457.962.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	66 Laporan	3.686.943.900,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal											
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	348.554.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Kesepakatan	372.831.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	86 Dokumen	996.491.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	88 Dokumen	1.269.736.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	4.287.994.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	4.931.991.000,00	
	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah											
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	27 Laporan	139.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	27 Laporan	208.770.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160 Laporan	4.148.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	170 Laporan	4.723.221.000,00	INSPEKTORAT
320	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	% pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti % kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah % pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	100 % 100 % 100 %	3.058.559.260,00						100% 100% 100%	4.125.319.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	% kebijakan pengawasan pemerintah provinsi yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan pemerintah Kab/kota	100 %	1.135.512.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.703.268.000,00	
	6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan											
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	950.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Rekomendasi	1.425.603.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan											
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	48 Rekomendasi	185.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Rekomendasi	277.665.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah kabupaten/kota Cakupan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah	100 % 100 %	1.923.047.260,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100% 100%	2.422.051.500,00	
	6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	230.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	35 Perangkat Daerah	346.200.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 Perangkat Daerah	265.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	53 Perangkat Daerah	397.576.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	1.308.346.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Kegiatan	1.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah	118.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Perangkat Daerah	178.275.000,00	INSPEKTORAT
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			74.044.097.990,00							62.172.359.349,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			74.044.097.990,00							62.172.359.349,00	
	8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**74.044.097.990,00**							**62.172.359.349,00**	
321	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	87.11 Nilai 83.18 % 100.92 Nilai	11.777.859.809,00						87.05% 91.47Nilai 101.43Nilai	11.111.412.349,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	467.556.872,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	24Dokumen	241.882.000,00	
	8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	306.983.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	179.832.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	39.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	1.485.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	10.743.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	6.402.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	4.442.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	67.548.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Laporan	5.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	27.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Laporan	33.553.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87 Laporan	7.375.282.144,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	89Laporan	7.134.694.349,00	
	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	7.154.047.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	54 Orang/ Bulan	6.953.410.349,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	43.038.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Dokumen	32.581.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	95.907.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	11.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	4.169.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.751.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	2.165.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	77.938.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	118.969.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	11.540.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola Oleh Perangkat Daerah	4 Barang	67.540.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4Barang	56.800.000,00	
	8	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	46.470.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	33.821.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.002.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	21.894.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195 Laporan	287.531.636,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	195Laporan	183.823.000,00	
	8	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket	81.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	58 Paket	94.456.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	57.165.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	28.936.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	91.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	1.837.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun											
							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Orang	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	53.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Orang	54.254.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Orang	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen Jumlah Laporan Jumlah Paket	43 Dokumen 41 Laporan 26 Paket	1.943.616.668,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	43Dokumen 41Laporan 26Paket	1.010.325.000,00	
	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	44.622.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Paket	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	133.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Paket	136.058.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	40.565.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	21.485.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	212.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	250.473.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	1.478.521.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	40 Laporan	551.457.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	34.622.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	2.975.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Jumlah Unit	10 Paket 42 Unit	260.689.350,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	42Unit 10Paket	387.977.000,00	
	8	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	101.455.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	194.477.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	154.961.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Unit	189.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224 Laporan	772.426.839,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	224Laporan	1.215.509.000,00	
	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	770.290.839,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.213.339.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	69 Unit	603.215.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	69Unit	880.402.000,00	
	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	385.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	26 Unit	649.473.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	8.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	9.030.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	143.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	59.679.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	63.690.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	160.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
322	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peserta yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa	80 %	1.496.900.088,00						80 %	8.175.787.000,00	
	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan ideologi pancasila Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan karakter bangsa	80 % 80 %	1.496.900.088,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	80% 80%	8.175.787.000,00	
	8	01	02	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	219.154.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	137.766.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	6.148.125.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 Orang	45.394.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Orang	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	12.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	78.508.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka											
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	13 Dokumen	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	14 Dokumen	1.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
323	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat	85 %	26.808.563.627,00						95%	8.049.520.000,00	
	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan Politik kepada masyarakat	85 %	26.808.563.627,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	85%	8.049.520.000,00	
	8	01	03	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	5.975.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	106.463.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	113.031.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	26.425.599.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	7.833.556.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Orang	30.739.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	66.219.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
324	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas	100 %	1.374.702.448,00						100 %	115.419.000,00	
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dibidang pemberdyaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	50 Kali 50 Kali	1.374.702.448,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	50Kali 50Kali	115.419.000,00	
	8	01	04	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	35.205.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	949.990.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	33.121.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	33.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	25.571.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	41.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	21.522.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
325	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100 %	1.282.078.236,00						100 %	1.495.548.000,00	
	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan Organisasi bentukan pemrintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	2 Kali 2 kali	1.282.078.236,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2kali 2Kali	1.495.548.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	05	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	8.508.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	62.981.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	1.154.606.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	1.341.267.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	63.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	51.144.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	55.419.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Laporan	40.156.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
326	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda	100 %	31.303.993.782,00						100 %	33.224.673.000,00	
	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan tim bentukan pemerintah di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial Jumlah kordinasi dan sinergi dengan forkopimda	6 Kali 12 Kali	31.303.993.782,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12Kali 6Kali	33.224.673.000,00	
	8	01	06	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 Dokumen	29.732.489.386,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Dokumen	29.436.859.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	42.008.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	1.142.571.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	79.495.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Orang	546.972.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	430.837.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	1.667.434.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapain visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Disamping kedua indikator tersebut, terdapat indikator SPM dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustanable Development Goals (SDG's) yang juga merupakan indikator yang wajib di gunakan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

7.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan daerah. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan daerah dimaksud terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Penganggurasn Terbuka (TPT)
4. Gini Ratio
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. PDRB Perkapita (ADHB)
7. Indeks Modal Manusia (IMM)
8. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Kinerja indikator makro Pembangunan Sulawesi selatan Tahun 2023 dan perkiraan capaian serta target 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII.1.
Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023-2025

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2023	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target Kesepakatan Rakortek	Target Kesepakatan Forum IMD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	5,5 - 6,90	5,50-6,30	6,45-6,79	5,50-6,30
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,7	8,31	7,30-7,89	7,30-7,89	7,30-7,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,33	4,24	3,80-4,10	3,70-4,10	3,80-4,10
4	Indeks Gini (Maret)	Indeks	0,377	0,361	0,371-0,376	0,371-0,376	0,371-0,376
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,46	73,99-74,02	-	-	-
6	PDRB Perkapita (ADHB)	Jt Rp.	65,59 (2022)	70,7	75,55	75,55	-
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	-	-	0,53	0,54	0,53
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK		-	-	3,7	37	3,7

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, merupakan target tahun kedua periode RPD 2024 - 2026. Dari enam indikator makro tersebut pada tabel diatas, indikator pertumbuhan ekonomi dan Tingkat kemiskinan belum menunjukkanperbaikan yang signifikan dengan pencapaian penurunan pertumbuhan ekonomi dan masih meningkatnya persentase penduduk miskin ditahun 2023, sedangkan indikator Tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, indeks pembanguna manusia dan PDRB perkapita (ADHB) menunjukkan capaian yang membaik. Adapun capaian 2023 dan target yang diharapkan ditahun 2024 dan 2025 selengkapnya dijelaskan sebagai berikut.

Ekonomi Sulawesi Selatan secara kumulatif selama tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 persen, capaian ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 sebelumnya senilai 5,09 persen. Meskipun capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor yang menonjol kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan 13,63 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 perlu mendapat perhatian agar Pembangunan ditahun berikutnya khususnya ditahun 2025 dengan target 5,50 – 6,30 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur serta layanan publik.

Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,07 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan tahun 2023 dari 8,63 persen menjadi 8,70 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami peningkatan 11.410 jika disbanding Maret 2022. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ini antara lain pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan yang berpengaruh pada pertumbuhan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor padat karya yang juga mengalami perlambatan, termasuk pula sektor pertanian, kehutanan, perikanan, jasa Pendidikan dan transportasi tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan capaian kinerja Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan diharapkan mengalami perbaikan menjadi 8,31 persen ditahun 2024 dan 7,30-7,89 persen ditahun 2025. Dalam Upaya pencapaian target penurunan kemiskinan ditahun-tahun berikutnya perlu dilakukan Langkah-langkah penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan pertumbuhan sektor padat karya yang dibarengai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengintegrasi layanan dan system data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan

Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang membaik dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,18 point. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023 yang sebesar 4,33% menunjukkan nilai capaian yang telah berada dibawah rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan usia angkatan kerja (penduduk usia 15 -64 tahun) Provinsi Sulwesi Selatan Tahun 2022 dan tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 1,58% dengan tingkat pengangguran terbuka yang hanya turun sebesar 0,18 % hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja belum sepenuhnya dapat mengatasi peningkatan angkatan kerja. Capaian yang diharapkan tahun 2024 sebesar 4,24 persen dan target tahun 2025 sebesar 3,80-4,10 persen diharapkan dapat tercapai dengan mendorong peningkatan UMKM; mendorong minat anak muda menjadi petani milenial mengingat sektor pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar, medorong pembukaan lapangan kerja baru disektor industri pengolahan dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat terserap di pasar kerja yang tersedia.

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 adalah 0,377. Capaian tahun tersebut lebih baik dari capain nasional yang berada pada angka 0,388. Pada tahun 2024 diharapkan Tingkat ketimpangan pendapat dan distribusinya akan lebih membaik dengan nilai 0,361 dan pada tahun 2025 ditargetkan senilai 0,371-0,376. Untuk mendukung target tersebut, perlu dilakukan sinergi kebijakan dan program pemerintah daerah yang mampu menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk, dan disisi lain mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pembangunan kualitas manusia di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan capaian indeks Pembangunan manusia (IPM) pada

tahun 2023 sebesar 73,46, yang meningkat sebesar 0,64 poin dari tahun 2022. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM Sulawesi Selatan pada tahun 2024 diharapkan dapat mencapai dan ditargetkan meningkat hingga 73,99-74,02 dan ditahun 2025 sudah menggunakan indikator Indeks Modal Manusia (IMM) dengan target 0,53. Untuk mendukung target ini, peningkatan Indeks Pendidikan diupayakan melalui perluasan akses dan kualitas pendidikan menengah, khusus dan vokasi termasuk pendidikan inklusi terutama bagi masyarakat rentan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan. Untuk Indeks Kesehatan dapat diupayakan melalui peningkatan sarana/ prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang Inklusif, serta dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sebagai isu kesehatan nasional. Peningkatan Indeks Ekonomi diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, dan perluasan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.

Tabel VII.2.
Indikator Makro Berdasarkan Hasil kesepakatan Rakortek Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target 2025
1	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	74,55
2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	12,51 – 12,58
3	Tingkat Kemiskinan	%	8,20
4	Rasio Gini	nilai	0,356
5	Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,25
6	Indeks Modal Manusia	nilai	0,53
7	Indonesia Blue Ekonomi Indeks	nilai	80,86
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		2.075.597
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Provinsi	%	44,5 – 45,0
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67 – 6,82
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Disektor Formal	%	20
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,03
13	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	54,3
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Nilai	1,41
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	%	78,22
16	Proporsi PBD Ekonomi Kreatif	%	0,19
17	Indeks Pembangunan	Indeks	6,0

No.	Indikator	Satuan	Target 2025
	Tehnologi Informasi dan Komunikasi		
18	Eksport Barang dan Jasa		6,8
19	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	koefisien	8,67
20	Pembentukan Modal tetap Bruto		36,5
21	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	50,45
22	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,34
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,35
24	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73,95
25	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	Tinggi
26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	nilai	0,6
27	Tingkat Inflasi	%	1 - 3
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	70,34 – 70,35
29	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,36
30	Konsumsi Listrik Perkapita		1.680
31	Prevelensi Kecukupan konsumsi pangan	%	10,79

Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortek 2024

7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Indikator Kinerja Utama Sulawesi Selatan dibuat untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU bertujuan memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Capaian dan Target indikator kinerja utama 2023 hingga 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VII.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Perkiraan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2023	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Nilai SAKIP Provinsi	68,78 (B)	68,52 (B)	69,27(B)
2	Indeks Pelayanan Publik	4,34 (A-)	A- (4,01 – 4,50)	A- (4,01 – 4,50)
3	Indeks Layanan Infrastruktur	81,20	81,97	82,34
4	Tingkat Kemiskinan	8,7	6,7 -7,7	7,30-7,89
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,33	4,24	3,80-4,10
6	Pertumbuhan Ekonomi	4,51	5,5-6,90	5,50-6,30
7	IPM	73,46	73,99-74,02	
	Indeks Modal Manusia (IMM)			0,53
8	Indeks Pembangunan Gender	93,19	93,65	93,78
9	Potensi Penurunan Emisi GRK	1.660.000	1.823.583	2.075.597

Sumber : BPS, dan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa 8 indikator kinerja utama, yang merupakan indikator sasaran Pembangunan dan empat indikator diantaranya juga merupakan indikator kinerja makro Pembangunan yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Indikator kinerja utama yang terdiri dari nilai sakip, indeks pelayanan publik, indeks layanan infrastruktur, indeks pembangunan gender dan potensi penurunan emisi GRK merupakan IKU yang tidak termasuk dalam indikator makro Pembangunan. Adapun capaian nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 berada dalam kategori B (68,78), capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2022, peningkatan tersebut diperoleh dari semua komponen yang dinilai yaitu komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Perkiraan capaian tahun 2024 senilai 68,52 optimis dapat di capai sebab nilai tersebut telah terlampaui capaiannya di tahun 2022, sementara target 2025 senilai 69,27 diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan terhadap 4 kompenan penilaian kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun kinerja Indeks pelayanan publik di tahun 2023 memperoleh capaian 4,34 (A-), mengalami peningkatan sebesar 0,15 point dari tahun 2022. Capaian tersebut juga telah sesuai dengan perkiraan capaian 2024 dan target 2025. Namun demikian untuk mencapai batas tertinggi nilai yang ditargetkan sebesat 4,50 masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, system informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan.

Indeks layanan infrastruktur Tahun 2023 senilai 81,20 menunjukkan angka telah melampaui target yang ditetapkan ditahun 2023 yaitu 79,64. Indeks ini dihitung dengan menggunakan 6 indikator pembangun yaitu (1). Kemantapan jalan; (2). Ketersediaan pelabuhan pengumpan regional pada PKW; (3). Rasio jaringan irigasi; (4). Rumah tangga dengan akses air minum layak; (5). Rumah tangga dengan akses sanitasi layak; serta (6). Rasio Elektrifikasi. Capaian indeks layanan infrastruktur di tahun 2024 dan 2025 diharapkan mengalami peningkatan melalui peningkatan terhadap kemantapan jalan, penambahan panjang jaringan irigasi baik dan peningkatan cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi dan air minum layak.

7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Dalam Upaya mensingkronkan RKPD 2025 dengan dokumen penrencanaan yang telah disusun sebelumnya, maka indikator kinerja kunci yang disajikan mengacu pada indikator yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018 -2023 khususnya pada indikator yang menggambarkan pencapai kinerja tahun 2023, dan untuk indikator yang terkait asumsi capaian 2024 dan target 2025 mengacu pada dokumen RPD Tahun 2024 – 2026, serta indikator yang tertuang dalam permendagri 18 tahun 2020. Adapun capaian indikator kinerja kunci yang telah ditargetkan pencapaiannya dalam Perubaahn RPJMD 2018 – 2023, khusus untuk tahun 2023 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel VII.4.
Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	KESEJATERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	90,84	91,3
2	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka	95,95	94,91
3	Persentase Balita Stunting	%	18,59	27,4
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,99	65,66
5	Persentase penduduk yang bekerja	%	94,84	95,76
6	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	38,03	40,41
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	42,48	54,40
8	Opini BPK	Opini	WTP	
9	Pencapaian skor pola pangan harapan	%	87,1	
10	Penguatan Cadangan pangan (Data Timpang)	%	100	100
11	Pendapatan daerah rawan pangan (Data Timpang)	%	100	100
12	Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	24,29	21,60
13	Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	10,07	1,22
14	Produksi sektor pertanian	Triliun Rp	183,34	
15	Kontribusi sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	1,92	4,12
16	Produksi Sektor Perkebunan	Triliun Rp	14,37	
17	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	93,55	
18	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0,09	5,13
19	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	7,18	8,64
20	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,14	14,49
21	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	15,22	12,85
22	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	8,3	
23	Pertumbuhan PDRB Industri	%	9,73	4,26
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	PENDIDIKAN			
24	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	**%**	62	92,95
25	Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	**%**	93,90	99,95
26	persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	**%**	57,25	60
27	persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	**%**	82	86,86
28	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	**%**	1 : 13	1 : 12
30	Persentase Guru SMK yang bersertifikat	**%**	46,35	46,85
31	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	**%**	100	91,1
32	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	**%**	51,O5	50,57
	KESEHATAN			
33	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	%	100	33,33
34	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	100	88
35	Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	7,5	5,30
36	Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	13	9,9
37	Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah ‘	%	100	86,93
38	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100
39	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100
40	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	100	100
41	Rasio Tenaga Kesehatan persatuan penduduk	%	100	27,86
42	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	**%**	100	77,72

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
43	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	100	100
44	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	%	100	100
45	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	(/100.000 Penduduk)	23	60
46	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	100	100
47	Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	%	100	100
48	Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	%	100	100
49	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	70	72
50	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	23
51	Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	%	100	100
52	Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	%	100	98,76
53	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi	%	100	87
54	Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan	%	100	99,8
55	Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman	%	100	85
56	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%	85	87,5
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
61	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	%	80	67,19
62	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	%	100	100
63	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	100
64	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	%	100	100
65	Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota	%	100	100
66	Persentase warga negara yang memperoleh layanan	%	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota			
67	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	%	100	100
68	Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi	%	16	NA
69	Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitasi	%	100	100
70	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	15	15
71	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	75,09	75,39
72	Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat	%	74,25	74,25
73	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	**%**	80	80
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
74	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	**%**	100	25,39
75	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	**%**	100	100
76	Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	**%**	93	97,36
77	Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	**%**	100	100
78	persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	**%**	100	57,14
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAt			
79	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	100	100
80	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100	100
81	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100
82	Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
83	Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100
84	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	41	
	SOSIAL			
85	Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	%	100	100
86	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan social	%	100	100
87	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	3,7	
88	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti	%	100	100
89	Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	%	100	100
90	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	100	100
91	Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	%	100	100
92	Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100	100
93	Persentase TMP yang dikelola	%	3,7	
	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR			
	TENAGA KERJA			
94	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	100	75
95	Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	100	15
96	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	77,08	**82**
97	Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	85,00	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
98	Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	%	4.35	9,69
99	Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	59.41	62,82
100	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	60.00	67,42
101	Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	47,22	47,34
102	Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	**%**	85.00	87,16
103	Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	**%**	84,00	84,29
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
104	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi %	%	35	58
105	Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	%	75	61
106	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	50,00	60
107	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	%	60	75
108	Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate	%	87	89
109	Persentase kabupaten/Kota Layak Anak	%	83	91,66
110	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	50	60
	PANGAN			
111	Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	**%**	60	0
112	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%):	**%**	Beras 386,08 , Jagung 58, 20 , Kedelai 27,55	Beras 334,94 Jagung 207,72 Kedelai 0,28
113	Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari) Kkal/ Kapita/ hari	Kkal/Kapita/hari	3.929.20	4.616
114	Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari) gr/Kapita/hari	gr/Kapita/hari	174.5	158,19
115	Jumlah Daerah Rawan Pangan	Daerah	19	5
116	Persentase Pengawasan	**%**	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	dan Pembinaan Keamanan Pangan			
	PERTANAHAN			
117	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100
118	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100
119	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP			
120	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100
121	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	%	40,5	7,12
122	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	100	100
123	Cakupan limbah yang dikelola	%	100	100
124	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	26	29,89
125	Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100
126	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	100	100
127	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan	%	5 Penghargaan	111 penghargaan
128	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
129	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	98	68,9
130	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	100	95,52
131	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	40,00	50,12
132	Persentase Pasangan ber akte nikah	%	37	51,04
133	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	90,00	93,92
134	Persentase Kepemilikan	%	47	97,75

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	Akta Kelahiran			
135	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	100	100
136	Persetase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100
137	Persentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
138	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik)	%	100	99,42
139	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,33	5,45
140	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	15	48,75
141	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	0,88	4,3
142	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	%	11.81	3,14
143	Persentase Desa yang diFasilitasi	%	25,05	50,33
144	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	1,57	1,44
145	Persentase Posyandu aktif	%	99,98	97,06
146	Persentase PKK aktif	%	100	100
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
147	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	**%**	45,82	
148	Persentase PUS peserta KB Aktif	**%**	65,5	
149	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	**%**	25	
	PERHUBUNGAN			
150	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	32,40	72
151	Persentase Layanan Angkutan Darat;	%	58	97
152	Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang	605.000	
153	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	30	3,07
154	Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	unit	20	
155	Jumlah Terminal Bis terkelola Terminal	terminal	16	
156	Jumlah arus penumpang	orang	1.105.000	

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	melalui pelabuhan (Prioritas)			
157	Jumlah pelabuhan strategis provinsi Lokasi	pelabuhan	11	11
158	Persentase pelabuhan yang beroperasi	%	35	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
159	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	**%**	100	100
160	Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	**%**	100	100
161	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	poin	3,00	3,09
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
162	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	50	12
163	Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	40	10
164	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	50	20
165	Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	30	20
166	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	40	20
167	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	40	20
168	Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	40	20
169	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	50	10
170	Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	11	11
171	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	3	3
	PENANAMAN MODAL			
172	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan	**%**	100	100
173	Jumlah Realisasi PMA	Rp. Triliun	16,54	4,983
174	Jumlah Realisasi PMDN	Rp. Triliun	20,84	11,468
175	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin	**%**	90	90

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	yang Diterbitkan Sesuai SOP			
176	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	100	100
177	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	100	100
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
178	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	25	40
179	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	2,03	2,33
188	Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	%	200	0,11
189	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	100	75
190	Persentase organisasi pramuka aktif	%	100	100
	STATISTIK			
191	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	100	80
	PERSANDIAN			
192	Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	%	60	69,57
	KEBUDAYAAN			
193	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	4,5	0,34
194	Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	%	9,4	7,5
195	Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi	%	5,6	3,89
196	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	1	0,29
197	Persentase Kunjungan ke musium	%	100	100
	PERPUSTAKAAN			
198	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	orang	250.000	353
199	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	100	100
	KEARSIPAN			
200	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	75,47	92
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN			
	PARIWISATA			
201	Persentase peningkatan	%	1,0	

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan			
202	Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	%	20,8	12,5
203	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	%	100	367,1
204	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	%	100	75,73
205	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	**%**	13	18,75
206	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	**%**	5,45	1,55
207	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	**%**	12	14,92
	PERTANIAN			
208	Jumlah produksi Talas Satoimo	Ton	26.432,55	
209	Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	331	
210	Produktifitas Padi kw/Ha	Kw/Ha	50,43	50,80
211	Produktifitas Jagung kw/Ha	Kw/Ha	55,73	57,54
212	Produtifitas Kopi kg/Ha	Kg/Ha	588,1	503,86
213	Produktifitas Kakao kg/Ha	Kg/ha	39.000	82.527
214	Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	unit	1.655	6.073
215	Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	1.495,55	850.440
216	Produksi Daging	Ton	187.450	143.114
217	Produksi Telur	Ton	214.274	275.595
218	Produksi Susu	Ton	2.159	1.961
219	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp.	465.893.180.426	11.331.727.857.600
220	Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp.	8.000.000.000	10.172.090.000
223	Persentase Penurunan Serangan OPT	%	4,5	24
224	Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	%	81,15	68
226	Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP	angka	0,5	0,5
	KEHUTANAN			
228	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	283	7.240,4
229	Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan M3	Ton	92.336,62	77.201,56
232	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata Jenis	Jenis	2	2
233	Persentase Jumlah	%	16,76	30,67

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan			
234	Jumlah DAS yang direhabilitasi DAS	DAS	2	2
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
238	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	95	93,52
239	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99	99,89
240	Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	%	99,50	100
	PERDAGANGAN			
241	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100	50
242	Persentase Penerbitan SKA	%	100	104,44
243	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100
244	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100	100
245	Nilai Ekspor Perdagangan	$	171.081.215	2.156.183.887
	PERINDUSTRIAN			
248	Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	7	35,44
	TRANSMIGRASI			
251	Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	**%**	100	100
252	Persentase penempatan transmigrasi	**%**	100	100
253	Persentase penempatan transmigrasi	**%**	100	100
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
254	Produksi garam rakyat	**Ton**	48.450	114.959,9
255	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	%	100	61,62
256	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara %	%	67,31	68,09
257	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	9.210,12 M	13.795,6
258	Produksi perikanan tangkap Ton	Ton	413.030,8	504.709
259	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	30,25	22,93
260	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	78,95	89,47
261	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	27,17	38,49

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
262	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp.Milyar	15.958,39	18.313,8
263	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.298.391,1	4.115.586,5
264	Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	100	112,58
265	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	89,85	56,35
267	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp.Milyar	317.28	496,1
268	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi Ton	Ton	5.544,1	6.998,2
269	Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	%	100	97,40
	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
270	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	**%**	100	**100**
271	Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	**%**	100	100
272	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	**%**	100	88,89
273	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	**%**	35,55	49,62
276	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	**%**	100	100
280	Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	**%**	100	100
	SEKRETARIAT DEWAN			
281	Persentase PROLEGDA yang terealisir	**%**	100	73,33
282	Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	**%**	100	100
283	Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	**%**	100	100
	PENUNJANG URUSAN			
	PERENCANAAN			
284	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	**%**	100	100
285	Persentase peningkatan capaian kinerja program	**%**	0,5	0,5
286	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran	**%**	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM			
287	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	%	95	95
288	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	95	95
	PENGADAAN / KEUANGAN			
289	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	%	100	100
290	Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100	100
291	Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100	100
292	Persentase Serapan Belanja Daerah	%	96	93,51
293	Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu	%	100	100
299	Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	%	92	96,63
300	Persentase Tanah Pemprov Yang Sudah Bersertifikat	%	58	66,43
301	Persentasi Peningkatan PAD	%	5	6,5
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
302	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	%	65	65
303	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	%	100	100
304	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	95	95
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
305	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial,	%	100	100

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural			
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
306	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	**%**	3	18,75
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
307	Persentase Pelayanan tamu daerah	**%**	100	83
308	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	**%**	100	0
	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
309	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	**%**	79,50	79,80
310	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	**%**	72,50	75,23
311	Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	**%**	100	100
312	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah 100	**%**	100	100
313	Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	**%**	100	100
314	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	**%**	100	100
	PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
315	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	**%**	20	100
316	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	**%**	82,01	101,67
317	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan	**%**	20	100
318	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	**%**	40	100
319	Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	**%**	100	100
320	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	**%**	10 % (40 kasus)	125

No.	Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI			
321	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Juta	Rp.	384.000	566.224
322	Nilai Tukar Petani Ribu Rp 11.841	Rp	118,41	114,25
323	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	21,09	50,44

Sumber : Perubahan RPJMD 2018 – 2023, BPS, Data Sektoral OPD

Adapun Asumsi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan target capaian Indikator kinerja kunci tahun 2025 didasarkan pada indikator yang termuat dalam Rencana Pembangunan daerah (RPD) tahun 2024 – 2026, indikator selangkapnya tabel berikut.

Tabel VII.5.
Perkiraan Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 – 2025

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
1	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	%	92,65	89,25	91,00	Dinas Pendidikan
2	Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	%	99,97	95,38	96,98	Dinas Pendidikan
3	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	83,68	100	100	Dinas Pendidikan
5	Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	82,73	100	100	Dinas Pendidikan
6	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	%	Na	100	100	Dinas Pendidikan
7	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	73,46	74,61	75,76	Dinas Pendidikan
8	Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	86,26	85	86	Dinas Pendidikan
9	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	%	01:13	01:13	1:13	Dinas Pendidikan
10	Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	52,69	53,39	54,09	Dinas Pendidikan
11	Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	46,85	47,41	47,97	Dinas Pendidikan
12	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	94,13	100	100	Dinas Pendidikan
13	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	45,3	46,45	47,60	Dinas Pendidikan
14	% Rumah Sakit yang Terakreditasi	%	80	85	90	Dinas Kesehatan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
15	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (SPM)	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
17	% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	%	94,3	95	96	Dinas Kesehatan
18	% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	%	82,42	90	90,5	Dinas Kesehatan
19	Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)	%	72,75	75	76	Dinas Kesehatan
20	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	%	96,32	97	98	Dinas Kesehatan
21	Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	Per 100.000/Penduduk	11/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	9,5/100.000 penduduk	Dinas Kesehatan
22	% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular	%	70	90	90	Dinas Kesehatan
23	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Darah Pada Fasilitas Kesehatan	%	79	80	81	UPT Transfusi Darah
24	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	98	85	85	UPT Lab. Kesehatan Daerah
25	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	91,4	100	100	UPT RSK Gigi dan Mulut
26	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	Persen	90	100	100	RSUD Labuang Baji
27	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam	%	90,98	100	100	RS Khusus Daerah

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	kondisi Baik					
28	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	60	61	62	RSUD Haji Makassar
29	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	%	75	76	76,5	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
30	Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
31	Cakupan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	70	65.76	75	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
32	% Pemenuhan SDMK Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	83,94	85	86	Dinas Kesehatan
33	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	100	20	20	UPT Transfusi Darah
34	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknisi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	98	90	90	UPT Lab. Kesehatan Daerah
35	Prosentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	%	99,05	100	100	UPT RSK Gigi dan Mulut
36	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	65	75	85	Labuang Baji
37	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	62,5	70	75	RSUD Haji Makassar
38	Persentase SDM Yang Mengikuti Pelatihan	%	NA	100	100	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
39	Prosentase tenaga kesehatan RSUD yang telah	%	89,19	33	12	Rumah Sakit Umum

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	ditingkatkan kapasitasnya					Daerah Sayang Rakyat
40	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%	95	100	100	Dinas Kesehatan
41	% Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	%	40	50	55	Dinas Kesehatan
42	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	Ha	3.638	6046	6445	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
43	Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	%	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
44	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (SPM)	%	92	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
47	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi	%	50	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
48	Cakupan Pembinaan layanan TPA kewenangan provinsi	%	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
49	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak (SPM)	%	92.2	95	96	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
50	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik kewenangan provinsi	%	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
51	Cakupan Pembinaan layanan drainase kewenangan provinsi	%	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
52	Persentase Bangunan Pamerintah Yang difasilitasi	%	85	90	95	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
53	Persentase fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi	%	77.7	81.2	82,4	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
54	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	71.95	76.00	77,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
55	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	90	91	92	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
56	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	%	86	91.35	92,7	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
57	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
58	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenanangan Provinsi	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
59	Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi	%	25,39	5,18	11,39	Dinas Perumahan, Kawasan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
						Pemukiman, Dan Pertanahan
60	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman	%	100	25.71	31,43	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
61	Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	%	92,35	16.67	38,33	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
62	Persentase Jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	%	na	25,71	31,43	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
63	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
64	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100	100	100	BPBD
65	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100	100	BPBD
66	Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100	100	BPBD
67	Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100	100	BPBD
68	% Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
69	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan	%	100	100	100	Dinas Sosial

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan					
70	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	Dinas Sosial
71	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100	Dinas Sosial
72	Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti	%	100	100	100	Dinas Sosial
73	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
74	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
75	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
76	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
77	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	%	100	100	100	Dinas Sosial
78	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
79	Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	%	100	100	100	Dinas Sosial
80	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro	**%**	66.67	94.00	95,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
81	Prosentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan	**%**	83.33	85.00	87,00	Dinas Tenaga Kerja

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	pekerjaan					dan Transmigrasi
82	Prosentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
83	Prosentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	%	9.49	9.50	9,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
84	Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	63.19	63.30	63,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
85	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	63.38	63.40	63,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
86	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	%	49.43	50.00	52,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
87	Prosentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	62.59	86.00	87,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
88	Meningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	100	100.00	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
89	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi	%	60	65	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
90	Persentase ARG di Tingkat Provinsi	%	37	38	38,5	
91	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	%	25	37,5	38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
						dan KB
92	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	37.50	54.16	58,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
93	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	%	90	95	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
94	Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	%	37.50	54.16	58,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
95	Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate	%	85	88	89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
96	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	87,5	91,66	Dinas Pemberdayaan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
						Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
97	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	37.50	54.16	58,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
98	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Yang Aktif	%	72	75	76	Dinas Ketahanan Pangan
99	Tingkat Ketersediaan Beras (%)	%	367.91	356.57	356,57	Dinas Ketahanan Pangan
100	Tingkat Ketersediaan Jagung (%)	%	55.04	54.61	54,61	Dinas Ketahanan Pangan
101	Tingkat Ketersediaan Kedelai (%)	%	18.23	17.74	17,74	
102	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	(kkal/kapita/hari)	3,593.00	3,543.56	3.543,56	
103	Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)	(gr/kapita/hari)	171.65	127.36	127,36	Dinas Ketahanan Pangan
104	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/tahun)	(kkal/orang/hari)	2 077,92	2,100.00	2.100,00	Dinas Ketahanan Pangan
105	Angka Kecukupan Protein (gr/kapita/tahun)	(gr/orang/hari)	64.18	57.00	57,00	Dinas Ketahanan Pangan
106	Persentase Cadangan Pangan	%	0.014	0.014	0,015	Dinas Ketahanan Pangan
107	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4.82	6.00	5,80	Dinas Ketahanan Pangan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
108	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
109	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	83.1	85.7	87,5	Dinas Ketahanan Pangan
109	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
110	Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
111	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
112	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	60	67	83	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
113	Potensi emisi GRK dari sektor limbah	Ton CO2 e	14135.36	15257.36	16435,36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
114	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	92,85	88,24	94,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
115	Persentase limbah yang dikelola	%	98,64	98,65	98,66	Dinas Lingkungan Hidup dan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
						Kehutanan
116	Rasio Tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	29,6	40	40,43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
117	Prosentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	73,61	33.33	66,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
118	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	87	73.4	86,7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
119	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	65.29	88.23	94,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
120	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
121	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	%	54,48	55	57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
122	Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	99.42	99.45	99,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
123	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99.42	99.45	99,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
124	Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	102.77	100	100	Dinas Kependudukan dan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
						Pencatatan Sipil
125	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	54.29	50	52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
126	Persentase Penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
127	Persentase Bayi ber-Akta Kalahiran	%	97.47	97.60	97,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
128	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah yang dilaporkan	%	39.86	39.90	39,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
129	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan Akta Kelahiran	%	96.51	96.60	96,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
130	Persentase Penerbitan Akta Cerai yang dilaporkan	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
131	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	96.51	96.60	96,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
132	Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
133	Prosentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
						Pencatatan Sipil
134	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,45	13,23	14,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
135	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	48,75	7,28	5,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
136	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	4,3	1,32	2,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
137	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Di Fasilitasi	%	45,01	17,21	22,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
138	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Difasilitasi dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	1,44	1,61	1,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
139	Prosentase Posyandu Aktif;	%	99,91	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
140	Prosentase PKK Aktif	%	99	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
141	Persentase BUM Desa Yang Difasilitasi	%	3,14	2,64	3,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
142	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di	%	25	25,5	30	Dinas Pemberdayaan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	Kampung KB					Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
143	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	64.94	65,35	65,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
144	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	25	25,5	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
145	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	30.8	33.78	35,37	Dinas Perhubungan
146	Prosentase Layanan Angkutan Darat;	%	97	97	97	Dinas Perhubungan
147	Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B Pertahun	Jiwa	500,981	628,431	688.548	Dinas Perhubungan
148	Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	60	63.65	65,45	Dinas Perhubungan
149	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan		0.108	0.31	0,328	Dinas Perhubungan
150	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Jiwa	1,418,985	1,779,975	1.950.252,98	Dinas Perhubungan
151	Jumlah pelabuhan Pengumpan yang beroperasi	Unit	11	11	11	Dinas Perhubungan
152	Jumlah Dokumen Rencana Perkeretaapian Provinsi	Dokumen	1	1	1	Dinas Perhubungan
153	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Nilai	-	40	45	Dinas Komunikasi

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	Informasi Publik					dan Informatika, Statistik dan Persandian
154	Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi	%	44	50	55	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
155	Persentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Jaringan Internet Intra Pemerintah Pemerintah Sulawesi Selatan	%	41	44	45	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
156	Prosentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	12	12	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
157	Prosentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
158	Prosentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
159	Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
160	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
161	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian	%	20	20	20	Dinas Koperasi,

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	Kesehatan Koperasi					Usaha Kecil dan Menengah
162	Prosentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
163	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
164	Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
165	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	%	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
166	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	3	3	3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
167	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor	%	85	87	90	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
168	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	6.73	6.8	7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
169	Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	7.52	7.75	8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
170	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	80	92	93	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
171	Prosentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	55	57	59	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
172	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	85	87	88	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
173	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,24	0,5	1,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
174	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	3,81	4,5	5,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
175	Peningkatan Prestasi olah raga	%	3,17	0,4	0,11	
176	Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	30	45	75	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
177	Persentasi organisasi pramuka aktif	%	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
178	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	80	90	92	Dinas Komunikasi dan Infomatika, Statistik dan Menengah
179	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Nilai	2.08	2.59	2,75	Dinas Komunikasi dan Infomatika, Statistik dan Menengah
180	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	0.34	1,28	1,92	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
181	Prosentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	%	7.69	7	7,5	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
182	Prosentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi.	%	3.89	4	4,5	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
183	Prosentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0.29	0.2	0,4	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
184	Prosentase Kunjungan ke musium	%	615.99	100	100	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
185	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	Orang	228,583	300	400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
186	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
187	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	79.49	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
188	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	Na	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
189	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip tepat waktu	%	Na	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
190	Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	569,269.53	816,593.22	822.559,65	Dinas Kelautan dan Perikanan
191	Jumlah produksi garam rakyat	Ton	3.387,78	5.000	6.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
192	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	%	18	20	20	Dinas Kelautan dan Perikanan
193	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp.	11.813.500.000	11.933.560.000	11.960.232.411	Dinas Kelautan dan Perikanan
194	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	436.735,72	442.959,60	451.818,70	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
195	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	27,39	29	30	Dinas Kelautan dan Perikanan
196	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	29.43	30.62	31,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
197	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	68.42	84.21	89,47	Dinas Kelautan dan Perikanan
198	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp.	21,712,560,000	21,850,160,000	22.187.160.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
199	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	4,095,934.66	4,331,299.7	4.417.925,7	Dinas Kelautan dan Perikanan
200	Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	78.51	85	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
201	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	94,01	97,80	99,7	Dinas Kelautan dan Perikanan
202	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	Rp.	355,500,000	391,940,000	411.540.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
203	Produksi olahan ikan	Ton	5,911.60	6,150.43	6.273,44	Dinas Kelautan dan Perikanan
204	Persentase pengujian mutu produk perikanan	%	69.05%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
205	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0.62	0.62	0,62	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
206	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Kunjungan	7,590,063	7,875,000	8.275.000	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
207	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	70.997	102.500	115.000	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
208	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang	%	18.75	18.75	18,75	Dinas Kebudayaan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	dikembangkan					dan Kepariwisataan
209	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	1.55	2	3	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
210	Prosentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	14.92	10	15	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
211	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	3,53	2	2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
212	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-5,22	2	2	
213	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-6,9	2	2	
214	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp	154,730,214,500	56,290,226,087	56.301.484.133	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
215	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%	-2.03	1.16	1,18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
216	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	%	-6.98	2.12	2,16	
217	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	%	0.54	2.73	2.81	
218	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah	%	-0.23	2.23	2,30	
219	Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap luasan lahan pertanian	Poin	0,0073	0,0076	0,0080	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
220	Nilai Produksi Hasil Ternak (Juta)	Rp	9,689,799	10,248,954	10.664.347	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
221	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	%	89.21	10	10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
222	Persentase luas serangan OPT yang tertangani terhadap luas serangan OPT (%)	%	Na	80	84	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
223	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	Na	50	55	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
224	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	Na	20	20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
225	Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	%	Na	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
226	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	%	13.97	21.15	28.23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
227	Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	%	11.85	11,91	11,97	
228	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	%	0.030	0.029	0,028	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
229	Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	%	3.28	3.57	3,63	
230	Jumlah laporan tumbuhan dan satwa liar yang tidak	Laporan	1	1	1	Dinas Lingkungan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata					Hidup dan Kehutanan
231	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH	%	belum dilakukan pengukuran	1.75	2,60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
232	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif	%	16.67	20.83	25,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
233	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	%	80	85	90	Dinas ESDM
234	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	%	na	10	12	Dinas ESDM
235	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Energi (Ton CO2 eq)	%	na	1,3	1,4	Dinas ESDM
236	Persentase Rumah Tangga berListrik	%	98,89	100	100	Dinas ESDM
237	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
238	Prosentase Penerbitan SKA	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
239	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
240	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
241	Nilai Ekspor Perdagangan	$ US	2.358.936.319	1.967.433.973	2.350.936.319	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
242	Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	sertifikasi mutu produk					
243	Prosentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	%	na	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
244	Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	35%	7.5%	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
245	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	2,1	2,5	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
246	Prosentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	2,2	4	4,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
247	Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
248	Prosentase penempatan transmigrasi	%	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
249	Prosentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	%	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
250	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	100	100	100	Biro Organisasi
251	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang Difasilitasi, Dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
252	% Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimamfaatkan	%	88,89	99,2	99,3	Biro Kesejahteraan Rakyat
253	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	%	45,94	46,3	46,35	
254	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dan dievaluasi	%	100	100	100	Biro Hukum
255	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
256	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	%	85	100	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
257	Prosentase capaian program prioritas pembangunan daerah	%	87	100	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
258	Presentase Kesesuaian rencana dengan pengadaan barang/ jasa	%	100	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
259	Presentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang / jasa	%	98,66	100	100	
260	% Prolegda yang terealisasi	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
261	% Jumlah Program Kerja DPRD yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
262	Jumlah Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya	Ranperda	15	15	15	Sekretariat DPRD
263	% Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD	%	97	100	100	Bappelitbangda
264	% Konsistensi Program RKPD terhadap APBD	%	100	100	100	
265	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah	%	90,03	91	92	
266	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N	%	100	100	100	
267	Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM	%	100	100	100	
268	Persentase Kesesuaian Indikator dan target	%	100	100	100	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang ekonomi dan SDA Tahun N					
269	Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA	%	100	100	100	
270	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang Infrastruktur dan kewilayahan Tahun N	%	100	100	100	
271	Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	100	
	KEUANGAN					
272	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
273	Evaluasi Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
274	Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
275	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
276	Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah Dalam	%		100	100	BKAD

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
	Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu					
277	Perencanaan Kebutuhan BMD Ditetapkan Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
278	Capaian Penetapan Status Penggunaan BMD Sesuai Ketentuan	%		100	100	BKAD
279	Cakupan Barang Milik Daerah Yang Dimanfaatkan	%		100	100	BKAD
280	Persentase Tanah Pemerintah Provinsi Yang Telah Bersertifikat	%		100	100	BKAD
281	persentasi keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100	100	100	Bapenda
282	Persentasi Peningkatan PAD	%	100	100	100	Bapenda
283	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	%	63	65	65,3	BKD
284	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	%	90	85	86	BKD
285	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	93	93	94	BKD
286	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50	50	50	BPSDM
287	Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50	50	50	BPSDM
288	Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	%	100	100	100	BPSDM
289	Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	Jumlah	5 Sertifikat	6 Sertifikat	6 serifikat	BPSDM
290	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.	%	Belum dilakukan pengukuran	30	40	Bappelitbangda

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
291	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi	%	11,32	13	15	Bappelitbangda
292	Presentase Pelayanan Badan Penghubung Daerah	%	65	86	87	Badan Penghubung Daerah
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
293	% Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	76,29	81	82	Inspektorat Daerah
294	% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	69	74	75	
295	% OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
296	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
297	Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
298	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
299	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa	%	20	80	80	Kesbangpol
300	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat	%	na	80	85	Kesbangpol
301	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas	%	na	100	100	Kesbangpol

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD Penanggung Jawab
302	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	na	100	100	Kesbangpol
303	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda	%	na	100	100	Kesbangpol
	PENUNJANG URUSAN					
304	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	Nilai	99,92	100,42	100,92	Semua OPD
305	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	Nilai	75,42	86,96	87,11	
306	Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	%	72,29	79,32	83,18	
307	Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	-27,35	10,2	12,13	

Sumber : RPD 2024 - 2026

7.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan menjadi hak pelayanan minimal dari setiap warga negara. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi urusan pemerintahan wajib sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengupayakan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada termasuk pembelanjaan anggaran daerah dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dan sebagau usaha pemerintah untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomer 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPD 2024-2026 dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), dan satuan harga. RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas progam dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN. Sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VII.6.
Penetapan Target Indikator SPM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Permendagri No 59 Tahun 2021)

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDIDIKAN**					
1.1	**Pendidikan Menengah**					
1	warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	83,68	86,2	100	100
2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
1.2	**Pendidikan Khusus**					
3	warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	82,73	84,94	100	100
4	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
2	**KESEHATAN**					
2.1	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi**					
5	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
2.2	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi**					
4	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM**					
3.1	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota**					
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota**					

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**					
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi**					
7	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi**					
8	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	30	100	100
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**					
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi**					
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**					
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti**					
10	**Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti**	100	7,4	100	100	100
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti**					
11	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	100	15,22	17,30	100	100
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti**					
12	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100	100	100	100	100
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti**					

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7
13	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100	100	100	100	100
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi**					
14	Jumlah Warga Negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	100	100	100	100

Sumber : OPD Pengelola SPM Prov. Sulsel, Tahun 2023, diolah

7.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global untuk untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development Goals (SDGs). dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi,pembangunan lingkungan hidup, dan governance.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Selatan telah disusun hingga tahun 2023, sehingga target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk Tingkat provinsi belum ditetapkan untuk tahun 2024 dan tahun 2025. Adapun capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Selatan serta target nasional tahun 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel VII.7.
Capaian Pembangunan Berlanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Selatan 2023 dan Sasaran Nasional Tahun 2024

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan				
	1.2	Pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, Perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskiman disemua dimensi, sesuai definisi nasional	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompoh umur	8,70	Menurunnya Tingkat kemiskinan menjadi 6,0 – 7,0 %
	1.4.	Pada Tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khusunya masyarakat miskin dan rentan memiliki hal yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan serta sumber daya alam, tehnologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses pelayanan dasar	a. Akses layanan air minum :46,39% (2022); b. Akses layanan sanitasi dasar :92,24% (2022); c. Akses fasilitas kebersihan dasar : 87,22%(2022)	Meningkatkan akses air minum layak menjadi 100%, tahun dasar 2020 :90,21%; Meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%, tahun dasar 2020 : 79,53%
			Proporsi penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki ha katas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	a. Persentase rumah tangga dengan rumah milik sendiri : 87,68%; b. Persentase rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak : 2,20%	

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan				
	2.1	Pada Tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khusunya orang miskin dan meraka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun	Prevelensi kecukupan konsumsi pangan	10,79% (2022)	Menurunnya prevelensi ketidakcukupan pangan menjadi 5% Tahun dasar 2020 :8,34%
					Menurunnya prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat menjadi 4% Tahun dasar 2020 :5,12%
	2.2	Pada Tahun 2030 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja Perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula	Prevelensi kekurangan gizi	Prevelensi balita stunting :27,20% (2022);	Menurunnya prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita menjadi 14%, tahun dasar 2019 :27,7%
				Prevelensi balita wasted :8,30 (2022)	Menurunnya prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita menjadi 7%, tahun dasar 2019 :7,4%
			Prevelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	3,78% (2022)	Meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) menjadi 95,2. Tahun dasar 2020 :86,3
			Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimun di bawah 1400 kkal/kapita/hari	9 % (2019)	
			Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	2,7% (2022)	

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
			berdasarkan tipe		
			Prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	75,88% (2022)	
	2.3.	Pada Tahun 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya Perempuan, masyarkat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	79.717.835 (2022)	Meningkatnya nilai tambah per tenaga kerja pertanian menjadi Rp.59,9 juta/tenaga kerja/tahun, tahun dasar 2020 :Rp.55,33 juta/tenaga kerja
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia				
	3.1.	Pada Tahun 2030 mengurangi resiko angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran	Proporsi Perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang proses melahirkan ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih	98,94%	Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183. Tahun dasar 2015 :305
			Persentase Perempuan pernah kawin 15 – 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitasi kesehatan	96,01	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitasi pelayanan Kesehatan menjadi 95%, tahun dasar 2020 :87,91%
	3.2.	Pada tahun 2030 mengahiri kematian bayi baru lahir dan Balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per1000 kelahiran hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% immunisasi dasar lengkap pada bayi	87,90 (2019)	Menurunkan angka kematian bayi per 1000 KH (kelahiran hidup) menjadi 16, Tahun dasar 2017 : 24

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
	3.3.	Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkolosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Kejadian malaria per 1000 orang	0,10 (2019)	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria menjadi 405. Tahun dasar 2020 :312
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	21 (2021)	
	3.7	Mencapai cakupan Kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan Kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang	Unmeet need pelayanan kesehatan	4,22 (2021)	Meningkatkan cakupan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan Kesehatan nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah menjadi 112,9 juta penduduk. Tahun dasar 2020 :96,6 juta penduduk
			Cakupan jaminan kesehatan nasional	a. BPJS Kesehatan non penerima bantuan iuran (Non-PBI):22,57 (2021); b. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) : 52,61 (2021)	
	3.8	Memperkuat pelaksanaan the framework convention on tobacco control WHO di seluruh negara sebagai Langkah yang tepat	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 Tahun	29,04 (2022)	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018 :9,1%
	3.9	Mendukung Penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang The trips Agreement and public healt, yang menegaskan hak negara	Proporsi fasilitas Kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	95,20 (2022)	Meningkatnya persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menjadi 96%.Tahun dasar 2020 :92,12%

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
		berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dari hak kekayaan intelektual terlait keleluasaan untuk melindungi Kesehatan Masyarakat dan khusunya menyediakan akses obat bagi semua.			
4	Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkat kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua				
	4.1	Pada Tahun 2030 menjamin bahwa semua anak Perempuan dan laki-laki menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat	106,65	Meningkatnya tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD/sederajat menjadi sebesar 98,94%, SMP/sederajat menjadi sebesar 93,33% dan SMA/sederajat menjadi sebesar 71,71%
			Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat	87,15	
			Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	88,04	
			Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun	8,95 (2021)	
	4.2	Pada Tahun 2030 menjamin bahwa semua anak Perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan dasar	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan anak usia dini (PAUD)	30,56 (2022)	Meningkatnya persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan anak usia dini menjadi 72,77%. Tahun dasar 2020 :62,48%
	4.3	Pada Tahun 2030 menjamin akses yang sama bagi semua Perempuan dan laki-laki terhadap Pendidikan tehnik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan	Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan tinggi (PT)	42,63 (2022)	Meningkatnya Angka 1 Bidang PartisiPasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (P't) menjadi 32,28o/o. Tahun dasar 2020: 30,85%

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
		berkualitas			
	4.4.	Pada tahun 2030 meningkatkan secara significant jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan tehnik dan kejuruan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	a. 15 – 24 tahun : 94,81 (2022) b. 15 – 59 tahun :73,16 (2022)	Meningkatnya pemanfaatan Tehnologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.
	4.5	Pada tahun 2030 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat Pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi Masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, Masyarakat penduduk asli dan ank dalam kondisi rentan	Rasio angka partisipasi murni (APM) Perempuan/Laki-Laki di SMA/SMK/MA/Sederajat dan rasio angka partisipasi kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki	a. Laki-laki :60,27 b. Perempuan : 60,88 c. Laki-Laki dan Perempuan :60,57	Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk 20 % Termiskin dan 20% Terkaya untuk tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat menjadi sebesar 0,83 dan tingkat Pendidikan Tinggi menjadi sebesar 0,32. Tahun dasar 2O20: SMA/Sederajat sebesar O,77; dan Pendidikan Tinggi sebesar 0,28
	4.6	Pada tahun 2020 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun Perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 Tahun	93,83	Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan literasi/keaksaraan di semua jenjang.
			Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 24 Tahun	99,87	
			Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 29 Tahun	97,39	
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan				
	5.3	Menghapus semua praktek berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan	Proporsi Perempuan umur 20 – 24 tahun yang kawin atau hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	9,33 (2022)	Menurunnya persentase perempuan turrr:ur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 8,74o/o. Tahun dasar 202O: 10,35%
	5.5	Menjamin Partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi Perempuan untuk	Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen daerah	25,88 (2021)	Mingkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%,DPRD Provinsi menjadi

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
		memimpin disemua Tingkat pengambilan Keputusan			2O%, darr DPRD Kabupaten/Kota menjadi l7%. Tahun dasar Hasil Pemilu 2O19 untuk DPR RI: 20,52% DPRD Provinsi: 17,53%, dan DPRD Kabupaten / Kota: 1 5,7 2 %
			Proporsi Perempuan yang berada pada wilayah managerial	32,14 (2021)	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tahun dasar 2020: 7 5,57%
	5.7	Meningkatkan penggunaan tehnologi yang memampukan, khuusnya tehnologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telopon genggam	69,83	Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam menjadi 7 5,7%. Tahun dasar 2020: 57,48%
6.	Menjamin ketersediann serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua				
	6.1	Pada Tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Persentase rumah yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	92,12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 3O,45o/ol dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%o. Tahun dasar 2020: 9O,21% untuk akses air minum layak. 20,690/o untuk akses air minum perpipaan, dan 1 1,97o untuk akses air minum aman
	6.2.	Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktek buang air besar ditempat sembarang, memberi perhatian khsuus pada kebutuhan kaum Perempuan serta kelompok masyarakat rentan	Proporsi polulasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	87,22 (2022)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman. Tahun dasar 202O: 79,53% untuk laYak termasuk 7 ,64% untuk aman
			Persentase rumah tangga yang	92,24 (2022)	Persentase rumah tangga yang masih

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
			memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar O%. Tahun dasar 2020: 6,19%
	6.3.	Pada tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separoh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan Kembali barang daur ulang yang aman secara global	Kualitas air permukaan sebagai air baku	52,38 (2020)	Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2079: 52,65
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua				
	7.1.	Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern	Rasio elektrifikasi	99,99	Meningkatnya rasio elektrifikasi mendekati 100% Tahun dasar 2020: 99,2%
			Rasio penggunaan gas rumah tangga	93,53	Tercapainya jaringan gas 4 juta sambungan rumah tangga. Tahun dasar 2O2O: 673.226 SR
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua				
	8.1.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestic bruto pertahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	4,11 (2022)	Meningkatnya Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan menjadi USD5.810-6.0OO per kapita. Tahun dasar, 2O2O; USD3.870
			PDRB perkapita atas dasar harga berlaku	65,59 juta rupiah (2022)	
			PDRB perkapita atas dasar harga konstan	39,12 juta rupiah (2022)	
	8.2	Mencapai Tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui deversifikasi, peningkatan dan inovasi tehnologi termasuk focus pada peningkatan	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB ril per orang bekerja	0,43 (2022)	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7- 4,5%. Tahun dasar 2020: - 1,84

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
		nilai tambah tinggi dan sektor padat karya	pertahun		
	8.3	Menggalakkan kebijakan Pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	46,27 (2021)	Akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 3O,8%. Tahun dasar 2020: 24,39%
			Persentase tenaga kerja formal	37,23	
			Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	91,61 (2021)	
	8.5.	Pada Tahun 2030 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua Perempuan dan laki-laki termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama lainnya	Upah rata-rata perjam pekerja (rupiah/jam)	17.257 (2022)	Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam rentang 3,64,3%. Tahun dasar 2O2O: 7 ,O7%
			Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	4,33	
			Tingkat setengah pengangguran	7,09	
	8.6	Pada tahun 2030, secara subtansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh Pendidikan atau pelatihan	Persentase usia muda (15 – 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	22,61	Meningkatnya kualitas pemuda
	8.9.	Pada Tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia menurut provinsi asal	9.858.971 (2021)	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 320-335 juta perjalanan. Tahun dasar 2O2O: 198,24 juta
9.	Membangun infrfastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif yang berkelanjutan serta mendorong inovasi				
	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas andal, berkelanjutan dan Tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk	Jumlah transfortasi dan barang berdasarkan moda transfortasi : a. Perkembangan Penumpang	846,52	Meningkatnya jumlah bandara sebanyak 21 unit. Tahun dasar 2019: 15

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
		mendukung Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan focus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	domestic angkutan udara b. Perkembangan penumpang internasional angkutan udara	31,76	
			c. Perkembangan penunpang angkutan laut	70,82	Meningkatnya jumlah lokasi pelabuhan penyeberangan sebanyak 36 unit. Tahun dasar 2019: 24
			d. Perkembangan barang perdagangan dalam negeri	1,030	
	9.7	Secara sifnifikan meningkatkan akses terhadap terhadap tehnologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang ditahun 2020	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	69,33	Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani mobile broadband menjadi 10O%. Tahun dasar 202O: 97,5%
			Proporsi individu yang menggunakan internet	69,95	
10.	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara				
	10.1	Pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada Tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Koefisien Gini	0,377	Menurunnya koefisien gini menjadi O,37 6-0 37 a. Tahun dasar September 2020: 0,385
			Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	8,70	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,07%. Tahun dasar September 2020
			Jumlah desa tertinggal	109 (2021)	Menurunnya Desa Tertinggal menjadi 9.152 desa. Tahun dasar 2019: 19.152
			Jumlah desa mandiri	17 (2021)	Meningkatnya Desa Mandiri menjadi 6.444 desa. Tahun dasar 2019: I .444
	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktek yang diskriminatif	Indeks kebebasan sipil	83,39 (2022)	Meningkatnya skor indeks demokrasi Indonesia variabel kebebasan menjadi 84,0.

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
		dan mempromosikan legislasi kebijakan dan Tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut			
11.	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan				
	11.1.	Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman terjangkau termasuk penataan Kawasan kumuh serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	69,9 (2022)	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%. Tahun dasar 2O19: 56,51%
	11.2.	Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap system transfortasi yang aman, terjangkau, mudah akses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transfortasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua	Proporsi pupolasi yang medapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	66,45 (2020)	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019: 1 kota
			Persentase penduduk terlayani transfortasi umum	7,83	
	11.6.	Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusu pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah perkotaan	Indeks kualitas udara	90,35	Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,50. Tahun dasar 2019: 86,57
	11.7.	Pada tahun 2030 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk Perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kerasan dalam 12 bulan terakhir	0,04 (2020)	

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
13.	Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya				
	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam disemua negara	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana	0	Rata-rata korban akibat bencana hidrometeoroiogi di daerah rawan bencana maksimal sebesar O,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya
16	Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan yang berkelanjutan menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembangaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkat				
	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 tahun terakhir Sulawesi Selatan	0,04 (2021)	Meningkatnya proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian menjadi >60%. Tahun dasar 20 19: 53,32%
	16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di Tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lau yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik	32,00 (2021	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi sebesar 81% dan 80%. Tahun dasar 2020: 89% dari: 77%
	16.7	Menjamin pengambilan Keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representative di setiap tingkatan	Indeks Lembaga demokrasi Sulawesi Selatan	69,66 (2022)	Meningkatnya persentase keterwakilan perempuan di DPR RI: 22,52%, DPRD Provinsi:20%, DPRD Kabupaten/Kota: 17% Tahun Dasar Hasil Pemilu 2O19 untuk DPR RI: 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53% dan DPRD Kabupaten/Kota: 15,72%
	16.9	Pada tahun 2030, Memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Persentase anak umur 0 – 4 tahun yang memiliki akte kelahiran	78,30% (2021)	Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
					oleh lembaga pencatatan sipil menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 77,20%
			Persentase anak berumur 0 – 17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran	78,31% (2021)	Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 88,11%
			Persentase anak berumur 0 – 17 tahun yang memiliki akta kelahiran	91,47 (2021)	
17	Menguatkan saran pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan yang berkelanjutan				
	17.18	Mengoperasionalkan secara penuh baik tehnologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas tehnologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan tehnologi yang memampukan, khususnya tehnologi informasi dan komunikasi	Proporsi individu yang menggunakan internet	66,95	Meningkatnya persentase pengguna intemet menjadi 82,30%. Tahun dasar 2O19: 73,70%
	17.18	Pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil untuk meningkatkan secara signifikan ketresediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	Perentase konsumen badan pusat statistic (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90,16	Meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data
			Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistic BPS sebagai rujukan utama	98,80	Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia

No	Tujuan/Target		Indikator	Capaian Provinsi 2023	Sasaran Nasional 2024
	17.19	Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan Pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestic bruto yang mendukung pengembangan kapasitas statiatik dinegara berkembang	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data Badan Pusat statistik	90,20	Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas
			Persentase konsumen yang menggunakan data badan pusat statistic dalam perencanaan dan evaluasi Pembangunan nasional	100	

Sumber : Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan 2023 (BPS) dan Lampiran Perpres Nomor: 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BAB VIII
PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMN 2025-2029, RPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana pinjaman dan hibah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan;
4. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah, Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2025 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil- hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

8.2. Kesimpulan

1. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2025.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijkan pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RPJMD Prov. Sulsel untuk Tahun 2025 yaitu : “pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter“ sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing

PJ. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Rappelitbangda
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ᨕᨘᨀᨘᨑᨗᨊ ᨕᨘᨔᨗᨑᨗᨅᨗ ᨅᨘᨄᨗᨑᨗᨅᨗ ᨀᨚᨔᨊ

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN